PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2024 *tentang*

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025

2025

surabaya.go.id

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

43. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

46. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100);

47. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

48. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

49. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);

50. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);

52. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

4. Walikota adalah Walikota Surabaya.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kota Surabaya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);

b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2025 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2025 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

(1) PD melaksanakan evaluasi serta membuat laporan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai berikut:

a. laporan setiap bulan, meliputi indikator kinerja dan kelompok sasaran pada level kegiatan dan sub kegiatan;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. laporan setiap triwulan dan tahunan, meliputi indikator kinerja dan kelompok sasaran pada level tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui aplikasi *e-planning* paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya bulan dan triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan terhadap usulan kegiatan dan anggaran yang diajukan oleh PD untuk tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan evaluasi serta membuat laporan evaluasi setiap triwulan dan tahunan terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan menggunakan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

(3) Laporan evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

Pasal 7

(1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta kegiatan dan sub kegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas dan sasaran pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar xv

BAB I PENDAHULUAN *I-1*
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-10
1.4 Maksud dan Tujuan I-11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II–1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II–21
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II–47
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II–178
2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) II–193
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-195
2.2.1 Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II–195
2.2.2 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II–196
2.2.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan II–197
2.2.4 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II–197
2.2.5 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II–197
2.2.6 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II–197
2.2.7 Kinerja Unsur Kewilayahan II–198
2.2.8 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum II–198

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-458
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II–458
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II–459

III BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Surabaya III-4
3.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2024 dan 2025 ..... III-21
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-26
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-28
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-51
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-58
3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah III-61

IV BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 5
4.2.1 Isu Strategis 6
4.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Surabaya 12
4.2.3 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 52
4.2.4 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 53
4.2.5 Pembangunan Pengarusutamaan Gender 98
4.2.6 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 99
4.2.7 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 117
4.2.8 Inovasi Pembangunan Tahun 2025 118

V BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Rencana Program V-1
5.2 Kerangka Pendanaan V-230

VI BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH . VI-1

6.1 Indikator Kinerja Utama VI-1
6.2 Indikator Kinerja Kunci.....VI-7

VII BAB VII PENUTUP.....VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan II–7

Tabel II.2 Luasan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2023 ..... II–8

Tabel II.3 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–14

Tabel II.4 Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 .... II–14

Tabel II.5 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–15

Tabel II.6 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan II–16

Tabel II.7 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2023 ..... II–17

Tabel II.8 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama II–18

Tabel II.9 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023 ..... II–19

Tabel II.10 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023 ..... II–20

Tabel II.11 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023 ..... II–21

Tabel II.12 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 – 2023 (dalam persen) II–22

Tabel II.13 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rp)..... II–24

Tabel II.14 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rp) II–25

Tabel II.15 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) ... II–26

Tabel II.16 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–28

Tabel II.17 Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–30

Tabel II.18 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–31

Tabel II.19 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–32

Tabel II.20 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–33

Tabel II.21 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–33

Tabel II.22 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 – 2023 II–33

Tabel II.23 Pengeluaran per Kapita disesuaikan di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–35

Tabel II.24 Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2019 – 2022 ..... II–36

Tabel II.25 Perkembangan AMH Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–37

Tabel II.26 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–38

Tabel II.27 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–38

Tabel II.28 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–39

Tabel II.29 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–39

Tabel II.30 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2019 – 2023..... II–40

Tabel II.31 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023... II–42

Tabel II.32 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–42

Tabel II.33 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–42

Tabel II.34 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023II–44

Tabel II.35 TPT Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 – 2023 II–45

Tabel II.36 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–45

Tabel II.37 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2023..... II–47

Tabel II.38 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2023..... II–67

Tabel II.39 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2023..... II–68

Tabel II.40 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2023..... II–70

Tabel II.41 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2019 – 2023..... II–72

Tabel II.42 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2019 – 2023.... II–73

Tabel II.43 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2019 – 2023..... II–73

Tabel II.44 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2023..... II–74

Tabel II.45 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–76

Tabel II.46 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023..... II–76

Tabel II.47 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023..... II–77

Tabel II.48 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2023..... II–77

Tabel II.49 Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2019 – 2023..... II–78

Tabel II.50 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam Tahun 2019 – 2023..... II–78

Tabel II.51 Daftar Kampung Tangguh Covid-19 Kota Surabaya 2023 ..... II–79

Tabel II.52 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2019 – 2023..... II–81

Tabel II.53 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2019 – 2023 ..... II–81

Tabel II.54 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2019 – 2023 ..... II–81

Tabel II.55 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2019 – 2023..... II–82

Tabel II.56 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023.... II–83

Tabel II.57 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–83

Tabel II.58 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–84

Tabel II.59 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–84

Tabel II.60 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–85

Tabel II.61 Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–86

Tabel II.62 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2019 – 2023 ..... II–87

Tabel II.63 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2023..... II–88

Tabel II.64 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–89

Tabel II.65 Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak Tahun 2019 – 2023 ..... II–90

Tabel II.66 Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2023.... II–91

Tabel II.67 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–92

Tabel II.68 Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2019 – 2023. II–92

Tabel II.69 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Tahun 2019 – 2023..... II–94

Tabel II.70 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–94

Tabel II.71 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa II–95

Tabel II.72 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–98

Tabel II.73 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–98

Tabel II.74 Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis Tahun 2019 – 2023 ..... II–99

Tabel II.75 Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2019 – 2023 ..... II–100

Tabel II.76 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–101

Tabel II.77 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–101

Tabel II.78 Penanganan PPKS Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–102

Tabel II.79 PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–103

Tabel II.80 PSKS Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–103

Tabel II.81 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–105

Tabel II.82 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–105

Tabel II.83 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir II–106

Tabel II.84 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–106

Tabel II.85 Penempatan Kerja Peserta Peningkatan Kompetensi Sesuai Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–107

Tabel II.86 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–107

Tabel II.87 Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–109

Tabel II.88 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2022 ..... II–109

Tabel II.89 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–110

Tabel II.90 KDRT Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–110

Tabel II.91 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–111

Tabel II.92 Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Tahun 2019 – 2023..... II–112

Tabel II.93 Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–112

Tabel II.94 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023. II–113

Tabel II.95 Pola Pangan Harapan Tahun 2019 – 2023 ..... II–113

Tabel II.96 Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–114

Tabel II.97 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2019 – 2023..... II–115

Tabel II.98 Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2019 – 2023..... II–116

Tabel II.99 Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat Tahun 2019 – 2023..... II–117

Tabel II.100 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–117

Tabel II.101 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–118

Tabel II.102 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2019 – 2023II–119

Tabel II.103 Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2022 ..... II–119

Tabel II.104 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2019 – 2023.. II–120

Tabel II.105 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–121

Tabel II.106 Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2019 – 2023..... II–122

Tabel II.107 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019 – 2022 .... II–123

Tabel II.108 Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–124

Tabel II.109 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–126

Tabel II.110 Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2019 – 2023 ..... II–127

Tabel II.111 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2019 – 2023 ..... II–128

Tabel II.112 Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–129

Tabel II.113 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–130

Tabel II.114 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 .... II–131

Tabel II.115 Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–131

Tabel II.116 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–132

Tabel II.117 Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–133

Tabel II.118 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–134

Tabel II.119 Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–134

Tabel II.120 Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–136

Tabel II.121 Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2019 – 2023 ..... II–136

Tabel II.122 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–137

Tabel II.123 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–138

Tabel II.124 Pemasangan Weather Information Display Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–138

Tabel II.125 Operasional Perlintasan Sebidang Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–139

Tabel II.126 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–139

Tabel II.127 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daring Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–140

Tabel II.128 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2019 – 2023..... II–141

Tabel II.129 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023.... II–141

Tabel II.130 Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 II–142

Tabel II.131 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–143

Tabel II.132 Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–143

Tabel II.133 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023. II–144

Tabel II.134 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–145

Tabel II.135 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–146

Tabel II.136 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–147

Tabel II.137 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–149

Tabel II.138 Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Kota Surabaya Tahun 2021 – 2023..... II–150

Tabel II.139 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–151

Tabel II.140 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–152

Tabel II.141 Jumlah Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–153

Tabel II.142 Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–154

Tabel II.143 Jumlah Koleksi dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019 – 2023..... II–155

Tabel II.144 Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2019 – 2023..... II–156

Tabel II.145 Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 . II–157

Tabel II.146 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–159

Tabel II.147 Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2019 – 2023... II–159

Tabel II.148 Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata Tahun 2019 – 2023..... II–161

Tabel II.149 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–161

Tabel II.150 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–162

Tabel II.151 Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2019 – 2023 ..... II–162

Tabel II.152 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–163

Tabel II.153 Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–163

Tabel II.154 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2019 – 2023 ..... II–164

Tabel II.155 Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–164

Tabel II.156 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2019 – 2022 .... II–165

Tabel II.157 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2019 – 2023..... II–166

Tabel II.158 SOP Dievaluasi Tahun 2019 – 2023 ..... II–166

Tabel II.159 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2019 – 2023..... II–166

Tabel II.160 Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2019 – 2022..... II–167

Tabel II.161 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023..... II–168

Tabel II.162 MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2023..... II–169

Tabel II.163 MoU Kerjasama Luar Negeri Tahun 2023 ..... II–169

Tabel II.164 MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2019 – 2023 ..... II–169

Tabel II.165 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–171

Tabel II.166 Penjabaran Program RPJMD Dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–172

Tabel II.167 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2019 – 2023 ..... II–173

Tabel II.168 Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–173

Tabel II.169 Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–174

Tabel II.170 Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2019 – 2023 ..... II–174

Tabel II.171 Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–175

Tabel II.172 Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–175

Tabel II.173 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 ..... II–176

Tabel II.174 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–177

Tabel II.175 Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–177

Tabel II.176 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2019 – 2022 ..... II–178

Tabel II.177 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–178

Tabel II.178 Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan Tahun 2019 – 2023 ..... II–179

Tabel II.179 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–180

Tabel II.180 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023. II–180

Tabel II.181 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–181

Tabel II.182 Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 II–182

Tabel II.183 Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–182

Tabel II.184 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–184

Tabel II.185 Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–184

Tabel II.186 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023.. II–185

Tabel II.187 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023.. II–185

Tabel II.188 Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2019 – 2023..... II–186

Tabel II.189 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–188

Tabel II.190 Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–188

Tabel II.191 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023. II–189

Tabel II.192 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surabaya Tahun 2019-2023 ..... II–189

Tabel II.193 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2019-2023 ..... II–190

Tabel II.194 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–190

Tabel II.195 Tingkat Pengganggguran Terbuka Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023 ..... II–191

Tabel II.196 Tingkat Pengganggguran Terbuka Kota Surabaya Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019-2023 ..... II–191

Tabel II.197 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 ..... II–193

Tabel II.198 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya Tahun 2023 ..... II–194

Tabel II.199 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Akhir Tahun 2023 Kota Surabaya II–199

Tabel III.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2019 s/d Tahun 2023* (dalam juta) III-5

Tabel III.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2019 s/d Tahun 2023* (dalam Juta) III-8

Tabel III.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 s/d Tahun 2023* III-11

Tabel III.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2019 - 2023* III-12

Tabel III.5 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2019 -Tahun 2023 ... III-18

Tabel III.6 Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022 ..... III-19

Tabel III.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya Tahun 2019 - 2023 ..... III-21

Tabel III.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2022 s.d. Tahun 2026 ..... III-39

Tabel III.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Per PD Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2022 s.d. Tahun 2026 ..... III-40

Tabel III.10 Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Surabaya Tahun 2022 s.d. Tahun 2026 ..... III-56

Tabel III.11 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 s.d. Tahun 2026 ..... III-60

Tabel IV.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3

Tabel IV.2 Indeks Risiko Bencana Kota Surabaya 5

Tabel IV.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 14

Tabel IV.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 52

Tabel IV.5 Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 54

Tabel IV.6 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 100

Tabel V.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 ..... V-10

Tabel V.2 Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro V-229

Tabel V.3 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2025 ..... V-229

Tabel VI.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 .....VI-3

Tabel VI.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022-2026.....VI-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Alur Penyusunan RKPD I-11

Gambar II.1 Grafik Curah Hujan Kota Surabaya Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024 ..... II–2

Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya II–4

Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya II–5

Gambar II.4 Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya II–9

Gambar II.5 Peta Sesar Kendeng II–11

Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara II–12

Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya II–12

Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2024 ..... II–13

Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia II–17

Gambar II.10 Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2019 – 2023 ..... II–29

Gambar II.11 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2019 – 2023 ..... II–43

Gambar II.12 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2019–2022 Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024 ..... II–46

Gambar II.13 Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya 2023 ..... II–82

Gambar II.14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan 2023 ..... II–83

Gambar II.15 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2023 . II–86

Gambar II.16 Persentase Atlet Berprestasi II–148

Gambar II.17 Nilai Terhadap Pelayanan dan Kemampuan Petugas TBM/Perpusatakaan dalam Membimbing Bibit Penulis dan Pendongeng II–155

Gambar II.18 Perangkat Smart Water Level II–186

Gambar III.1 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 - Tahun 2023 (persen) III-14

Gambar III.2 Grafik Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2023 ..... III-16

Gambar IV.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2025 .....IV-7

Gambar IV.2 Prioritas Nasional Tahun 2025.....IV-9

Gambar IV.3 Penyelarasan Tema Pembangunan Tahun 2025.....IV-13

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 JULI 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah periode

sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2023, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 serta penelaahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan :

a. Persiapan Penyusunan RKPD;
b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
c. Penyusunan Rancangan RKPD;
d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;
e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
f. Penetapan.

Muatan dalam dokumen RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2024);
48. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
49. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
50. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
53. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD Tahun 2025 bersamaan dengan penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045 sehingga dalam penyusunan RKPD 2025 juga mempertimbangkan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025. Penyusunan Dokumen RKPD tahun 2025 juga mempedomani RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Dokumen RKPD Kota Surabaya 2025 merupakan tahapan akhir penyusunan RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan tindaklanjut hasil fasilitasi dari Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dan disahkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Keraja Perangkat Daerah yang selanjutnya diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya untuk dapat ditetapkan sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Secara substansial, RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 memuat arah kebijakan sekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah pada tahun 2025.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

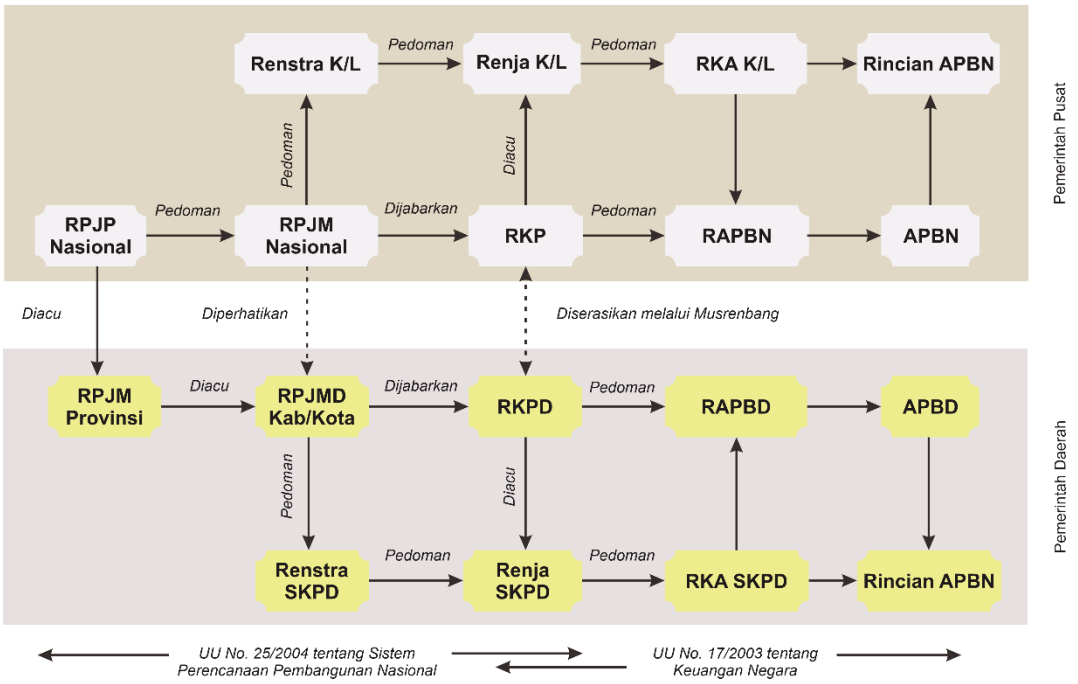

Gambar I.1
Alur Penyusunan RKPD

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjaga konsistensi antara substansi rencana jangka panjang, substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
3. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional;

4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2025;
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-RPPAS) tahun 2025.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, latar belakang penyusunan serta proses penyusunan RKPD Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, provinsi maupun kota.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5 Sistematika

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan BAB serta garis besar isi setiap BAB didalamnya.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yaitu menguraikan hasil evaluasi RKPD tahun 2023, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan dokumen RKPD tahun 2024 sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan mengenai kondisi geografi daerah, kondisi demografi, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya

indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Menjelaskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's dalam bentuk tabel yang disertai dengan penjelasan dan analisis untuk menjelaskan kondisi dan perkembangan pencapaian indikator TPB/SDG's.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan Nasional/Provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat Daerah dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2025, mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d. 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d. 112°54' Bujur Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau bahwa luas wilayah Kota Surabaya seluas 335,925 km^2. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Di tahun 2023, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yakni sebesar 487,1 mm, dengan temperatur berkisar antara 20°C hingga 36°C. Sedangkan untuk data tahun 2024, masih harus menunggu rilis BPS untuk Surabaya Dalam Angka Tahun 2025. Gambar II.1 menunjukkan grafik curah hujan Kota Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

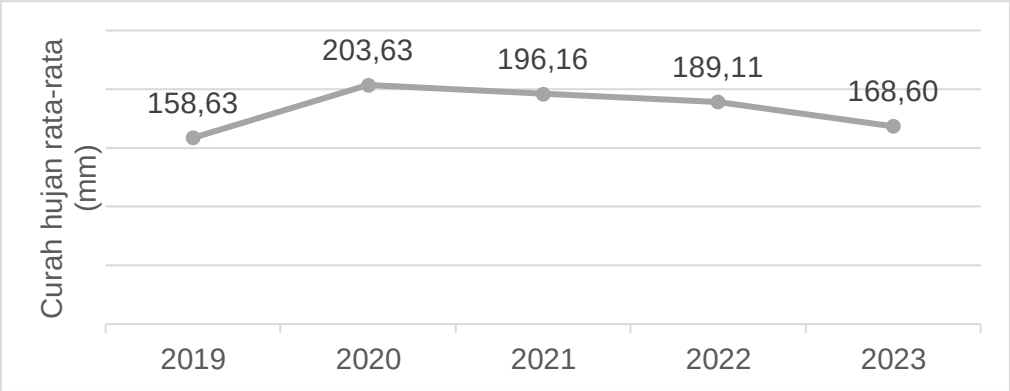

Gambar II.1 Grafik Curah Hujan Kota Surabaya

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan, 153 kelurahan, 1.360 rukun warga (RW) dan 9.149 rukun tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan yang secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal

Multipurpose Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;

4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Suroboyo yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

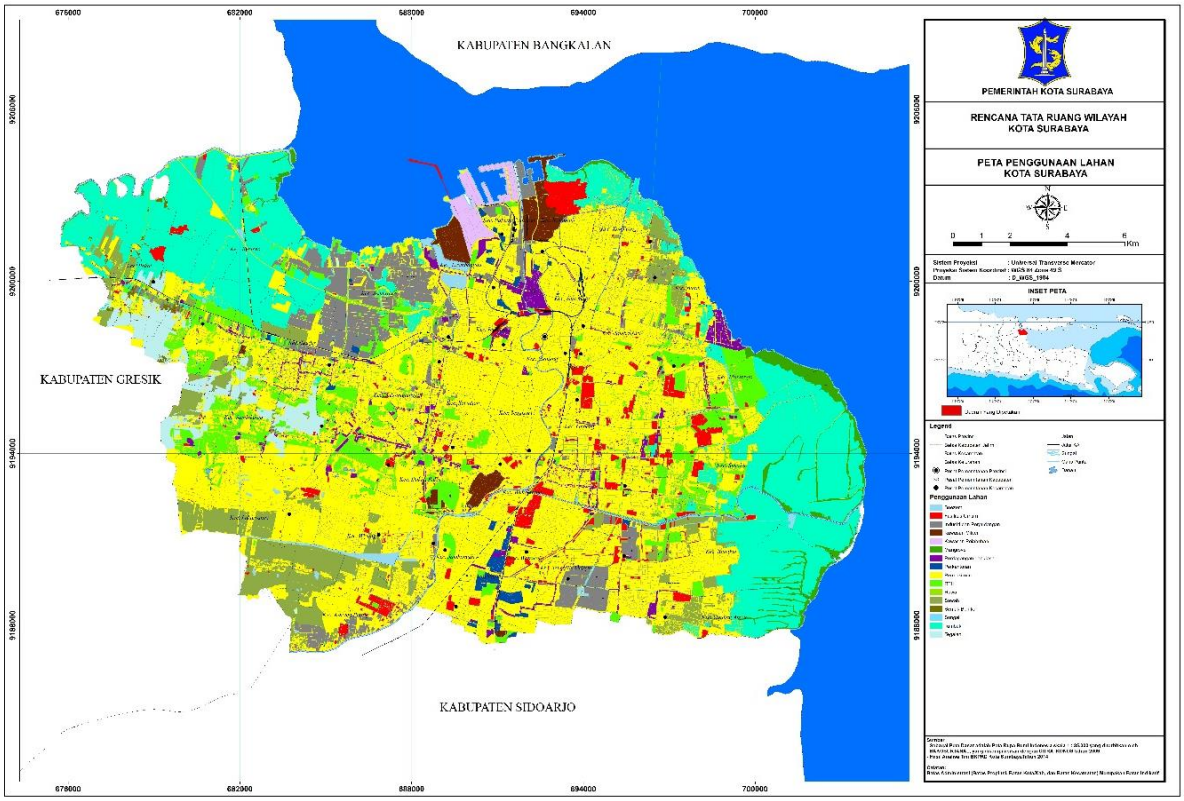

Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Berdasarkan peta penggunaan lahan di atas, permukiman menjadi yang terbesar, yakni sebanyak 48% atau 16.057 hektar. Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang. Gambar II.2 menunjukkan Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya.

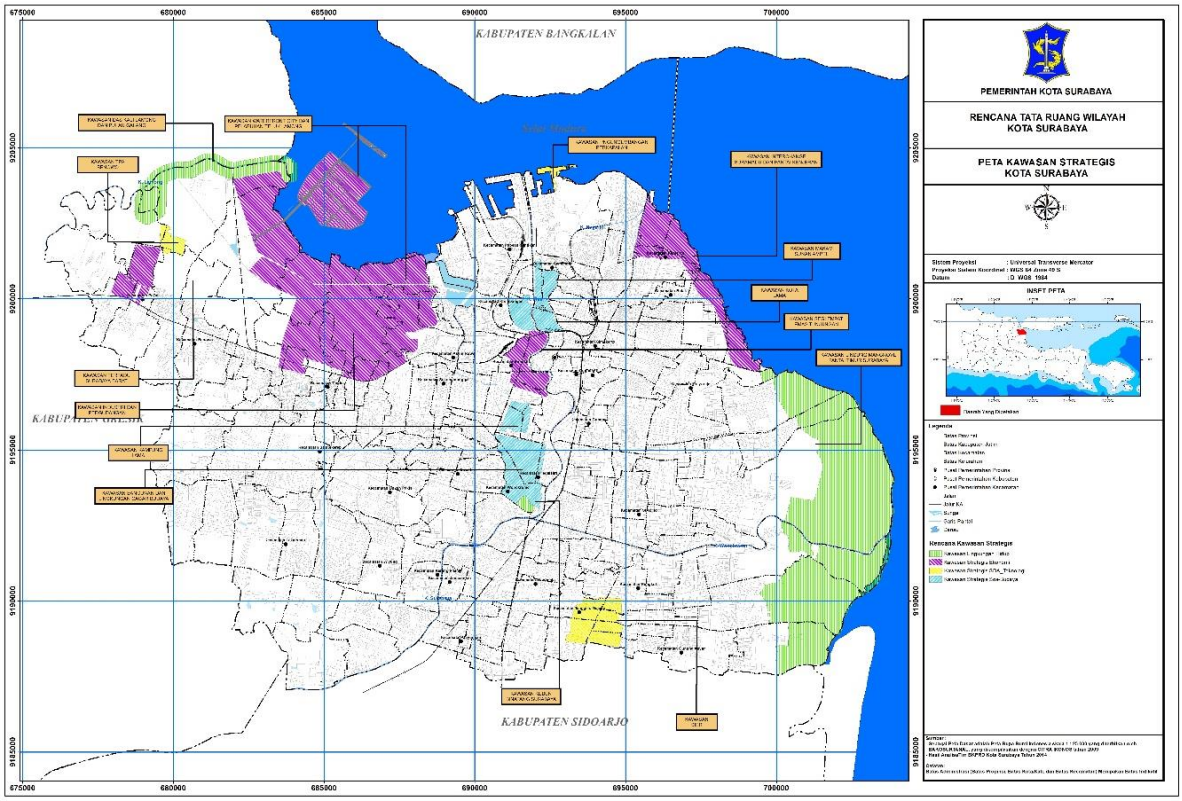

Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, di antaranya adalah :

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun. Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.
- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan. Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970-an dengan

karakteristik *shopping-street* dan *shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak, kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak pada kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyumbang sebesar 33% dari total PDRB Kecamatan Bulak, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 26% dari total PDRB Kecamatan Bulak.
- Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan *mixed-use* pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjang Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangon, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala internasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Tabel II.1
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Genteng	67
2	Krembangan	57
3	Pabean Cantian	28
4	Tegalsari	28
5	Wonokromo	27
6	Bubutan	25
7	Gubeng	11
8	Simokerto	9
9	Semampir	12
10	Sawahan	9
11	Tambaksari	7
12	Lakarsantri	2
13	Gayungan	1
14	Bulak	1
15	Dukuhpakis	1
16	Wonocolo	1
Jumlah		**286**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Kebun Binatang Surabaya (KBS) di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo dengan luas lahan 15,3 Ha yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
- Kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada Tabel II.2. Kondisi instrusi air laut di kawasan mangrove Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini.

Tabel II.2
Luasan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2023

No	Jenis RTH	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kawasan lindung dan pesisir timur	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.570,33
2	Hutan kota	57,55	66,03	66,03	66,03	66,03
Total (Ha)		4.624,95	4.636,36	4.636,36	4.636,36	4.636,36

Sumber: Bappedalitbang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diolah, 2024

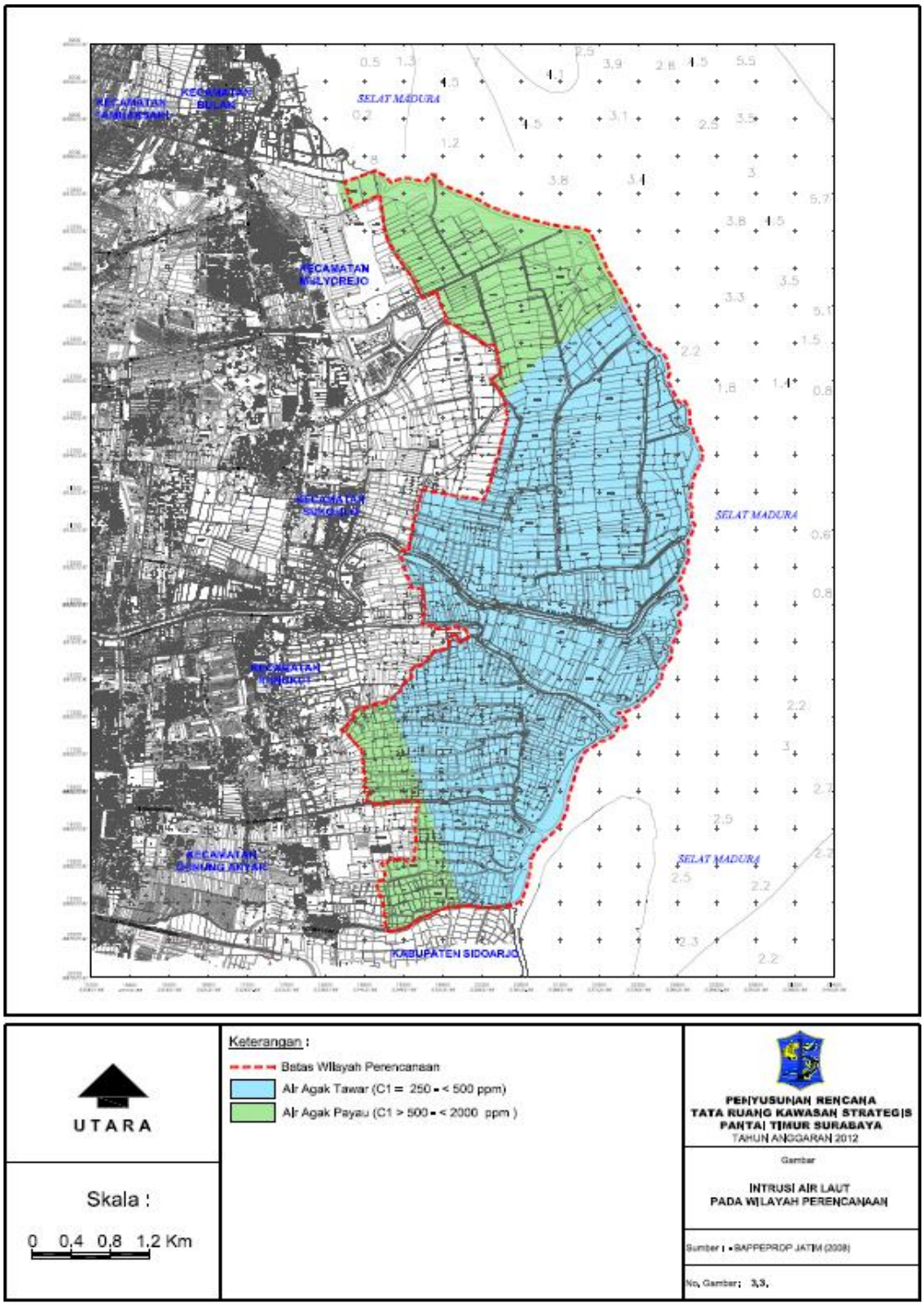

Gambar II.4 Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya

- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada Tabel II.2.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentinganpendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) da-tau teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: *"Waste to Energy".*

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/ Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.

3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga "relatif aman" dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.5.

Gambar II.5
Peta Sesar Kendeng
Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut.

Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara

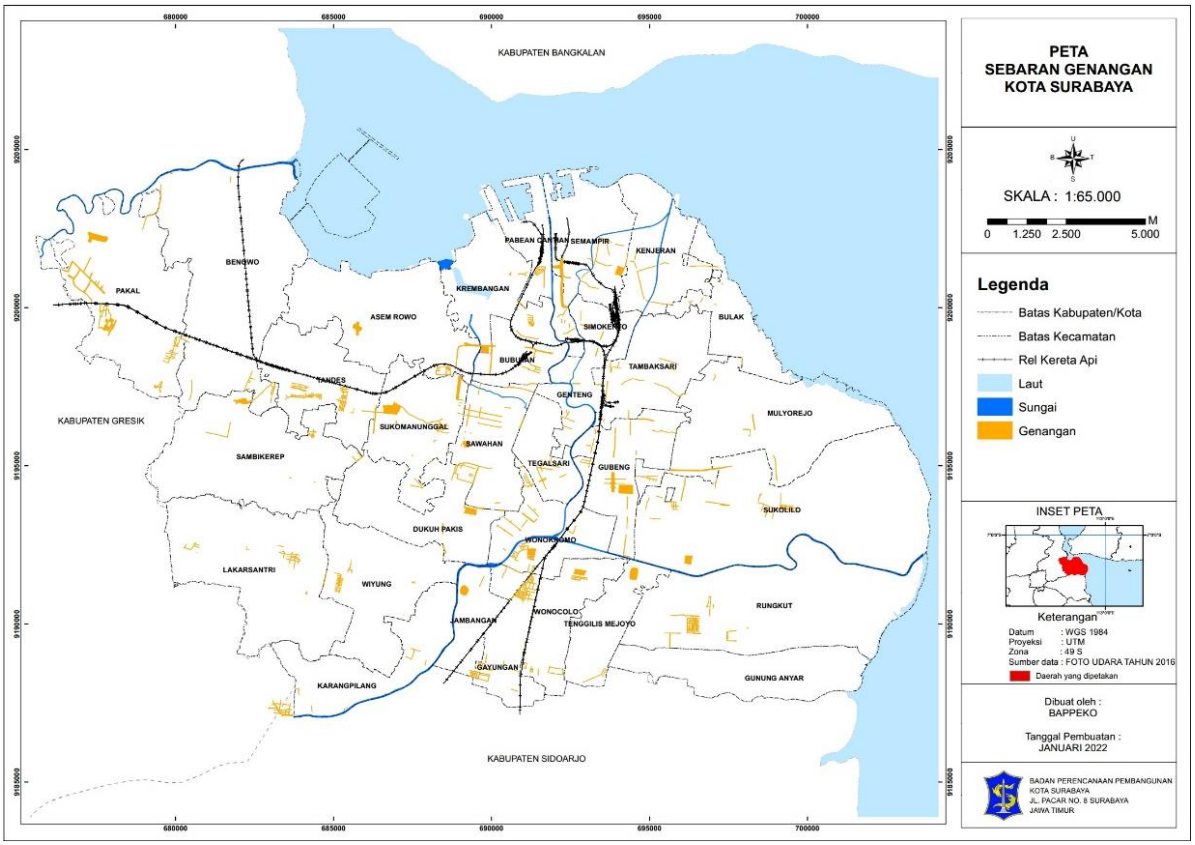

Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi

kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

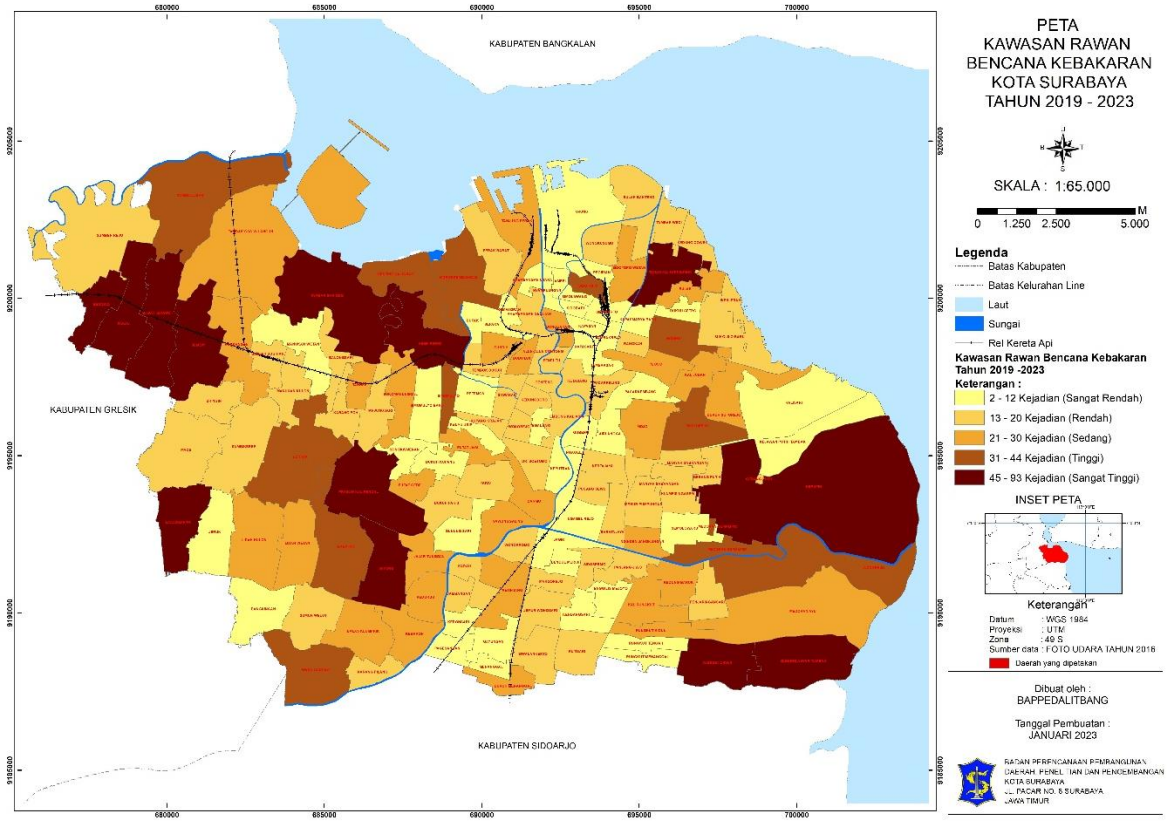

Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2024

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan beberapa strategi dalam pengendalian, pengurangan, serta penanggulangan bencana kebakaran. Salah satu strategi efektif yang dilakukan dalam pengendalian dan pencegahan risiko bencana kebakaran adalah dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Selain itu, dalam rangka mengurangi kejadian bencana kebakaran pada bangunan gedung, perlu dilakukan proteksi terhadap bangunan gedung terutama pada wilayah dengan intensitas pemanfaatan bangunan yang cukup tinggi. Untuk itu, upaya aktif yang

dilakukan adalah dengan melakukan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung, baik milik swasta maupun milik Pemerintah Kota Surabaya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

Tabel II.3
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Banjir/ Pasang Air Laut	0	0	0	0	0
2	Angin Puting Beliung	7	2	4	0	0
3	Kebakaran	515	608	705	589	771
4	Gempa Bumi	0	0	0	0	0
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0	0	0	0	0
6	Cuaca Ekstrim	0	0	0	0	0
7	Kekeringan	0	0	0	0	0
8	Tsunami	0	0	0	0	0
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	0	0	0	0	0
10	Likuifaksi	0	0	0	0	0
11	Kegagalan Teknologi	0	0	0	0	0
Total		**522**	**610**	**709**	**589**	**771**

Sumber: BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bencana gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, likuifaksi, serta kegagalan teknologi sepanjang tahun 2019-2023 belum pernah terjadi di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2019 telah membentuk 154 kelurahan tangguh bencana. Ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di Kota Surabaya, upaya mengantisipasi terjadinya bencana dan mengurangi dampak bencana. Pada tahun 2023, jumlah kelurahan tangguh bencana berkurang disebabkan adanya penggabungan 2 kelurahan menjadi satu. Data kelurahan tangguh bencana tahun 2019 – 2023 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.4
Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	154	154	154	154	153

Sumber: BPBD Kota Surabaya, 2023

Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan mitigasi bencana dengan melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada seluruh elemen masyarakat serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana. Terkait dengan tanggap darurat bencana, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kapasitas Command Center 112 dan menyediakan 7 lokasi posko terpadu dan 34

lokasi pos pantau yang dapat memaksimalkan penanganan kejadian kedaruratan sampai dengan 7 menit, serta melakukan kegiatan pasca bencana dengan memberikan bantuan logistik kepada korban bencana yang membutuhkan.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan tingkat risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi-hazard*) tersebut dengan tingkatan, seperti nilai 1 untuk rendah, 2 untuk sedang, dan 3 untuk tinggi. Berikut adalah kondisi kinerja historis Pemerintah Kota Surabaya melalui IRB selama 5 tahun.

Tabel II.5
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	150,34	150,34	136,36	124,93	113,31

Sumber: BNPB dan BPBD Provinsi Jawa TImur, 2023

Capaian di atas menunjukkan bahwa IRB Kota Surabaya sejak tahun 2019 mengalami tren menurun, hingga tahun 2023 berada di *level* 113,31. Meski demikian, penyelenggaraan urusan kebencanaan pada periode mendatang akan memiliki tantangan yang cukup besar, terdapat potensi bencana akibat perubahan iklim, serta dampak dari pertambahan penduduk yang berpotensi besar menjadi penyebab bencana lingkungan. Di sisi lain permasalahan birokrasi dan tata kelola kebencanaan harus dapat terselesaikan, Perangkat Daerah belum sinkron serta sinergis dalam rangka mendukung ketahanan daerah, peralatan kebencanaan yang sesuai dengan standar masih belum tercukupi, aparatur serta perangkat kebencanaan yang belum merata memiliki kompetensi memadai dalam penanganan kedaruratan. Permasalahan dan tantangan tersebut selanjutnya menjadi isu yang perlu dioptimalkan dengan penyiapan dan penguatan ketangguhan serta ketahanan kota yang berkelanjutan.

2.1.1.3 Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk sangat penting dalam proses pembangunan, karena itu penduduk akan menjadi menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per 31 Desember Tahun 2023 sebesar 3.009.286 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan

ditunjukkan pada Tabel II.6. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Terdapat 7 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km^2 yaitu Kecamatan Bubutan, Kenjeran, Sawahan, Semampir, Simokerto, Tambaksari, dan Tegalsari. Oleh karenanya, program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel II.6
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1	Asem Rowo	15,0083	48.022	3.200	17	Pakal	18,5756	62.715	3.376
2	Benowo	26,6462	73.306	2.751	18	Rungkut	22,9428	121.941	5.315
3	Bubutan	3,9060	97.273	24.904	19	Sambikerep	17,4166	67.943	3.901
4	Bulak	6,2363	47.082	7.550	20	Sawahan	7,1563	199.336	27.855
5	Dukuh Pakis	10,2708	59.532	5.796	21	Semampir	9,0671	182.371	20.113
6	Gayungan	5,9121	43.999	7.442	22	Simokerto	2,6300	92.683	35.241
7	Genteng	4,0919	58.742	14.356	23	Sukolilo	30,1774	115.099	3.814
8	Gubeng	7,9291	133.804	16.875	24	Sukomanunggal	9,4023	104.786	11.145
9	Gunung Anyar	10,1527	61.565	6.064	25	Tambaksari	8,9657	226.995	25.318
10	Jambangan	4,1191	54.200	13.158	26	Tandes	9,9805	91.922	9.210
11	Karang Pilang	9,3896	75.572	8.048	27	Tegalsari	4,3334	98.317	22.688
12	Kenjeran	8,5193	181.300	21.281	28	Tenggilis Mejoyo	5,8085	58.990	10.156
13	Krembangan	8,6046	115.320	13.402	29	Wiyung	12,3170	75.382	6.120
14	Lakarsantri	18,6939	64.062	3.427	30	Wonocolo	6,5445	79.986	12.222
15	Mulyorejo	17,3741	87.556	5.039	31	Wonokromo	8,2768	154.995	18.726
16	Pabean Cantian	5,4765	74.490	13.602	**Total**		**335,925**	**3.009.286**	**8.958**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024, diolah

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin, meliputi 1.518.928 jiwa atau 50,47% penduduk perempuan dan 1.490.358 jiwa atau 49,53% penduduk laki-laki. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, atau lebih dikenal sebagai piramida penduduk, dapat dilihat pada Gambar II.9.

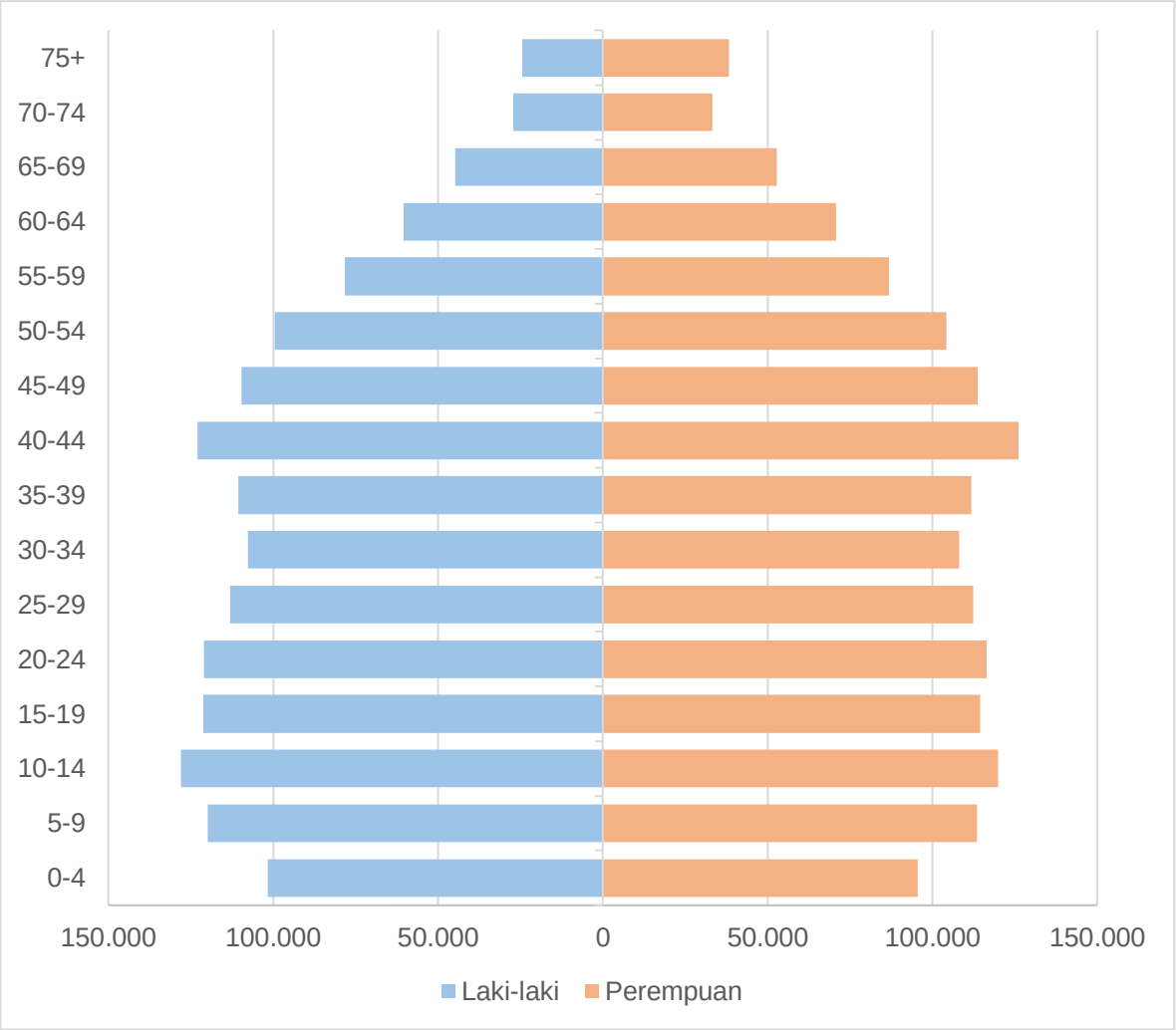

Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2023 yaitu usia 3-6 tahun sebanyak 180.354 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 292.229 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 147.594 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 139.165 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.7
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2023

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	3.433	5.044	2.546	2.408
2	Benowo	4.479	7.459	3.832	3.610
3	Bubutan	5.750	9.257	4.708	4.536
4	Bulak	3.066	4.771	2.461	2.360
5	Dukuh Pakis	3.400	5.694	2.786	2.655
6	Gayungan	2.470	4.135	2.144	2.020
7	Genteng	3.229	5.420	2.802	2.749

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
8	Gubeng	7.166	11.826	6.120	5.942
9	Gunung Anyar	3.755	6.105	2.965	2.703
10	Jambangan	3.309	5.466	2.682	2.537
11	Karangpilang	4.472	7.162	3.479	3.511
12	Kenjeran	12.782	19.316	9.541	8.703
13	Krembangan	7.109	11.449	5.799	5.290
14	Lakarsantri	3.942	6.255	3.223	3.065
15	Mulyorejo	4.911	8.022	4.012	3.961
16	Pabean Cantian	4.658	7.175	3.749	3.491
17	Pakal	3.898	6.188	3.142	3.046
18	Rungkut	7.209	11.899	5.761	5.424
19	Sambikerep	4.092	6.587	3.311	3.150
20	Sawahan	11.090	18.843	9.696	9.213
21	Semampir	12.631	19.730	9.801	8.847
22	Simokerto	5.641	9.113	4.485	4.162
23	Sukolilo	6.863	11.056	5.505	5.178
24	Sukomanunggal	6.218	10.201	4.963	4.716
25	Tambaksari	12.970	21.477	10.984	10.098
26	Tandes	5.314	9.158	4.775	4.446
27	Tegalsari	5.509	9.241	4.722	4.319
28	Tenggilis Mejoyo	3.506	5.520	2.828	2.652
29	Wiyung	4.286	7.060	3.469	3.502
30	Wonocolo	4.763	7.595	3.891	3.683
31	Wonokromo	8.433	14.005	7.412	7.188
Jumlah		**180.354**	**292.229**	**147.594**	**139.165**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024, diolah

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada tabel di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada tabel berikut.

Tabel II.8
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

Agama	2019	2020	2021	2022	2023
1. Islam	85,51%	85,70%	85,83%	85,99%	86,05%
2. Kristen	8,89%	8,75%	8,68%	8,59%	8,56%
3. Katholik	3,91%	3,90%	3,87%	3,83%	3,83%
4. Budha	1,42%	1,40%	1,37%	1,34%	1,32%
5. Hindu	0,24%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
6. Konghuchu	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Tabel di atas menunjukkan, bahwa pada tahun 2023, Kota Surabaya masih didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 86,05% sedangkan sisanya sebesar 13,95% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 81 jenis pekerjaan, yang paling banyak adalah Karyawan swasta, sebesar 56,13 persen. Posisi kedua ditempati oleh penduduk dengan status Mengurus rumah tangga yakni sebesar 14,09 persen, dan di posisi ketiga adalah Wiraswasta sebesar 11,79 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.9
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Karyawan Swasta	567.576	56,12990
2	Mengurus Rumah Tangga	142.536	14,09596
3	Wiraswasta	119.205	11,78867
4	Pelajar Mahasiswa	42.222	4,17551
5	Belum/Tidak Bekerja	36.636	3,62308
6	Pegawai Negeri Sipil	24.137	2,38701
7	Pensiunan	15.216	1,50477
8	Tentara Nasional Indonesia	9.977	0,98667
9	Guru	9.937	0,98271
10	Pedagang	5.877	0,58120
11	Buruh Harian Lepas	4.481	0,44314
12	Karyawan BUMN	4.261	0,42139
13	Kepolisian RI	3.840	0,37975
14	Dosen	3.769	0,37273
15	Dokter	3.118	0,30835
16	Petani Pekebun	2.356	0,23299
17	Perdagangan	2.055	0,20323
18	Sopir	1.850	0,18295
19	Karyawan Honorer	1.420	0,14043
20	Tukang Batu	1.322	0,13074
21	Nelayan/Perikanan	1.012	0,10008
22	Perawat	779	0,07704
23	Karyawan BUMD	450	0,04450

No	Pekerjaan	Jumlah	%
24	Pendeta	400	0,03956
25	Mekanik	379	0,03748
26	Tukang Jahit	329	0,03254
27	Industri	328	0,03244
28	Pelaut	323	0,03194
29	Pembantu Rumah Tangga	298	0,02947
30	Tukang Kayu	259	0,02561
31	Buruh Tani/Perkebunan	255	0,02522
32	Transportasi	247	0,02443
33	Konstruksi	234	0,02314
34	Pengacara	223	0,02205
35	Wartawan	189	0,01869
36	Tukang Las/Pandai Besi	146	0,01444
37	Biarawati	142	0,01404
38	Seniman	129	0,01276
39	Konsultan	127	0,01256
40	Notaris	121	0,01197
41	Bidan	119	0,01177
42	Tukang Listrik	114	0,01127
43	Apoteker	104	0,01028
44	Arsitek	94	0,00930
45	Buruh Nelayan Perikanan	82	0,00811
46	Ustadz Mubaligh	58	0,00574

No	Pekerjaan	Jumlah	%
47	Juru Masak	56	0,00554
48	Tukang Sol Sepatu	49	0,00485
49	Tukang Cukur	40	0,00396
50	Peneliti	31	0,00307
51	Penata Rias	30	0,00297
52	Penata Rambut	27	0,00267
53	Akuntan	26	0,00257
54	Pastor	26	0,00257
55	Peternak	25	0,00247
56	Psikiater Psikolog	20	0,00198
57	Pilot	16	0,00158
58	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	13	0,00129
59	Imam Masjid	13	0,00129
60	Tabib	10	0,00099
61	Buruh Peternakan	9	0,00089
62	Anggota DPRD Provinsi	8	0,00079
63	Penterjemah	7	0,00069
64	Penyiar Radio	7	0,00069
65	Penata Busana	6	0,00059
66	Perancang Busana	5	0,00049
67	Perangkat Desa	5	0,00049
68	Tukang Gigi	4	0,00040
69	Anggota DPR RI	4	0,00040
70	Pialang	3	0,00030
71	Penyiar Televisi	2	0,00020
72	Paraji	2	0,00020
73	Anggota Kabinet Kementerian	2	0,00020
74	Paranormal	2	0,00020
75	Promotor Acara	2	0,00020
76	Gubernur	2	0,00020
77	Kepala Desa	2	0,00020
78	Walikota	1	0,00010
79	Wakil Walikota	1	0,00010
80	Wakil Bupati	1	0,00010
81	Lainnya	1.994	0,19719

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada tabel di bawah ini. Penduduk Kota Surabaya paling banyak (28,33 persen), merupakan penduduk yang tidak/belum sekolah. Posisi kedua adalah penduduk lulusan SMA sederajat sebesar 27,07 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SD sederajat sebanyak 13,45 persen.

Tabel II.10
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
Tidak/Belum Sekolah	852.636	28,33
Belum Tamat SD/setara	211.367	7,02
Tamat SD/setara	404.803	13,45
SMP/setara	347.677	11,55
SMA/setara	814.649	27,07
D1/D2	16.669	0,55
D3/Sarjana Muda	41.118	1,37
D4/S1	297.446	9,88
S2	21.304	0,71
S3	1.617	0,05
Total	**3.009.286**	**100,00**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.10. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2023, terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali pada kategori pertambangan dan penggalian. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tinggi hingga 2 digit pada masa akhir pandemi ini di antaranya kategori transportasi dan pergudangan; serta pengadaan listrik dan gas.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertambangan dan penggalian; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta kategori real estate. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pertambangan dan penggalian. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun ini dikarenakan semakin terbatasnya lahan pertambangan dan penggalian yang ada di Surabaya.

Tabel II.11
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,90	-4,90	1,11	3,46	0,51
B	Pertambangan dan Penggalian	0,09	-6,34	0,08	-1,98	-6,54
C	Industri Pengolahan	5,43	-1,15	3,90	6,55	3,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,41	-6,25	6,10	8,03	30,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,92	4,02	5,63	2,13	2,41
F	Konstruksi	5,45	-5,39	4,38	6,40	5,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,89	-8,57	7,37	6,95	5,48
H	Transportasi dan Pergudangan	7,62	-4,98	2,05	14,14	11,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	-10,87	2,08	8,48	7,84
J	Informasi dan Komunikasi	7,49	7,19	6,00	3,14	6,76

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023*
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	0,23	0,49	1,68	4,05
L	Real Estate	6,09	2,00	1,63	4,07	2,42
M,N	Jasa Perusahaan	6,84	-7,11	1,97	5,75	8,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,64	-2,33	-0,12	0,16	0,06
P	Jasa Pendidikan	6,66	2,75	0,59	0,08	4,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,64	8,75	5,17	1,62	3,97
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,94	-16,30	2,76	13,26	9,28
PDRB		**6,10**	**-4,85**	**4,29**	**6,51**	**5,70**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di angka -4,85 persen. Namun seiring dengan melandainya jumlah kasus penularan yang terjadi di Surabaya Raya, dan didukung oleh kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kembalinya perekonomian masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, hal tersebut dapat membantu menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di normal yang baru dengan inovasi berupa pemanfaatan teknologi informasi, di antaranya *online marketplace* seperti ePeken.

Secara keseluruhan laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya bergerak positif sehingga pada tahun 2022 tercapai pada angka 6,51%. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya tercapai pada angka 5,70% yang mengindikasikan bahwa ekonomi di Kota Surabaya tetap mengalami pertumbuhan namun lebih rendah dari target sebesar 5,90%. Kendati pertumbuhan diproyeksikan bergerak positif, upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan utamanya pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

Berdasarkan data rilis BPS, perekonomian nasional dan provinsi pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dan terlepas dari kontraksi sebagaimana terjadi di tahun 2020 yang lalu. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2023 di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional sedikit mengalami penurunan. Data selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.12
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2019 – 2023 (dalam persen)

Pertumbuhan Ekonomi	2019	2020	2021	2022	2023*
Surabaya	6,09	-4,85	4,29	6,51	5,70
Jawa Timur	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95
Nasional	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,05

*Sumber data: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2024. *) data sementara*

2.1.2.1.1.1PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010, mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tabels* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2023, sebesar Rp715.294.707,23 juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022, sebesar Rp655.616.221,58 juta. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2023 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp201.432.925,47 juta atau sebesar 28,16%. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp135.434.984,12 juta atau sebesar 18,93% sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya, seperti yang dapat dilihat pada Tabel II.13.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp434.268.341,12 juta meningkat menjadi sebesar Rp459.030.719,58 juta di tahun 2023. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2023 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp128.814.587,77 juta diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp87.392.236,59 juta serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp66.946.110,99 juta seperti dapat dilihat pada Tabel II.14 berikut.

Tabel II.13
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	928.398,16	0,16	889.331,91	0,16	917.595,42	0,16	982.815,39	0,15	1.026.186,70	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	33.531,33	0,01	31.943,8	0,01	32.761,34	0,01	33.392,98	0,01	32.513,35	0,00
C	Industri Pengolahan	109.245.937,20	18,81	107.416.294,34	19,37	113.544.581,14	19,24	126.030.898,75	19,22	135.434.984,12	18,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.362.300,29	0,41	2.237.615,57	0,40	2.417.167,25	0,41	2.742.046,30	0,42	3.728.710,22	0,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	791.147,83	0,14	824.951,94	0,15	872.320,90	0,15	932.750,33	0,14	968.113,96	0,14
F	Konstruksi	54.649.310,30	9,41	51.969.408,77	9,37	55.273.538,87	9,36	61.408.502,94	9,37	64.940.579,25	9,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	161.141.233,33	27,75	149.246.755,05	26,92	163.509.913,19	27,70	184.610.467,40	28,16	201.432.925,47	28,16
H	Transportasi dan Pergudangan	31.240.415,60	5,38	29.794.090,41	5,37	30.520.260,56	5,17	36.260.418,47	5,53	42.834.312,86	5,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95.537.038,24	16,45	85.618.582,64	15,44	91.418.079,71	15,49	102.248.698,97	15,60	114.627.560,20	16,03
J	Informasi dan Komunikasi	30.770.585,80	5,30	33.247.669,54	6,00	35.273.340,84	5,98	36.541.720,23	5,57	39.290.062,52	5,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.413.339,89	5,06	29.183.377,44	5,26	30.560.741,63	5,18	33.950.422,52	5,18	35.852.303,70	5,01
L	Real Estate	14.947.568,30	2,57	15.354.350,85	2,77	15.790.323,11	2,68	16.599.139,83	2,53	17.213.531,88	2,41
M,N	Jasa Perusahaan	14.930.184,77	2,57	14.116.912,06	2,55	14.543.157,97	2,46	15.772.593,51	2,41	17.530.932,18	2,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.154.990,77	1,40	8.238.304,23	1,49	8.310.975,30	1,41	8.486.026,22	1,29	8.533.021,21	1,19
P	Jasa Pendidikan	14.007.607,77	2,41	14.540.365,94	2,62	14.682.371,72	2,49	14.866.084,13	2,27	15.784.480,73	2,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.443.228,45	0,77	4.880.587,79	0,88	5.220.638,17	0,88	5.508.115,81	0,84	5.958.216,19	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.159.192,66	1,40	6.918.915,11	1,25	7.340.199,70	1,24	8.642.127,81	1,32	10.106.272,69	1,41
Produk Domestik Regional Bruto		**580.756.010,69**	**100**	**554.509.457,38**	**100**	**590.227.966,81**	**100**	**655.616.221,58**	**100**	**715.294.707,23**	**100**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Tabel II.14
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	576.221,53	0,14	547.994,9	0,14	554.054,70	0,14	573.236,82	0,13	1.026.186,70	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	20.782,09	0,01	19.464,04	0,00	19.479,80	0,00	19.094,55	0,01	32.513,35	0,00
C	Industri Pengolahan	77.312.368,81	18,81	76.384.521,77	19,54	79.366.597,60	19,47	84.567.579,11	19,47	135.434.984,12	18,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.546.272,08	0,38	1.449.668,99	0,37	1.538.145,90	0,38	1.661.665,76	0,38	3.728.710,22	0,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	605.979,60	0,15	630.336,37	0,16	665.833,70	0,16	680.003,79	0,16	968.113,96	0,14
F	Konstruksi	40.576.452,62	9,87	38.387.739,29	9,82	40.070.071,60	9,83	42.633.575,68	9,82	64.940.579,25	9,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	116.343.590,22	28,31	106.340.867,71	27,20	114.183.332,30	28,00	122.122.627,45	28,12	201.432.925,47	28,16
H	Transportasi dan Pergudangan	20.497.977,43	4,99	19.477.422,82	4,98	19.875.912,40	4,87	22.684.941,35	5,22	42.834.312,86	5,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.898.688,76	15,30	56.053.239,21	14,34	57.221.633,10	14,03	62.076.385,35	14,29	114.627.560,20	16,03
J	Informasi dan Komunikasi	27.531.903,71	6,70	29.511.280,46	7,55	31.281.790,20	7,67	32.264.418,48	7,43	39.290.062,52	5,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.187.832,54	4,67	19.231.210,98	4,92	19.324.709,70	4,74	19.648.801,34	4,52	35.852.303,70	5,01
L	Real Estate	10.784.959,46	2,62	11.000.304,15	2,81	11.179.684,10	2,74	11.634.820,68	2,68	17.213.531,88	2,41
M,N	Jasa Perusahaan	9.474.538,92	2,31	8.801.216,28	2,25	8.974.255,50	2,20	9.490.093,03	2,19	17.530.932,18	2,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.867.861,44	1,18	4.754.525,35	1,22	4.748.920,20	1,16	4.756.347,15	1,10	8.533.021,21	1,19
P	Jasa Pendidikan	9.668.100,19	2,35	9.934.443,75	2,54	9.993.043,00	2,45	10.001.195,71	2,30	15.784.480,73	2,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.254.593,89	0,79	3.539.299,11	0,91	3.722.145,30	0,91	3.782.452,79	0,87	5.958.216,19	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.821.770,58	1,42	4.872.889,81	1,25	5.007.190,10	1,23	5.671.102,07	1,31	10.106.272,69	1,41
Produk Domestik Regional Bruto		**410.969.893,87**	**100**	**390.936.424,98**	**100**	**407.726.799,20**	**100**	**434.268.341,12**	**100**	**715.294.707,23**	**100**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Tabel II.15
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Uraian	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,16	0,14	0,16	0,14	0,16	0,14	0,15	0,13	0,14	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	18,81	18,81	19,37	19,54	19,24	19,47	19,22	19,47	18,93	19,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,41	0,38	0,40	0,37	0,41	0,38	0,42	0,38	0,52	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,16	0,14	0,16	0,14	0,15
F	Konstruksi	9,41	9,87	9,37	9,82	9,36	9,83	9,37	9,82	9,08	9,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,75	28,31	26,92	27,20	27,70	28,00	28,16	28,12	28,16	28,06
H	Transportasi dan Pergudangan	5,38	4,99	5,37	4,98	5,17	4,87	5,53	5,22	5,99	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,45	15,30	15,44	14,34	15,49	14,03	15,60	14,29	16,03	14,58
J	Informasi dan Komunikasi	5,30	6,70	6,00	7,55	5,98	7,67	5,57	7,43	5,49	7,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,06	4,67	5,26	4,92	5,18	4,74	5,18	4,52	5,01	4,45
L	Real Estate	2,57	2,62	2,77	2,81	2,68	2,74	2,53	2,68	2,41	2,60
M,N	Jasa Perusahaan	2,57	2,31	2,55	2,25	2,46	2,20	2,41	2,19	2,45	2,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,40	1,18	1,49	1,22	1,41	1,16	1,29	1,10	1,19	1,04
P	Jasa Pendidikan	2,41	2,35	2,62	2,54	2,49	2,45	2,27	2,30	2,21	2,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,79	0,88	0,91	0,88	0,91	0,84	0,87	0,83	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,40	1,42	1,25	1,25	1,24	1,23	1,32	1,31	1,41	1,35
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta makanan minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Di samping itu, daya dukung seperti padatnya jumlah penduduk Kota Surabaya disertai tingginya tingkat konsumsi membuat Kota Surabaya memiliki nilai tambah lebih besar bagi pelaku pasar.

Selama tahun 2019-2023 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 26-28 persen setiap tahunnya. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut menjadikan kategori industri pengolahan sebagai kategori lapangan usaha paling dominan kedua dengan nilai kontribusi 18-19 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 14-16 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.1.2 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan

gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2019 – 2023.

Tabel II.16
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022*	2023**
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (Milyar Rp)	580.488,53	554.509,46	590.227,97	655.616,22	715.294,71
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	200,43	193,01	204,92	227,08	245,72
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (Milyar Rp)	410.879,31	390.936,42	407.726,80	434.268,34	459.030,72
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	141,87	136,07	141,56	150,41	157,69
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (ribu orang)	2.897	2.873	2.880	2.887	2.911

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Pada tabel di atas, PDRB per kapita Kota Surabaya, dapat dilihat bahwa ADHB dan ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya, meski mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini karena dampak adanya pandemi Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.2 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2023, sampai dengan bulan Desember, tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 3,03% (*year-on-year*). Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama di tahun 2022 sebesar 6,59% sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

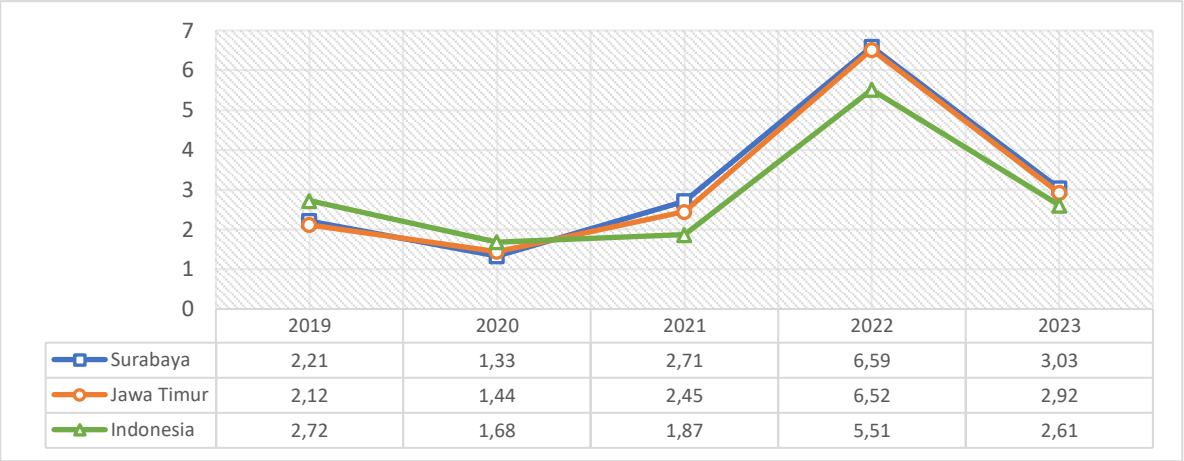

	2019	2020	2021	2022	2023
Surabaya	2,21	1,33	2,71	6,59	3,03
Jawa Timur	2,12	1,44	2,45	6,52	2,92
Indonesia	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Gambar II.10
Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2019 – 2023
Sumber: BPS Kota Surabaya, Januari 2024

Bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Timur dan Nasional, Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana terangkum dalam grafik di atas. Sejak tahun 2021, rata-rata inflasi Kota Surabaya cenderung lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional maupun provinsi, tingginya nilai inflasi tersebut berpotensi melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kota Surabaya.

Peningkatan inflasi tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa peningkatan inflasi global akibat meningkatnya harga komoditas global yang selanjutnya kemudian berdampak terhadap harga-harga produk dalam negeri. Namun pada tahun 2023, angka tersebut berhasil dikendalikan, salah satunya karena upaya Pemerintah Kota Surabaya melalui TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, serta tetap menjaga komunikasi yang efektif bersama.

2.1.2.1.3 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4 yang tergolong dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang dirilis BPS, indeks gini Kota Surabaya memiliki angka yang cenderung lebih tinggi dibandingkan keduanya, kecuali kondisi pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan pada tahun 2023, peningkatan indeks gini di Kota Surabaya cukup signifikan. Oleh sebab itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan selalu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik, karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Saat ini, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk menurunkan angka rasio gini, dengan strategi yang berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran.

Tabel II.17
Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Indeks Gini	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Surabaya	0,406	0,344	0,351	0,388	0,423
Jawa Timur	0,364*	0,364*	0,364*	0,365*	0,387
Nasional	0,380*	0,385*	0,381*	0,381*	0,388

*Sumber data: BPS, 2024 (versi data Maret). *) versi data September*

2.1.2.1.4 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Meski garis kemiskinan setiap tahun cenderung meningkat mengikuti inflasi, namun angka dan jumlah penduduk miskin harus semakin menurun. Pada periode pandemi Covid-19, tahun 2020 dan 2021, angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin naik cukup signifikan sebagai dampak dari pembatasan sosial dalam skala besar. Namun, di tahun 2022 dan 2023, angka kemiskinan berhasil diturunkan berturut-turut menjadi 4,72 dan 4,65 sebagai dampak dari berbagai intervensi kemiskinan yang dilakukan secara masif oleh Pemerintah Kota

Surabaya. Selengkapnya angka dan garis kemiskinan serta jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.18
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	Lingkup	2019	2020	2021	2022	2023*
Angka Kemiskinan (persen)	Surabaya*	4,51	5,02	5,23	4,72	4,65
	Jawa Timur	10,20	11,46	10,59	10,49	10,35
	Nasional	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	Surabaya*	567.474	592.137	611.466	652.540	718.370
	Jawa Timur	404.172	418.228	445.139	487.908	507.286
	Nasional	440.538	458.947	486.168	535.547	550.458
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Surabaya*	130,55	145,67	152,489	138,21	136,37
	Jawa Timur	4.056,00	4.585,97	4.259,60	4.236,51	4.188,81
	Nasional	24.785,87	27.549,69	26.503,65	26.363,27	25.898,55

*Sumber: BPS, 2023 (versi data Sept). *) versi data Maret*

Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat 0% (nol persen) pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu rumah tangga yang mendapatkan penghasilan sebesar 1,9 USD PPP (*Purchasing Power Parity)* per hari. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 69.330 jiwa (2,39%), terus menurun di tahun 2021, sebanyak 35.020 jiwa (1,20%), hingga tahun 2023, sebanyak 7.572 jiwa (0,25%). Kota Surabaya sedang berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem, di antaranya dengan menetapkan data kemiskinan ekstrem melalui SK Walikota No. 188.45/556/436.1.2/2022 tentang Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Kota Surabaya Tahun 2022, yakni sejumlah 23.530 jiwa pada 5.310 KK. Salah satu bentuk intervensi bagi mereka adalah dengan mendorong pembukaan lapangan kerja padat karya untuk peningkatan kemandirian ekonomi.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2023, angka IPM mengalami *update* data Umur Harapan Hidup, yang sebelumnya dihitung menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010, dimutakhirkan menggunakan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. *Update* angka umur harapan hidup tersebut mengakibatkan penyesuaian angka IPM sejak tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2023. IPM Kota Surabaya meningkat dari 82,76 pada tahun 2020 menjadi 83,99 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Kota Surabaya rata-rata tumbuh sebesar 0,49% per tahun. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan manusia Kota Surabaya menjadi kategori sangat tinggi, meski hanya merupakan angka tertinggi kedua untuk tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Malang (84,00). Tren IPM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama 5 tahun terakhir, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.19
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019*	2020	2021	2022	2023
IPM Kota Surabaya	82,22	82,76	82,94	83,32	83,99
IPM Provinsi Jawa Timur	71,5	73,04	73,48	74,05	74,65
IPM Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. *)dihitung menggunakan basis data SP2010*

2.1.2.2.1.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur panjang dan hidup sehat dapat diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2023, data UHH yang sebelumnya dihitung menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010, dimutakhirkan menggunakan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, sehingga mengakibatkan perubahan angka UHH

sejak tahun 2020 hingga tahun-tahun berikutnya. Perkembangan UHH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.20
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Umur Harapan Hidup (UHH)	2019*	2020	2021	2022	2023
Kota Surabaya (tahun)	74,13	75,24	75,43	75,62	75,82
Provinsi Jawa Timur (tahun)	71,18	74,21	74,28	74,57	74,87
Nasional (tahun)	71,34	73,37	73,46	73,7	73,93

*Sumber: BPS, 2024. *)dihitung menggunakan basis data SP2010*

UHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2020 sebesar 75,24 tahun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 75,43 tahun meski di tengah kondisi pandemi. Kemudian di tahun 2022, UHH penduduk Kota Surabaya kembali meningkat menjadi 75,62 tahun. Sedangkan pada tahun 2023 UHH penduduk Kota Surabaya terus meningkat menjadi 75,82 tahun. Perkembangan yang positif ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warganya melalui UHC (*universal health coverage*), yang didukung oleh para pemangku kepentingan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya, seperti rumah sakit, klinik, serta fasilitas kesehatan milik swasta lainnya.

2.1.2.2.1.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur melalui RLS (rata-rata lama sekolah) dan HLS (harapan lama sekolah). Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.21
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2019	2020	2021	2022	2023
RLS Kota Surabaya (tahun)	10,47	10,49	10,50	10,51	10,70
RLS Provinsi Jawa Timur (tahun)	7,59	7,78	7,88	8,03	8,11
RLS Nasional (tahun)	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber: BPS, 2024

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.22
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 – 2023

Harapan Lama Sekolah (HLS)	2019	2020	2021	2022	2023
HLS Kota Surabaya (tahun)	14,79	14,80	14,81	14,83	14,85
HLS Provinsi Jawa Timur (tahun)	13,16	13,19	13,36	13,37	13,38
HLS Nasional (tahun)	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15

Sumber: BPS, 2024

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya di tahun 2023 berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA, yakni melebihi tingkat Diploma-3 (D3) namun masih belum mencapai Diploma-4 (D4) atau Strata-1 (S1). Adapun penyebab utama yang secara signifikan dapat mempengaruhi HLS dan RLS antara lain karena faktor tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan tempat tinggal yang secara jarak menurut pengukuran zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tidak terjangkau dari lokasi satuan pendidikan. Penyebab anak tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi di antaranya karena menikah/mengurus rumah tangga, merasa pendidikan cukup dan telah bekerja. Untuk faktor tempat tinggal yang jauh dari lokasi satuan pendidikan, dialami oleh kebanyakan anak pada usia 16 tahun ke atas atau usia belajar setingkat SMA/SMK sesuai dengan data rata-rata lama sekolah siswa di Surabaya yang pendidikannya terhenti saat usia 16-17 tahun. Hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menambah jumlah satuan pendidikan setingkat SMA/SMK. Saat ini Ketersediaan jumlah 22 sekolah SMA dan 10 sekolah SMK negeri yang terbatas sehingga jumlah satuan pendidikan ini tidak mencukupi dengan lulusan kelas 9 dari SMP negeri maupun swasta.

Meski mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah masih belum dapat memenuhi harapan lama sekolah. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong pelaksanaan pemberian beasiswa bagi pelajar SMA/SMK, bahkan hingga Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan indeks pendidikan warga Kota Surabaya. Langkah yang paling efektif adalah dengan memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah, sehingga nilai Harapan Lama Sekolah akan naik serta memperhatikan penduduk produktif usia 25 tahun ke atas yang tidak/putus sekolah agar bisa kembali sekolah dan memiliki ijazah sebagai suatu langkah menaikan nilai Rata rata Lama Sekolah.

2.1.2.2.1.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Standar hidup layak didapat melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita masyarakat di kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.23
Pengeluaran per Kapita disesuaikan di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Pengeluaran Per Kapita	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Surabaya (Rp .000)	17.854	17.755	17.826	18.345	18.977
Provinsi Jawa Timur (Rp .000)	11.739	11.601	11.707	11.992	12.421
Nasional (Rp .000)	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2024

Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Surabaya mencapai 18,977 juta rupiah per tahun. Tentu angka tersebut lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional, karena tingginya kebutuhan hidup di kota besar yang selaras dengan perkembangan kemajuan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya.

2.1.2.2.2 Indeks Harmoni Sosial

Indeks Harmoni Sosial merupakan indikator baru dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang merupakan indikator komposit yang terdiri dari Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks ini menekankan pada keselarasan perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkum, mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial yang ditandai dengan adanya solidaritas dalam masyarakat yang beragam tersebut. Indeks Budaya Lokal disusun oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal (mengenai jenis seni budaya dan cagar budaya) dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan merupakan indeks komposit yang tersusun atas 4 komponen, yakni: (1) persentase masyarakat yang pemahaman lingkungan hidupnya meningkat, (2) jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan, (3) peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan, dan (4) persentase rumah sehat. Kemudian, Indeks Kepedulian Sosial merupakan indeks yang ditentukan dengan hasil survei terhadap partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama dan kebangsaan.

Nilai Indeks Budaya Lokal dapat menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dapat menggambarkan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan Indeks Kepedulian Sosial dapat menggambarkan tingkat kepedulian antar masyarakat dalam lingkup sosial sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dianggap penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat terutama pada zaman modernisasi sekarang, di mana dengan berkembangnya teknologi informasi sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, beserta lingkungan hidup yang mendukung aktivitas masyarakat.

Tabel II.24
Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Harmoni Sosial	N/A	N/A	N/A	80,08	82,70
1.a	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	N/A	N/A	N/A	48,01	56,51
1.b	Indeks Kepedulian Sosial	N/A	N/A	N/A	97,67	97,86
1.c	Indeks Budaya Lokal	82,42	88,56	89,67	89,97	89,99

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2023

Pencapaian Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya tahun 2023 sebesar 82,70% tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan ragam dan frekuensi event budaya lokal, kepedulian lingkungan, serta penguatan karakter kebangsaan dan kerukunan antar masyarakat di Kota Surabaya. Keberhasilan tersebut di antaranya merupakan hasil dari rutinnya pelaksanaan event, festival serta parade dengan tema seni dan budaya serta sejarah yang diadakan di Kota Surabaya, seperti Parade Juang, Festival Rujak Uleg, Perobekan Bendera, Heroic Track, Sekolah Kebangsaan, Surabaya Vaganza, Cak dan Ning, Parade Budaya serta Sedekah Bumi. Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung oleh upaya edukasi lingkungan kepada masyarakat, baik pelajar maupun pelaku usaha mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di antaranya pembinaan bank sampah di 470 lokasi dan 40 kampung *zero waste*, serta diadakannya perlombaan lingkungan seperti Surabaya *Smart City*, ECO school, ECO campus dan ECO pesantren. Kemudian, pencapaian Indeks Harmoni Sosial tersebut juga terwujud melalui upaya pemantapan karakter kebangsaan dan ideologi pancasila, serta penguatan kerukunan antar masyarakat melalui forum kerukunan umat

beragama, mediasi konflik umat beragama, serta sosialisasi anti narkotika dan koordinasi operasi gabungan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Seiring dengan upaya dalam mengurangi potensi konflik, Pemerintah Kota Surabaya juga senantiasa berupaya penuh dalam meningkatkan nilai kesalehan sosial dalam bermasyarakat. Salah satu langkah strategis dalam meraih hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kepedulian sosial di masyarakat yang diukur dalam Indeks Kepedulian Sosial. Indeks Kepedulian Sosial merupakan suatu sinergi yang menggabungkan antara nilai sosial kemanusiaan, ketuhanan, budi pekerti serta kepatuhan terhadap peraturan negara.

2.1.2.2.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi kasar.

Angka melek huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH penduduk Kota Surabaya sudah sebesar 100 persen sejak tahun 2016. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.25
Perkembangan AMH Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bisa Membaca dan Menulis	2.458.655	2.460.443	2.295.394	2.300.947	2.330.830
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	2.458.655	2.460.443	2.295.394	2.300.947	2.330.830
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Dari data pada tabel di atas, penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat

partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut. APM jenjang SD/MI pada tahun 2019 sebesar 98,88 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar 84,58 persen. Pada tahun 2020, APM jenjang SD/MI sebesar 98,46 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,58 persen. Sedangkan pada tahun 2021 APM jenjang SD/MI sebesar 100,82 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,34 persen. Kemudian pada tahun 2022 APM jenjang SD/MI sebesar 91,37 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 80,77 persen. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2023 APM jenjang SD/MI sebesar 95,08 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 96,17 persen. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.26
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	APM SD/MI (persen)	98,88	98,46	100,82	91,37	95,08
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	291.907	295.357	299.814	269.289	277.858
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	303.021	299.966	297.369	294.723	292.229
2	APM SMP/MTs (persen)	84,58	87,58	87,34	80,77	96,17
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	123.398	126.874	129.763	119.705	141.948
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	146.952	144.872	148.573	148.205	147.594

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dispendukcapil Kota Surabaya, 2024

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.27
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki
Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio APM SD/MI (persen)	94,34	92,73	99,80	94,04	100,15
2.	Rasio APM SMP/MTs (persen)	100,04	90,59	103,13	94,00	101,63

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator

yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.28
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	APK PAUD (persen)	68,07	69,36	69,59	57,05	58,77
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang PAUD	125.941	124.883	123.269	102.666	105.998
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun	185.012	180.053	177.135	179.967	180.354
2.	APK SD/MI (persen)	105,86	104,30	106,90	106,37	109,89
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang SD/MI	310.982	312.873	317.885	313.505	321.128
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	303.021	299.966	297.369	294.723	292.229
3.	APK SMP/MTs (persen)	86,49	98,93	110,64	108,47	110,53
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang SMP/MTs	135.629	143.329	164.376	160.764	163.134
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	146.952	144.872	148.573	148.205	147.594

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Pada tahun 2022, terdapat 1.973 lembaga PAUD yang tidak aktif izin operasionalnya karena sudah tidak ada proses belajar mengajar dan/atau masalah internal yayasan. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pembinaan kepada lembaga PAUD untuk meningkatkan ketertiban lembaga PAUD sehingga kegiatan belajar mengajar PAUD dapat terlaksana dengan optimal.

2.1.2.2.4 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan status gizi masyarakat. Utamanya pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2019 yang sebesar 0,12 persen, berhasil diturunkan menjadi 0,08 persen di akhir tahun 2023, seperti dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.29
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	242	196	148	123	118
2	Jumlah balita yang ditimbang	183.286	178.043	148.720	126.113	149.899
3	Prevalensi balita gizi buruk (%)	0,13	0,11	0,10	0,10	0,08

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Tabel II.30
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2019 – 2023

No	Kecamatan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	3	3.228	0,09%	3	2.875	0,10%	12	3.257	0,37%	4	3.504	0,11%	0	3.523	0,00%
2	Kec. Benowo	4	4.392	0,09%	1	4.577	0,02%	1	3.475	0,03%	3	3.017	0,10%	6	5.112	0,02%
3	Kec. Bubutan	1	5.793	0,02%	3	5.567	0,05%	4	5.008	0,08%	5	4.212	0,12%	8	4.418	0,05%
4	Kec. Bulak	5	2.802	0,18%	2	2.774	0,07%	6	2.645	0,23%	4	2.458	0,16%	1	2.543	0,07%
5	Kec. Dukuh Pakis	3	3.148	0,10%	1	3.084	0,03%	6	2.167	0,28%	5	1.771	0,28%	3	2.505	0,05%
6	Kec. Gayungan	4	2.249	0,18%	1	2.210	0,05%	1	1.828	0,05%	3	1.501	0,20%	1	2.130	0,00%
7	Kec. Genteng	11	3.265	0,34%	7	3.211	0,22%	5	3.181	0,16%	1	2.850	0,04%	0	2.351	0,00%
8	Kec. Gubeng	0	7.592	0,00%	2	6.878	0,03%	1	6.056	0,02%	2	3.506	0,06%	3	5.950	0,04%
9	Kec. Gunung Anyar	0	4.087	0,00%	2	3.895	0,05%	0	3.383	0,00%	2	1.305	0,15%	2	2.543	0,00%
10	Kec. Jambangan	0	3.529	0,00%	2	3.479	0,06%	0	3.280	0,00%	0	1.838	0,00%	0	3.206	0,04%
11	Kec. Karang Pilang	5	4.372	0,11%	5	4.390	0,11%	0	4.552	0,00%	3	1.982	0,15%	3	4.050	0,49%
12	Kec. Kenjeran	15	14.034	0,11%	12	13.647	0,09%	8	10.635	0,08%	10	9.711	0,10%	8	10.884	0,03%
13	Kec. Krembangan	2	7.832	0,03%	4	7.480	0,05%	3	6.197	0,05%	11	6.068	0,18%	7	5.690	0,07%
14	Kec. Lakarsantri	4	4.158	0,10%	4	4.209	0,10%	5	2.857	0,18%	3	2.952	0,10%	3	3.722	0,09%
15	Kec. Mulyorejo	0	5.616	0,00%	4	5.513	0,07%	3	2.368	0,13%	1	2.158	0,05%	0	4.678	0,00%
16	Kec. Pabean Cantian	2	4.249	0,05%	1	4.195	0,02%	1	3.478	0,03%	2	3.980	0,05%	0	3.708	0,00%
17	Kec. Pakal	36	4.093	0,88%	20	3.895	0,51%	8	3.841	0,21%	2	3.793	0,05%	1	3.434	0,00%

No	Kecamatan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
18	Kec. Rungkut	8	7.163	0,11%	5	7.154	0,07%	2	5.186	0,04%	6	3.056	0,20%	12	5.146	0,16%
19	Kec. Sambikerep	5	3.400	0,15%	2	4.350	0,05%	4	3.317	0,12%	2	2.960	0,07%	4	3.995	0,1%
20	Kec. Sawahan	15	12.064	0,12%	21	11.869	0,18%	10	10.349	0,10%	3	10.046	0,03%	7	10.456	0,05%
21	Kec. Semampir	21	11.680	0,18%	10	11.719	0,09%	11	9.578	0,11%	12	8.537	0,14%	18	8.542	0,13%
22	Kec. Simokerto	8	3.626	0,22%	3	3.754	0,08%	7	4.887	0,14%	4	4.102	0,10%	5	4.254	0,1%
23	Kec. Sukolilo	3	6.845	0,04%	7	6.760	0,10%	1	4.759	0,02%	5	2.879	0,17%	1	5.190	0,03%
24	Kec. Sukomanunggal	59	6.405	0,92%	43	6.387	0,67%	22	5.558	0,40%	1	5.156	0,02%	0	5.340	0,02%
25	Kec. Tambaksari	6	11.963	0,05%	9	12.227	0,07%	6	10.767	0,06%	9	8.616	0,10%	8	10.103	0,05%
26	Kec. Tandes	4	6.263	0,06%	5	6.125	0,08%	2	5.864	0,03%	2	4.066	0,05%	0	4.951	0,00%
27	Kec. Tegalsari	7	5.646	0,12%	7	5.594	0,13%	12	3.960	0,30%	3	3.906	0,08%	1	5.187	0,00%
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	0	3.058	0,00%	1	2.947	0,03%	0	2.714	0,00%	0	2.376	0,00%	6	2.827	0,41%
29	Kec. Wiyung	3	4.316	0,07%	1	4.324	0,02%	3	2.395	0,13%	6	3.132	0,19%	5	3.214	0,23%
30	Kec. Wonocolo	4	4.925	0,08%	3	4.959	0,06%	2	4.261	0,05%	1	4.262	0,02%	0	4.082	0,00%
31	Kec. Wonokromo	4	8.535	0,05%	5	7.995	0,06%	2	6.917	0,03%	8	6.413	0,12%	5	6.165	0,06%
Total		**242**	**180.328**	**0,13%**	**196**	**178.043**	**0,11%**	**148**	**148.720**	**0,10%**	**123**	**126.113**	**0,10%**	**118**	**149.899**	**0,08%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2024

Selain itu prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2019 sebesar 8,22, berhasil diturunkan menjadi 1,98 pada akhir tahun 2023, seperti dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.31
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah balita dengan status gizi kurang	14.818	14.617	6.200	2.501	2.332
2	Jumlah balita yang ditimbang	183.286	178.043	148.720	126.113	149.899
3	Prevalensi balita gizi kurang (%)	8,08	8,21	4,17	1,98	1,56

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel II.32
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	25	24	17	16	13
2	Kelahiran Hidup	42.145	41.814	40.158	40.012	39.891
3	AKI per 100.000 KH	59,32	57,40	42,33	39,99	32,59

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup terus berkurang dari tahun 2019 sebesar 59,32 menjadi 32,59 pada akhir tahun 2023. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 sebesar 5,01 terus berkurang menjadi 4,04 pada tahun 2023. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan bawaan.

Tabel II.33
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bayi lahir meninggal	211	208	199	174	161
2	Kelahiran Hidup	42.145	41.814	40.158	40.012	39.891
3	AKB per 1.000 KH	5,01	4,97	4,96	4,35	4,04

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi di bawah target bahkan capaiannya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya

telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

Selain permasalahan di atas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah *stunting* (kerdil) di mana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Prevalensi Balita *Stunting* menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2019 sebesar 8,54 persen menjadi hanya 0,66 persen pada tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari upaya pencegahan dan penurunan *stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Program pencegahan dan penanganan balita *stunting* termasuk balita gizi buruk dan gizi kurang di Kota Surabaya berjalan dengan baik, didukung dengan adanya pemanfaatan Kader Surabaya Hebat dalam melaksanakan monitoring dan pendampingan setiap balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang, juga didukung dengan adanya sistem Aplikasi Sayang Warga yang memudahkan pendataan dan monitoring secara *realtime* perkembangan balita dari waktu ke waktu. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna mewujudkan *zero stunting* di Kota Surabaya, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

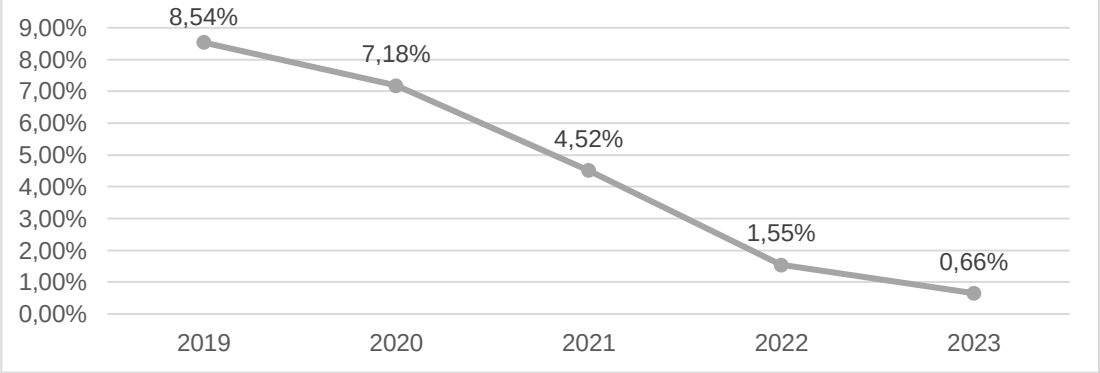

Gambar II.11 Prevalensi Balita *Stunting* Tahun 2019 – 2023
Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

2.1.2.2.5 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga

menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2021 mempunyai tren meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,68 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja yang utamanya banyak terjadi ketika pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021. Namun pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,76 persen, hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi pengangguran akibat terjadinya pandemi Covid-19 dengan melakukan penguatan sektor UMKM, pemulihan wisata, dan program padat karya. Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 – 2023.

Tabel II.34
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	91.557	154.933	152.273	125.276	106.120
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.590.651	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,76	9,79	9,68	7,62	6,76

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun 2019 jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya sebesar 1.590.651 menjadi 1.569.714 di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 berdampak pada naiknya TPT Kota Surabaya sampai dengan 9,79 persen. Rendahnya penyerapan tenaga kerja dan banyaknya karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja merupakan akibat dari terdampaknya perekonomian Kota Surabaya, Indonesia dan global secara umum karena pembatasan sosial dalam skala besar. Meski kondisi pandemi masih berlanjut di tahun 2021 dan 2022, namun TPT Kota Surabaya dapat diturunkan menjadi 7,62 persen di akhir tahun 2022, sehingga pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 dilakukan penyesuaian target menjadi

5% dari semula pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 sebesar 8,26%. Sementara itu, pada tahun 2023 TPT Kota Surabaya semakin menurun di angka 6,76%.

Tabel II.35
TPT Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 – 2023

TPT	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Surabaya	5,76	9,79	9,68	7,62	6,76
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber data: BPS, 2023 (versi data Agustus).

Dalam kurun 5 tahun terakhir angka TPT Kota Surabaya cukup fluktuatif, utamanya disebabkan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, meningkatkan jumlah pengangguran. Namun pada tahun 2022 dan 2023 angka TPT berhasil diturunkan cukup signifikan, meski belum mencapai di angka sebelum pandemi. Angka TPT di Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada periode yang sama juga mengalami hal serupa meski dengan derajat yang berbeda. Di tahun 2024, dengan masih fokusnya pemulihan ekonomi sebagai tema pembangunan, di antaranya melalui program padat karya dan penyelenggaraan *job fair*, tentu diharapkan dapat menurunkan kembali angka TPT di Kota Surabaya.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.36
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Capaian Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Grup Kesenian	731	771	743	806	715
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	42	42	42	45	49
4	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	5	5	5

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2018 sebanyak 611 grup kesenian, tahun 2019 meningkat menjadi 731 grup kesenian dan sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tercatat menjadi 806 grup kesenian. Pembinaan seni dan budaya juga dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan pelaksanaan penampilan/ pertunjukan seni di ruang publik. Adapun even pertunjukan seni dan budaya yang diadakan di antaranya Festival Rujak Uleg, Parade Surabaya Juang, Sedekah Bumi, Festival Cipta Karya Tari, Festival Seni Lintas Budaya, Surabaya Vaganza, Night At The Museum, Surabaya Art & Culture Festival, Pemilihan Duta Wisata Cak dan Ning Suroboyo serta fasilitasi tampilan seni di ruang-ruang publik lainnya.

Selain itu, dalam melestarikan budaya lokal, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menciptakan rasa memiliki disertai kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan. Hal ini diukur dalam indeks budaya lokal yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari hasil survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal, serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan bernilai kebangsaan. Adapun pencapaian indeks budaya lokal pada tahun 2019 hingga 2023, dapat dilihat pada gambar berikut.

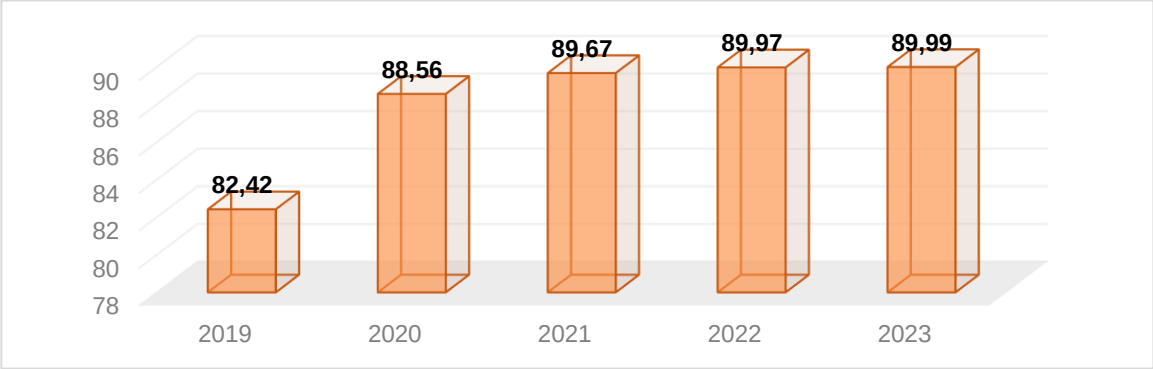

Gambar II.12 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2019–2022

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024

Pencapaian Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya tahun 2023 realisasinya 89,99%. Angka realisasi tersebut terus meningkat dari realisasi tahun 2019 sebesar 82,42%. Peningkatan Indeks Budaya Lokal tersebut menunjukkan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang semakin membaik.

Jumlah cabang olahraga yang dibina sampai dengan tahun 2023 sebanyak 49 cabang olahraga. Pada tahun 2023, jumlah prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional sebanyak 398 prestasi dengan total medali yang diraih sebanyak 1.389 medali dari 781 atlet yang dikirim ke kejuaraan skala provinsi, nasional dan internasional. Dengan keterbatasan even kejuaraan pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19, capaian tersebut cukup memuaskan. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Sampai dengan tahun 2023, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 5 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo, dan gedung indoor *Surabaya Sport Center* (SSC), serta Gelora Pancasila. Selain itu, lapangan olahraga juga tersebar di permukiman penduduk maupun sekolah-sekolah, baik itu lapangan olahraga yang dibangun pemerintah kota maupun milik swasta. Sampai dengan tahun 2023 lapangan olahraga yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya berjumlah 618 lapangan terdiri dari lapangan berbagai macam cabang olahraga termasuk olahraga renang dan panjat tebing. Pembinaan atlet juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pemusatan latihan dan pelaksanaan even kejuaraan tingkat kota seperti Piala Walikota.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.37
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
URUSAN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA						**99,68%**
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**					**99,34%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	yang belum terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Orang	90.917	90.917	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,34%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	37,36	47,01	-9,65	100%
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	79,58	55,85	23,73	70,18%
	4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0,42	0,44	-0,02	100%
	5. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100%
	6. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100%
	7. Proporsi PTK bersertifikat	%	24,94	29,7	-4,76	100%
	8. Proporsi PTK penggerak	%	2,2	3,33	-1,13	100%
	9. Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100%
2	**Pendidikan Dasar**					**99,69%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Orang	440.149	440.149	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,69%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian
	SD					
	1. Angka partisipasi kasar	%	103,78	103,91	-0,13	100%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
	3. Angka partisipasi murni	%	98,81	95,02	3,79	96,16%
	4. Kemampuan literasi	Nilai	65,76	83,93	-18,17	100%
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	47,13	65,63	-18,5	100%
	6. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	1,86	1,86	0	100%
	7. Perbedaan Skor numerasi	Nilai	0,76	0,76	0	100%
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	76,53	72,99	3,54	95,37%
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	67,36	64,57	2,79	95,86%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	52,06	50,91	1,15	97,79%
	11. Indeks distribusi guru	%	61,77	60,43	1,34	97,83%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	23,52	29,79	-6,27	100%
	13. Proporsi PTK penggerak	%	5,96	7,59	-1,63	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100%
	SMP					
	1. Angka partisipasi kasar	%	99,01	106,27	-7,26	100%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
	3. Angka partisipasi murni	%	87,34	95,82	-8,48	100%
	4. Kemampuan literasi	Nilai	78,51	87,07	-8,56	100%
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	77,76	69,24	8,52	89,04%
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	5,71	5,71	0	100%
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,3	1,3	0	100%
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	76	72,66	3,34	95,61%
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	%	66,03	58,91	7,12	89,22%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	52,61	69,22	-16,61	100%
	11. Indeks distribusi guru	%	62,32	77,57	-15,25	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	45,15	48,26	-3,11	100%
	13. Proporsi PTK penggerak	%	8,06	10,78	-2,72	100%
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100%
3	**Pendidikan Kesetaraan**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	Orang	4.749	4.749	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	5,04	5,04	0	100%
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	2,35	2,35	0	100%
	11. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100%
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100%
URUSAN KESEHATAN KOTA SURABAYA						**99,97%**
1	**Pelayanan kesehatan ibu hamil**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	44.057	44.057	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	4.406	4.406	0	100%
	2. Tablet tambah darah	Tablet	3.965.130	3.965.130	0	100%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	44.057	44.057	0	100%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	44.057	44.057	0	100%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	44.057	44.057	0	100%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	6.609	6.609	0	100%
	7. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	44.057	44.057	0	100%
	8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	32.619	32.619	0	100%
	9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	3.606	3.606	0	100%
	10. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	11. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	44.057	44.057	0	100%
2	**Pelayanan kesehatan ibu bersalin**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	Orang	41.893	41.893	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Formulir Partograf	Formulir	41.893	41.893	0	100%
	2. Kartu ibu (rekam medis)	Paket	44.057	44.057	0	100%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	32.619	32.619	0	100%
	4. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	3.606	3.606	0	100%
	5. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	**0**	**100%**
3	**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	Orang	41.804	41.804	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	41.804	41.804	0	100%
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	41.804	41.804	0	100%
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	41.804	41.804	0	100%
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	41.804	41.804	0	100%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	125.412	125.412	0	100%
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	32.619	32.619	0	100%
	7. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	3.588	3.588	0	100%
	8. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	9. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**					**99,65%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**79,76%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	164.508	164.023	485	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,46%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	164.508	164.023	485	99,71%
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	164.508	164.023	485	99,71%
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	32.619	32.619	0	100%
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	33.117	30.186	2.931	91,15%
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	131.030	126.402	4.628	96,47%
	6. Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	41.020	41.020	0	100%
	7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	13.460	13.460	0	100%
	8. Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	41.388	41.388	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	9. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	10.282	10.282	0	100%
	10. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	10.345	10.345	0	100%
	11. Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	10.359	10.359	0	100%
	12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	10.359	10.359	0	100%
	13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	10.497	10.497	0	100%
	14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	10.513	10.513	0	100%
	15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	10.513	10.513	0	100%
	16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	786.722	786.722	0	100%
	17. Peralatan Anafilaktik	Paket	11.654	11.654	0	100%
	18. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.588	3.588	0	100%
	19. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	20. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	492	492	0	100%
	22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	28.256	28.256	0	100%
	23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	11.943	11.943	0	100%
5	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A**.** Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan		398.238	398.238	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Buku raport kesehatanku	Buku	398.238	398.238	0	100%
	2. Buku pemantauan kesehatan	Buku	65	65	0	100%
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	398.238	398.238	0	100%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	756	756	0	100%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	756	756	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	3.283	3.283	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	9. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	492	492	0	100%
	10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	11. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	28.256	28.256	0	100%
	12. Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	25.764	25.764	0	100%
6	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A**.** Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2.155.512	2.155.512	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	126	126	0	100%
	2. Alat ukur berat badan	Unit	780	780	0	100%
	3. Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	780	780	0	100%
	4. Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	780	780	0	100%
	5. Alat : Tensimeter	Unit	780	780	0	100%
	6. Alat : Glukometer	Unit	2.173	2.173	0	100%
	7. Alat : Tes strip gula darah	Unit	19.293	19.293	0	100%
	8. Alat : Lancet	Unit	8.900	8.900	0	100%
	9. Alat : Kapas alkohol	Unit	7.197	7.197	0	100%
	10. Alat : KIT IVA Tes	Unit	63	63	0	100%
	11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	756	756	0	100%
	12. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.283	3.283	0	100%
	13. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	14. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	15. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	492	492	0	100%
	16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	17. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	27.489	27.489	0	100%
7	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	326.681	326.681	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	326.681	326.681	0	100%
	2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	326.681	326.681	0	100%
	3. Buku kesehatan lansia	Buku	43.025	43.025	0	100%
	4. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.672	3.672	0	100%
	5. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	7. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	492	492	0	100%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	9. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	27.489	27.489	0	100%
8	**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani **:**		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		761.441	761.441	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	126	126	0	100%
	2. Tensimeter	Unit	780	780	0	100%
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	756	756	0	100%
	4. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.672	3.672	0	100%
	5. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	8. Obat Hipertensi	Paket	761.441	761.441	0	100%
9	**Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	113.970	113.970	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Alat : Glukometer	Unit	2.173	2.173	0	100%
	2. Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	19.293	19.293	0	100%
	3. Alat : Kapas Alkohol	Unit	7.197	7.197	0	100%
	4. Alat : Lancet	Unit	8.900	8.900	0	100%
	5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	756	756	0	100%
	6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	126	126	0	100%
	7. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.283	3.283	0	100%
	8. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	9. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	10. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	492	492	0	100%
	11. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	12. Obat Diabetes Melitus	Paket	113.970	113.970	0	100%
10	**Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	Orang	5.766	5.766	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	63	63	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	3	3	0	100%
	3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	756	756	0	100%
	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	63	63	0	100%
	5. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	63	63	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	63	63	0	100%
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	63	63	0	100%
11	**Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	89.139	89.139	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,68%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	63	63	0	100%
	2. Reagen Zn TB	Paket	1.783	1.783	0	100%
	3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	8.976	8.976	0	100%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	10.138	10.138	0	100%
	5. Catridge tes cepat molekuler	Paket	69.610	69.610	0	100%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	63	63	0	100%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	63	63	0	100%
	8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	3.799	3.799	0	100%
	9. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	10. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	912	912	0	100%
	11. Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	442	442	0	100%
	12. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	13. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	27.489	27.489	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
12	**Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	66.001	66.001	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	66.001	66.001	0	100%
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	60.175	60.175	0	100%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	66.001	66.001	0	100%
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	63	63	0	100%
	5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	3.797	3.797	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.389	10.389	0	100%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.812	1.812	0	100%
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	912	912	0	100%
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	291	291	0	100%
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	27.489	27.489	0	100%
URUSAN PEKERJAAN UMUM KOTA SURABAYA						**97,88%**
1	**Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari**					**98,49%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**79,88%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari	Orang	2.913.208	2.913.208	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18,61%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/ SR	609.486	610.219	-733	100,12%
	2. Jaringan Perpipaan	Sambungan Rumah/ SR	609.486	610.219	-733	100,12%
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**					**97,28%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**79,69%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	2.880.284	2.880.284	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**17,59%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	577.832	577.832	0	100%
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	5.110	5.110	0	100%
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SURABAYA						**100%**
1	**Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni		Tidak Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/ kota	1	1	0	100%
2	**Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. **Jumlah yang Harus Dilayani :**		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
			344	344	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan		39	39	0	100%
	2. Subsidi Uang Sewa		-	-	-	-
	3. Penyediaan rumah layak huni		95	95	0	100%
URUSAN TRANTIBUM KOTA SURABAYA						**100%**
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
			1.150	1.150	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	284	284	0	100%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	46	46	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	978	978	0	100%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	0	0	0	0%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0%
2	**Pelayanan Informasi Rawan bencana**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
			732.605	732.605	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	730.728	730.728	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	1.877	1.877	0	100%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	1	1	0	100%
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
			500	500	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	unit	7	7	0	100%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	500	500	0	100%
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
			1.060	1.060	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1.060	1.060	0	100%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1.060	1.060	0	100%
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	431	431	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	431	431	0	100%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	1.060	1.060	0	100%
5	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**					**99,03%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
			793	793	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,03%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	793	793	0	100%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	21	21	0	100%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	uinit	24	23	1	95.83%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	810	768	42	94.81%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	793	793	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	112	112	0	100%
URUSAN SOSIAL KOTA SURABAYA						**100%**
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	orang	56	56	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	56	56	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	56	56	0	100%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	7	7	0	100%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	56	56	0	100%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	56	56	0	100%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	2	2	0	100%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	56	56	0	100%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	56	56	0	100%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100%
	13. Layanan rujukan	Orang	7	7	0	100%
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	91	91	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	91	91	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	91	91	0	100%
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	91	91	0	100%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	91	91	0	100%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	3	3	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	91	91	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	91	91	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	3	3	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100%
	12. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100%
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	221	221	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	221	221	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	221	221	0	100%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	27	27	0	100%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	221	221	0	100%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	221	221	0	100%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	5	5	0	100%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	221	221	0	100%
	10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	39	39	0	100%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5	5	0	100%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100%
	13. Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100%
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	1217	1217	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	1217	1217	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	1217	1217	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1217	1217	0	100%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1217	1217	0	100%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	374	374	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	546	546	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	113	113	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	260	260	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	490	490	0	100%
	12. Layanan rujukan	Orang	839	839	0	100%
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		810	810	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM)		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	1	1	0	100%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2024

Meski SPM Kota Surabaya Tahun 2023 secara rata-rata pada 6 urusan tercapai 99,67% (meningkat dari tahun 2022 yang tercapapai 99,14%), namun masih

terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, di antaranya adalah diperlukannya perbaikan komunikasi dan kerjasama antar perangkat instansi pemerintahan, baik di internal Pemerintah Kota Surabaya maupun dengan instansi pemerintahan lainnya.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Kota Surabaya menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dasar tersebut kepada seluruh warga, khususnya di bidang pendidikan. Pada tahun 2023, Kota Surabaya mencapai target 100% di hampir semua indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota, tenaga pendidik dan kependidikan, serta berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga menunjukkan efektivitas program dan kebijakan serta inovasi yang telah diterapkan.

Tabel II.38
Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2023

No.	Jenis Layanan SPM	2021	2022	2023
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	97,15%	99,34%
2	Pendidikan Dasar	100%	99,83%	99,69%
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	98,65%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2024

Meski demikian, beberapa indikator masih perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya. Salah satunya pada jenjang Pendidikan PAUD adalah pertumbuhan pendidik PAUD dengan kualifikasi S1 yang masih berada pada angka 70,18%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pendidik PAUD belum memiliki kualifikasi pendidikan yang diharapkan. Pemerintah Kota Surabaya berupaya meningkatkan kualifikasi pendidik PAUD dengan memberikan beasiswa S1 untuk tenaga pendidik PAUD. Selain itu, indeks distribusi guru SD yang hanya mencapai 97,84% menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan dalam distribusi guru di berbagai wilayah di Kota Surabaya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Peningkatan indeks distribusi guru diupayakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan memanfaatan program kemitraan dengan Perguruan Tinggi melalui program Surabaya Mengajar, Program

Pendidikan Profesi Guru, Mahasiswa Kampus Mengajar serta pengangkatan guru melalui seleksi ASN PPPK formasi umum.

Di samping itu, kemampuan numerasi siswa SMP yang tercatat pada angka 89,04% juga masih memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa semua siswa mencapai kompetensi minimum yang diharapkan. Hal ini diintervensi Pemerintah Kota Surabaya dengan penyediaan rumah matematika di Kota Surabaya. Terakhir, angka partisipasi murni dalam pendidikan kesetaraan yang masih berada di angka 80% menandakan bahwa terdapat sebagian warga yang belum terlayani secara optimal dalam program pendidikan kesetaraan, yang dapat berdampak pada kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan jenjang pendidikan formal.

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data APM per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.39
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan
Tahun 2023

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Asemrowo	5.044	4.172	82,71%	2.546	1.855	72,86%
Benowo	7.459	6.841	91,71%	3.832	3.760	98,12%
Bubutan	9.257	8.541	92,27%	4.708	2.039	43,31%
Bulak	4.771	6.046	126,72%	2.461	2.737	111,21%
Dukuh Pakis	5.694	5.945	104,41%	2.786	3.818	137,04%
Gayungan	4.135	5.397	130,52%	2.144	2.434	113,53%
Genteng	5.420	5.762	106,31%	2.802	5.604	200,00%
Gubeng	11.826	12.849	108,65%	6.120	4.858	79,38%
Gunung Anyar	6.105	4.781	78,31%	2.965	2.174	73,32%
Jambangan	5.466	4.999	91,46%	2.682	4.131	154,03%
Karangpilang	7.162	6.119	85,44%	3.479	3.311	95,17%
Kenjeran	19.316	17.608	91,16%	9.541	9.779	102,49%
Krembangan	11.449	12.494	109,13%	5.799	8.036	138,58%
Lakarsantri	6.255	8.734	139,63%	3.223	5.124	158,98%
Mulyorejo	8.022	10.442	130,17%	4.012	6.312	157,33%
Pabean Cantian	7.175	4.213	58,72%	3.749	1.650	44,01%
Pakal	6.188	7.324	118,36%	3.142	3.560	113,30%
Rungkut	11.899	10.861	91,28%	5.761	5.208	90,40%
Sambikerep	6.587	6.702	101,75%	3.311	4.561	137,75%
Sawahan	18.843	14.537	77,15%	9.696	4.854	50,06%

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Semampir	19.730	18.945	96,02%	9.801	5.768	58,85%
Simokerto	9.113	6.688	73,39%	4.485	3.565	79,49%
Sukolilo	11.056	12.033	108,84%	5.505	7.625	138,51%
Sukomanunggal	10.201	9.853	96,59%	4.963	6.522	131,41%
Tambaksari	21.477	16.236	75,60%	10.984	6.569	59,81%
Tandes	9.158	10.751	117,39%	4.775	3.786	79,29%
Tegalsari	9.241	9.215	99,72%	4.722	2.838	60,10%
Tenggilis Mejoyo	5.520	5.074	91,92%	2.828	2.906	102,76%
Wiyung	7.060	6.769	95,88%	3.469	3.030	87,35%
Wonocolo	7.595	7.250	95,46%	3.891	5.119	131,56%
Wonokromo	14.005	10.677	76,24%	7.412	8.415	113,53%
Total	**292.229**	**277.858**	**95,08%**	**147.594**	**141.948**	**96,17%**

Sumber: Dinas Pendidikan, diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data APK per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Dari data di bawah terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK lebih dari 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK 100% menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

Tabel II.40
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	3.433	1.691	49,69%	5.044	4.730	76,29%	2.546	2.142	58,73%
Benowo	4.479	2.970	67,66%	7.459	7.940	88,27%	3.832	4.315	83,54%
Bubutan	5.750	3.040	52,84%	9.257	9.880	87,19%	4.708	2.384	36,66%
Bulak	3.066	1.852	60,32%	4.771	6.984	121,13%	2.461	3.095	95,31%
Dukuh Pakis	3.400	2.471	70,80%	5.694	6.790	98,37%	2.786	4.479	114,39%
Gayungan	2.470	1.507	61,11%	4.135	6.264	123,96%	2.144	2.824	94,49%
Genteng	3.229	2.295	71,12%	5.420	6.758	101,95%	2.802	6.518	164,77%
Gubeng	7.166	4.395	62,16%	11.826	14.958	101,46%	6.120	5.573	62,70%
Gunung Anyar	3.755	2.820	73,72%	6.105	5.473	72,74%	2.965	2.509	59,15%
Jambangan	3.309	1.742	50,98%	5.466	5.701	86,81%	2.682	4.697	128,00%
Karangpilang	4.472	2.907	65,01%	7.162	7.070	81,84%	3.479	3.801	76,90%
Kenjeran	12.782	6.285	50,06%	19.316	20.382	88,37%	9.541	11.309	86,41%
Krembangan	7.109	3.884	53,81%	11.449	14.291	103,24%	5.799	9.238	117,81%
Lakarsantri	3.942	2.678	66,50%	6.255	9.949	130,04%	3.223	5.953	130,40%
Mulyorejo	4.911	4.268	85,73%	8.022	11.916	119,93%	4.012	7.290	128,64%
Pabean Cantian	4.658	1.857	40,59%	7.175	4.857	54,83%	3.749	1.895	37,22%
Pakal	3.898	2.778	72,07%	6.188	8.517	114,11%	3.142	4.051	94,99%
Rungkut	7.209	4.775	63,85%	11.899	12.601	87,63%	5.761	5.949	77,31%
Sambikerep	4.092	2.322	57,15%	6.587	7.561	93,61%	3.311	5.219	114,70%
Sawahan	11.090	5.529	49,77%	18.843	17.010	71,95%	9.696	5.487	40,69%
Semampir	12.631	5.362	43,05%	19.730	21.844	90,39%	9.801	6.623	50,29%

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Simokerto	5.641	3.725	68,45%	9.113	7.698	69,64%	4.485	4.078	65,33%
Sukolilo	6.863	4.326	60,78%	11.056	13.868	104,71%	5.505	8.690	114,95%
Sukomanunggal	6.218	3.990	62,57%	10.201	11.328	90,99%	4.963	7.547	110,22%
Tambaksari	12.970	7.053	52,95%	21.477	19.193	71,99%	10.984	7.548	49,59%
Tandes	5.314	4.275	80,66%	9.158	12.457	110,12%	4.775	4.308	65,76%
Tegalsari	5.509	2.878	51,70%	9.241	10.729	94,22%	4.722	3.256	52,02%
Tenggilis Mejoyo	3.506	2.231	61,72%	5.520	5.869	85,89%	2.828	3.341	84,80%
Wiyung	4.286	2.997	69,18%	7.060	7.713	91,70%	3.469	3.544	72,17%
Wonocolo	4.763	2.581	55,54%	7.595	8.432	88,98%	3.891	5.890	113,39%
Wonokromo	8.433	4.514	53,13%	14.005	12.365	70,78%	7.412	9.581	91,16%
Total	**180.354**	**105.998**	**58,77%**	**292.229**	**321.128**	**109,89%**	**147.594**	**163.134**	**110,53%**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023 diolah

2.1.3.1.1.3 Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. AL untuk jenjang SD/MI tahun 2019 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2023. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2019 sebesar 100 persen, dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan akhir tahun 2023. Perkembangan Angka Kelulusan jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.41
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2019 – 2023

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	AL SD/MI (persen)	100	100	100	100	100
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	46.127	41.677	41.182	44.039	44.930
1.2	Jumlah Siswa SD/MI Kelas 6	46.127	41.677	41.182	44.039	44.930
2.	AL SMP/MTs (persen)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	40.965	38.403	37.413	38.131	40.218
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs Kelas 9	40.965	38.403	37.413	38.131	40.218

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah di jenjang masing-masing.

2.1.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2019 APS di jenjang SD/MI sebesar 0% dan konsisten sampai dengan akhir tahun 2023. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2019 sebesar 0% dan konsisten sampai dengan tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.42
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2019 – 2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	APS SD/MI (persen)	0	0	0	0	0
1.1	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	0	0	0	0	0
1.2	Jumlah Siswa SD/MI	309.427	312.873	317.885	313.505	321.128
2.	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0	0	0
2.1	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	0	0	0	0	0
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs	134.215	143.329	156.083	160.764	163.134

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

2.1.3.1.1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.43
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2019 – 2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Ketersediaan SD/MI	1:356	1:325	1:358	1:358	1:355
1.1.	Jumlah gedung sekolah	851	857	831	823	823
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	303.021	278.601	297.369	294.723	292.229
2.	Rasio Ketersediaan SMP/MTs	1:357	1:357	1:372	1:371	1:387
2.1.	Jumlah gedung sekolah	412	413	399	399	381
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	146.952	147.458	148.573	148.205	147.594

Sumber : Dinas Pendidikan, 2024

Tabel II.44
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	7	8	15	5.044	1:336	3	3	6	2.546	1:424
Benowo	14	5	19	7.459	1:392	4	2	6	3.832	1:638
Bubutan	28	2	30	9.257	1:308	8	0	8	4.708	1:588
Bulak	12	6	18	4.771	1:265	4	2	6	2.461	1:410
Dukuh Pakis	21	1	22	5.694	1:259	11	1	12	2.786	1:232
Gayungan	14	1	15	4.135	1:276	5	1	6	2.144	1:357
Genteng	20	1	21	5.420	1:258	11	0	11	2.802	1:255
Gubeng	24	5	29	11.826	1:408	13	0	13	6.120	1:471
Gununganyar	15	1	16	6.105	1:381	9	1	10	2.965	1:296
Jambangan	7	5	12	5.466	1:455	6	3	9	2.682	1:298
Karangpilang	12	3	15	7.162	1:477	8	0	8	3.479	1:435
Kenjeran	18	21	39	19.316	1:495	12	7	19	9.541	1:502
Krembangan	31	7	38	11.449	1:301	17	2	19	5.799	1:305
Lakarsantri	23	5	28	6.255	1:223	11	2	13	3.223	1:248
Mulyorejo	24	0	24	8.022	1:334	15	0	15	4.012	1:267
Pabean Cantian	14	4	18	7.175	1:399	5	0	5	3.749	1:750
Pakal	15	6	21	6.188	1:295	7	3	10	3.142	1:314
Rungkut	24	5	29	11.899	1:410	10	2	12	5.761	1:480
Sambikerep	16	6	22	6.587	1:299	15	4	19	3.311	1:174
Sawahan	41	0	41	18.843	1:459	13	1	14	9.696	1:692
Semampir	34	28	62	19.730	1:318	15	10	25	9.801	1:392
Simokerto	18	6	24	9.113	1:380	9	3	12	4.485	1:374
Sukolilo	32	1	33	11.056	1:335	16	2	18	5.505	1:305
Sukomanunggal	27	1	28	10.201	1:364	15	2	17	4.963	1:292
Tambaksari	36	10	46	21.477	1:467	17	3	20	10.984	1:549
Tandes	21	10	31	9.158	1:295	12	2	14	4.775	1:341
Tegalsari	29	2	31	9.241	1:298	8	0	8	4.722	1:590
Tenggilis Mejoyo	18	1	19	5.520	1:290	7	0	7	2.828	1:404
Wiyung	16	1	17	7.060	1:415	10	0	10	3.469	1:347
Wonocolo	17	2	19	7.595	1:340	8	1	9	3.891	1:432
Wonokromo	33	8	41	14.005	1:341	18	2	20	7.412	1:371

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah baik di jenjang SD dan di jenjang SMP semakin meningkat di setiap tahunnya. Namun jika dilihat rasio ketersediaan

sekolah, ada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Lakarsantri dengan nilai rasio sebesar 1:223, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Kenjeran dengan nilai rasio sebesar 1:495. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Sambikerep memiliki rasio tertinggi yaitu 1:174 dan Kecamatan Pabean Cantian merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:750.

Kecamatan yang rasio ketersediaan sekolahnya tinggi menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya rendah perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan tahun 2023 terdapat 367 sekolah SMP/sederajat yang telah terakreditasi, terdiri dari 234 sekolah yang terakreditasi A, 120 sekolah terakreditasi B dan terdapat 13 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/sederajat terdapat 802 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 515 sekolah yang terakreditasi A, 251 sekolah terakreditasi B dan 36 sekolah SD/MI yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2023, terdapat 17 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 13 lembaga, dan sebanyak 4 lembaga sisanya belum terakreditasi. Fakta bahwa masih adanya sekolah di jenjang SD maupun SMP yang terakreditasi C, kemudian masih adanya lembaga kursus/pelatihan yang belum terakreditasi ini penting untuk diperbaiki kembali guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan untuk menjawab tantangan global seperti saat ini.

Di samping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2022 dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 1.742 peserta, sebanyak 441 peserta mengikuti ujian dengan tingkat kelulusan 100%. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 2.369 peserta, sebanyak 801 peserta mengikuti ujian dengan tingkat kelulusan 100%. Dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 4.854 peserta, sebanyak 3.012 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya lulus.

2.1.3.1.1.6 Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel II.45
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Guru SD/MI	1:19	1:24	1:23	1:23	1:23
1.1.	Guru SD/MI	13.798	12.806	13.725	13.340	14.024
1.2.	Murid SD/MI	310.283	312.873	317.885	313.505	321.128
2.	Rasio Guru SMP/MTs	1:19	1:23	1:23	1:25	1:22
2.1.	Guru SMP/MTs	6.887	6.250	6.862	6.512	7.346
2.2.	Murid SMP/MTs	134.215	143.329	156.083	160.764	163.134

Sumber : Dinas Pendidikan, 2024

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.46
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2023

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	4	0	6	0	0	115	20	0	145
SD	28	1	26	3	3	3.078	481	1	3.621
SMP	0	1	2	5	1	1.074	359	1	1.443
Total	32	2	34	8	4	4.267	860	2	5.209

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Tabel II.47
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2023

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	605	34	86	40	5	3.911	135	0	4.816
SD	168	8	37	23	12	8.655	410	5	9.318
SMP	20	2	3	14	4	4.556	451	3	5.053
Total	793	44	126	77	21	17.122	996	8	19.187

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Pada tabel jumlah guru di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah pengajar yang belum memenuhi kesesuaian akademik, sehingga masih sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas para pengajar baik PNS maupun Non PNS di jenjang pendidikan TK, SD, maupun SMP.

Tabel II.48
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2023

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SD	3.003	2.816	5.819	3.749	9.318	13.067	746	6.502	7.248
2	SMP	1.328	1.818	3.429	1.521	5.053	6.574	193	3.235	3.428
Jumlah		**4.331**	**4.947**	**9.709**	**5.270**	**14.371**	**19.641**	**939**	**9.737**	**10.676**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa masih ada 7.248 guru SD/MI/setara dan 3.428 guru SMP/MTs/setara yang belum sertifikasi. Hal ini disebabkan banyaknya guru non PNS yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi mengingat terbatasnya kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat dan syarat guru yang diajukan untuk sertifikasi adalah guru PNS.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan AHH, salah satunya melalui penanganan terhadap penderita

penyakit menular dan tidak menular yang dapat dilihat pada tabel berikut. Meski semua penderita telah ditangani, namun tingginya jumlah penderita dari tahun ke tahun, utamanya penyakit hipertensi dan diabetes melitus, serta penyakit menular covid-19, menunjukkan masih diperlukannya perbaikan di bidang pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Data penderita penyakit menular dan tidak menular selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.49
Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular
Tahun 2019 – 2023

No	Penyakit	2019	2020	2021	2022	2023
1.	TBC	7.950	4.151	4.628	8.218	9.198
2.	COVID-19	N/A	18.164	67.073*	77.739	4.580
3.	HIV/AIDS	1.343	786	749	828	1.260
4.	Kusta	97	47	45	91	93
5.	DBD	277	73	111	195	191
6.	Hipertensi	720.378*	724.582*	737.258	740.719	761.441
7.	Diabetes Melitus	94.076	94.624	96.279	96.773	113.970

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024
*Keterangan: *) dihitung berdasarkan estimasi*

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan UHH, melakukan berbagai upaya, yang salah satunya melalui layanan cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.50
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	4	154	154	154	153
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	4	154	154	154	153
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Kejadian Luar Biasa tahun 2020 dan 2021 adalah pandemi COVID-19 yang terjadi di 154 kelurahan. Sedangkan Kejadian Luar Biasa pada tahun 2023 adalah kasus Demam Berdarah, HIV serta penyakit menular lainnya yang terjadi di 153 kelurahan. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sesuai Perubahan RPJMD

Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2022-2026, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi kurang dari 20 jam.

Untuk kasus Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021, 31 Kecamatan di kota Surabaya telah membentuk Kampung Tangguh Wani Covid-19 di tiap RW-nya sebagai upaya untuk mendukung program Pemerintah dalam pencegahan persebaran Covid-19. Data Kampung Tangguh bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.51
Daftar Kampung Tangguh Covid-19 Kota Surabaya 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kampung Tangguh
1	Asemrowo	17
2	Benowo	26
3	Bubutan	44
4	Bulak	21
5	Dukuh Pakis	31
6	Gayungan	28
7	Genteng	51
8	Gubeng	51
9	Gunung Anyar	29
10	Jambangan	26
11	Karangpilang	29
12	Kenjeran	37
13	Krembangan	43
14	Lakarsantri	29
15	Mulyorejo	52
16	Pakal	26
17	Pabean Cantian	52
18	Rungkut	74
19	Sambikerep	31
20	Sawahan	68
21	Simokerto	48
22	Semampir	49
23	Sukolilo	67
24	Sukomanunggal	36
25	Tambaksari	73
26	Tandes	51
27	Tegalsari	48
29	Tenggilis Mejoyo	25

No	Kecamatan	Jumlah Kampung Tangguh
29	Wiyung	34
30	Wonocolo	44
31	Wonokromo	58

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, 2023

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m^2/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase rumah sehat dapat dilihat pada gambar di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

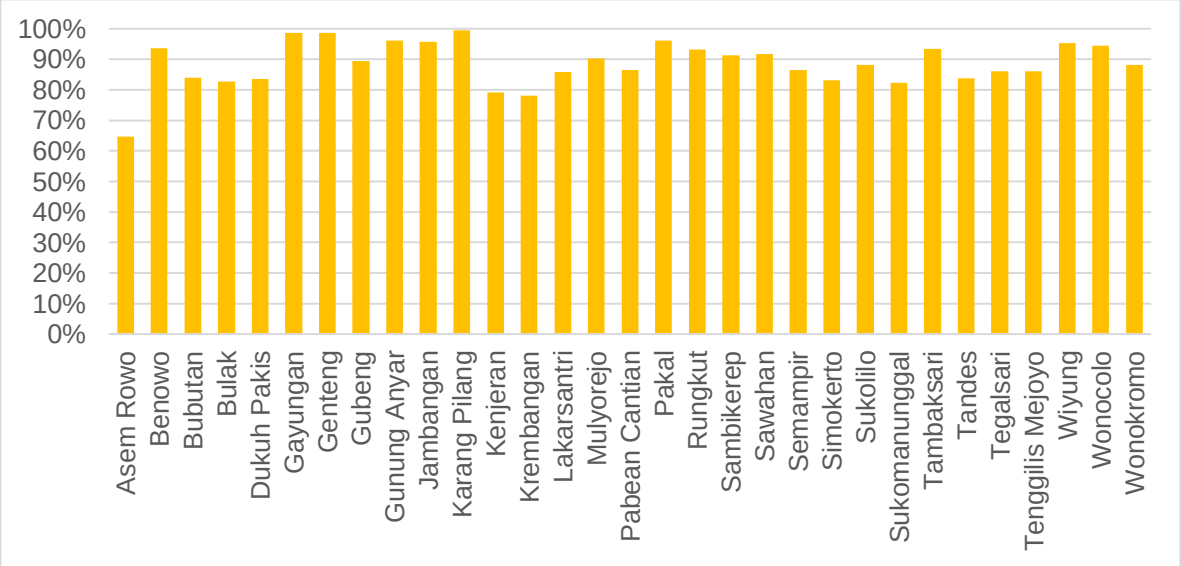

Gambar II.13
Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya 2023
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2024

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2023 seluruh kelurahan memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.52
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	154	154	153
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	154	154	153
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Tabel II.53
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	42.783	35.657	42.100	42.019	41.893
2	Jumlah sasaran ibu nifas	44.252	43.904	42.164	42.014	41.885
3	Persentase (persen)	96,68	81,22	99,85	100,01	100,02

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Tabel II.54
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar	40.813	40.448	42.248	41.931	37.349
2	Jumlah sasaran bayi	41.646	42.034	42.708	41.901	41.180
3	Persentase (persen)	98,00	96,23	98,92	100,1	90,70

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

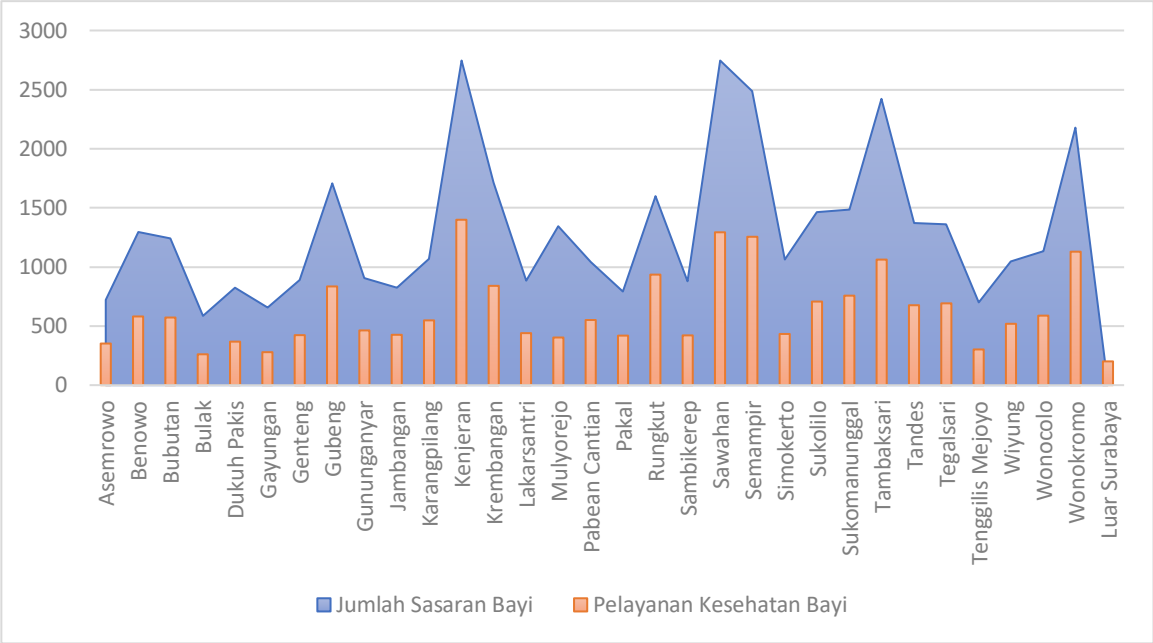

Gambar II.14
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan 2023
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2024

Pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling banyak sesuai gambar di atas adalah di Kecamatan Kenjeran. Sedangkan pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling sedikit ada di Kecamatan Bulak.

Tabel II.55
Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	242	196	148	123	63
2	Jumlah balita gizi buruk	242	196	148	123	63
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Sejak tahun 2018 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita di wilayahnya masing-masing. Di tahun 2019 dan 2020 jumlah posyandu balita sebanyak 2.776 dan 2.764. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah posyandu balita sebanyak 2.734, dan pada tahun 2022 jumlah posyandu sebanyak 2.731. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 2.682 posyandu. Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.56
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah posyandu	2.776	2.764	2.734	2.731	2.682
2	Jumlah sasaran balita	209.706	207.881	208.175	206.810	205.688
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	13,37	13,30	13,1	13,2	13,04

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2023

Dari data tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1.000 penduduk berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2023, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 22 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 58 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2023 sejumlah 3.009.286 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 47.766 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya belum mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.57
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah puskesmas	63	63	63	63	63
2	Jumlah klinik	286	348	358	442	352
3	Jumlah pustu	59	59	59	59	58

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif

dan rehabilitatif. Data rumah sakit di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.58
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286
2.	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	4	5	5	5	5
3.	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	4	4	3	3	3
4.	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7	7
5.	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2	2
6.	Rumah Sakit Swasta	43	42	43	43	43
Jumlah Rumah Sakit (Terakreditasi)		**59 (N/A)**	**59 (N/A)**	**60 (N/A)**	**60 (56)**	**60 (59)**
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		**0,0191**	**0,0187**	**0,0209**	**0,0209**	**0,0199**

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2019, jumlah dokter sebanyak 2.093 orang, dengan rasio 0,66 per 1000 penduduk. Pada tahun 2020, jumlah dokter sebanyak 2.066 orang, dengan rasio 1,44 per 1000 penduduk. Pada Tahun 2021 , jumlah dokter sebanyak 7.484, dengan rasio 2,52 per 1000 penduduk. Sedangkan pada Tahun 2022 , jumlah dokter sebanyak 8.158, dengan rasio 2,73 per 1000 penduduk. Kemudian pada tahun 2023, jumlah dokter sebanyak 8.826, dengan rasio 2,95 per 1000 penduduk. Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kota Surabaya masih belum mencukupi. Selain kecukupan kuantitas SDM Kesehatan, kualitas SDM Kesehatan juga mutlak diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.59
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	2.987.863
2	Jumlah dokter	2.093	1.561	7.484	8.158	8.826
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,66	0,53	2,52	2,73	2,95

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2023

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Pencapaian SPM di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.60
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Instansi	2019	2020	2021	2022	2023
IKM RSUD Bhakti Dharma Husada	86,43	88,76	79,89	87,46	93,67
IKM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	88,80	83,48	88,85	87,49	91,89
SPM RSUD Bhakti Dharma Husada	77,98	81,55	86,39	86,87	92,59
SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	83,67	82,83	84,85	91,57	86,87

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Dari tabel pencapaian nilai IKM dan SPM di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie di atas, dapat dinilai masih tergolong baik, namun cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya proses renovasi gedung yang menghambat pelayanan kesehatan. Meski begitu, tentu hal ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 terdapat 16 puskesmas telah dilakukan akreditasi di antaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu, Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih, Puskesmas Pegirian, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Tenggilis, Puskesmas Putat Jaya, Puskesmas Wonokromo dan Puskesmas Dukuh Kupang. Sampai dengan akhir tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian akreditasi di semua puskesmas. Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna. Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.15
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2023

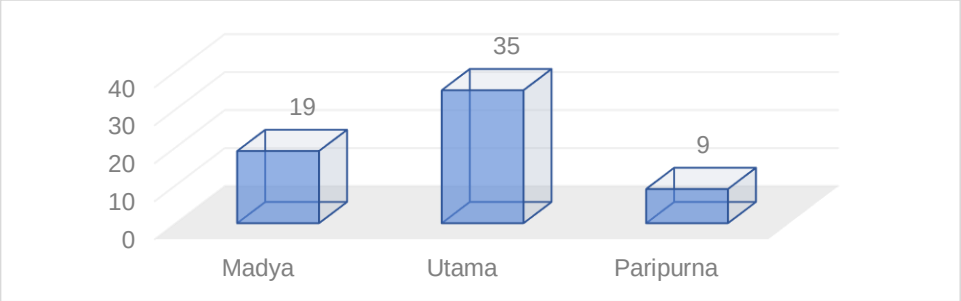

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024 diolah

Selain peningkatan mutu, aksesibilitas pelayanan kesehatan, juga diupayakan melalui pemberian jaminan kesehatan, terutama kepada warga miskin. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2019 telah ditetapkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan survei yang dilakukan secara berkala untuk memperbarui data tersebut. Pada tahun 2019 terdata sebanyak 799.540 orang MBR dan lebih dari 80 persennya telah mendapatkan jaminan kesehatan. Kemudian di tahun 2020, jumlah MBR diperbarui menjadi 822.105 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatan MBR naik menjadi 92,55 persen. Lalu di tahun 2021, cakupan jaminan kesehatan untuk MBR mengalami penurunan menjadi 69,80 persen, meski jumlah data MBR juga kembali dilakukan pembaruan menjadi 1.566.307 orang. Kemudian di tahun 2022, berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022, tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin, istilah MBR diperbarui menjadi anggota keluarga miskin (gakin), yakni 219.427 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin meningkat menjadi 100 persen. Dan di akhir tahun 2023 jumlah anggota keluarga miskin kembali diperbarui menjadi 193.786 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatannya tetap 100 persen. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota untuk menjamin akses hidup sehat bagi penduduknya. Selengkapnya tentang data perkembangan cakupan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.61
Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019*	2020*	2021*	2022	2023
1	Jumlah anggota keluarga miskin	799.540	822.105	1.566.307	219.427	193.786

No	Uraian	2019*	2020*	2021*	2022	2023
2	Jumlah anggota keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	672.998	760.882	1.093.374	219.427	193.786
3	Persentase anggota keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (%)	84,17	92,55	69,80	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2023

**)Data 2019-2021 merupakan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*

Dalam rangka mencapai Bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan), Pemerintah Kota Surabaya terus berusaha meningkatkan capaian kelurahan yang bebas BABS. Peningkatan yang terjadi, dari tahun 2017 sebanyak 35 persen atau sejumlah 54 kelurahan, hingga tahun 2023 telah seluruhnya atau sejumlah 153 kelurahan bebas BABS. Permasalahan yang paling sering ditemui adalah banyaknya rumah yang berada pada tanah ilegal dan tidak adanya lahan yang tersedia untuk dilakukan pembangunan jamban sehat sehingga sulit untuk dilakukan intervensi dalam memperoleh bantuan baik dari pemerintah dan/atau swasta.

Pelayanan kesehatan juga dilakukan untuk menjamin makanan olahan yang dijual di masyarakat memenuhi syarat kebersihan (higienis sanitasi). Hasil pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.62
Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah TPM	1.834	1.846	1.797	2.369	43
2	Jumlah TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	1.380	1.408	1.532	2.104	43
3	Persentase (%)	75,25	76,27	85,25	88,81	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2024

Adapun capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2020 hingga 2023 pada tabel di bawah ini, secara umum, mengalami peningkatan. Meski demikian, masih terdapat kendala terkait masih adanya balita yang tidak terlaporkan pelayanan kesehatannya dikarenakan domisili penduduk ber-KTP Surabaya tersebut yang berada di luar Kota Surabaya. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi dan himbauan bagi warga tersebut untuk menyesuaikan lokasi dokumen administrasi kependudukannya dengan domisili tetapnya saat ini.

Tabel II.63
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2023

No	Nama Indikator	2021			2022			2023		
		Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	44.174	43.901	99,38	44.012	44.182	100,39	43.881	44.057	100,40
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	42.164	42.008	99,63	42.014	42.019	100,01	41.885	41.893	100,02
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	40.158	41.967	104,50	40.012	41.930	104,79	39.891	41.804	104,80
4	Pelayanan kesehatan balita	165.467	151.550	91,59	164.909	160.663	97,43	164.508	164.023	99,71
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	333.018	358.605	107,68	331.551	415.739	125,39	330.258	398.238	120,58
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	2.042.911	1.804.530	88,33	2.042.586	2.081.701	101,91	2.041.119	2.155.512	105,60
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	292.030	316.075	108,23	303.328	313.027	103,20	314.690	326.681	103,81
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	737.254	625.943	84,90	740.719	708.121	95,60	744.436	761.441	102,28
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	96.280	103.819	107,83	96.732	106.860	110,47	104.362	113.970	109,21
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	5.545	4.605	83,05	7.320	6.226	85,05	5.580	5.766	103,33
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	54.422	68.623	126,09	60.804	83.577	137,45	63.879	89.139	139,15
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	49.084	52.598	107,16	51.607	61.726	119,61	52.741	66.001	125,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2024

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2021, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,54 yakni jalan Kota Surabaya sepanjang 1.697,39 kilometer melayani jumlah penduduk sebesar 2.970.952 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottleneck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada tahun 2019, jalan kondisi baik sepanjang 1.683,11 km dari total panjang jalan 1.694,38 km, dengan persentase 99,33%. Sedangkan pada tahun 2020, jalan kondisi baik juga meningkat menjadi 1.686,88 km dari total panjang jalan 1.697,39 km, dengan persentase 99,38%. Pada tahun 2021, akibat pandemi covid-19 tidak ada penambahan panjang jalan dari tahun 2020. Namun pada tahun 2022 hingga 2023, penambahan jalan baru dapat terlaksana dengan persentase jalan kondisi baik berturut-turut sebesar 99,54% dan 99,55%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas jalan melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.64
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	1.683,11	1.686,88	1.686,88	1.692,19	1.693,42
Panjang jalan (km)	1.694,38	1.697,39	1.697,39	1.699,95	1.701,12
Persentase jalan kondisi baik (%)	99,33	99,38	99,38	99,54	99,55

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2023

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, bidang pekerjaan umum juga dituntut untuk menyediakan layanan air bersih, sanitasi, dan air minum layak di kawasan permukiman penduduk. Untuk meningkatkan pelayanan sanitasi, diperlukan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan air bersih, kerja sama dilakukan dengan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

Meskipun pada akses berkelanjutan terhadap air bersih mengalami penurunan pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan oleh banyaknya pembangunan kawasan permukiman penduduk yang status pengelolaannya masih milik pengembang, sehingga PDAM Surya Sembada tidak dapat melakukan intervensi lebih jauh. Program Sanitasi dan Kebersihan Kota Surabaya juga melibatkan pengembangan fasilitas umum seperti toilet umum yang bersih dan mudah diakses terutama di area publik. Upaya untuk meningkatkan sanitasi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih nyaman bagi warga kota, serta mengurangi risiko penyakit disebabkan sanitasi yang buruk. Data cakupan penduduk dengan akses air bersih, sanitasi dan air minum layak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.65
Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	98,10%	98,27%	98,27%	99,62%	100%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak	99,48%	99,12%	99,12%	99,85%	100%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih	99,90%	99,12%	99,39%	99,67%	100%

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan PDAM Surya Sembada, 2024

Adapun pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kota Surabaya Tahun 2023 sebesar 100% dengan rincian Jenis Layanan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 100% dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik sebesar 100%. Secara umum, Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil mengupayakan pemenuhan kebutuhan dan mutu minimal layanan di bidang urusan Pekerjaan Umum. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian terhadap aspek mutu yaitu 1) kuantitas kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan pemenuhan kebutuhan jaringan perpipaan air minum, serta 2) adanya Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) juga telah terpenuhi 100%.

2.1.3.1.3.2 Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan melalui integrasi RTRW dengan rencana induk dan rencana-rencana sektoral lainnya.

Rencana induk sektoral mutlak dibutuhkan untuk menjawab perkembangan kota yang pesat dan dinamis. Sepanjang periode 2016-2023, rencana induk yang telah disusun, beserta kebutuhan rencana induk yang masih diperlukan untuk disusun ke depannya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.66
Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2023

Uraian	Tahun Disusun
1. Rencana Induk Air Minum	2015
2. Rencana Induk Kereta Api	2015
3. Rencana Induk Pelabuhan	2015
4. Rencana induk Bandara	2015
5. Masterplan Permakaman	2016
6. Masterplan RTH	2016
7. Masterplan Permukiman (RP3KP)	2016
8. Masterplan Sarpras Kebakaran	2016
9. Masterplan Drainase	2017
10. Masterplan Air Limbah	2018
11. Masterplan Transportasi	2019
12. Masterplan RPPLH	2020
13. Masterplan Energi	2021
14. Masterplan Persampahan	*(belum disusun)*
15. Masterplan Industri	*(belum disusun)*
16. Strategi Sanitasi Kota	2019
17. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	2023
18. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	2015
19. Rencana Induk Sistem Drainase Lingkungan di Perkotaan	*(belum disusun)*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2024

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan

rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS (*Geographical Information System*) dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan *Surabaya Single Window* (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.67
IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Tinggal	5.723	5.783	6.615	5.983	5.687
2	Non Rumah Tinggal	1.944	1.807	1.572	1.616	1.881
3	Reklame	454	436	101	105	53
Total		8.121	8.026	8.288	3.238	7.568

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2023

Tabel II.68
Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah bangunan yang dikenakan sanksi administratif	9 persil	401 persil	412 persil	150 persil	62 persil

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2023

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfataan ruang kota dapat diindikasikan dengan jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan izin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana-prasarananya kurang. Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/433/436.1.2/2019 tentang Hasil Penanganan Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya, bahwa total luas penanganan kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 145,89 Ha (nol kumuh).

Dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan kegiatan “Dandan Omah” yaitu perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat Kota Surabaya. Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022, kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah menjadi layak huni, sehat dan aman dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, keswadayaan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan kegiatan pembangunan berdasarkan partisipasi warga (*community-based development*), yang pelaksanaan kegiatannya dioptimalkan melalui pemberdayaan warga setempat. Perbaikan rumah tidak layak huni ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yaang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dan pendampingan secara berkala oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR), Kelurahan dan Dinas dalam upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan perbaikan rutilahu. Sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan karena masih terdapat beberapa rumah yang masih perlu diklarifikasi legalitasnya. Mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terdapat total kebutuhan rumah tidak layak huni (rutilahu) sejumlah 9.772 unit dan telah dikerjakan sampai dengan tahun 2023 sejumlah 5.990 unit, sehingga sisa yang belum dikerjakan yaitu 3.782 unit dan akan dikerjakan di tahun selanjutnya. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.69
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.090	1.551	2.174	3.103	5.990
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	4.550	4.550	4.550	4.550	9.772
Persentase perbaikan rumah tidak layak huni (%)	23,96	34,09	47,78	68,20	61,30

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2024

Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang sehat adalah melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang kurang atau *backlog* di Kota Surabaya pada tahun 2023 adalah sebanyak 87.259 unit, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya ketersediaan lahan. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi *backlog* adalah mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung program rehabilitasi, peremajaan dan permukiman kembali serta pengadaan PSU perumahan dan kawasan permukiman; mengembangkan skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam menyediakan rumah susun milik atau sewa yang layak dan terjangkau, khususnya bagi keluarga miskin; dan mengaplikasikan prinsip subsidi silang untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan gedung Rusunawa melalui skema hunian campuran yang mana Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) baru tidak hanya dapat dihuni oleh masyarakat miskin saja, melainkan juga masyarakat berpenghasilan menengah bawah bahkan masyarakat berpenghasilan menengah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.70
Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemohon Rusun	2.105	1.141	1.234	363	10

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2023

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi, hingga pada tahun 2023,

penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 109 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 23 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.71
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan / Kecamatan	Tipe	Blok	Luas Lahan (m^2)	Keterangan
1	URIP SUMOHARJO	Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun 1983 (APBN)
2	DUPAK BANGUNREJO	Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun 1992 (APBN)
3	SOMBO	Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto	18	8	± 41.044	Dibangun 1993 (APBN)
		Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto	24	2		Dibangun 2020 (APBD)
4	PENJARINGANSARI	Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	18	3	± 32.350	Dibangun 1995 (APBN)
		Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	21	6		Dibangun 2003 (APBN)
		Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap III)	24	2		Dibangun 2009 (APBN)
		Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap IV)	24	2		Dibangun 2018 (APBD)
5	WARUGUNUNG	Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang	21	10	± 29.845	Dibangun 1996 (APBD)
6	WONOREJO	Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	21	2	± 5.466	Dibangun 2003 (APBN)
		Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	21	4		Dibangun 2006 (APBN)
7	TANAH MERAH	Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap I)	21	4	± 28.810	Dibangun 2007 (APBN)
		Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap II)	24	4		Dibangun 2009 (APBN)
8	RANDU	Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun 2007 (APBN)
9	GRUDO	Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	PESAPEN	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011 (APBN)
11	JAMBANGAN I	Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	24	1	± 2.977	Dibangun 2011 (APBN)
12	JAMBANGAN II	Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	24	1		Dibangun 2017 (APBD)
13	SIWALANKERTO	Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap I)	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
		Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap II)	24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14	ROMOKALISARI	Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap I)	24	4	± 25.000	Dibangun 2012 (APBN)
		Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap II)	24	4		Dibangun 2013 (APBN)
		Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap III)	24	2		Dibangun 2014 (APBN)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan / Kecamatan	Tipe	Blok	Luas Lahan (m^2)	Keterangan
15	BANDAREJO	Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
16	DUKUH MENANGGAL	Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap I)	24	2	± 14.388	Dibangun 2016 (APBN)
		Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap II)	36	2		Dibangun 2020 (APBN)
17	KEPUTIH	Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap I)	36	4	± 258.140	Dibangun 2016 (APBN)
		Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap II)	36	2		Dibangun 2017 (APBN)
		Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap III)	36	2		Dibangun 2018 (APBN)
18	TAMBAK WEDI	Jalan Tambak Wedi, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	36	2	±	Dibangun 2017 (APBN)
19	TAMBAK WEDI II	Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	36	2	±	Dibangun 2020 (APBN)
20	INDRAPURA	Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian	24	2	± 5.466	Dibangun 2019 (APBD)
21	BABAT JERAWAT	Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal	24	2	± 4.129	Dibangun 2019 (APBD)
22	GUNUNGANYAR SAWAH	Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar	24	2	± 14.150	Dibangun 2019 (APBD)
		Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar (Blok B)	36	2		Dibangun 2020 (APBD)
23	PAKAL BENOWO	Jalan Kauman Baru, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal	24	2	± 29.900	Dibangun 2022 (APBD)
JUMLAH				**109**		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2024

Pada tahun 2023, Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebesar 100% melalui pemenuhan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, keberhasilan ini juga ditunjukkan dengan cakupan penduduk yang yang memperoleh fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebesar 100%, serta cakupan pemenuhan penyediaan rumah layak huni juga tercapai 100%.

2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Pemerintah Kota berkomitmen tinggi dalam perwujudan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat. Dalam hal ini, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman dan ketertiban umum menjadi salah satu pengendalian dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. Melalui beberapa indikator kinerja dalam setiap layanannya, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan kualitas sarana dan prasarana layanan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penegakan peraturan daerah, pelaksanaan penanganan unjuk rasa serta pelaksanaan operasi kawasan yang memiliki potensi tinggi akan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum pada Tabel II.37, upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja SPM, antara lain:

1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani sebanyak 14.818 orang melalui aktivitas penegakan perda sesuai SOP menggunakan sarana prasarana serta SDM Satpol PP sesuai standar.
2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan cara melakukan identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana kepada sejumlah 56.328 orang dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kepada 820 orang.
3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kepada sebanyak 324 orang. Aktivitas yang mendukung pelayanan tersebut antara lain, pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana, melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat

bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, respon cepat penyakit KLB dan/atau wabah zoonosis, serta pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana.

4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, antara lain melalui layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak sebanyak 38 orang. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan sebanyak 8 orang.

2.1.3.1.5.1 Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.72
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	781	781	783	978	978
2	Jumlah penduduk	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,47	2,62	2,63	3,27	3,25

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Tabel II.73
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	16.382	5.274	4.124	10.736	13.102
2	Jumlah pelanggaran K3	16.382	5.274	4.124	13.261	16.420

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100	100	100	80,96	79,79

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2019, sebanyak 16.382 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen, dan pada tahun 2020, jumlah pelanggaran menurun menjadi 5.274 dan seluruhnya telah diselesaikan 100 persen. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah pelanggaran menurun menjadi 4.124 dan seluruhnya telah diselesaikan 100 persen. Pada tahun 2022, jumlah pelanggaran sebanyak 13.261 dan diselesaikan 80,96 persen. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah pelanggaran sebanyak 16.420 dan dapat diselesaikan sebanyak 79,79 persen. Khusus di tahun 2020, jumlah pelanggaran terbesar adalah pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19, yakni sebanyak 829 pelanggar.

Tabel II.74
Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa	227	215	297	403	309
2	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa yang Mengarah Kejadian Anarkis	13	10	8	5	7

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis. Pada tahun 2019, hanya ada 13 kejadian anarkis dari 227 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk tahun 2020, hanya ada 10 kejadian anarkis dari 215 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2021, ada 8 kejadian anarkis dari 297 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan di tahun 2022 ada 5 kejadian anarkis dari 403 jumlah kejadian. Pada tahun 2023, terdapat 7 kejadian anarkis dari 309 kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Satpol PP di Kota Surabaya.

2.1.3.1.5.2 Penanganan Bencana Kebakaran

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II.75
Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2019 – 2023

No	Penyebab	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hubungan Listrik	75	157	200	219	95
2	Api Terbuka	186	220	246	212	247
3	Api Mekanis	0	0	0	0	0
4	Dalam Penyelidikan	254	241	257	158	429
5	Tidak Ada Keterangan	0	0	2	0	0
Total		515	617	705	589	771

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2023

Penyebab kebakaran di tahun 2023, dari total 771 kejadian, sebagian besarnya karena kelalaian manusia. Dari sumber api terbuka sebanyak 247 kejadian, sebagian besar disebabkan karena kelalaian dalam meninggalkan sisa pembakaran sampah atau terdapat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Sedangkan dari sumber listrik sebanyak 95 kejadian, sebagian besarnya karena hubungan arus pendek.

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal, termasuk operasional Command Center 112 yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan segala kejadian kedaruratan sehingga pelayanan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Sampai dengan akhir tahun 2023, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.76
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit	515	617	705	589	771
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	515	617	705	589	771
3	Persentase penanganan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2023

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit direncanakan dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan waktu respon yang telah ditentukan.

Tabel II.77
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	86	86	86	86	86
2	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	21	21	21	21	21
3	Jumlah Penduduk	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286
4	Cakupan Pelayanan WMK	94%	95,6%	95,6%	95,6%	96%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2024

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.

d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Bentuk penanganan yang diterima PPKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PPKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa,dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PPKS hasil penertiban.

Tabel II.78
Penanganan PPKS Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPKS yang ada	77.808	73.176	62.243	64.933	54.916
2	Jumlah PPKS yang ditangani	46.765	44.435	31.516	34.180	25.562
3	Persentase PPKS yang ditangani (%)	60,10	60,72	50,63	52,63	46,55

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2023

Secara umum, jumlah PPKS menurun dari tahun 2019 sebanyak 77.808 orang menjadi 73.176 orang pada tahun 2020 dan menjadi 62.243 orang di tahun 2021. Persentase PPKS yang ditangani sepanjang tahun 2019-2020 semakin meningkat yaitu dari 60,10 persen menjadi 60,72 persen dan pada tahun 2021 sebesar 50,63 persen. Sedangkan tahun 2022 jumlah PPKS yang ada sejumlah 64.933 orang dan persentase PPKS yang ditangani sebesar 52,63 persen. Kemudian pada tahun 2023 jumlah PPKS yang ada sejumlah 54.916 orang dan

persentase PPKS yang ditangani sebesar 46,55 persen. PPKS yang ditangani yang dimaksud yakni PPKS yang ada di UPTD yang dimiliki Dinas Sosial dan mendapat penanganan mulai dari permakanan hingga penanganan sosial lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PPKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PPKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PPKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Selain PPKS dari penduduk Kota Surabaya sebagaimana tabel di atas, di Kota Surabaya juga terdapat PPKS dari penduduk non Surabaya. Mayoritas PPKS ini merupakan pendatang dari luar Kota Surabaya. Banyaknya pendatang ini rentan menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah PPKS dari penduduk non Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.79
PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PPKS non Surabaya	669	1.137	1.252	1.409	419

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PPKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PPKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PPKS. PPKS merupakan komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja Pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peran aktif PPKS dapat dilihat dari berkurangnya PPKS. Jumlah PSKS aktif bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.80
PSKS Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Total PSKS	1.551	1.090	1.159	3.855	2.160
PSKS Aktif	1.016	645	996	2.443	1.747

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Kota Surabaya telah mencapai keberhasilan signifikan dalam bidang sosial pada tahun 2023, dengan semua target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang urusan sosial mencapai 100%. Pencapaian ini mencakup berbagai program rehabilitasi sosial dasar yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan

di luar panti sosial. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial berhasil menjangkau seluruh penyandang disabilitas terlantar, memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial juga mencapai target 100%, memastikan bahwa semua anak terlantar menerima perawatan, pendidikan, dan dukungan sosial yang memadai. Upaya rehabilitasi bagi lanjut usia terlantar di luar panti sosial juga tidak ketinggalan, dengan pencapaian 100% yang menunjukkan bahwa setiap lanjut usia terlantar mendapatkan perhatian dan pelayanan yang layak. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, juga telah berhasil sepenuhnya, memastikan bahwa mereka menerima bantuan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan layanan sosial yang inklusif dan merata, serta memastikan bahwa semua warganya, terutama yang berada dalam kondisi paling rentan, mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar.

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat hingga tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja, yaitu sebesar 1.520.041 pada tahun 2018 menjadi 1.566.846 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 1.582.564. Pada tahun 2021 jumlah penduduk angkatan kerja usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan menjadi 1.572.888 hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah penduduk angkatan kerja usia 15 tahun ke atas meningkat menjadi 1.643.314. Sementara itu, pada tahun 2023, rasio angkatan kerja berada pada angka sekitar 0,67 dengan komposisi jumlah angkatan kerja 15 tahun keatas sebanyak 1.569.714 jiwa. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.81
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.566.846	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.283.861	2.325.749	2.337.229	2.348.058	2.330.830
3	Rasio angkatan kerja	0,69	0,68	0,67	0,69	0,67

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2024

2.1.3.2.1.1 Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.82
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	235	347	283	120	176
2	Jumlah Sengketa Selesai	112	125	117	120	116
3	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	10.592	10.592
4	Rasio sengketa	1,84	2,72	2,21	1,13	1,66

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2024

Pada tahun 2019 terdapat 235 sengketa, yang sebagian besarnya dipicu oleh kenaikan UMK yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan adanya hak-hak pekerja yang belum terpenuhi. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat tajam menjadi 347 kasus, hal ini dipicu oleh gelombang PHK yang cukup besar dikarenakan banyak perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 jumlah sengketa mengalami penurunan menjadi sebesar 283 sengketa. Kemudian pada tahun 2022 jumlah sengketa menurun kembali menjadi 120 sengketa. Namun pada akhir tahun 2023 jumlah sengketa meningkat menjadi 176 sengketa, dengan 116 di antaranya dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama.

2.1.3.2.1.2 Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA maupun SMK, sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan

tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.83
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2023
1	Tidak/belum pernah sekolah	13.829
2	Tidak/belum tamat SD	
3	Sekolah Dasar	
4	SMP	16.187
5	SMA	63.306
6	SMK	
7	Diploma I/II/III/Akademi	12.798
8	Universitas	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 9.235 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 6.065 orang. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 4.507 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 2.570 orang. Pada tahun 2021, pencari kerja yang difasilitasi sebesar 5.132 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 2.815 orang. Sedangkan pada tahun 2021, pencari kerja yang difasilitasi sebesar 7.291 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 7.291 orang. Kemudian pada akhir tahun 2023 pencari kerja yang difasilitasi sebesar 7.760 dan semuanya dapat difasilitasi. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.84
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	6.065	2.570	2.815	7.291	7.760
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	9.235	4.507	5.132	7.291	7.760

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2023

Penurunan jumlah pencari kerja yang difasilitasi maupun ditempatkan disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang tahun 2020 dan juga di tahun 2021 yang berdampak pada turunnya permintaan tenaga kerja dari perusahaan. Diharapkan kegiatan fasilitasi yang terus dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bisa efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Salah satu hal yang masih menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya adalah pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Data peserta yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai pasar kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.85
Penempatan Kerja Peserta Peningkatan Kompetensi Sesuai Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai pasar kerja	1085	126	441	732	1.117

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2024

2.1.3.2.1.3 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.86
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	7.801	9.335	12.746	8.573	7.560
2	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.780	10.592	10.592

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (%)	61,03	73,03	99,73	80,94	71,37

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2024

Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 7.801 perusahaan atau 61,03% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2020, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 9.335 perusahaan atau 73,03% dari total perusahaan yang terdaftar. Selanjutnya tahun 2021 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 12.780 perusahaan atau 99,73% dari total perusahaan yang terdaftar. Untuk tahun 2022 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menurun menjadi 8.573 perusahaan atau 80,94% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menurun menjadi 7.560 perusahaan atau 71,37% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender sejatinya dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, nilai IPG cenderung meningkat dikarenakan keterkaitannya dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya yang semakin meningkat. Sedangkan nilai IDG dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena IDG menitikberatkan pada partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sejauh ini, di Kota Surabaya, pembentukan nilai IDG lebih banyak dipengaruhi faktor alami dari kemampuan individu. Karenanya masih diperlukan strategi-strategi khusus dalam percepatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi dan politik.

Tabel II.87
Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,68	93,70	93,90	94,21	94,36
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,88	82,86	82,82	83,20	85,29

Sumber : BPS Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, 2024

2.1.3.2.2.1 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2019 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 13.342 orang dan di tahun 2020, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 13.433 orang. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 14.903 orang. Kemudian di tahun 2022 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 14.828 orang. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.88
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pekerja Perempuan	617.965	600.845	312.338	632.797	629.533
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	13.342	13.433	14.903	14.828	15.660
3	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota (%)	2,16	2,24	4,77	2,34	2,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia & Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2023

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2.1.3.2.2.2 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2019, sebesar 617.965 orang atau 94,05% dari jumlah angkatan kerja perempuan dan menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 600.845 orang. Kemudian di tahun 2021 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 312.338 orang atau 53,43%. Salah satu penyebabnya adalah dampak pandemi Covid-19 yang

memaksa banyak perusahaan untuk melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya sebesar 632.797 orang atau 95,38%. Kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 2023, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun sekitar 1,42% menjadi 93,96%. Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.89
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	657.039	655.746	584.465	663.404	669.988
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	617.965	600.845	312.338	632.797	629.533
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	94,05	91,63	53,43	95,38	93,96

Sumber : BPS dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2024

2.1.3.2.2.3 Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.90
KDRT Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Tangga	974.740	957.188	974.298	974.298	1.011.183
2	Jumlah KDRT	10	13	34	75	103
3	Rasio KDRT	1:97.474	1:73.630	1:28.656	1:12.991	1:9.817

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang terlaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada tabel di atas jumlah KDRT pada tahun 2019 sebanyak 10 kejadian. Akan tetapi di tahun 2020 hingga tahun 2023 jumlah kasusnya cenderung meningkat. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat di antaranya adalah PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), Pusat Krisis Berbasis

Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.91
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	342	235	138	192	264
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	342	235	138	192	264
3	Penyelesaian pengaduan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan di *shelter* (rumah aman). Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penguatan terhadap peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak sebagai salah satu upaya untuk menekan angka permasalahan perempuan dan anak. Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak pada tahun 2019-2023 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.92
Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak (lembaga)	62	63	70	75	662

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2020 terdapat 31 kecamatan sudah responsif gender dan 119 kelurahan ramah anak. Sampai dengan tahun 2023, seluruh 31 kecamatan sudah responsif gender dan 153 kelurahan ramah anak. Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pengarusutamaan gender adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan usia produktif. Jumlah perempuan usia produktif yang mengikuti pemberdayaan ekonomi tahun 2019–2023 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.93
Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perempuan mengikuti pemberdayaan ekonomi	197	0	50	14	68

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 310,95 kg/kapita/th. Selanjutnya pada tahun 2020 menjadi 216,55 kg/kapita/tahun, kemudian pada tahun 2021 menjadi 248,28 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 210,75 kg/kapita/tahun, dan pada tahun 2023 sebesar 115,93 kg/kapita/tahun. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dari daerah penghasil pangan menurun. Namun jika angka ketersediaan pangan utama ini dibandingkan dengan angka kebutuhan pangan, yakni sebesar 63,36 kg/kapita/tahun, nilai rasionya masih lebih besar dari angka 1 (satu). Nilai ini menggambarkan bahwa status ketersediaan pangan utama (beras) di Kota Surabaya masih aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kota.

Tabel II.94
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	982.443.190	643.307.412	737.617.453	629.700.570	348.867.348
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	310,95	216,55	248,28	210,75	115,93

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dispendukcapil, 2024

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat disampaikan bahwa Pola Pangan Harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2019 mencapai 96,1. Sedangkan pada tahun 2020 PPH masyarakat Kota Surabaya meningkat menjadi 96,25. Namun kemudian pada tahun 2021 kembali menurun menjadi menjadi 94,48 dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 94,16. Hal ini dikarenakan ada pergeseran pola konsumsi pangan kota Surabaya dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) menjadi sumber protein. Sedangkan pada akhir tahun 2023, PPH masyarakat Kota Surabaya meningkat menjadi 94,34.

Tabel II.95
Pola Pangan Harapan Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pola Pangan Harapan	96,1	96,25	94,48	94,16	94,34

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Selain permasalahan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keamanan pangan segar yang dikonsumsi oleh masyarakat Surabaya. Setiap tahun dilakukan survei dan pengambilan sampel pangan segar untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman. Hasil pengambilan sampel pangan segar Kota Surabaya pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.96
Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sampel pangan segar	2.003	2.060	2.061	1.500	1.668
Jumlah sampel tidak memenuhi syarat keamanan	210	44	149	60	12

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pangan antara lain perlunya perluasan kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, hal ini harus dilakukan untuk mendukung stabilitas harga pangan di Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota besar dengan karakter pasokan pangan yang sangat bergantung kepada daerah penghasil pangan.

Selanjutnya adalah optimalisasi potensi *urban farming* di masyarakat sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan. Dengan keterbatasan lahan di perkotaan, Pemerintah Kota tetap berupaya untuk meningkatkan produksi pangan di dalam kota sendiri. Memanfaatkan teknologi *urban farming* dan juga memanfaatkan semaksimal mungkin lahan-lahan aset pemerintah yang tidak produktif serta menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi.

Selanjutnya masalah bahan pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan. Permasalahan ini akan terus diawasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan segar yang aman. Selain itu juga pemerintah akan terus melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar dan melakukan pemeriksaan sampel secara acak dan rutin setiap bulannya.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui

pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada tahun 2019, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,36 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Selanjutnya pada tahun 2020, tanah aset yang bersertifikat selain jalan dan saluran telah mencapai 32,07 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran. Sedangkan untuk tahun 2021 tanah aset selain jalan dan saluran yang bersertifikat telah mencapai 37,34 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran. Pada tahun 2022, tanah aset selain jalan dan saluran yang bersertifikat telah mencapai 47,78 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran, serta terus mengalami peningkatan menjadi 56,12 persen di akhir tahun 2023. Pengamanan administrasi berupa pencatatan/inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi dua, yaitu Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur dan Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur. Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk jalan, jembatan, dan saluran. Selanjutnya, Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk makam, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain.

Tabel II.97
Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur (Ha)	6,92	8,37	7,93	1,92	1,74

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur (Ha)	14,65	2,75	1,41	0,78	0,82

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2023

Realisasi luasan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur bersifat fluktuatif karena menyesuaikan skala prioritas pembangunan kota. Sedangkan realisasi luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur pada tahun 2019 sangat besar, yang disebabkan adanya percepatan proses untuk pembebasan lahan seperti di eks lokalisasi, TPA Benowo, Pamurbaya dan Waru Gunung. Sedangkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan karena adanya lokasi rencana yang masih dalam proses verifikasi dan validasi status tanah sehingga berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan Berikut adalah tabel luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur dan luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur.

Tabel II.98
Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019*	2020**	2021**	2022***	2023***
Jumlah Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	1.323	1.130	1.410	1.804	2.119
Total aset pemerintah	6.497	3.523	3.776	3.776	3.776
Persentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat (%)	20,36	32,07	37,34	47,78	56,12

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024
*Total aset 2018-2019 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya
**Total aset 2020-2021 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT
*** Total aset 2022-2023 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh BPKAD

Sementara itu, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat sampai dengan tahun 2019 luas lahan aset yang bersertifikat sebanyak 16.337.822 m^2. Sedangkan sampai dengan tahun 2020, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat mencapai 16.798.212 m^2 dan sampai dengan tahun 2021 luas lahan aset yang bersertifikat meningkat menjadi 17.763.111 m^2. Kemudian pada tahun 2022, luas lahan aset yang bersertifikat kembali bertambah menjadi seluas 19.372.065 m^2 dan sampai dengan akhir tahun 2023 bertambah lagi menjadi seluas 20.247.010 m^2 lahan aset yang bersertifikat. Data luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.99
Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019*	2020*8	2021**	2022***	2023***
Akumulasi Luas Lahan Aset Bersertifikat (m^2)	16.337.822	16.798.212	17.763.111	19.372.065	20.247.010
Jumlah Luas Wilayah Aset (m^2)	64.552.306	37.824.454	37.778.702	37.778.702	37.778.702
Presentase Luas Lahan Aset Bersertifikat (%)	25,31	44,41	47,02	51,28	53,59

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024
*Total aset 2018-2019 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya
**Total aset 2020-2021 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT
*** Total aset 2022-2023 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh BPKAD

Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat ke depannya, terdapat peningkatan aktivitas pergerakan orang atau barang di Kota Surabaya. Aktivitas pergerakan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Untuk mendorong pengembangan perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Surabaya, diperlukan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur bagi kepentingan umum seperti pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat, Jalan Lingkar Luar Timur, Kebun Raya Mangrove di Wonorejo dan Gunung Anyar, TPA Benowo, serta Makam Waru Gunung.

Untuk mewujudkan pembangunan sarana prasarana bagi kepentingan umum tersebut, perlu dilakukan pengadaan tanah. Hingga akhir tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya telah membebaskan lahan seluas 12,3 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan lahan seluas 11,8 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur. Untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan Jalan Lingkar Luar Timur tidak terlepas dari kontribusi pengembang yang terkena rencana pembangunan tersebut. Adapun untuk RTH Kebun Raya Mangrove Wonorejo luas yang telah dibebaskan sebesar 2,08 Ha dan untuk Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar sebesar 2,24 Ha. Lahan yang telah dibebaskan hingga akhir tahun 2020 untuk sarana kebersihan TPA Benowo seluas 22,6 Ha. Adapun lahan yang telah dibebaskan untuk lokasi makam Waru Gunung seluas 3,31 Ha.

Tabel II.100
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	30	33	44	30	30
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	6	2	28	16	30

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3.	Persentase Kasus yang Diselesaikan (%)	20	6,06	63,64	53,33	100

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2.1.3.2.5.1 Persampahan

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya pada tahun 2019 sebanyak 2.224,27 ton/hari, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 2.222,62 ton/hari. Pada tahun 2021 sebanyak 1.752,50 ton/hari, sedangkan pada tahun 2022 produksi sampah mencapai 1.792,72 ton/hari dan pada tahun 2023 volume produksi sampah adalah 1.800,04 ton/hari, sebagaimana rekap data pada tabel berikut.

Tabel II.101
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume Produksi Sampah (ton/hari)	2.224,27	2.222,62	1.752,50	1.792,72	1.800,04
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.969,87	1.958,41	1.585,26	1.601	1.536,76

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan

perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Data terkait jumlah TPS tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.102
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286
2	Jumlah TPS (unit)	187	187	190	190	190
3	Jumlah TPS 3R	4	9	9	9	9

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Perlunya pengetahuan tentang peduli lingkungan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan pada peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan jika dilihat pada tabel di bawah naik setiap tahunnya. Namun tetap diperlukan adanya peningkatan kerjasama dalam pengembangan pemasaran daur ulang maupun peningkatan gerakan terhadap pengelolaan sampah plastik.

Tabel II.103
Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan kebersihan	1.028	1.082	909	1.113

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

2.1.3.2.5.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota. Selain itu, RTH memiliki berbagai manfaat antara lain meningkatkan kualitas lingkungan hidup (pengurangan polusi); mendukung perekonomian daerah (penciptaan lapangan kerja); mendorong pembangunan berkelanjutan (penggunaan

energi terbarukan); dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (peningkatan taraf hidup).

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2018 mencapai 21,88 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.321,93 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2019 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,91 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.329,82 Ha. Sedangkan pada tahun 2020 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,99 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.356,96 Ha. Untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 22,00 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.359,77 Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.104
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2019 – 2023

No.	Jenis RTH Publik	2019	2020	2021	2022	2023
1	RTH makam	283,53	283,53	284,95	284,95	284,95
2	RTH lapangan dan stadion	359,86	360,58	361,08	361,08	361,08
3	RTH telaga/ waduk/ boezem	196,29	198,23	198,23	198,23	198,23
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.570,33
6	RTH hutan	57,55	66,03	66,03	66,03	66,03
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.672,75	1.672,75	1.672,75	1.673,65	1.673,65
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		**7.345,82**	**7.356,96**	**7.358,87**	**7.359,77**	**7.359,77**
Luas Kota Surabaya		**33.451**	**33.451**	**33.451**	**33.451**	**33.592**
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		**21,96**	**21,99**	**22,00**	**22,00**	**21,91**

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2023

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih perlu untuk dimanfaatkan atau difungsikan secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi/peran serta masyarakat dan pihak

swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai *stakeholder*.

2.1.3.2.5.3 Kepatuhan Usaha Terhadap Aspek Lingkungan

Keberadaan industri dan tempat usaha yang semakin pesat di kota Surabaya berkaitan dengan adanya pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, saluran drainase, polusi udara, dan kebisingan. Di Kota Surabaya kasus dugaan pencemaran lingkungan masih terjadi. Pada tahun 2019, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 59 kasus, dan sebanyak 59 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 43 kasus, dan sebanyak 43 kasus dapat ditangani. Pada tahun 2021, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 51 kasus, dan sebanyak 51 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 44 kasus, dan sebanyak 44 kasus dapat ditangani. Kemudian pada tahun 2023, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 24 kasus, dan sebanyak 24 kasus dapat ditangani.

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.105
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah permasalahan lingkungan	59	43	51	44	51
2	Jumlah permasalahan lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Kota	59	43	51	44	51
3	Persentase permasalahan lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami, lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Berikut merupakan ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan di kota Surabaya. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa dengan terus meningkatnya ketaatan/kepatuhan para pengusaha terhadap aspek lingkungan serta

meningkatnya kualitas sistem pengawasan dampak lingkungan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.106
Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	200	200	200	254	241
Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi aspek administrasi dan teknis	200	180	190	129	122

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

2.1.3.2.5.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (dan Persampahan)

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, *mall*, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penaatan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perizinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian dan sistem kontrol bersama.

Pembuangan limbah domestik dan industri di sepanjang Kali Surabaya mengakibatkan kondisi fisik sungai mengalami pencemaran yang akan semakin berat. Keberadaan Kali Surabaya penting bagi keberlangsungan perekonomian dan

kelangsungan hidup bagi masyarakat, industri, dan niaga di sekitar bantaran kali. Selain itu Kali Surabaya menjadi sumber air baku PDAM Surabaya dan konsumen PDAM Surabaya bergantung pada kondisi kualitas air Kali Surabaya. Menurunnya kualitas air baku Kali Surabaya menyebabkan menurunnya kualitas air bersih dan menurunnya kualitas jaringan pipa distribusi air bersih yang mengakibatkan rawan kebocoran air, panjang pipa PDAM di Kota Surabaya adalah 5.812,62 km^2.

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan. Perhitungan IKLH terdiri atas tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Namun pada tahun 2018 terdapat surat edaran Menteri LHK Nomor 5.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2020-2024 dimana komponen IKTL digantikan dengan komponen IKL (Indeks Kualitas Lahan).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah dicapai kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 67,78 masih menggunakan metode lama. Sedangkan nilai IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang telah menggunakan metode baru, masing-masing sebesar 68,29 dan 71,43. Sedangkan di tahun 2022, IKLH Kota Surabaya menggunakan metode baru yang mencapai 55,97, lebih rendah dari capaian IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 69,92 dan 72,42. Kemudian di tahun 2023, IKLH Kota Surabaya mencapai 54,52 dan IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 69,59 dan 72,54. Selengkapnya nilai IKLH Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dalam 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.107
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019 – 2022

Uraian	2019	2020	2021		2022	2023
IKLH Kota Surabaya	61,43	60,96	67,78	N/A*	55,97*	54,52*
IKLH Provinsi Jawa Timur	67,10	67,70	-	68,49*	69,92*	69,59*
IKLH Nasional	66,55	70,27	-	71,45*	72,42*	72,54*

*Sumber data: DLH Surabaya, 2023. *) hasil perhitungan KLHK metode baru*

Kota Surabaya menambahkan indikator persampahan dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup sehingga menjadi Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup dan Persampahan (IKLHS). Berikut merupakan pencapaian IKLHS Kota Surabaya pada tahun 2019-2023.

Tabel II.108
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Indeks	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air (IKA)	57,68	56,05	58,18	57,91	58,50
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,30	90,35	90,28	90,55	86,61
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	42,45	42,63	42,63	42,64	42,65
Indeks Persampahan	75,09	75,84	76,62	82,91	83,79
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	64,97	65,08	65,71	70,82	70,35

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2023

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan;

2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya semakin membaik dari tahun 2019 sampai 2022, di mana pada tahun 2019 IKLHS sebesar 64,97 dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2023 IKLHS telah mencapai 70,35. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas lingkungannya, baik melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang bagus serta manajemen pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau dan pengawasan serta pengendalian dampak lingkungan yang sangat baik. Pada tahun 2022, IKLHS mengalami kenaikan yang signifikan karena salah satu unsur pembentuk nilai KLHS yaitu indeks persampahan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan beroperasinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara optimal terutama di TPA Benowo meliputi PSEL, *Buffer zone*, IPAL, dan penutupan membran pada area *landfill*. Sedangkan pada tahun 2023, IKLHS Kota Surabaya mengalami penurunan karena salah satu unsur pembentuk nilai IKLHS yaitu Indeks Kualitias Udara (IKU) mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya faktor iklim (kemarau panjang), sehingga suhu dan debu meningkat, serta semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan belum disertai penyediaan dan pemanfaatan transportasi umum yang optimal.

2.1.3.2.5.5 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perubahan iklim sebagai perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat dibandingkan adalah definisi perubahan iklim yang diberikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*/UNFCCC). Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang meliputi karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Pada dasarnya, Gas Rumah Kaca diperlukan untuk menjaga kestabilan suhu bumi. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan penebalan atmosfer. Semakin banyak yang terperangkap di atmosfer bumi, menyebabkan kenaikan suhu bumi yang dikenal dengan pemanasan global.

Gas rumah kaca (GRK) adalah gas di atmosfer yang menyerap radiasi infra merah dan juga menentukan suhu atmosfer. Dampak aktivitas manusia terhadap emisi gas rumah kaca ke atmosfer telah meningkat secara signifikan, terutama sejak era pra-industri, meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini menimbulkan masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Ada enam jenis yang dapat digolongkan sebagai gas rumah kaca, yaitu karbondioksida (CO_2), gas metan (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), sulfurheksafluorida (SF_6), perfluorokarbon (PFCS) dan hidrofluorokarbon (HFCS). Selain itu, beberapa gas yang juga dihitung sebagai gas rumah kaca, yaitu karbonmonoksida (CO), nitrogen oksida (NOX), klorofluorokarbon (CFC), dan gas organik volatil non logam. Gas rumah kaca yang paling berkontribusi terhadap gejala pemanasan global adalah CO_2, CH_4, N_2O, NOX, CO, PFC dan SF_6.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Inventarisasi GRK dilakukan melalui pemantauan dan pengumpulan data tentang aktivitas sumber emisi, kemudian melakukan perhitungan emisi dan serapan GRK untuk mendapatkan data *real-time* mengenai tingkat, status, dan tren perubahan emisi GRK dari berbagai sumber emisi dan sarapan, termasuk penyimpanan karbon. Dalam mereferensikan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya, melakukan analisis secara rutin terhadap emisi/serapan gas rumah kaca setiap tahun sejak tahun 2019, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.109
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO_2 *eq*)	630	47.611,15	0	124.601,46	366,67

Sumber: Aksara Bappenas, 2024

2.1.3.2.5.6 Konservasi Energi

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21

bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan *solar cell*, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan. Penerapan teknologi dan pengembangan pemanfaatan energi alternatif terbarukan pada gedung Pemerintah Kota Surabaya antara lain di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) dan area Balai Kota Surabaya, sedangkan pada gedung swasta antara lain Intiland Tower, Esa Sampoerna Center, dan Graha Wonokoyo, sehingga masih diperlukan optimalisasi penerapan teknologi dan pengembangan pemanfaatan energi alternatif terbarukan baik pada sektor pemerintah maupun swasta.

Tabel II.110
Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2019 – 2023

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PJU LED	Unit	19.589	20.598	20.598	96.252	105.846
Solar cell di Sekolah Adiwiyata	Unit	29	29	29	29	29
Solar cell di gedung pemerintah	Lokasi	28	35	40	40	40
Kincir Angin	Unit	8	8	8	8	8
Warning Light (APIL) *Solar Cell*	Unit	18	4	8	21	21
Traffic Light (APIL) Solar Cell	Unit	59	71	77	77	77

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2024

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk melanjutkan upaya konversi dan konservasi energi dengan mendorong pihak swasta atau masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi. Untuk pengusahaan konservasi energi oleh

kegiatan/usaha swasta sudah mulai didorong mulai tahun 2017, dengan 11 kegiatan/usaha yang diaudit di tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2023, setiap tahunnya menambahkan 11 kegiatan/usaha yang telah diaudit penerapan konservasi energinya. Tentunya hal ini masih jauh dari pengawasan yang menyeluruh dikarenakan jumlah kegiatan/usaha yang masih sedikit. Sehingga diharapkan ke depannya dapat meningkat.

Namun, dalam hal pemanfaatan energi terbarukan bagi sektor swasta masih belum mempunyai payung hukum. Karena itu, perlu diciptakan instrumen pendukung di antaranya berupa peraturan daerah dalam rangka mendorong percepatan dimulainya upaya pemanfaatan energi terbarukan ini oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.111
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2019	2.355.489	2.108.476
2020	2.188.680	2.147.337
2021	2.217.423	2.181.345
2022	2.251.947	2.204.168
2023	2.280.865	2.033.593

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2024.

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.112
Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelahiran (berdasarkan data SIAK)	45.248	51.368	75.253	40.012	90.577
2	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	45.248	51.368	75.253	40.012	90.577
3	Jumlah kematian (berdasarkan data SIAK)	45.248	23.212	42.717	30.960	27.503
4	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	45.248	23.212	42.717	30.960	27.503

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024.

Berdasarkan tabel penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) di atas, menunjukkan bahwa seluruh penduduk lahir berdasarkan data SIAK memperoleh akta kelahiran, dimana anak yang dilahirkan di seluruh rumah sakit, puskesmas, dan beberapa bidan di Kota Surabaya (yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) akan otomatis mendapatkan akta kelahiran. Untuk anak yang dilahirkan di luar kota Surabaya dan selain rumah sakit, puskesmas, dan bidan di kota Surabaya, maka akta kelahiran anak tersebut diurus secara pribadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah Kota Surabaya memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan publik di Siola dan mobil pelayanan keliling oleh dispendukcapil yang beroperasi di beberapa titik lokasi, antara lain: di RT, RW, kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan taman kota (tempat publik). Hal yang sama juga berlaku pada penduduk yang meninggal, di mana penduduk meninggal dapat diurus di kantor kelurahan/kecamatan.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2019 adalah 8.483 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 829.725 jiwa. Selanjutnya kepemilikan KIA sampai tahun 2020 yaitu 197.486 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 752.020 jiwa. Kemudian pada tahun 2021 kepemilikan KIA bertambah menjadi 368.802 jiwa, dari 768.210 jiwa (jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun). Sedangkan di tahun 2022, kepemilikan KIA sebesar 419.071 jiwa, atau sebesar 56,94 persen dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun, yakni 735.900 jiwa.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran.

2.1.3.2.7.1 Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Pada tahun 2019, jumlah akseptor KB meningkat sebesar 426.024 atau 80,94 persen. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah akseptor KB juga meningkat sebesar 434.983 atau 82,37 persen. Untuk tahun 2021, jumlah akseptor KB sebesar 429.350 atau 95 persen. Pada tahun 2022, jumlah akseptor KB sebesar 309.150 atau 81,33 persen. Kemudian pada tahun 2023, jumlah akseptor KB sebesar 307.775 atau 83,05 persen. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.113
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	526.329	528.086	527.912	325.405	370.601
2	Jumlah Akseptor KB	426.024	434.983	429.350	309.150	307.775
3	Rasio Akseptor KB (persen)	80,94	82,37	81,33	95	83,05

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2023

Adapun angka *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 415.241 pasangan, Tahun 2017 sebanyak 416.634 pasangan, Tahun 2018 sebanyak 412.170 pasangan, Tahun 2019 sebanyak 416.205 pasangan, dan Tahun 2020 sebanyak 434.983 pasangan. Meski fluktuatif namun terjadi peningkatan yang cukup besar dari tahun 2019 ke tahun 2020. Data mCPR di tahun 2021 adalah sebanyak 435.479 pasangan, sedangkan untuk tahun 2022 angka *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) adalah 303.968 pasangan. Kemudian pada tahun 2023 angka *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) adalah 206.196 pasangan.

Sedangkan angka *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2019. Tahun 2017 mencapai 13,62; Tahun 2018 mencapai 21,98; dan Tahun 2019 mencapai 19,88. Sedangkan data ASFR untuk tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 juga belum dapat disajikan pada *web* resmi BPS Kota Surabaya.

2.1.3.2.7.2 Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil,

suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.114
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	526.329	528.086	527.912	325.405	370.601
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	426.024	434.983	429.350	306.968	307.610
3	Cakupan Peserta KB Aktif	80,94	82,37	81,33	94,31	83,03

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Pada tahun 2019 terdapat 526.329 PUS, dan tahun 2020 terdapat 528.086 dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 434.983. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 527.912 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 429.350. Untuk tahun 2022 terdapat 325.405 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 306.896. Kemudian pada tahun 2023 terdapat 370.601 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 307.610.

Program KB bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan terciptanya keluarga sejahtera. Keberhasilan implementasi program dapat dilihat dari tingkat kepesertaan masyarakat pada program KB. Jika dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi, Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB (*unmet need*), dan Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun semakin menurun dari tahun ke tahun, namun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dimana banyak fasilitas kesehatan yang membatasi layanannya sekaligus banyak peserta KB yang membatasi interaksi dengan orang lain.

Tabel II.115
Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	1.271	712	937	627	371
2	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB	100.576	93.103	98.562	69.610	61.899

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	15	12	14	204	29

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.116
***Total Fertility Rate* (TFR) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Total Fertility Rate (TFR)	1,729	1,705	N/A	1,831	1,70

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2023 (diolah). Catatan: Tahun 2019 merupakan data olahan Susenas.

2.1.3.2.7.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu secara mikro kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Pada tahun 2014, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 193.550 atau 27,18% dari jumlah keluarga sebesar 712.172. Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2019 terdapat 1000 BKB, 233 BKR dan 100 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Sedangkan sampai dengan tahun 2020 terdapat 1000 BKB yang aktif melakukan kegiatan. Untuk tahun 2021 terdapat 675 BKB, 50 BKR, dan 150 BKL yang aktif melakukan kegiatan.

2.1.3.2.7.4 Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 153 lembaga. Selain itu, komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dari seberapa banyak jumlah Keluarga Miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif. Pada tahun 2019, terdapat 190 keluarga miskin yang dilatih untuk melakukan produksi, dan pada tahun 2020 terdapat pendampingan peningkatan produksi untuk 23 keluarga miskin. Pada tahun 2021, dilaksanakan pendampingan untuk 50 keluarga miskin. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dengan terdapatnya dukungan bantuan modal usaha serta adanya pelatihan berusaha melalui program Padat Karya yang dilaksanakan secara sinergi oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan memanfaatkan lahan aset Pemerintah Kota yang belum termanfaatkan, yang diberikan kepada 924 keluarga miskin di tahun 2022, dan 1.499 keluarga miskin pada tahun 2023. Data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.117
Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
Jumlah Keluarga Miskin yang telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	190	23	50	924	1.499

*Sumber: * Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB*
***Dinas Sosial*

Kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan ke arah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki total 15 terminal angkutan darat yang melayani angkutan umum dengan jenis bus dan/atau angkutan kota (angkot). Jumlah angkutan darat di Kota Surabaya sendiri terus menurun sejak tahun tahun 2019 menjadi 7.349 kendaraan, berlanjut ke tahun 2020 menjadi 1.999 kendaraan, lalu tahun 2021 menjadi 1.870 kendaraan, kemudian tahun 2022 ini menjadi 1.051 kendaraan, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 373 kendaraan akibat banyaknya angkutan umum yang dinonaktifkan. Dalam rangka peningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi. Detil jumlah terminal dan angkutan darat di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.118
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus)	2	2	2	2	1
2	Jumlah Terminal Tipe B	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Tipe C	11	11	11	13	13
4	Jumlah Angkutan Darat	7.349	1.999	1.870	1.051	373

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian izin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum. Dalam pemberian izin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.119
Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286
2	Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan	2435	3.257	2.869	563	188
3	Rasio Izin Trayek	0,00077	0,00109	0,00096	0,00019	0,00062

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Pada tahun 2019, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2.435 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.159.481 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar

0,00077. Pada tahun 2020, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.257 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.970.730 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00109. Lalu pada tahun 2021, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2.869 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.970.952. Sedangkan pada tahun 2022 izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 563 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.987.863, sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00019. Kemudian pada tahun 2023 izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 188 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.987.863, sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00062.

Tren penurunan jumlah izin trayek yang dikeluarkan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan angkutan umum yang sudah berakhir masa berlaku pajaknya tidak bisa balik nama kendaraan, dikarenakan persyaratan wajib berbadan usaha. Penyebab berikutnya adalah menurunnya jumlah penumpang angkutan umum setiap tahun diakibatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi serta persaingan dengan kendaraan berbasis aplikasi sehingga membuat pendapatan pemilik dan pengemudi angkutan hanya mencukupi untuk pemenuhan bahan bakar, sehingga pemilik tidak mampu melakukan perawatan kendaraan yang berakibat pada angkutan umum yang tidak laik jalan. Penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek disebabkan juga oleh banyaknya kendaraan taksi dan angkot yang berubah menjadi plat hitam, yakni sebanyak 16 dan 23 kendaraan angkutan umum pada tahun 2018 dan 2019 secara berurutan.

Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek, Pemerintah Kota Surabaya selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dari tahun ke tahun. Salah satunya dengan memperpendek waktu tunggu kendaraan umum di terminal atau halte. Rata-rata waktu tunggu angkutan umum di Kota Surabaya dari tahun ke tahun semakin singkat. Pada tahun 2019 rata-rata waktu tunggu angkutan kota (angkot) adalah 14,14 menit, pada tahun 2020 rata-rata waktu tunggunya menjadi 12,61 menit, pada tahun 2021 turun lagi menjadi 12,61 menit, kemudian pada tahun 2022 rata-rata waktu tunggu angkutan kota (angkot) adalah 12,71 menit, dan pada tahun 2023 rata-rata waktu tunggunya menjadi 14 menit. Sedangkan rata-rata waktu tunggu untuk bus pada tahun 2019 adalah 19,82 menit, kemudian turun menjadi 13 menit pada tahun 2020, begitu juga pada tahun 2021 menjadi 13 menit, lalu pada tahun 2022 rata-rata waktu tunggu untuk bus adalah 18,95 menit, dan pada tahun 2023 rata-rata waktu tunggu untuk bus menjadi 15 menit. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan waktu tunggu angkutan

kota karena banyak masyarakat pengguna angkutan umum eksisting dan kendaraan pribadi beralih menggunakan *trunk* dan *feeder* dikarenakan faktor kenyamanan dan ketepatan waktu. Rata-rata waktu tunggu kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.120
Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata waktu tunggu angkutan kota (menit)	14,14	12,61	12,61	12,71	14
Rata-rata waktu tunggu bus (menit)	19,82	13,00	13	18,95	15

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan pada pengguna angkutan umum, Pemerintah Kota Surabaya juga memperhatikan *load factor* angkutan umum. *Load factor* adalah rasio jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk per satuan waktu tertentu. *Load factor* menggambarkan kebutuhan/*demand* dibandingkan kapasitas yang tersedia. Semakin tinggi angka *load factor* kendaraan umum maka semakin efisien pula biaya operasionalnya. Pada tahun 2018, rata-rata *load factor* angkutan kota (angkot) di Kota Surabaya adalah sebesar 29,60, kemudian naik menjadi 34,37 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai *load factor* angkutan kota mengalami penurunan yang cukup siginifikan akibat menurunnya jumlah penumpang/pengguna angkutan umum karena penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Namun pada tahun 2021 nilai *load factor* angkutan kota mengalami kenaikan menjadi 33,02, begitu juga pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan menjadi 33,92, dan juga pada tahun 2023 naik menjadi 44,86.

Begitupun dengan nilai *load factor* bus, yang menunjukkan tren serupa. Load factor bus pada tahun 2018 berada pada angka 36,14, kemudian naik menjadi 42,06 pada tahun 2019, turun menjadi 40,58 pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 44,65. Jika dibandingkan dengan penurunan *load factor* angkutan kota, penurunan *load factor* bus di tahun 2020 relatif lebih kecil. Sedangkan pada tahun 2022 nilai *load factor* bus adalah 57,45. Kemudian pada tahun 2023 nilai *load factor* bus adalah 55,21. Data terkait *load factor* kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.121
Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Load factor angkutan kota (persen)	34,37	29,69	33,02	33,92	44,86

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Load factor bus (persen)	42,06	40,58	44,65	57,45	55,21

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2019 sebanyak 149.446 kendaraan, sementara sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 141.663 kendaraan. Pada tahun 2021, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 135.905 kendaraan. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 132.719 kendaraan. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah kendaraan umum yang lulus uji menurun menjadi sebanyak 61.394 kendaraan. Penurunan tersebut dikarenakan berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan uji KIR sebagai syarat kendaraan untuk beroperasional di jalan, serta banyak kendaraan angkutan umum yang beroperasi melebihi umur kendaraan. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.122
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah uji kir angkutan umum	47.605	45.582	43.135	43.870	42.770
2	Jumlah kendaraan wajib uji kir	157.768	159.116	151.064	143.605	136.367
3	Jumlah kendaraan yang diuji kir	158.249	147.708	142.532	136.735	126.819
4	Jumlah kendaraan lulus uji kir	149.446	141.663	135.905	132.719	123.196

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 pemasangan baru berjumlah 16.915 unit. Sedangkan pada tahun 2020, pemasangan rambu meningkat menjadi 17.439 unit. Tahun 2021, pemasangan rambu meningkat menjadi 18.140 unit, sedangkan sampai dengan tahun 2022 pemasangan rambu mencapai 19.261 unit. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2023, pemasangan rambu menurun menjadi

903 unit, hal ini dikarenakan sudah tercukupinya rambu pengguna jalan di Kota Surabaya. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II.123
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	16.915	17.439	18.140	19.261	903

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Selain memberikan kenyamanan dan keselamatan transportasi darat Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemasangan dan pemeliharaan peralatan informasi cuaca (*Weather Information Display*) yang dapat digunakan oleh nelayan-nelayan di pesisir Kota Surabaya sebagai pertimbangan ketika akan berlayar. Peralatan tersebut telah bekerja sama dengan BMKG untuk memberikan data cuaca secara riil yang bertujuan untuk menunjang keselamatan kepada nelayan. Pemasangan peralatan informasi cuaca (*Weather Information Display*) telah dilaksanakan pada tahun 2018 dipasang sejumlah 3 unit, kemudian pada tahun 2019 sejumlah 3 unit lagi sehingga menjadi 6 unit dan sampai dengan akhir tahun 2023 jumlahnya masih tetap 6 unit. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pelatihan keselamatan kepada nelayan agar tetap menjaga keselamatan ketika berlayar.

Tabel II.124
Pemasangan *Weather Information Display* Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemasangan *Weather Information Display*	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keselamatan perlintasan sebidang karena kondisi rel kereta api di Kota Surabaya akan menjadi jalur ganda (*Double Track*) secara keseluruhan yang akan meningkatkan frekuensi jadwal dari kereta api. Tahun 2018, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemeliharaan dan operasional perlintasan sebidang pada lokasi Margorejo, Tandes (1 pos), dan A. Yani - Royal Plaza. Pada tahun 2019, bertambah 2 lokasi perlintasan yaitu Ketintang dan Singapur. Pada tahun 2022 bertambah 1 lokasi lagi yaitu Pakal. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pelatihan keselamatan kepada operator perlintasan sebidang serta masyarakat agar tetap memperhatikan keselamatan di perlintasan sebidang.

Tabel II.125
Operasional Perlintasan Sebidang Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Lokasi Perlintasan Sebidang yang dioperasikan	5	5	5	6	6

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah jaringan fiber optik (FO) yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi HT (*handy talkie*) pada tiap SKPD. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Surabaya memiliki jaringan fiber optik (FO) sebanyak 224,08 kilometer dan alat komunikasi HT sebanyak 2.653 unit. Demikian juga pada tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya memiliki jaringan fiber optik (FO) sepanjang 237,67 kilometer dan alat komunikasi HT sebanyak 2.753 unit. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya memiliki jaringan fiber optik (FO) sepanjang 248,84 kilometer, dan alat komunikasi HT sebanyak 2.838 unit. Sedangkan pada tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya memiliki jaringan fiber optik (FO) sepanjang 285,93 kilometer, dan jumlah alat komunikasi HT yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.938 unit. Kemudian pada tahun 2023 Pemerintah Kota Surabaya memiliki jaringan fiber optik (FO) sepanjang 285,93 kilometer, dan jumlah alat komunikasi HT yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.978 unit. Selain menggunakan alat komunikasi berupa HT (*handy talkie*), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II.126
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Alat Komunikasi HT (unit)	2.653	2.753	2.838	2.938	2.978
Jaringan Fiber Optik (kilometer)	224,08	237,67	248,84	285,93	285,93

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Pemerintah Kota Surabaya sejak awal telah memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat *http://www.surabaya.go.id*. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga

melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain menggunakan website resmi milik Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan aplikasi/sistem pelayanan perijinan sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perijinan. Sedangkan pada tahun 2018 hingga akhir tahun 2023, setiap tahunnya terdapat 10 sistem informasi pelayanan perizinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perizinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.127
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daring Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	10	10	10	10	10
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perizinan	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melaui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.10.1 Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2019 jumlah anggota koperasi mencapai 271.267 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah anggota koperasi turun menjadi 221.968 orang. Namun pada tahun 2021 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan menjadi 256.946 orang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan karena menggunakan sumber data yang berbeda dari tahun sebelumnya yaitu *online data system* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM sehingga jumlah anggota koperasi aktif menjadi 153.809 dengan rincian jenis kelamin laki-laki sejumlah 88.038 orang dan perempuan sejumlah 65.771 orang. Sedangkan pada tahun 2023, jumlahnya menurun menjadi 150.327 orang. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.128
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anggota koperasi	271.267	221.968	256.946	153.809	150.327

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2024

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2019 jumlah koperasi sebanyak 1.784 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.521 koperasi, sedangkan pada tahun 2020, jumlah koperasi mengalami peningkatan menjadi 1.817 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.554 koperasi. Untuk tahun 2021 jumlah koperasi kembali meningkat sebanyak 1.834 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.571 koperasi. Namun pada tahun 2022 jumlah koperasi menurun dalam hal aktif RAT sebanyak 2.048 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 488 koperasi. Kemudian pada tahun 2023 jumlah koperasi yang aktif RAT sebanyak 2.016 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 455 koperasi. Secara rinci persentase koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.129
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koperasi	1.784	1.817	1.834	2.048	2.016
2	Jumlah koperasi aktif	1.521	1.554	1.571	488	455
3	Persen koperasi aktif	85,26	85,52	85,66	23,83	22,57

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2024

Distribusi jumlah koperasi di Tahun 2023 adalah 295 koperasi berjenis koperasi jasa, 1.396 koperasi berjenis koperasi konsumen, 31 koperasi berjenis

koperasi pemasaran, 129 koperasi berjenis koperasi produsen dan 167 koperasi berjenis koperasi simpan pinjam. Distribusi jumlah koperasi di Tahun 2023 adalah 295 koperasi berjenis koperasi jasa, 1.396 koperasi berjenis koperasi konsumen, 31 koperasi berjenis koperasi pemasaran, 129 koperasi berjenis koperasi produsen dan 167 koperasi berjenis koperasi simpan pinjam. Sedangkan jumlah koperasi per jenis usaha di Kota Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.130
Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Angkutan Darat	13	13	13	17	17
Jasa Angkutan Laut	1	1	1	0	0
Jasa Lain-Lain	90	91	105	681	693
KJKS	23	23	23	18	16
Kopinkra	7	7	7	7	7
Kopkar	326	327	328	377	372
Kopma	21	21	21	22	22
Koppas	21	24	24	15	16
Koppontren	22	22	22	23	23
Kopwan	171	171	171	142	142
KPRI	185	185	186	183	182
KSP	107	108	110	114	113
KSU	639	666	665	238	238
KUD	5	5	5	5	5
Pemuda	4	4	4	6	6
Pertanian	4	4	4	5	5
PK 5	33	33	33	26	26
Primkopabri	12	12	12	12	12
Primkopad	18	18	18	18	18
Primkopal	17	17	17	17	17
Primkopau	1	1	1	1	1
Primkoppol	11	11	11	11	11
Primkoptama	30	30	30	30	30
Profesi	18	18	18	26	27
Sekunder	1	1	1	1	1
Nelayan	4	4	4	5	5
Tenaga Kerja Bongkar	-	-	-	2	2
Total	**1.784**	**1.817**	**1.834**	**2.002**	**2.007**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2024

Rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 volume usaha koperasi mencapai 2.128 milyar dari 1.521 koperasi. Sedangkan pada tahun 2020 volume usaha koperasi turun menjadi 1.864 milyar dari

1.554 koperasi dan pada tahun 2021 volume usaha koperasi meningkat menjadi 2.147 milyar dari 1.571 koperasi. Pada tahun 2022 volume usaha koperasi turun menjadi 1.412 milyar karena jumlah koperasi aktif RAT mengalami penurunan menjadi 488 koperasi aktif namun secara rasio meningkat menjadi 2,89. Pada tahun 2023, rasio volume usaha koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 3,12 dengan nilai volume usaha koperasi aktif sebesar 1.419 Milyar dari 455 koperasi aktif ber-RAT. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.131
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi Aktif	1.521	1.554	1.571	488	455
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	2.128	1.864	2.147	1.412	1.419
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif	1,40	1,20	1,37	2,36	3,12

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2024

2.1.3.2.10.2 Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan fasilitasi pemasaran dan kemitraan terhadap 5.363 pelaku usaha mikro dengan berbagai macam intervensi di antaranya pendampingan pengurusan merek 125 usaha mikro, pendampingan sertifikasi halal 100 usaha mikro, pelatihan 62 usaha mikro, fasilitasi kemitraan/kerjasama 136 usaha mikro, fasilitasi pemasaran berupa pameran/bazar/gelar produk 2.188 UMKM, dan pemasaran secara online melalui e-Peken 2.752 usaha mikro. Sedangkan, pada tahun 2023 fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha mikro dilakukan kepada 5.301 pelaku usaha mikro berupa pemberian pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro, pemberian sertifikasi, pemberian surat keterangan pendaftaran merek dan halal, pemasaran secara online melalui e-peken hingga fasilitasi pemasaran pada event-event di Kota Surabaya. Fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha mikro Kota Surabaya yang dilakukan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.132
Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Intervensi	2019	2020	2021	2022	2023
Merek	250	140	200	125	0
Halal	200	70	165	100	0

Intervensi	2019	2020	2021	2022	2023
Pelatihan UMKM	769	88	505	62	100
Fasilitas Kemitraan/Kerjasama	45	187	260	136	70
Pameran/Bazar/Gelar Produk	893	9	346	2.188	431
Pemasaran Online Peken	-	-	-	2.752	N/A
Total	**2.157**	**494**	**1.476**	**5.363**	**5.301**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2024

Dengan upaya tersebut di atas maka sebanyak 5.301 UMKM binaan yang naik kelas sampai dengan akhir Desember 2023 omsetnya mencapai Rp 52.956.901.699. Detil upaya peningkatan UMKM naik kelas tersebut dilakukan dengan:

1. Penguatan produk yang dilakukan melalui fasilitasi pengurusan merek dan sertifikat halal, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas UMKM atas kualitas sebuah produk yang dihasilkan;
2. Peningkatan manajemen kelembagaan melalui pelatihan, yang akan meningkatkan kualitas SDM dan pengetahuan dalam mengelola dan mengembangkan UMKM;
3. Peningkatan permodalan dengan fasilitasi kemitraan/ kerjasama;
4. Peningkatan pemasaran dengan pameran/ bazar/ gelar produk dan pemasaran *online* e-Peken.

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

2.1.3.2.11.1 PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya.

Tabel II.133
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Proyek PMDN	284	466	1.310	63.360	147.254
Jumlah Proyek PMA	95	122	177	340	677
Total	**379**	**588**	**1.487**	**63.700**	**147.931**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Penanaman Modal di Kota Surabaya menunjukkan bahwa investasi di Kota Surabaya pada tahun 2019 tercatat sejumlah 379 proyek. Sedangkan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 588 proyek, dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 1.487 proyek. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 63.700 proyek. Kemudian pada akhir tahun 2023 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 147.931 proyek. Peningkatan signifikan jumlah proyek tersebut di antaranya disebabkan oleh mudahnya perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) dan didukung oleh adanya layanan Klinik Investasi yang diinformasikan dan dilakukan secara masif sebagai komitmen Surabaya Ramah Investasi.

Sedangkan untuk nilai investasi PMA dan PMDN, pada tahun 2019 sebesar Rp19.219,90 Miliar. Sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp22.152,03 Miliar. Di tahun 2021 nilai investasi PMA dan PMDN sebesar Rp29.215,06 Miliar dan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp34.897,81 Miliar dan Rp37.573,89 Miliar.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perizinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.134
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persetujuan (USD Juta)	1.963,39	2.046,22	6.337,45	-	-
1.1	Jumlah Proyek	379	588	31.467	117.580	134.984
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	19.219,90	22.152,03	65.888,88	151.959,88	115.914,68
2	Realisasi (USD Juta)	1.963,39	2.046,22	2.810,02	-	-
2.1	Jumlah Proyek	379	588	1.487	63.700	147.931
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	19.219,90	22.152,03	29.215,06	34.897,81	37.573,89

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang

berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, yang dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel II.135
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PMA/PMDN	353	348	961	30.304	70.817
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	36.626	4.862	13.496	92.707	199.420
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	103,76	13,97	14,04	3,06	2,81

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi investasi, baik dari penanaman PMA dan PMDN, pada tahun 2019 menyerap sebanyak 36.626 tenaga kerja dari 353 proyek, dengan nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 103,76. Untuk tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 13.496 orang dari 961 proyek maka nilai rasio investasi terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 14,04. Tahun 2022 kembali terdapat peningkatan baik jumlah proyek maupun jumlah tenaga kerja yang terserap masing-masing 30.304 proyek dan 92.707 tenaga kerja dengan rasio 3,06. Kemudian pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang terserap kembali meningkat sebanyak 199.420 orang dari 70.817 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 2,81.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka *(outdoor)* maupun tertutup *(indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2019, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 630 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Pada tahun 2020, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi

665 lapangan olahraga. Untuk tahun 2021, jumlah lapangan olahraga tersebut masih sejumlah 665 lapangan olahraga. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 jumlah lapangan olahraga menjadi 618 lapangan olahraga. Rincian jumlah lapangan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.136
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lapangan olahraga	630	665	665	603	618
2	Jumlah penduduk	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286
3	Rasio lapangan olahraga	1 : 5.015	1:4.467	1:4.467	1:4.955	1:4.870

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga secara khusus. Cakupan pembinaan olahraga di Kota Surabaya menyeluruh meliputi semua cabang olahraga prestasi dan induk olahraga rekreasi dan tradisional. Pembinaan olahraga tersebut bersinergi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya dan juga dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Di bawah komite tersebut bernaung cabang-cabang olahraga yang didukung Pemerintah Kota Surabaya, mulai dari kegiatan pembibitan, pelatihan rutin, pelatihan terpusat, pengiriman atlet untuk lomba, penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta memberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang berprestasi. Pembibitan atlet muda dilaksanakan secara professional di cabang olahraga masing-masing. Untuk meningkatkan kompetensi pelatih, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan kegiatan pelatihan untuk pelatih. Hal ini dilakukan agar proses pembibitan atlet terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Pada tahun 2016, nilai persentase atlet yang berprestasi sangat memuaskan yaitu mencapai 95%, dari 847 orang atlet olahraga yang dibina sejumlah 805 orang diantaranya meraih prestasi olahraga ditingkat regional, nasional maupun internasional. Sampai dengan tahun 2019, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 98,04% terdapat 2,852 orang atlet yang dibina dan sejumlah 2,796 orang

diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya pada tahun 2020, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,32%. Pada tahun 2021 tidak ada agenda kejuaraan olahraga dikarenakan pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,16%. Pada tahun 2023, sejumlah 781 orang atlet mendapatkan pembinaan dari pemerintah kota, 689 orang atlet di antaranya berhasil menorehkan prestasi, sehingga nilai persentase atlet yang berprestasi menjadi 88,22%. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya selalu menjadi juara umum di acara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim). Hal ini dapat diraih tidak terlepas dari dukungan dan keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pembangunan olahraga secara menyeluruh.

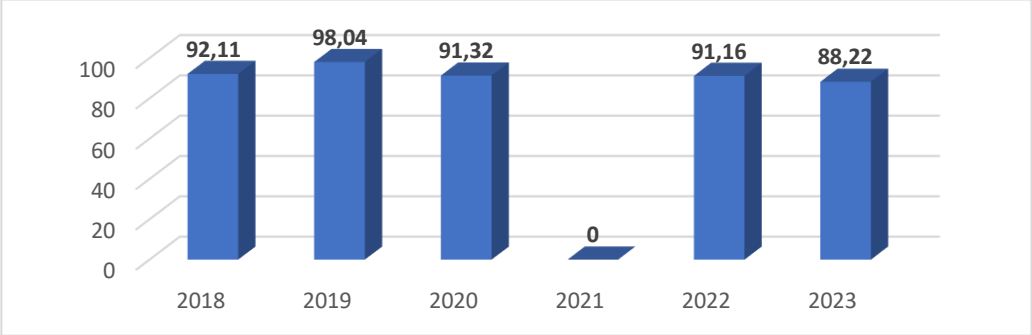

Gambar II.16 Persentase Atlet Berprestasi

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Pada tahun 2019 terdapat sejumlah 1.732 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2020 terdapat sejumlah 799 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Untuk tahun 2021 terdapat sejumlah 1.000 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan terdapat tambahan 170 pemuda yang menjadi kader anti kenakalan remaja di tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah pemuda yang dibina menjadi kader anti kenakalan remaja sebanyak 777 orang. Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program wirausaha bagi pemuda. Pada tahun 2019 terdapat sejumlah 395 pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha. Pada tahun 2020 jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha menurun menjadi 200 pemuda. Pada tahun 2021 jumlah pemuda yang

mendapatkan pelatihan wirausaha meningkat menjadi 282 pemuda. Pada tahun 2022 jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha kembali meningkat menjadi sejumlah 567 pemuda. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 472 pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha. Pelatihan ini juga dilanjutkan dengan fasilitasi magang wirausaha. Pemuda terpilih yang telah mendapatkan pelatihan juga akan ditempatkan di beberapa perusahaan sebelum mereka benar-benar menjadi wirausahawan mandiri.

2.1.3.2.13 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku PDRB Kota Surabaya dan Statistik Sektoral Kota Surabaya sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka.

Tabel II.137
Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Dokumen	2019	2020	2021	2022	2023
1.	PDRB Kota Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada	-
2.	PDRB Kecamatan	Ada	Ada	Ada	-	-
3.	Statistik Sektoral Kota Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Surabaya Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024

Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di Perangkat Daerah masing-masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing Perangkat Daerah, seperti Dinas Sosial terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Sekretariat Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dan sebagainya.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 maupun RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

2.1.3.2.14 Persandian

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Persandian dilaksanakan utamanya untuk menjamin keamanan data dan sistem informasi yang mendukung pelayanan publik, serta seluruh proses pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya secara berkala melakukan pengawasan sistem keamanan informasi untuk melindungi sistem informasi yang ada.

Tabel II.138
Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah serangan	56	240	270
2	Jumlah penanganan serangan	56	240	270
3	Persentase penanganan serangan	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Dalam pelaksanaannya sistem keamanan informasi Kota Surabaya dapat menangani serangan *cyber* dengan perangkat teknologi yang dimiliki, namun seiring perkembangan teknologi sistem keamanan informasi perlu terus ditingkatkan untuk menjaga keamanan infomasi.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.15.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Di sisi lain, banyaknya penyelenggaran festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan *stakeholder* untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.139
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	805	520	4	454	521

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

Tahun 2018, festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya sebanyak 984 festival, dan pada tahun 2019, jumlah festival seni dan budaya menurun menjadi 805 kali karena beberapa festival melakukan kolaborasi menjadi satu festival yang lebih besar. Sedangkan di tahun 2020 penyelenggaraan festival seni dan budaya berkurang drastis menjadi hanya 502 kali. Kemudian pada tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi hanya 4 festival seni dan budaya yang diselenggarakan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 penyelenggaraan festival seni budaya meningkat menjadi 454 kali, dan pada tahun 2023 penyelenggaraan festival seni budaya meningkat menjadi 521 kali. Promosi pelaksanaan festival seni dan budaya di Kota Surabaya dilakukan secara masif, baik di media cetak maupun melalui media elektronik, termasuk di dalamnya berbagai *platform* media sosial, seperti instagram sparklingsurabaya dan *website* tiketwisata.surabaya.go.id.

2.1.3.2.15.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

2.1.3.2.15.3 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di Kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2019 terdapat 277 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2020 terdapat 288 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan. dan sampai dengan tahun 2021 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan. Pada tahun 2022 jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

berkurang menjadi yaitu sejumlah 286 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Hal ini disebabkan oleh terdapat 2 bangunan cagar budaya yang dievaluasi, dimana dari hasil evaluasi status cagar budaya pada bangunan tersebut dicabut. Pada tahun 2023, jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya tetap sejumlah 286 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Saat ini seluruh benda, situs, bangunan dan Kawasan ini dalam kondisi baik. Dalam upaya pelestarian seluruh benda, situs, bangunan dan Kawasan ini rutin diawasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga aktif melakukan revitalisasi kawasan cagar budaya menjadi destinasi wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Adapun kawasan yang sedang direvitalisasi antara lain kawasan kota lama terdiri dari zona eropa, zona pecinan dan zona arab. Dengan adanya revitalisasi ini tentu akan memberikan dampak positif khususnya bagi pemilik bangunan cagar budaya. Tujuan akhir yang akan dituju adalah terlestarikannya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel II.140
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	277	288	288	289	286
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	277	288	288	289	286
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

Karya seni tidak sebatas fenomena keindahan saja, tetapi juga adalah sebuah ekspresi, tepatnya objektifikasi manusia pada ruang dan waktu di mana ia berada. Segala bentuk hasil cipta manusia adalah fakta budaya yang seharusnya dapat dipahami oleh masyarakat luas melalui suatu pagelaran budaya. Kelompok seni yang terdaftar sebanyak 498 pada tahun 2016, yang selanjutnya dilatih dan dibimbing hingga kelompok seni tersebut layak tampil di depan publik. Kelompok seni layak tampil dari tahun 2019 hingga akhir tahun 2023 mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya perkembangan di bidang seni dan minat seni masyarakat di Kota Surabaya. Adapun kelompok seni yang telah dibina dan layak tampil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.141
Jumlah Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok seni layak tampil	399	406	415	423	428
Jumlah kelompok seni belum layak tampil	99	92	92	292	287
Jumlah kelompok seni binaan	498	498	507	715	715

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2024

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan layanan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal yang tersebar secara merata; menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM; menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM; menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota; melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/l*eaflet*, spanduk, *banner, billboard*, media cetak dan elektronik; melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan; melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Perpustakaan di Kota Surabaya milik Pemerintah Kota sampai dengan tahun 2023 berjumlah sama yaitu 2 perpustakaan. Selain itu terdapat 65 Perpustakaan milik non Pemda yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.142
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perpustakaan Milik Pemda	2	2	2	2	2
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	61	61	61	65	65

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Dalam usaha meningkatkan literasi masyarakat Kota Surabaya, selain mengembangkan fasilitas perpustakaannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya juga melakukan pembinaan serta sertifikasi pada tenaga pemustaka di perpustakaan maupun TBM guna peningkatan kapasitas setiap tahunnya. Mulai tahun 2022 hingga 2024 target pemustaka yang ditingkatkan kapasitasnya adalah seluruh tenaga pemustaka tersebut mendapat pembinaan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah tenaga pemustaka yang mendapatkan pembinaan sejumlah 502 orang dengan capaian 100%. Pada tahun 2023, jumlah tenaga pemustaka yang mendapatkan pembinaan berjumlah 506 orang dengan capaian 100%. Dari capaian yang terus meningkat diharapkan pula memberikan dampak peningkatan pelayanan pada perpustakaan.

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Perpustakaan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Keberhasilan pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung layanan baca belum dapat dihitung, namun jumlah kunjungannya tercatat sebanyak 6.715.104 kali, dan meningkat menjadi 7.718.590 kali di tahun 2020. Pada tahun 2021, rata-rata jumlah pengunjung layanan baca tercatat 13.504 orang per bulannya, dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 176.637 orang per bulannya. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling. Peningkatan kunjungan tersebut tidak lepas dari terus bertambahnya koleksi buku yang dimiliki layanan baca milik Pemerintah Kota, yakni sebanyak 448.840 judul dengan 541.781 eksemplar sampai dengan tahun 2023. Jumlah koleksi buku dan kunjungan di layanan baca milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.143
Jumlah Koleksi dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah koleksi buku (eksemplar)	529.151	533.361	537.571	541.781	541.781
Jumlah pengunjung layanan baca per bulan (orang)	N/A	N/A	13.504	87.515	176.637

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Mengacu kepada sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, meningkatkan kualitas pembangunan manusia dilakukan salah satunya dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Dan pada tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan minat dan budaya baca melalui peningkatan kualitas dan kuantitas even literasi, di antaranya Bercerita Surabaya, kegiatan mendongeng siswa SD, kegiatan bedah buku, festival budaya pustaka dan pameran buku.

Barometer keberhasilan perpustakaan adalah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat guna, hal ini sangat dipengaruhi oleh prosedur prosedur didalam perpustakaan tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. Adapun hasil survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2022 adalah 97,5. Survey pelayanan kearsipan ini dilaksanakan secara langsung kepada responden melalu *Google Form.*

Gambar II.17
Nilai Terhadap Pelayanan dan Kemampuan Petugas TBM/Perpusatakaan dalam Membimbing Bibit Penulis dan Pendongeng

2.1.3.2.17 Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Kearsipan salah satunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.144
Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	641	580	583	78	70
2.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	432	531	583	78	70
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	67,39	91,55	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Pada tahun 2019 sebanyak 432 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 531 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan. Pada tahun 2021, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib

sistem tata kearsipan sesuai ketentuan terus meningkat menjadi 583 lembaga. Sedangkan, pada tahun 2022, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan menurun menjadi 78 lembaga. Kemudian pada tahun 2023, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan menurun menjadi 70 lembaga dan persentasenya menjadi 100 persen.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2017, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 473 arsip. Dan di tahun 2018, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 876 arsip. Pada tahun 2019, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 352 arsip. Selanjutnya, pada tahun 2020, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 537 arsip dan pada tahun 2021, jumlah arsip yang diakuisisi sebanyak 175 arsip. Dengan demikian, persentase arsip diakuisi sebesar 139,88% terhadap target 1.725 arsip diakusisi.

2.1.3.3 Urusan Pilihan Pemerintahan

Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.145
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perikanan Laut	7.165,30	8.057,63	7.805,50	8.057,49	8.295,33
2.	Perikanan Tambak	8.504,92	8.442,47	9.054,27	9.349,56	9.508,29
Jumlah		**16.576,83**	**15.670,22**	**16.500,11**	**17.407,05**	**17.803,62**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat untuk jumlah produksi perikanan laut dan tambak mengalami kenaikan di tahun 2022 dan 2023, hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam budidaya perikanan melalui pelatihan, fasilitasi sarana dan pemasaran bagi pembudidaya ikan.

Di sektor perikanan tangkap, selain bergantung kepada kondisi cuaca, hasil tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh kondisi peralatan tangkap yang digunakan oleh nelayan. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk memenuhi sarana perikanan tangkap yang dibutuhkan oleh nelayan, mulai dari perahu, mesin perahu, alat tangkap serta alat pendukung lainnya seperti papan seluncur lumpur, tali, serta senter. Apabila cuaca tidak memungkinkan untuk melaut, nelayan juga diberikan keterampilan untuk pengolahan hasil laut yang dapat dijadikan produk turunan dari hasil tangkapan. Di sektor perikanan budidaya selain bantuan sarana dan prasarana, pembudiya perikanan juga rutin dibekali dengan pelatihan terkait penerapan teknologi tepat guna, agar hasil budidaya dapat maksimal. Masing-masing pembudidaya juga rutin mendapatkan pendampingan oleh penyuluh. Selain itu, Pemerintah Kota juga memfasilitasi pemasaran produk nelayan melalui ePeken.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019, kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya sebanyak 28.827.160 kunjungan dengan perincian sebanyak 1.901.671 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 26.925.489 kunjungan wisatawan nusantara. Kemudian pada tahun 2020, adanya pandemi virus Covid-19, membuat kunjungan wisatawan menurun drastis menjadi sebanyak 10.681.318 kunjungan saja, dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 319.082 dan wisatawan nusantara sebanyak 10.362.236 kunjungan. Pada tahun 2021, kunjungan wisatawan sebanyak 9.335.841 kunjungan dengan perincian sebanyak 100.767 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 9.235.074 kunjungan wisatawan nusantara. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan sebanyak 14.237.215 dengan perincian sebanyak 565.998 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 13.671.217 kunjungan wisatawan nusantara. Sedangkan pada tahun 2023, kunjungan wisatawan sebanyak 17.425.476 dengan perincian sebanyak 1.285.905 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 16.139.571 kunjungan wisatawan nusantara. Dengan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan *multiplier effect* bagi

kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Tabel II.146
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.901.671	319.082	100.767	565.998	1.285.905
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	26.925.489	10.362.236	9.235.074	13.671.217	16.139.571
Jumlah		**28.827.160**	**10.681.318**	**9.335.841**	**14.237.215**	**17.425.476**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, 2024

Pariwisata merupakan integral pembangunan yang semakin dipertimbangkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perkembangan regional, terutama peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian wilayah cukup besar. Hal ini menyebabkan pembangunan pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas, khususnya di Surabaya.

Tabel II.147
Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ODTW yang berhasil dikembangkan	10	11	2	5	6
Jumlah ODTW yang dikelola	14	14	14	14	14

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2024

Pengembangan obyek daya tarik wisata pada tahun 2020 ke tahun 2021 tampak menurun karena pengertian pengembangan lebih spesifik yang semula hanya sebatas adanya penambahan wahana baru di ODTW yang dikelola pemerintah Kota Surabaya, kemudian menjadi ditingkatkan kualitasnya sesuai standar berdasarkan kriteria yang ditetapkan (sapta pesona). Terdapat 10 kampung wisata dan 4 destinasi wisata yang menjadi sasaran. Pada tahun 2021, terdapat 1 kampung dan 1 kawasan yang berhasil dikembangkan memenuhi kriteria sapta pesona, yakni Kampung Lawas Maspati dan Kawasan Tunjungan yang dikenal sekarang dengan Tunjungan Romansa. Pada tahun 2022, terdapat 3 destinasi wisata yang berhasil dikembangkan antara lain, wisata perahu kalimas, kawasan kota lama, serta THP Kenjeran. Pada tahun 2023 terdapat tambahan 1 kampung yang berhasil dikembangkan dengan kriteria sapta pesona yakni kampung wisata peneleh. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 6 destinasi wisata yang berhasil

dikembangkan dengan standar kriteria sapta pesona. 6 destinasi wisata ini juga berhasil menarik kunjungan wisatawan dalam negeri maupun manca negara.

Untuk menggerakan roda perekonomian Kota Surabaya, pemerintah terus menerus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu fokus pembangunan di Kota Surabaya yang memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki perananan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat mengentaskan kemiskinan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya cukup besar, hal ini dapat dilihat dari nilai perolehan pajak hotel pada tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp365.525.262.323 atau 6,33% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 yakni sebesar Rp5.771.818530.453. Nilai perolehan pajak restoran pada tahun 2023 juga tinggi yakni mencapai Rp613.372.251.383 atau 10,63% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023. Selain itu perolehan pajak hiburan pada tahun 2023 juga mencapai Rp76.778.370.378 atau 1,33% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023. Jika digabungkan 3 jenis perolehan pajak ini, nilainya mencapai 18,29% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023.

Pembangunan sektor pariwisata di Kota Surabaya saat ini menggunakan pendekatan kepariwisataan inklusif. Hal itu dituangkan dalam sasaran pembangunan pariwisata tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Tujuan dari sasaran pembangunan pariwisata inklusif yakni meningkatkan usaha lokal dalam perindustrian pariwisata dan meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal.

Sinergitas dalam kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* di Surabaya tentu memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan dan pengembangan objek wisata. Kolaborasi antar *stakeholder* tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Hingga tahun 2022 terjadi peningkatan kesepakatan *stakeholder* di bidang pariwisata Surabaya yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga fokus untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif di Kota Surabaya. Terdapat beberapa program kegiatan yang disiapkan untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya pendampingan, fasilitasi kerjasama, fasilitasi sarana dan prasarana, branding dan promosi serta penyediaan

ruang-ruang kreatif yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Kota Surabaya seperti di Balai Pemuda, *coworking space* (koridor siola) serta di ruang-ruang terbuka kota yang tersebar di seluruh wilayah. *Event-event* pertunjukan hasil produk ekonomi kreatif juga rutin dilaksanakan untuk membantu branding dan promosi produk. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada, pada tahap awal Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan subsektor Film, Animasi, Video, Musik, *Fashion* serta Aplikasi untuk dikembangkan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga membantu memfasilitasi pelaku usaha kreatif untuk berkembang melalui kerja sama antar pihak baik itu pemerintah maupun swasta. Terdapat beberapa kesepakatan di Bidang Pariwisata yang berhasil dilaksanakan, tentunya kerjasama ini sangat berdampak bagi pelaku usaha kreatif.

Tabel II.148
Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Akumulasi jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan	7	7	9	14	22

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2024

2.1.3.3.3 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari produktivitas serta hasil produksi pertanian di Kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.149
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	9.685,21	12.042,85	8.082,50	6.156,69	7.150,88
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	1.750	1.854,90	1.242,8	955,15	1.090,74
3.	Produktivitas (ton/ha)	5,53	6,49	6,51	6,45	6,56

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2024

Pada tabel di bawah ini disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di kota Surabaya dari tahun 2019 – 2023.

Tabel II.150
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	9.685,21	12.042,85	8.076,12	8.156,78	7.150,88
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	109,54	323,86	162,219	154,95	158,35
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	528,10	307,33	N/A	37,48	32,10
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	718,40	855,91	202,8	151,55	480,61
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	2.083,50	3.781,61	6.763,71	10.111,78	9.717,68

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2024

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu padi dan buah, sedangkan produksi sayur dan jagung mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2023 komoditi yang mengalami peningkatan produksi adalah padi, jagung, dan sayur. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana tabel di atas.

Untuk menjamin kualitas dan kesehatan hewan ternak, Pemerintah Kota Surabaya membuka pelayanan untuk pengobatan hewan ternak di Kota Surabaya. Data intervensi pengobatan dan vaksin hewan ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.151
Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ternak (ekor)	47.516	91.609	23.870	21.753	16.381
Jumlah ternak diintervensi (ekor)	43.332	81.398	21.128	19.509	14.666
Persentase ternak yang diintervensi (%)	91,19	88,85	88,51	89,68	89,53

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Di Kota Surabaya, kontribusi sektor pertanian memang relatif kecil, namun demikian sektor ini berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan penduduk dan menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan makanan di Kota Surabaya, sehingga di masa mendatang tetap dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memajukan sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi *urban farming*.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26 persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.152
Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Pasar Modern	2019	2020	2021	2022	2023
1	Supermarket	63	83	83	90	90
2	Minimarket	601	709	709	573	573
3	Departement Store	12	13	13	16	16
4	Mall/Plaza	34	34	34	38	38
Total		**728**	**839**	**839**	**717**	**717**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2024

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (Usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel II.153
Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Tahun				
	2019	2019	2020	2022	2023
1	Pasar Penjaringansari (lanjutan)	-	-	Pasar Sememi	Pasar Kutisari (rehab)
2	Pasar Kutisari (lanjutan)			Gunung Anyar	Pasar Gununganyar (rehab)
3	Pasar Burung Dolly			Pegirian	Pasar Nambangan (rehab)
4	Pasar Loak Gembong (rehab)			Keputih	Pasar Keputih (rehab)
5				Burung Dolly Lanjutan	Pasar Dukh Menanggal (rehab)
6				Jambangan	Pasar Sememi (rehab)
7				Gembong Asih	Pasar Raci (rehab)
8				Penjaringan Sari	Pasar Jambangan (rehab)

No	Tahun				
	2019	2019	2020	2022	2023
9				Dupak	Pasar Rakyat Jambangan (Rehab)
10				Kutisari	Pasar Simo (rehab)
11				Nambangan Lanjutan	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2024

Tabel II.154
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2019 – 2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Selatan	17	17	17	17	17
Timur	22	22	22	22	22
Utara	28	28	28	28	28
Total	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2024

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan izin usaha perdagangan dan industri, yang baru dimulai di tahun 2021 menggunakan OSS-RBA terpusat, sehingga data jumlah usaha menjadi lebih akurat. Sebagaimana pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa jumlah usaha di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel II.155
Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Perusahaan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perdagangan	9.336	13.562	691	1.054	1.054
2	Industri	139	253	208	356	356
Total		**9.475**	**13.815**	**899**	**1.410**	**1.410**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

2.1.3.4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.156
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2019 – 2022

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	A	A
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	73,47	75,13	75,34	80,31	83,92

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Pada tahun 2018, penilaian evaluasi SAKIP untuk Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 70,03 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya selalu mendapatkan predikat kinerja tingkat BB. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan predikat kinerja tingkat A. Meski demikian, nilai evaluasi SAKIP terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada tahun 2021 sebanyak 361 jenis pelayanan, dan 215 jenis pelayanan atau 59,56 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP). Kemudian pada tahun 2022 terdapat sebanyak 215 jenis pelayanan dan 131 jenis pelayanan atau 60,93 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP). Sedangkan pada tahun 2023

terdapat sebanyak 215 jenis pelayanan dan 143 jenis pelayanan (60,93 persen) telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II.157
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah jenis pelayanan	329	329	361	215	215
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	172	182	215	131	143
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP (%)	52,28	55,32	59,56	60,93	66,51

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Sedangkan untuk SOP yang dievaluasi tiap tahun bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.158
SOP Dievaluasi Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah SOP	868	868	906	1.446	1.536
SOP dievaluasi	561	10	68	123	556

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Dari keseluruhan 868 SOP yang ada, 561 di antaranya telah dilakukan evaluasi pada tahun 2019. Selanjutnya di tahun 2020 ada 10 SOP dievaluasi, di tahun 2021 ada 68 SOP yang dievaluasi, dan di tahun 2022 dari 1.446 SOP telah dilakukan evaluasi sebanyak 123 SOP. Sedangkan pada tahun 2023, dari 1.536 SOP telah dilakukan evaluasi sebanyak 556 SOP.

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus melakukan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penyelesaian rancangan produk hukum dan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah ada. Sejak tahun 2018 hingga 2021, setiap tahunnya terdapat 12 produk hukum yang dievaluasi. Sementara itu, produk hukum baru yang diselesaikan tiap tahunnya mencapai 100% terhadap rancangan produk hukum di tahun tersebut. Jumlah keseluruhan produk hukum baru yang bisa diselesaikan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 sebanyak 481 produk hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.159
Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah rancangan produk hukum	75	72	149	155	30
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	75	72	149	155	30

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Selain itu, pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi hal yang penting dalam rangka mendukung pelayanan pada masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Rekap kinerja BUMD Kota Surabaya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.160
Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2019 – 2022

Nama BUMD	2019	2020	2021	2022
PDAM Surya Sembada	WTP	WTP	WTP	WTP
PD Pasar Surya	WDP	WDP	WDP	WDP
PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya	WTP	WTP	WTP	WTP
PD Rumah Potong Hewan	WTP	WDP	WDP	WDP
PT BPR Surya Artha Utama	WTP	WTP	WTP	WTP
PT Surya Karsa Utama	WDP	WDP	TMP	WDP

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya yang kinerjanya belum maksimal. Beberapa BUMD yang telah memiiki kinerja baik yang ditunjukkan dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 antara lain PDAM Surya Sembada, PDTS Kebun Binatang Surabaya, dan PT BPR Surya Artha Utama. Untuk audit kinerja BUMD tahun 2023 masih akan dilakukan di tahun 2024.

2.1.3.4.1.2 Pelayanan Publik

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.161
Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata nilai SKM Pelayanan	82,43	86,05	88,37	90,76	95,82

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Pelaksanaan *survey* kepuasan masyarakat telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit penyelenggara pelayanan adalah unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (31 Kecamatan, 153 Kelurahan, 63 Puskesmas, 2 Rumah Sakit Umum Daerah, PTSP Surabaya Timur, PTSP Surabaya Pusat (Siola), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Laboratorium Kesehatan Daerah). Rata-rata nilai SKM sepanjang tahun 2023, mayoritas berada di atas nilai 90, yakni “Sangat Baik”. Meski demikian, nilai tersebut selalu naik dan turun setiap tahunnya. Artinya, masih dibutuhkan usaha yang lebih inovatif lagi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dapat mencapai kategori “Sangat Baik”.

2.1.3.4.1.3 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada tahun 2023 terdapat 20 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 MoU atau 100% terealisasi dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 11 MoU dan keseluruhan 11 MoU memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.162
MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	20
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan	20
3.	Persentase bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Tabel II.163
MoU Kerjasama Luar Negeri Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	11
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama luar negeri keseluruhan	11
3.	Persentase bidang MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

Dari beberapa Kerjasama tersebut, setiap tahunnya dilakukan evaluasi. Data jumlah kerjasama yg dievaluasi bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel II.164
MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kerjasama dievaluasi	27	29	21	36	31

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

2.1.3.4.1.4 Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Di samping menjalankan bisnis secara profesional, BUMD juga dituntut untuk dapat berkontribusi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. Beberapa BUMD yang berkontribusi pada tahun 2019 – 2021, yakni:

1) PDAM Surya Sembada

   Pada tahun 2023, PDAM Surya Sembada berkomitmen secara berkala menyelenggarakan program Satria Surya Sembada Mengajar kepada siswa dan mahasiswa.

2) PT BPR Surya Artha Utama (SAU)

   Sejak tahun 2021, PT BPR Surya Artha Utama mendukung upaya penguatan UMKM di Kota Surabaya sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi, melalui pemberian kredit kepada UMKM dengan suku bunga 3% per tahun dengan plafon Rp2.500.000, melalui Program PUSPITA dan SI KUMIS. Selain itu, di tahun 2022, PT BPR-SAU mendukung

pengembangan pasar melalui bantuan pemasangan *signage* di Pasar Penjaringan Sari dan Pasar Keputih.

3) PT SIER (*Surabaya Industrial Estate Rungkut*)

Meski Pemerintah Kota Surabaya hanya memiliki 25% saham, PT SIER tetap berkomitmen melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk memberikan bantuan dalam rangka percepatan pemulihan Kota Surabaya di masa pandemi melalui bantuan alat kesehatan senilai Rp203.000.000. Selain itu, PT SIER juga secara rutin memberikan beasiswa kepada warga Kota Surabaya yang berpenghasilan rendah dalam rangka mendukung program pendidikan di Kota Surabaya. Selain itu, PT SIER juga secara konsisten mendukung pemulihan ekonomi melalui pembinaan bagi warga sekitar kawasan industri SIER.

4) PT BPD Jatim

Meski Pemerintah Kota Surabaya hanya memiliki 2,13% saham, PT BPD Jatim, sejak 2021, juga memberikan bantuan kepada usaha mikro kecil binaan Pemerintah Kota Surabaya berupa barang dan uang. PT BPD Jatim juga mendukung digitalisasi transaksi daerah melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dalam hal pembayaran ePeken melalui QRIS. Selain itu, PT BPD Jatim juga mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui pembinaan UMKM oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melalui pemberian bantuan CSR berupa alat jahit. Dalam hal mendukung digitalisasi, PT BPD Jatim menyerahkan bantuan CSR sebanyak 120 Unit *Personal Computer* (PC) kepada Pemerintah Kota Surabaya. PT BPD Jatim juga bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penerapan sistem pembayaran parkir nontunai.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012. Sedangkan di tahun 2021, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.165
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Jenis Dokumen	2019	2020	2021	2022	2023
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 102 program. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020, telah dilakukan *review* terhadap RPJMD 2016-2021 untuk dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021, namun dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka khusus untuk tahun 2021 dilaksanakan pemetaan program sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga terdapat perubahan jumlah program dalam RPJMD Tahun 2021. Akan tetapi, meski jumlah program berkurang, namun esensi program, berupa indikator-indikator versi *Review* RPJMD 2016-2021, seluruhnya tetap dimasukkan ke 121 program hasil konversi.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Sehingga pada tahun 2022 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 123 program.

Tabel II.166
Penjabaran Program RPJMD Dalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	102	177	177	123	123
2	Jumlah Program RKPD	102	177	121	124	124
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100*	100*	100*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2023
*Keterangan: *) Jumlah program RKPD 2021 menyesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020*

Sementara itu, tingkat capaian keberhasilan program pada tahun 2019 tingkat capaian keberhasilan program mencapai 99,02%. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat capaian keberhasilan program masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 99,02%, lalu di tahun 2021 tingkat capaian keberhasilan program mencapai 98,13%. Kemudian pada tahun 2022 tingkat capaian keberhasilan program mencapai 95,27% dan pada tahun 2023 tingkat capaian keberhasilan program mencapai 99,43%. Data tingkat capaian keberhasilan program pembangunan tahun 2019 – 2023 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.167
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (%)	99,02	99,02	98,13	99,21	99,43

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2024

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2020 mencapai 90,18%. Sedangkan pada tahun 2021, rata-rata penyerapan anggaran mencapai 80,17%, kemudian pada akhir tahun 2022 rata-rata penyerapan anggaran mencapai 88,83%. Dan sampai dengan akhir tahun 2023, penyerapan anggarannya baru mencapai 88,19%.

Tabel II.168
Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan (%)	95,95	90,18	80,17	88,83	88,19

Sumber: Sekretariat Daerah, diolah, 2024

2.1.3.5.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistim. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan pola karier PNS yang berhasil diidentifikasi meliputi pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang, pangkat dan tingkat jabatan serta kompetensi. Pemerintah Kota Surabaya juga telah merumuskan sistem pengembangan pola karier pegawai dan saat ini dalam proses pengesahan menjadi peraturan Kepala Daerah.

Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tak kalah pentingnya dalam memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi konstribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui *off the job*

dan *on the job training*. Pada tahun 2019 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 5.803 pegawai, kemudian di tahun 2020 menurun menjadi 4.503 pegawai. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.725 pegawai, lalu pada tahun 2022 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 5.776 pegawai, dan pada tahun 2023 jumlahnya sebanyak 5.603 pegawai. Di bawah ini terdapat jumlah data pegawai yang kompeten.

Tabel II.169
Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pegawai kompeten	5.803	4.503	4.725	5.776	5.603
2	Jumlah pegawai belum kompeten	2.734	2.033	1.636	312	403

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Dari data di atas, sejak tahun 2019 – 2022, jumlah pegawai belum kompeten menurun setiap tahunnya. Namun pegawai yang belum kompeten masih relatif tinggi. Mengingat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan penuh dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis, diupayakan untuk memperkecil jumlah pegawai yang belum kompeten.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pejabat struktural, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel II.170
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pejabat struktural	1.580	1.461	1.414	1.197	1.233
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	1.174	1.048	944	624	642
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural (%)	74,30	71,73	66,76	52,13	52,07

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

2.1.3.5.3 Pengelolaan Perbatasan

Tahapan pelaksanaan pekerjaan penegasan batas wilayah pada tahun 2016–2019 meliputi sosialisasi pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan lalu dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta

dasar, pembuatan garis batas di atas peta serta penetapan ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Agar batas daerah tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas. Sedangkan pada tahun 2020 hingga akhir tahun 2023, penegasan batas wilayah dilakukan dengan mengukur dan menetapkan batas wilayah melalui Perwali. Data penegasan wilayah Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut.

Tabel II.171
Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31
Sudah dilakukan penegasan wilayah	0	10	16	22	25

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

2.1.3.6 Unsur Pengawasan

Dalam melaksanakan setiap kegiatan di instansi pemerintahan memerlukan data serta informasi. Salah satu informasi yang diperlukan melalui kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi sebagai aspek penunjang dalam hal pelayanan, baik buruknya kinerja pelayanan dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi yang berjalan. Dalam menjalankan setiap kegiatan tata kelola administrasi seringkali adanya pelanggaran yang terjadi di Perangkat Daerah. Karena itu, diperlukan pengawasan untuk mengurangi pelanggaran di setiap tahunnya. Sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.172
Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelanggaran tata kelola administrasi	38	24	19	0	0

Sumber: Inspektorat Daerah, 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas, tahun 2019 sampai tahun 2021 pelanggaran tata kelola administrasi mengalami penurunan. Dari 38 pelanggaran di tahun 2019, menjadi 19 pelanggaran di tahun 2021. Mulai di tahun 2022 hingga tahun 2023, jumlah pelanggaran dapat dicegah melalui pengawasan sebelum pelaporan tata kelola administrasi sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran tata kelola administrasi. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan dari sistem informasi elektronik yang membantu mengakselerasi dan mempermudah proses pengawasan dan pemeriksaan.

Selain itu, unsur pengawasan internal juga diperlukan untuk mendisiplinkan aparatur. Banyaknya pelanggaran disiplin aparatur, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga 2023, karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal untuk mengurangi jumlah pelanggaran.

Tabel II.173
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Jenis Hukuman Disiplin	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	2	8	13	2	5
Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	2	7	1	2	19
Jumlah Hukuman Disiplin Berat	23	15	16	29	21
Total Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan	27	30	30	33	45

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

2.1.3.7.1 Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakat lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi

Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Jumlah Ormas Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.174
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Ormas Aktif	21	15	38	27	26
2	Jumlah Ormas Terdaftar	167	167	167	104	213

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 26 ormas yang mendapat pembinaan.

2.1.3.7.2 Penanganan Potensi Konflik

Lingkungan yang damai dan tertib merupakan keinginan setiap masyarakat karena hal ini termasuk salah satu faktor yang sangat signifikan pengaruhnya pada kehidupan manusia.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintah kota Surabaya melakukan upaya pengawasan terhadap potensi konflik yang bisa terjadi dimasyarakat. Data potensi konflik selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.175
Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah potensi konflik	227	215	297	403	309
2	Jumlah konflik	13	10	8	5	5

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Guna mengurangi risiko potensi konflik ini, partisipasi masyarakat sangat signifikan dalam mewujudkan kerukunan antar elemen di masyarakat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Tabel II.176
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2019 – 2022

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita				Total	
	Makanan	%	Non Makanan	%		
2019	742.013	36,60	1.285.586	63,40	2.027.599	100%
2020	777.725	41,39	1.101.421	58,61	1.879.146	100%
2021	810.743	41,52	1.141.846	54,48	1.952.589	100%
2022	819.124	41,60	1.149.824	58,40	1.968.948	100%
2023	948.701	38,79	1.497.216	61,21	2.445.917	100%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun pandemi 2020. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat. Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana berikut.

Tabel II.177
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja (orang)	1.566.846	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714
PDRB (Juta Rp)	580.488.529	554.509.457	590.227.967	655.616.222	715.294.707
Produktivitas (Juta Rp per orang)	370,48	350,39	375,25	398,96	455,68

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel II.178
Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB ADHK (miliar rupiah)	20.497,98	19.477,42	19.875,91	22.684,94	25.217,17
Laju Pertumbuhan (persen)	7,62	-4,98	2,05	14,14	11,16

Sumber : BPS Kota Surabaya diolah, 2024

2.1.4.2 Fokus Infrastruktur Kewilayahan

2.1.4.2.1 Indeks Infrastruktur Kota

Indeks Infrastruktur Kota mengukur keberhasilan dalam peningkatan kualitas infrastruktur kota. Indeks Infrastruktur Kota menggambarkan implementasi penataan ruang kota yang terintegrasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota yang terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan serta Indeks Penyelenggaraan Transportasi.

Pola perhitungan Indeks Infrastruktur Kota pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah dilakukan evaluasi dan perbaikan pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan diperlukan penyesuaian komponen perhitungan untuk mengakomodir aspek infrastruktur kota yang masih perlu ditingkatkan pada periode 2021-2026. Sehingga formulasi perhitungan antara tahun 2020-2021 dengan tahun 2022 berbeda, dan capaiannya tidak dapat disejajarkan.

Pada tahun 2022, realisasi Indeks Infrastruktur Kota Surabaya adalah sebesar 0,672. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas jalan dan prasarana melalui pembangunan pedestrian dan pelaksanaan overlay (pelapisan ulang aspal) pada 2.072 ruas jalan, peningkatan konektivitas jalan melalui pembangunan jalan baru (Jalan Lingkar Luar Barat). Penanganan genangan dilakukan melalui pembangunan dan/rehabilitasi sistem drainase pada 353 lokasi, penambahan kapasitas dan pembangunan rumah pompa baru sebanyak 4 unit, serta pengerukan saluran primer, sekunder dan tersier sebanyak 1.192 lokasi. Selanjutnya, penyediaan hunian layak juga telah dilakukan melalui penyediaan

rumah susun bagi masyarakat miskin sebanyak 107 blok rusunawa dan pembangunan baru 2 blok rusunawa yang tuntas pada akhir 2022, Program Dandan Omah sebagai upaya rehabilitasi terhadap rumah tapak tidak layak huni sebanyak 929 rumah, fasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan sebanyak 22 lokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik. Selain itu dari sisi penataan ruang dan penyediaan tanah telah dilakukan pelayanan penataan ruang dan bangunan yang terintegrasi serta berbasis teknologi. Sedangkan dari aspek transportasi, keberhasilan tersebut didukung oleh penyediaan layanan angkutan umum perkotaan dengan penyediaan angkutan suroboyo bus sebanyak 28 unit yang melayani 3 rute layanan dan kerjasama Kementerian Perhubungan melalui Teman Bus sebanyak 17 unit yang melayani 1 rute serta pengadaan angkutan feeder sebanyak 52 unit yang dioperasikan di tahun 2023, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2023, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel II.179
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2023

Tabel II.180
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
Rasio luas wilayah industri (persen)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2023

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2023 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel II.181
Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Reviu RTRW Kota Surabaya, 2023

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.3 Perhubungan

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk terus menyediakan fasilitas jalan yang memadai dengan memperhatikan perkembangan volume lalu lintas harian pada ruas jalan utama di Kota Surabaya. Hal ini diukur melalui V/C ratio yaitu perhitungan volume per jam tertinggi untuk memperkirakan volume per jam desain (yaitu volume per jam tertinggi ke-n) untuk keperluan desain yang ideal. Pada tahun 2022, terdapat 49 jalan kewenangan kota dan 2 jalan kewenangan nasional yang memiliki V/C Ratio ≤0,90 dari total 51 ruas jalan yang disampling. Semakin kecil nilai V/C ratio pada suatu ruas jalan maka semakin baik pula fungsi jalan tersebut. Rata-rata V/C ratio di beberapa ruas jalan di Kota Surabaya terbukti semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya adalah 0,56. Kemudian turun menjadi 0,54 pada tahun 2019, dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 0,47 dan di tahun 2021 menjadi 0,42. Namun pada tahun 2022 rata-rata V/C ratio di

Kota Surabaya mengalami kenaikan menjadi 0,74. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan pengembangan infrastruktur kota antara lain dengan menyediakan alternatif rute perjalanan serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Rata-rata V/C ratio jalan di Kota Surabaya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel II.182
Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata V/C Ratio	0,54	0,47	0,42	0,75	0,74

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2023

Tabel II.183
Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jl. Adityawarman	kota	0,3	0,28	0,295	0,54	0,85
2	Jl. Bengawan	kota	0,16	0,13	0,155	0,69	0,70
3	Jl. Blauran	kota	0,95	0,72	0,57	0,71	0,51
4	Jl. Bubutan	kota	0,67	0,4	0,82	0,81	0,44
5	Jl. Citra Raya Unesa	kota	0,51	0,4	0,27	0,72	0,84
6	Jl. Darmo	kota	0,47	0,5	0,545	0,88	0,76
7	Jl. Dharmahusada Utara VIII	kota	0,14	0,12	0,065	0,58	0,56
8	Jl. Dharmawangsa	kota	0,38	0,34	0,27	0,89	0,70
9	Jl. Dinoyo	kota	0,13	0,28	0,195	0,69	0,80
10	Jl. Diponegoro	kota	0,44	0,42	0,45	0,58	0,69
11	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno	kota	0,43	0,42	0,49	0,86	0,79
12	Jl. Dr.Soetomo	kota	3,19	0,42	0,3	0,61	0,62
13	Jl. Embong Malang	kota	0,37	0,44	0,55	0,65	0,46
14	Jl. Gemblongan	kota	0,61	0,48	0,53	0,95	0,95
16	Jl. Gubeng pojok	kota	0,34	0,47	0,28	0,65	0,55
17	Jl. Gubernur Suryo	kota	0,91	0,67	0,32	0,69	0,60
18	Jl. Hayam Wuruk	kota	0,26	0,17	0,14	0,52	0,86
19	Jl. Indragiri	kota	0,2	0,18	0,375	0,69	0,77
20	Jl. Indrapura	kota	0,55	0,83	0,8	0,76	0,74
21	Jl. Jagir Wonokromo	kota	0,29	0,18	0,315	0,61	0,60
22	Jl. Jakarta	kota	0,66	0,6	0,385	0,80	0,88
23	Jl. Joyoboyo	kota	0,64	0,22	0,545	0,78	0,87
24	Jl. Kapuas	kota	0,01	0,01	0,035	0,64	0,43
25	Jl. Kayoon	kota	0,23	0,23	0,25	0,64	0,78
26	Jl. Kedungdoro	kota	0,23	0,27	0,41	0,82	0,76
27	Jl. Kejawan Putih Tambak	kota	0,13	0,27	0,2	0,71	0,70
28	Jl. Kembang Jepun	kota	0,36	0,57	0,55	0,74	0,77
29	Jl. Kertajaya Indah	kota	0,58	0,45	0,53	0,74	0,73
30	Jl. Kusuma Bangsa	kota	0,63	0,49	0,47	0,75	0,76

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2019	2020	2021	2022	2023
31	Jl. Laguna Kejawan Putih Tambak	kota	0,23	0,22	0,25	0,67	0,63
32	Jl. Mayjend HR. Muhammad	kota	0,34	0,26	0,565	0,72	0,98
34	Jl. Mayjend Sungkono	kota	0,43	0,44	0,475	0,92	0,94
35	Jl. Ngagel	kota	0,46	0,5	0,27	0,70	0,70
36	Jl. Pahlawan	kota	0,74	1,11	0,53	0,80	0,82
37	Jl. Pemuda	kota	0,51	0,79	0,83	0,86	0,90
38	Jl. Perak Barat	nasional	0,85	0,63	0,71	1,03	0,99
39	Jl. Perak Timur	nasional	0,87	0,54	0,41	1,16	0,96
40	Jl. Polisi Istimewa	kota	0,19	0,16	0,22	0,79	0,78
41	Jl. Prof. Dr. Moestopo	kota	0,66	0,72	0,565	0,88	0,72
42	Jl. Rajawali	kota	0,85	0,83	0,51	0,76	0,76
43	Jl. Raya ITS	kota	0,58	0,19	0,23	0,49	0,65
44	Jl. Stasiun Wonokromo	kota	0,29	0,5	0,42	0,77	0,63
45	Jl. Sumatra	kota	0,52	0,37	0,02	0,72	0,78
46	Jl. Tunjungan	kota	0,82	1,03	0,58	0,66	0,87
47	Jl. Urip Sumoharjo	kota	0,89	0,55	0,475	0,87	0,70
48	Jl. Jendral Basuki Rachmat	kota	1,18	1,38	1,2	0,82	0,76
49	Jl. Jembatan Merah/ Jl. Veteran	kota	0,86	1,01	1,05	0,71	0,70
50	Jl. Panglima Sudirman	kota	0,22	0,96	0,27	0,85	0,71
51	Jl. Keputran	kota	0,12	0,05	0,035	0,72	0,87
Rata-rata di jalan kewenangan kota			**0,55**	**0,48**	**0,43**	**0,73**	**0,71**
Rata-rata total			**0,54**	**0,47**	**0,42**	**0,75**	**0,74**

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Pada tabel di atas, rata-rata derajat kejenuhan menunjukkan tren yang relatif tinggi di angka 0,74. Masih adanya beberapa ruas jalan yang derajat kejenuhannya lebih dari 0,95 menunjukkan masih diperlukannya upaya untuk melakukan peningkatan penggunaan transportasi publik dan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Meningkatnya volume kendaraan di Kota Surabaya menyebabkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka kecelakaan dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat tetap tertib saat berkendara, pemasangan rambu dan lain-lain. Angka kejadian kecelakaan lalu lintas di Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.184
Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	1.345	874	932	1.263	1.404

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2024

Mengingat Kota Surabaya adalah kota besar dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, seringkali Kota Surabaya menjadi tempat jujukan bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut dapat terlihat pada jumlah kepadatan masyarakat di Kota Surabaya antara siang hari dan malam hari. Pada malam hari, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk kurang lebih 3.009.286 jiwa, sementara pada siang hari bisa menjadi 2 kali lipat karena masyarakat dari Kabupaten/Kota sekitar yang memiliki pekerjaan di Kota Surabaya. Hal ini membuat akses keluar masuk Kota Surabaya sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Surabaya agar dapat memberikan alternatif moda transportasi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih moda transportasi.

2.1.4.2.4 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya secara umum mengalami penurunan. Pada 2019 rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,01 menit dapat diturunkan tiap tahunnya, hingga akhir tahun 2023 ini rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 18,69 menit, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.185
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	22,01	22,22	22,04	19,12	18,69

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2023

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya secara umum juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020, rata-rata tinggi genangan sebesar 10,92 cm. Hingga

akhir tahun 2023 ini, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya dapat diturunkan menjadi sebesar 10,01 cm sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.186
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	9,20	10,92	10,92	10,92	10,01

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2023

Luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 688,96 hektar. Hingga akhir tahun 2023 ini, luas wilayah genangan terus menurun menjadi sebesar 400,74 hektar, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.187
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Wilayah Genangan (ha)	688,96	462,64	452,57	432,09	400,74

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2023

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain melakukan pembangunan/rehabilitasi sistem drainase sebanyak 435 lokasi sesuai dengan rencana penyelesaian genangan, membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 167,99 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 75 rumah pompa, melakukan pengerukan saluran primer, sekunder dan tersier di 1.348 lokasi sesuai dengan rencana pemeliharaan rutin saluran serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut. Hingga sekarang, *smart water level* telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah titik lokasi genangan di Kota Surabaya dari 414 titik lokasi genangan pada tahun 2021 menjadi 219 titik lokasi genangan pada tahun 2023. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah

pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.

Perangkat

Sensor dan Tiang Penyangga

Display Matrix

Gambar II.18
Perangkat Smart Water Level

2.1.4.2.5 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota di antaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah PJU yang terpasang sebanyak 96.252 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel II.188
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PJU terpasang (titik per tahun)	6.090	6.400	1.324	3.002	9.594

Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah

Kota Surabaya, maka beban pemeliharaan dan tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban pemeliharaan dan tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan/ konservasi energi kota.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

1. Komponen Pengungkit (*Enablers*), yaitu penilaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Komponen Hasil (*Results*), merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penilaian BB (78,13). Sedangkan pada tahun 2021, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali memberikan nilai BB (78,38). Baru di tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan nilai A (80,14). Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan nilai AA (95,12). Meski mendapat AA, namun evaluasi terus dilakukan untuk mendorong perbaikan kinerja birokrasi.

2.1.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.189
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bidang Politik	78	64	67	99	57
2	Bidang Ekonomi	68	81	142	161	106
3	Bidang Sosial Budaya	81	70	87	151	166
Jumlah unjuk rasa		**227**	**215**	**296**	**411**	**329**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

Jumlah unjuk rasa di Kota Surabaya dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan kejadian unjuk rasa sebanyak 296 kejadian dan didominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi. Di tahun 2022, jumlah kejadian kembali meningkat dengan cukup signifikan. Namun di tahun 2023, jumlah kejadian sedikit berkurang. Hal ini menunjukan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan bisa dikendalikan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada tabel di berikut ini, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perizinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2022, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya.

Tabel II.190
Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perda Terkait Perizinan	1	0	0	0	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0	1	0

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2024

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.191
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan D4/S1	305.315	303.41	287.516	290.887	297.446
2	Jumlah lulusan S2	21.363	21.179	19.976	20.615	21.304
3	Jumlah lulusan S3	1.376	1.405	1.412	1.518	1.617
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	328.054	325.994	308.904	313.020	320.367
5	Jumlah penduduk	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,104	0,109	0,104	0,105	0,106

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Daya saing SDM salah satunya tercermin pada pemerataan gender dan tingkat pendidikan dalam angkatan kerja, yakni penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja Kota Surabaya pada tahun 2023 sejumlah 1.569.714 orang atau sebesar 68,73 persen sedikit menurun dibanding tahun 2022 sejumlah 1.634.314 orang atau sebesar 69,99 persen. Penurunan ini diperkirakan akibat pergeseran kecenderungan penduduk usia 15 tahun ke atas untuk melanjutkan sekolah ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga masuk ke dalam kategori bukan angkatan kerja.

Berdasarkan gender, partisipasi angkatan kerja perempuan semakin meningkat setiap tahunnya mencapai 57,61 persen pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar 55,46 persen, sementara partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 80,25 persen pada tahun 2023 menurun dari tahun 2022 yakni sebesar 85.07 persen. Semakin tinggi partisipasi perempuan untuk bekerja menunjukkan semakin sempitnya kesenjangan antara peranan laki-laki dan perempuan yang berarti pengarusutamaan gender pada sektor ketenagakerjaan semakin baik.

Tabel II.192
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surabaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkatan kerja	1.590.651	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1,569,714
2	Jumlah penduduk usia kerja	2.313.177	2.325.749	2.337.229	2.348.058	2.283.993
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,76	68,05	67,30	69,99	68,73

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki	81,79	81,23	81,69	85,07	80,25
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	56,22	55,35	53,44	55,46	57,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, angkatan kerja Kota Surabaya sejak tahun 2019 hingga 2023 didominasi oleh lulusan tingkat pendidikan menengah atas, diikuti dengan pendidikan tinggi (universitas dan diploma), kemudian pendidikan menengah pertama, dan paling sedikit adalah pendidikan dasar ke bawah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.193
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkatan kerja lulusan SD ke bawah	296.551	280.991	277.665	242.208	259.079
2	Jumlah angkatan kerja lulusan SMP	224.516	209.422	205.322	245.457	214.666
3	Jumlah angkatan kerja lulusan SMA Umum	352.095	364.391	361.454	446.306	375.281
4	Jumlah angkatan kerja lulusan SMA Kejuruan	318.598	344.292	348.882	331.289	367.480
5	Jumlah angkatan kerja lulusan Diploma I/II/III	61.526	59.030	56.790	47.937	47.479
6	Jumlah angkatan kerja lulusan Universitas	337.365	324.438	322.775	330.117	305.729

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, semakin tinggi nilai produktivitas. Sebesar 23,67 persen penduduk bekerja di Kota Surabaya berpendidikan perguruan tinggi, 46,54 persen berpendidikan menengah atas, dan sisanya tersebar pada lulusan SMP dan SD atau kurang sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.194
Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan SD ke bawah	287.732	268.174	255.077	238.468	245.250
2	Jumlah lulusan SMP	214.547	182.651	185.909	213.754	198.479
3	Jumlah lulusan SMA	330.195	322.011	319.721	392.352	342.080
4	Jumlah lulusan SMK	285.022	298.881	309.413	314.112	337.375

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
5	Jumlah lulusan perguruan tinggi	381.598	355.951	350.495	359.352	340.410

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya semakin menurun secara signifikan mencapai 6,76 persen pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 yakni sebesar 7,62 persen. Penganggur terbuka yang dimaksud terdiri dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel II.195
Tingkat Pengganggguran Terbuka Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengangguran	91.557	154.896	152.273	125.276	106.120
2	Tingkat pengganggguran terbuka	5,76	9,79	9,68	7,62	6,76
3	Tingkat pengganggguran terbuka laki-laki	5,64	10,79	10,77	9,66	7,30
4	Tingkat pengganggguran terbuka perempuan	5,92	8,37	8,07	4,61	6,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Ditinjau dari tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan sebagaimana tabel di bawah, pengangguran yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 ada pada tingkat menengah atas kejuruan sebesar 8,19 persen dibanding tahun 2022 sebesar 5,18 persen. Hal ini diperkirakan terjadi akibat belum optimalnya pasar kerja menyerap lulusan SMK dan mereka juga tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Sementara lulusan perguruan tinggi tercatat menurun dari 4,95 persen di tahun 2022 menjadi 3,62 persen di tahun 2023 menunjukkan tingginya kebutuhan pasar kerja terhadap tenaga kerja yang berkualitas.

Tabel II.196
Tingkat Pengganggguran Terbuka Kota Surabaya Menurut
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pengangguran terbuka lulusan SD ke bawah	2,97	4,56	8,13	1,54	5,34
2	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMP	4,44	12,78	9,45	12,92	7,54
3	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMA	6,22	11,63	11,55	12,09	8,85
4	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMK	10,54	13,19	11,31	5,18	8,19

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
5	Persentase pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi	4,34	7,18	7.66	4,95	3,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan tersebut, antara lain semakin tingginya tingkat pendidikan angkatan kerja dan meratanya gender dalam partisipasi angkatan kerja yang berdampak pada semakin turunnya tingkat pengangguran terbuka terutama pada tingkat pendidikan tinggi, daya saing daerah sektor ketenagakerjaan Kota Surabaya dapat diproyeksikan semakin baik dan berkualitas pada periode ke depan. Kunci utama dalam daya saing sumber daya manusia adalah perbaikan kualitas pendidikan yang mampu membuka akses terhadap berbagai kesempatan dan potensi pekerjaan, bukan hanya pada pasar kerja formal melainkan juga informal yang justru mampu menciptakan lowongan pekerjaan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa struktur angkatan kerja di Kota Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tertinggi berada pada tingkat pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas. Tertinggi selanjutnya yakni berada pada tingkat pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi. Sebagaimana selayaknya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang semakin baik pula. Artinya, semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, maka semakin tinggi nilai produktivitas yang bisa dihasilkan, begitu sebaliknya. Sehingga besarnya proporsi jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tertinggi pada jenjang sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di Kota Surabaya tersebut menjadi potensi tenaga kerja yang berdaya saing di pasar kerja. Ditambah lagi, untuk meningkatkan tenaga kerja di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya mengadakan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk memenuhi tuntutan dan standar pasar tenaga kerja yang terus berkembang pesat.

2.1.4.4.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II.197
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	700.826	688.478	675.558	686.916	678.456
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	229.491	186.272	193.749	208.815	220.805
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	930.317	874.750	869.307	895.731	899.261
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.229.164	2.095.980	2.101.645	2.092.132	2.110.025
6	Rasio ketergantungan	0,417	0,417	0,414	0,428	0,426

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada akhir tahun 2023, antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun dan usia lebih dari 64 tahun meningkat dari tahun 2022. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) juga ikut meningkat dari tahun 2022. Sehingga rasio ketergantungan sedikit turun menjadi sebesar 0,426 yang artinya, setiap 100 orang yang berusia produktif/bekerja mempunyai tanggungan sebanyak 42 hingga 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16)

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang berkolaborasi dengan kebijakan perencanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun capaian TPB di Kota Surabaya pada tahun 2023, adalah sebagai berikut.

Tabel II.198
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya Tahun 2023

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Ada Target	Tidak Ada Data
1	Tanpa Kemiskinan	25	13	3	8	1
2	Tanpa Kelaparan	10	5	-	1	4
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	33	20	1	8	4
4	Pendidikan Berkualitas	14	8	1	3	2
5	Kesetaraan Gender	14	6	2	4	2
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	14	8	3	2	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	-	-	-	-
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	18	11	-	-	7
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	11	7	-	3	1
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	3	0	1	3
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	12	8	-	1	3
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertangung Jawab	6	2	-	-	4
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	2	-	-	-
14	Ekosistem Lautan	0	-	-	-	-
15	Ekosistem Daratan	2	2	-	-	-
16	Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh	23	13	1	2	7
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	16	8	2	4	2
Total		**207**	**116**	**13**	**37**	**41**

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024

Mengacu tabel di atas, sebanyak 129 indikator dari 207 indikator atau sebesar 62,31% indikator TPB memiliki relevansi/kesesuaian dengan indikator kinerja RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan seluruhnya telah mencapai predikat Tercapai dan Akan Tercapai untuk target tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian TPB melalui program pembangunan dan kegiatan prioritas utamanya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi. Sebanyak 76 program dari 148 program pembangunan Kota Surabaya serta 109 kegiatan dari 1.666 kegiatan Pemerintah Kota Surabaya

mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaksanaan TPB dengan dukungan APBD Tahun 2023 sebesar Rp4,129 triliun.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya untuk menyediakan data realisasi/kondisi terkini atas 82 indikator lainnya, dan sebanyak 41 indikator di antaranya tidak tersedia data, disebabkan ketentuan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa data tersebut bukan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota untuk penyediaannya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan data capaian kinerja dapat diketahui Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum rata-rata mampu mencapai yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas penyelenggara pemerintahan kota cukup tinggi dari semua elemen, dalam menghadapi tantangan yang cukup berat pada masa pandemi tersebut. Fungsi dan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan dasar masih tetap dapat dipertahankan dengan baik.

2.2.1 Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mampu mencatat kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan ini mencapai 112,51% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Adapun rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Pendidikan sebesar 103,36%;
2) Kesehatan sebesar 105,51%;
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 151,98%;
4) Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 112,46%;
5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar 102,74%;
6) Sosial sebesar 99,01%.

2.2.2 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Secara umum, kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar mencapai 107,49% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Namun demikian, urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan perlu memperoleh perhatian khusus dengan rata-rata capaian sebesar 19,35%. Belum optimalnya capaian urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan antara lain disebabkan adanya lokasi rencana pengadaan tanah yang masih dalam proses verifikasi dan validasi status tanah sehingga berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan serta adanya penyesuaian program prioritas pembangunan di tingkat kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan monitoring secara rutin dan membuat Sekretariat Bersama (Sekber) di Kantor Pertanahan guna memudahkan koordinasi kemajuan pembebasan tanah untuk pembangunan non infrastruktur. Rincian capaian per Bidang Urusan sebagai berikut:

1) Tenaga Kerja sebesar 110,00%;
2) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar 109,24%;
3) Pangan sebesar 120,54%;
4) Pertanahan sebesar 19,35%;
5) Lingkungan Hidup sebesar 117,75%;
6) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar 120,01%;
7) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar 100,00%;
8) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar 133,52%;
9) Perhubungan sebesar 101,35%;
10) Komunikasi Dan Informatika sebesar 103,14%;
11) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah sebesar 104,28%;
12) Penanaman Modal sebesar 102,97%;
13) Kepemudaan Dan Olahraga sebesar 137,26%;
14) Statistik sebesar 100,00%;
15) Persandian sebesar 124,50%;
16) Kebudayaan sebesar 101,87%;
17) Perpustakaan sebesar 112,08%;
18) Kearsipan sebesar 116,98%.

2.2.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Secara umum, kinerja Urusan Pilihan menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan pilihan mencapai 109,81% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Adapun rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Kelautan Dan Perikanan sebesar 104,59%;
2) Pariwisata sebesar 134,09%;
3) Pertanian sebesar 101,52%;
4) Perdagangan sebesar 101,43%;
5) Perindustrian sebesar 107,41%.

2.2.4 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terlaksana dengan baik, dengan angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 102,95% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Rincian capaian Bidang Urusan Sekretariat Daerah sebesar 106,04% dan Bidang Urusan Sekretariat DPRD sebesar 99,85%.

2.2.5 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 108,60% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Perencanaan sebesar 100,45%;
2) Keuangan sebesar 130,70%;
3) Kepegawaian sebesar 106,02%;
4) Pendidikan Dan Pelatihan sebesar 105,82%;
5) Penelitian Dan Pengembangan sebesar 100,00%.

2.2.6 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Secara umum, kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan menunjukkan kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan mencapai 99,65% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.7 Kinerja Unsur Kewilayahan

Kinerja Unsur Kewilayahan yang meliputi Urusan Kecamatan terlaksana dengan baik, melalui angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 113,64% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.8 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja Unsur Pemerintahan Umum yang meliputi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik telah terlaksana dengan baik, melalui angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pemerintahan Umum mencapai 100,68% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Kategori **Sangat Tinggi**.

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 dan realisasi tahun kedua RPJMD 2021-2026 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2023, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program sampai dengan akhir tahun 2023, secara umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.199
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023 Triwulan IV Kota Surabaya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.065.645.443		797.542.430		953.671.359		840.255.336		88,11%		1.637.797.766		153,69%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,13%		91,83%		91,75%		94,61%		103,12%		94,61%		100,51%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.442.377		1.383.541		1.335.210		1.267.170		94,90%		2.650.711		59,67%		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan		N/A		3 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		3 kegiatan		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.442.377		1.383.541		1.335.210		1.267.170		94,90%		2.650.711		59,67%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.029.406.176		774.531.587		932.972.775		821.384.396		88,04%		1.595.915.983		155,03%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.029.406.176		774.531.587		932.972.775		821.384.396		88,04%		1.595.915.983		155,03%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5929 Orang/bulan		100%		6389 Orang/bulan		7589 Orang/bulan		118,78%		7589 Orang/bulan		128,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.331.194		647.495		644.697		409.937		63,59%		1.057.432		79,43%		
			Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		94.36 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.331.194		647.495		644.697		409.937		63,59%		1.057.432		79,43%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		19 jenis		24 Paket		24 Paket		100,00%		24 Paket		200,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.870.126		2.751.879		1.000.674		557.235		55,69%		3.309.114		67,95%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		71.27 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.870.126		2.751.879		1.000.674		557.235		55,69%		3.309.114		67,95%		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	768 Unit		59 jenis		964 Unit		964 Unit		100,00%		964 Unit		125,52%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.595.570		18.227.928		17.718.002		16.636.599		93,90%		34.864.527		136,21%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		94.36 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.477.487		2.018.449		2.213.214		1.945.551		87,91%		3.964.000		160,00%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			23.118.083		16.209.479		15.504.788		14.691.048		94,75%		30.900.527		133,66%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		4 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		400,00%		Dinas Pendidikan	
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.278.141.505		1.052.294.748		1.003.385.429		974.009.351		97,07%		2.026.304.099		158,54%		
			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%		99,42%		100%		100,99%		100,99%		100,99%		100,99%		Dinas Pendidikan	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		84,04%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	97,44%		95,04%		96,79%		94,51%		97,64%		94,51%		96,99%		Dinas Pendidikan	
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	91,43%		100,00%		87,60%		102,78%		117,33%		102,78%		112,41%		Dinas Pendidikan	
			Persentase lembaga PAUD berkualitas	84,85%		82,32%		83,71%		89,84%		107,32%		89,84%		105,88%		Dinas Pendidikan	
			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	100%		100,00%		85%		100%		117,65%		100%		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Angka Kelulusan SMP/MTS	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	57%		15,54%		28%		22,35%		79,82%		22,35%		39,21%		Dinas Pendidikan	
			Persentase SD terakreditasi minimal B	95,04%		94,55%		93,69%		93,57%		99,87%		93,57%		98,45%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			642.779.016		558.708.662		500.329.514		491.427.471		98,22%		1.050.136.133		163,37%		
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100,00%		1 laporan		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		100,00%		4 laporan		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		3 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga		N/A		692 Lembaga		692 Lembaga		100,00%		692 Lembaga		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		90.57 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			102.209.068		14.261.442		10.329.125		7.854.642		76,04%		22.116.084		21,64%		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	19 Unit		8 Lokasi		5 Unit		5 Unit		100,00%		5 Unit		26,32%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			188.257		130.800		125.000		125.000		100,00%		255.800		135,88%		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan		260 lembaga		259 Satuan Pendidikan		259 Satuan Pendidikan		100,00%		259 Satuan Pendidikan		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			6.043.654		1.255.151		1.424.531		1.085.309		76,19%		2.340.460		38,73%		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	73986 Peserta Didik		13 kali		73986 Peserta Didik		73989 Peserta Didik		100,00%		73989 Peserta Didik		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			7.328.937		5.574.225		3.024.351		2.957.344		97,78%		8.531.569		116,41%		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket		56 lembaga		3 Paket		3 Paket		100,00%		3 Paket		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			148.042.295		211.948.784		216.075.660		214.027.810		99,05%		425.976.593		287,74%		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidikan		285 lembaga		587 Satuan Pendidikan		587 Satuan Pendidikan		100,00%		587 Satuan Pendidikan		100,00%		Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			30.802.004		681.421		699.577		414.539		59,26%		1.095.959		3,56%		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang		N/A		3135 Orang		3547 Orang		113,14%		3547 Orang		113,14%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			320.687.503		319.700.499		262.465.584		258.978.399		98,67%		578.678.899		180,45%		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85997 Peserta Didik		691 lembaga		85997 Peserta Didik		86001 Peserta Didik		100,00%		86001 Peserta Didik		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			320.597		228.222		389.600		347.821		89,28%		576.043		179,68%		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	649 Satuan Pendidikan		643 lembaga		649 Satuan Pendidikan		649 Satuan Pendidikan		100,00%		649 Satuan Pendidikan		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			27.156.702		4.928.118		5.796.085		5.636.609		97,25%		10.564.726		38,90%		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	205 Unit		266 Lokasi		125 Unit		125 Unit		100,00%		125 Unit		60,98%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			362.852.051		312.049.131		277.734.090		272.588.770		98,15%		584.637.901		161,12%		
			Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga		312 Lembaga		305 Lembaga		284 Lembaga		93,11%		284 Lembaga		93,11%		Dinas Pendidikan	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		90.57 %		100%		97.14 %		97,14%		97.14 %		97,14%		Dinas Pendidikan	
			Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		100,00%		4 laporan		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		3 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100,00%		1 laporan		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			68.139.379		6.389.132		1.024.196		1.007.431		98,36%		7.396.563		10,86%		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit		3 lokasi		4 Unit		4 Unit		100,00%		4 Unit		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			441.521		266.600		216.700		203.700		94,00%		470.300		106,52%		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	258 Satuan Pendidikan		305 Lembaga		275 Satuan Pendidikan		275 Satuan Pendidikan		100,00%		275 Satuan Pendidikan		106,59%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			4.584.334		2.265.022		2.520.319		2.085.115		82,73%		4.350.137		94,89%		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2280 Peserta Didik		18 kali		2000 Peserta Didik		2694 Peserta Didik		134,70%		2694 Peserta Didik		118,16%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			6.779.353		12.781.912		2.786.300		2.681.657		96,24%		15.463.568		228,10%		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		63 Lembaga		3 Paket		3 Paket		100,00%		3 Paket		150,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			80.429.498		126.650.648		126.928.600		125.878.552		99,17%		252.529.200		313,98%		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan		63 lembaga		272 Satuan Pendidikan		268 Satuan Pendidikan		98,53%		268 Satuan Pendidikan		98,53%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			13.494.310		435.230		702.461		402.497		57,30%		837.727		6,21%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang		N/A		1013 Orang		1102 Orang		108,79%		1102 Orang		108,79%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			170.635.719		161.602.047		135.305.656		132.283.208		97,77%		293.885.255		172,23%		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37574 Peserta Didik		312 lembaga		40574 Peserta Didik		41225 Peserta Didik		101,60%		41225 Peserta Didik		109,72%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			243.465		233.590		217.900		217.545		99,84%		451.135		185,30%		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	39248 Peserta Didik		300 lembaga		39248 Peserta Didik		39607 Peserta Didik		100,91%		39607 Peserta Didik		100,91%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			18.104.473		1.424.950		8.031.958		7.829.065		97,47%		9.254.015		51,11%		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit		60 lokasi		63 Unit		63 Unit		100,00%		63 Unit		350,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			155.588.380		107.244.223		128.844.379		117.690.996		91,34%		224.935.219		144,57%		
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		3 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan		4 laporan		7 laporan		7 laporan		100,00%		7 laporan		175,00%		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan		4 laporan		7 laporan		7 laporan		100,00%		7 laporan		175,00%		Dinas Pendidikan	
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100,00%		1 laporan		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			716.291		484.273		253.263		102.731		40,56%		587.004		81,95%		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan		467 lembaga		2355 Satuan Pendidikan		2646 Satuan Pendidikan		112,36%		2646 Satuan Pendidikan		112,36%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD			742.276		6.929.742		1.991.425		1.671.041		83,91%		8.600.783		1158,70%		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket		2 Lembaga		3 Paket		3 Paket		100,00%		3 Paket		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD			69.014.400		59.896.940		62.199.049		61.509.542		98,89%		121.406.482		175,91%		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan		2539 lembaga		2442 Satuan Pendidikan		2442 Satuan Pendidikan		100,00%		2442 Satuan Pendidikan		98,51%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			8.420.251		203.323		3.392.515		1.325.209		39,06%		1.528.532		18,15%		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang		N/A		3092 Orang		2536 Orang		82,02%		2536 Orang		82,02%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			161.215		244.518		5.018.830		3.441.692		68,58%		3.686.211		2286,52%		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik		2 Lembaga		251 Peserta Didik		632 Peserta Didik		251,79%		632 Peserta Didik		302,39%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			76.002.570		39.485.427		55.583.318		49.254.840		88,61%		88.740.267		116,76%		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88978 Peserta Didik		2644 lembaga		88678 Peserta Didik		100126 Peserta Didik		112,91%		100126 Peserta Didik		112,53%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			531.376		0		405.979		385.940		95,06%		385.940		72,63%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		N/A		3 Unit		3 Unit		100,00%		3 Unit		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**			116.922.057		74.292.732		96.477.446		92.302.114		95,67%		166.594.846		142,48%		
			Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	5 hari		1.27 hari		5 hari		1.03 hari		179,40%		1.03 hari		179,40%		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		6 laporan		150,00%		6 laporan		150,00%		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		3 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.16	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan**			135.748		70.000		96.874		45.600		47,07%		115.600		85,16%		
			Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	293 Satuan Pendidikan		153 lembaga		293 Satuan Pendidikan		293 Satuan Pendidikan		100,00%		293 Satuan Pendidikan		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.09	**Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			297.779		87.120		283.933		30.930		10,89%		118.050		39,64%		
			Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket		1 lembaga		2 Paket		2 Paket		100,00%		2 Paket		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.17	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**			6.791.865		3.881.578		4.663.872		4.521.147		96,94%		8.402.725		123,72%		
			Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan		30 lembaga		23 Satuan Pendidikan		23 Satuan Pendidikan		100,00%		23 Satuan Pendidikan		85,19%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.15	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			113.511		60.110		82.070		50.860		61,97%		110.970		97,76%		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		96 orang		250 Orang		218 Orang		87,20%		218 Orang		87,20%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.10	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan**			849.600		540.327		5.475.811		5.091.631		92,98%		5.631.959		662,90%		
			Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	45 Peserta Didik		1 lembaga		30 Peserta Didik		31 Peserta Didik		103,33%		31 Peserta Didik		68,89%		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.12	**Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan**			108.733.554		69.653.597		85.874.886		82.561.946		96,14%		152.215.542		139,99%		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2822 Peserta Didik		N/A		2792 Peserta Didik		2995 Peserta Didik		107,27%		2995 Peserta Didik		106,13%		Dinas Pendidikan	
3	1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			134.346.197		38.397.532		41.881.147		38.341.781		91,55%		76.739.312		57,12%		
			Rasio Guru/ Murid jenjang SD	0,05		0,05		0,05		0,05		100,00%		0,05		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	0,05		0,05		0,05		0,06		120,00%		0,06		120,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**			134.346.197		38.397.532		41.881.147		38.341.781		91,55%		76.739.312		57,12%		
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang		5926 orang		7725 orang		7725 orang		100,00%		7725 orang		100,00%		Dinas Pendidikan	
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang		N/A		12685 orang		12685 orang		100,00%		12685 orang		100,00%		Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			133.374.035		38.239.001		41.516.900		38.041.100		91,63%		76.280.101		57,19%		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	350 Laporan		497 lembaga		350 Laporan		350 Laporan		100,00%		350 Laporan		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			972.162		158.530		364.247		300.681		82,55%		459.211		47,24%		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Dinas Pendidikan	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
4	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.121.682.948		1.063.461.370		1.319.267.976		1.086.872.619		82,38%		2.150.333.989		191,71%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		85,54%		100%		89,40%		89,40%		89,40%		89,40%		Dinas Kesehatan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%		91,63%		87,88%		88,63%		100,85%		88,63%		100,72%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	83%		86,87%		82,88%		84,85%		102,38%		84,85%		104,66%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	84%		90,48%		82%		91,12%		111,12%		91,12%		110,23%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%		92,34%		88%		92,76%		105,41%		92,76%		104,22%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			374.216.829		358.499.713		427.588.546		376.619.655		88,08%		735.119.368		196,44%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			35.732.522		42.785.406		58.928.955		47.668.232		80,89%		90.453.637		253,14%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan		100%		235 Orang/bulan		236 Orang/bulan		100,43%		236 Orang/bulan		122,92%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			71.091.174		73.013.480		97.853.248		82.501.656		84,31%		155.515.136		218,75%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan		100%		475 Orang/bulan		475 Orang/bulan		100,00%		475 Orang/bulan		105,56%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			267.393.133		242.700.827		270.806.343		246.449.767		91,01%		489.150.594		182,93%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1174 Orang/bulan		100%		1343 Orang/bulan		1343 Orang/bulan		100,00%		1343 Orang/bulan		114,40%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.082.258		2.068.876		1.297.707		989.119		76,22%		3.057.995		37,84%		
			Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%		64.73 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.082.258		2.068.876		1.297.707		989.119		76,22%		3.057.995		37,84%		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		6 jenis		4 Unit		6 Unit		150,00%		6 Unit		150,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			266.965.244		206.128.640		190.791.125		157.913.874		82,77%		364.042.514		136,36%		
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		90.62 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		N/A		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.134.015		0		1.875.489		1.407.009		75,02%		1.407.009		8,21%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			72.073.629		36.065.058		1.468.473		1.308.680		89,12%		37.373.738		51,85%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			45.112.416		37.103.021		1.376.750		976.000		70,89%		38.079.021		84,41%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			132.645.183		132.960.561		186.070.413		154.222.185		82,88%		287.182.746		216,50%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		7 jenis		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			472.418.617		496.764.141		699.590.598		551.349.971		78,81%		1.048.114.112		221,86%		
			Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	3 jenis		N/A		3 jenis		3 jenis		100,00%		3 jenis		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			304.879.739		229.219.119		311.005.697		262.847.683		84,52%		492.066.801		161,40%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		14 jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			166.477.578		149.679.087		204.881.629		167.921.867		81,96%		317.600.954		190,78%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		12 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		2.701.122		2.844.583		2.243.666		78,88%		4.944.788		29352,84%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		3 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		2.091.593		1.045.839		801.019		76,59%		2.892.612		17170,88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		3 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		3.003.196		2.658.162		1.824.020		68,62%		4.827.217		28654,92%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		3 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		1.058.573		1.070.861		730.884		68,25%		1.789.457		10622,43%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		3 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		844.782		3.741.255		2.647.382		70,76%		3.492.163		20729,89%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		3 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		2.544.467		3.463.059		2.314.277		66,83%		4.858.744		28842,07%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		3 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		2.805.811		2.516.499		1.463.845		58,17%		4.269.656		25345,17%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		3 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		1.204.731		2.839.883		1.554.899		54,75%		2.759.630		16381,48%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		3 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		2.387.825		3.854.164		2.657.663		68,96%		5.045.489		29950,61%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		3 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		1.820.451		2.160.290		1.556.640		72,06%		3.377.090		20046,80%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		3 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		3.015.134		4.524.428		2.356.671		52,09%		5.371.805		31887,66%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		3 Jenis		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		802.515		2.764.951		1.918.661		69,39%		2.721.176		16153,22%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		347.644		2.010.091		1.367.886		68,05%		1.715.530		10183,58%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		546.486		2.853.776		1.801.277		63,12%		2.347.763		13936,59%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		761.409		4.146.949		3.019.801		72,82%		3.781.210		22445,70%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		971.553		1.485.889		1.153.345		77,62%		2.124.898		12613,64%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		742.080		1.505.853		912.046		60,57%		1.654.126		9819,08%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		852.624		2.350.960		1.631.366		69,39%		2.483.990		14745,26%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		12 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		960.438		2.830.577		1.651.794		58,36%		2.612.231		15506,51%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		13 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		595.619		3.374.550		1.949.448		57,77%		2.545.068		15107,82%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		1.150.622		2.719.875		1.961.523		72,12%		3.112.145		18474,06%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		12 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		495.916		3.764.482		2.242.801		59,58%		2.738.717		16257,35%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		683.437		2.497.781		1.724.459		69,04%		2.407.896		14293,55%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		1.106.756		2.283.907		1.493.522		65,39%		2.600.278		15435,55%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		481.379		1.711.791		1.170.034		68,35%		1.651.413		9802,98%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		523.440		1.783.581		1.297.425		72,74%		1.820.865		10808,87%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		13 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		940.139		3.143.177		2.274.918		72,38%		3.215.057		19084,96%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		814.192		1.998.597		1.182.355		59,16%		1.996.547		11851,74%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		12 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		677.608		2.402.738		1.513.104		62,97%		2.190.712		13004,32%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		750.346		1.487.936		1.100.889		73,99%		1.851.235		10989,15%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		12 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		473.593		4.145.142		2.969.830		71,65%		3.443.423		20440,56%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		512.552		4.036.564		2.651.304		65,68%		3.163.856		18781,02%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		10 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		477.300		2.833.206		1.593.114		56,23%		2.070.415		12290,22%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		780.078		4.102.517		2.506.916		61,11%		3.286.994		19511,98%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		432.279		2.601.188		1.737.752		66,81%		2.170.031		12881,56%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		10 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		608.006		3.271.560		2.000.871		61,16%		2.608.877		15486,60%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		334.331		2.699.158		1.786.694		66,19%		2.121.025		12590,65%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		14 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		881.006		3.227.044		2.152.563		66,70%		3.033.569		18007,62%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		759.404		2.280.276		1.643.663		72,08%		2.403.067		14264,89%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		492.161		2.862.207		1.930.101		67,43%		2.422.262		14378,83%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		10 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		863.068		2.415.915		1.498.479		62,03%		2.361.547		14018,42%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		13 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		571.560		4.042.709		2.791.011		69,04%		3.362.570		19960,61%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		10 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		713.973		3.293.605		2.231.028		67,74%		2.945.001		17481,87%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		949.374		2.679.218		1.744.862		65,13%		2.694.236		15993,30%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		12 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		567.308		3.805.866		2.427.271		63,78%		2.994.579		17776,17%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		618.267		3.176.421		2.093.233		65,90%		2.711.500		16095,78%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		474.337		1.860.165		1.298.728		69,82%		1.773.065		10525,12%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		10 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		1.326.015		4.175.145		2.605.787		62,41%		3.931.802		23339,64%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		10 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		963.249		1.984.384		1.397.355		70,42%		2.360.604		14012,82%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		605.045		2.834.879		1.940.717		68,46%		2.545.762		15111,94%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		1.060.426		5.997.298		3.808.127		63,50%		4.868.553		28900,30%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		10 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		643.988		2.564.402		1.759.680		68,62%		2.403.668		14268,46%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		559.172		4.913.450		2.441.917		49,70%		3.001.088		17814,81%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		13 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		615.593		1.634.015		1.142.605		69,93%		1.758.199		10436,87%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		589.410		3.294.064		2.287.398		69,44%		2.876.808		17077,07%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		1.181.526		1.485.775		858.492		57,78%		2.040.019		12109,79%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		10 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		935.749		4.827.949		3.058.046		63,34%		3.993.794		23707,63%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		988.189		2.081.235		1.592.481		76,52%		2.580.670		15319,16%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		783.603		3.265.656		2.103.198		64,40%		2.886.801		17136,39%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		491.464		3.060.325		2.028.739		66,29%		2.520.203		14960,22%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		12 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		452.185		3.817.206		2.281.899		59,78%		2.734.085		16229,85%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		11 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		626.902		2.362.569		1.791.459		75,83%		2.418.361		14355,68%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		10 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.846		1.320.091		4.235.675		2.907.481		68,64%		4.227.573		25095,36%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		9 Kegiatan		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100,00%		1 Unit Kerja		100,00%		Dinas Kesehatan	
5	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			804.001.170		729.222.416		984.416.451		731.180.539		74,28%		1.460.402.955		181,64%		
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	60%		69,84%		55%		63,49%		115,44%		63,49%		103,17%		Dinas Kesehatan	
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,10%		0,05%		0,10%		0,08%		122,33%		0,08%		120,00%		Dinas Kesehatan	
			Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,21%		97,35%		99,18%		98,31%		99,12%		98,31%		101,09%		Dinas Kesehatan	
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	100%		97,47%		98%		102,08%		104,16%		102,08%		101,47%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%		96,75%		100%		96%		96,00%		96%		97,60%		Dinas Kesehatan	
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,07%		99,59%		99,04%		97,30%		98,24%		97,30%		101,11%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	84,13%		96,83%		79,37%		100%		125,99%		100%		118,86%		Dinas Kesehatan	
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08%		100,00%		98,08%		100%		101,96%		100%		101,96%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Persentase Rumah Sehat	88,22%		88,32%		88,19%		88,39%		100,23%		88,39%		100,19%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Jaminan Kesehatan	98,00%		98,48%		96,97%		102,15%		105,34%		102,15%		104,23%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,65%		91,31%		82,50%		106,45%		129,03%		106,45%		123,06%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%		100,82%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			253.625.877		245.561.800		375.354.347		229.252.050		61,08%		474.813.850		187,21%		
			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit		63 Puskesmas		64 Unit		64 Unit		100,00%		64 Unit		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	14 unit		15 Bangunan		10 unit		10 unit		100,00%		10 unit		71,43%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen		N/A		3 Dokumen		4 Dokumen		133,33%		4 Dokumen		133,33%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100%		N/A		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit		N/A		64 Unit		63 Unit		98,44%		63 Unit		98,44%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.01	**Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya**			110.381.289		366.600		204.935.550		75.813.478		36,99%		76.180.078		69,02%		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		2 Bangunan		1 Unit		1 Unit		100,00%		1 Unit		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.20	**Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			20.455.226		15.435.515		8.747.427		6.750.169		77,17%		22.185.685		108,46%		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit		38 Jenis		16 Unit		69 Unit		431,25%		69 Unit		209,09%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.14	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			8.332.225		3.828.802		15.739.171		15.312.746		97,29%		19.141.548		229,73%		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit		2 Kelompok		89 Unit		89 Unit		100,00%		89 Unit		2966,67%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.02.2.01.14	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			1.772.987		159.583.523		71.487.713		65.046.284		90,99%		224.629.807		12669,57%		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		1 kelompok		188 Unit		370 Unit		196,81%		370 Unit		37000,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.02.2.01.14	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			1.388.852		5.002.000		4.657.482		4.266.000		91,59%		9.268.000		667,31%		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		1 Jenis		3 Unit		19 Unit		633,33%		19 Unit		63,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.17	**Pengadaan Bahan Habis Pakai**			77.584.596		29.130.900		14.073.554		10.617.352		75,44%		39.748.252		51,23%		
			Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 Paket		62 Jenis		3 Paket		3 Paket		100,00%		3 Paket		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.16	**Pengadaan Obat, Vaksin**			9.093.726		1.111.477		1.441.939		1.151.006		79,82%		2.262.482		24,88%		
			Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket		4 Jenis		2 Paket		1 Paket		50,00%		1 Paket		50,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.13	**Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			682.517		372.500		32.884		32.500		98,83%		405.000		59,34%		
			Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		1 Jenis		1 Unit		1 Unit		100,00%		1 Unit		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.07	**Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			101.369		117.155		68.200		54.400		79,77%		171.555		169,24%		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit		5 Dokumen		3 Unit		4 Unit		133,33%		4 Unit		133,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.05	**Pengembangan Rumah Sakit**			103.983		0		25.674.050		25.542.028		99,49%		25.542.028		24563,77%		
			Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		N/A		1 Unit		1 Unit		100,00%		1 Unit		100,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.02.2.01.10	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			926.120		105.450		33.600		29.970		89,20%		135.420		14,62%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit		1 Bangunan		2 Unit		2 Unit		100,00%		2 Unit		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			22.802.988		27.131.325		28.462.777		24.636.117		86,56%		51.767.442		227,02%		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit		13 Bangunan		10 Unit		10 Unit		100,00%		10 Unit		83,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			492.155.472		482.726.634		608.652.425		501.539.927		82,40%		984.266.561		199,99%		
			Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi		N/A		700 Lokasi		804 Lokasi		114,86%		804 Lokasi		114,86%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan		N/A		2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		2 kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa		123676 jiwa		54669 jiwa		17820 jiwa		32,60%		17820 jiwa		16971,43%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	100 Dokumen		N/A		100 Dokumen		100 Dokumen		100,00%		100 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan		N/A		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		1 kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas		1 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100,00%		63 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas		1 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100,00%		63 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan		N/A		2 kegiatan		3 kegiatan		150,00%		3 kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan		N/A		2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		2 kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan		N/A		4 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		4 kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas		1 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100,00%		63 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di puskesmas	2 kegiatan		N/A		2 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		2 kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan		N/A		3 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		3 kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan		154 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan		100,00%		153 Kelurahan		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit		N/A		63 Unit		63 Unit		100,00%		63 Unit		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100,00%		63 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas		1 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100,00%		63 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		14.918		1.012.241		683.840		67,56%		698.757		5690,02%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		1 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		48.345		487.202		305.934		62,79%		354.279		2884,91%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		1 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		28.730		713.565		450.639		63,15%		479.369		3903,53%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		84.840		747.134		405.668		54,30%		490.507		3994,23%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		1 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		48.565		838.748		558.170		66,55%		606.735		4940,68%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		1 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		90.835		1.069.790		659.195		61,62%		750.030		6107,53%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		53.456		905.642		789.599		87,19%		843.056		6865,05%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		1 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		21.855		758.361		445.153		58,70%		467.008		3802,88%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		31.525		727.209		509.455		70,06%		540.980		4405,23%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		18.400		831.850		577.824		69,46%		596.225		4855,09%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		16.075		1.135.090		577.464		50,87%		593.540		4833,23%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		21.755		763.406		427.315		55,97%		449.070		3656,81%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		25.544		686.738		453.766		66,08%		479.310		3903,05%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		7.055		1.029.189		571.302		55,51%		578.357		4709,59%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		7.573		1.190.944		812.731		68,24%		820.304		6679,78%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		15.725		698.671		297.834		42,63%		313.559		2553,32%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		16.348		928.986		479.500		51,62%		495.847		4037,71%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		19.635		614.988		412.948		67,15%		432.583		3522,54%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		21.105		1.205.670		545.530		45,25%		566.635		4614,14%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		20.740		848.461		588.199		69,33%		608.939		4958,63%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		8.928		899.795		494.230		54,93%		503.157		4097,24%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		10.963		941.785		488.281		51,85%		499.244		4065,37%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		9.155		966.460		560.150		57,96%		569.305		4635,88%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		14.820		839.304		422.574		50,35%		437.394		3561,73%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		13.275		700.561		346.111		49,40%		359.386		2926,50%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		17.390		600.962		395.317		65,78%		412.707		3360,69%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		26.325		1.020.131		599.986		58,81%		626.311		5100,08%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		9.820		714.968		415.046		58,05%		424.866		3459,71%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		8.200		869.014		504.414		58,04%		512.614		4174,25%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		18.645		624.591		375.694		60,15%		394.339		3211,13%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		10.090		712.020		516.678		72,57%		526.768		4289,50%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		13.526		858.866		444.790		51,79%		458.316		3732,09%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		20.560		744.392		387.675		52,08%		408.235		3324,28%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		11.590		771.884		477.959		61,92%		489.549		3986,43%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		6.073		1.133.558		755.689		66,67%		761.761		6203,07%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		18.005		754.061		441.918		58,61%		459.923		3745,18%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		14.000		1.226.478		765.729		62,43%		779.729		6349,38%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		11.915		744.785		448.148		60,17%		460.063		3746,32%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		7.620		694.512		388.805		55,98%		396.425		3228,11%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		8.885		779.755		371.685		47,67%		380.570		3099,01%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		20.680		660.161		328.180		49,71%		348.860		2840,79%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		9.180		1.130.110		606.115		53,63%		615.295		5010,38%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		13.590		560.851		394.853		70,40%		408.443		3325,98%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		9.158		1.042.458		502.503		48,20%		511.662		4166,49%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		9.333		768.536		415.986		54,13%		425.318		3463,39%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		18.675		584.800		423.967		72,50%		442.642		3604,46%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		23.515		767.530		548.973		71,52%		572.488		4661,80%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		10.195		983.891		703.105		71,46%		713.300		5808,44%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		12.765		941.394		510.217		54,20%		522.982		4258,67%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		12.780		1.443.443		713.151		49,41%		725.931		5911,30%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		25.060		1.300.669		809.767		62,26%		834.827		6798,04%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		18.035		840.209		483.961		57,60%		501.996		4087,78%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		6.360		1.159.159		703.251		60,67%		709.611		5778,40%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		16.026		796.738		495.219		62,16%		511.245		4163,10%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		30.765		908.645		536.384		59,03%		567.150		4618,33%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		15.491		902.314		410.072		45,45%		425.563		3465,38%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		12.190		1.432.610		934.332		65,22%		946.522		7707,58%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		6.780		924.084		535.564		57,96%		542.344		4416,34%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		10.236		1.086.978		709.762		65,30%		719.998		5862,98%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		7.715		977.416		532.699		54,50%		540.414		4400,62%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		17.330		905.005		541.942		59,88%		559.272		4554,19%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		8.995		542.443		299.679		55,25%		308.674		2513,55%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.280		8.492		1.146.435		711.354		62,05%		719.846		5861,75%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			2.924.783		0		1.380.604		1.213.930		87,93%		1.213.930		41,50%		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	63 Unit		N/A		40 Unit		40 Unit		100,00%		40 Unit		63,49%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			445.667		691.613		360.834		360.034		99,78%		1.051.647		235,97%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen		11 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			19.478.405		3.005.025		827.151		715.322		86,48%		3.720.347		19,10%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		154 Kelurahan		12 Dokumen		25 Dokumen		208,33%		25 Dokumen		208,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		16.863		32.136		0		0,00%		16.863		109,15%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.996		32.138		0		0,00%		8.996		58,23%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.692		32.138		0		0,00%		8.692		56,26%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.943		32.138		0		0,00%		8.943		57,89%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		10.947		32.138		0		0,00%		10.947		70,86%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.994		32.138		0		0,00%		8.994		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.582		32.138		0		0,00%		8.582		55,55%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.916		32.138		0		0,00%		8.916		57,71%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		7.559		32.138		0		0,00%		7.559		48,92%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.773		32.138		0		0,00%		8.773		56,79%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		7.623		32.138		0		0,00%		7.623		49,34%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.634		32.138		0		0,00%		8.634		55,88%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.967		32.138		0		0,00%		8.967		58,04%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.943		32.138		0		0,00%		8.943		57,89%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.943		32.138		0		0,00%		8.943		57,89%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.731		32.138		0		0,00%		8.731		56,51%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		14.269		32.138		0		0,00%		14.269		92,36%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		14.247		32.138		0		0,00%		14.247		92,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.943		32.138		0		0,00%		8.943		57,89%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.166		32.138		0		0,00%		8.166		52,85%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.994		32.138		0		0,00%		8.994		58,21%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		11.634		32.138		0		0,00%		11.634		75,31%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.676		32.138		0		0,00%		8.676		56,15%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.502		32.138		0		0,00%		8.502		55,03%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.638		32.138		0		0,00%		8.638		55,91%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		11.583		32.138		0		0,00%		11.583		74,97%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		11.627		32.138		0		0,00%		11.627		75,26%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.790		32.138		0		0,00%		8.790		56,90%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.988		32.138		0		0,00%		8.988		58,18%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.252		32.138		0		0,00%		8.252		53,41%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		11.583		32.138		0		0,00%		11.583		74,97%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.639		32.138		0		0,00%		8.639		55,92%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		10 Dokumen		83,33%		10 Dokumen		83,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.219		32.138		0		0,00%		8.219		53,20%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.916		32.138		0		0,00%		8.916		57,71%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.998		32.138		0		0,00%		8.998		58,24%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.893		32.138		0		0,00%		8.893		57,56%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		13 Dokumen		108,33%		13 Dokumen		108,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		10 Dokumen		83,33%		10 Dokumen		83,33%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		14.274		32.138		0		0,00%		14.274		92,39%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.943		32.138		0		0,00%		8.943		57,89%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.991		32.138		0		0,00%		8.991		58,20%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.943		32.138		0		0,00%		8.943		57,89%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.988		32.138		0		0,00%		8.988		58,18%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		16.750		32.138		0		0,00%		16.750		108,42%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.280		32.138		0		0,00%		8.280		53,59%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.943		32.138		0		0,00%		8.943		57,89%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		7.971		32.138		0		0,00%		7.971		51,59%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.992		32.138		0		0,00%		8.992		58,20%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.995		32.138		0		0,00%		8.995		58,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		8.362		32.138		0		0,00%		8.362		54,13%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		31.566		32.138		0		0,00%		31.566		204,32%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			15.449		17.486		32.138		0		0,00%		17.486		113,18%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			434.139.730		399.848.530		491.380.793		437.122.703		88,96%		836.971.233		192,79%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		1175129 jiwa		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			175.559		555.301		760.379		598.682		78,73%		1.153.983		657,32%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen		10 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			4.191.821		6.128.823		31.088.247		20.613.426		66,31%		26.742.248		637,96%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		196 Balita		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		34.663		20.324		0		0,00%		34.663		137,97%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		21.216		12.938		0		0,00%		21.216		84,45%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		24.683		26.368		0		0,00%		24.683		98,25%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		39.786		22.393		0		0,00%		39.786		158,37%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		27.960		18.935		0		0,00%		27.960		111,29%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		22.508		46.085		0		0,00%		22.508		89,59%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		32.660		17.103		0		0,00%		32.660		130,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		21.788		20.456		0		0,00%		21.788		86,73%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		33.703		34.960		0		0,00%		33.703		134,15%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		25.955		16.052		0		0,00%		25.955		103,31%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		21.247		20.181		0		0,00%		21.247		84,57%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		35.426		23.858		0		0,00%		35.426		141,01%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		40.849		16.791		0		0,00%		40.849		162,60%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		23.702		23.549		0		0,00%		23.702		94,35%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		18.912		26.787		0		0,00%		18.912		75,28%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		30.979		13.369		0		0,00%		30.979		123,31%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		32.346		16.840		0		0,00%		32.346		128,75%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		33.434		20.624		0		0,00%		33.434		133,08%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		21.988		21.287		0		0,00%		21.988		87,52%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		40.212		24.033		0		0,00%		40.212		160,06%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		6 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		26.550		21.510		0		0,00%		26.550		105,68%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		25.470		31.206		0		0,00%		25.470		101,38%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		19.775		27.682		0		0,00%		19.775		78,71%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		27.162		20.427		0		0,00%		27.162		108,12%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		31.423		19.996		0		0,00%		31.423		125,08%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		20.219		19.565		0		0,00%		20.219		80,48%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		29.417		20.513		0		0,00%		29.417		117,09%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		22.037		19.189		0		0,00%		22.037		87,72%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		28.432		19.708		0		0,00%		28.432		113,17%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		32.579		16.475		0		0,00%		32.579		129,68%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		26.821		29.007		0		0,00%		26.821		106,76%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		30.979		22.887		0		0,00%		30.979		123,31%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		24.063		19.938		0		0,00%		24.063		95,78%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		34.329		20.500		0		0,00%		34.329		136,64%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		53.474		14.584		0		0,00%		53.474		212,85%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		10 Dokumen		83,33%		10 Dokumen		83,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		31.449		19.993		0		0,00%		31.449		125,18%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		22.211		19.696		0		0,00%		22.211		88,41%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		7 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		23.740		18.251		0		0,00%		23.740		94,49%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		21.469		17.258		0		0,00%		21.469		85,46%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		6 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		37.585		13.037		0		0,00%		37.585		149,61%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		36.568		28.392		0		0,00%		36.568		145,56%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		24.134		31.315		0		0,00%		24.134		96,06%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		31.937		23.385		0		0,00%		31.937		127,13%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		10 Dokumen		83,33%		10 Dokumen		83,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		21.860		14.186		0		0,00%		21.860		87,01%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		26.390		21.685		0		0,00%		26.390		105,04%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		31.727		23.168		0		0,00%		31.727		126,29%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		30.543		13.833		0		0,00%		30.543		121,58%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		24.229		33.746		0		0,00%		24.229		96,44%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		32.701		23.020		0		0,00%		32.701		130,17%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		24.614		20.825		0		0,00%		24.614		97,97%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		30.642		16.793		0		0,00%		30.642		121,97%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		22.092		19.796		0		0,00%		22.092		87,94%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		23.908		35.015		0		0,00%		23.908		95,16%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		31.038		12.971		0		0,00%		31.038		123,54%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		29.424		26.699		0		0,00%		29.424		117,12%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		25.948		13.281		0		0,00%		25.948		103,28%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		33.722		13.246		0		0,00%		33.722		134,23%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		32.868		26.808		0		0,00%		32.868		130,83%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		29.882		20.634		0		0,00%		29.882		118,95%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		27.079		27.129		0		0,00%		27.079		107,79%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		27.861		21.398		0		0,00%		27.861		110,90%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		11 Dokumen		91,67%		11 Dokumen		91,67%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		82.151		13.158		0		0,00%		82.151		327,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		81.241		17.280		0		0,00%		81.241		323,37%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		6 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			3.281.051		138.000		125.000		103.000		82,40%		241.000		7,35%		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41553 Orang		1137 Kunjungan		41885 Orang		31867 Orang		76,08%		31867 Orang		76,69%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			9.146.714		6.917.428		3.327.691		3.106.965		93,37%		10.024.393		109,60%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43532 Orang		126 Puskesmas		43881 Orang		43460 Orang		99,04%		43460 Orang		99,83%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		62.640		21.442		0		0,00%		62.640		1870,03%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	739 Orang		5 Kegiatan		745 Orang		1234 Orang		165,64%		1234 Orang		166,98%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		83.305		21.442		0		0,00%		83.305		2486,93%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang		6 Kegiatan		226 Orang		220 Orang		97,35%		220 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		85.680		21.442		0		0,00%		85.680		2557,85%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang		4 Kegiatan		546 Orang		556 Orang		101,83%		556 Orang		102,96%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		96.247		21.442		0		0,00%		96.247		2873,29%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang		5 Kegiatan		223 Orang		213 Orang		95,52%		213 Orang		98,16%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		81.802		21.442		0		0,00%		81.802		2442,05%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	929 Orang		6 Kegiatan		935 Orang		890 Orang		95,19%		890 Orang		95,80%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		64.000		21.442		0		0,00%		64.000		1910,61%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	825 Orang		7 Kegiatan		831 Orang		739 Orang		88,93%		739 Orang		89,58%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		84.207		21.442		0		0,00%		84.207		2513,87%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	673 Orang		6 Kegiatan		679 Orang		505 Orang		74,37%		505 Orang		75,04%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		81.316		21.442		0		0,00%		81.316		2427,56%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	760 Orang		7 Kegiatan		766 Orang		789 Orang		103,00%		789 Orang		103,82%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		90.963		21.442		0		0,00%		90.963		2715,56%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1029 Orang		4 Kegiatan		1035 Orang		832 Orang		80,39%		832 Orang		80,86%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		87.652		21.442		0		0,00%		87.652		2616,71%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang		4 Kegiatan		366 Orang		385 Orang		105,19%		385 Orang		106,94%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		82.964		21.442		0		0,00%		82.964		2476,76%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1286 Orang		6 Kegiatan		1292 Orang		1161 Orang		89,86%		1161 Orang		90,28%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		85.109		21.442		0		0,00%		85.109		2540,80%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	670 Orang		6 Kegiatan		676 Orang		657 Orang		97,19%		657 Orang		98,06%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		90.772		21.442		0		0,00%		90.772		2709,86%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	595 Orang		5 Kegiatan		601 Orang		460 Orang		76,54%		460 Orang		77,31%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		74.573		21.442		0		0,00%		74.573		2226,26%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	969 Orang		6 Kegiatan		975 Orang		665 Orang		68,21%		665 Orang		68,63%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		77.013		21.442		0		0,00%		77.013		2299,09%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	813 Orang		5 Kegiatan		819 Orang		798 Orang		97,44%		798 Orang		98,15%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		94.848		21.442		0		0,00%		94.848		2831,53%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277 Orang		4 Kegiatan		283 Orang		548 Orang		193,64%		548 Orang		197,83%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		76.769		21.442		0		0,00%		76.769		2291,81%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		7 Kegiatan		301 Orang		383 Orang		127,24%		383 Orang		129,83%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		95.378		21.442		0		0,00%		95.378		2847,37%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819 Orang		5 Kegiatan		825 Orang		394 Orang		47,76%		394 Orang		48,11%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		81.422		21.442		0		0,00%		81.422		2430,73%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	846 Orang		5 Kegiatan		852 Orang		621 Orang		72,89%		621 Orang		73,40%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		96.344		21.442		0		0,00%		96.344		2876,20%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	853 Orang		5 Kegiatan		830 Orang		400 Orang		48,19%		400 Orang		46,89%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		85.237		21.442		0		0,00%		85.237		2544,60%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	577 Orang		7 Kegiatan		583 Orang		845 Orang		144,94%		845 Orang		146,45%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		84.404		21.442		0		0,00%		84.404		2519,76%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1109 Orang		12 Kegiatan		1115 Orang		998 Orang		89,51%		998 Orang		89,99%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		77.452		21.442		0		0,00%		77.452		2312,19%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang		5 Kegiatan		692 Orang		358 Orang		51,73%		358 Orang		52,19%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		70.368		21.442		0		0,00%		70.368		2100,72%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang		4 Kegiatan		612 Orang		593 Orang		96,90%		593 Orang		97,85%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		89.946		21.442		0		0,00%		89.946		2685,19%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292 Orang		5 Kegiatan		298 Orang		316 Orang		106,04%		316 Orang		108,22%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		82.798		21.442		0		0,00%		82.798		2471,82%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	403 Orang		4 Kegiatan		409 Orang		796 Orang		194,62%		796 Orang		197,52%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		96.151		21.442		0		0,00%		96.151		2870,42%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang		6 Kegiatan		606 Orang		541 Orang		89,27%		541 Orang		90,17%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		81.415		21.442		0		0,00%		81.415		2430,51%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	399 Orang		6 Kegiatan		405 Orang		367 Orang		90,62%		367 Orang		91,98%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		79.516		21.442		0		0,00%		79.516		2373,83%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	698 Orang		6 Kegiatan		704 Orang		1175 Orang		166,90%		1175 Orang		168,34%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		97.696		21.442		0		0,00%		97.696		2916,57%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		4 Kegiatan		267 Orang		247 Orang		92,51%		247 Orang		94,64%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		87.083		21.442		0		0,00%		87.083		2599,72%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	848 Orang		5 Kegiatan		854 Orang		875 Orang		102,46%		875 Orang		103,18%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		96.606		21.442		0		0,00%		96.606		2884,02%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	899 Orang		4 Kegiatan		905 Orang		920 Orang		101,66%		920 Orang		102,34%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		81.174		21.442		0		0,00%		81.174		2423,31%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	459 Orang		4 Kegiatan		465 Orang		455 Orang		97,85%		455 Orang		99,13%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		78.894		21.442		0		0,00%		78.894		2355,25%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1158 Orang		6 Kegiatan		1164 Orang		1005 Orang		86,34%		1005 Orang		86,79%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		87.290		21.442		0		0,00%		87.290		2605,90%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	821 Orang		5 Kegiatan		827 Orang		740 Orang		89,48%		740 Orang		90,13%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		83.474		21.442		0		0,00%		83.474		2491,97%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang		4 Kegiatan		622 Orang		974 Orang		156,59%		974 Orang		158,12%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		83.401		21.442		0		0,00%		83.401		2489,82%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	844 Orang		5 Kegiatan		850 Orang		862 Orang		101,41%		862 Orang		102,13%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		77.122		21.442		0		0,00%		77.122		2302,34%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755 Orang		5 Kegiatan		761 Orang		276 Orang		36,27%		276 Orang		36,56%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		87.985		21.442		0		0,00%		87.985		2626,66%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	533 Orang		7 Kegiatan		539 Orang		484 Orang		89,80%		484 Orang		90,81%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		92.926		21.442		0		0,00%		92.926		2774,17%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	415 Orang		5 Kegiatan		421 Orang		475 Orang		112,83%		475 Orang		114,46%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		83.609		21.442		0		0,00%		83.609		2496,00%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	610 Orang		4 Kegiatan		616 Orang		349 Orang		56,66%		349 Orang		57,21%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		79.151		21.442		0		0,00%		79.151		2362,92%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1078 Orang		5 Kegiatan		1084 Orang		1118 Orang		103,14%		1118 Orang		103,71%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		84.091		21.442		0		0,00%		84.091		2510,40%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	642 Orang		5 Kegiatan		648 Orang		644 Orang		99,38%		644 Orang		100,31%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		84.849		21.442		0		0,00%		84.849		2533,04%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	784 Orang		6 Kegiatan		790 Orang		609 Orang		77,09%		609 Orang		77,68%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		91.386		21.442		0		0,00%		91.386		2728,18%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	536 Orang		5 Kegiatan		542 Orang		556 Orang		102,58%		556 Orang		103,73%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		93.622		21.442		0		0,00%		93.622		2794,93%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	455 Orang		5 Kegiatan		709 Orang		691 Orang		97,46%		691 Orang		151,87%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		92.706		21.442		0		0,00%		92.706		2767,60%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	703 Orang		5 Kegiatan		461 Orang		367 Orang		79,61%		367 Orang		52,20%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		56.324		21.442		0		0,00%		56.324		1681,48%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1347 Orang		5 Kegiatan		1353 Orang		1195 Orang		88,32%		1195 Orang		88,72%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		83.394		21.442		0		0,00%		83.394		2489,58%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	618 Orang		5 Kegiatan		624 Orang		1385 Orang		221,96%		1385 Orang		224,11%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		64.937		21.442		0		0,00%		64.937		1938,59%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	788 Orang		4 Kegiatan		794 Orang		563 Orang		70,91%		563 Orang		71,45%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		94.748		21.442		0		0,00%		94.748		2828,54%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1051 Orang		5 Kegiatan		1057 Orang		1673 Orang		158,28%		1673 Orang		159,18%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		84.554		21.442		0		0,00%		84.554		2524,23%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	604 Orang		4 Kegiatan		610 Orang		531 Orang		87,05%		531 Orang		87,91%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		68.965		21.442		0		0,00%		68.965		2058,83%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1164 Orang		4 Kegiatan		1170 Orang		1131 Orang		96,67%		1131 Orang		97,16%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		75.071		21.442		0		0,00%		75.071		2241,13%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang		4 Kegiatan		251 Orang		309 Orang		123,11%		309 Orang		126,12%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		90.521		21.442		0		0,00%		90.521		2702,36%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang		5 Kegiatan		592 Orang		441 Orang		74,49%		441 Orang		147,99%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		85.151		21.442		0		0,00%		85.151		2542,05%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	586 Orang		6 Kegiatan		304 Orang		261 Orang		85,86%		261 Orang		44,54%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		74.964		21.442		0		0,00%		74.964		2237,92%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	942 Orang		5 Kegiatan		948 Orang		831 Orang		87,66%		831 Orang		88,22%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		80.065		21.442		0		0,00%		80.065		2390,20%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	354 Orang		5 Kegiatan		360 Orang		353 Orang		98,06%		353 Orang		99,72%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		76.345		21.442		0		0,00%		76.345		2279,16%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	719 Orang		4 Kegiatan		725 Orang		685 Orang		94,48%		685 Orang		95,27%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		79.746		21.442		0		0,00%		79.746		2380,70%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	732 Orang		4 Kegiatan		738 Orang		685 Orang		92,82%		685 Orang		93,58%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		78.845		21.442		0		0,00%		78.845		2353,78%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	846 Orang		5 Kegiatan		852 Orang		881 Orang		103,40%		881 Orang		104,14%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		70.227		21.442		0		0,00%		70.227		2096,51%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	613 Orang		3 Kegiatan		619 Orang		515 Orang		83,20%		515 Orang		84,01%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		58.909		21.442		0		0,00%		58.909		1758,62%		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1123 Orang		2 Kegiatan		1129 Orang		1938 Orang		171,66%		1938 Orang		172,57%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2.942.877		610.882		734.338		206.051		28,06%		816.933		27,76%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		80.686		42.534		0		0,00%		80.686		185,29%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		67.101		29.338		0		0,00%		67.101		154,09%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		47.652		53.604		0		0,00%		47.652		109,43%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		97.127		30.137		0		0,00%		97.127		223,04%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		64.417		37.179		0		0,00%		64.417		147,93%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		13 Dokumen		108,33%		13 Dokumen		108,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		45.701		53.463		0		0,00%		45.701		104,95%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		89.718		37.219		0		0,00%		89.718		206,03%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		61.284		35.113		0		0,00%		61.284		140,73%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		30.226		44.719		0		0,00%		30.226		69,41%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		54.071		30.024		0		0,00%		54.071		124,17%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		55.683		47.134		0		0,00%		55.683		127,87%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		53.968		40.593		0		0,00%		53.968		123,93%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		59.142		32.827		0		0,00%		59.142		135,81%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		52.893		48.607		0		0,00%		52.893		121,46%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		67.449		51.180		0		0,00%		67.449		154,89%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		102.666		34.828		0		0,00%		102.666		235,76%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		13 Dokumen		108,33%		13 Dokumen		108,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		71.873		29.097		0		0,00%		71.873		165,05%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		60.311		43.016		0		0,00%		60.311		138,50%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		56.269		48.064		0		0,00%		56.269		129,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		51.124		47.390		0		0,00%		51.124		117,40%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		62.149		31.943		0		0,00%		62.149		142,72%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		42.131		61.634		0		0,00%		42.131		96,75%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		52.064		41.248		0		0,00%		52.064		119,56%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		55.125		38.173		0		0,00%		55.125		126,59%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		62.776		30.216		0		0,00%		62.776		144,16%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		69.709		38.528		0		0,00%		69.709		160,08%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		74.430		45.152		0		0,00%		74.430		170,92%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		49.309		29.972		0		0,00%		49.309		113,23%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		61.068		41.212		0		0,00%		61.068		140,24%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		67.051		32.140		0		0,00%		67.051		153,98%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		51.110		51.547		0		0,00%		51.110		117,37%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		67.472		50.217		0		0,00%		67.472		154,94%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		72.671		38.251		0		0,00%		72.671		166,88%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		49.224		45.265		0		0,00%		49.224		113,04%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		42.516		35.090		0		0,00%		42.516		97,64%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		10 Dokumen		83,33%		10 Dokumen		83,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		41.814		46.924		0		0,00%		41.814		96,02%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		66.709		71.600		0		0,00%		66.709		153,19%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		60.553		44.517		0		0,00%		60.553		139,05%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		63.655		31.607		0		0,00%		63.655		146,18%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		80.013		31.338		0		0,00%		80.013		183,74%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		69.381		28.566		0		0,00%		69.381		159,33%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		106.448		52.762		0		0,00%		106.448		244,45%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		66.686		52.570		0		0,00%		66.686		153,14%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		10 Dokumen		83,33%		10 Dokumen		83,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		78.998		31.492		0		0,00%		78.998		181,41%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		65.395		47.440		0		0,00%		65.395		150,17%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		116.241		35.899		0		0,00%		116.241		266,94%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		76.560		30.988		0		0,00%		76.560		175,81%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		54.875		47.973		0		0,00%		54.875		126,01%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		56.544		44.436		0		0,00%		56.544		129,85%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		84.774		37.196		0		0,00%		84.774		194,68%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		75.330		43.862		0		0,00%		75.330		172,99%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		13 Dokumen		108,33%		13 Dokumen		108,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		63.173		37.272		0		0,00%		63.173		145,07%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		68.493		42.389		0		0,00%		68.493		157,29%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		68.797		33.544		0		0,00%		68.797		157,99%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		59.189		43.846		0		0,00%		59.189		135,92%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		72.049		30.175		0		0,00%		72.049		165,45%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		114.597		34.446		0		0,00%		114.597		263,16%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		70.112		37.770		0		0,00%		70.112		161,01%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		68.851		43.360		0		0,00%		68.851		158,11%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		65.840		47.615		0		0,00%		65.840		151,19%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		81.873		42.105		0		0,00%		81.873		188,01%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		2 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		4.139		37.807		0		0,00%		4.139		9,51%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		1 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.546		2.713		40.976		0		0,00%		2.713		6,23%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		1 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria			0		0		25.388		24.720		97,37%		24.720		0,00%		
			jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	N/A		N/A		10 orang		10 orang		100,00%		10 orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)			0		0		765.345		652.921		85,31%		652.921		0,00%		
			Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	N/A		N/A		205 orang		1299 orang		633,66%		1299 orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		662.188		5.115		0		0,00%		662.188		19768,57%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52741 Orang		9 Kegiatan		823 Orang		943 Orang		114,58%		943 Orang		1,79%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.597		5.115		0		0,00%		3.597		107,38%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	823 orang		1 Kegiatan		249 orang		246 orang		98,80%		246 orang		29,89%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.747		5.115		0		0,00%		2.747		82,02%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	249 orang		1 Kegiatan		640 orang		788 orang		123,13%		788 orang		316,47%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.746		5.115		0		0,00%		3.746		111,82%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 orang		1 Kegiatan		250 orang		338 orang		135,20%		338 orang		52,81%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.108		5.115		0		0,00%		2.108		62,93%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 orang		1 Kegiatan		1416 orang		1416 orang		100,00%		1416 orang		566,40%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.873		5.115		0		0,00%		2.873		85,78%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1416 orang		1 Kegiatan		912 orang		975 orang		106,91%		975 orang		68,86%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		1.036		5.115		0		0,00%		1.036		30,93%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	912 orang		1 Kegiatan		732 orang		807 orang		110,25%		807 orang		88,49%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.805		5.115		0		0,00%		2.805		83,74%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	732 orang		1 Kegiatan		922 orang		1080 orang		117,14%		1080 orang		147,54%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.711		5.115		0		0,00%		3.711		110,79%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	922 orang		1 Kegiatan		1224 orang		1051 orang		85,87%		1051 orang		113,99%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		1.749		5.115		0		0,00%		1.749		52,21%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1224 orang		1 Kegiatan		465 orang		595 orang		127,96%		595 orang		48,61%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.996		5.115		0		0,00%		2.996		89,45%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	465 orang		1 Kegiatan		1420 orang		1420 orang		100,00%		1420 orang		305,38%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.868		5.115		0		0,00%		2.868		85,62%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1420 orang		1 Kegiatan		538 orang		598 orang		111,15%		598 orang		42,11%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.970		5.115		0		0,00%		2.970		88,66%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	538 orang		1 Kegiatan		695 orang		697 orang		100,29%		697 orang		129,55%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		4.884		5.115		0		0,00%		4.884		145,80%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	695 orang		1 Kegiatan		1109 orang		1109 orang		100,00%		1109 orang		159,57%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.620		5.115		0		0,00%		2.620		78,22%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1109 orang		1 Kegiatan		924 orang		1290 orang		139,61%		1290 orang		116,32%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		1.703		5.115		0		0,00%		1.703		50,83%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	924 orang		1 Kegiatan		333 orang		422 orang		126,73%		422 orang		45,67%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		1.379		5.115		0		0,00%		1.379		41,18%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	333 orang		3 Kegiatan		792 orang		616 orang		77,78%		616 orang		184,98%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.363		5.115		0		0,00%		2.363		70,54%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	792 orang		1 Kegiatan		882 orang		882 orang		100,00%		882 orang		111,36%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.465		5.115		0		0,00%		3.465		103,44%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	882 orang		1 Kegiatan		1217 orang		1217 orang		100,00%		1217 orang		137,98%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.013		5.115		0		0,00%		2.013		60,09%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1217 orang		2 Kegiatan		949 orang		949 orang		100,00%		949 orang		77,98%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		4.502		5.115		0		0,00%		4.502		134,41%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 orang		2 Kegiatan		2175 orang		2175 orang		100,00%		2175 orang		229,19%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.772		5.115		0		0,00%		2.772		82,75%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2175 orang		1 Kegiatan		1287 orang		1331 orang		103,42%		1331 orang		61,20%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.081		5.115		0		0,00%		3.081		91,98%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1287 orang		1 Kegiatan		696 orang		730 orang		104,89%		730 orang		56,72%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.578		5.115		0		0,00%		3.578		106,81%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	696 orang		1 Kegiatan		664 orang		585 orang		88,10%		585 orang		84,05%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.449		5.115		0		0,00%		2.449		73,10%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	664 orang		1 Kegiatan		429 orang		735 orang		171,33%		735 orang		110,69%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		4.015		5.115		0		0,00%		4.015		119,87%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 orang		1 Kegiatan		462 orang		386 orang		83,55%		386 orang		89,98%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.341		5.115		0		0,00%		3.341		99,73%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	462 orang		1 Kegiatan		718 orang		682 orang		94,99%		682 orang		147,62%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.083		5.115		0		0,00%		3.083		92,03%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	718 orang		1 Kegiatan		447 orang		462 orang		103,36%		462 orang		64,35%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.708		5.115		0		0,00%		2.708		80,84%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	447 orang		1 Kegiatan		754 orang		973 orang		129,05%		973 orang		217,67%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		4.772		5.115		0		0,00%		4.772		142,47%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	754 orang		1 Kegiatan		290 orang		257 orang		88,62%		257 orang		34,08%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.424		5.115		0		0,00%		3.424		102,21%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	290 orang		1 Kegiatan		1037 orang		1145 orang		110,41%		1145 orang		394,83%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.323		5.115		0		0,00%		2.323		69,36%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1037 orang		1 Kegiatan		971 orang		1008 orang		103,81%		1008 orang		97,20%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.503		5.115		0		0,00%		2.503		74,71%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	971 orang		1 Kegiatan		718 orang		712 orang		99,16%		712 orang		73,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.158		5.115		0		0,00%		3.158		94,29%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	718 orang		1 Kegiatan		1430 orang		2200 orang		153,85%		2200 orang		306,41%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		4.224		5.115		0		0,00%		4.224		126,10%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1430 orang		1 Kegiatan		879 orang		838 orang		95,34%		838 orang		58,60%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.440		5.115		0		0,00%		3.440		102,71%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	879 orang		1 Kegiatan		670 orang		724 orang		108,06%		724 orang		82,37%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.523		5.115		0		0,00%		3.523		105,16%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	670 orang		1 Kegiatan		948 orang		1314 orang		138,61%		1314 orang		196,12%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.003		5.115		0		0,00%		3.003		89,65%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	948 orang		1 Kegiatan		832 orang		1030 orang		123,80%		1030 orang		108,65%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.201		5.115		0		0,00%		3.201		95,56%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	832 orang		2 Kegiatan		592 orang		691 orang		116,72%		691 orang		83,05%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.771		5.115		0		0,00%		2.771		82,74%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	592 orang		1 Kegiatan		490 orang		669 orang		136,53%		669 orang		113,01%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		1.313		5.115		0		0,00%		1.313		39,21%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	490 orang		1 Kegiatan		687 orang		687 orang		100,00%		687 orang		140,20%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.293		5.115		0		0,00%		3.293		98,32%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	687 orang		1 Kegiatan		1436 orang		1251 orang		87,12%		1251 orang		182,10%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		1.419		5.115		0		0,00%		1.419		42,36%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1436 orang		1 Kegiatan		700 orang		677 orang		96,71%		677 orang		47,14%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.640		5.115		0		0,00%		2.640		78,81%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	700 orang		1 Kegiatan		966 orang		983 orang		101,76%		983 orang		140,43%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.763		5.115		0		0,00%		3.763		112,34%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	966 orang		1 Kegiatan		803 orang		1005 orang		125,16%		1005 orang		104,04%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.092		5.115		0		0,00%		2.092		62,46%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	803 orang		1 Kegiatan		951 orang		1053 orang		110,73%		1053 orang		131,13%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.716		5.115		0		0,00%		3.716		110,93%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	578 orang		1 Kegiatan		578 orang		578 orang		100,00%		578 orang		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.926		5.115		0		0,00%		3.926		117,22%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	951 orang		1 Kegiatan		1638 orang		1455 orang		88,83%		1455 orang		153,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.353		5.115		0		0,00%		3.353		100,09%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1638 orang		1 Kegiatan		686 orang		759 orang		110,64%		759 orang		46,34%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.752		5.115		0		0,00%		3.752		112,02%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	686 orang		1 Kegiatan		861 orang		861 orang		100,00%		861 orang		125,51%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.649		5.115		0		0,00%		3.649		108,92%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	861 orang		1 Kegiatan		1148 orang		1148 orang		100,00%		1148 orang		133,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		4.144		5.115		0		0,00%		4.144		123,72%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 orang		1 Kegiatan		666 orang		767 orang		115,17%		767 orang		66,81%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.620		5.115		0		0,00%		2.620		78,22%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	666 orang		1 Kegiatan		1277 orang		1342 orang		105,09%		1342 orang		201,50%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		1.676		5.115		0		0,00%		1.676		50,05%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1277 orang		1 Kegiatan		369 orang		490 orang		132,79%		490 orang		38,37%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		4.200		5.115		0		0,00%		4.200		125,38%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 orang		1 Kegiatan		613 orang		671 orang		109,46%		671 orang		181,84%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		4.522		5.115		0		0,00%		4.522		135,00%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350 orang		2 Kegiatan		350 orang		350 orang		100,00%		350 orang		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.839		5.115		0		0,00%		3.839		114,60%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	613 orang		2 Kegiatan		1037 orang		1143 orang		110,22%		1143 orang		186,46%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		1.459		5.115		0		0,00%		1.459		43,54%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1037 orang		1 Kegiatan		401 orang		508 orang		126,68%		508 orang		48,99%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		2.871		5.115		0		0,00%		2.871		85,71%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	401 orang		1 Kegiatan		795 orang		754 orang		94,84%		754 orang		188,03%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.109		5.115		0		0,00%		3.109		92,80%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	795 orang		1 Kegiatan		944 orang		1014 orang		107,42%		1014 orang		127,55%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		1.498		5.115		0		0,00%		1.498		44,73%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	944 orang		1 Kegiatan		952 orang		952 orang		100,00%		952 orang		100,85%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		3.288		5.115		0		0,00%		3.288		98,16%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	952 orang		1 Kegiatan		667 orang		640 orang		95,95%		640 orang		67,23%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		121.816		5.115		0		0,00%		121.816		3636,62%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	667 orang		2 Orang		1235 orang		1377 orang		111,50%		1377 orang		206,45%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		126.391		1.111.726		878.593		79,03%		1.004.985		30002,23%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1235 orang		2 Orang		52741 orang		56551 orang		107,22%		56551 orang		4579,03%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0		0		888.444		720.000		81,04%		720.000		0,00%		
			Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	N/A		N/A		666 orang		2345 orang		352,10%		2345 orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		792.362		3.147.476		509.021		16,17%		1.301.382		38850,70%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang		9 Kegiatan		60480 Orang		60563 Orang		100,14%		60563 Orang		100,08%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		126.659		19.754		0		0,00%		126.659		3781,21%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 orang		2 Orang		949 orang		1036 orang		109,17%		1036 orang		109,17%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		126.442		11.582		0		0,00%		126.442		3774,74%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	283 orang		2 Orang		282 orang		332 orang		117,73%		332 orang		117,31%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.551		19.754		0		0,00%		127.551		3807,83%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	707 orang		2 Orang		707 orang		724 orang		102,40%		724 orang		102,40%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		110.868		11.582		0		0,00%		110.868		3309,79%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293 orang		2 Orang		293 orang		298 orang		101,71%		298 orang		101,71%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		120.618		19.754		0		0,00%		120.618		3600,87%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1293 orang		2 Orang		1293 orang		1315 orang		101,70%		1315 orang		101,70%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.347		17.030		0		0,00%		127.347		3801,74%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1179 orang		2 Orang		1178 orang		1325 orang		112,48%		1325 orang		112,38%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.513		19.754		0		0,00%		127.513		3806,69%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	712 orang		2 Orang		711 orang		661 orang		92,97%		661 orang		92,84%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		126.073		19.754		0		0,00%		126.073		3763,71%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1164 orang		2 Orang		1163 orang		1256 orang		108,00%		1256 orang		107,90%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.627		14.306		0		0,00%		127.627		3810,11%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1216 orang		2 Orang		1216 orang		1260 orang		103,62%		1260 orang		103,62%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		120.306		11.582		0		0,00%		120.306		3591,56%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 orang		2 Orang		463 orang		632 orang		136,50%		632 orang		136,50%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		126.098		19.754		0		0,00%		126.098		3764,47%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1879 orang		2 Orang		1878 orang		1832 orang		97,55%		1832 orang		97,50%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		105.475		11.582		0		0,00%		105.475		3148,79%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	887 orang		2 Orang		887 orang		532 orang		59,98%		532 orang		59,98%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		126.748		19.754		0		0,00%		126.748		3783,87%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	834 orang		2 Orang		834 orang		901 orang		108,03%		901 orang		108,03%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.500		19.754		0		0,00%		127.500		3806,31%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1203 orang		2 Orang		1203 orang		895 orang		74,40%		895 orang		74,40%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.551		19.754		0		0,00%		127.551		3807,83%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1273 orang		2 Orang		1273 orang		1379 orang		108,33%		1379 orang		108,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.665		11.582		0		0,00%		127.665		3811,25%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	423 orang		2 Orang		422 orang		454 orang		107,58%		454 orang		107,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.551		17.030		0		0,00%		127.551		3807,83%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 orang		2 Orang		353 orang		622 orang		176,20%		622 orang		175,71%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.385		17.030		0		0,00%		127.385		3802,88%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 orang		2 Orang		917 orang		981 orang		106,98%		981 orang		106,98%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		125.997		19.754		0		0,00%		125.997		3761,43%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1067 orang		2 Orang		1067 orang		1018 orang		95,41%		1018 orang		95,41%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.360		19.754		0		0,00%		127.360		3802,12%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1065 orang		2 Orang		1065 orang		944 orang		88,64%		944 orang		88,64%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.156		19.754		0		0,00%		127.156		3796,04%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	847 orang		2 Orang		847 orang		898 orang		106,02%		898 orang		106,02%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		121.574		19.754		0		0,00%		121.574		3629,39%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1514 orang		2 Orang		1514 orang		1411 orang		93,20%		1411 orang		93,20%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.615		17.030		0		0,00%		127.615		3809,73%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 orang		2 Orang		916 orang		979 orang		106,88%		979 orang		106,76%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		126.544		14.306		0		0,00%		126.544		3777,78%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	750 orang		2 Orang		750 orang		823 orang		109,73%		823 orang		109,73%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		121.574		11.582		0		0,00%		121.574		3629,39%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	391 orang		2 Orang		391 orang		450 orang		115,09%		450 orang		115,09%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.462		14.306		0		0,00%		127.462		3805,17%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 orang		2 Orang		496 orang		375 orang		75,60%		375 orang		75,60%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.538		19.754		0		0,00%		127.538		3807,45%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 orang		2 Orang		941 orang		999 orang		106,16%		999 orang		106,16%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		125.895		11.582		0		0,00%		125.895		3758,39%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	593 orang		2 Orang		593 orang		733 orang		123,61%		733 orang		123,61%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.139		14.306		0		0,00%		127.139		3795,54%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1029 orang		3 Orang		1029 orang		1165 orang		113,22%		1165 orang		113,22%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.589		11.582		0		0,00%		127.589		3808,97%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	298 orang		3 Orang		298 orang		299 orang		100,34%		299 orang		100,34%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		120.542		19.754		0		0,00%		120.542		3598,58%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1163 orang		2 Orang		1162 orang		1065 orang		91,65%		1065 orang		91,57%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		126.595		19.754		0		0,00%		126.595		3779,30%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1323 orang		2 Orang		1323 orang		1141 orang		86,24%		1141 orang		86,24%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		116.603		17.030		0		0,00%		116.603		3481,00%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1010 orang		2 Orang		1009 orang		718 orang		71,16%		718 orang		71,09%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.551		19.754		0		0,00%		127.551		3807,83%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1649 orang		2 Orang		1648 orang		1431 orang		86,83%		1431 orang		86,78%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.462		19.754		0		0,00%		127.462		3805,17%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	932 orang		2 Orang		932 orang		899 orang		96,46%		899 orang		96,46%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		125.869		14.306		0		0,00%		125.869		3757,62%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	843 orang		2 Orang		842 orang		726 orang		86,22%		726 orang		86,12%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		120.911		17.030		0		0,00%		120.911		3609,61%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1137 orang		2 Orang		1136 orang		1184 orang		104,23%		1184 orang		104,13%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.551		17.030		0		0,00%		127.551		3807,83%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1268 orang		2 Orang		1267 orang		978 orang		77,19%		978 orang		77,13%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		126.493		11.582		0		0,00%		126.493		3776,26%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	741 orang		2 Orang		741 orang		767 orang		103,51%		767 orang		103,51%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		126.073		19.754		0		0,00%		126.073		3763,71%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	630 orang		2 Orang		630 orang		599 orang		95,08%		599 orang		95,08%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.360		19.754		0		0,00%		127.360		3802,12%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	798 orang		2 Orang		798 orang		734 orang		91,98%		734 orang		91,98%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		125.946		19.754		0		0,00%		125.946		3759,91%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1535 orang		2 Orang		1534 orang		1414 orang		92,18%		1414 orang		92,12%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		126.621		19.754		0		0,00%		126.621		3780,06%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1115 orang		2 Orang		1115 orang		1064 orang		95,43%		1064 orang		95,43%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.283		19.754		0		0,00%		127.283		3799,84%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	945 orang		2 Orang		944 orang		988 orang		104,66%		988 orang		104,55%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		126.239		19.754		0		0,00%		126.239		3768,65%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1444 orang		2 Orang		1443 orang		1467 orang		101,66%		1467 orang		101,59%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		124.595		19.754		0		0,00%		124.595		3719,59%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	680 orang		2 Orang		1126 orang		816 orang		72,47%		816 orang		120,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.640		19.754		0		0,00%		127.640		3810,49%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1127 orang		2 Orang		680 orang		680 orang		100,00%		680 orang		60,34%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.232		19.754		0		0,00%		127.232		3798,32%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1383 orang		2 Orang		1382 orang		1447 orang		104,70%		1447 orang		104,63%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.105		14.306		0		0,00%		127.105		3794,52%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	840 orang		2 Orang		840 orang		837 orang		99,64%		837 orang		99,64%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.653		19.754		0		0,00%		127.653		3810,87%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1018 orang		2 Orang		1017 orang		1136 orang		111,70%		1136 orang		111,59%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.665		19.754		0		0,00%		127.665		3811,25%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1246 orang		2 Orang		1245 orang		1412 orang		113,41%		1412 orang		113,32%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.372		19.754		0		0,00%		127.372		3802,50%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	779 orang		2 Orang		779 orang		1208 orang		155,07%		1208 orang		155,07%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		122.147		19.754		0		0,00%		122.147		3646,51%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1562 orang		2 Orang		1562 orang		1211 orang		77,53%		1211 orang		77,53%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		121.926		14.306		0		0,00%		121.926		3639,92%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 orang		2 Orang		354 orang		425 orang		120,06%		425 orang		120,06%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.207		19.754		0		0,00%		127.207		3797,56%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 orang		2 Orang		1148 orang		1154 orang		100,52%		1154 orang		316,16%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.334		11.582		0		0,00%		127.334		3801,36%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 orang		2 Orang		365 orang		388 orang		106,30%		388 orang		33,80%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		121.930		19.754		0		0,00%		121.930		3640,04%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1194 orang		2 Orang		1193 orang		1298 orang		108,80%		1298 orang		108,71%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		126.697		17.030		0		0,00%		126.697		3782,35%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 orang		2 Orang		552 orang		654 orang		118,48%		654 orang		118,48%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.551		19.754		0		0,00%		127.551		3807,83%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1176 orang		2 Orang		1175 orang		1102 orang		93,79%		1102 orang		93,71%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.615		14.306		0		0,00%		127.615		3809,73%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1186 orang		2 Orang		1186 orang		1155 orang		97,39%		1155 orang		97,39%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		127.525		17.030		0		0,00%		127.525		3807,07%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1196 orang		2 Orang		1195 orang		1327 orang		111,05%		1327 orang		110,95%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		55.848		11.582		0		0,00%		55.848		1667,27%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	829 orang		2 Kegiatan		829 orang		826 orang		99,64%		826 orang		99,64%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		35.257		19.754		0		0,00%		35.257		1052,54%		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1404 orang		3 Kegiatan		1403 orang		1407 orang		100,29%		1407 orang		100,21%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			4.295.627		141.000		34.600		33.600		97,11%		174.600		4,06%		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337268 Orang		1 Kegiatan		314690 Orang		260821 Orang		82,88%		260821 Orang		77,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			3.226.155		1.390.766		1.208.301		1.175.537		97,29%		2.566.304		79,55%		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2034759 Orang		63 Puskesmas		2041119 Orang		1336931 Orang		65,50%		1336931 Orang		65,70%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			18.866		0		57.334		55.662		97,08%		55.662		295,04%		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749560 Orang		N/A		744435 Orang		440659 Orang		59,19%		440659 Orang		58,79%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			315.144		203.914		218.706		216.570		99,02%		420.484		133,43%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen		63 Puskesmas		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			438.104		331.396		241.691		229.212		94,84%		560.608		127,96%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		68 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		46.769		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		67.752		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		69.729		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		166.011		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		112.377		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		70.409		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		212.913		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		71.457		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		67.930		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		49.730		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		87.383		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		139.256		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		125.274		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		129.661		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		41.485		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		86.193		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		132.939		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		23.954		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		109.133		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		64.381		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		61.374		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		102.536		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		287.990		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		493.987		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		97.371		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		114.794		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		46.330		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		89.484		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		117.861		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		94.041		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		111.310		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		146.150		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		89.321		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		86.209		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		63.125		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		30.558		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		10 Dokumen		83,33%		10 Dokumen		83,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		66.389		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		70.335		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		62.774		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		126.942		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		72.886		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		133.774		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		107.117		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		152.218		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		10 Dokumen		83,33%		10 Dokumen		83,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		101.550		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		154.813		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		58.257		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		37.729		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		218.375		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		61.082		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		166.434		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		65.699		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		13 Dokumen		108,33%		13 Dokumen		108,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		92.312		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		67.682		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		13 Dokumen		108,33%		13 Dokumen		108,33%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		82.849		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		78.544		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		228.234		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.699		0		147.370		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.02.2.02.20	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**			6.699		0		144.123		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**			6.699		0		27.638		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**			6.699		0		24.377		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**			6.699		0		91.889		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**			6.699		0		108.649		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**			363.311		223.925		59.378		58.620		98,72%		282.545		77,77%		
			Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi		3 Aplikasi		3 Aplikasi		3 Aplikasi		100,00%		3 Aplikasi		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.03.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan**			363.311		223.925		59.378		58.620		98,72%		282.545		77,77%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5 Dokumen		1 Aplikasi		5 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		5 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			57.856.510		710.057		350.302		329.942		94,19%		1.039.999		1,80%		
			Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga		123 Lembaga		122 Lembaga		122 Lembaga		100,00%		122 Lembaga		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.03	**Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan**			47.189.112		369.462		288.667		272.307		94,33%		641.769		1,36%		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit		63 Puskesmas		63 Unit		63 Unit		100,00%		63 Unit		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.04	**Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan**			10.667.398		0		61.635		57.635		93,51%		57.635		0,54%		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
6	1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			7.196.679		21.148.340		1.483.827		1.331.708		89,75%		22.480.047		312,37%		
			Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	53,52%		43,31%		48,49%		60,46%		124,69%		60,46%		112,97%		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			7.196.679		21.148.340		1.483.827		1.331.708		89,75%		22.480.047		312,37%		
			Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang		3024 Orang		63 Orang		1015 Orang		1611,11%		1015 Orang		1611,11%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			3.841.543		614.990		1.383.827		1.331.708		96,23%		1.946.697		50,67%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		28 Kali		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			3.355.136		0		100.000		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1794 Orang		N/A		1794 Orang		2026 Orang		112,93%		2026 Orang		112,93%		Dinas Kesehatan	
7	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			2.790.371		517.661		441.456		308.645		69,92%		826.306		29,61%		
			Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%		100,00%		100%		91,83%		91,83%		91,83%		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			2.790.371		495.098		441.456		308.645		69,92%		803.743		28,80%		
			Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT		215 PIRT		217 PIRT		217 PIRT		100,00%		217 PIRT		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			2.790.371		495.098		441.456		308.645		69,92%		803.743		28,80%		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit		2458 Sampel		150 Unit		209 Unit		139,33%		209 Unit		139,33%		Dinas Kesehatan	
8	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			66.842.725		129.839.879		197.949.084		191.473.961		96,73%		321.313.840		480,70%		
			Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.118.740		195.052		124.747		77.556		62,17%		272.608		2,69%		
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan		154 Kelurahan		153 Kelurahan		156 Kelurahan		101,96%		156 Kelurahan		101,30%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			10.118.740		195.052		124.747		77.556		62,17%		272.608		2,69%		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen		65 Puskesmas		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			56.723.985		129.644.827		197.824.337		191.396.405		96,75%		321.041.232		565,97%		
			Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan		N/A		6 Kegiatan		4 Kegiatan		66,67%		4 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100,00%		63 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			54.013.675		124.958.372		195.742.016		191.396.405		97,78%		316.354.778		585,69%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		8 Jenis		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			40.632		7.160		20.195		0		0,00%		7.160		17,62%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			39.124		5.120		39.200		0		0,00%		5.120		13,09%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			39.124		7.208		36.063		0		0,00%		7.208		18,42%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			54.935		6.230		39.090		0		0,00%		6.230		11,34%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			50.179		6.230		40.895		0		0,00%		6.230		12,41%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			39.794		8.395		12.145		0		0,00%		8.395		21,09%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			42.876		5.120		20.195		0		0,00%		5.120		11,94%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			44.283		7.340		10.420		0		0,00%		7.340		16,57%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			34.703		8.334		40.895		0		0,00%		8.334		24,02%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			26.731		5.120		61.283		0		0,00%		5.120		19,15%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			51.585		7.340		23.645		0		0,00%		7.340		14,23%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			64.314		8.532		45.495		0		0,00%		8.532		13,27%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			53.763		6.230		29.395		0		0,00%		6.230		11,59%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			49.408		8.334		25.945		0		0,00%		8.334		16,87%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			48.772		7.422		32.845		0		0,00%		7.422		15,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			38.689		5.120		39.433		0		0,00%		5.120		13,23%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			47.834		6.197		43.690		0		0,00%		6.197		12,95%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			63.946		6.828		33.188		0		0,00%		6.828		10,68%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			54.533		7.422		42.045		0		0,00%		7.422		13,61%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			33.263		8.532		34.368		0		0,00%		8.532		25,65%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			33.865		6.230		9.267		0		0,00%		6.230		18,39%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			36.378		8.532		17.895		0		0,00%		8.532		23,45%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			67.932		8.450		33.420		0		0,00%		8.450		12,44%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			23.850		6.170		55.270		0		0,00%		6.170		25,87%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			22.309		6.230		36.870		0		0,00%		6.230		27,92%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			48.671		6.230		45.990		0		0,00%		6.230		12,80%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			46.896		7.142		29.890		0		0,00%		7.142		15,23%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			33.397		6.230		17.320		0		0,00%		6.230		18,65%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			46.527		6.230		24.140		0		0,00%		6.230		13,39%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			56.141		6.230		23.908		0		0,00%		6.230		11,10%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			37.550		6.746		40.240		0		0,00%		6.746		17,96%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			45.422		7.422		20.115		0		0,00%		7.422		16,34%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			39.995		7.160		28.165		0		0,00%		7.160		17,90%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			22.610		7.422		8.695		0		0,00%		7.422		32,83%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			35.507		5.120		37.365		0		0,00%		5.120		14,42%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			25.223		7.422		25.370		0		0,00%		7.422		29,43%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			50.480		6.230		23.413		0		0,00%		6.230		12,34%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			68.635		6.230		49.520		0		0,00%		6.230		9,08%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			30.080		5.120		50.015		0		0,00%		5.120		17,02%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			50.915		5.120		26.288		0		0,00%		5.120		10,05%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			46.460		7.340		37.445		0		0,00%		7.340		15,80%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			30.549		9.560		37.788		0		0,00%		9.560		31,29%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			46.996		7.340		31.695		0		0,00%		7.340		15,62%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			53.394		5.112		16.745		0		0,00%		5.112		9,57%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			50.212		7.340		39.665		0		0,00%		7.340		14,62%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			48.202		5.120		10.995		0		0,00%		5.120		10,62%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			49.274		6.230		40.583		0		0,00%		6.230		12,64%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			41.771		8.450		17.320		0		0,00%		8.450		20,23%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			24.587		7.422		37.445		0		0,00%		7.422		30,19%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			35.339		6.216		44.033		0		0,00%		6.216		17,59%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			43.881		5.120		41.390		0		0,00%		5.120		11,67%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			58.385		6.230		46.565		0		0,00%		6.230		10,67%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			43.580		7.340		38.363		0		0,00%		7.340		16,84%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			61.032		5.120		47.220		0		0,00%		5.120		8,39%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			50.179		5.120		29.890		0		0,00%		5.120		10,20%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			0		7.340		50.358		0		0,00%		7.340		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			38.220		5.120		44.608		0		0,00%		5.120		13,39%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		5 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			39.058		7.340		20.770		0		0,00%		7.340		18,79%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			52.356		7.340		26.520		0		0,00%		7.340		14,02%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			36.947		8.532		26.863		0		0,00%		8.532		23,09%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			42.910		7.340		64.733		0		0,00%		7.340		17,10%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			24.386		4.922		17.088		0		0,00%		4.922		20,18%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			51.719		5.120		40.663		0		0,00%		5.120		9,90%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		4 Kegiatan		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kesehatan	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
9	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			135.419.812		117.039.979		124.922.456		119.062.751		95,31%		236.102.729		174,35%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,75%		90,00%		86,00%		91,79%		106,73%		91,79%		105,81%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95%		95,31%		92%		98,30%		106,85%		98,30%		103,47%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			344.372		130.686		234.961		196.540		83,65%		327.226		95,02%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			344.372		130.686		234.961		196.540		83,65%		327.226		95,02%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		100,00%		8 Dokumen		88,89%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.347.173		45.430.818		46.847.018		45.014.852		96,09%		90.445.670		155,01%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			58.347.173		45.430.818		46.847.018		45.014.852		96,09%		90.445.670		155,01%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan		100%		189 Orang/bulan		189 Orang/bulan		100,00%		189 Orang/bulan		95,94%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			10.691.809		6.576.438		5.899.434		5.236.212		88,76%		11.812.650		110,48%		
			Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%		87.21 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			10.691.809		6.576.438		5.899.434		5.236.212		88,76%		11.812.650		110,48%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		87.21 %		3 Paket		3 Paket		100,00%		3 Paket		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			66.036.458		64.902.036		71.941.044		68.615.147		95,38%		133.517.183		202,19%		
			Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	332 unit		315 unit		321 unit		321 unit		100,00%		321 unit		96,69%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			34.268.991		37.691.908		46.573.217		43.717.480		93,87%		81.409.388		237,56%		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		91.49 %		7 Unit		8 Unit		114,29%		8 Unit		133,33%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.03	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**			17.184.882		13.319.810		11.271.019		11.079.630		98,30%		24.399.440		141,98%		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	76 Unit		72 unit		73 Unit		73 Unit		100,00%		73 Unit		96,05%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**			14.582.585		13.890.319		14.096.807		13.818.037		98,02%		27.708.356		190,01%		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	243 Unit		243 unit		248 Unit		248 Unit		100,00%		248 Unit		102,06%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
10	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			50.157.841		69.039.735		58.966.976		55.264.039		93,72%		124.303.774		247,83%		
			Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			50.157.841		69.039.735		58.966.976		55.264.039		93,72%		124.303.774		247,83%		
			Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	64 unit		60 unit		61 unit		61 unit		100,00%		61 unit		95,31%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.02.2.01.55	**Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir**			50.157.841		69.039.735		58.966.976		55.264.039		93,72%		124.303.774		247,83%		
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	285 Unit		264 unit		266 Unit		266 Unit		100,00%		266 Unit		93,33%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
11	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			9.306.760		8.273.115		7.519.710		7.385.796		98,22%		15.658.911		168,25%		
			Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	923 m3		1,041,00 m3		906 m3		906 m3		100,00%		906 m3		98,16%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**			9.306.760		8.273.115		7.519.710		7.385.796		98,22%		15.658.911		168,25%		
			jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan		2 kelurahan		2 kelurahan		3 kelurahan		150,00%		3 kelurahan		150,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		100,00%		4 Jenis		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.05.2.01.10	**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**			7.156.794		7.101.988		5.326.178		5.193.617		97,51%		12.295.605		171,80%		
			Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	96 Unit		96 lokasi		96 Unit		96 Unit		100,00%		96 Unit		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.05.2.01.06	**Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat**			2.149.966		0		2.193.532		2.192.180		99,94%		2.192.180		101,96%		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	50 Rumah Tangga		N/A		161 Rumah Tangga		174 Rumah Tangga		108,07%		174 Rumah Tangga		348,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
12	1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			582.830.777		539.579.103		616.676.538		548.652.129		88,97%		1.088.231.232		186,71%		
			Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**			582.830.777		539.579.103		616.676.538		548.652.129		88,97%		1.088.231.232		186,71%		
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1223 lokasi		1318 lokasi		1127 lokasi		1175 lokasi		104,26%		1175 lokasi		96,08%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen		90 dokumen		80 dokumen		83 dokumen		103,75%		83 dokumen		103,75%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi		232 Lokasi		200 lokasi		201 lokasi		100,50%		201 lokasi		100,50%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.09	**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase**			103.393.336		80.697.111		81.814.471		78.043.178		95,39%		158.740.289		153,53%		
			Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	29000 M		1192 lokasi		60000 M		68428 M		114,05%		68428 M		235,96%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.12	**Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan**			125.161.494		111.356.071		174.779.936		156.483.980		89,53%		267.840.051		214,00%		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M		232 Lokasi		10000 M		13917.8 M		139,18%		13917.8 M		139,18%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.05	**Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan**			246.834.073		230.454.863		247.487.970		220.348.609		89,03%		450.803.472		182,63%		
			Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	6000 M		75 lokasi		7000 M		7895 M		112,79%		7895 M		131,58%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.01	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan**			8.038.411		13.019.051		6.252.652		5.571.955		89,11%		18.591.006		231,28%		
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	50 Dokumen		60 dokumen		50 Dokumen		52 Dokumen		104,00%		52 Dokumen		104,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.07	**Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan**			89.285.275		94.057.443		95.026.977		77.888.686		81,96%		171.946.129		192,58%		
			Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	3300 M		51 lokasi		2700 M		3871.68 M		143,40%		3871.68 M		117,32%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.03	**Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan**			10.118.188		9.994.564		11.314.531		10.315.721		91,17%		20.310.284		200,73%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	30 Dokumen		30 dokumen		30 Dokumen		31 Dokumen		103,33%		31 Dokumen		103,33%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
13	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			3.183.407		2.745.271		2.066.359		1.951.502		94,44%		4.696.773		147,54%		
			Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	11%		7,35%		7%		7,31%		104,43%		7,31%		66,45%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			3.183.407		2.745.271		2.066.359		1.951.502		94,44%		4.696.773		147,54%		
			Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas		267 berkas		240 berkas		245 berkas		102,08%		245 berkas		102,08%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	14 Dokumen		13 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		85,71%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1.412.391		950.339		686.170		633.625		92,34%		1.583.964		112,15%		
			Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14 Sistem Jaringan		23 Dokumen		12 Sistem Jaringan		18 Sistem Jaringan		150,00%		18 Sistem Jaringan		128,57%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1.771.015		1.794.932		1.380.189		1.317.876		95,49%		3.112.809		175,76%		
			Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	240 Sistem Jaringan		267 berkas		240 Sistem Jaringan		245 Sistem Jaringan		102,08%		245 Sistem Jaringan		102,08%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
14	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			315.023.875		283.507.041		329.726.201		302.496.725		91,74%		586.003.767		186,02%		
			Persentase bangunan yang ber IMB	2,69%		1,92%		2,20%		1,96%		89,09%		1,96%		73,98%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	91,25%		90,45%		90,48%		91,65%		101,29%		91,65%		100,44%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	90%		83,24%		82%		74,50%		90,85%		74,50%		82,40%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			315.023.875		283.507.041		329.726.201		302.496.725		91,74%		586.003.767		186,02%		
			Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1768 Berkas		N/A		3472 Berkas		3660 Berkas		105,41%		3660 Berkas		207,01%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1907 Lokasi		N/A		1872 Lokasi		2401 Lokasi		128,26%		2401 Lokasi		125,90%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	248 Bangunan		302 Bangunan		253 Bangunan		360 Bangunan		142,29%		360 Bangunan		145,16%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.13	**Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**			38.016.233		43.964.024		47.318.250		42.685.345		90,21%		86.649.370		227,93%		
			Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	164 Unit		183 Bangunan		175 Unit		190 Unit		108,57%		190 Unit		115,85%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.09	**Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan**			3.517.554		1.513.713		1.392.984		1.243.913		89,30%		2.757.626		78,40%		
			Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	1861 Unit		N/A		1861 Unit		2401 Unit		129,02%		2401 Unit		129,02%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.01	**Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG**			6.187.321		2.702.008		1.948.664		1.828.191		93,82%		4.530.200		73,22%		
			Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.03	**Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota**			744.126		479.400		202.500		193.500		95,56%		672.900		90,43%		
			Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		3 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.02	**Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**			8.725.773		234.847.895		6.252.301		5.905.451		94,45%		240.753.346		2759,11%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	65 Dokumen		N/A		59 Dokumen		108 Dokumen		183,05%		108 Dokumen		166,15%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.12	**Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			257.832.869		0		272.611.503		250.640.325		91,94%		250.640.325		97,21%		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	141 Unit		N/A		147 Unit		171 Unit		116,33%		171 Unit		121,28%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
15	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			610.347.180		591.087.803		478.449.271		423.646.336		88,55%		1.014.734.139		166,26%		
			Luas jalan yang diperbaiki	210000 m2		472,008,75 m2		150000 m2		565438,78 m2		376,96%		565438,78 m2		277,13%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	12,000 meter		29,053,34 meter		10850 meter		28023,07 meter		258,28%		28023,07 meter		506884,75%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			610.347.180		591.087.803		478.449.271		423.646.336		88,55%		1.014.734.139		166,26%		
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen		212 dokumen		151 dokumen		156 dokumen		103,31%		156 dokumen		113,87%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi		N/A		4 lokasi		5 lokasi		125,00%		5 lokasi		250,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1501 lokasi		3918 lokasi		2200 lokasi		2779 lokasi		126,32%		2779 lokasi		185,14%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	338 lokasi		272 lokasi		270 lokasi		283 lokasi		104,81%		283 lokasi		83,73%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan			273.886.986		283.074.392		295.392.857		273.288.130		92,52%		556.362.522		203,14%		
			Panjang Jalan yang Dibangun	12 KM		N/A		10.85 KM		52.51 KM		483,96%		52.51 KM		437,58%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan			221.175.434		199.142.291		74.809.333		61.880.705		82,72%		261.022.995		118,02%		
			Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	5550 M²		4 lokasi		13600 M²		17375 M²		127,76%		17375 M²		313,06%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan			87.885.919		84.359.260		87.505.084		69.258.396		79,15%		153.617.656		174,79%		
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	40 KM		3917 lokasi		90 KM		153.35 KM		170,39%		153.35 KM		383,38%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			14.182.828		9.244.657		9.296.513		8.398.263		90,34%		17.642.920		124,40%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	67 Dokumen		69 dokumen		60 Dokumen		65 Dokumen		108,33%		65 Dokumen		97,01%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			7.385.767		12.422.391		10.103.109		9.612.997		95,15%		22.035.388		298,35%		
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	70 Dokumen		143 dokumen		91 Dokumen		91 Dokumen		100,00%		91 Dokumen		130,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan			5.830.246		0		1.342.375		1.207.846		89,98%		1.207.846		20,72%		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM		N/A		0.2 KM		0.27 KM		135,00%		0.27 KM		33,75%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
16	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			982.825		551.936		684.234		462.812		67,64%		1.014.748		103,25%		
			Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	100%		103,00%		93%		118,10%		126,99%		118,10%		118,10%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			982.825		551.936		684.234		462.812		67,64%		1.014.748		103,25%		
			Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis		N/A		4 jenis		4 jenis		100,00%		4 jenis		80,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			982.825		551.936		684.234		462.812		67,64%		1.014.748		103,25%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	120 Orang		103 perusahaan		105 Orang		124 Orang		118,10%		124 Orang		103,33%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
17	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			14.227.131		3.731.146		4.606.503		3.802.524		82,55%		7.533.670		52,95%		
			Persentase pelayanan penataan ruang	96%		98,35%		95%		98,76%		103,96%		98,76%		102,88%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota			3.956.284		1.836.120		2.786.993		2.166.376		77,73%		4.002.496		101,17%		
			Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		100,00%		3 dokumen		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			3.956.284		1.836.120		2.786.993		2.166.376		77,73%		4.002.496		101,17%		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		3 Dokumen		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			10.270.847		1.895.026		1.819.510		1.636.148		89,92%		3.531.174		34,38%		
			Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		100,00%		3 dokumen		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			2.713.270		895.428		784.784		766.577		97,68%		1.662.005		61,25%		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen		2 dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang			7.557.576		999.598		1.034.727		869.571		84,04%		1.869.170		24,73%		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen		154 Kelurahan		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
18	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.352.356		32.355.126		32.998.394		30.996.557		93,93%		63.351.684		112,42%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,50%		92,06%		88%		94,12%		106,95%		94,12%		105,16%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.425		60.432		20.800		15.600		75,00%		76.032		63,14%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00%		2 jenis		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			120.425		60.432		20.800		15.600		75,00%		76.032		63,14%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		7 Dokumen		87,50%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			43.233.748		25.583.648		26.402.116		25.255.328		95,66%		50.838.976		117,59%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			43.233.748		25.583.648		26.402.116		25.255.328		95,66%		50.838.976		117,59%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		100%		77 Orang/bulan		77 Orang/bulan		100,00%		77 Orang/bulan		95,06%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.664.298		4.688.552		4.965.722		4.405.045		88,71%		9.093.597		94,09%		
			Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis		15 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		100,00%		3 Jenis		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.664.298		4.688.552		4.965.722		4.405.045		88,71%		9.093.597		94,09%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		100%		15 Paket		16 Paket		106,67%		16 Paket		106,67%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.333.885		2.022.494		1.609.756		1.320.584		82,04%		3.343.078		100,28%		
			Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis		N/A		2 Jenis		2 Jenis		100,00%		2 Jenis		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.333.885		2.022.494		1.609.756		1.320.584		82,04%		3.343.078		100,28%		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit		100%		98 Unit		103 Unit		105,10%		103 Unit		105,10%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
19	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			40.719.101		20.433.137		14.823.397		13.108.780		88,43%		33.541.917		82,37%		
			Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%		70,72%		75%		76,61%		102,15%		76,61%		76,61%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			40.719.101		20.433.137		14.823.397		13.108.780		88,43%		33.541.917		82,37%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5157 Unit Hunian		N/A		5233 Unit Hunian		5233 Unit Hunian		100,00%		5233 Unit Hunian		101,47%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			40.719.101		20.433.137		14.823.397		13.108.780		88,43%		33.541.917		82,37%		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	105 Dokumen		105 blok		109 Dokumen		111 Dokumen		101,83%		111 Dokumen		105,71%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
20	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			18.599.004		37.931.470		122.043.201		119.570.739		97,97%		157.502.209		846,83%		
			Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	100%		103,22%		92%		106,93%		116,23%		106,93%		106,93%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			18.599.004		37.931.470		122.043.201		119.570.739		97,97%		157.502.209		846,83%		
			Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00%		2 jenis		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			18.599.004		37.931.470		122.043.201		119.570.739		97,97%		157.502.209		846,83%		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	405 Unit Rumah		929 unit		2700 Unit Rumah		2887 Unit Rumah		106,93%		2887 Unit Rumah		712,84%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
21	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			96.664.080		68.461.615		31.363.670		28.308.619		90,26%		96.770.235		100,11%		
			Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%		111,11%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			96.664.080		68.461.615		31.363.670		28.308.619		90,26%		96.770.235		100,11%		
			Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	8 lokasi		10 lokasi		7 lokasi		7 lokasi		100,00%		7 lokasi		87,50%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			96.664.080		68.461.615		31.363.670		28.308.619		90,26%		96.770.235		100,11%		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah		10 Bangunan		7 Unit Rumah		7 Unit Rumah		100,00%		7 Unit Rumah		70,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
22	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.260.047		1.204.315		1.610.098		1.560.769		96,94%		2.765.084		219,44%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	100%		24,66%		40%		54,79%		136,98%		54,79%		54,79%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**			1.260.047		1.204.315		1.610.098		1.560.769		96,94%		2.765.084		219,44%		
			Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	12 dokumen		12 dokumen		11 dokumen		14 dokumen		127,27%		14 dokumen		116,67%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.05.2.01.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan**			1.260.047		1.204.315		1.610.098		1.560.769		96,94%		2.765.084		219,44%		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan		12 dokumen		11 Laporan		15 Laporan		136,36%		15 Laporan		125,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																	
23	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			96.085.239		73.327.338		77.444.563		72.821.047		94,03%		146.148.385		152,10%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%		93,11%		88%		96,28%		109,41%		96,28%		109,41%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%		95,86%		93%		96,74%		104,02%		96,74%		101,83%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98%		97,86%		96,50%		97,76%		101,31%		97,76%		99,76%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			79.722.492		62.755.882		67.242.082		64.188.283		95,46%		126.944.165		159,23%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			37.585.968		29.325.250		30.675.784		29.425.001		95,92%		58.750.252		156,31%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan		100%		126 Orang/bulan		126 Orang/bulan		100,00%		126 Orang/bulan		95,45%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			12.269.993		8.119.846		9.649.248		9.305.302		96,44%		17.425.148		142,01%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		100%		26 Orang/bulan		26 Orang/bulan		100,00%		26 Orang/bulan		104,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			29.866.532		25.310.785		26.917.050		25.457.980		94,58%		50.768.765		169,99%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan		100%		106 Orang/bulan		106 Orang/bulan		100,00%		106 Orang/bulan		95,50%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			6.872.334		4.670.906		4.907.517		3.739.066		76,19%		8.409.972		122,37%		
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan		N/A		12 laporan		12 laporan		100,00%		12 laporan		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			773.782		527.622		506.578		436.194		86,11%		963.817		124,56%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		100%		2 Paket		2 Paket		100,00%		2 Paket		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.659.697		2.163.046		2.118.177		1.795.116		84,75%		3.958.162		238,49%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		68.29 %		17 Paket		8 Paket		47,06%		8 Paket		47,06%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.438.855		1.980.237		2.282.762		1.507.756		66,05%		3.487.993		78,58%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		64.32 %		17 Paket		17 Paket		100,00%		17 Paket		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.490.413		5.900.550		5.294.964		4.893.698		92,42%		10.794.248		113,74%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		92.06 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		88.17 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket		N/A		3 paket		3 paket		100,00%		3 paket		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.935.520		1.374.399		1.253.536		1.224.411		97,68%		2.598.809		134,27%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		92.06 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.004.199		2.527.856		2.789.018		2.562.555		91,88%		5.090.411		127,13%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Bulan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.550.694		1.998.295		1.252.410		1.106.732		88,37%		3.105.027		87,45%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		88.17 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
24	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			37.177.337		27.138.817		43.008.919		35.109.955		81,63%		62.248.772		167,44%		
			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase PPNS yang dibina	100%		96,67%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			34.779.392		24.183.526		35.803.863		32.495.034		90,76%		56.678.560		162,97%		
			Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	116 Titik/Lokasi		92 Titik/Lokasi		98 Titik/Lokasi		98 Titik/Lokasi		100,00%		98 Titik/Lokasi		84,48%		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		100,00%		11 Lembaga		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali		N/A		192 Kali		197 Kali		102,60%		197 Kali		102,60%		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1520 Orang		1340 Orang		1150 Orang		1150 Orang		100,00%		1150 Orang		75,66%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.06	**Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			527.904		482.832		823.427		761.973		92,54%		1.244.805		235,80%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen		293 Kali		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.01	**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**			31.434.907		20.722.542		32.659.449		29.450.574		90,17%		50.173.115		159,61%		
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	10080 Kasus		10205 Objek		10080 Kasus		10106 Kasus		100,26%		10106 Kasus		100,26%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.02	**Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**			2.167.280		1.839.383		1.516.216		1.515.408		99,95%		3.354.791		154,79%		
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Kasus		43 Penertiban		36 Kasus		37 Kasus		102,78%		37 Kasus		102,78%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.05	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**			464.625		889.143		492.186		480.495		97,62%		1.369.637		294,78%		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	978 Orang		200 Kali		978 Orang		978 Orang		100,00%		978 Orang		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.09	**Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada**			124.031		138.779		151.063		125.063		82,79%		263.842		212,72%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		79 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.08	**Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**			60.646		110.848		161.523		161.523		100,00%		272.370		449,12%		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2 Dokumen		18 SOP		18 Dokumen		18 Dokumen		100,00%		18 Dokumen		900,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			2.282.865		2.847.760		7.070.176		2.480.041		35,08%		5.327.801		233,38%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek		N/A		94 Objek		100 Objek		106,38%		100 Objek		106,38%		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek		N/A		4230 Objek		4901 Objek		115,86%		4901 Objek		115,86%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02.03	**Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			1.865.433		1.678.786		2.565.630		1.176.794		45,87%		2.855.580		153,08%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan		1042 Objek		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02.02	**Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			417.432		470.451		839.214		625.677		74,56%		1.096.128		262,59%		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan		280 Objek		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02.01	**Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			0		0		3.665.332		677.570		18,49%		677.570		0,00%		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	N/A		N/A		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		N/A		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**			115.079		107.531		134.880		134.880		100,00%		242.411		210,65%		
			Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	65 Orang		N/A		80 Orang		82 Orang		102,50%		82 Orang		126,15%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.03.01	**Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS**			115.079		107.531		134.880		134.880		100,00%		242.411		210,65%		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan		87 Orang		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
25	1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			48.680.383		44.787.389		26.068.439		25.303.245		97,06%		70.090.633		143,98%		
			Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%		97,82%		100%		98,63%		98,63%		98,63%		98,68%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%		52,73%		100%		98,34%		98,34%		98,34%		98,34%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**			20.320.538		19.768.220		1.349.395		1.259.607		93,35%		21.027.827		103,48%		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan		N/A		42 Kegiatan		42 Kegiatan		100,00%		42 Kegiatan		100,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.02	**Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**			3.318.289		949.005		991.511		944.604		95,27%		1.893.609		57,07%		
			Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1650 Orang		1650 orang		1650 Orang		1748 Orang		105,94%		1748 Orang		105,94%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			16.669.689		18.583.044		242.726		241.721		99,59%		18.824.765		112,93%		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	31 Kawasan		10 Kali		30 Kawasan		30 Kawasan		100,00%		30 Kawasan		96,77%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			332.559		236.172		115.157		73.283		63,64%		309.454		93,05%		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit		5 jenis		5 Unit		5 Unit		100,00%		5 Unit		100,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			28.359.846		25.019.168		24.719.044		24.043.637		97,27%		49.062.806		173,00%		
			Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis		N/A		10 Jenis		11 Jenis		110,00%		11 Jenis		110,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			26.091.537		23.039.300		22.957.021		22.592.240		98,41%		45.631.540		174,89%		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4497 Orang		11 jenis		12000 Orang		16639 Orang		138,66%		16639 Orang		370,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			2.268.308		1.979.869		1.762.024		1.451.397		82,37%		3.431.266		151,27%		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang		4 Jenis		467 Orang		424 Orang		90,79%		424 Orang		90,79%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
26	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			64.034.041		80.570.700		76.927.213		75.313.153		97,90%		155.883.853		243,44%		
			Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	46		45,41		48		38		120,83%		38		117,39%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			62.884.592		79.695.753		76.173.901		74.650.529		98,00%		154.346.282		245,44%		
			Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas		N/A		656 Petugas		764 Petugas		116,46%		764 Petugas		116,46%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%		N/A		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			42.696.091		36.934.124		34.827.388		34.384.494		98,73%		71.318.618		167,04%		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		635 Orang		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.05.04.2.01.07	**Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran**			1.006.458		756.046		502.493		493.723		98,25%		1.249.770		124,18%		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang		10 Kali		10 Orang		10 Orang		100,00%		10 Orang		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.06	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri**			10.493.247		35.715.454		35.743.762		35.032.053		98,01%		70.747.507		674,22%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	910 Unit		1567 Unit		191 Unit		191 Unit		100,00%		191 Unit		20,99%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.05	**Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri**			8.688.797		6.290.129		5.100.258		4.740.259		92,94%		11.030.388		126,95%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen		220 Unit		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			550.836		339.995		413.816		357.789		86,46%		697.784		126,68%		
			Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	520 Berkas		N/A		460 Berkas		460 Berkas		100,00%		460 Berkas		88,46%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.02.02	**Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran**			550.836		339.995		413.816		357.789		86,46%		697.784		126,68%		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen		520 Bangunan/Gedung		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**			598.613		534.953		339.496		304.834		89,79%		839.787		140,29%		
			Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	110 Kegiatan		N/A		80 Kegiatan		80 Kegiatan		100,00%		80 Kegiatan		72,73%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.04.01	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**			598.613		534.953		339.496		304.834		89,79%		839.787		140,29%		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1100 Orang		146 Kali		800 Orang		800 Orang		100,00%		800 Orang		72,73%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																	
27	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			24.100.497		18.088.313		19.319.406		18.064.017		93,50%		36.152.330		150,01%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%		89,88%		88%		93,92%		106,73%		93,92%		106,73%		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			19.227.230		15.234.168		16.377.903		15.456.244		94,37%		30.690.412		159,62%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1.06.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			19.227.230		15.234.168		16.377.903		15.456.244		94,37%		30.690.412		159,62%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		100%		45 Orang/bulan		45 Orang/bulan		100,00%		45 Orang/bulan		100,00%		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			2.354.427		1.508.488		1.399.921		1.082.126		77,30%		2.590.614		110,03%		
			Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%		76.82 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			2.354.427		1.508.488		1.399.921		1.082.126		77,30%		2.590.614		110,03%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		103 unit		15 Paket		15 Paket		100,00%		15 Paket		125,00%		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			2.518.840		1.345.657		1.541.582		1.525.646		98,97%		2.871.303		113,99%		
			Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			2.518.840		1.345.657		1.541.582		1.525.646		98,97%		2.871.303		113,99%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Sosial	
28	1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			8.489.757		5.149.389		5.236.362		4.906.106		93,69%		10.055.495		118,44%		
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	88,98%		76,61%		85,95%		81,96%		95,36%		81,96%		92,11%		Dinas Sosial	
			Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100%		81,82%		82,35%		64,29%		78,07%		64,29%		64,29%		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			8.489.757		5.149.389		5.236.362		4.906.106		93,69%		10.055.495		118,44%		
			Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	372 orang		N/A		1500 orang		1559 orang		103,93%		1559 orang		419,09%		Dinas Sosial	
			Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	7 jenis		N/A		5 jenis		6 jenis		120,00%		6 jenis		85,71%		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.01	**Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**			6.940.781		4.290.146		4.141.536		3.978.705		96,07%		8.268.851		119,13%		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	597 Orang		N/A		577 Orang		535 Orang		92,72%		535 Orang		89,61%		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.04	**Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**			1.548.976		859.243		1.094.826		927.401		84,71%		1.786.644		115,34%		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga		N/A		8 Lembaga		8 Lembaga		100,00%		8 Lembaga		66,67%		Dinas Sosial	
29	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			67.098.483		29.899.965		131.545.722		115.627.594		87,90%		145.527.559		216,89%		
			Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sosial	
			Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sosial	
			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			45.567.674		14.430.343		114.805.142		100.742.163		87,75%		115.172.507		252,75%		
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		100,00%		12 kali		100,00%		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		100,00%		12 kali		100,00%		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		100,00%		12 kali		100,00%		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		100,00%		12 kali		100,00%		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.08	**Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar**			5.917.303		0		5.290.032		4.205.760		79,50%		4.205.760		71,08%		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang		N/A		100 Orang		104 Orang		104,00%		104 Orang		80,00%		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.05	**Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**			37.558.454		14.190.140		11.670.993		9.463.379		81,08%		23.653.519		62,98%		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	215 Orang		N/A		216 Orang		221 Orang		102,31%		221 Orang		102,79%		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.12	**Pemberian Layanan Rujukan**			1.615.342		0		782.506		750.364		95,89%		750.364		46,45%		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		N/A		49 Orang		57 Orang		116,33%		57 Orang		142,50%		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.04	**Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga**			476.574		240.203		146.822		90.612		61,72%		330.815		69,42%		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang		1654 orang		1598 Orang		1687 Orang		105,57%		1687 Orang		212,20%		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.01	**Penyediaan Permakanan**			0		0		96.914.789		86.232.049		88,98%		86.232.049		0,00%		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A		N/A		23327 Orang		23327 Orang		100,00%		23327 Orang		N/A		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**			21.530.809		15.469.622		16.740.580		14.885.431		88,92%		30.355.053		140,98%		
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		100,00%		12 kali		100,00%		Dinas Sosial	
			Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00%		12 laporan		100,00%		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.07	**Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**			17.475.588		12.461.326		13.657.220		12.038.003		88,14%		24.499.329		140,19%		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1100 Orang		1073 orang		900 Orang		1552 Orang		172,44%		1552 Orang		141,09%		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.02	**Pemberian Layanan Kedaruratan**			4.055.221		3.008.296		3.083.361		2.847.428		92,35%		5.855.723		144,40%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang		4784 kali		4716 Orang		4876 Orang		103,39%		4876 Orang		103,39%		Dinas Sosial	
30	1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			10.901.678		23.358.542		32.728.737		32.202.820		98,39%		55.561.362		509,66%		
			Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%		87,75%		87%		82,94%		95,33%		82,94%		110,95%		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			10.901.678		23.358.542		32.728.737		32.202.820		98,39%		55.561.362		509,66%		
			Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00%		12 laporan		100,00%		Dinas Sosial	
			Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00%		12 laporan		100,00%		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.04	**Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**			116.497		0		5.917.741		5.669.791		95,81%		5.669.791		4866,91%		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2229 Orang		N/A		826 Orang		834 Orang		100,97%		834 Orang		37,42%		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.03	**Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**			5.865.631		14.272.137		21.461.655		21.210.011		98,83%		35.482.148		604,92%		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83899 Keluarga		27 kali		88316 Keluarga		148525 Keluarga		168,17%		148525 Keluarga		177,03%		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.01	**Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			4.681.621		5.253.804		5.025.741		5.011.418		99,72%		10.265.222		219,27%		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	534731 Orang		12 kali		268343 Orang		272670 Orang		101,61%		272670 Orang		50,99%		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			237.929		180.071		323.600		311.600		96,29%		491.671		206,65%		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	264931 keluarga		24 data		88316 keluarga		88435 keluarga		100,13%		88435 keluarga		33,38%		Dinas Sosial	
31	1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			1.980.041		2.083.691		1.570.785		1.524.603		97,06%		3.608.295		182,23%		
			Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Sosial	
	1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**			1.980.041		2.083.691		1.570.785		1.524.603		97,06%		3.608.295		182,23%		
			Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis		N/A		3 Jenis		3 Jenis		100,00%		3 Jenis		100,00%		Dinas Sosial	
	1.06.07.2.01.02	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**			1.980.041		2.083.691		1.570.785		1.524.603		97,06%		3.608.295		182,23%		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam		3 jenis		7 Makam		7 Makam		100,00%		7 Makam		100,00%		Dinas Sosial	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																	
32	2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			14.606.977		13.384.957		15.094.886		14.253.168		94,42%		27.638.125		189,21%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		93,88%		92%		94,37%		102,58%		94,37%		99,34%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			12.701.619		11.683.096		13.170.260		12.466.523		94,66%		24.149.620		190,13%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			12.701.619		11.683.096		13.170.260		12.466.523		94,66%		24.149.620		190,13%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan		100%		30 Orang/bulan		30 Orang/bulan		100,00%		30 Orang/bulan		96,77%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			1.905.358		1.701.861		1.924.626		1.786.645		92,83%		3.488.506		183,09%		
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			1.596.618		1.432.504		1.582.527		1.508.769		95,34%		2.941.273		184,22%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		93.87 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			308.739		269.356		342.099		277.876		81,23%		547.233		177,25%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		95.45 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
33	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			11.303.582		7.865.217		9.488.453		8.299.114		87,47%		16.164.331		143,00%		
			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	85,02%		83,06%		79,02%		80,84%		102,30%		80,84%		95,08%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	91,70%		98,36%		90,20%		97,96%		108,60%		97,96%		106,83%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**			6.876.862		4.694.035		6.241.504		5.268.525		84,41%		9.962.560		144,87%		
			Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan		N/A		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.01.02	**Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja**			434.813		363.442		513.592		437.163		85,12%		800.605		184,13%		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga		130 Orang		20 Lembaga		42 Lembaga		210,00%		42 Lembaga		350,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.01.01	**Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**			6.442.049		4.330.593		5.727.913		4.831.362		84,35%		9.161.955		142,22%		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang		732 Orang		720 Orang		736 Orang		102,22%		736 Orang		102,22%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**			305.648		534.433		283.090		265.314		93,72%		799.747		261,66%		
			Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.04.01	**Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil**			305.648		534.433		283.090		265.314		93,72%		799.747		261,66%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan		1 Dokumen		50 Perusahaan		50 Perusahaan		100,00%		50 Perusahaan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.121.071		2.636.749		2.963.859		2.765.275		93,30%		5.402.024		131,08%		
			Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan		N/A		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			4.121.071		2.636.749		2.963.859		2.765.275		93,30%		5.402.024		131,08%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen		912 Orang		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		4 Dokumen		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
34	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			3.690.000		2.556.607		3.137.164		2.236.285		71,28%		4.792.892		129,89%		
			Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	5%		2,03%		2,50%		3,50%		140,00%		3,50%		70,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			2.280.264		1.787.445		2.335.334		1.568.793		67,18%		3.356.238		147,19%		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan		N/A		9 laporan		9 laporan		100,00%		9 laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja			24.068		51.256		120.148		78.573		65,40%		129.829		539,42%		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2150 Orang		60 orang		1900 Orang		1938 Orang		102,00%		1938 Orang		90,14%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			1.151.313		655.638		566.437		487.571		86,08%		1.143.209		99,30%		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1500 Orang		1000 orang		1000 Orang		1000 Orang		100,00%		1000 Orang		66,67%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja			1.104.883		1.080.551		1.648.749		1.002.649		60,81%		2.083.200		188,54%		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang		532 orang		500 Orang		546 Orang		109,20%		546 Orang		218,40%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			338.718		290.115		363.402		250.335		68,89%		540.449		159,56%		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	7 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		57,14%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja			338.718		290.115		363.402		250.335		68,89%		540.449		159,56%		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	350 Orang		4 Kali		200 Orang		260 Orang		130,00%		260 Orang		74,29%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			1.071.018		479.047		438.428		417.158		95,15%		896.204		83,68%		
			Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	7 Laporan		2 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		57,14%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			1.071.018		479.047		438.428		417.158		95,15%		896.204		83,68%		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	350 Orang		100 Orang		200 Orang		200 Orang		100,00%		200 Orang		57,14%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
35	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			2.216.940		2.193.498		2.025.073		1.867.257		92,21%		4.060.754		183,17%		
			Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	60%		21,02%		30%		30,86%		102,87%		30,86%		51,43%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	15,04%		15,63%		13,14%		13,55%		103,12%		13,55%		90,09%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			1.358.206		1.253.780		1.146.571		1.049.002		91,49%		2.302.783		169,55%		
			Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan**			62.206		46.300		43.038		41.538		96,51%		87.838		141,20%		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan		270 Berkas		220 Perusahaan		300 Perusahaan		136,36%		300 Perusahaan		136,36%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.03	**Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**			1.296.000		1.207.480		1.103.533		1.007.464		91,29%		2.214.945		170,91%		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**			858.734		939.717		878.502		818.254		93,14%		1.757.972		204,72%		
			Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.01	**Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			525.521		618.587		470.557		421.337		89,54%		1.039.924		197,88%		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara		500 Orang		50 Perkara		60 Perkara		120,00%		60 Perkara		120,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.02	**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			333.213		321.130		407.945		396.917		97,30%		718.048		215,49%		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara		120 Kasus		110 Perkara		116 Perkara		105,45%		116 Perkara		105,45%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																	
36	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			17.557.497		12.733.154		14.163.838		13.404.567		94,64%		26.137.721		148,87%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		93,04%		100%		95,31%		95,31%		95,31%		95,31%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.968.828		9.754.549		11.126.574		10.490.806		94,29%		20.245.355		156,11%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.968.828		9.754.549		11.126.574		10.490.806		94,29%		20.245.355		156,11%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		100%		25 Orang/bulan		25 Orang/bulan		100,00%		25 Orang/bulan		104,17%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.012.046		2.579.648		2.624.284		2.555.114		97,36%		5.134.762		127,98%		
			Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		93.56 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.012.046		2.579.648		2.624.284		2.555.114		97,36%		5.134.762		127,98%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		23 Rekening		16 Paket		16 Paket		100,00%		16 Paket		320,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			576.622		398.958		412.980		358.647		86,84%		757.605		131,39%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%		63.96 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			576.622		398.958		412.980		358.647		86,84%		757.605		131,39%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		20 Rekening		14 Laporan		14 Laporan		100,00%		14 Laporan		233,33%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
37	2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			2.324.452		1.696.328		1.391.650		1.089.699		78,30%		2.786.027		119,86%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%		102,94%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**			782.126		594.261		434.697		359.086		82,61%		953.347		121,89%		
			Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		3 Dokumen		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.01.03	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG**			782.126		594.261		434.697		359.086		82,61%		953.347		121,89%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah		58 Lembaga		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		100,00%		58 Perangkat Daerah		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**			467.797		313.054		335.219		293.888		87,67%		606.942		129,74%		
			Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang		600 Orang		500 Orang		568 Orang		113,60%		568 Orang		94,67%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.02.02	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**			467.797		313.054		335.219		293.888		87,67%		606.942		129,74%		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi		4 Kali		31 Organisasi		44 Organisasi		141,94%		44 Organisasi		141,94%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			1.074.529		789.013		621.733		436.725		70,24%		1.225.738		114,07%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan		N/A		12 Kegiatan		12 Kegiatan		100,00%		12 Kegiatan		57,14%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.03.02	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			1.074.529		789.013		621.733		436.725		70,24%		1.225.738		114,07%		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang		1132 Orang		740 Orang		740 Orang		100,00%		740 Orang		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
38	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			538.911		480.957		548.104		542.161		98,92%		1.023.118		189,85%		
			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	100%		32,26%		48,38%		48,39%		100,02%		48,39%		48,39%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**			105.528		173.139		166.000		162.000		97,59%		335.139		317,58%		
			Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus		38 kasus		74 kasus		82 kasus		110,81%		82 kasus		410,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.02.01	**Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**			105.528		111.500		166.000		162.000		97,59%		273.500		259,17%		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang		38 kasus		74 Orang		82 Orang		110,81%		82 Orang		410,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			433.382		272.663		382.104		380.161		99,49%		652.824		150,63%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	31 kecamatan		10 kecamatan		15 kecamatan		15 kecamatan		100,00%		15 kecamatan		48,39%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			433.382		272.663		382.104		380.161		99,49%		652.824		150,63%		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		133 orang		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
39	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			619.665		529.527		1.008.880		946.288		93,80%		1.475.815		238,16%		
			Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	283		322		245		322		131,43%		322		113,78%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			619.665		529.527		1.008.880		946.288		93,80%		1.475.815		238,16%		
			Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00%		12 laporan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			619.665		529.527		1.008.880		946.288		93,80%		1.475.815		238,16%		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan		2 lembaga		3 Layanan		3 Layanan		100,00%		3 Layanan		150,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
40	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			468.442		264.640		265.375		264.306		99,60%		528.946		112,92%		
			Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			468.442		264.640		265.375		264.306		99,60%		528.946		112,92%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga		58 Lembaga		58 Lembaga		58 Lembaga		100,00%		58 Lembaga		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			468.442		264.640		265.375		264.306		99,60%		528.946		112,92%		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		2 Kali		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
41	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			3.918.987		2.117.446		2.850.624		2.462.484		86,38%		4.579.930		116,87%		
			Persentase Kelurahan Layak Anak	100%		61,69%		60,38%		100%		165,62%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			911.497		401.630		600.349		434.988		72,46%		836.618		91,79%		
			Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		1 kegiatan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			911.497		401.630		600.349		434.988		72,46%		836.618		91,79%		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	21 Organisasi		42 Kelurahan		58 Organisasi		58 Organisasi		100,00%		58 Organisasi		276,19%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3.007.491		1.715.816		2.250.275		2.027.496		90,10%		3.743.312		124,47%		
			Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		3 kegiatan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.08.06.2.02.03	**Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			1.431.215		514.310		768.482		734.719		95,61%		1.249.029		87,27%		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		447 Lembaga		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.02.01	**Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**			1.576.276		1.201.506		1.481.793		1.292.777		87,24%		2.494.283		158,24%		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		2 Lembaga		20 Orang		31 Orang		155,00%		31 Orang		310,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
42	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			1.549.369		1.243.820		1.058.684		1.006.344		95,06%		2.250.164		145,23%		
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	100%		32,26%		48,38%		48,39%		100,02%		48,39%		48,39%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			1.549.369		1.095.556		1.058.684		1.006.344		95,06%		2.101.900		135,66%		
			Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	31 lembaga		10 lembaga		15 lembaga		15 lembaga		100,00%		15 lembaga		48,39%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus		154 kasus		150 kasus		182 kasus		121,33%		182 kasus		121,33%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.02.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota**			192.248		191.418		64.927		64.927		100,00%		256.345		133,34%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Layanan		154 kasus		150 Layanan		182 Layanan		121,33%		182 Layanan		121,33%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.357.120		904.139		993.757		941.417		94,73%		1.845.555		135,99%		
			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang		154 kasus		150 Orang		182 Orang		121,33%		182 Orang		121,33%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
43	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26.817.816		20.815.111		24.745.333		21.261.280		85,92%		42.076.391		156,90%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		93,70%		93,50%		94,50%		101,07%		94,50%		99,47%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.173.111		16.452.095		19.909.478		17.310.121		86,94%		33.762.216		152,27%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.173.111		16.452.095		19.909.478		17.310.121		86,94%		33.762.216		152,27%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan		100%		49 Orang/bulan		49 Orang/bulan		100,00%		49 Orang/bulan		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.644.705		4.363.016		4.835.854		3.951.159		81,71%		8.314.175		179,00%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		91.34 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.681.649		3.275.699		3.328.075		3.031.261		91,08%		6.306.960		171,31%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		91.34 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			963.056		1.087.317		1.507.779		919.898		61,01%		2.007.215		208,42%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		63.32 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
44	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			2.185.139		1.645.271		1.625.288		1.398.121		86,02%		3.043.391		139,28%		
			Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1,26		0,96		1,15		1,84		160,00%		1,84		146,03%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			931.260		565.175		660.490		589.471		89,25%		1.154.646		123,99%		
			Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis		N/A		4 Jenis		4 Jenis		100,00%		4 Jenis		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			931.260		565.175		660.490		589.471		89,25%		1.154.646		123,99%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Dokumen		15 Kali		15 Dokumen		15 Dokumen		100,00%		15 Dokumen		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			1.253.879		1.080.096		964.798		808.650		83,82%		1.888.745		150,63%		
			Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Jenis		N/A		3 Jenis		3 Jenis		100,00%		3 Jenis		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1.253.879		1.080.096		964.798		808.650		83,82%		1.888.745		150,63%		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan		40 Kali		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
45	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			973.715		694.166		861.586		672.458		78,05%		1.366.624		140,35%		
			Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,91%		96,00%		97,88%		99,28%		101,43%		99,28%		101,40%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			973.715		694.166		861.586		672.458		78,05%		1.366.624		140,35%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			973.715		694.166		861.586		672.458		78,05%		1.366.624		140,35%		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen		1500 sampel		36 Dokumen		36 Dokumen		100,00%		36 Dokumen		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
46	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			153.598.241		11.780.406		33.376.321		28.976.055		86,82%		40.756.461		26,53%		
			Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	55265,71 M2		7,763,00 M2		42279,63 M2		6422 M2		15,19%		6422 M2		11,62%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			153.598.241		11.780.406		33.376.321		28.976.055		86,82%		40.756.461		26,53%		
			Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	1 lokasi		N/A		3 lokasi		3 lokasi		100,00%		3 lokasi		300,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			153.598.241		11.780.406		33.376.321		28.976.055		86,82%		40.756.461		26,53%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 lokasi		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		3 Dokumen		300,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																	
47	2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			98.611.737		60.925.173		57.978.375		54.136.584		93,37%		115.061.757		116,68%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%		88,00%		86%		90,16%		104,84%		90,16%		103,63%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			81.736.755		45.813.325		46.443.962		44.105.816		94,97%		89.919.141		110,01%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			81.736.755		45.813.325		46.443.962		44.105.816		94,97%		89.919.141		110,01%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan		100%		180 Orang/bulan		180 Orang/bulan		100,00%		180 Orang/bulan		93,26%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			15.689.324		14.619.196		11.083.452		9.606.264		86,67%		24.225.460		154,41%		
			Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		90.54 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			15.689.324		14.619.196		11.083.452		9.606.264		86,67%		24.225.460		154,41%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		90.54 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			1.185.658		492.653		450.961		424.504		94,13%		917.157		77,35%		
			Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%		79.15 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.09.10	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			1.185.658		492.653		450.961		424.504		94,13%		917.157		77,35%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		79.15 %		50 Unit		50 Unit		100,00%		50 Unit		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
48	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			6.731.441		4.659.680		36.442.437		33.771.080		92,67%		38.430.759		570,91%		
			Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	50%		45,58%		44%		46,90%		106,59%		46,90%		93,80%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	90%		100,00%		84%		87,12%		103,71%		87,12%		101,07%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			2.963.234		2.023.950		1.713.355		1.691.250		98,71%		3.715.200		125,38%		
			jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan		3 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		1 kegiatan		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00%		2 jenis		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01.01	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut**			1.002.892		529.332		583.677		562.479		96,37%		1.091.811		108,87%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen		1011 data		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		3 Dokumen		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01.02	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**			1.960.342		1.494.617		1.129.678		1.128.771		99,92%		2.623.388		133,82%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		23 lokasi		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			3.768.206		2.635.730		34.729.082		32.079.830		92,37%		34.715.560		921,28%		
			Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	3 stasiun		2 stasiun		2 stasiun		2 stasiun		100,00%		2 stasiun		66,67%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.02.01	**Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat**			1.378.750		735.075		1.010.697		857.947		84,89%		1.593.022		115,54%		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan		365 data		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.02.03	**Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**			2.389.456		1.900.655		33.718.385		31.221.883		92,60%		33.122.538		1386,20%		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	300 Titik		300 unit		8000 Titik		7922 Titik		99,03%		7922 Titik		2640,67%		Dinas Lingkungan Hidup	
49	2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			114.572.766		88.720.867		103.710.136		92.846.462		89,52%		181.567.329		158,47%		
			Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	100%		101,42%		99,24%		101,68%		102,46%		101,68%		101,68%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**			114.572.766		88.720.867		103.710.136		92.846.462		89,52%		181.567.329		158,47%		
			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.87 Ha		2.79 Ha		2.81 Ha		2.86 Ha		101,78%		2.86 Ha		99,65%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.87 Ha		2.79 Ha		2.81 Ha		2.86 Ha		101,78%		2.86 Ha		99,65%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		100,00%		3 dokumen		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.04	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**			88.616.171		65.496.992		81.268.392		72.046.462		88,65%		137.543.455		155,21%		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275.90 Ha		463 lokasi		275.84 Ha		275.84 Ha		100,00%		275.84 Ha		99,98%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.07	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati**			9.689.511		9.859.275		8.549.741		7.679.015		89,82%		17.538.289		181,00%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit		79 Lokasi		125 Unit		125 Unit		100,00%		125 Unit		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.05	**Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**			15.911.738		13.128.430		13.362.382		12.604.503		94,33%		25.732.933		161,72%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	143.26 Ha		14 lokasi		143.26 Ha		143.26 Ha		100,00%		143.26 Ha		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			355.347		236.170		529.620		516.482		97,52%		752.652		211,81%		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		7 ekosistem		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
50	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			5.250.677		3.291.607		1.208.721		1.139.242		94,25%		4.430.850		84,39%		
			Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%		100,00%		80%		100%		125,00%		100%		125,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	100%		80,00%		90%		90%		100,00%		90%		90,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3			779.119		274.327		278.904		278.787		99,96%		553.115		70,99%		
			Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas		214 berkas		250 berkas		265 berkas		106,00%		265 berkas		106,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			779.119		274.327		278.904		278.787		99,96%		553.115		70,99%		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen		220 Berkas		255 Dokumen		278 Dokumen		109,02%		278 Dokumen		109,02%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.471.557		3.017.280		929.816		860.455		92,54%		3.877.735		86,72%		
			Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		1 kegiatan		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			4.471.557		3.017.280		929.816		860.455		92,54%		3.877.735		86,72%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen		8 lokasi		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
51	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			4.000.329		1.359.197		1.398.030		1.379.136		98,65%		2.738.333		68,45%		
			Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	95%		50,79%		60%		61%		101,67%		61%		64,21%		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			4.000.329		1.359.197		1.398.030		1.379.136		98,65%		2.738.333		68,45%		
			Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%		100%		80%		100%		125,00%		100%		125,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek		432 obyek		432 obyek		432 obyek		100,00%		432 obyek		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.01	**Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**			2.406.414		868.623		908.198		900.400		99,14%		1.769.023		73,51%		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	350 Dokumen		N/A		275 Dokumen		300 Dokumen		109,09%		300 Dokumen		85,71%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.03	**Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			1.593.914		490.574		489.832		478.737		97,73%		969.310		60,81%		
			Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	254 Laporan		N/A		432 Laporan		432 Laporan		100,00%		432 Laporan		170,08%		Dinas Lingkungan Hidup	
52	2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			8.194.978		5.012.602		1.428.272		1.392.464		97,49%		6.405.066		78,16%		
			Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	63,84%		55,77%		57,74%		58,59%		101,47%		58,59%		91,78%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	71,81%		100,86%		55,66%		82,69%		148,56%		82,69%		115,15%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			8.194.978		5.012.602		1.428.272		1.392.464		97,49%		6.405.066		78,16%		
			Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		100,00%		1 jenis		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		100,00%		12 kali		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.02	**Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup**			7.391.891		5.012.602		958.536		926.349		96,64%		5.938.951		80,34%		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.03	**Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup**			803.086		0		469.736		466.115		99,23%		466.115		58,04%		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1725 Orang		N/A		1560 Orang		1610 Orang		103,21%		1610 Orang		93,33%		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
53	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			687.892		325.940		3.974.695		3.632.216		91,38%		3.958.156		575,40%		
			Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	92,00%		50,40%		60,80%		58%		95,39%		58%		63,04%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			687.892		325.940		3.974.695		3.632.216		91,38%		3.958.156		575,40%		
			Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan		4 penghargaan		4 penghargaan		4 penghargaan		100,00%		4 penghargaan		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			687.892		325.940		3.974.695		3.632.216		91,38%		3.958.156		575,40%		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas		N/A		10 Entitas		10 Entitas		100,00%		10 Entitas		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
54	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			732.771		308.664		238.486		228.633		95,87%		537.298		73,32%		
			Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	46 obyek		44,00 obyek		49 obyek		51 obyek		95,92%		51 obyek		89,13%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			732.771		308.664		238.486		228.633		95,87%		537.298		73,32%		
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan			732.771		308.664		238.486		228.633		95,87%		537.298		73,32%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	46 Dokumen		44 Obyek		49 Dokumen		51 Dokumen		104,08%		51 Dokumen		110,87%		Dinas Lingkungan Hidup	
55	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			445.929.165		383.448.733		431.377.833		390.749.518		90,58%		774.198.252		173,61%		
			Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5,12%		2,56%		2,56%		2,56%		100,00%		2,56%		50,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	52%		74,62%		50,50%		53,18%		105,31%		53,18%		102,27%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	88,76%		91,05%		87,64%		100%		114,10%		100%		112,66%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			445.929.165		383.448.733		431.377.833		390.749.518		90,58%		774.198.252		173,61%		
			Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00%		2 jenis		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		100,00%		4 jenis		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		100,00%		3 jenis		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota			222.633.644		216.074.703		216.093.878		198.755.958		91,98%		414.830.661		186,33%		
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	650430 Ton		N/A		650430 Ton		560917.19 Ton		86,24%		560917.19 Ton		86,24%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			182.639.754		138.083.107		187.241.559		169.713.041		90,64%		307.796.148		168,53%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan		40 lokasi		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			40.655.768		29.290.923		28.042.395		22.280.519		79,45%		51.571.442		126,85%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	226 Unit		193 lokasi		226 Unit		424 Unit		187,61%		424 Unit		187,61%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
56	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26.618.623		21.932.383		49.803.334		46.229.000		92,82%		68.161.383		256,07%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,58%		88,91%		86,22%		89,98%		104,36%		89,98%		102,74%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.846		31.200		9.100		9.100		100,00%		40.300		239,23%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		N/A		2 jenis		2 jenis		100,00%		2 jenis		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.846		18.200		9.100		9.100		100,00%		27.300		162,06%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		12 dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		100,00%		8 Dokumen		88,89%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.703.038		13.534.226		44.034.158		40.803.680		92,66%		54.337.907		346,03%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.703.038		13.534.226		44.034.158		40.803.680		92,66%		54.337.907		346,03%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan		100%		193 Orang/bulan		193 Orang/bulan		100,00%		193 Orang/bulan		470,73%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.049.047		4.194.873		2.884.315		2.694.128		93,41%		6.889.001		68,55%		
			Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%		81.9 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.049.047		4.194.873		2.884.315		2.694.128		93,41%		6.889.001		68,55%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		81.9 %		3 Paket		3 Paket		100,00%		3 Paket		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			849.692		3.674.323		2.875.761		2.722.091		94,66%		6.396.414		752,79%		
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			849.692		3.674.323		2.875.761		2.722.091		94,66%		6.396.414		752,79%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		95.68 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
57	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			3.481.298		3.340.332		3.849.431		3.802.619		98,78%		7.142.950		205,18%		
			Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%		100,00%		95%		100%		105,26%		100%		105,26%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.655.892		2.543.640		2.830.581		2.795.808		98,77%		5.339.448		201,04%		
			Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas		325504 berkas		156000 berkas		184539 berkas		118,29%		184539 berkas		118,29%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			2.655.892		2.543.640		2.830.581		2.795.808		98,77%		5.339.448		201,04%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen		325504 berkas		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			825.406		796.691		1.018.850		1.006.811		98,82%		1.803.502		218,50%		
			Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas		325504 berkas		302228 berkas		354613 berkas		117,33%		354613 berkas		227,32%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			825.406		796.691		1.018.850		1.006.811		98,82%		1.803.502		218,50%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen		388497 berkas		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
58	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			1.969.905		2.039.380		2.977.976		2.937.677		98,65%		4.977.058		252,65%		
			Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%		100,00%		95%		100%		105,26%		100%		105,26%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			1.524.354		1.495.108		2.357.471		2.335.226		99,06%		3.830.334		251,28%		
			Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas		73753 berkas		36000 berkas		37054 berkas		102,93%		37054 berkas		102,93%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			1.524.354		1.495.108		2.357.471		2.335.226		99,06%		3.830.334		251,28%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen		73753 berkas		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			445.551		544.273		620.505		602.451		97,09%		1.146.724		257,37%		
			Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas		129119 berkas		109107 berkas		138801 berkas		127,22%		138801 berkas		385,56%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil			445.551		544.273		620.505		602.451		97,09%		1.146.724		257,37%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan		129119 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
59	2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			2.941.983		3.041.062		3.068.508		2.980.158		97,12%		6.021.220		204,67%		
			Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	99%		97,87%		96%		98,44%		102,54%		98,44%		99,43%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	100%		54,55%		40%		77,27%		193,18%		77,27%		77,27%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	77%		79,10%		68%		88,06%		129,50%		88,06%		114,36%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**			431.627		446.047		1.021.604		1.007.546		98,62%		1.453.593		336,77%		
			Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	48000 data		N/A		110942 data		112565 data		101,46%		112565 data		234,51%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.01.01	**Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**			431.627		446.047		1.021.604		1.007.546		98,62%		1.453.593		336,77%		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen		119798 data		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			653.293		628.726		687.480		666.669		96,97%		1.295.395		198,29%		
			Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga		12 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		100,00%		5 Lembaga		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03.06	**Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi**			362.799		358.263		384.878		372.084		96,68%		730.347		201,31%		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen		11 Lembaga		5 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		5 Dokumen		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03.04	**Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan**			290.494		270.463		302.601		294.585		97,35%		565.048		194,51%		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen		9 Lembaga		5 Dokumen		10 Dokumen		200,00%		10 Dokumen		200,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			1.857.063		1.966.289		1.359.425		1.305.943		96,07%		3.272.231		176,20%		
			Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan		N/A		32 unit layanan		32 unit layanan		100,00%		32 unit layanan		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.04.01	**Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			1.857.063		1.966.289		1.359.425		1.305.943		96,07%		3.272.231		176,20%		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan		32 unit layanan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
60	2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			89.414		98.010		68.112		64.333		94,45%		162.343		181,56%		
			Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**			89.414		98.010		68.112		64.333		94,45%		162.343		181,56%		
			Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi		N/A		4 Informasi		4 Informasi		100,00%		4 Informasi		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain			89.414		98.010		68.112		64.333		94,45%		162.343		181,56%		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen		2 kali		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
61	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			0		0		1.580.717		1.214.287		76,82%		1.214.287		0,00%		
			Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	0%		0		100%		100%		100,00%		100%		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			0		0		1.580.717		1.214.287		76,82%		1.214.287		0,00%		
			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	N/A		N/A		53 Kegiatan		34 Kegiatan		64,15%		34 Kegiatan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			0		0		1.580.717		1.214.287		76,82%		1.214.287		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	N/A		N/A		53 Laporan		34 Laporan		64,15%		34 Laporan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
62	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			379.795		350.201		593.347		571.396		96,30%		921.596		242,66%		
			Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	100%		24,45%		46,07%		47,38%		102,84%		47,38%		47,38%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			231.497		190.085		179.165		172.955		96,53%		363.039		156,82%		
			Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	178 Orang		N/A		150 Orang		292 Orang		194,67%		292 Orang		164,04%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			231.497		190.085		179.165		172.955		96,53%		363.039		156,82%		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	89 Satuan Pendidikan		133 Orang		75 Satuan Pendidikan		150 Satuan Pendidikan		200,00%		150 Satuan Pendidikan		168,54%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			148.298		160.116		414.183		398.441		96,20%		558.557		376,64%		
			Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		100,00%		58 Perangkat Daerah		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			0		0		64.200		63.631		99,11%		63.631		0,00%		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	N/A		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			0		0		232.800		217.628		93,48%		217.628		0,00%		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	N/A		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			148.298		115.061		117.183		117.183		100,00%		232.244		156,61%		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.14.02.2.02.11	**Penyediaan Data dan Informasi Keluarga**			0		0		0		0		0,00%		0		0,00%		
63	2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			10.106.307		5.888.490		10.052.148		7.492.785		74,54%		13.381.276		132,41%		
			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	86%		92,74%		83%		83%		100,00%		83%		96,51%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	17,60%		21,39%		18,35%		16,70%		108,99%		16,70%		105,11%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**			357.857		495.160		902.683		890.321		98,63%		1.385.482		387,16%		
			Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan		31 kecamatan		31 Kecamatan		31 Kecamatan		100,00%		31 Kecamatan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.01	**Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja**			0		0		120.000		117.264		97,72%		117.264		0,00%		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	N/A		N/A		31 Organisasi		31 Organisasi		100,00%		31 Organisasi		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.06	**Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)**			178.928		0		403.000		402.600		99,90%		402.600		225,01%		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.08	**Pengendalian Program KKBPK**			178.928		0		229.683		221.704		96,53%		221.704		123,91%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		N/A		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		200,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.04	**Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang**			0		0		150.000		148.754		99,17%		148.754		0,00%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	N/A		N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			2.657.552		1.944.477		953.824		950.861		99,69%		2.895.338		108,95%		
			Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		100,00%		12 Kali		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02.01	**Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB**			0		0		48.000		46.980		97,88%		46.980		0,00%		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	N/A		N/A		31 Organisasi		31 Organisasi		100,00%		31 Organisasi		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02.04	**Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)**			1.797.554		824.146		308.000		307.416		99,81%		1.131.562		62,95%		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang		1566 Orang		1566 Orang		1566 Orang		100,00%		1566 Orang		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02.03	**Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)**			859.998		1.120.331		597.824		596.465		99,77%		1.716.796		199,63%		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan		12 kali		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**			4.520.722		2.871.417		7.706.140		5.162.135		66,99%		8.033.552		177,71%		
			Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417096 Orang		303968 Orang		307610 Orang		307610 Orang		100,00%		307610 Orang		73,75%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			0		0		54.300		32.126		59,16%		32.126		0,00%		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	N/A		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			2.353.459		653.353		538.213		285.359		53,02%		938.711		39,89%		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan		303968 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1.749.975		1.452.102		6.280.672		4.177.571		66,51%		5.629.673		321,70%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang		2184 orang		1950 Orang		1950 Orang		100,00%		1950 Orang		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			417.288		765.963		832.955		667.080		80,09%		1.433.043		343,42%		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit		37 Unit		66 Unit		66 Unit		100,00%		66 Unit		347,37%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			2.570.177		577.436		489.500		489.468		99,99%		1.066.904		41,51%		
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			0		0		9.000		9.000		100,00%		9.000		0,00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	N/A		N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			2.570.177		189.428		480.500		480.468		99,99%		669.896		26,06%		
			Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	31 Kampung		31 Kecamatan		31 Kampung		31 Kampung		100,00%		31 Kampung		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
64	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			4.687.035		10.791.829		17.016.807		16.381.580		96,27%		27.173.409		579,76%		
			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41,58%		168,10%		41,55%		45,23%		108,86%		45,23%		108,78%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	44%		42,86%		41%		71,43%		174,22%		71,43%		162,34%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	55,76%		85,53%		43,37%		93,05%		214,55%		93,05%		159,45%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun		28,00 tahun		20 tahun		23,33 tahun		116,65%		23,33 tahun		109,05%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			4.687.035		10.791.829		17.016.807		16.381.580		96,27%		27.173.409		579,76%		
			Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok		N/A		10 Kelompok		14 Kelompok		140,00%		14 Kelompok		140,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.04	**Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**			608.785		310.173		475.356		381.869		80,33%		692.042		113,68%		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1136 Orang		N/A		625 Orang		625 Orang		100,00%		625 Orang		55,02%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.01	**Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)**			1.202.795		962.895		1.557.258		1.500.549		96,36%		2.463.444		204,81%		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	57 Kelompok		160 keluarga		2263 Kelompok		2263 Kelompok		100,00%		2263 Kelompok		3970,18%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.02	**Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**			412.985		642.765		360.000		352.200		97,83%		994.965		240,92%		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38 Unit		N/A		20 Unit		30 Unit		150,00%		30 Unit		78,95%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.05	**Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**			1.002.109		8.502.808		13.948.200		13.512.980		96,88%		22.015.788		2196,94%		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6642 Orang		31 kecamatan		6642 Orang		6664 Orang		100,33%		6664 Orang		100,33%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1.460.361		373.188		675.993		633.982		93,79%		1.007.170		68,97%		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		14 keluarga		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
65	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			93.715.342		69.862.326		73.886.830		68.991.310		93,37%		138.853.636		148,17%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%		91,96%		92%		93,55%		101,68%		93,55%		101,68%		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			73.040.321		55.583.796		59.520.884		55.952.232		94,00%		111.536.028		152,70%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			73.040.321		55.583.796		59.520.884		55.952.232		94,00%		111.536.028		152,70%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	287 Orang/bulan		100%		275 Orang/bulan		275 Orang/bulan		100,00%		275 Orang/bulan		95,82%		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.949.269		6.245.177		4.886.313		4.449.529		91,06%		10.694.705		179,77%		
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.949.269		6.245.177		4.886.313		4.449.529		91,06%		10.694.705		179,77%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket		75.62 %		23 Paket		14 Paket		60,87%		14 Paket		60,87%		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.725.751		8.033.353		9.479.633		8.589.550		90,61%		16.622.902		112,88%		
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			14.725.751		8.033.353		9.479.633		8.589.550		90,61%		16.622.902		112,88%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		100%		3 Laporan		3 Laporan		100,00%		3 Laporan		100,00%		Dinas Perhubungan	
66	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			472.129.235		392.215.492		418.411.410		386.327.414		92,33%		778.542.906		164,90%		
			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%		80,25%		80%		80,98%		101,23%		80,98%		101,23%		Dinas Perhubungan	
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%		82,86%		80%		81,99%		102,49%		81,99%		102,49%		Dinas Perhubungan	
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,75%		50,77%		48,65%		50,40%		103,60%		50,40%		103,38%		Dinas Perhubungan	
			Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	50 km/jam		40,21 km/jam		43 km/jam		43,18 km/jam		100,42%		43,18 km/jam		86,36%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			323.533.151		246.045.060		274.892.631		260.710.896		94,84%		506.755.956		156,63%		
			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi		15 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100,00%		8 Lokasi		53,33%		Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan		31 Kawasan		31 Kawasan		31 Kawasan		100,00%		31 Kawasan		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			117.251.786		85.875.044		117.483.948		110.118.093		93,73%		195.993.137		167,16%		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit		N/A		5000 Unit		5903 Unit		118,06%		5903 Unit		196,77%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			28.689.292		11.721.511		8.296.325		4.655.122		56,11%		16.376.632		57,08%		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit		2506 Unit		1883 Unit		1946 Unit		103,35%		1946 Unit		77,84%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			35.134.102		28.371.855		19.410.022		18.277.767		94,17%		46.649.622		132,78%		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit		5 Jenis		9000 Unit		9000 Unit		100,00%		9000 Unit		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			142.457.971		120.076.651		129.702.335		127.659.915		98,43%		247.736.565		173,90%		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	105252 Unit		N/A		96252 Unit		96252 Unit		100,00%		96252 Unit		91,45%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			29.006.404		19.217.179		17.115.520		16.253.211		94,96%		35.470.389		122,28%		
			Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi		14 Lokasi		13 Lokasi		13 Lokasi		100,00%		13 Lokasi		92,86%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			29.006.404		19.217.179		17.115.520		16.253.211		94,96%		35.470.389		122,28%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	12 Unit		14 Jam		12 Unit		12 Unit		100,00%		12 Unit		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			20.323.724		20.068.458		25.115.593		22.496.325		89,57%		42.564.783		209,43%		
			Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas		44 Berkas		75 Berkas		75 Berkas		100,00%		75 Berkas		125,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			20.323.724		20.068.458		25.115.593		22.496.325		89,57%		42.564.783		209,43%		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		1821 Titik		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			8.140.371		10.714.509		9.879.546		9.280.189		93,93%		19.994.698		245,62%		
			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134525 Unit		134918 Unit		123388 Unit		123870 Unit		100,39%		123870 Unit		92,08%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			8.140.371		10.714.509		9.879.546		9.280.189		93,93%		19.994.698		245,62%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit		138964 Unit		33 Unit		33 Unit		100,00%		33 Unit		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			21.001.558		18.037.456		25.817.104		21.861.455		84,68%		39.898.911		189,98%		
			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		9 Lokasi		90,00%		9 Lokasi		90,00%		Dinas Perhubungan	
			Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		100,00%		7 Jenis		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			4.153.675		3.119.306		2.366.829		2.216.713		93,66%		5.336.018		128,47%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	13 Laporan		13 Dokumen		9 Laporan		9 Laporan		100,00%		9 Laporan		69,23%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			16.847.884		14.918.150		23.450.275		19.644.742		83,77%		34.562.892		205,15%		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		365 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			65.033.247		74.742.348		63.993.487		54.187.039		84,68%		128.929.387		198,25%		
			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang		100,00%		75 Orang		100,00%		Dinas Perhubungan	
			Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor		4 Koridor		9 Koridor		10 Koridor		111,11%		10 Koridor		333,33%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			32.542.203		39.569.835		7.865.594		5.281.118		67,14%		44.850.952		137,82%		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		365 Kali		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			32.491.043		35.172.514		56.127.892		48.905.921		87,13%		84.078.435		258,77%		
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 Unit		N/A		88 Unit		88 Unit		100,00%		88 Unit		122,22%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.090.782		3.390.481		1.597.529		1.538.300		96,29%		4.928.781		96,82%		
			Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		100,00%		1 Jaringan		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.090.782		3.390.481		1.597.529		1.538.300		96,29%		4.928.781		96,82%		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen		9 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		4 Dokumen		40,00%		Dinas Perhubungan	
67	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			3.518.992		2.477.742		908.544		855.852		94,20%		3.333.594		94,73%		
			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			3.518.992		2.477.742		908.544		855.852		94,20%		3.333.594		94,73%		
			Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		100,00%		2 Kali		100,00%		Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.15.03.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota			3.518.992		2.477.742		908.544		855.852		94,20%		3.333.594		94,73%		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		200 Orang		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Dinas Perhubungan	
68	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			5.874.008		4.726.275		4.948.156		4.446.226		89,86%		9.172.501		156,15%		
			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			5.874.008		4.726.275		4.948.156		4.446.226		89,86%		9.172.501		156,15%		
			Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali		N/A		2 Kali		2 Kali		100,00%		2 Kali		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.05.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian			5.874.008		4.726.275		4.948.156		4.446.226		89,86%		9.172.501		156,15%		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen		50 Orang		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Dinas Perhubungan	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
69	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.550.501		15.081.424		16.614.839		15.336.126		92,30%		30.417.550		163,97%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,58%		91,15%		89,55%		93,59%		104,51%		93,59%		104,48%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.330.201		13.250.285		14.387.430		13.314.338		92,54%		26.564.623		173,28%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.330.201		13.250.285		14.387.430		13.314.338		92,54%		26.564.623		173,28%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		100%		35 Orang/bulan		35 Orang/bulan		100,00%		35 Orang/bulan		94,59%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.996.579		1.310.054		1.536.594		1.418.729		92,33%		2.728.783		136,67%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		95.46 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.996.579		1.310.054		1.536.594		1.418.729		92,33%		2.728.783		136,67%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Jenis		4 Paket		4 Paket		100,00%		4 Paket		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.223.721		521.085		690.815		603.059		87,30%		1.124.144		91,86%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		87.24 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.223.721		521.085		690.815		603.059		87,30%		1.124.144		91,86%		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit		2 jenis		90 Unit		90 Unit		100,00%		90 Unit		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
70	2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			16.438.816		13.642.304		14.217.068		11.827.411		83,19%		25.469.715		154,94%		
			Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	89%		90,09%		86%		89,87%		104,50%		89,87%		101,37%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			16.438.816		13.642.304		14.217.068		11.827.411		83,19%		25.469.715		154,94%		
			Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		100,00%		4 Jenis		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.08	**Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan**			2.943.703		2.181.695		1.594.749		1.412.760		88,59%		3.594.455		122,11%		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen		100 Kali		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.06	**Pelayanan Informasi Publik**			849.870		794.159		866.143		813.008		93,87%		1.607.167		189,11%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen		52 Kali		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.05	**Pengelolaan Media Komunikasi Publik**			12.645.244		10.666.449		11.756.177		9.601.643		81,67%		20.268.093		160,28%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
71	2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			74.293.471		53.993.415		63.232.093		54.622.482		86,38%		108.615.896		146,20%		
			Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			31.347.122		28.109.014		54.960.423		49.225.766		89,57%		77.334.780		246,70%		
			Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%		N/A		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.01.03	**Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**			31.347.122		28.109.014		54.960.423		49.225.766		89,57%		77.334.780		246,70%		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	415 Unit		249 lokasi		226 Unit		226 Unit		100,00%		226 Unit		54,46%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			42.946.350		25.884.400		8.271.670		5.396.716		65,24%		31.281.117		72,84%		
			Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%		N/A		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%		N/A		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.01	**Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			498.811		391.377		408.313		398.673		97,64%		790.051		158,39%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 Dokumen		58 PD		58 Dokumen		58 Dokumen		100,00%		58 Dokumen		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.03	**Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**			5.641.236		2.172.220		3.482.500		776.329		22,29%		2.948.549		52,27%		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit		378 Kali		2 Unit		2 Unit		100,00%		2 Unit		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.07	**Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**			5.046.132		1.518.706		1.571.421		1.509.581		96,06%		3.028.287		60,01%		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	190 Unit		190 Aplikasi		190 Unit		190 Unit		100,00%		190 Unit		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.10	**Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**			31.760.170		21.802.097		2.809.436		2.712.133		96,54%		24.514.230		77,19%		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58 Dokumen		58 PD		58 Dokumen		58 Dokumen		100,00%		58 Dokumen		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																	
72	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			40.889.705		29.248.117		30.699.575		28.624.185		93,24%		57.872.302		141,53%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		90,48%		90%		93,61%		104,01%		93,61%		100,66%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			34.133.950		24.085.152		25.699.703		24.028.728		93,50%		48.113.880		140,96%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			34.133.950		24.085.152		25.699.703		24.028.728		93,50%		48.113.880		140,96%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan		100%		81 Orang/bulan		81 Orang/bulan		100,00%		81 Orang/bulan		96,43%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			6.755.756		5.162.965		4.999.872		4.595.457		91,91%		9.758.422		144,45%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			5.759.388		3.953.434		4.334.463		4.120.217		95,06%		8.073.651		140,18%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		98.19 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			996.368		1.209.531		665.409		475.240		71,42%		1.684.771		169,09%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
73	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			778.729		322.880		386.348		270.194		69,94%		593.075		76,16%		
			Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	44%		15,90%		23%		23,13%		100,57%		23,13%		52,57%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			778.729		322.880		386.348		270.194		69,94%		593.075		76,16%		
			Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi		30 koperasi		30 koperasi		30 koperasi		100,00%		30 koperasi		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			778.729		322.880		386.348		270.194		69,94%		593.075		76,16%		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha		30 koperasi		30 Unit Usaha		30 Unit Usaha		100,00%		30 Unit Usaha		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
74	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			1.063.751		673.965		747.948		708.854		94,77%		1.382.819		129,99%		
			Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	71%		86,02%		68%		85,06%		125,09%		85,06%		119,80%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			1.063.751		673.965		747.948		708.854		94,77%		1.382.819		129,99%		
			Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi		415 koperasi		415 koperasi		415 koperasi		100,00%		415 koperasi		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.063.751		673.965		747.948		708.854		94,77%		1.382.819		129,99%		
			Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	415 Unit Usaha		415 koperasi		415 Unit Usaha		415 Unit Usaha		100,00%		415 Unit Usaha		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
75	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			565.398		395.249		225.591		168.281		74,60%		563.530		99,67%		
			Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	72%		14,38%		29%		29,32%		101,10%		29,32%		40,72%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			565.398		395.249		225.591		168.281		74,60%		563.530		99,67%		
			Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang		179 Orang		103 Orang		103 Orang		100,00%		103 Orang		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			565.398		395.249		225.591		168.281		74,60%		563.530		99,67%		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang		179 orang		103 Orang		103 Orang		100,00%		103 Orang		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
76	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			559.292		407.113		434.523		426.005		98,04%		833.118		148,96%		
			Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	100%		20,00%		40%		40%		100,00%		40%		40,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			559.292		407.113		434.523		426.005		98,04%		833.118		148,96%		
			Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi		83 koperasi		83 koperasi		83 koperasi		100,00%		83 koperasi		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			559.292		407.113		434.523		426.005		98,04%		833.118		148,96%		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	83 Orang		83 koperasi		83 Orang		83 Orang		100,00%		83 Orang		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
77	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			3.423.539		2.852.137		2.417.208		2.225.902		92,09%		5.078.039		148,33%		
			Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	50%		10,65%		19,95%		21,03%		105,41%		21,03%		42,06%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%		83,67%		100%		93,88%		93,88%		93,88%		93,88%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			3.423.539		2.852.137		2.417.208		2.225.902		92,09%		5.078.039		148,33%		
			Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	9 sentra		11 sentra		10 sentra		10 sentra		100,00%		10 sentra		111,11%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang		135 0rang		136 Orang		136 Orang		100,00%		136 Orang		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			3.048.602		2.603.243		2.134.654		1.970.095		92,29%		4.573.338		150,01%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	9 Unit Usaha		11 sentra		10 Unit Usaha		10 Unit Usaha		100,00%		10 Unit Usaha		111,11%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro			374.936		248.894		282.553		255.807		90,53%		504.701		134,61%		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha		135 orang		136 Unit Usaha		136 Unit Usaha		100,00%		136 Unit Usaha		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
78	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1.548.127		1.004.533		2.310.041		1.448.109		62,69%		2.452.643		158,43%		
			Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	100%		52,24%		64%		66,68%		104,19%		66,68%		66,68%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil			1.548.127		1.004.533		2.310.041		1.448.109		62,69%		2.452.643		158,43%		
			Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang		668 orang		500 orang		500 orang		100,00%		500 orang		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			1.548.127		1.004.533		2.310.041		1.448.109		62,69%		2.452.643		158,43%		
			Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha		668 orang		500 Unit Usaha		500 Unit Usaha		100,00%		500 Unit Usaha		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
79	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.852.455		12.962.841		12.687.422		12.288.100		96,85%		25.250.940		159,29%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		90,26%		90%		92,68%		102,98%		92,68%		99,66%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.545.528		9.512.128		9.962.797		9.656.813		96,93%		19.168.941		141,51%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.545.528		9.512.128		9.962.797		9.656.813		96,93%		19.168.941		141,51%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		100%		27 Orang/bulan		27 Orang/bulan		100,00%		27 Orang/bulan		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.306.927		3.450.712		2.724.626		2.631.287		96,57%		6.081.999		263,64%		
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%		78.37 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%		98.79 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.125.937		2.706.724		2.646.495		2.553.849		96,50%		5.260.573		247,45%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		98.79 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			180.990		743.988		78.131		77.438		99,11%		821.426		453,85%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		78.37 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
80	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			665.825		371.142		548.853		472.905		86,16%		844.047		126,77%		
			Jumlah Investor PMA/PMDN	230 Perusahaan		151,00 Perusahaan		170 Perusahaan		170 Perusahaan		100,00%		170 Perusahaan		73,91%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			665.825		371.142		548.853		472.905		86,16%		844.047		126,77%		
			Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	78%		72.81 %		72%		77.4 %		107,50%		77.4 %		99,23%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			665.825		371.142		548.853		472.905		86,16%		844.047		126,77%		
			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen		5 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		4 Dokumen		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
81	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			738.216		627.708		594.681		539.336		90,69%		1.167.043		158,09%		
			Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60%		58,82%		55%		59,67%		108,49%		59,67%		99,45%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			738.216		627.708		594.681		539.336		90,69%		1.167.043		158,09%		
			Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor		221 Calon Investor / Investor		250 Calon Investor / Investor		305 Calon Investor / Investor		122,00%		305 Calon Investor / Investor		101,67%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			738.216		627.708		594.681		539.336		90,69%		1.167.043		158,09%		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		4 Pameran		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		3 Dokumen		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
82	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			5.864.492		4.030.301		3.948.327		3.909.862		99,03%		7.940.162		135,39%		
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%		99,33%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			5.864.492		4.030.301		3.948.327		3.909.862		99,03%		7.940.162		135,39%		
			Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	12000 Kegiatan usaha		N/A		11500 Kegiatan usaha		12373 Kegiatan usaha		107,59%		12373 Kegiatan usaha		103,11%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	100000 berkas		N/A		85000 berkas		103827 berkas		122,15%		103827 berkas		103,83%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			1.092.027		823.751		813.212		801.041		98,50%		1.624.791		148,79%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	12000 Kegiatan Usaha		11734 Pelaku Usaha		11500 Kegiatan Usaha		12373 Kegiatan Usaha		107,59%		12373 Kegiatan Usaha		103,11%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			4.772.465		3.206.550		3.135.115		3.108.821		99,16%		6.315.371		132,33%		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	16000 Pelaku Usaha		90564 berkas		10000 Pelaku Usaha		11167 Pelaku Usaha		111,67%		11167 Pelaku Usaha		69,79%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
83	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			1.056.164		816.236		910.955		837.464		91,93%		1.653.700		156,58%		
			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	46%		50,46%		43%		45,73%		106,35%		45,73%		99,41%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.056.164		816.236		910.955		837.464		91,93%		1.653.700		156,58%		
			Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1500 perusahaan		1111 perusahaan		1200 perusahaan		1230 perusahaan		102,50%		1230 perusahaan		82,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			283.670		257.796		271.339		225.005		82,92%		482.801		170,20%		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	290 Pelaku Usaha		327 peserta		260 Pelaku Usaha		293 Pelaku Usaha		112,69%		293 Pelaku Usaha		101,03%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			772.494		558.440		639.616		612.459		95,75%		1.170.899		151,57%		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2960 Kegiatan Usaha		N/A		2870 Kegiatan Usaha		3073 Kegiatan Usaha		107,07%		3073 Kegiatan Usaha		103,82%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
84	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			377.020		245.197		229.676		229.449		99,90%		474.646		125,89%		
			jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga		21,00 lembaga		20 lembaga		20 lembaga		100,00%		20 lembaga		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			377.020		245.197		229.676		229.449		99,90%		474.646		125,89%		
			Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	500 perusahaan		309 perusahaan		350 perusahaan		387 perusahaan		110,57%		387 perusahaan		77,40%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			377.020		245.197		229.676		229.449		99,90%		474.646		125,89%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen		46167 data		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		4 Dokumen		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
85	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			50.957.792		33.887.982		39.352.019		38.293.638		97,31%		72.181.620		141,65%		
			Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	28%		20,07%		22%		22,12%		100,55%		22,12%		79,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	28%		20,11%		22%		23,31%		105,95%		23,31%		83,25%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47,98%		50,00%		46,86%		70,78%		151,05%		70,78%		147,52%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			50.957.792		33.887.982		39.352.019		38.293.638		97,31%		72.181.620		141,65%		
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	24 jenis		N/A		23 jenis		23 jenis		100,00%		23 jenis		95,83%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan		N/A		1 laporan		1 laporan		100,00%		1 laporan		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00%		2 jenis		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1.715.027		366.400		430.330		397.176		92,30%		763.575		44,52%		
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	820 Orang		34 kegiatan		825 Orang		825 Orang		100,00%		825 Orang		100,61%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			1.758.202		813.975		568.151		544.906		95,91%		1.358.881		77,29%		
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500 Orang		14 Kegiatan		500 Orang		500 Orang		100,00%		500 Orang		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi			45.009.330		30.845.757		36.762.187		35.965.966		97,83%		66.811.723		148,44%		
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	15849 Orang		16458 orang		3186 Orang		3186 Orang		100,00%		3186 Orang		20,10%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			2.475.234		1.861.850		1.591.351		1.385.591		87,07%		3.247.441		131,20%		
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	810 Orang		40 kegiatan		925 Orang		925 Orang		100,00%		925 Orang		114,20%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
86	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			99.950.462		67.100.783		83.707.565		77.204.689		92,23%		144.305.472		144,38%		
			Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	28%		10,00%		17%		17%		100,00%		17%		60,71%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	205 medali		354,00 medali		174 medali		398 medali		228,74%		398 medali		194,15%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			24.739.225		10.732.328		11.651.888		9.178.365		78,77%		19.910.693		80,48%		
			Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	9 kecamatan		10 kecamatan		10 kecamatan		10 kecamatan		100,00%		10 kecamatan		111,11%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			24.739.225		10.732.328		11.651.888		9.178.365		78,77%		19.910.693		80,48%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	84 Unit		30 unit		30 Unit		30 Unit		100,00%		30 Unit		35,71%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			41.576.316		32.993.043		46.381.309		44.945.918		96,91%		77.938.962		187,46%		
			Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	45 cabang olahraga		43 cabang olahraga		45 cabang olahraga		49 cabang olahraga		108,89%		49 cabang olahraga		108,89%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota			41.576.316		32.993.043		46.381.309		44.945.918		96,91%		77.938.962		187,46%		
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	700 Orang		50 kegiatan		642 Orang		689 Orang		107,32%		689 Orang		98,43%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			33.634.920		23.375.412		25.674.368		23.080.406		89,90%		46.455.817		138,12%		
			Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	166 lokasi		263 lokasi		386 lokasi		386 lokasi		100,00%		386 lokasi		232,53%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen		N/A		4 dokumen		4 dokumen		100,00%		4 dokumen		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			27.850.024		20.221.533		22.908.034		20.597.916		89,92%		40.819.448		146,57%		
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	166 Unit		286 kali		386 Unit		386 Unit		100,00%		386 Unit		232,53%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			5.784.896		3.153.879		2.766.334		2.482.490		89,74%		5.636.369		97,43%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7 Dokumen		12 kegiatan		7 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		7 Dokumen		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
87	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			695.275		487.892		556.836		530.791		95,32%		1.018.683		146,52%		
			Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			695.275		487.892		556.836		530.791		95,32%		1.018.683		146,52%		
			Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor		5 Sektor		5 Sektor		5 Sektor		100,00%		5 Sektor		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			695.275		487.892		556.836		530.791		95,32%		1.018.683		146,52%		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen		12 Kali		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
88	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			7.177.846		5.113.427		5.556.245		5.312.643		95,62%		10.426.070		145,25%		
			Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	41%		13,79%		18%		22,41%		124,50%		22,41%		54,66%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.474.291		2.810.569		3.681.829		3.537.959		96,09%		6.348.529		141,89%		
			Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari		3.01 kali/per hari		3 kali/per hari		3.02 kali/per hari		100,67%		3.02 kali/per hari		100,67%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.474.291		2.810.569		3.681.829		3.537.959		96,09%		6.348.529		141,89%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah		13 PD		13 Perangkat Daerah		13 Perangkat Daerah		100,00%		13 Perangkat Daerah		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			2.703.556		2.302.857		1.874.416		1.774.683		94,68%		4.077.541		150,82%		
			Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali		N/A		6 Kali		6 Kali		100,00%		6 Kali		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.703.556		2.302.857		1.874.416		1.774.683		94,68%		4.077.541		150,82%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah		1576 Unit		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		100,00%		58 Perangkat Daerah		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
89	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			51.347.778		35.078.877		27.078.034		25.501.935		94,18%		60.580.812		117,98%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		90,78%		90%		93,34%		103,71%		93,34%		100,37%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			32.124.462		20.682.777		21.972.140		20.759.625		94,48%		41.442.402		129,01%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			32.124.462		20.682.777		21.972.140		20.759.625		94,48%		41.442.402		129,01%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		100%		72 Orang/bulan		72 Orang/bulan		100,00%		72 Orang/bulan		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			19.223.316		14.396.099		5.105.894		4.742.310		92,88%		19.138.409		99,56%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%		95.43 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		83.07 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			17.544.444		12.943.404		4.633.304		4.330.266		93,46%		17.273.670		98,46%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3 jenis		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.678.872		1.452.695		472.590		412.043		87,19%		1.864.739		111,07%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3 jenis		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
90	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			6.343.173		6.301.617		8.600.504		7.855.570		91,34%		14.157.187		223,19%		
			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	100%		60,00%		70%		70%		100,00%		70%		70,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			6.343.173		5.931.733		8.600.504		7.855.570		91,34%		13.787.302		217,36%		
			Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	480 kali		N/A		520 kali		521 kali		100,19%		521 kali		108,54%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.02.2.01.01	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan**			6.343.173		5.931.733		8.600.504		7.855.570		91,34%		13.787.302		217,36%		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek		451 kali		2 Objek		2 Objek		100,00%		2 Objek		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
91	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			2.443.046		1.456.090		1.294.832		1.157.731		89,41%		2.613.820		106,99%		
			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	62,00%		59,16%		59,50%		59,86%		100,61%		59,86%		96,55%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			2.443.046		1.456.090		1.294.832		1.157.731		89,41%		2.613.820		106,99%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen		N/A		12 dokumen		12 dokumen		100,00%		12 dokumen		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.22.03.2.01.01	**Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional**			2.443.046		1.456.090		1.294.832		1.157.731		89,41%		2.613.820		106,99%		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	973 Orang		770 kali		860 Orang		927 Orang		107,79%		927 Orang		95,27%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
92	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			1.292.538		981.734		1.338.255		1.128.486		84,33%		2.110.220		163,26%		
			Persentase siswa yang memahami materi sejarah	80%		73,39%		74%		75,13%		101,53%		75,13%		93,91%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			1.292.538		981.734		1.338.255		1.128.486		84,33%		2.110.220		163,26%		
			Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		100,00%		10 kali		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.04.2.01.03	**Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah**			1.292.538		981.734		1.338.255		1.128.486		84,33%		2.110.220		163,26%		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen		10 kali		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		4 Dokumen		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
93	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			1.514.094		1.286.498		1.187.340		1.044.957		88,01%		2.331.454		153,98%		
			Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,04%		95,86%		92,04%		96,99%		105,38%		96,99%		105,38%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			1.514.094		1.286.498		1.187.340		1.044.957		88,01%		2.331.454		153,98%		
			Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	289 lokasi		266 lokasi		270 lokasi		270 lokasi		100,00%		270 lokasi		93,43%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.05.2.02.01	**Pelindungan Cagar Budaya**			1.514.094		1.286.498		1.187.340		1.044.957		88,01%		2.331.454		153,98%		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	289 Objek		266 lokasi		270 Objek		270 Objek		100,00%		270 Objek		93,43%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
94	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			3.477.181		3.987.680		8.940.223		8.343.870		93,33%		12.331.549		354,64%		
			Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**			3.477.181		3.987.680		8.940.223		8.343.870		93,33%		12.331.549		354,64%		
			Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	8 lokasi		N/A		9 lokasi		9 lokasi		100,00%		9 lokasi		112,50%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.01	**Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu**			223.926		414.981		450.849		416.154		92,30%		831.135		371,17%		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	730 Unit		2 lokasi		747 Unit		747 Unit		100,00%		747 Unit		102,33%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.03	**Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum**			433.529		755.047		807.609		800.187		99,08%		1.555.235		358,74%		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit		8 kegiatan		8 Unit		8 Unit		100,00%		8 Unit		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.04	**Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum**			135.342		203.318		241.542		226.497		93,77%		429.815		317,58%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit		2 lokasi		2 Unit		2 Unit		100,00%		2 Unit		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			2.684.384		2.614.334		7.440.223		6.901.031		92,75%		9.515.365		354,47%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	8 Unit		7 lokasi		9 Unit		9 Unit		100,00%		9 Unit		112,50%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
95	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.264.534		16.668.048		17.939.224		16.815.246		93,73%		33.483.294		173,81%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,02%		94,98%		96,04%		97,53%		101,55%		97,53%		98,50%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.905.797		14.070.890		15.447.249		14.484.525		93,77%		28.555.415		179,53%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.905.797		14.070.890		15.447.249		14.484.525		93,77%		28.555.415		179,53%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		100%		41 Orang/bulan		41 Orang/bulan		100,00%		41 Orang/bulan		91,11%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			227.838		168.045		121.466		84.592		69,64%		252.637		110,88%		
			Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		77.31 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			227.838		168.045		121.466		84.592		69,64%		252.637		110,88%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		77.31 %		10 Paket		10 Paket		100,00%		10 Paket		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			754.718		499.833		283.057		208.663		73,72%		708.495		93,88%		
			Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%		73.58 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			754.718		499.833		283.057		208.663		73,72%		708.495		93,88%		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit		73.58 %		19 Unit		19 Unit		100,00%		19 Unit		135,71%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.376.181		1.929.281		2.087.453		2.037.467		97,61%		3.966.747		166,94%		
			Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			214.853		231.425		330.708		291.337		88,09%		522.762		243,31%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.161.328		1.697.856		1.756.745		1.746.130		99,40%		3.443.985		159,35%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
96	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			32.318.230		15.913.789		17.268.835		16.438.506		95,19%		32.352.295		100,11%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	100%		56,13%		56,13%		80,09%		142,69%		80,09%		80,09%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase event literasi yang diselenggarakan	100%		19,20%		38,80%		38,80%		100,00%		38,80%		38,80%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	100%		57,92%		67,21%		69,95%		104,08%		69,95%		69,95%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			31.664.882		15.462.651		16.742.646		15.996.440		95,54%		31.459.091		99,35%		
			Jenis buku yang disediakan	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100,00%		2 Jenis		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Tingkat Kepuasan Pemustaka	83.5 nilai		81.78 nilai		82 nilai		93.31 nilai		113,79%		93.31 nilai		111,75%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	230 Lembaga		251 Lembaga		271 Lembaga		271 Lembaga		100,00%		271 Lembaga		117,83%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.05	**Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota**			241.070		172.731		222.216		212.211		95,50%		384.942		159,68%		
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan		201 lembaga		200 Perpustakaan		203 Perpustakaan		101,50%		203 Perpustakaan		101,50%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.04	**Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan**			76.506		64.843		87.608		87.479		99,85%		152.321		199,10%		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan		50 lembaga		68 Perpustakaan		68 Perpustakaan		100,00%		68 Perpustakaan		226,67%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.09	**Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka**			1.665.490		806.479		549.537		334.788		60,92%		1.141.267		68,52%		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1505 Eksemplar		4210 Examplar		1498 Eksemplar		1797 Eksemplar		119,96%		1797 Eksemplar		119,40%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.02	**Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			29.394.765		14.174.827		15.649.953		15.129.773		96,68%		29.304.600		99,69%		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1505 Perpustakaan		1494 lokasi		1498 Perpustakaan		1498 Perpustakaan		100,00%		1498 Perpustakaan		99,53%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.06	**Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			287.051		243.771		233.332		232.189		99,51%		475.961		165,81%		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang		502 orang		500 Orang		506 Orang		101,20%		506 Orang		101,20%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			653.349		451.138		526.189		442.066		84,01%		893.204		136,71%		
			Jumlah bibit penulis dan pendongeng	7429 orang		3637 orang		4477 orang		4477 orang		100,00%		4477 orang		60,26%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			653.349		451.138		526.189		442.066		84,01%		893.204		136,71%		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	260 Lokus		242 kali		245 Lokus		245 Lokus		100,00%		245 Lokus		94,23%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
97	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			3.079.365		3.185.791		3.461.922		3.306.859		95,52%		6.492.650		210,84%		
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	30,01%		27,93%		28,25%		29,64%		104,92%		29,64%		98,77%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	17,98%		10,35%		12,12%		16,04%		132,34%		16,04%		89,21%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	100%		52,02%		64,14%		73,49%		114,58%		73,49%		73,49%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			943.857		717.975		891.237		832.007		93,35%		1.549.982		164,22%		
			Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item		10226 item		9000 item		9000 item		100,00%		9000 item		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	66 lembaga		48 lembaga		48 lembaga		51 lembaga		106,25%		51 lembaga		77,27%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			783.408		562.950		622.675		566.115		90,92%		1.129.065		144,12%		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas		19 Item		471 Berkas		471 Berkas		100,00%		471 Berkas		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			160.449		155.025		268.562		265.892		99,01%		420.918		262,34%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan		66 Kali		66 Laporan		66 Laporan		100,00%		66 Laporan		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			1.743.109		2.096.644		1.951.884		1.891.796		96,92%		3.988.440		228,81%		
			Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar		10020 Lembar		8640 Lembar		8640 Lembar		100,00%		8640 Lembar		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			1.743.109		2.096.644		1.951.884		1.891.796		96,92%		3.988.440		228,81%		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip		5 Kegiatan		300 Arsip		300 Arsip		100,00%		300 Arsip		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			392.398		371.172		618.801		583.056		94,22%		954.228		243,18%		
			Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	9200 item		5298 item		7457 item		8205 item		110,03%		8205 item		89,18%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	69 Lembaga		78 Lembaga		70 Lembaga		70 Lembaga		100,00%		70 Lembaga		101,45%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			152.577		120.665		194.173		186.113		95,85%		306.778		201,06%		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	69 Laporan		78 Lembaga		70 Laporan		70 Laporan		100,00%		70 Laporan		101,45%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN			239.821		250.507		424.628		396.943		93,48%		647.450		269,97%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna		43 kali		2559 Pengguna		3080 Pengguna		120,36%		3080 Pengguna		3080,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
98	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			178.274		65.836		70.000		66.100		94,43%		131.936		74,01%		
			Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	100%		97,76%		39,96%		51,95%		130,01%		51,95%		51,95%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			178.274		65.836		70.000		66.100		94,43%		131.936		74,01%		
			Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			178.274		65.836		70.000		66.100		94,43%		131.936		74,01%		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip		1656 Item arsip		880 Arsip		880 Arsip		100,00%		880 Arsip		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
99	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			4.094.028		7.837.998		2.629.133		2.334.352		88,79%		10.172.350		248,47%		
			Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	50%		31,67%		35%		41,43%		118,37%		41,43%		82,86%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			4.094.028		7.837.998		2.629.133		2.334.352		88,79%		10.172.350		248,47%		
			Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100,00%		1 laporan		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			4.094.028		7.837.998		2.629.133		2.334.352		88,79%		10.172.350		248,47%		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	70 Unit		50 unit		55 Unit		55 Unit		100,00%		55 Unit		78,57%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
100	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1.687.007		2.788.492		2.272.835		1.519.178		66,84%		4.307.670		255,34%		
			Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	40 orang/kelompok		22,00 orang/kelompok		25 orang/kelompok		25 orang/kelompok		100,00%		25 orang/kelompok		62,50%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			379.056		318.938		462.721		385.873		83,39%		704.812		185,94%		
			Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	40 kali		32 kali		34 kali		34 kali		100,00%		34 kali		85,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			379.056		318.938		462.721		385.873		83,39%		704.812		185,94%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40 Kelompok		875 orang		25 Kelompok		25 Kelompok		100,00%		25 Kelompok		62,50%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.307.951		2.469.553		1.810.115		1.133.305		62,61%		3.602.858		275,46%		
			Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100,00%		1 laporan		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.307.951		2.469.553		1.810.115		1.133.305		62,61%		3.602.858		275,46%		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	68 Unit		86 unit		53 Unit		60 Unit		113,21%		60 Unit		88,24%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
101	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			45.590.707		1.578.567		187.583		179.800		95,85%		1.758.367		3,86%		
			Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	0 kasus		0,00 kasus		0 kasus		0 kasus		100,00%		0 kasus		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			45.590.707		1.578.567		187.583		179.800		95,85%		1.758.367		3,86%		
			Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali		N/A		12 Kali		12 Kali		100,00%		12 Kali		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			45.590.707		1.578.567		187.583		179.800		95,85%		1.758.367		3,86%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 kali		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
102	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			820.823		732.264		1.978.453		1.842.281		93,12%		2.574.545		313,65%		
			Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	80%		61,20%		65%		65%		100,00%		65%		81,25%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			820.823		732.264		1.978.453		1.842.281		93,12%		2.574.545		313,65%		
			Jumlah sentra ikan yang dikelola	3 sentra		3 sentra		2 sentra		2 sentra		100,00%		2 sentra		66,67%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			820.823		732.264		1.978.453		1.842.281		93,12%		2.574.545		313,65%		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	250 Pelaku Usaha		250 pelaku usaha		180 Pelaku Usaha		180 Pelaku Usaha		100,00%		180 Pelaku Usaha		72,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
103	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			6.263.210		5.513.307		7.027.005		6.190.044		88,09%		11.703.351		186,86%		
			Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	78,57%		35,71%		42,85%		42,86%		100,02%		42,86%		54,55%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			5.122.716		4.283.255		5.990.726		5.370.679		89,65%		9.653.934		188,45%		
			Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi		N/A		2 lokasi		2 lokasi		100,00%		2 lokasi		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			5.122.716		4.126.208		5.990.726		5.370.679		89,65%		9.496.886		185,39%		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi		2 lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		100,00%		2 Lokasi		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.140.494		1.230.052		1.036.278		819.365		79,07%		2.049.417		179,70%		
			Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		100,00%		1 lokasi		50,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			150.212		0		217.236		177.699		81,80%		177.699		118,30%		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Dokumen		N/A		60 Dokumen		60 Dokumen		100,00%		60 Dokumen		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			598.043		915.117		629.443		510.566		81,11%		1.425.683		238,39%		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi		1 lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		1 Lokasi		50,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			392.238		314.935		189.600		131.100		69,15%		446.035		113,72%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
104	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			6.583.809		3.713.592		5.522.514		4.521.173		81,87%		8.234.765		125,08%		
			Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	47%		42,54%		42,50%		48,16%		113,32%		48,16%		221,02%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			6.583.809		3.713.592		5.522.514		4.521.173		81,87%		8.234.765		125,08%		
			Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis		N/A		2 jenis		2 jenis		100,00%		2 jenis		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			6.583.809		3.713.592		5.522.514		4.521.173		81,87%		8.234.765		125,08%		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan		206 kali		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
105	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			2.802.104		2.201.648		2.193.240		1.779.764		81,15%		3.981.412		142,09%		
			Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	100%		66,67%		80%		100%		125,00%		100%		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	28%		22,88%		22%		22,22%		101,00%		22,22%		79,36%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	100%		25,00%		40%		40%		100,00%		40%		40,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			822.352		536.729		582.883		544.379		93,39%		1.081.108		131,47%		
			Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 jenis		N/A		3 jenis		3 jenis		100,00%		3 jenis		150,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat	1 laporan		N/A		1 laporan		1 laporan		100,00%		1 laporan		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			398.118		268.463		262.588		253.548		96,56%		522.011		131,12%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	80 Orang		3 kali		72 Orang		72 Orang		100,00%		72 Orang		90,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			424.235		268.266		320.296		290.831		90,80%		559.097		131,79%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	300 Orang		6 kali		250 Orang		250 Orang		100,00%		250 Orang		83,33%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			1.979.752		1.664.920		1.610.357		1.235.384		76,71%		2.900.304		146,50%		
			Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	5 Produk		3 Produk		3 Produk		3 Produk		100,00%		3 Produk		60,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			1.979.752		1.664.920		1.610.357		1.235.384		76,71%		2.900.304		146,50%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	250 Orang		20 Kali		150 Orang		150 Orang		100,00%		150 Orang		60,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
106	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			7.660.760		6.934.739		5.588.237		4.737.353		84,77%		11.672.093		152,36%		
			Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	45 Orang		25,00 Orang		30 Orang		30 Orang		100,00%		30 Orang		66,67%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			6.792.603		5.172.447		2.506.242		2.423.739		96,71%		7.596.186		111,83%		
			Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		100,00%		10 Jenis		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			6.792.603		5.172.447		2.376.242		2.293.845		96,53%		7.466.293		109,92%		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan		500 Orang		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			0		0		130.000		129.894		99,92%		129.894		0,00%		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	N/A		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		N/A		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			868.157		0		3.081.995		2.313.615		75,07%		2.313.615		266,50%		
			Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis		N/A		6 Jenis		6 Jenis		100,00%		6 Jenis		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			868.157		1.762.292		3.081.995		2.313.615		75,07%		4.075.907		469,49%		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
107	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			21.217.227		19.946.716		11.336.513		10.184.831		89,84%		30.131.548		142,01%		
			Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha		2,00 Ha		2 Ha		2 Ha		100,00%		2 Ha		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	35 Lokasi		14,00 Lokasi		19 Lokasi		19 Lokasi		100,00%		19 Lokasi		54,29%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			1.309.313		1.009.919		5.615.919		5.136.309		91,46%		6.146.228		469,42%		
			Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		100,00%		4 Jenis		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya			1.309.313		1.009.919		5.615.919		5.136.309		91,46%		6.146.228		469,42%		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6 Laporan		4 Lokasi		16 Laporan		16 Laporan		100,00%		16 Laporan		266,67%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			19.907.914		18.936.797		5.720.594		5.048.522		88,25%		23.985.319		120,48%		
			Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	13 Laporan		13 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		15,38%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			19.907.914		18.936.797		5.720.594		5.048.522		88,25%		23.985.319		120,48%		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13 Unit		13 lokasi		2 Unit		2 Unit		100,00%		2 Unit		15,38%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
108	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1.140.798		992.214		1.724.083		1.203.319		69,79%		2.195.533		192,46%		
			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89,50%		89,68%		89,50%		89,53%		100,03%		89,53%		100,03%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	8 kelompok		3,00 kelompok		5 kelompok		5 kelompok		100,00%		5 kelompok		62,50%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			845.362		825.181		1.312.392		996.499		75,93%		1.821.680		215,49%		
			Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%		89.2 %		80%		90.95 %		113,69%		90.95 %		113,69%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.01.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis**			845.362		825.181		1.312.392		996.499		75,93%		1.821.680		215,49%		
			Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan		2803 ekor		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**			295.436		167.033		411.691		206.820		50,24%		373.853		126,54%		
			Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	45 Unit		25 Unit		30 Unit		31 Unit		103,33%		31 Unit		68,89%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.04.01	**Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan**			295.436		167.033		411.691		206.820		50,24%		373.853		126,54%		
			Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan		8 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
109	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			113.553		105.616		43.937		42.955		97,76%		148.570		130,84%		
			Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			113.553		105.616		43.937		42.955		97,76%		148.570		130,84%		
			Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80%		N/A		80%		100%		125,00%		100%		125,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.06.2.01.02	**Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian**			113.553		105.616		43.937		42.955		97,76%		148.570		130,84%		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen		92.36 %		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
110	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			2.709.423		2.387.833		2.088.712		2.001.952		95,85%		4.389.785		162,02%		
			Tingkat Produktivitas Pertanian	6,05 ton/ha		6,46 ton/ha		5,85 ton/ha		6,56 ton/ha		112,14%		6,56 ton/ha		108,43%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**			2.709.423		2.387.833		2.088.712		2.001.952		95,85%		4.389.785		162,02%		
			Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang		25 orang		25 orang		26 orang		104,00%		26 orang		104,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali		N/A		7 kali		7 kali		100,00%		7 kali		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.07.2.01.02	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**			1.702.059		1.433.395		870.043		808.868		92,97%		2.242.263		131,74%		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit		6 Kali		7 Unit		7 Unit		100,00%		7 Unit		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			1.007.364		954.438		1.218.670		1.193.085		97,90%		2.147.522		213,18%		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit		5 kali		1 Unit		1 Unit		100,00%		1 Unit		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
111	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			1.879.526		1.038.165		934.995		837.993		89,63%		1.876.158		99,82%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan	96%		100,00%		93%		99,64%		107,14%		99,64%		103,79%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			501.503		263.829		232.426		193.163		83,11%		456.992		91,12%		
			Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			501.503		263.829		232.426		193.163		83,11%		456.992		91,12%		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen		456 pelaku usaha		450 Dokumen		547 Dokumen		121,56%		547 Dokumen		121,56%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			585.879		207.863		228.689		200.679		87,75%		408.542		69,73%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			585.879		207.863		228.689		200.679		87,75%		408.542		69,73%		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	60 Dokumen		556 Pelaku usaha		200 Dokumen		200 Dokumen		100,00%		200 Dokumen		333,33%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			127.369		95.902		94.563		88.496		93,58%		184.398		144,77%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri			127.369		0		94.563		88.496		93,58%		88.496		69,48%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen		N/A		24 Dokumen		29 Dokumen		120,83%		29 Dokumen		120,83%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri			127.369		40.100		39.600		33.600		84,85%		73.700		57,86%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri			127.369		0		39.600		33.600		84,85%		33.600		26,38%		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen		N/A		24 Dokumen		29 Dokumen		120,83%		29 Dokumen		120,83%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			537.406		321.310		339.716		322.055		94,80%		643.365		119,72%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C			537.406		321.310		339.716		322.055		94,80%		643.365		119,72%		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dokumen		400 Pelaku usaha		64 Dokumen		88 Dokumen		137,50%		88 Dokumen		220,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
112	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			4.968.209		3.342.317		5.200.817		4.499.354		86,51%		7.841.671		157,84%		
			Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			4.968.209		3.342.317		5.200.817		4.499.354		86,51%		7.841.671		157,84%		
			Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			4.968.209		3.342.317		5.200.817		4.499.354		86,51%		7.841.671		157,84%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen		N/A		611 Dokumen		622 Dokumen		101,80%		622 Dokumen		101,80%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
113	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			1.309.691		685.902		777.254		759.349		97,70%		1.445.251		110,35%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**			1.309.691		685.902		777.254		759.349		97,70%		1.445.251		110,35%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02.03	**Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**			425.952		249.511		316.363		301.824		95,40%		551.335		129,44%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		302 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02.01	**Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**			883.738		436.391		460.892		457.526		99,27%		893.917		101,15%		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
114	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			2.045.562		1.063.804		658.605		614.124		93,25%		1.677.928		82,03%		
			Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**			2.045.562		1.063.804		658.605		614.124		93,25%		1.677.928		82,03%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**			1.898.815		954.911		547.382		509.165		93,02%		1.464.076		77,10%		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	24290 Unit		24198 Unit		22880 Unit		23246 Unit		101,60%		23246 Unit		95,70%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01.02	**Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal**			146.747		108.893		111.223		104.959		94,37%		213.851		145,73%		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang		5036 unit		1200 Orang		1264 Orang		105,33%		1264 Orang		105,33%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
115	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			6.660.120		5.328.295		6.367.965		5.779.579		90,76%		11.107.874		166,78%		
			Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			6.660.120		5.328.295		6.367.965		5.779.579		90,76%		11.107.874		166,78%		
			Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00%		12 laporan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			6.660.120		5.328.295		6.367.965		5.779.579		90,76%		11.107.874		166,78%		
			Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	5220 UMKM		5363 orang		5220 UMKM		5301 UMKM		101,55%		5301 UMKM		101,55%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
116	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			589.753		849.985		972.110		852.656		87,71%		1.702.641		288,70%		
			Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	26%		16,40%		17%		17,05%		100,29%		17,05%		65,58%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			589.753		849.985		972.110		852.656		87,71%		1.702.641		288,70%		
			Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			0		0		167.281		121.832		72,83%		121.832		0,00%		
			Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	N/A		N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		N/A		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			589.753		734.070		804.829		730.824		90,80%		1.464.894		248,39%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen		550 Pelaku usaha		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
117	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			331.422		258.596		428.491		413.608		96,53%		672.203		202,82%		
			Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	90%		99,77%		82%		100%		121,95%		100%		111,11%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			331.422		258.596		428.491		413.608		96,53%		672.203		202,82%		
			Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			331.422		258.596		428.491		413.608		96,53%		672.203		202,82%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen		457 Pelaku usaha		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
118	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			213.589		212.258		244.396		204.471		83,66%		416.729		195,11%		
			Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			213.589		212.258		244.396		204.471		83,66%		416.729		195,11%		
			Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota surabaya	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			213.589		212.258		244.396		204.471		83,66%		416.729		195,11%		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen		1 dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH																	
119	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			262.195.831		210.135.254		237.231.985		215.729.913		90,94%		425.865.167		162,42%		
			Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	90%		100,00%		85%		100%		117,65%		100%		111,11%		Sekretariat Daerah	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%		93,70%		100%		95%		95,00%		95%		95,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	75%		87,93%		66,66%		100%		150,02%		100%		133,33%		Sekretariat Daerah	
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%		100,00%		97%		100%		103,09%		100%		102,04%		Sekretariat Daerah	
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	98%		99,09%		92%		99,96%		108,65%		99,96%		102,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			91.628.677		62.085.264		64.418.503		61.560.357		95,56%		123.645.621		134,94%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			91.628.677		62.085.264		64.418.503		61.560.357		95,56%		123.645.621		134,94%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bulan		100%		168 Orang/bulan		168 Orang/bulan		100,00%		168 Orang/bulan		107,01%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.083.838		19.873.689		1.658.360		1.378.544		83,13%		21.252.234		520,40%		
			Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00%		12 laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			4.083.838		19.873.689		1.658.360		1.378.544		83,13%		21.252.234		520,40%		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket		46335 Stel		5 Paket		9 Paket		180,00%		9 Paket		180,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			33.982.990		19.626.917		37.740.619		25.279.955		66,98%		44.906.872		132,15%		
			Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00%		12 laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33.982.990		19.626.917		37.740.619		25.279.955		66,98%		44.906.872		132,15%		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1200 Unit		8526 Unit		1800 Unit		2569 Unit		142,72%		2569 Unit		214,08%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.205.968		82.422.753		102.902.293		99.420.505		96,62%		181.843.258		287,70%		
			Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%		85.63 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%		N/A		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			52.008.578		76.878.553		97.019.192		93.700.063		96,58%		170.578.616		327,98%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.349.570		3.749.395		3.831.428		3.772.040		98,45%		7.521.436		118,46%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.847.821		1.794.805		2.051.673		1.948.401		94,97%		3.743.206		77,21%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		100%		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			9.302.988		8.446.555		9.424.255		8.247.147		87,51%		16.693.702		179,44%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			8.072.880		8.272.880		9.238.090		8.072.846		87,39%		16.345.726		202,48%		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		100,00%		2 Orang/Bulan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.230.108		173.674		186.165		174.301		93,63%		347.976		28,29%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		100,00%		2 Orang/Bulan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			3.818.611		2.109.990		2.765.965		2.514.120		90,89%		4.624.110		121,09%		
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi		58 instansi		58 instansi		58 instansi		100,00%		58 instansi		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit		253 unit		253 unit		253 unit		100,00%		253 unit		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi		N/A		58 instansi		58 instansi		100,00%		58 instansi		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1.545.079		500.041		726.352		661.614		91,09%		1.161.655		75,18%		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		253 kegiatan		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1.005.337		853.128		993.883		917.788		92,34%		1.770.916		176,15%		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		58 kegiatan		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1.268.196		756.821		1.045.730		934.717		89,38%		1.691.539		133,38%		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		58 kegiatan		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			56.172.758		15.570.085		18.321.989		17.329.285		94,58%		32.899.370		58,57%		
			Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00%		12 laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan			54.169.994		14.567.939		17.542.202		16.566.422		94,44%		31.134.361		57,48%		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		100%		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			2.002.763		1.002.146		779.787		762.863		97,83%		1.765.009		88,13%		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		116 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
120	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			40.046.015		42.563.967		113.769.153		88.201.903		77,53%		130.765.870		326,54%		
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	100%		100,00%		83%		100%		120,48%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari		1,00 hari		2 hari		2 hari		100,00%		2 hari		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	100%		70,97%		77,42%		80,65%		104,17%		80,65%		80,65%		Sekretariat Daerah	
			Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	100%		100,00%		92%		100%		108,70%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	100%		19,46%		38,91%		43,48%		111,75%		43,48%		43,48%		Sekretariat Daerah	
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	100%		100,00%		98%		100%		102,04%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari		12,00 hari		14 hari		14 hari		100,00%		14 hari		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**			14.579.943		7.126.025		6.511.670		5.793.231		88,97%		12.919.256		88,61%		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen		2 dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	185 Lembaga		36 Lembaga		72 Lembaga		80 Lembaga		111,11%		80 Lembaga		43,24%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	31 Kecamatan		22 Kecamatan		24 Kecamatan		25 Kecamatan		104,17%		25 Kecamatan		80,65%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.03	**Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**			5.403.004		3.659.472		2.584.907		2.330.599		90,16%		5.990.071		110,87%		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen		2 Berkas		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.01	**Penataan Administrasi Pemerintahan**			4.813.183		2.024.070		2.192.082		1.900.597		86,70%		3.924.667		81,54%		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		185 Peserta		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.02	**Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**			4.363.756		1.442.484		1.734.681		1.562.034		90,05%		3.004.518		68,85%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		22 Kecamatan		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			4.931.081		26.429.128		99.342.904		76.108.302		76,61%		102.537.430		2079,41%		
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		1 Kegiatan		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		1 Kegiatan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.01	**Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**			3.101.912		25.596.364		31.986.614		27.067.565		84,62%		52.663.929		1697,79%		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.03	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat**			104.165		0		66.007.634		47.867.133		72,52%		47.867.133		45952,98%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.02	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial**			1.725.003		832.764		1.348.656		1.173.604		87,02%		2.006.369		116,31%		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			17.480.417		7.128.360		5.500.334		4.861.957		88,39%		11.990.317		68,59%		
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum		155 rancangan produk hukum		60 rancangan produk hukum		104 rancangan produk hukum		173,33%		104 rancangan produk hukum		173,33%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum		155 produk hukum		60 produk hukum		104 produk hukum		173,33%		104 produk hukum		173,33%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum		25 permasalahan hukum		20 permasalahan hukum		20 permasalahan hukum		100,00%		20 permasalahan hukum		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**			8.163.200		2.402.206		1.771.618		1.651.831		93,24%		4.054.037		49,66%		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus		25 permasalahan hukum		20 Kasus		20 Kasus		100,00%		20 Kasus		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.01	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**			7.357.890		3.214.816		2.454.486		2.164.183		88,17%		5.378.999		73,11%		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen		155 rancangan produk hukum		60 Dokumen		104 Dokumen		173,33%		104 Dokumen		173,33%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.03	**Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**			1.959.326		1.511.338		1.274.230		1.045.942		82,08%		2.557.280		130,52%		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen		155 produk hukum		60 Dokumen		104 Dokumen		173,33%		104 Dokumen		173,33%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**			3.054.574		1.880.453		2.414.245		1.438.414		59,58%		3.318.867		108,65%		
			Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga		N/A		11 Lembaga		11 Lembaga		100,00%		11 Lembaga		91,67%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga		N/A		20 Lembaga		20 Lembaga		100,00%		20 Lembaga		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	32 Lembaga		N/A		31 Lembaga		31 Lembaga		100,00%		31 Lembaga		96,88%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.03	**Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama**			171.358		0		355.950		315.703		88,69%		315.703		184,24%		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.01	**Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri**			1.043.032		833.192		828.834		648.934		78,29%		1.482.126		142,10%		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.02	**Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri**			1.840.185		1.047.261		1.229.462		473.776		38,54%		1.521.038		82,66%		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
121	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			34.422.025		16.209.814		17.643.401		15.278.251		86,59%		31.488.065		91,48%		
			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	100%		100,00%		80%		100%		125,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	86%		86,91%		84,50%		88,23%		104,41%		88,23%		102,59%		Sekretariat Daerah	
			Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**			4.723.953		4.245.014		3.911.869		3.337.671		85,32%		7.582.685		160,52%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00%		12 laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00%		12 laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100,00%		12 laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.01	**Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**			2.272.753		1.865.735		1.496.325		1.184.830		79,18%		3.050.565		134,22%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		9 BUMD		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.02	**Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**			1.863.337		1.933.088		1.771.725		1.607.162		90,71%		3.540.250		190,00%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan		12 laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.03	**Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil**			587.864		446.190		643.819		545.679		84,76%		991.869		168,72%		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 kali		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		4 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**			16.052.307		7.454.449		9.247.361		7.804.821		84,40%		15.259.271		95,06%		
			Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen		3 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.03	**Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**			8.427.767		1.761.008		7.004.965		5.896.632		84,18%		7.657.639		90,86%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan		17 dokumen		16 Laporan		16 Laporan		100,00%		16 Laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.02	**Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan**			7.624.540		2.254.928		2.242.396		1.908.190		85,10%		4.163.118		54,60%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			13.527.842		4.510.351		4.421.771		4.079.858		92,27%		8.590.209		63,50%		
			Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	98%		100%		92%		100%		108,70%		100%		102,04%		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**			11.720.292		342.705		387.400		336.937		86,97%		679.642		5,80%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang		310 Dokumen		300 Orang		323 Orang		107,67%		323 Orang		107,67%		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			1.807.550		4.167.646		4.034.371		3.742.921		92,78%		7.910.568		437,64%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen		95.01 %		20 Dokumen		23 Dokumen		115,00%		23 Dokumen		115,00%		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**			117.922		0		62.400		55.900		89,58%		55.900		47,40%		
			Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan		N/A		1 laporan		1 laporan		100,00%		1 laporan		100,00%		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			117.922		0		62.400		55.900		89,58%		55.900		47,40%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD																	
122	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			211.561.797		113.345.289		157.460.174		111.489.750		70,81%		224.835.039		106,27%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		89,05%		92,50%		92,22%		99,70%		92,22%		98,11%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.979.496		13.950.541		14.936.079		12.846.823		86,01%		26.797.364		167,70%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.979.496		13.950.541		14.936.079		12.846.823		86,01%		26.797.364		167,70%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		100%		53 Orang/bulan		53 Orang/bulan		100,00%		53 Orang/bulan		91,38%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			30.164.551		31.061.982		37.191.181		28.960.657		77,87%		60.022.640		198,98%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.164.551		31.061.982		37.191.181		28.960.657		77,87%		60.022.640		198,98%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Jenis		11 Paket		11 Paket		100,00%		11 Paket		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.459.328		5.296.432		9.906.327		5.441.075		54,93%		10.737.507		196,68%		
			Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari		100,00%		1 Hari		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.459.328		5.296.432		9.906.327		5.441.075		54,93%		10.737.507		196,68%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit		83.37 %		204 Unit		140 Unit		68,63%		140 Unit		68,63%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			96.495.857		18.656.013		49.439.909		21.442.017		43,37%		40.098.030		41,55%		
			Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari		100,00%		1 Hari		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan			96.495.857		18.656.013		49.439.909		21.442.017		43,37%		40.098.030		41,55%		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan		470 Kali		96 Laporan		96 Laporan		100,00%		96 Laporan		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			59.974.263		42.331.010		45.059.551		42.208.224		93,67%		84.539.235		140,96%		
			Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			59.974.263		42.331.010		45.059.551		42.208.224		93,67%		84.539.235		140,96%		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan		100%		50 Orang/Bulan		45.58 Orang/Bulan		91,16%		45.58 Orang/Bulan		91,16%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			3.488.302		2.049.311		927.126		590.952		63,74%		2.640.263		75,69%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	2 Hari		1.46 Hari		2 Hari		1.13 Hari		143,50%		1.13 Hari		143,50%		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			3.488.302		2.049.311		927.126		590.952		63,74%		2.640.263		75,69%		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan		67 Kali		36 Laporan		24 Laporan		66,67%		24 Laporan		66,67%		Sekretariat DPRD	
123	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			50.604.084		42.964.867		63.958.174		56.830.024		88,85%		99.794.891		197,21%		
			Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%		101,45%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5.204.429		1.233.574		4.202.904		1.535.146		36,53%		2.768.720		53,20%		
			Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		6 Dokumen		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			5.204.429		1.233.574		4.202.904		1.535.146		36,53%		2.768.720		53,20%		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		6 Dokumen		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			23.981.751		21.494.787		27.311.094		24.129.993		88,35%		45.624.780		190,25%		
			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang		82 Orang		50 Orang		77 Orang		154,00%		77 Orang		154,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD			1.976.169		482.000		840.000		529.500		63,04%		1.011.500		51,18%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen		18 Kali		2 Dokumen		15 Dokumen		750,00%		15 Dokumen		750,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			22.005.582		21.012.786		26.471.094		23.600.493		89,16%		44.613.280		202,74%		
			Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen		4 Media		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		4 Dokumen		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			16.446.120		16.908.603		28.112.551		27.858.452		99,10%		44.767.055		272,20%		
			Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		3 Dokumen		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses			16.446.120		16.908.603		28.112.551		27.858.452		99,10%		44.767.055		272,20%		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen		3 Kali		150 Dokumen		150 Dokumen		100,00%		150 Dokumen		100,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			4.971.784		3.327.904		4.331.626		3.306.433		76,33%		6.634.336		133,44%		
			Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	2 Hari		1 Hari		2 Hari		1 Hari		150,00%		1 Hari		150,00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			4.971.784		3.327.904		4.331.626		3.306.433		76,33%		6.634.336		133,44%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen		1060 Kali		36 Dokumen		93 Dokumen		258,33%		93 Dokumen		258,33%		Sekretariat DPRD	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	5.01	PERENCANAAN																	
124	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35.308.369		24.550.256		25.832.800		25.021.651		96,86%		49.571.907		140,40%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,69%		95,35%		95,47%		96,97%		101,57%		96,97%		101,34%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			210.672		302.862		232.491		231.496		99,57%		534.358		253,64%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00%		2 jenis		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			210.672		302.862		232.491		231.496		99,57%		534.358		253,64%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		100,00%		8 Dokumen		88,89%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			31.185.574		21.257.050		22.336.677		21.861.915		97,87%		43.118.965		138,27%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			31.185.574		21.257.050		22.336.677		21.861.915		97,87%		43.118.965		138,27%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan		100%		48 Orang/bulan		48 Orang/bulan		100,00%		48 Orang/bulan		104,35%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.912.122		2.990.344		3.263.632		2.928.240		89,72%		5.918.584		151,29%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.386.893		2.606.705		2.833.430		2.583.061		91,16%		5.189.766		153,23%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		96.48 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			525.229		383.639		430.202		345.179		80,24%		728.818		138,76%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
125	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.929.602		3.346.270		2.964.660		2.629.069		88,68%		5.975.339		152,06%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
			Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.402.991		1.303.972		1.382.043		1.165.673		84,34%		2.469.645		176,03%		
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen		N/A		6 dokumen		6 dokumen		100,00%		6 dokumen		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	5.01.02.2.01.07	**Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**			1.402.991		1.303.972		1.382.043		1.165.673		84,34%		2.469.645		176,03%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		6 dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			1.519.411		1.162.650		1.032.417		931.939		90,27%		2.094.590		137,86%		
			Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD		N/A		58 PD		58 PD		100,00%		58 PD		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.02.01	**Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**			1.519.411		1.162.650		1.032.417		931.939		90,27%		2.094.590		137,86%		
			Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	38 Masukan		58 PD		38 Masukan		39 Masukan		102,63%		39 Masukan		102,63%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			1.007.199		879.648		550.200		531.456		96,59%		1.411.104		140,10%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD		N/A		58 PD		58 PD		100,00%		58 PD		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.03.03	**Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**			1.007.199		879.648		550.200		531.456		96,59%		1.411.104		140,10%		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		58 PD		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
126	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			10.791.670		5.690.626		5.756.629		5.447.477		94,63%		11.138.103		103,21%		
			Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,63%		97,63%		98,36%		99,01%		100,66%		99,01%		100,39%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**			3.064.620		1.656.461		1.950.396		1.871.093		95,93%		3.527.554		115,11%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan		N/A		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.01.08	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia**			1.742.848		1.049.933		1.151.126		1.113.374		96,72%		2.163.306		124,12%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan		2 dokumen		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	5.01.03.2.01.04	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan**			1.321.772		606.528		799.269		757.720		94,80%		1.364.247		103,21%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 dokumen		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			3.728.973		1.717.861		1.642.556		1.551.763		94,47%		3.269.624		87,68%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan		N/A		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02.04	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian**			2.300.253		851.799		872.114		818.670		93,87%		1.670.469		72,62%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan		2 Dokumen		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02.08	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA**			1.428.720		866.062		770.442		733.093		95,15%		1.599.155		111,93%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan		2 Dokumen		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			3.998.078		2.316.305		2.163.677		2.024.621		93,57%		4.340.926		108,58%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan		N/A		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03.04	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**			2.288.163		1.152.539		1.206.691		1.106.649		91,71%		2.259.189		98,73%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan		2 Dokumen		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03.08	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan**			1.709.914		1.163.765		956.986		917.972		95,92%		2.081.737		121,75%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan		2 Dokumen		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.02	**KEUANGAN**																	
127	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			158.554.798		104.596.490		88.975.159		81.655.464		91,77%		186.251.955		117,47%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		91,40%		91%		92,87%		102,05%		92,87%		98,80%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		90,43%		91%		95,37%		104,80%		95,37%		101,46%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			138.590.122		85.352.427		70.173.940		66.879.215		95,30%		152.231.642		109,84%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			33.513.641		31.555.770		29.091.727		27.892.930		95,88%		59.448.700		177,39%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan		100%		79 Orang/bulan		79 Orang/bulan		100,00%		79 Orang/bulan		95,18%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			105.076.481		53.796.656		41.082.213		38.986.286		94,90%		92.782.942		88,30%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan		100%		111 Orang/bulan		111 Orang/bulan		100,00%		111 Orang/bulan		97,37%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**			302.277		246.276		320.096		241.977		75,60%		488.253		161,52%		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.04.02	**Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah**			302.277		246.276		320.096		241.977		75,60%		488.253		161,52%		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			2.257.261		660.581		304.531		95.682		31,42%		756.263		33,50%		
			Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.07.10	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			2.257.261		660.581		304.531		95.682		31,42%		756.263		33,50%		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit		100%		200 Unit		200 Unit		100,00%		200 Unit		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			8.380.438		11.996.948		14.309.231		11.742.633		82,06%		23.739.581		283,27%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		95.23 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		59.07 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			2.381.130		3.612.994		4.247.217		2.978.230		70,12%		6.591.224		276,81%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		95.23 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			5.702.468		5.357.846		6.199.098		5.781.586		93,26%		11.139.431		195,34%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		100%		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			52.856		677.317		832.169		607.080		72,95%		1.284.397		2430,00%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		59.07 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			243.984		2.348.791		3.030.748		2.375.738		78,39%		4.724.529		1936,41%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		86.34 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			9.024.700		6.340.259		3.867.361		2.695.957		69,71%		9.036.216		100,13%		
			Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.01	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			9.024.700		6.340.259		3.867.361		2.695.957		69,71%		9.036.216		100,13%		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2240 Unit		2806 Unit		2660 Unit		2412 Unit		90,68%		2412 Unit		107,68%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
128	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			23.003.236		9.277.549		41.791.491		19.560.456		46,80%		28.838.004		125,36%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**			2.377.973		3.306.392		3.222.765		3.078.749		95,53%		6.385.141		268,51%		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	7 Dokumen		N/A		7 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		7 Dokumen		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.01	**Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS**			570.265		561.367		777.575		774.790		99,64%		1.336.157		234,30%		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.07	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD**			595.726		907.978		680.554		657.717		96,64%		1.565.695		262,82%		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		1 Laporan		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	5.02.02.2.01.08	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD**			637.253		1.158.065		1.056.370		943.448		89,31%		2.101.514		329,78%		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Laporan		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.02	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**			574.729		678.982		708.266		702.793		99,23%		1.381.775		240,42%		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			3.181.881		2.160.022		2.776.019		2.652.201		95,54%		4.812.223		151,24%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen		N/A		4 dokumen		4 dokumen		100,00%		4 dokumen		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen		N/A		244 Dokumen		244 Dokumen		100,00%		244 Dokumen		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	104440 berkas		82675 berkas		90220 berkas		94756 berkas		105,03%		94756 berkas		90,73%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.01	**Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah**			625.752		533.184		633.960		619.180		97,67%		1.152.365		184,16%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen		244 Dokumen		244 Dokumen		244 Dokumen		100,00%		244 Dokumen		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.05	**Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya**			376.596		369.174		428.282		371.674		86,78%		740.849		196,72%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		4 Dokumen		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.2.02.09	**Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait**			2.179.533		1.257.663		1.713.777		1.661.346		96,94%		2.919.010		133,93%		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	104440 Dokumen		82675 Berkas		90220 Dokumen		94756 Dokumen		105,03%		94756 Dokumen		90,73%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**			1.193.382		1.045.967		1.093.407		1.013.729		92,71%		2.059.697		172,59%		
			Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen		22 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		100,00%		24 Dokumen		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	5.02.02.2.03.08	**Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**			1.193.382		1.045.967		1.093.407		1.013.729		92,71%		2.059.697		172,59%		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen		22 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		100,00%		24 Dokumen		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			16.250.000		2.765.167		34.699.300		12.815.776		36,93%		15.580.944		95,88%		
			Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%		70.23 %		25%		25%		100,00%		25%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase realisasi bagi hasil retribusi	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.08	**Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan**			500.000		0		500.000		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		100%		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.10	**Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota**			750.000		1.062.589		750.000		0		0,00%		1.062.589		141,68%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		100%		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.09	**Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak**			15.000.000		1.702.578		33.449.300		12.815.776		38,31%		14.518.355		96,79%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		70.23 %		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
129	5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			50.448.426		39.483.392		29.513.129		27.828.823		94,29%		67.312.215		133,43%		
			Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33,30%		26,75%		61,80%		61,90%		100,16%		61,90%		185,89%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**			50.448.426		39.483.392		29.513.129		27.828.823		94,29%		67.312.215		133,43%		
			Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%		N/A		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen		30 Dokumen		30 Dokumen		30 Dokumen		100,00%		30 Dokumen		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.10	**Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah**			10.102.386		22.240.406		18.179.240		17.212.043		94,68%		39.452.449		390,53%		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen		7970 lokasi		7679 Dokumen		8115 Dokumen		105,68%		8115 Dokumen		105,68%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.13	**Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**			3.138.336		4.822.901		2.883.327		2.584.912		89,65%		7.407.813		236,04%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang		58 Lembaga		60 Orang		60 Orang		100,00%		60 Orang		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	5.02.03.2.01.07	**Pengamanan Barang Milik Daerah**			9.289.359		10.300.366		6.299.383		5.935.597		94,23%		16.235.964		174,78%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan		N/A		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.09	**Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah**			27.918.345		2.119.719		2.151.180		2.096.270		97,45%		4.215.989		15,10%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan		30 Kasus/Obyek		30 Laporan		30 Laporan		100,00%		30 Laporan		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
130	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			37.665.666		15.380.513		21.355.165		19.449.692		91,08%		34.830.205		92,47%		
			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%		79,89%		60%		185,78%		309,63%		185,78%		315,63%		Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	85%		56,96%		82%		99,83%		121,74%		99,83%		117,45%		Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	73%		0,00%		67%		67,79%		101,18%		67,79%		92,86%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**			37.665.666		15.380.513		21.355.165		19.449.692		91,08%		34.830.205		92,47%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		N/A		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		N/A		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20615 Objek Pajak		N/A		19426 Objek Pajak		25749 Objek Pajak		132,55%		25749 Objek Pajak		124,90%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.14	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**			697.318		396.600		450.173		401.748		89,24%		798.348		114,49%		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		12 bulan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.11	**Penagihan Pajak Daerah**			4.872.361		1.396.435		1.968.872		1.730.039		87,87%		3.126.474		64,17%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		549323 Objek Pajak		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.05	**Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**			17.564.766		4.865.863		7.787.473		6.634.852		85,20%		11.500.716		65,48%		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		254734 Objek Pajak		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.13	**Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**			1.397.431		2.080.419		4.134.276		3.999.245		96,73%		6.079.664		435,06%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		78533 Objek Pajak		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.07	**Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**			13.133.790		6.641.196		7.014.371		6.683.808		95,29%		13.325.004		101,46%		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20615 Obyek Pajak		832668 Objek Pajak		19426 Obyek Pajak		25749 Obyek Pajak		132,55%		25749 Obyek Pajak		124,90%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
131	5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			19.003.190		15.841.654		16.923.220		15.928.466		94,12%		31.770.120		167,18%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%		92,55%		89%		94,10%		105,73%		94,10%		105,73%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			16.673.062		14.146.374		15.505.295		14.572.603		93,98%		28.718.977		172,25%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			16.673.062		14.146.374		15.505.295		14.572.603		93,98%		28.718.977		172,25%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		100%		40 Orang/bulan		40 Orang/bulan		100,00%		40 Orang/bulan		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			1.624.599		1.167.077		896.932		854.276		95,24%		2.021.353		124,42%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.624.599		1.167.077		896.932		854.276		95,24%		2.021.353		124,42%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		100%		25 Paket		25 Paket		100,00%		25 Paket		89,29%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			705.530		528.203		520.993		501.587		96,28%		1.029.789		145,96%		
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			705.530		528.203		520.993		501.587		96,28%		1.029.789		145,96%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		100%		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
132	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			7.304.388		4.570.735		4.600.138		4.268.050		92,78%		8.838.785		121,01%		
			Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	95%		100,00%		92%		99,86%		108,54%		99,86%		105,12%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase pegawai yang disiplin	96,99%		96,73%		96,50%		96,60%		100,10%		96,60%		99,59%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	37,94%		37,57%		30,77%		35,61%		115,73%		35,61%		93,86%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**			2.823.680		921.422		1.135.383		1.050.385		92,51%		1.971.808		69,83%		
			Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	94%		99.95 %		91%		100%		109,89%		100%		106,38%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.03	**Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK**			2.014.416		323.300		432.236		379.685		87,84%		702.985		34,90%		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		2 Tahap Seleksi		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.11	**Pengelolaan Data Kepegawaian**			483.991		355.949		430.177		417.213		96,99%		773.162		159,75%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		9659 Data pegawai		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.02	**Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN**			325.274		242.173		272.970		253.488		92,86%		495.661		152,38%		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**			1.935.060		1.514.540		1.504.914		1.449.717		96,33%		2.964.257		153,19%		
			Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas		9659 berkas		8555 berkas		9493 berkas		110,96%		9493 berkas		110,96%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.02	**Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN**			695.225		484.502		434.219		418.230		96,32%		902.732		129,85%		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen		8841 berkas		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.01	**Pengelolaan Mutasi ASN**			649.787		495.920		492.451		472.598		95,97%		968.519		149,05%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		805 berkas		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.03	**Pengelolaan Promosi ASN**			590.048		534.118		578.244		558.889		96,65%		1.093.007		185,24%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		13 berkas		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			2.545.648		2.134.773		1.959.841		1.767.947		90,21%		3.902.720		153,31%		
			Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00%		2 jenis		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		100,00%		1 jenis		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		100,00%		5 jenis		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.03	**Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			933.164		555.150		507.535		447.485		88,17%		1.002.635		107,44%		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan		6 kali		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.02	**Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			684.603		664.029		639.193		590.643		92,40%		1.254.673		183,27%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5199 Dokumen		6364 orang		6138 Dokumen		6067 Dokumen		98,84%		6067 Dokumen		116,70%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.08	**Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN**			927.881		915.594		813.113		729.819		89,76%		1.645.412		177,33%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan		5 jenis		5 Laporan		5 Laporan		100,00%		5 Laporan		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																	
133	5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			9.535.107		6.567.055		3.511.170		2.799.946		79,74%		9.367.001		98,24%		
			Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	96%		98,31%		94,50%		100%		105,82%		100%		104,17%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**			2.027.793		2.178.159		2.736.093		2.114.010		77,26%		4.292.170		211,67%		
			Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang		N/A		2232 orang		2292 orang		102,69%		2292 orang		102,69%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.01.03	**Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum**			2.027.793		2.178.159		2.736.093		2.114.010		77,26%		4.292.170		211,67%		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang		3574 orang		2232 Orang		2292 Orang		102,69%		2292 Orang		102,69%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**			7.507.314		4.388.895		775.077		685.936		88,50%		5.074.831		67,60%		
			Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang		N/A		168 orang		168 orang		100,00%		168 orang		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.02.07	**Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**			7.507.314		4.388.895		775.077		685.936		88,50%		5.074.831		67,60%		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan		927 orang		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																	
134	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			689.355		985.030		1.400.096		1.319.801		94,27%		2.304.831		334,35%		
			Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**			689.355		985.030		1.400.096		1.319.801		94,27%		2.304.831		334,35%		
			Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen		N/A		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		4 Dokumen		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04.03	**Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif**			292.621		465.820		715.099		676.802		94,64%		1.142.622		390,48%		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan		2 Dokumen		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04.01	**Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi**			396.735		519.210		684.996		643.000		93,87%		1.162.209		292,94%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		2 Dokumen		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH																	
135	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			31.555.889		23.532.563		23.623.997		22.872.314		96,82%		46.404.877		147,06%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		92,81%		100%		97,58%		97,58%		97,58%		97,58%		Inspektorat	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.567.135		22.183.677		21.970.068		21.403.256		97,42%		43.586.933		158,11%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Inspektorat	
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.567.135		22.183.677		21.970.068		21.403.256		97,42%		43.586.933		158,11%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		100%		42 Orang/bulan		42 Orang/bulan		100,00%		42 Orang/bulan		100,00%		Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			802.437		247.171		246.287		215.857		87,64%		463.028		57,70%		
			Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Inspektorat	
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			802.437		247.171		246.287		215.857		87,64%		463.028		57,70%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		100%		2 Paket		2 Paket		100,00%		2 Paket		100,00%		Inspektorat	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.186.316		1.101.716		1.407.642		1.253.201		89,03%		2.354.916		73,91%		
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		84.76 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Inspektorat	
	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.186.316		1.101.716		1.407.642		1.253.201		89,03%		2.354.916		73,91%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		84.76 %		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Inspektorat	
136	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			2.764.043		1.610.600		1.447.753		1.354.518		93,56%		2.965.118		107,27%		
			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Inspektorat	
			Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%		76,92%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Inspektorat	
			Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Inspektorat	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2.115.113		1.370.580		901.005		875.060		97,12%		2.245.640		106,17%		
			Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	65 lembaga		69 lembaga		60 lembaga		60 lembaga		100,00%		60 lembaga		92,31%		Inspektorat	
			Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen		N/A		17 Dokumen		17 Dokumen		100,00%		17 Dokumen		100,00%		Inspektorat	
			Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	20 Rekomendasi		14 Rekomendasi		36 Rekomendasi		36 Rekomendasi		100,00%		36 Rekomendasi		180,00%		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			1.440.287		970.100		260.900		260.900		100,00%		1.231.000		85,47%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen		70 Lembaga		36 Dokumen		36 Dokumen		100,00%		36 Dokumen		180,00%		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			598.536		162.980		224.060		224.060		100,00%		387.040		64,66%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan		71 Kali		60 Laporan		60 Laporan		100,00%		60 Laporan		92,31%		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan			36.351		117.100		216.500		196.500		90,76%		313.600		862,69%		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan		7 Kali		7 Laporan		7 Laporan		100,00%		7 Laporan		100,00%		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja			39.940		120.400		199.545		193.600		97,02%		314.000		786,18%		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan		10 Kali		10 Laporan		10 Laporan		100,00%		10 Laporan		100,00%		Inspektorat	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			648.930		240.020		546.748		479.458		87,69%		719.478		110,87%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga		24 lembaga		20 lembaga		20 lembaga		100,00%		20 lembaga		100,00%		Inspektorat	
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			35.956		118.420		233.790		229.700		98,25%		348.120		968,17%		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan		4 Kali		5 Laporan		5 Laporan		100,00%		5 Laporan		100,00%		Inspektorat	
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			612.973		121.600		312.958		249.758		79,81%		371.358		60,58%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan		24 kali		20 Laporan		20 Laporan		100,00%		20 Laporan		100,00%		Inspektorat	
137	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1.127.801		877.320		1.434.340		1.403.840		97,87%		2.281.160		202,27%		
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Inspektorat	
			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Inspektorat	
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Inspektorat	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			522.100		363.300		491.500		477.500		97,15%		840.800		161,04%		
			Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen		7 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		100,00%		4 dokumen		100,00%		Inspektorat	
	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			78.860		119.900		217.200		205.200		94,48%		325.100		412,25%		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 kali		4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		100,00%		4 Rekomendasi		100,00%		Inspektorat	
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			443.240		243.400		274.300		272.300		99,27%		515.700		116,35%		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 kali		4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		100,00%		4 Rekomendasi		100,00%		Inspektorat	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			605.701		514.020		942.840		926.340		98,25%		1.440.360		237,80%		
			Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 Laporan		N/A		60 Laporan		60 Laporan		100,00%		60 Laporan		92,31%		Inspektorat	
			Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	49 Kali		N/A		93 Kali		93 Kali		100,00%		93 Kali		189,80%		Inspektorat	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			56.261		121.500		234.280		232.280		99,15%		353.780		628,82%		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan		50 Kali		25 Kegiatan		25 Kegiatan		100,00%		25 Kegiatan		100,00%		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			36.045		122.160		218.500		212.000		97,03%		334.160		927,06%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14 perangkat daerah		12 Kali		8 perangkat daerah		8 perangkat daerah		100,00%		8 perangkat daerah		57,14%		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			70.353		121.060		222.400		222.400		100,00%		343.460		488,19%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah		21 Kali		60 perangkat daerah		60 perangkat daerah		100,00%		60 perangkat daerah		600,00%		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			443.042		149.300		267.660		259.660		97,01%		408.960		92,31%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 perangkat daerah		60 Kali		60 perangkat daerah		60 perangkat daerah		100,00%		60 perangkat daerah		92,31%		Inspektorat	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7.01	KECAMATAN																	
138	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			627.261.662		762.485.609		809.029.468		749.872.486		92,69%		1.512.358.095		241,10%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,09%		92,68%		97,81%		94,04%		96,15%		94,04%		95,87%		Kec. Benowo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,44%		93,99%		97,30%		95,30%		97,94%		95,30%		97,80%		Kec. Krembangan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,65%		92,75%		98,39%		94,78%		96,33%		94,78%		95,11%		Kec. Gayungan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,36%		92,79%		96,63%		95,22%		98,54%		95,22%		97,80%		Kec. Tandes	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,81%		93,23%		96,77%		94,61%		97,77%		94,61%		97,73%		Kec. Karangpilang	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,26%		92,81%		97,03%		95,15%		98,06%		95,15%		97,83%		Kec. Sukolilo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,45%		89,87%		96,86%		94,52%		97,58%		94,52%		96,99%		Kec. Rungkut	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,35%		91,92%		98,05%		94,10%		95,97%		94,10%		95,68%		Kec. Tegalsari	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,43%		93,07%		97,24%		95,54%		98,25%		95,54%		98,06%		Kec. Wonocolo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,92%		93,32%		95,17%		97,24%		102,18%		97,24%		101,38%		Kec. Semampir	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,09%		93,05%		97,99%		96,05%		98,02%		96,05%		97,92%		Kec. Gunung Anyar	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,04%		93,10%		95,95%		96,08%		100,14%		96,08%		100,04%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,92%		94,84%		97,86%		96,02%		98,12%		96,02%		98,06%		Kec. Sukomanunggal	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100,60%		93,53%		99,37%		95,50%		96,11%		95,50%		94,93%		Kec. Asemrowo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,36%		94,40%		97,97%		96,60%		98,60%		96,60%		98,21%		Kec. Wonokromo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,48%		91,42%		97,35%		94,35%		96,92%		94,35%		96,79%		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,58%		94,54%		98,30%		95,81%		97,47%		95,81%		97,19%		Kec. Jambangan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,93%		92,18%		96,59%		95,07%		98,43%		95,07%		98,08%		Kec. Sawahan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,10%		95,65%		98,86%		96,37%		97,48%		96,37%		97,25%		Kec. Sambikerep	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,56%		95,27%		97,46%		96,78%		99,30%		96,78%		99,20%		Kec. Simokerto	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,70%		92,56%		97,40%		96,32%		98,89%		96,32%		98,59%		Kec. Genteng	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,29%		90,70%		96,81%		93,93%		97,03%		93,93%		95,56%		Kec. Dukuh Pakis	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,08%		93,00%		96,91%		95,84%		98,90%		95,84%		98,72%		Kec. Gubeng	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,15%		93,56%		97,44%		96,33%		98,86%		96,33%		98,15%		Kec. Tambaksari	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,82%		93,57%		98,44%		95,81%		97,33%		95,81%		95,98%		Kec. Bulak	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,26%		92,94%		97,24%		96,14%		98,87%		96,14%		98,85%		Kec. Lakarsantri	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,76%		96,43%		98,71%		97,51%		98,78%		97,51%		98,73%		Kec. Kenjeran	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,19%		91,71%		96,00%		95,34%		99,31%		95,34%		99,12%		Kec. Bubutan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,46%		93,86%		98,39%		97,15%		98,74%		97,15%		98,67%		Kec. Wiyung	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,05%		92,58%		97,68%		95,35%		97,61%		95,35%		97,25%		Kec. Pabean Cantian	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,99%		92,32%		96,95%		95,56%		98,57%		95,56%		98,53%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			546.130.426		581.657.334		630.208.776		576.295.745		91,45%		1.157.953.079		212,03%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Bulak	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gubeng	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Semampir	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tandes	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sawahan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wonocolo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Krembangan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Genteng	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Bubutan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gayungan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Jambangan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Simokerto	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Benowo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Pakal	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Rungkut	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wiyung	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.940.971		18.318.119		19.615.816		17.616.074		89,81%		35.934.193		225,42%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan		100%		60 Orang/bulan		60 Orang/bulan		100,00%		60 Orang/bulan		88,24%		Kec. Simokerto	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			16.781.899		16.005.547		17.554.308		15.688.486		89,37%		31.694.033		188,86%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		100%		54 Orang/bulan		54 Orang/bulan		100,00%		54 Orang/bulan		90,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.603.917		16.534.031		17.610.565		16.570.930		94,10%		33.104.961		212,16%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		100%		55 Orang/bulan		55 Orang/bulan		100,00%		55 Orang/bulan		85,94%		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			17.790.611		15.910.708		17.841.724		16.650.400		93,32%		32.561.108		183,02%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		100%		52 Orang/bulan		52 Orang/bulan		100,00%		52 Orang/bulan		89,66%		Kec. Krembangan	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			19.118.818		20.703.624		22.287.909		20.003.580		89,75%		40.707.204		212,92%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		100%		69 Orang/bulan		69 Orang/bulan		100,00%		69 Orang/bulan		86,25%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			19.428.208		21.361.429		22.917.893		21.154.656		92,31%		42.516.085		218,84%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		100%		69 Orang/bulan		69 Orang/bulan		100,00%		69 Orang/bulan		85,19%		Kec. Gubeng	
	7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			20.296.819		22.029.856		23.457.290		22.151.892		94,44%		44.181.748		217,68%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		100%		74 Orang/bulan		74 Orang/bulan		100,00%		74 Orang/bulan		91,36%		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.809.979		16.195.164		17.595.256		15.923.330		90,50%		32.118.494		203,15%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		100%		54 Orang/bulan		54 Orang/bulan		100,00%		54 Orang/bulan		90,00%		Kec. Pakal	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.154.579		15.964.329		17.129.295		15.269.995		89,15%		31.234.324		206,10%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		100%		50 Orang/bulan		50 Orang/bulan		100,00%		50 Orang/bulan		83,33%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.969.408		20.500.188		22.396.415		21.137.921		94,38%		41.638.108		208,51%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		100%		66 Orang/bulan		67 Orang/bulan		101,52%		67 Orang/bulan		88,16%		Kec. Rungkut	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.775.782		23.731.539		25.541.365		23.941.220		93,74%		47.672.760		218,93%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan		100%		82 Orang/bulan		82 Orang/bulan		100,00%		82 Orang/bulan		92,13%		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.215.176		21.113.219		22.460.587		20.559.260		91,53%		41.672.479		206,14%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		100%		67 Orang/bulan		67 Orang/bulan		100,00%		67 Orang/bulan		88,16%		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.466.465		17.497.915		19.148.516		16.608.937		86,74%		34.106.851		195,27%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		100%		58 Orang/bulan		58 Orang/bulan		100,00%		58 Orang/bulan		92,06%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.466.930		18.392.512		19.826.222		18.261.009		92,11%		36.653.521		222,59%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan		100%		62 Orang/bulan		62 Orang/bulan		100,00%		62 Orang/bulan		91,18%		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.169.150		18.748.993		20.408.033		18.755.268		91,90%		37.504.261		206,42%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		100%		62 Orang/bulan		62 Orang/bulan		100,00%		62 Orang/bulan		88,57%		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.997.087		14.947.182		16.036.765		14.771.214		92,11%		29.718.397		212,32%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		100%		54 Orang/bulan		54 Orang/bulan		100,00%		54 Orang/bulan		93,10%		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.192.561		18.141.992		19.419.096		18.725.710		96,43%		36.867.702		227,68%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan		100%		67 Orang/bulan		67 Orang/bulan		100,00%		67 Orang/bulan		91,78%		Kec. Gayungan	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.035.256		18.567.635		20.049.896		18.268.181		91,11%		36.835.816		245,00%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan		100%		67 Orang/bulan		67 Orang/bulan		100,00%		67 Orang/bulan		91,78%		Kec. Jambangan	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.950.603		17.998.411		19.756.997		17.058.289		86,34%		35.056.700		206,82%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan		100%		61 Orang/bulan		61 Orang/bulan		100,00%		61 Orang/bulan		91,04%		Kec. Tegalsari	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.653.687		22.731.869		24.876.584		22.251.157		89,45%		44.983.026		207,74%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan		100%		78 Orang/bulan		78 Orang/bulan		100,00%		78 Orang/bulan		88,64%		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.766.279		16.101.923		17.796.494		16.613.589		93,35%		32.715.511		207,50%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		100%		56 Orang/bulan		56 Orang/bulan		100,00%		56 Orang/bulan		88,89%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.739.285		15.775.409		17.067.956		16.026.452		93,90%		31.801.861		202,05%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan		100%		53 Orang/bulan		53 Orang/bulan		100,00%		53 Orang/bulan		89,83%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.615.151		16.558.059		18.101.739		16.930.363		93,53%		33.488.421		214,46%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		100%		57 Orang/bulan		57 Orang/bulan		100,00%		57 Orang/bulan		90,48%		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.957.215		18.560.721		21.691.248		18.626.006		85,87%		37.186.728		233,04%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		100%		62 Orang/bulan		62 Orang/bulan		100,00%		62 Orang/bulan		86,11%		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.279.561		22.331.088		24.054.069		21.567.194		89,66%		43.898.282		216,47%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan		100%		75 Orang/bulan		75 Orang/bulan		100,00%		75 Orang/bulan		86,21%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.925.618		17.007.799		18.041.299		16.998.180		94,22%		34.005.979		213,53%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		100%		57 Orang/bulan		57 Orang/bulan		100,00%		57 Orang/bulan		89,06%		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.595.265		19.024.085		20.471.842		18.355.968		89,66%		37.380.054		212,44%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		100%		63 Orang/bulan		63 Orang/bulan		100,00%		63 Orang/bulan		84,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.063.586		21.857.314		23.967.793		21.990.942		91,75%		43.848.257		242,74%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan		100%		78 Orang/bulan		78 Orang/bulan		100,00%		78 Orang/bulan		89,66%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.822.509		16.968.534		17.981.419		16.313.490		90,72%		33.282.024		197,84%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		100%		56 Orang/bulan		56 Orang/bulan		100,00%		56 Orang/bulan		86,15%		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.104.845		15.845.761		17.027.904		15.841.033		93,03%		31.686.795		209,78%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		100%		51 Orang/bulan		51 Orang/bulan		100,00%		51 Orang/bulan		92,73%		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25.443.205		26.232.380		28.076.482		25.665.017		91,41%		51.897.397		203,97%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan		100%		86 Orang/bulan		86 Orang/bulan		100,00%		86 Orang/bulan		90,53%		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			76.007.353		177.319.232		174.636.771		170.176.954		97,45%		347.496.186		457,19%		
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		93.79 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sawahan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Krembangan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gayungan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		96.99 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Jambangan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		95.66 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		95.95 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Pabean Cantian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	94.12 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Pakal	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	91.74 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Rungkut	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Semampir	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	89.75 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Genteng	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	84.78 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Wonocolo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	79.54 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Sukomanunggal	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	90.89 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Bubutan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	97.05 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Gubeng	
			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	31 Paket	N/A	28 Paket	31 Paket	110,71%	31 Paket	100,00%	Kec. Gunung Anyar	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	91.91 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Lakarsantri	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	98.57 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Karangpilang	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	94.43 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Asemrowo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	94.61 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Benowo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	93.38 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	87.5 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket	N/A	29 Paket	29 Paket	100,00%	29 Paket	100,00%	Kec. Sambikerep	
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket	N/A	24 paket	24 paket	100,00%	24 paket	100,00%	Kec. Bulak	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	98.65 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Wiyung	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Kenjeran	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	88.57 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Simokerto	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	91.39 %	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Tambaksari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		94.06 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tandes	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		86.29 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		N/A		19 Paket		14 Paket		73,68%		14 Paket		73,68%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		97.24 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.643.376		7.364.618		6.851.691		6.638.168		96,88%		14.002.786		529,73%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		95.66 %		15 Paket		17 Paket		113,33%		17 Paket		113,33%		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.909.831		5.214.934		5.229.859		5.076.275		97,06%		10.291.209		538,85%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		88.57 %		9 Paket		9 Paket		100,00%		9 Paket		100,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.885.216		5.777.806		5.870.288		5.659.862		96,42%		11.437.667		606,70%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		79.54 %		20 Paket		20 Paket		100,00%		20 Paket		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			816.940		3.197.743		3.103.084		2.999.287		96,66%		6.197.030		758,57%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		94.43 %		17 Paket		17 Paket		100,00%		17 Paket		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.142.237		6.092.653		6.249.260		5.975.487		95,62%		12.068.140		563,34%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		100%		24 Paket		26 Paket		108,33%		26 Paket		108,33%		Kec. Krembangan	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.172.553		5.130.109		4.778.294		4.669.312		97,72%		9.799.421		451,06%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		98.57 %		19 Paket		19 Paket		100,00%		19 Paket		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.029.400		6.513.231		6.495.418		6.408.443		98,66%		12.921.673		426,54%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket		87.5 %		22 Paket		29 Paket		131,82%		29 Paket		131,82%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.723.479		5.954.517		5.775.935		5.603.485		97,01%		11.558.002		424,38%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		89.75 %		15 Paket		15 Paket		100,00%		15 Paket		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.734.121		4.703.426		4.816.528		4.721.682		98,03%		9.425.108		543,51%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		98.65 %		8 Paket		8 Paket		100,00%		8 Paket		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.462.248		4.872.770		4.856.524		4.769.423		98,21%		9.642.194		659,41%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		97.13 %		19 Paket		14 Paket		73,68%		14 Paket		73,68%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.775.956		6.172.043		6.224.987		6.115.623		98,24%		12.287.667		325,42%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		100%		15 Paket		15 Paket		100,00%		15 Paket		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.448.920		5.653.446		5.400.426		5.270.376		97,59%		10.923.822		753,93%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket		90.89 %		30 Paket		24 Paket		80,00%		24 Paket		66,67%		Kec. Bubutan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.786.799		5.963.000		5.702.193		5.594.231		98,11%		11.557.231		305,20%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		96.53 %		24 Paket		24 Paket		100,00%		24 Paket		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			847.284		6.110.800		6.384.559		6.210.437		97,27%		12.321.237		1454,20%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket		97.24 %		23 Paket		24 Paket		104,35%		24 Paket		104,35%		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.920.502		6.340.031		6.220.717		5.854.795		94,12%		12.194.826		417,56%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket		86.29 %		27 Paket		23 Paket		85,19%		23 Paket		85,19%		Kec. Tegalsari	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.755.199		5.222.231		5.328.943		5.202.676		97,63%		10.424.906		378,37%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		91.91 %		8 Paket		8 Paket		100,00%		8 Paket		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.729.368		5.918.114		5.575.159		5.437.105		97,52%		11.355.219		656,61%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		95.95 %		6 Paket		6 Paket		100,00%		6 Paket		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.098.006		10.073.636		9.484.184		9.183.800		96,83%		19.257.435		377,74%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		91.39 %		20 Paket		20 Paket		100,00%		20 Paket		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.367.996		4.207.672		4.183.481		4.074.128		97,39%		8.281.800		189,60%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		93.38 %		1 Paket		1 Paket		100,00%		1 Paket		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.448.980		7.697.941		7.582.831		7.355.493		97,00%		15.053.434		614,68%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		93.79 %		19 Paket		19 Paket		100,00%		19 Paket		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.807.210		4.426.722		4.453.763		4.370.808		98,14%		8.797.530		486,80%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket		100%		22 Paket		22 Paket		100,00%		22 Paket		100,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			724.460		4.707.469		4.631.848		4.526.421		97,72%		9.233.890		1274,59%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		94.61 %		17 Paket		17 Paket		100,00%		17 Paket		100,00%		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.840.899		6.865.471		6.792.733		6.676.207		98,28%		13.541.678		735,60%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		91.74 %		15 Paket		15 Paket		100,00%		15 Paket		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.181.219		5.206.048		5.058.222		4.946.105		97,78%		10.152.154		859,46%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket		94.12 %		501 Paket		516 Paket		102,99%		516 Paket		102,99%		Kec. Pakal	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.415.085		5.115.639		5.131.377		5.067.707		98,76%		10.183.346		158,74%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket		100%		28 Paket		31 Paket		110,71%		31 Paket		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.007.331		4.248.725		4.137.183		4.073.849		98,47%		8.322.575		826,20%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		96.99 %		100 Paket		109 Paket		109,00%		109 Paket		109,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.832.212		5.992.213		6.114.177		5.999.459		98,12%		11.991.672		654,49%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		94.06 %		10 Paket		10 Paket		100,00%		10 Paket		100,00%		Kec. Tandes	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.827.863		5.322.103		5.202.041		5.059.004		97,25%		10.381.106		567,94%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		84.78 %		100 Paket		113 Paket		113,00%		113 Paket		113,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			964.089		7.040.251		6.691.104		6.605.545		98,72%		13.645.796		1415,41%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		97.05 %		10 Paket		16 Paket		160,00%		16 Paket		160,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.109.517		5.735.202		5.949.856		5.769.822		96,97%		11.505.025		1036,94%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		100%		12 Paket		12 Paket		100,00%		12 Paket		100,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.599.059		4.478.669		4.360.106		4.261.936		97,75%		8.740.605		115,02%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		89.46 %		29 Paket		29 Paket		100,00%		29 Paket		100,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.123.883		3.509.042		4.183.921		3.399.788		81,26%		6.908.830		134,84%		
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Rungkut	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		73.68 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tambaksari	
			jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20 Unit		N/A		18 Unit		24 Unit		133,33%		24 Unit		120,00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		92.42 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gubeng	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		87.5 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit		N/A		2 unit		2 unit		100,00%		2 unit		100,00%		Kec. Bulak	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		N/A		30 Unit		25 Unit		83,33%		25 Unit		83,33%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		92.59 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		81.71 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Benowo	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gayungan	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		87.84 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Krembangan	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		93.94 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		83.33 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Bubutan	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		84.44 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sawahan	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Semampir	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		72.06 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Genteng	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		80%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		85.94 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Jambangan	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		92.19 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Pakal	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		92.31 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wonokromo	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		84.85 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Simokerto	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		90%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tandes	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		84.48 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wiyung	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		84.72 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.09.10	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			200.239		128.192		146.946		116.420		79,23%		244.611		122,16%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit		87.84 %		36 Unit		23 Unit		63,89%		23 Unit		63,89%		Kec. Krembangan	
	7.01.01.2.09.10	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			170.767		98.629		147.281		120.036		81,50%		218.666		128,05%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		87.5 %		50 Unit		50 Unit		100,00%		50 Unit		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.09.10	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			211.392		132.214		153.681		143.051		93,08%		275.265		130,22%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit		100%		34 Unit		21 Unit		61,76%		21 Unit		61,76%		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.09.10	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			140.091		108.017		112.970		98.870		87,52%		206.888		147,68%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit		84.85 %		65 Unit		27 Unit		41,54%		27 Unit		41,54%		Kec. Simokerto	
	7.01.01.2.09.10	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			148.255		61.172		94.761		73.204		77,25%		134.376		90,64%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit		83.33 %		30 Unit		25 Unit		83,33%		25 Unit		71,43%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.09.10	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			126.396		112.128		106.078		87.115		82,12%		199.243		157,63%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit		93.94 %		29 Unit		23 Unit		79,31%		23 Unit		79,31%		Kec. Karangpilang	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			198.810		120.860		162.295		138.711		85,47%		259.571		130,56%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		80%		3 Unit		3 Unit		100,00%		3 Unit		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			164.611		117.694		105.573		80.467		76,22%		198.160		120,38%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		72.06 %		5 Unit		5 Unit		100,00%		5 Unit		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			110.587		99.643		114.326		101.390		88,68%		201.032		181,79%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		100%		5 Unit		5 Unit		100,00%		5 Unit		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			301.827		164.989		205.667		159.666		77,63%		324.655		107,56%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		100%		6 Unit		6 Unit		100,00%		6 Unit		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			156.241		100.873		122.594		116.632		95,14%		217.505		139,21%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		100%		5 Unit		6 Unit		120,00%		6 Unit		120,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			190.228		148.253		137.280		117.830		85,83%		266.083		139,88%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		100%		2 Unit		2 Unit		100,00%		2 Unit		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			194.913		150.744		139.398		126.755		90,93%		277.499		142,37%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		100%		7 Unit		7 Unit		100,00%		7 Unit		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			161.471		71.905		102.869		91.794		89,23%		163.699		101,38%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		83.33 %		3 Unit		3 Unit		100,00%		3 Unit		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			175.905		109.360		147.871		118.442		80,10%		227.801		129,50%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		92.59 %		4 Unit		4 Unit		100,00%		4 Unit		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			232.980		110.846		194.042		120.802		62,26%		231.648		99,43%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		73.68 %		50 Unit		50 Unit		100,00%		50 Unit		100,00%		Kec. Tambaksari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			96.413		106.505		143.531		113.694		79,21%		220.199		228,39%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		100%		4 Unit		4 Unit		100,00%		4 Unit		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			168.090		82.631		146.285		132.851		90,82%		215.482		128,19%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		81.71 %		5 Unit		9 Unit		180,00%		9 Unit		180,00%		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			139.792		99.914		62.928		58.012		92,19%		157.925		112,97%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		100%		6 Unit		6 Unit		100,00%		6 Unit		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			141.228		110.747		195.595		134.764		68,90%		245.511		173,84%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit		92.19 %		19 Unit		26 Unit		136,84%		26 Unit		136,84%		Kec. Pakal	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			105.600		94.273		92.351		88.285		95,60%		182.558		172,88%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		94.23 %		18 Unit		24 Unit		133,33%		24 Unit		120,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			117.333		105.800		103.468		89.593		86,59%		195.393		166,53%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		85.94 %		100 Unit		99 Unit		99,00%		99 Unit		99,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			305.712		129.044		187.713		114.733		61,12%		243.777		79,74%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		84.48 %		7 Unit		7 Unit		100,00%		7 Unit		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			223.592		124.164		103.500		87.681		84,72%		211.845		94,75%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		84.72 %		100 Unit		113 Unit		113,00%		113 Unit		113,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			108.863		181.392		139.646		123.041		88,11%		304.433		279,65%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit		92.42 %		60 Unit		43 Unit		71,67%		43 Unit		71,67%		Kec. Gubeng	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			160.370		93.646		129.147		111.038		85,98%		204.683		127,63%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		100%		5 Unit		5 Unit		100,00%		5 Unit		100,00%		Kec. Kenjeran	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			95.506		99.047		118.353		92.805		78,41%		191.852		200,88%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		84.44 %		50 Unit		49 Unit		98,00%		49 Unit		98,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			132.288		111.917		145.605		108.978		74,85%		220.896		166,98%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		92.31 %		4 Unit		4 Unit		100,00%		4 Unit		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			162.335		107.863		133.602		99.719		74,64%		207.582		127,87%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit		90%		60 Unit		60 Unit		100,00%		60 Unit		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			133.688		105.413		142.784		105.074		73,59%		210.487		157,45%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		100%		3 Unit		4 Unit		133,33%		4 Unit		133,33%		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			148.363		121.169		145.781		128.337		88,03%		249.506		168,17%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		100%		5 Unit		5 Unit		100,00%		5 Unit		100,00%		Kec. Gayungan	
139	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			145.220.138		163.531.806		1.464.347		1.269.277		86,68%		164.801.083		113,48%		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Simokerto	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,94%		65,67%		29,54%		58,97%		199,63%		58,97%		155,43%		Kec. Wonocolo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		82,14%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Pakal	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		79,47%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tandes	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32,87%		53,74%		27,71%		72,73%		262,47%		72,73%		221,27%		Kec. Gayungan	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40,51%		54,05%		40,51%		60,36%		149,00%		60,36%		149,00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34,45%		47,33%		34,45%		40,99%		118,98%		40,99%		118,98%		Kec. Benowo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Jambangan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33,33%		76,27%		33,33%		55,98%		167,96%		55,98%		167,96%		Kec. Kenjeran	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	86,72%	100%	99,78%	99,78%	99,78%	99,78%	Kec. Tambaksari	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	87,62%	100%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Wiyung	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	87,30%	100%	98,10%	98,10%	98,10%	98,10%	Kec. Gunung Anyar	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Tambaksari	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	66,18%	100%	97,62%	97,62%	97,62%	97,62%	Kec. Bubutan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	67,57%	100%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	Kec. Tegalsari	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	69,72%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Bulak	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24,37%	68,29%	23,82%	59,17%	248,40%	59,17%	242,80%	Kec. Bubutan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	77,88%	100%	99,51%	99,51%	99,51%	99,51%	Kec. Kenjeran	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	90,30%	100%	99,55%	99,55%	99,55%	99,55%	Kec. Asemrowo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Sukomanunggal	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Rungkut	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Genteng	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Asemrowo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	79,05%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Semampir	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	68,43%	100%	99,34%	99,34%	99,34%	99,34%	Kec. Jambangan	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	20%	67,80%	15%	55,43%	369,53%	55,43%	277,15%	Kec. Pabean Cantian	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Krembangan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Wonokromo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53,19%	62,30%	53,19%	63,92%	120,17%	63,92%	120,17%	Kec. Pakal	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	83,28%	100%	99,02%	99,02%	99,02%	99,02%	Kec. Sambikerep	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30,77%	52,99%	30,77%	91,18%	296,33%	91,18%	296,33%	Kec. Gubeng	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Pabean Cantian	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	90,21%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Gubeng	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	82,19%	100%	99,51%	99,51%	99,51%	99,51%	Kec. Gayungan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Gayungan	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,71%	62,94%	26,71%	56,52%	211,61%	56,52%	211,61%	Kec. Sukolilo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	77,42%	100%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	Kec. Sukolilo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	75,03%	100%	94,61%	94,61%	94,61%	94,61%	Kec. Lakarsantri	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	33,46%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Benowo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%	69,37%	23,36%	76,06%	325,60%	76,06%	304,24%	Kec. Lakarsantri	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	65,01%	54,95%	20,43%	68,49%	335,24%	68,49%	105,35%	Kec. Wonokromo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	31,30%	50,00%	25,99%	62,88%	241,94%	62,88%	200,89%	Kec. Jambangan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	94,53%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Mulyorejo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Bulak	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	79,31%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Genteng	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23,25%	66,67%	23,25%	61,29%	263,61%	61,29%	263,61%	Kec. Tegalsari	
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23,38%	40,09%	23,38%	74,29%	317,75%	74,29%	317,75%	Kec. Genteng	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47,02%	79,70%	47,02%	47,37%	100,74%	47,37%	100,74%	Kec. Tambaksari	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Sawahan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Bubutan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	62,65%	100%	99,84%	99,84%	99,84%	99,84%	Kec. Wiyung	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55,81%	55,14%	55,81%	64,96%	116,39%	64,96%	116,39%	Kec. Wiyung	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,11%	65,44%	37,11%	57,22%	154,19%	57,22%	154,19%	Kec. Krembangan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Benowo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	84,42%	100%	99,93%	99,93%	99,93%	99,93%	Kec. Wonokromo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Tandes	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Sukolilo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%	65,34%	23,36%	75,09%	321,45%	75,09%	300,36%	Kec. Semampir	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Sambikerep	
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24,73%	74,02%	24,73%	74,51%	301,29%	74,51%	301,29%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	79,96%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Sawahan	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	100%	62,22%	56,45%	73,86%	130,84%	73,86%	73,86%	Kec. Karangpilang	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%	51,90%	50%	35,78%	71,56%	35,78%	71,56%	Kec. Gunung Anyar	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%	43,90%	23,36%	64,29%	275,21%	64,29%	257,16%	Kec. Bulak	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	80,72%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Karangpilang	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	67,56%	100%	99,14%	99,14%	99,14%	99,14%	Kec. Wonocolo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Pakal	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		74,34%		100%		99,93%		99,93%		99,93%		99,93%		Kec. Simokerto	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		63,22%		100%		98,99%		98,99%		98,99%		98,99%		Kec. Rungkut	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Semampir	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,32%		55,74%		26,32%		76,29%		289,86%		76,29%		289,86%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,27%		53,93%		27,27%		68,22%		250,17%		68,22%		250,17%		Kec. Asemrowo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wonocolo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		79,77%		100%		99,77%		99,77%		99,77%		99,77%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50,51%		45,53%		50,51%		52,07%		103,09%		52,07%		103,09%		Kec. Tandes	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		66,21%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%		29,73%		51%		51,57%		101,12%		51,57%		101,12%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		92,15%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,16%		47,37%		37,16%		53,75%		144,64%		53,75%		144,64%		Kec. Rungkut	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gubeng	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	81,70%		65,99%		53,35%		70,09%		131,38%		70,09%		85,79%		Kec. Simokerto	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24,37%		56,67%		24,37%		64,14%		263,19%		64,14%		263,19%		Kec. Sambikerep	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	89,61%		45,45%		42,86%		72,09%		168,20%		72,09%		80,45%		Kec. Sawahan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		67,86%		100%		99,22%		99,22%		99,22%		99,22%		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			267.325		108.122		95.492		95.442		99,95%		203.564		76,15%		
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		7 Lembaga		116,67%		7 Lembaga		116,67%		Kec. Genteng	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkaitt	2 laporan		N/A		2 laporan		2 laporan		100,00%		2 laporan		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		3 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		6 Lembaga		100,00%		Kec. Tambaksari	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		12 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		6 Lembaga		100,00%		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		6 Lembaga		100,00%		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00%	6 Lembaga	100,00%	Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	100,00%	Kec. Rungkut	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	7 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00%	6 Lembaga	100,00%	Kec. Jambangan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	7 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100,00%	4 Lembaga	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00%	6 Lembaga	100,00%	Kec. Tegalsari	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100,00%	4 Lembaga	100,00%	Kec. Wonokromo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00%	6 Lembaga	100,00%	Kec. Karangpilang	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00%	6 Lembaga	100,00%	Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00%	6 Lembaga	100,00%	Kec. Wonocolo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00%	6 Lembaga	100,00%	Kec. Mulyorejo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	100,00%	6 lembaga	100,00%	Kec. Wiyung	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	12 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	116,67%	7 Lembaga	116,67%	Kec. Sukolilo	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	100,00%	Kec. Kenjeran	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	100,00%	6 lembaga	100,00%	Kec. Sawahan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	100,00%	6 lembaga	100,00%	Kec. Tandes	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga	10 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	100,00%	5 lembaga	100,00%	Kec. Simokerto	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00%	6 Lembaga	100,00%	Kec. Gayungan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan	6 Lembaga	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	100,00%	Kec. Krembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		7 Lembaga		6 Lembaga		7 Lembaga		116,67%		7 Lembaga		116,67%		Kec. Gubeng	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		6 Lembaga		100,00%		Kec. Asemrowo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100,00%		6 lembaga		100,00%		Kec. Benowo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		13 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		6 Lembaga		100,00%		Kec. Bubutan	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		N/A		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Kec. Bulak	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		6 Lembaga		100,00%		Kec. Sambikerep	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		7 Lembaga		175,00%		7 Lembaga		175,00%		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.01.01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			10.786		3.840		2.010		2.010		100,00%		5.850		54,24%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan		144 Orang		6 Laporan		6 Laporan		100,00%		6 Laporan		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.01.01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.843		4.500		2.550		2.550		100,00%		7.050		79,72%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		80 orang		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.01.01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.374		2.580		3.000		3.000		100,00%		5.580		66,63%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		86 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.01.01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			2.512		1.320		2.250		2.250		100,00%		3.570		142,10%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		44 orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Kenjeran	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.699		3.600		3.600		3.600		100,00%		7.200		107,47%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		120 orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			14.739		13.290		9.720		9.720		100,00%		23.010		156,12%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		207 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.752		3.420		3.060		3.060		100,00%		6.480		172,72%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		102 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.108		2.400		3.000		3.000		100,00%		5.400		105,71%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		80 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.967		2.250		2.250		2.250		100,00%		4.500		64,59%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		75 orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.374		2.850		3.750		3.750		100,00%		6.600		78,81%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		119 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.048		2.730		2.730		2.730		100,00%		5.460		179,12%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		91 orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12.729		3.000		1.950		1.950		100,00%		4.950		38,89%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		100 orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.025		2.370		3.420		3.420		100,00%		5.790		115,23%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		76 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.694		2.550		5.100		5.100		100,00%		7.650		134,34%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		85 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.699		3.000		1.650		1.650		100,00%		4.650		69,41%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		100 orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4.020		1.500		5.430		5.400		99,45%		6.900		171,66%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		50 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12.394		1.080		1.050		1.050		100,00%		2.130		17,19%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		36 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			15.779		14.432		3.792		3.792		100,00%		18.224		115,49%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		379 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			10.049		2.340		2.340		2.340		100,00%		4.680		46,57%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		78 Orang		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.852		780		3.450		3.450		100,00%		4.230		109,81%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		55 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			10.887		2.400		2.400		2.400		100,00%		4.800		44,09%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		79 orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			10.049		3.750		2.700		2.700		100,00%		6.450		64,18%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan		100 Orang		125 Laporan		125 Laporan		100,00%		125 Laporan		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.427		4.950		4.860		4.860		100,00%		9.810		180,78%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		100 orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			15.375		600		3.840		3.840		100,00%		4.440		28,88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		100 orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.350		3.060		2.000		1.980		99,00%		5.040		150,46%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan		169 Orang		178 Laporan		178 Laporan		100,00%		178 Laporan		100,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			16.079		2.100		2.100		2.100		100,00%		4.200		26,12%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		70 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.441		2.130		1.410		1.410		100,00%		3.540		41,94%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		78 orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.910		3.900		1.980		1.980		100,00%		5.880		65,99%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		130 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			19.294		6.000		2.700		2.700		100,00%		8.700		45,09%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		200 Orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.350		3.000		3.000		3.000		100,00%		6.000		179,12%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		100 orang		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			10.719		0		2.400		2.400		100,00%		2.400		22,39%		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		N/A		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			138.837.194		162.708.884		701.210		694.187		99,00%		163.403.071		117,69%		
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga		188 lembaga		188 lembaga		193 lembaga		102,66%		193 lembaga		102,66%		Kec. Benowo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga		414 Lembaga		414 Lembaga		414 Lembaga		100,00%		414 Lembaga		100,00%		Kec. Bubutan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		100,00%		158 Lembaga		100,00%		Kec. Bulak	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga		196 Lembaga		196 Lembaga		196 Lembaga		100,00%		196 Lembaga		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga		168 lLmbaga		168 Lembaga		168 Lembaga		100,00%		168 Lembaga		100,00%		Kec. Jambangan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		100,00%		460 Lembaga		100,00%		Kec. Kenjeran	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga		431 Lembaga		431 Lembaga		431 Lembaga		100,00%		431 Lembaga		100,00%		Kec. Krembangan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		100,00%		346 Lembaga		100,00%		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	376 Lembaga		376 Lembaga		371 Lembaga		371 Lembaga		100,00%		371 Lembaga		98,67%		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga		488 Lembaga		497 Lembaga		497 Lembaga		100,00%		497 Lembaga		101,84%		Kec. Rungkut	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	280 Lembaga		280 Lembaga		281 Lembaga		281 Lembaga		100,00%		281 Lembaga		100,36%		Kec. Wonocolo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga		356 lembaga		356 lembaga		356 lembaga		100,00%		356 lembaga		100,00%		Kec. Simokerto	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	749 Lembaga		749 Lembaga		749 Lembaga		749 Lembaga		100,00%		749 Lembaga		100,00%		Kec. Tambaksari	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga		211 lembaga		211 lembaga		212 lembaga		100,47%		212 lembaga		100,47%		Kec. Wiyung	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga		229 Lembaga		229 Lembaga		229 Lembaga		100,00%		229 Lembaga		100,00%		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga		185 Lembaga		185 Lembaga		185 Lembaga		100,00%		185 Lembaga		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga		220 Lembaga		220 Lembaga		220 Lembaga		100,00%		220 Lembaga		100,00%		Kec. Karangpilang	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	217 Lembaga		217 Lembaga		217 Lembaga		217 Lembaga		100,00%		217 Lembaga		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	200 Lembaga		205 Lembaga		205 Lembaga		205 Lembaga		100,00%		205 Lembaga		102,50%		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	365 Lembaga		365 Lembaga		365 Lembaga		364 Lembaga		99,73%		364 Lembaga		99,73%		Kec. Tegalsari	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga		480 Lembaga		480 Lembaga		480 Lembaga		100,00%		480 Lembaga		100,00%		Kec. Gubeng	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		100,00%		197 Lembaga		100,00%		Kec. Gayungan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga		139 Lembaga		139 Lembaga		139 Lembaga		100,00%		139 Lembaga		100,00%		Kec. Asemrowo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	260 Lembaga		260 Lembaga		261 Lembaga		261 Lembaga		100,00%		261 Lembaga		100,38%		Kec. Sambikerep	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		100,00%		364 Lembaga		100,00%		Kec. Genteng	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga		627 lembaga		627 lembaga		627 lembaga		100,00%		627 lembaga		100,00%		Kec. Sawahan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga		636 Lembaga		636 Lembaga		636 Lembaga		100,00%		636 Lembaga		100,00%		Kec. Semampir	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	439 Lembaga		439 Lembaga		441 Lembaga		441 Lembaga		100,00%		441 Lembaga		100,46%		Kec. Sukolilo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga		100,00%		323 Lembaga		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		100,00%		371 lembaga		100,00%		Kec. Tandes	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga		568 Lembaga		568 Lembaga		568 Lembaga		100,00%		568 Lembaga		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.454.403		3.164.843		12.701		12.701		100,00%		3.177.543		129,46%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		12 Kali		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			6.200.886		7.373.419		31.104		31.104		100,00%		7.404.523		119,41%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.594.402		6.551.703		27.929		27.929		100,00%		6.579.632		117,61%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.798.635		6.214.010		29.808		29.344		98,44%		6.243.353		107,67%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.890.578		7.302.833		28.577		28.517		99,79%		7.331.350		124,46%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan		12 Kali		60 Laporan		60 Laporan		100,00%		60 Laporan		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.708.920		5.438.714		23.069		23.069		100,00%		5.461.782		115,99%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.745.070		3.399.276		13.284		13.284		100,00%		3.412.560		124,32%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.852.656		5.839.778		23.587		23.301		98,79%		5.863.079		120,82%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			6.686.608		5.794.815		22.421		22.421		100,00%		5.817.236		87,00%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.876.732		3.298.494		13.673		13.673		100,00%		3.312.167		115,14%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wiyung	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9.280.353		8.270.317		41.023		41.013		99,97%		8.311.330		89,56%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.483.134		3.067.424		11.988		11.988		100,00%		3.079.412		124,01%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.437.744		6.174.724		26.827		26.827		100,00%		6.201.551		139,75%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		15 Laporan		125,00%		15 Laporan		125,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.917.046		5.918.785		34.068		32.388		95,07%		5.951.173		121,03%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.427.372		7.193.837		32.206		31.601		98,12%		7.225.438		133,13%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.108.477		2.543.566		10.238		10.082		98,47%		2.553.647		121,11%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.881.581		2.100.117		9.007		9.007		100,00%		2.109.124		112,09%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.761.646		3.580.377		14.839		14.510		97,78%		3.594.887		130,17%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			8.285.543		8.931.515		41.213		41.213		100,00%		8.972.728		108,29%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan		12 Kali		30 Laporan		30 Laporan		100,00%		30 Laporan		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			9.569.468		10.661.321		48.535		48.535		100,00%		10.709.857		111,92%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.436.619		2.725.459		12.182		12.182		100,00%		2.737.641		112,35%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.411.844		3.411.251		14.062		14.062		100,00%		3.425.313		142,02%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.001.019		6.131.571		23.652		23.587		99,73%		6.155.158		123,08%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			1.680.000		2.447.419		10.886		10.886		100,00%		2.458.306		146,33%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.152.648		4.994.101		20.930		20.920		99,95%		5.015.021		120,77%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan		12 Kali		60 Laporan		60 Laporan		100,00%		60 Laporan		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.859.088		3.446.404		14.256		14.256		100,00%		3.460.660		121,04%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.600.212		3.139.776		13.241		13.238		99,98%		3.153.014		121,26%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gayungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			6.782.123		7.650.143		36.806		36.185		98,31%		7.686.328		113,33%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			3.684.744		4.711.550		18.209		17.231		94,63%		4.728.781		128,33%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			3.422.884		4.835.949		16.848		16.583		98,43%		4.852.532		141,77%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.844.760		6.395.394		24.041		22.550		93,80%		6.417.945		132,47%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			6.115.619		714.800		667.645		479.648		71,84%		1.194.448		19,53%		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Bubutan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan		N/A		4 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		150,00%		6 Bidang Urusan		150,00%		Kec. Bulak	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Genteng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Gubeng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Jambangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Lakarsantri	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Krembangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Simokerto	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Sukolilo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Sukolilo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Wonokromo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Tandes	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	N/A	4 Laporan	6 Laporan	150,00%	6 Laporan	150,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Bidang urusan pemrintahan terkait pelayanan non perzinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Kenjeran	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Wiyung	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Wiyung	
			Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	635 Dokumen	N/A	620 Dokumen	304 Dokumen	49,03%	304 Dokumen	47,87%	Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Wonokromo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Gubeng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Semampir	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Lakarsantri	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Wonokromo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Tegalsari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	8 Bidang Urusan	9 Bidang Urusan	112,50%	9 Bidang Urusan	900,00%	Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Krembangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Sukolilo	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Benowo	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen	N/A	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00%	24 Dokumen	100,00%	Kec. Bulak	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Simokerto	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Genteng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Gayungan	
			Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan	N/A	11 Layanan	12 Layanan	109,09%	12 Layanan	109,09%	Kec. Bulak	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Wonocolo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Semampir	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Benowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Bubutan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Bubutan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Gubeng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Asemrowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Gayungan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Genteng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Jambangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Tambaksari	
			Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan	N/A	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	100,00%	Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Tandes	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Kenjeran	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Krembangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Karangpilang	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Karangpilang	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Gayungan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Lakarsantri	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Benowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan	N/A	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	100,00%	Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	N/A	30 Dokumen	30 Dokumen	100,00%	30 Dokumen	100,00%	Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Jambangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Tegalsari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Wonocolo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Semampir	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Simokerto	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Tambaksari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Tambaksari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	N/A	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100,00%	6 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Tandes	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Tegalsari	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan	N/A	1 Laporan	2 Laporan	200,00%	2 Laporan	200,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100,00%	1 Bidang Urusan	100,00%	Kec. Wiyung	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		7.134		1.111		915		82,37%		8.049		100,12%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		5.714		1.851		0		0,00%		5.714		71,07%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			4.020		3.657		3.600		3.597		99,91%		7.254		180,47%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		8.744		2.520		1.890		75,00%		10.634		105,82%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			3.753		3.194		205		171		83,57%		3.365		89,66%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		0		4.827		4.706		97,50%		4.706		46,83%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		3 laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1.102		220		44.619		8.022		17,98%		8.242		748,20%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			912		2.844		488		397		81,34%		3.241		355,39%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			13.399		11.545		419		416		99,27%		11.961		89,27%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			16.079		2.550		3.128		1.787		57,12%		4.337		26,97%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		8.900		83		0		0,00%		8.900		88,56%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		5 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			18.591		6.716		6.762		6.454		95,44%		13.170		70,84%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		4 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		5.690		7.198		7.197		100,00%		12.888		160,31%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		7.412		266		266		100,00%		7.679		76,41%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			21.494		2.353		2.862		2.309		80,68%		4.662		21,69%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		5.796		3.194		3.154		98,75%		8.950		111,33%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.594		0		1.841		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.597		5.069		3.910		3.840		98,20%		8.909		103,62%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12.863		9.929		719		710		98,77%		10.639		82,71%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2.043		1.020		140		115		82,63%		1.135		55,56%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			128.628		26.468		21.094		1.250		5,93%		27.718		21,55%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		3 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12.059		12.452		10.791		8.654		80,19%		21.105		175,02%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		5.554		644		577		89,58%		6.131		76,26%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.652		3.871		2.688		2.527		94,02%		6.398		60,06%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			32.500		14.055		802		0		0,00%		14.055		43,25%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		7.937		9.000		0		0,00%		7.937		78,98%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			402		7.775		5.934		5.934		100,00%		13.709		3410,60%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			6.699		2.360		2.190		2.190		100,00%		4.550		67,91%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		3.988		283		0		0,00%		3.988		49,60%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.374		7.155		167		0		0,00%		7.155		85,44%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			24.118		8.778		393		305		77,61%		9.083		37,66%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		4 laporan		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		5.493		8.042		7.454		92,68%		12.947		90,80%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		1964 Berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		6.127		3.707		3.570		96,31%		9.697		68,01%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		3254 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4.020		64.320		916		888		96,97%		65.208		1622,22%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		7397 Berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			3.753		3.122		448		436		97,28%		3.559		94,81%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		11052 Berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		0		7.497		3.375		45,02%		3.375		33,58%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		15226 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			8.039		730		12.111		11.736		96,90%		12.466		155,06%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		3816 Berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		1.415		12.591		11.045		87,72%		12.460		123,99%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		4700 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			13.399		4.179		4.718		4.163		88,24%		8.341		62,25%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		5239 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		396		23.559		19.936		84,62%		20.332		142,59%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		4577 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		9.158		6.000		0		0,00%		9.158		91,14%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		15245 berkas		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			18.591		10.032		17.770		17.770		100,00%		27.802		149,55%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		2686 berkas		4 Laporan		6 Laporan		150,00%		6 Laporan		150,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			9.171		7.919		19.280		19.276		99,98%		27.196		296,53%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		3346 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		12.746		6.689		6.689		100,00%		19.435		136,30%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan		2914 berkas		2923 Laporan		3235 Laporan		110,67%		3235 Laporan		110,67%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			21.494		16.589		10.997		9.052		82,31%		25.641		119,29%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		5291 Berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4.809.279		48.224		41.387		41.387		100,00%		89.611		1,86%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		10603 berkas		12 Laporan		13 Laporan		108,33%		13 Laporan		108,33%		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			19.438		7.842		2.000		2.000		100,00%		9.842		50,63%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		7928 Berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4.913		1.901		2.198		2.198		100,00%		4.098		83,43%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		2392 Berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		6.937		8.726		3.330		38,16%		10.267		72,00%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		24141 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			12.075		5.446		12.112		11.402		94,14%		16.848		139,52%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		7579 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			20.098		0		18.000		3.906		21,70%		3.906		19,44%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan		10397 Berkas		4140 Laporan		4163 Laporan		100,56%		4163 Laporan		100,56%		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			12.059		10.705		6.595		5.836		88,50%		16.541		137,17%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12655 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			8.039		7.226		4.451		4.448		99,94%		11.674		145,21%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		10296 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.652		4.594		11.791		11.668		98,95%		16.262		152,67%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		4554 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			72.000		22.609		15.984		15.984		100,00%		38.593		53,60%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan		3974 berkas		4277 Laporan		4672 Laporan		109,24%		4672 Laporan		109,24%		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		2.176		9.000		0		0,00%		2.176		21,65%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		5339 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			402		4.740		888		888		100,00%		5.628		1400,13%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		6468 Berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		8.037		46.253		46.253		100,00%		54.290		540,24%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		6419 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			2.010		1.760		3.000		2.958		98,60%		4.718		234,76%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		7350 Berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			8.374		25.038		2.562		2.504		97,72%		27.542		328,89%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		3797 Berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			24.118		23.867		40.337		37.825		93,77%		61.692		255,79%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		3831 berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			3.350		6.017		2.400		2.264		94,35%		8.282		247,24%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		10931 Berkas		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		9.999		623		537		86,24%		10.536		65,53%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen		28 Berkas		40 Dokumen		83 Dokumen		207,50%		83 Dokumen		207,50%		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		2.503		8.207		7.560		92,11%		10.063		62,59%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen		105 berkas		35 Dokumen		35 Dokumen		100,00%		35 Dokumen		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.675		1.438		12.321		12.266		99,55%		13.704		818,22%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		125 Berkas		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Kec. Wonokromo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.016		7.464		9.000		8.940		99,33%		16.404		163,78%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen		153 berkas		50 Dokumen		50 Dokumen		100,00%		50 Dokumen		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		6.501		125		0		0,00%		6.501		40,43%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen		250 berkas		100 Dokumen		135 Dokumen		135,00%		135 Dokumen		135,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			3.753		3.014		1.471		1.310		89,08%		4.324		115,21%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen		52 Berkas		20 Dokumen		60 Dokumen		300,00%		60 Dokumen		300,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		1.987		5.606		5.606		100,00%		7.592		75,55%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen		117 berkas		24 Dokumen		76 Dokumen		316,67%		76 Dokumen		316,67%		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			13.399		9.395		886		839		94,77%		10.234		76,38%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		303 berkas		30 Dokumen		30 Dokumen		100,00%		30 Dokumen		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		1.010		66		62		94,52%		1.072		10,67%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		68 berkas		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		1.956		2.620		1.516		57,85%		3.471		21,59%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		70 Berkas		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			12.059		6.063		5.606		5.050		90,09%		11.113		92,15%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		46 berkas		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		10.301		730		685		93,84%		10.986		109,33%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		574 berkas		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		1 Dokumen		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			18.591		9.509		5.606		5.606		100,00%		15.114		81,30%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		43 berkas		1 Dokumen		2 Dokumen		200,00%		2 Dokumen		200,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		13.990		749		705		94,07%		14.694		91,39%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen		49 berkas		42 Dokumen		92 Dokumen		219,05%		92 Dokumen		219,05%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.340		1.440		3.868		3.867		99,99%		5.307		396,08%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		237 berkas		48 Dokumen		48 Dokumen		100,00%		48 Dokumen		100,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			21.494		6.676		3.497		3.444		98,49%		10.119		47,08%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		61 Berkas		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			2.456		2.269		369		300		81,24%		2.569		104,58%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen		112 Berkas		24 Dokumen		24 Dokumen		100,00%		24 Dokumen		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			18.142		5.768		7.658		7.448		97,26%		13.217		72,85%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen		25 Berkas		10 Dokumen		12 Dokumen		120,00%		12 Dokumen		120,00%		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			13.834		1.956		863		836		96,92%		2.792		20,18%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen		43 berkas		10 Dokumen		10 Dokumen		100,00%		10 Dokumen		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			9.513		10.522		579		466		80,58%		10.989		115,51%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen		75 Berkas		38 Dokumen		81 Dokumen		213,16%		81 Dokumen		213,16%		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			24.118		15.762		21.600		5.184		24,00%		20.946		86,85%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		109 Berkas		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		4 Dokumen		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			8.039		7.211		1.121		1.079		96,26%		8.289		103,11%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen		92 berkas		15 Dokumen		16 Dokumen		106,67%		16 Dokumen		106,67%		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			12.059		6.655		8.729		6.809		78,00%		13.464		111,65%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		102 berkas		48 Dokumen		89 Dokumen		185,42%		89 Dokumen		185,42%		Kec. Tambaksari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.652		1.304		1.880		1.854		98,63%		3.159		29,65%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	635 Dokumen		215 berkas		620 Dokumen		304 Dokumen		49,03%		304 Dokumen		47,87%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.005		837		405		405		100,00%		1.242		123,60%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen		237 Berkas		16 Dokumen		53 Dokumen		331,25%		53 Dokumen		331,25%		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			12.863		9.923		526		525		99,73%		10.448		81,22%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		66 berkas		48 Dokumen		70 Dokumen		145,83%		70 Dokumen		145,83%		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		0		34.973		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		64 Berkas		30 Dokumen		58 Dokumen		193,33%		58 Dokumen		193,33%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			108.004		12.720		311		311		100,00%		13.031		12,07%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		104 Berkas		48 Dokumen		81 Dokumen		168,75%		81 Dokumen		168,75%		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		785		389		389		100,00%		1.174		7,30%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		281 Berkas		30 Dokumen		30 Dokumen		100,00%		30 Dokumen		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			24.118		9.371		15.694		12.623		80,43%		21.994		91,19%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen		82 berkas		35 Dokumen		36 Dokumen		102,86%		36 Dokumen		102,86%		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			9.647		8.248		5.829		5.801		99,52%		14.049		145,63%		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		70 berkas		12 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		12 Dokumen		100,00%		Kec. Asemrowo	
140	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			629.376.184		311.279.226		512.908.167		381.680.174		74,41%		692.959.400		110,10%		
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sawahan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Genteng	
			Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gubeng	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Tegalsari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Kenjeran	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Pabean Cantian	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Benowo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Gayungan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Pabean Cantian	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Simokerto	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Wonocolo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Wonocolo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Bubutan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	84,31%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Wiyung	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Jambangan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Wonokromo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Bubutan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Krembangan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Gunung Anyar	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Sukolilo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Tandes	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Gayungan	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Tandes	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Jambangan	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Sawahan	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Wonokromo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Asemrowo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	70,53%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kec. Benowo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Pakal	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Semampir	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%	12,50%	37,50%	37,50%	100,00%	37,50%	37,50%	Kec. Bulak	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%		70,89%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Rungkut	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Simokerto	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Karangpilang	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Gubeng	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Semampir	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Kenjeran	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Genteng	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Sambikerep	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Wiyung	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Krembangan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Pakal	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Rungkut	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Tambaksari	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		12,50%		37,50%		37,50%		100,00%		37,50%		37,50%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			623.077.437		310.802.146		502.631.255		373.957.156		74,40%		684.759.302		109,90%		
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		100,00%		1 Kelurahan		100,00%		Kec. Wonocolo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		3 kelurahan		100,00%		Kec. Asemrowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Bulak	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	100,00%	6 kelurahan	100,00%	Kec. Gubeng	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	100,00%	4 kelurahan	100,00%	Kec. Gunung Anyar	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	100,00%	4 kelurahan	100,00%	Kec. Jambangan	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	100,00%	4 kelurahan	100,00%	Kec. Karangpilang	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Krembangan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100,00%	2 Kelurahan	200,00%	Kec. Mulyorejo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Pakal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	2 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Sawahan	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	100,00%	5 kelurahan	100,00%	Kec. Semampir	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	100,00%	6 kelurahan	100,00%	Kec. Lakarsantri	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100,00%	4 Kelurahan	100,00%	Kec. Pakal	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	N/A	1 Unit	22 Unit	2200,00%	22 Unit	2200,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	100,00%	6 kelurahan	100,00%	Kec. Wonokromo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Simokerto	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	N/A	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	100,00%	1 Pokmas/Ormas	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	100,00%	4 kelurahan	100,00%	Kec. Gayungan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Karangpilang	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	100,00%	5 kelurahan	100,00%	Kec. Tegalsari	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Gayungan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Tandes	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100,00%	4 Kelurahan	100,00%	Kec. Wiyung	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Pabean Cantian	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	100,00%	4 kelurahan	100,00%	Kec. Benowo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100,00%	2 Kelurahan	200,00%	Kec. Sukomanunggal	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan	8 kelurahan	8 kelurahan	8 kelurahan	100,00%	8 kelurahan	100,00%	Kec. Tambaksari	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	100,00%	2 kelurahan	100,00%	Kec. Tambaksari	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Benowo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Sambikerep	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Asemrowo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100,00%	4 Kelurahan	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100,00%	2 Kelurahan	100,00%	Kec. Gubeng	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	100,00%	6 kelurahan	100,00%	Kec. Tandes	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	100,00%	6 kelurahan	100,00%	Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Tegalsari	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	2 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100,00%	4 Kelurahan	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Kenjeran	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	100,00%	5 kelurahan	100,00%	Kec. Genteng	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	100,00%	4 kelurahan	100,00%	Kec. Sambikerep	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Bubutan	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100,00%	5 Kelurahan	100,00%	Kec. Bubutan	
			jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga	N/A	5 Lembaga	5 Lembaga	100,00%	5 Lembaga	100,00%	Kec. Bulak	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	100,00%	4 kelurahan	100,00%	Kec. Kenjeran	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	100,00%	4 kelurahan	80,00%	Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Semampir	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100,00%	2 Kelurahan	200,00%	Kec. Rungkut	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Gunung Anyar	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	100,00%	6 kelurahan	100,00%	Kec. Mulyorejo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100,00%	2 Kelurahan	100,00%	Kec. Sukolilo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	2 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Lakarsantri	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Genteng	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Jambangan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	1 Kelurahan	100,00%	Kec. Wiyung	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga	5 kelurahan	5 Lembaga	5 Lembaga	100,00%	5 Lembaga	100,00%	Kec. Krembangan	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	N/A	2 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	150,00%	3 Lembaga Kemasyarakatan	150,00%	Kec. Rungkut	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	100,00%	6 kelurahan	100,00%	Kec. Sawahan	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	100,00%	5 kelurahan	100,00%	Kec. Simokerto	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	100,00%	7 kelurahan	100,00%	Kec. Sukolilo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		N/A		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		1 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		100,00%		5 kelurahan		100,00%		Kec. Wonocolo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan		3 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		100,00%		4 Kelurahan		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.544.639		349.454		2.174.288		1.682.512		77,38%		2.031.967		57,33%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 RW		2 Unit		2 Unit		100,00%		2 Unit		200,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.767.659		383.455		1.753.675		809.772		46,18%		1.193.226		43,11%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 RW		6 Unit		8 Unit		133,33%		8 Unit		133,33%		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.520.370		169.553		2.130.887		1.737.986		81,56%		1.907.539		125,47%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	66 Unit		12 RW		20 Unit		8 Unit		40,00%		8 Unit		12,12%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			984.989		276.299		1.879.782		1.397.413		74,34%		1.673.712		169,92%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit		2 RW		14 Unit		9 Unit		64,29%		9 Unit		37,50%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.551.881		361.358		2.132.039		1.804.524		84,64%		2.165.882		139,56%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		11 RW		13 Unit		14 Unit		107,69%		14 Unit		107,69%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.348.168		575.141		1.831.135		756.758		41,33%		1.331.899		24,90%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		11 RW		16 Unit		2 Unit		12,50%		2 Unit		7,41%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.777.698		396.794		1.489.365		995.079		66,81%		1.391.873		78,30%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		16 RW		10 Unit		9 Unit		90,00%		9 Unit		90,00%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.658.766		910.449		1.073.360		477.426		44,48%		1.387.875		37,93%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 RW		9 Unit		12 Unit		133,33%		12 Unit		133,33%		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.787.980		1.127.753		2.888.691		1.425.743		49,36%		2.553.496		91,59%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		2 RW		10 Unit		7 Unit		70,00%		7 Unit		70,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.459.209		545.065		2.123.282		1.649.588		77,69%		2.194.653		49,22%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		6 RW		9 Unit		11 Unit		122,22%		11 Unit		122,22%		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.505.701		571.287		1.632.490		680.150		41,66%		1.251.437		35,70%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		9 RW		10 Unit		6 Unit		60,00%		6 Unit		60,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.436.054		432.446		2.193.919		1.621.986		73,93%		2.054.432		143,06%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 RW		6 Unit		6 Unit		100,00%		6 Unit		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.675.411		8.487		2.061.485		1.509.923		73,24%		1.518.410		90,63%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		1 RW		8 Unit		8 Unit		100,00%		8 Unit		100,00%		Kec. Wiyung	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			998.221		470.902		2.132.104		1.179.818		55,34%		1.650.720		165,37%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		8 RW		3 Unit		3 Unit		100,00%		3 Unit		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.667.236		306.069		2.182.470		962.439		44,10%		1.268.509		76,08%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		4 RW		9 Unit		5 Unit		55,56%		5 Unit		55,56%		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.166.718		1.289.489		3.014.666		2.099.919		69,66%		3.389.408		156,43%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		3 RW		11 Unit		11 Unit		100,00%		11 Unit		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.474.407		745.609		2.516.379		1.204.557		47,87%		1.950.166		56,13%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		10 RW		19 Unit		16 Unit		84,21%		16 Unit		800,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.545.939		1.285.692		3.148.307		2.813.510		89,37%		4.099.202		115,60%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		15 RW		12 Unit		21 Unit		175,00%		21 Unit		1050,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.577.259		665.181		2.231.095		2.182.007		97,80%		2.847.188		79,59%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		7 RW		8 Unit		15 Unit		187,50%		15 Unit		750,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.776.235		1.453.995		2.782.691		2.081.589		74,80%		3.535.585		93,63%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		9 RW		15 Unit		13 Unit		86,67%		13 Unit		650,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.611.036		867.657		2.549.638		2.405.867		94,36%		3.273.525		90,65%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		13 RW		9 Unit		20 Unit		222,22%		20 Unit		1000,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.934.527		1.480.904		2.268.759		387.601		17,08%		1.868.505		63,67%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		18 RW		12 Unit		7 Unit		58,33%		7 Unit		350,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.157.876		700.735		1.787.839		1.475.277		82,52%		2.176.012		187,93%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		7 RW		3 Unit		3 Unit		100,00%		3 Unit		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			914.917		511.252		2.351.220		1.003.632		42,69%		1.514.884		165,58%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		7 RW		3 Unit		3 Unit		100,00%		3 Unit		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.059.580		479.164		1.973.429		951.566		48,22%		1.430.730		135,03%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 RW		3 Unit		3 Unit		100,00%		3 Unit		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			716.396		163.530		2.382.115		2.074.456		87,08%		2.237.985		312,39%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		5 RW		15 Unit		12 Unit		80,00%		12 Unit		36,36%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			510.519		282.429		1.943.960		1.732.250		89,11%		2.014.680		394,63%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		2 RW		3 Unit		14 Unit		466,67%		14 Unit		466,67%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			497.724		139.500		1.953.310		994.506		50,91%		1.134.005		227,84%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 RW		1 Unit		4 Unit		400,00%		4 Unit		400,00%		Kec. Lakarsantri	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.697.312		532.180		2.440.763		850.153		34,83%		1.382.333		81,44%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		6 RW		1 Unit		4 Unit		400,00%		4 Unit		400,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.393.201		937.737		1.995.618		1.697.410		85,06%		2.635.147		189,14%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		5 RW		15 Unit		16 Unit		106,67%		16 Unit		106,67%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.567.015		300.288		2.002.886		331.121		16,53%		631.409		40,29%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		5 RW		1 Unit		2 Unit		200,00%		2 Unit		200,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			743.626		484.450		2.819.922		2.620.937		92,94%		3.105.387		417,60%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		2 RW		3 Unit		8 Unit		266,67%		8 Unit		266,67%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			393.697		223.252		1.641.286		1.447.118		88,17%		1.670.370		424,28%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 RW		1 Unit		8 Unit		800,00%		8 Unit		800,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.587.513		384.673		1.622.715		1.284.153		79,14%		1.668.826		105,12%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		6 RW		1 Unit		8 Unit		800,00%		8 Unit		800,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.786.345		518.229		2.342.246		1.112.912		47,51%		1.631.142		91,31%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 RW		1 Unit		8 Unit		800,00%		8 Unit		800,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.283.835		532.392		1.504.693		1.409.949		93,70%		1.942.340		85,05%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		10 RW		2 Unit		2 Unit		100,00%		2 Unit		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.790.793		497.388		2.366.483		1.641.468		69,36%		2.138.857		76,64%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		5 RW		2 Unit		2 Unit		100,00%		2 Unit		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.277.356		857.102		2.192.022		1.268.472		57,87%		2.125.574		93,34%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		8 RW		2 Unit		2 Unit		100,00%		2 Unit		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.398.685		1.172.874		1.510.088		1.357.912		89,92%		2.530.786		74,46%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		18 RW		4 Unit		8 Unit		200,00%		8 Unit		200,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.392.974		588.222		2.445.707		1.684.214		68,86%		2.272.436		163,14%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		7 RW		3 Unit		3 Unit		100,00%		3 Unit		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.453.097		1.344.493		2.944.246		1.853.021		62,94%		3.197.513		92,60%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		5 RW		3 Unit		4 Unit		133,33%		4 Unit		133,33%		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.998.712		160.845		1.835.294		557.567		30,38%		718.411		17,97%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		9 RW		5 Unit		2 Unit		40,00%		2 Unit		40,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.172.837		248.145		961.150		694.817		72,29%		942.962		29,72%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		13 RW		6 Unit		10 Unit		166,67%		10 Unit		166,67%		Kec. Krembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.234.239		275.400		1.514.461		1.137.727		75,12%		1.413.127		43,69%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		8 RW		4 Unit		1 Unit		25,00%		1 Unit		25,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.703.650		328.607		2.183.983		1.488.088		68,14%		1.816.694		49,05%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		14 RW		5 Unit		5 Unit		100,00%		5 Unit		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.064.205		820.953		1.158.508		1.089.748		94,06%		1.910.701		62,36%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		24 RW		5 Unit		6 Unit		120,00%		6 Unit		50,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.894.195		1.069.891		2.104.470		1.680.034		79,83%		2.749.926		95,02%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		20 RW		8 Unit		8 Unit		100,00%		8 Unit		80,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.125.820		717.491		2.247.117		865.454		38,51%		1.582.945		50,64%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		21 RW		4 Unit		9 Unit		225,00%		9 Unit		225,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.986.633		2.793.466		2.523.559		1.673.871		66,33%		4.467.337		149,58%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		9 RW		4 Unit		8 Unit		200,00%		8 Unit		200,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.931.648		764.718		2.194.087		1.764.309		80,41%		2.529.027		86,27%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 RW		10 Unit		14 Unit		140,00%		14 Unit		140,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.084.961		317.194		1.051.602		878.990		83,59%		1.196.185		57,37%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		10 RW		1 Unit		10 Unit		1000,00%		10 Unit		1000,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.995.477		1.248.610		2.122.625		1.693.662		79,79%		2.942.271		73,64%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		11 RW		5 Unit		18 Unit		360,00%		18 Unit		360,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.855.743		335.337		1.422.829		962.803		67,67%		1.298.140		45,46%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		5 RW		1 Unit		4 Unit		400,00%		4 Unit		400,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.787.091		1.112.405		2.470.944		1.809.149		73,22%		2.921.554		61,03%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		11 RW		12 Unit		11 Unit		91,67%		11 Unit		91,67%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.839.386		1.012.705		2.146.866		1.119.811		52,16%		2.132.516		55,54%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 RW		12 Unit		12 Unit		100,00%		12 Unit		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.937.372		1.050.829		947.115		750.732		79,27%		1.801.561		36,49%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 RW		8 Unit		8 Unit		100,00%		8 Unit		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.906.513		1.406.636		3.569.081		2.953.084		82,74%		4.359.720		111,60%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 RW		14 Unit		15 Unit		107,14%		15 Unit		107,14%		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.822.107		3.908.867		3.576.799		3.426.045		95,79%		7.334.912		191,91%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		9 RW		12 Unit		13 Unit		108,33%		13 Unit		108,33%		Kec. Kenjeran	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.019.165		1.169.072		2.812.173		2.472.200		87,91%		3.641.272		180,34%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 RW		8 Unit		8 Unit		100,00%		8 Unit		100,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.446.203		964.298		2.622.305		2.426.462		92,53%		3.390.760		62,26%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		3 RW		4 Unit		4 Unit		100,00%		4 Unit		100,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.947.833		543.167		1.739.805		268.604		15,44%		811.771		27,54%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		12 RW		1 Unit		3 Unit		300,00%		3 Unit		300,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.902.278		656.558		1.658.999		1.151.748		69,42%		1.808.306		95,06%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 RW		1 Unit		3 Unit		300,00%		3 Unit		300,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.902.278		135.587		1.704.096		805.580		47,27%		941.168		49,48%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		6 RW		1 Unit		3 Unit		300,00%		3 Unit		300,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			951.139		91.649		954.080		258.934		27,14%		350.582		36,86%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 RW		1 Unit		3 Unit		300,00%		3 Unit		300,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.377.848		172.214		2.685.592		570.182		21,23%		742.396		31,22%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		12 RW		1 Unit		3 Unit		300,00%		3 Unit		300,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.377.848		770.026		2.132.146		1.706.305		80,03%		2.476.332		104,14%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		5 RW		1 Unit		8 Unit		800,00%		8 Unit		800,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.114.697		682.799		2.067.783		1.481.585		71,65%		2.164.384		69,49%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		8 RW		1 Unit		5 Unit		500,00%		5 Unit		500,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			343.974		258.130		1.928.378		967.397		50,17%		1.225.527		356,28%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 RW		3 Unit		3 Unit		100,00%		3 Unit		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			675.134		576.285		1.986.426		494.637		24,90%		1.070.922		158,62%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		4 RW		3 Unit		3 Unit		100,00%		3 Unit		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			949.596		191.752		2.024.454		200.214		9,89%		391.966		41,28%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		7 RW		3 Unit		3 Unit		100,00%		3 Unit		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.294.288		717.728		2.243.548		1.944.746		86,68%		2.662.473		62,00%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		4 RW		2 Unit		2 Unit		100,00%		2 Unit		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			560.418		153.596		2.279.712		1.977.514		86,74%		2.131.110		380,27%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		3 RW		2 Unit		6 Unit		300,00%		6 Unit		300,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			733.449		244.887		2.079.019		931.859		44,82%		1.176.746		160,44%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 RW		2 Unit		2 Unit		100,00%		2 Unit		100,00%		Kec. Asemrowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.314.486		182.494		857.987		800.803		93,34%		983.297		42,48%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 RW		1 Unit		1 Unit		100,00%		1 Unit		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.268.395		638.022		3.012.045		2.589.012		85,96%		3.227.034		142,26%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		8 RW		6 Unit		6 Unit		100,00%		6 Unit		600,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.343.308		221.343		1.580.737		1.466.398		92,77%		1.687.741		125,64%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 RW		6 Unit		7 Unit		116,67%		7 Unit		350,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.055.456		371.625		2.325.373		1.951.450		83,92%		2.323.075		220,10%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		7 RW		2 Unit		3 Unit		150,00%		3 Unit		300,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.764.212		3.048.783		3.341.661		2.650.048		79,30%		5.698.832		119,62%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		15 RW		1 Unit		1 Unit		100,00%		1 Unit		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.458.343		345.953		2.268.821		1.995.184		87,94%		2.341.137		95,23%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 RW		9 Unit		18 Unit		200,00%		18 Unit		1800,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.774.678		559.218		2.071.746		1.978.418		95,50%		2.537.636		91,46%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 RW		8 Unit		14 Unit		175,00%		14 Unit		1400,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.714.272		1.054.698		2.973.638		1.984.849		66,75%		3.039.547		81,83%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		11 RW		10 Unit		10 Unit		100,00%		10 Unit		500,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.508.587		2.190.638		2.776.101		2.470.300		88,98%		4.660.937		103,38%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		13 RW		5 Unit		9 Unit		180,00%		9 Unit		180,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.937.215		1.385.296		1.991.653		1.831.348		91,95%		3.216.645		109,51%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		7 RW		6 Unit		13 Unit		216,67%		13 Unit		1300,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.591.799		220.394		2.110.588		1.915.898		90,78%		2.136.292		134,21%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 RW		4 Unit		4 Unit		100,00%		4 Unit		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.876.228		329.967		2.800.371		2.297.679		82,05%		2.627.646		91,36%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 RW		9 Unit		12 Unit		133,33%		12 Unit		133,33%		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.405.262		488.647		2.722.896		1.813.507		66,60%		2.302.154		95,71%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 RW		7 Unit		8 Unit		114,29%		8 Unit		114,29%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.011.356		213.092		844.481		280.315		33,19%		493.407		48,79%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		2 RW		3 Unit		2 Unit		66,67%		2 Unit		66,67%		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.155.850		565.222		2.659.746		2.180.215		81,97%		2.745.437		87,00%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		9 RW		10 Unit		9 Unit		90,00%		9 Unit		90,00%		Kec. Benowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.405.315		1.989.629		2.646.882		2.169.962		81,98%		4.159.591		122,15%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 RW		10 Unit		14 Unit		140,00%		14 Unit		140,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			563.929		65.151		1.500.341		906.793		60,44%		971.944		172,35%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		1 RW		4 Unit		5 Unit		125,00%		5 Unit		125,00%		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.184.566		416.055		2.011.659		1.707.490		84,88%		2.123.545		97,21%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 RW		6 Unit		4 Unit		66,67%		4 Unit		66,67%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.952.311		305.291		2.078.228		1.353.150		65,11%		1.658.441		84,95%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		3 RW		5 Unit		5 Unit		100,00%		5 Unit		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.310.806		109.985		2.270.756		1.185.630		52,21%		1.295.615		56,07%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		2 RW		4 Unit		4 Unit		100,00%		4 Unit		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			934.257		993.220		2.356.226		2.016.201		85,57%		3.009.421		322,12%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		9 RW		12 Unit		13 Unit		108,33%		13 Unit		108,33%		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.560.404		415.811		2.544.639		266.979		10,49%		682.790		43,76%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		3 RW		4 Unit		4 Unit		100,00%		4 Unit		57,14%		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.101.652		63.962		2.408.934		2.330.207		96,73%		2.394.169		217,33%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		1 RW		3 Unit		11 Unit		366,67%		11 Unit		366,67%		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.258.246		332.677		2.241.097		1.959.813		87,45%		2.292.490		182,20%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 RW		4 Unit		4 Unit		100,00%		4 Unit		100,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.267.520		48.940		2.734.813		2.598.664		95,02%		2.647.604		62,04%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		2 RW		8 Unit		13 Unit		162,50%		13 Unit		39,39%		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.368.380		32.456		2.439.911		2.235.626		91,63%		2.268.082		95,77%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		2 RW		6 Unit		7 Unit		116,67%		7 Unit		116,67%		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.066.352		37.451		3.141.238		2.328.977		74,14%		2.366.428		114,52%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		1 RW		3 Unit		12 Unit		400,00%		12 Unit		400,00%		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.923.694		115.713		2.187.737		1.983.752		90,68%		2.099.465		109,14%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit		1 RW		18 Unit		16 Unit		88,89%		16 Unit		80,00%		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.011.339		630.648		2.355.351		2.197.573		93,30%		2.828.221		70,51%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 RW		7 Unit		17 Unit		242,86%		17 Unit		242,86%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.869.453		418.064		2.603.699		2.315.811		88,94%		2.733.875		56,14%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 RW		11 Unit		4 Unit		36,36%		4 Unit		36,36%		Kec. Tambaksari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.861.720		2.169.484		3.240.322		3.225.673		99,55%		5.395.157		110,97%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 RW		8 Unit		23 Unit		287,50%		23 Unit		287,50%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			793.506		553.496		1.353.316		812.723		60,05%		1.366.218		172,17%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		4 RW		7 Unit		7 Unit		100,00%		7 Unit		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.875.658		1.881.722		1.800.112		1.391.438		77,30%		3.273.160		84,45%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		13 RW		13 Unit		13 Unit		100,00%		13 Unit		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.423.557		114.849		1.980.733		1.327.974		67,04%		1.442.823		32,62%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 RW		12 Unit		12 Unit		100,00%		12 Unit		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.481.058		1.875.429		2.322.259		1.968.875		84,78%		3.844.304		259,56%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		9 RW		13 Unit		13 Unit		100,00%		13 Unit		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			642.099		27.003		2.193.527		1.602.509		73,06%		1.629.512		253,78%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 RW		3 Unit		3 Unit		100,00%		3 Unit		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.176.870		1.237.717		2.907.701		2.843.596		97,80%		4.081.313		78,84%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 RW		11 Unit		11 Unit		100,00%		11 Unit		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.656.137		752.933		2.927.412		2.626.987		89,74%		3.379.920		72,59%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 RW		11 Unit		9 Unit		81,82%		9 Unit		81,82%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.738.431		177.721		1.379.953		1.169.872		84,78%		1.347.593		36,05%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 RW		9 Unit		7 Unit		77,78%		7 Unit		77,78%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.339.186		315.257		2.391.402		1.999.653		83,62%		2.314.911		53,35%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 RW		9 Unit		10 Unit		111,11%		10 Unit		111,11%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.144.651		554.675		2.539.946		1.762.260		69,38%		2.316.935		108,03%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		8 RW		9 Unit		12 Unit		133,33%		12 Unit		133,33%		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.382.471		952.789		1.784.522		1.458.595		81,74%		2.411.385		101,21%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		6 RW		2 Unit		9 Unit		450,00%		9 Unit		450,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.382.471		702.730		2.148.206		2.008.514		93,50%		2.711.244		113,80%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 RW		8 Unit		6 Unit		75,00%		6 Unit		75,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.144.651		381.940		2.082.672		1.736.459		83,38%		2.118.399		98,78%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 RW		6 Unit		9 Unit		150,00%		9 Unit		150,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.249.664		579.165		3.262.350		2.646.200		81,11%		3.225.365		143,37%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		1 RW		3 Unit		11 Unit		366,67%		11 Unit		183,33%		Kec. Sukolilo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.392.343		258.878		1.398.915		599.620		42,86%		858.498		35,89%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		2 RW		3 Unit		8 Unit		266,67%		8 Unit		133,33%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.020.102		620.827		3.094.163		3.043.120		98,35%		3.663.947		121,32%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		9 RW		5 Unit		15 Unit		300,00%		15 Unit		300,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.020.102		287.894		2.792.507		622.360		22,29%		910.253		30,14%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		1 RW		4 Unit		5 Unit		125,00%		5 Unit		71,43%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.298.312		109.273		2.036.244		1.321.795		64,91%		1.431.068		43,39%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		6 RW		3 Unit		10 Unit		333,33%		10 Unit		333,33%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.761.470		840.479		2.310.388		1.852.883		80,20%		2.693.363		152,90%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		3 RW		12 Unit		14 Unit		116,67%		14 Unit		116,67%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.046.368		420.410		1.955.370		1.458.440		74,59%		1.878.850		91,81%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		1 RW		5 Unit		8 Unit		160,00%		8 Unit		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.422.669		1.336.177		2.353.820		1.673.578		71,10%		3.009.755		211,56%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		16 RW		9 Unit		14 Unit		155,56%		14 Unit		155,56%		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			499.855		469.607		2.168.210		1.749.861		80,71%		2.219.468		444,02%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		4 RW		2 Unit		11 Unit		550,00%		11 Unit		550,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.412.480		1.222.544		2.574.206		1.819.321		70,68%		3.041.865		215,36%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 RW		7 Unit		15 Unit		214,29%		15 Unit		214,29%		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			307.061		234.403		2.454.988		2.281.630		92,94%		2.516.034		819,39%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		3 RW		2 Unit		12 Unit		600,00%		12 Unit		600,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.570.614		1.050.277		2.381.999		2.240.409		94,06%		3.290.686		209,52%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		8 RW		4 Unit		5 Unit		125,00%		5 Unit		41,67%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			588.445		512.215		1.500.960		1.107.601		73,79%		1.619.816		275,27%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		8 RW		1 Unit		3 Unit		300,00%		3 Unit		300,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			718.802		355.825		2.056.736		1.710.077		83,15%		2.065.902		287,41%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 RW		4 Unit		10 Unit		250,00%		10 Unit		250,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.449.825		663.014		1.619.917		875.313		54,03%		1.538.328		106,10%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		3 RW		2 Unit		7 Unit		350,00%		7 Unit		350,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.311.429		262.013		1.765.163		1.501.165		85,04%		1.763.178		53,25%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		4 RW		12 Unit		9 Unit		75,00%		9 Unit		75,00%		Kec. Tegalsari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.829.275		329.910		1.115.465		323.618		29,01%		653.528		23,10%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		6 RW		9 Unit		5 Unit		55,56%		5 Unit		13,89%		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.281.862		423.204		2.247.465		2.010.870		89,47%		2.434.074		74,17%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		11 RW		18 Unit		14 Unit		77,78%		14 Unit		77,78%		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.679.181		650.381		2.149.378		1.460.033		67,93%		2.110.414		125,68%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		8 RW		24 Unit		10 Unit		41,67%		10 Unit		34,48%		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.720.121		128.873		1.146.329		199.970		17,44%		328.843		12,09%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit		11 RW		5 Unit		2 Unit		40,00%		2 Unit		10,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.966.850		674.457		1.853.685		619.191		33,40%		1.293.648		65,77%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		9 RW		5 Unit		8 Unit		160,00%		8 Unit		160,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.875.774		859.800		2.440.992		2.186.631		89,58%		3.046.431		162,41%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		7 RW		3 Unit		10 Unit		333,33%		10 Unit		333,33%		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.417.269		571.706		2.252.526		1.364.076		60,56%		1.935.782		80,08%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit		8 RW		34 Unit		12 Unit		35,29%		12 Unit		30,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.170.973		1.276.097		2.045.165		1.219.503		59,63%		2.495.600		114,95%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit		10 RW		16 Unit		10 Unit		62,50%		10 Unit		45,45%		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.775.556		851.477		2.344.653		2.229.008		95,07%		3.080.486		110,99%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		14 RW		1 Unit		18 Unit		1800,00%		18 Unit		450,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.823.588		817.055		3.565.683		3.042.836		85,34%		3.859.890		80,02%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		14 RW		5 Unit		11 Unit		220,00%		11 Unit		220,00%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.410.138		386.883		1.264.168		257.877		20,40%		644.760		14,62%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		12 RW		2 Unit		5 Unit		250,00%		5 Unit		250,00%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.422.502		610.488		3.037.290		1.800.022		59,26%		2.410.509		54,51%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		11 RW		3 Unit		8 Unit		266,67%		8 Unit		266,67%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.650.489		903.881		4.669.180		3.076.872		65,90%		3.980.753		70,45%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		9 RW		4 Unit		7 Unit		175,00%		7 Unit		175,00%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.961.405		180.273		1.794.410		332.467		18,53%		512.740		10,33%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		15 RW		2 Unit		6 Unit		300,00%		6 Unit		300,00%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.537.320		222.008		2.119.741		702.173		33,13%		924.181		60,12%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 RW		6 Unit		9 Unit		150,00%		9 Unit		150,00%		Kec. Wonocolo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.119.392		774.031		2.175.569		1.825.407		83,90%		2.599.438		232,22%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 RW		8 Unit		8 Unit		100,00%		8 Unit		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.123.349		179.321		2.359.463		2.021.108		85,66%		2.200.429		103,63%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 RW		12 Unit		11 Unit		91,67%		11 Unit		91,67%		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.848.309		326.474		2.335.999		1.817.685		77,81%		2.144.158		75,28%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		5 RW		2 Unit		2 Unit		100,00%		2 Unit		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.143.111		183.652		1.431.912		913.047		63,76%		1.096.699		95,94%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 RW		8 Unit		7 Unit		87,50%		7 Unit		87,50%		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0		0		3.953.289		3.311.265		83,76%		3.311.265		0,00%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		2 unit		2 unit		100,00%		2 unit		N/A		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.166.147		485.340		611.953		467.600		76,41%		952.940		81,72%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		6 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.805.410		2.278.572		1.004.245		894.727		89,09%		3.173.300		175,77%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		12 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			918.505		507.783		758.170		687.634		90,70%		1.195.417		130,15%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		10 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.104.769		2.502.487		1.192.810		951.985		79,81%		3.454.472		164,13%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		11 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.467.127		1.546.468		964.022		881.595		91,45%		2.428.063		165,50%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		11 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.250.584		2.821.338		1.730.677		1.194.528		69,02%		4.015.865		178,44%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		16 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.272.583		1.712.460		1.568.518		814.501		51,93%		2.526.961		111,19%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.479.471		2.120.412		1.345.745		1.179.458		87,64%		3.299.870		133,09%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		10 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Bubutan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.407.099		2.157.021		1.848.380		1.317.664		71,29%		3.474.685		144,35%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.574.386		2.094.147		2.370.391		1.356.411		57,22%		3.450.558		96,54%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		10 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			947.958		637.726		690.340		641.615		92,94%		1.279.341		134,96%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.837.092		1.292.825		1.013.184		1.000.040		98,70%		2.292.865		124,81%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		11 RW		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		100,00%		4 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842.672		686.089		512.381		421.939		82,35%		1.108.028		131,49%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			962.895		754.965		650.699		621.323		95,49%		1.376.287		142,93%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		8 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.320.793		1.206.017		799.874		622.663		77,85%		1.828.680		138,45%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		8 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.216.778		3.182.696		1.307.562		1.249.378		95,55%		4.432.074		137,78%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.103.167		2.045.971		1.037.374		878.601		84,69%		2.924.572		139,06%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.435.573		2.474.280		1.745.381		1.285.769		73,67%		3.760.049		154,38%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		10 RW		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		100,00%		5 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.160.036		3.974.633		1.666.470		1.624.988		97,51%		5.599.621		177,20%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		15 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.820.535		1.535.772		1.039.748		983.187		94,56%		2.518.959		138,36%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		13 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sawahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.271.557		2.167.832		1.895.110		1.766.871		93,23%		3.934.703		173,22%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		18 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.071.524		928.858		642.117		572.578		89,17%		1.501.436		140,12%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		7 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.141.471		759.926		889.846		592.003		66,53%		1.351.929		118,44%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.099.598		453.727		801.416		669.444		83,53%		1.123.172		102,14%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.067.306		774.170		700.085		636.945		90,98%		1.411.115		132,21%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		6 RW		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		100,00%		1 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.271.723		925.810		558.772		501.467		89,74%		1.427.278		112,23%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		5 RW		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		100,00%		1 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.248.122		989.698		835.490		529.945		63,43%		1.519.642		121,75%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		6 RW		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		100,00%		1 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.394.393		1.113.690		787.951		655.796		83,23%		1.769.486		126,90%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		9 RW		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		100,00%		1 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			965.059		1.040.092		447.138		442.808		99,03%		1.482.900		153,66%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		150,00%		3 Pokmas / Ormas		150,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			986.245		1.200.297		601.992		318.550		52,92%		1.518.848		154,00%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			979.817		782.618		356.267		270.385		75,89%		1.053.003		107,47%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.643.893		1.158.550		1.416.657		838.337		59,18%		1.996.887		121,47%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Lakarsantri	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			703.767		376.574		484.381		471.923		97,43%		848.496		120,56%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			628.210		518.253		371.406		255.247		68,72%		773.500		123,13%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.131.939		1.100.018		1.629.768		792.440		48,62%		1.892.458		167,19%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		10 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.735.397		2.491.825		1.324.235		1.008.310		76,14%		3.500.135		127,96%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		10 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.181.764		794.815		1.075.092		846.950		78,78%		1.641.765		138,92%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		12 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.982.423		1.236.434		1.232.274		1.041.810		84,54%		2.278.244		114,92%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		19 RW		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		100,00%		5 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.432.113		2.420.122		1.144.449		994.480		86,90%		3.414.602		140,40%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		5 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.373.294		1.806.682		1.677.287		1.094.105		65,23%		2.900.787		211,23%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		13 RW		7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas		100,00%		7 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.164.376		846.473		409.426		219.945		53,72%		1.066.418		91,59%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.050.663		1.670.880		981.446		954.923		97,30%		2.625.803		249,92%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		16 RW		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		100,00%		4 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.332.172		3.832.590		2.895.762		1.342.135		46,35%		5.174.725		221,88%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		9 RW		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		100,00%		5 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.948.824		796.729		1.555.530		1.278.021		82,16%		2.074.750		106,46%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		22 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.625.380		1.302.147		1.219.421		898.148		73,65%		2.200.295		135,37%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		24 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.668.532		1.238.000		997.802		758.641		76,03%		1.996.640		119,66%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		14 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.574.842		1.337.494		1.016.054		932.665		91,79%		2.270.159		144,15%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		12 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.668.143		778.951		1.718.780		1.545.465		89,92%		2.324.415		139,34%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas		25 RW		15 Pokmas / Ormas		15 Pokmas / Ormas		100,00%		15 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.313.211		1.268.207		953.940		831.141		87,13%		2.099.348		159,86%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		14 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.115.318		2.837.999		1.643.370		1.223.943		74,48%		4.061.942		192,03%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		10 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.963.261		1.174.036		1.270.194		1.073.238		84,49%		2.247.274		114,47%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		11 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.297.476		1.301.799		1.099.967		576.313		52,39%		1.878.112		144,75%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		5 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.772.012		3.543.705		2.142.554		1.701.915		79,43%		5.245.619		189,24%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		12 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.091.174		2.150.660		1.678.997		1.235.653		73,59%		3.386.314		161,93%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		12 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.025.727		3.168.712		1.699.645		1.293.651		76,11%		4.462.363		147,48%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		8 RW		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		100,00%		5 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.025.849		2.127.114		2.127.214		2.007.015		94,35%		4.134.128		136,63%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		14 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Kenjeran	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.239.302		2.024.954		2.006.582		1.936.190		96,49%		3.961.144		122,28%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		12 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.871.745		1.629.287		1.049.348		986.057		93,97%		2.615.344		139,73%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.323.475		1.026.101		795.867		760.155		95,51%		1.786.255		134,97%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.101.041		1.074.282		1.336.880		931.951		69,71%		2.006.233		182,21%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		12 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.127.615		1.117.277		1.054.284		787.745		74,72%		1.905.021		168,94%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.027.721		1.489.229		1.627.362		870.477		53,49%		2.359.705		229,61%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		5 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			558.633		497.847		898.712		342.372		38,10%		840.219		150,41%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.669.712		1.895.102		1.056.759		846.600		80,11%		2.741.702		164,20%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			850.264		539.634		580.034		570.349		98,33%		1.109.982		130,55%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.466.004		1.036.353		1.031.615		1.003.148		97,24%		2.039.501		139,12%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.071.548		1.769.328		1.529.356		1.122.928		73,42%		2.892.256		139,62%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		8 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			874.932		801.151		315.165		267.177		84,77%		1.068.329		122,10%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Asemrowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.768.963		1.567.966		883.458		824.088		93,28%		2.392.054		135,22%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		8 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			772.531		831.723		609.377		348.224		57,14%		1.179.946		152,74%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.497.398		919.642		881.757		367.070		41,63%		1.286.711		85,93%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.901.301		1.050.197		811.980		615.452		75,80%		1.665.648		87,61%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.911.965		869.596		845.429		785.719		92,94%		1.655.315		86,58%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			911.900		978.155		897.948		586.079		65,27%		1.564.234		171,54%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.727.658		1.433.298		880.134		816.033		92,72%		2.249.331		130,20%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			885.745		978.308		605.980		557.136		91,94%		1.535.443		173,35%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		7 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			962.207		672.529		593.880		533.151		89,77%		1.205.679		125,30%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		7 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.815.890		1.384.112		1.745.110		1.733.390		99,33%		3.117.502		110,71%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		15 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			810.766		841.789		606.296		447.287		73,77%		1.289.076		158,99%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		4 RW		5 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		120,00%		6 Pokmas / Ormas		120,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.312.079		1.093.676		669.529		618.570		92,39%		1.712.246		130,50%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gubeng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.783.596		1.717.274		1.187.604		1.144.352		96,36%		2.861.627		160,44%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		11 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.662.868		1.771.096		1.820.615		1.618.714		88,91%		3.389.810		127,30%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		13 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.341.718		791.345		902.559		752.280		83,35%		1.543.625		115,05%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.470.002		1.769.868		834.360		825.538		98,94%		2.595.406		176,56%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			413.413		297.742		211.760		207.470		97,97%		505.211		122,20%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		2 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.986.677		2.754.787		1.322.881		1.167.505		88,25%		3.922.292		197,43%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			557.717		586.660		526.569		223.395		42,42%		810.054		145,24%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 RW		3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		133,33%		4 Pokmas / Ormas		133,33%		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			407.201		398.621		299.761		298.049		99,43%		696.670		171,09%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.209.682		1.001.979		740.800		735.616		99,30%		1.737.595		143,64%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.187.055		1.714.354		1.669.445		1.337.007		80,09%		3.051.361		139,52%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		10 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			626.804		621.729		549.417		540.400		98,36%		1.162.129		185,41%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.133.491		1.141.662		590.701		477.739		80,88%		1.619.401		142,87%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		5 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sukomanunggal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.043.949		762.358		686.854		642.330		93,52%		1.404.687		134,56%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.756.326		743.304		955.007		854.453		89,47%		1.597.757		90,97%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 RW		12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas		100,00%		12 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.486.122		1.014.047		557.753		474.430		85,06%		1.488.477		100,16%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 RW		7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas		100,00%		7 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.547.999		1.107.908		581.014		401.394		69,09%		1.509.303		97,50%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.080.816		936.557		548.402		404.702		73,80%		1.341.259		124,10%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 RW		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		100,00%		4 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.066.891		1.052.836		1.380.575		1.357.889		98,36%		2.410.725		116,64%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		14 RW		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		100,00%		5 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			930.189		824.787		473.275		449.405		94,96%		1.274.192		136,98%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			129.030		963.249		588.179		563.946		95,88%		1.527.195		1183,60%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		8 RW		6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		100,00%		6 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.169.320		754.454		557.975		530.968		95,16%		1.285.422		109,93%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		6 RW		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		100,00%		4 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			648.488		725.759		990.598		380.682		38,43%		1.106.441		170,62%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			667.913		810.171		1.436.123		1.105.227		76,96%		1.915.398		286,77%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		13 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			877.868		866.319		1.064.592		1.017.634		95,59%		1.883.953		214,61%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Karangpilang	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.241.199		436.740		293.257		269.128		91,77%		705.868		21,78%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.062.865		759.570		1.136.631		1.000.661		88,04%		1.760.231		165,61%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.224.080		1.440.189		1.393.721		1.308.431		93,88%		2.748.620		123,58%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		11 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.456.023		2.208.214		1.309.311		1.290.677		98,58%		3.498.891		142,46%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		8 RW		2 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		200,00%		4 Pokmas / Ormas		200,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.675.032		1.211.092		1.478.400		1.133.274		76,66%		2.344.367		139,96%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		12 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.427.230		1.618.171		1.583.626		1.529.329		96,57%		3.147.499		129,67%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		11 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.685.781		1.955.788		1.354.195		1.338.336		98,83%		3.294.123		122,65%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		11 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.357.204		1.435.698		1.879.906		753.553		40,08%		2.189.251		161,31%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.667.073		2.355.919		1.183.086		1.077.719		91,09%		3.433.638		128,74%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			702.840		417.936		569.715		525.464		92,23%		943.400		134,23%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		9 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.184.061		629.808		911.894		738.593		81,00%		1.368.401		115,57%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		5 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			748.403		610.988		696.070		679.814		97,66%		1.290.802		172,47%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		8 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gayungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			699.380		362.423		576.827		568.210		98,51%		930.633		133,07%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			780.674		662.514		459.508		425.444		92,59%		1.087.958		139,36%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		7 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		75,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.033.519		1.020.129		733.667		708.563		96,58%		1.728.692		167,26%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.470.386		1.147.293		1.141.220		733.203		64,25%		1.880.496		127,89%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.167.111		1.243.537		898.453		889.133		98,96%		2.132.670		182,73%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		75,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.403.731		1.522.388		862.833		841.062		97,48%		2.363.451		168,37%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		10 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.206.980		852.900		1.066.010		915.552		85,89%		1.768.452		146,52%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		75,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.198.532		565.604		1.158.786		1.042.503		89,97%		1.608.106		134,17%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		11 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.518.871		1.202.866		1.490.564		1.404.673		94,24%		2.607.539		171,68%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		16 RW		3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		133,33%		4 Pokmas / Ormas		133,33%		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.418.571		638.274		1.215.786		1.184.859		97,46%		1.823.133		128,52%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		7 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			833.579		692.415		477.830		473.802		99,16%		1.166.217		139,90%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		6 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			587.694		556.113		325.640		282.946		86,89%		839.059		142,77%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Sambikerep	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.878.070		1.697.374		1.077.207		883.044		81,98%		2.580.418		137,40%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			655.157		480.713		1.076.417		666.153		61,89%		1.146.865		175,05%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		4 RW		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		100,00%		1 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.088.790		1.164.020		845.379		807.009		95,46%		1.971.029		181,03%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		5 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.460.828		1.417.357		559.399		475.920		85,08%		1.893.277		129,60%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		8 RW		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		100,00%		4 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.835.583		1.811.918		993.804		735.535		74,01%		2.547.452		138,78%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		4 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.452.106		1.586.275		1.619.729		674.187		41,62%		2.260.462		155,67%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.809.622		1.703.195		1.244.071		1.059.709		85,18%		2.762.904		152,68%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		11 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			949.789		1.451.273		1.131.958		999.426		88,29%		2.450.700		258,03%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		10 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.614.622		1.944.417		1.588.225		1.084.207		68,27%		3.028.624		187,57%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.728.681		1.396.108		867.329		791.808		91,29%		2.187.915		126,57%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		9 RW		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		100,00%		4 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.596.717		1.235.085		1.029.815		889.834		86,41%		2.124.918		133,08%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		10 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.446.145		2.162.881		692.664		687.264		99,22%		2.850.145		116,52%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		7 RW		6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		100,00%		6 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.158.529		2.244.807		1.500.539		1.189.476		79,27%		3.434.283		159,10%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		14 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.177.498		2.445.436		1.289.308		946.007		73,37%		3.391.443		106,73%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		8 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.445.420		2.394.426		1.816.551		1.621.929		89,29%		4.016.354		116,57%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		14 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.894.153		2.709.715		2.352.246		2.331.046		99,10%		5.040.761		174,17%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		16 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.445.420		1.620.413		1.460.159		1.306.186		89,46%		2.926.599		84,94%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		17 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.445.420		2.856.800		1.752.794		1.351.258		77,09%		4.208.058		122,13%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		12 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.833.928		2.626.701		1.538.584		1.324.270		86,07%		3.950.971		215,44%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		11 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			709.961		1.156.704		849.995		591.195		69,55%		1.747.898		246,20%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		6 RW		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		100,00%		1 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.975.407		1.399.520		1.050.758		931.337		88,63%		2.330.857		117,99%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		9 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			846.811		986.162		1.165.723		912.079		78,24%		1.898.241		224,16%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		12 RW		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		100,00%		3 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.505.548		774.695		1.193.224		576.842		48,34%		1.351.537		89,77%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		7 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.004.486		555.900		650.731		585.392		89,96%		1.141.291		113,62%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		6 RW		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100,00%		2 Pokmas / Ormas		100,00%		Kec. Wonocolo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			0		0		2.731.059		2.117.590		77,54%		2.117.590		0,00%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas/Ormas		2 Pokmas/Ormas		100,00%		2 Pokmas/Ormas		N/A		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			37.564		3.420		1.920		1.920		100,00%		5.340		14,22%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Kali		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		10 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			1.340		5.700		1.200		0		0,00%		5.700		425,41%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		8 kali		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		4 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			2.010		9.200		3.600		3.600		100,00%		12.800		636,87%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			6.389		3.890		2.940		2.940		100,00%		6.830		106,90%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		11 kali		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		10 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			26.673		14.800		3.600		3.600		100,00%		18.400		68,98%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		1 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			10.853		8.820		4.860		4.860		100,00%		13.680		126,05%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		12 kali		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		4 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			6.699		9.000		2.700		2.700		100,00%		11.700		174,64%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		10 kali		8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		8 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			13.399		9.600		3.600		3.600		100,00%		13.200		98,52%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Gayungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			33.497		29.800		2.850		2.850		100,00%		32.650		97,47%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		12 Kali		2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		2 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.072		8.918		2.460		2.460		100,00%		11.378		1061,48%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		12 Kali		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		4 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		17.840		8.150		8.150		100,00%		25.990		86,21%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		10 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.029		4.380		267		207		77,39%		4.587		76,07%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			16.528		13.618		9.500		9.500		100,00%		23.118		139,87%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		10 Kali		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		6 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10.049		5.340		2.670		2.670		100,00%		8.010		79,71%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Kali		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		6 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.675		4.320		1.770		1.770		100,00%		6.090		363,61%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		12 kali		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		6 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			40.196		22.050		2.100		2.100		100,00%		24.150		60,08%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		12 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.675		1.530		1.500		0		0,00%		1.530		91,35%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		8 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan		112,50%		9 Lembaga Kemasyarakatan		112,50%		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		3.780		5.529		0		0,00%		3.780		12,54%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Kali		12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		12 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		9.120		4.800		4.800		100,00%		13.920		46,17%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		8 kali		9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		9 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.675		12.000		6.000		6.000		100,00%		18.000		1074,72%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		16 kali		6 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan		116,67%		7 Lembaga Kemasyarakatan		116,67%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		9.000		4.500		4.500		100,00%		13.500		44,78%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		12 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		120,00%		6 Lembaga Kemasyarakatan		120,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			2.680		9.100		3.000		3.000		100,00%		12.100		451,53%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			26.798		14.300		1.650		1.650		100,00%		15.950		59,52%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		4 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			23.448		21.420		6.300		6.300		100,00%		27.720		118,22%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		12 Lembaga Kemasyarakatan		13 Lembaga Kemasyarakatan		108,33%		13 Lembaga Kemasyarakatan		108,33%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.163		2.520		2.760		2.760		100,00%		5.280		85,67%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Kenjeran	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.025		5.100		3.600		3.600		100,00%		8.700		173,15%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		8 Kali		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		6 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			23.448		15.240		12.520		4.860		38,82%		20.100		85,72%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			8.374		7.500		3.750		3.750		100,00%		11.250		134,34%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		10 Kali		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		5 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			46.839		17.200		4.050		4.050		100,00%		21.250		45,37%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		10 kali		7 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		142,86%		10 Lembaga Kemasyarakatan		142,86%		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			27.783		12.500		9.540		9.540		100,00%		22.040		79,33%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		10 Kali		12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		12 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			18.318		5.430		3.750		3.750		100,00%		9.180		50,11%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 kali		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		10 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			6.298.746		477.080		10.276.912		7.723.018		75,15%		8.200.098		130,19%		
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	480 Lembaga		N/A		420 Lembaga		420 Lembaga		100,00%		420 Lembaga		87,50%		Kec. Bulak	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga		N/A		124 Lembaga		124 Lembaga		100,00%		124 Lembaga		100,00%		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga		N/A		67 Lembaga		67 Lembaga		100,00%		67 Lembaga		100,00%		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga		N/A		52 Lembaga		52 Lembaga		100,00%		52 Lembaga		100,00%		Kec. Gubeng	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga		N/A		100 Lembaga		103 Lembaga		103,00%		103 Lembaga		103,00%		Kec. Jambangan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga		N/A		21 Lembaga		21 Lembaga		100,00%		21 Lembaga		100,00%		Kec. Bulak	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga		N/A		38 Lembaga		43 Lembaga		113,16%		43 Lembaga		113,16%		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga		N/A		50 Lembaga		50 Lembaga		100,00%		50 Lembaga		100,00%		Kec. Pabean Cantian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100,00%	100 pelaku usaha	100,00%	Kec. Pakal	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	62 Unit Usaha	N/A	62 Unit Usaha	62 Unit Usaha	100,00%	62 Unit Usaha	100,00%	Kec. Asemrowo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga	N/A	74 Lembaga	74 Lembaga	100,00%	74 Lembaga	100,00%	Kec. Rungkut	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	100,00%	50 Lembaga	100,00%	Kec. Simokerto	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga	N/A	25 Lembaga	25 Lembaga	100,00%	25 Lembaga	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga	N/A	61 Lembaga	61 Lembaga	100,00%	61 Lembaga	100,00%	Kec. Genteng	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	93 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100,00%	100 Pelaku Usaha	100,00%	Kec. Tandes	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha	117 pelaku usaha	150 pelaku usaha	209 pelaku usaha	139,33%	209 pelaku usaha	139,33%	Kec. Tambaksari	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100,00%	100 Pelaku Usaha	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	N/A	29 Lembaga	29 Lembaga	100,00%	29 Lembaga	100,00%	Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga	N/A	51 Lembaga	51 Lembaga	100,00%	51 Lembaga	100,00%	Kec. Tandes	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga	N/A	156 Lembaga	203 Lembaga	130,13%	203 Lembaga	130,13%	Kec. Wonocolo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha	976 Unit Usaha	116 Unit Usaha	116 Unit Usaha	100,00%	116 Unit Usaha	100,00%	Kec. Wonokromo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha	N/A	140 Unit Usaha	140 Unit Usaha	100,00%	140 Unit Usaha	100,00%	Kec. Semampir	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga	293 Lembaga	288 Lembaga	288 Lembaga	100,00%	288 Lembaga	100,00%	Kec. Sawahan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga	N/A	58 Lembaga	58 Lembaga	100,00%	58 Lembaga	100,00%	Kec. Wonokromo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	110 Pelaku Usaha	110,00%	110 Pelaku Usaha	110,00%	Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga	116 Lembaga	116 Lembaga	116 Lembaga	100,00%	116 Lembaga	100,00%	Kec. Karangpilang	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	90 Unit Kerja	N/A	90 Unit Kerja	91 Unit Kerja	101,11%	91 Unit Kerja	101,11%	Kec. Gubeng	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	84 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	92 Pelaku Usaha	92,00%	92 Pelaku Usaha	92,00%	Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha	N/A	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	100,00%	110 Unit Usaha	100,00%	Kec. Rungkut	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	N/A	26 Lembaga	26 Lembaga	100,00%	26 Lembaga	100,00%	Kec. Benowo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga	N/A	30 Lembaga	30 Lembaga	100,00%	30 Lembaga	100,00%	Kec. Gayungan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga	N/A	53 Lembaga	58 Lembaga	109,43%	58 Lembaga	109,43%	Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	N/A	44 Lembaga	44 Lembaga	100,00%	44 Lembaga	100,00%	Kec. Krembangan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga	N/A	34 Lembaga	34 Lembaga	100,00%	34 Lembaga	100,00%	Kec. Pakal	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	480 Lembaga	478 Lembaga	420 Lembaga	421 Lembaga	100,24%	421 Lembaga	87,71%	Kec. Bubutan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha	176 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100,00%	50 Pelaku Usaha	100,00%	Kec. Sukolilo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	N/A	44 Lembaga	44 Lembaga	100,00%	44 Lembaga	100,00%	Kec. Bubutan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	N/A	29 Lembaga	29 Lembaga	100,00%	29 Lembaga	100,00%	Kec. Karangpilang	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga	N/A	31 Lembaga	31 Lembaga	100,00%	31 Lembaga	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga	242 Lembaga	192 Lembaga	192 Lembaga	100,00%	192 Lembaga	100,00%	Kec. Tegalsari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga		N/A		36 Lembaga		36 Lembaga		100,00%		36 Lembaga		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga		139 Lembaga		120 Lembaga		120 Lembaga		100,00%		120 Lembaga		100,00%		Kec. Gayungan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	29 Lembaga		N/A		20 Lembaga		23 Lembaga		115,00%		23 Lembaga		79,31%		Kec. Genteng	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga		N/A		48 Lembaga		48 Lembaga		100,00%		48 Lembaga		100,00%		Kec. Simokerto	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga		N/A		26 Lembaga		26 Lembaga		100,00%		26 Lembaga		100,00%		Kec. Jambangan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga		N/A		32 Lembaga		32 Lembaga		100,00%		32 Lembaga		100,00%		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga		N/A		17 Lembaga		17 Lembaga		100,00%		17 Lembaga		100,00%		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga		N/A		78 Lembaga		78 Lembaga		100,00%		78 Lembaga		100,00%		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga		N/A		72 Lembaga		72 Lembaga		100,00%		72 Lembaga		100,00%		Kec. Sawahan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		257 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		231 Pelaku Usaha		231,00%		231 Pelaku Usaha		231,00%		Kec. Krembangan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha		919 Potensi usaha		50 Potensi usaha		50 Potensi usaha		100,00%		50 Potensi usaha		100,00%		Kec. Benowo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		N/A		44 Lembaga		44 Lembaga		100,00%		44 Lembaga		100,00%		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		518 pelaku usaha		100 pelaku usaha		102 pelaku usaha		102,00%		102 pelaku usaha		102,00%		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga		N/A		148 Lembaga		148 Lembaga		100,00%		148 Lembaga		100,00%		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga		N/A		34 Lembaga		34 Lembaga		100,00%		34 Lembaga		100,00%		Kec. Wiyung	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga		N/A		52 Lembaga		50 Lembaga		96,15%		50 Lembaga		96,15%		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	37 Lembaga		N/A		38 Lembaga		38 Lembaga		100,00%		38 Lembaga		102,70%		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga		N/A		70 Lembaga		70 Lembaga		100,00%		70 Lembaga		100,00%		Kec. Semampir	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		242 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100,00%		100 Pelaku Usaha		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga		N/A		48 Lembaga		48 Lembaga		100,00%		48 Lembaga		100,00%		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga		N/A		25 Lembaga		26 Lembaga		104,00%		26 Lembaga		104,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha		43 unit usaha		20 unit usaha		20 unit usaha		100,00%		20 unit usaha		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.03.04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			16.079		9.900		7.200		7.200		100,00%		17.100		106,35%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		55 Kali		6 Laporan		6 Laporan		100,00%		6 Laporan		100,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.03.04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			8.039		5.600		3.000		3.000		100,00%		8.600		106,97%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		65 Kali		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.03.04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			9.179		8.640		4.320		4.320		100,00%		12.960		141,19%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Kali		48 Laporan		48 Laporan		100,00%		48 Laporan		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			15.000		4.050		4.320		4.320		100,00%		8.370		55,80%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		50 Kali		48 Laporan		48 Laporan		100,00%		48 Laporan		100,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			51.641		9.000		3.600		3.600		100,00%		12.600		24,40%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		48 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			15.312		14.010		7.200		7.200		100,00%		21.210		138,52%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Kali		48 Laporan		48 Laporan		100,00%		48 Laporan		100,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			19.294		17.640		9.030		9.030		100,00%		26.670		138,23%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		112 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.854		21.030		8.370		8.370		100,00%		29.400		123,25%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		53 Kali		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			25.324		22.920		14.130		14.130		100,00%		37.050		146,31%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		57 Kali		48 Laporan		53 Laporan		110,42%		53 Laporan		110,42%		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			10.049		5.760		3.600		3.600		100,00%		9.360		93,14%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		53 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			42.599		23.760		9.930		9.930		100,00%		33.690		79,09%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		74 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			73.733		37.731		20.583		20.583		100,00%		58.314		79,09%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		51 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			12.863		11.740		5.760		5.760		100,00%		17.500		136,05%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		48 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			10.049		17.280		4.500		4.500		100,00%		21.780		216,74%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		312 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			9.647		8.820		4.200		4.200		100,00%		13.020		134,96%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		54 Kali		3 Laporan		3 Laporan		100,00%		3 Laporan		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			12.059		10.920		13.140		12.990		98,86%		23.910		198,28%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		62 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3.350		8.810		4.320		4.320		100,00%		13.130		391,97%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		48 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			19.294		14.400		10.080		10.080		100,00%		24.480		126,88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		82 Kali		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			17.824		15.700		16.778		16.110		96,02%		31.810		178,47%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		59 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3.182		7.000		480		480		100,00%		7.480		235,06%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		49 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3.350		26.039		43.836		43.786		99,89%		69.825		2084,51%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Kali		48 Laporan		48 Laporan		100,00%		48 Laporan		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			31.822		24.000		18.900		18.900		100,00%		42.900		134,81%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		50 kali		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.854		19.400		6.100		6.100		100,00%		25.500		106,90%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		48 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			16.414		22.200		9.900		9.900		100,00%		32.100		195,57%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		48 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			9.647		8.640		5.040		5.040		100,00%		13.680		141,80%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		49 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			16.414		14.940		7.200		7.200		100,00%		22.140		134,89%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		56 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			28.539		15.820		10.640		10.640		100,00%		26.460		92,71%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		49 Kali		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			14.999		19.880		13.394		13.394		100,00%		33.274		221,84%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		127 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			50.246		25.890		6.840		6.840		100,00%		32.730		65,14%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		80 Kali		4 Laporan		7 Laporan		175,00%		7 Laporan		175,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.448		8.280		11.500		11.500		100,00%		19.780		84,36%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		68 Kali		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.113		17.280		4.500		4.500		100,00%		21.780		94,23%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		100 kali		48 Laporan		48 Laporan		100,00%		48 Laporan		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			71.766		0		81.491		78.861		96,77%		78.861		109,89%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit		N/A		38 Unit		38 Unit		100,00%		38 Unit		223,53%		Kec. Asemrowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			281.439		0		262.058		252.208		96,24%		252.208		89,61%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit		N/A		70 Unit		67 Unit		95,71%		67 Unit		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			302.442		0		622.762		270.658		43,46%		270.658		89,49%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit		N/A		197 Unit		92 Unit		46,70%		92 Unit		127,78%		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			98.701		0		141.647		137.730		97,23%		137.730		139,54%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit		N/A		50 Unit		50 Unit		100,00%		50 Unit		192,31%		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			79.720		0		166.551		162.653		97,66%		162.653		204,03%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit		N/A		94 Unit		94 Unit		100,00%		94 Unit		447,62%		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			134.419		0		175.380		170.358		97,14%		170.358		126,74%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit		N/A		59 Unit		59 Unit		100,00%		59 Unit		184,38%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			130.218		0		418.807		286.793		68,48%		286.793		220,24%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	31 Unit		N/A		328 Unit		60 Unit		18,29%		60 Unit		193,55%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			218.430		0		240.293		215.904		89,85%		215.904		98,84%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit		N/A		58 Unit		55 Unit		94,83%		55 Unit		105,77%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			184.826		0		176.482		169.966		96,31%		169.966		91,96%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		N/A		49 Unit		49 Unit		100,00%		49 Unit		111,36%		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			142.820		0		147.619		133.699		90,57%		133.699		93,61%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit		N/A		38 Unit		71 Unit		186,84%		71 Unit		208,82%		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			121.817		0		132.698		116.889		88,09%		116.889		95,95%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit		N/A		53 Unit		32 Unit		60,38%		32 Unit		110,34%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			294.041		0		422.406		400.278		94,76%		400.278		136,13%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit		N/A		91 Unit		86 Unit		94,51%		86 Unit		122,86%		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			201.628		0		315.260		209.148		66,34%		209.148		103,73%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit		N/A		150 Unit		48 Unit		32,00%		48 Unit		100,00%		Kec. Tegalsari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			184.826		0		191.151		184.621		96,58%		184.621		99,89%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		N/A		51 Unit		51 Unit		100,00%		51 Unit		115,91%		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			159.622		0		247.835		242.049		97,67%		242.049		151,64%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit		N/A		54 Unit		54 Unit		100,00%		54 Unit		142,11%		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			105.015		0		122.955		117.852		95,85%		117.852		112,22%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	25 Unit		N/A		67 Unit		66 Unit		98,51%		66 Unit		264,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			310.843		0		392.303		274.956		70,09%		274.956		88,45%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit		N/A		95 Unit		78 Unit		82,11%		78 Unit		105,41%		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			222.631		0		316.115		299.351		94,70%		299.351		134,46%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit		N/A		89 Unit		85 Unit		95,51%		85 Unit		160,38%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			218.430		0		503.318		491.770		97,71%		491.770		225,14%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit		N/A		108 Unit		108 Unit		100,00%		108 Unit		207,69%		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			193.827		0		562.973		439.110		78,00%		439.110		226,55%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit		N/A		245 Unit		223 Unit		91,02%		223 Unit		437,25%		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			184.826		0		221.111		214.498		97,01%		214.498		116,05%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		N/A		93 Unit		93 Unit		100,00%		93 Unit		211,36%		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			256.236		0		350.155		339.568		96,98%		339.568		132,52%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit		N/A		183 Unit		183 Unit		100,00%		183 Unit		351,92%		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			182.218		0		182.218		175.185		96,14%		175.185		96,14%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit		N/A		48 Unit		48 Unit		100,00%		48 Unit		100,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			109.215		0		98.701		94.892		96,14%		94.892		86,89%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit		N/A		26 Unit		26 Unit		100,00%		26 Unit		100,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			121.817		0		154.397		140.934		91,28%		140.934		115,69%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit		N/A		38 Unit		37 Unit		97,37%		37 Unit		127,59%		Kec. Karangpilang	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			243.634		0		1.173.227		391.635		33,38%		391.635		160,75%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit		N/A		464 Unit		363 Unit		78,23%		363 Unit		625,86%		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			126.017		0		180.137		169.686		94,20%		169.686		134,65%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit		N/A		119 Unit		118 Unit		99,16%		118 Unit		393,33%		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			155.422		0		276.376		269.218		97,41%		269.218		173,22%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	37 Unit		N/A		69 Unit		69 Unit		100,00%		69 Unit		186,49%		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			142.820		0		560.544		286.343		51,08%		286.343		200,49%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit		N/A		522 Unit		455 Unit		87,16%		455 Unit		1338,24%		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			151.221		0		393.191		321.147		81,68%		321.147		212,37%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit		N/A		230 Unit		214 Unit		93,04%		214 Unit		594,44%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			327.645		0		754.360		373.538		49,52%		373.538		114,01%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit		N/A		415 Unit		102 Unit		24,58%		102 Unit		130,77%		Kec. Tambaksari	
141	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.087.451		4.447.960		10.031.934		7.875.918		78,51%		12.323.878		242,24%		
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sawahan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Bubutan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		97,06%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wonocolo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Pakal	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		99,70%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		86,30%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gayungan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tandes	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		94,73%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Bulak	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Semampir	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		99,34%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Krembangan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		86,27%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Benowo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wiyung	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Simokerto	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Genteng	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		94,38%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Jambangan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		86,57%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gubeng	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		97,87%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wonokromo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			5.087.451		4.447.960		10.031.934		7.875.918		78,51%		12.323.878		242,24%		
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100,00%		15 Lokasi		100,00%		Kec. Bubutan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		25 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		100,00%		24 Lokasi		100,00%		Kec. Gayungan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		16 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100,00%		15 Lokasi		100,00%		Kec. Sambikerep	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi		28 lokasi		17 lokasi		17 lokasi		100,00%		17 lokasi		100,00%		Kec. Tambaksari	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi		16 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		100,00%		15 lokasi		100,00%		Kec. Tandes	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100,00%		12 Lokasi		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan		14 Lokasi		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Krembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	14 Lokasi	14 Lokasi	14 Lokasi	100,00%	14 Lokasi	100,00%	Kec. Benowo	
			Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	100,00%	Kec. Bulak	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	100,00%	12 Lokasi	100,00%	Kec. Lakarsantri	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	9 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	100,00%	8 Lokasi	100,00%	Kec. Wonocolo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	6 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	100,00%	5 Lokasi	100,00%	Kec. Asemrowo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	49 Lokasi	24 Lokasi	24 Lokasi	100,00%	24 Lokasi	100,00%	Kec. Gubeng	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	17 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	100,00%	15 Lokasi	100,00%	Kec. Pakal	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	24 Lokasi	24 Lokasi	24 Lokasi	100,00%	24 Lokasi	100,00%	Kec. Sukomanunggal	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 Lokasi	43 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi	100,00%	20 Lokasi	100,00%	Kec. Wonokromo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi	22 Lokasi	21 Lokasi	21 Lokasi	100,00%	21 Lokasi	100,00%	Kec. Tegalsari	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	15 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	100,00%	12 Lokasi	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi	N/A	14 lokasi	14 lokasi	100,00%	14 lokasi	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	100,00%	10 Lokasi	100,00%	Kec. Kenjeran	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	15 lokasi	15 lokasi	15 lokasi	100,00%	15 lokasi	100,00%	Kec. Wiyung	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	23 Lokasi	22 Lokasi	22 Lokasi	100,00%	22 Lokasi	100,00%	Kec. Rungkut	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	100,00%	16 Lokasi	100,00%	Kec. Semampir	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	28 Lokasi	14 Lokasi	16 Lokasi	114,29%	16 Lokasi	114,29%	Kec. Sawahan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	100,00%	12 Lokasi	100,00%	Kec. Genteng	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	100,00%	15 Lokasi	100,00%	Kec. Gunung Anyar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	82 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100,00%		8 Lokasi		9,76%		Kec. Jambangan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100,00%		8 Lokasi		100,00%		Kec. Karangpilang	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi		28 Lokasi		26 Lokasi		29 Lokasi		111,54%		29 Lokasi		111,54%		Kec. Mulyorejo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		29 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100,00%		14 Lokasi		100,00%		Kec. Simokerto	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi		11 Lokasi		11 Lokasi		12 Lokasi		109,09%		12 Lokasi		109,09%		Kec. Sukolilo	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			155.275		136.533		143.342		134.911		94,12%		271.445		174,82%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		363 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			177.759		138.045		267.562		252.340		94,31%		390.385		219,61%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			262.249		244.917		268.323		231.581		86,31%		476.498		181,70%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			154.683		162.897		256.959		238.435		92,79%		401.332		259,45%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		373 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			169.641		125.513		184.573		148.686		80,56%		274.199		161,63%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Pabean Cantian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			88.039		81.774		216.491		210.984		97,46%		292.759		332,53%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		363 Kali		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			145.639		147.766		200.998		190.645		94,85%		338.411		232,36%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			199.767		171.739		219.152		200.512		91,49%		372.251		186,34%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		360 kali		360 Laporan		360 Laporan		100,00%		360 Laporan		100,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			167.097		155.725		203.291		187.136		92,05%		342.861		205,19%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		355 kali		360 Laporan		361 Laporan		100,28%		361 Laporan		100,28%		Kec. Jambangan	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			120.295		110.359		308.905		283.555		91,79%		393.913		327,46%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		361 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			194.561		149.885		476.262		428.076		89,88%		577.961		297,06%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		364 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			157.159		171.817		205.788		185.604		90,19%		357.421		227,43%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			171.867		134.154		194.561		179.692		92,36%		313.846		182,61%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			142.826		128.044		260.140		254.976		98,02%		383.020		268,17%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		364 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			309.309		212.218		259.777		238.946		91,98%		451.164		145,86%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		365 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			146.260		168.006		268.616		265.875		98,98%		433.881		296,65%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		363 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			188.612		134.105		336.592		313.654		93,19%		447.759		237,40%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		394 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			154.049		104.739		276.306		265.669		96,15%		370.408		240,45%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		407 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gunung Anyar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			131.678		119.309		123.398		115.252		93,40%		234.560		178,13%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		365 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			152.729		129.192		126.156		124.527		98,71%		253.720		166,12%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			152.234		145.816		854.548		145.887		17,07%		291.702		191,61%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		361 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			154.049		151.932		248.509		238.705		96,05%		390.637		253,58%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		408 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			151.735		140.083		313.544		292.283		93,22%		432.366		284,95%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		360 kali		6 Laporan		6 Laporan		100,00%		6 Laporan		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			157.866		140.685		390.982		340.735		87,15%		481.420		304,96%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			165.164		107.253		1.060.539		122.039		11,51%		229.291		138,83%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		366 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			31.844		75.484		89.548		89.548		100,00%		165.032		518,25%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		365 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			165.173		114.508		353.347		341.551		96,66%		456.060		276,11%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		360 Kali		360 Laporan		360 Laporan		100,00%		360 Laporan		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			316.157		240.053		688.137		667.168		96,95%		907.222		286,95%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		365 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			156.952		133.182		806.669		779.648		96,65%		912.830		581,60%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		362 Kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			129.511		125.209		176.460		165.066		93,54%		290.275		224,13%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		360 Kali		6 Laporan		6 Laporan		100,00%		6 Laporan		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			117.273		147.019		252.461		242.232		95,95%		389.250		331,92%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		360 kali		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Benowo	
142	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.265.386		561.516		461.706		437.862		94,84%		999.378		78,98%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wonokromo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Genteng	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wonocolo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		93,10%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tandes	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		85,37%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Jambangan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Bubutan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Benowo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		85,71%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Wiyung	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Sawahan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Pakal	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Krembangan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Rungkut	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gayungan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		96,88%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Gubeng	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Semampir	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Bulak	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		80,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		94,74%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.265.386		561.516		461.706		437.862		94,84%		999.378		78,98%		
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	19 Kasus		43 Kasus		34 Kasus		34 Kasus		100,00%		34 Kasus		178,95%		Kec. Bubutan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus		73 Kasus		73 Kasus		73 Kasus		100,00%		73 Kasus		100,00%		Kec. Karangpilang	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100,00%		2 Topik		100,00%		Kec. Kenjeran	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang		2 Topik		35 Orang		35 Orang		100,00%		35 Orang		100,00%		Kec. Krembangan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Laporan		19 Kasus		7 Laporan		9 Laporan		128,57%		9 Laporan		128,57%		Kec. Krembangan	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100,00%		2 Topik		100,00%		Kec. Sukolilo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100,00%		2 Topik		100,00%		Kec. Karangpilang	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100,00%		2 Topik		100,00%		Kec. Bubutan	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100,00%		2 Topik		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus		27 Kasus		150 Kasus		150 Kasus		100,00%		150 Kasus		100,00%		Kec. Rungkut	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus		42 kasus		2 kasus		12 kasus		600,00%		12 kasus		600,00%		Kec. Tambaksari	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		27 Kasus		20 Kasus		21 Kasus		105,00%		21 Kasus		105,00%		Kec. Tandes	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus		37 Kasus		37 Kasus		37 Kasus		100,00%		37 Kasus		100,00%		Kec. Sambikerep	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100,00%		2 Topik		100,00%		Kec. Genteng	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100,00%		2 Topik		100,00%		Kec. Wonocolo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		28 Kasus		20 Kasus		21 Kasus		105,00%		21 Kasus		105,00%		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus		44 Kasus		44 Kasus		44 Kasus		100,00%		44 Kasus		100,00%		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		47 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		100,00%		24 Kasus		100,00%		Kec. Kenjeran	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	4 Kasus	25 Kasus	24 Kasus	18 Kasus	75,00%	18 Kasus	450,00%	Kec. Mulyorejo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 Kasus	70 Kasus	36 Kasus	36 Kasus	100,00%	36 Kasus	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Benowo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus	17 Kasus	45 Kasus	45 Kasus	100,00%	45 Kasus	100,00%	Kec. Gayungan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	30 Kasus	24 Kasus	28 Kasus	116,67%	28 Kasus	116,67%	Kec. Gubeng	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Rungkut	
			Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	100,00%	Kec. Bulak	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Tandes	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Gubeng	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	28 Kasus	41 Kasus	38 Kasus	39 Kasus	102,63%	39 Kasus	139,29%	Kec. Jambangan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	100,00%	20 Kasus	100,00%	Kec. Asemrowo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus	8 Kasus	7 Kasus	18 Kasus	257,14%	18 Kasus	257,14%	Kec. Simokerto	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus	N/A	24 kasus	20 kasus	83,33%	20 kasus	83,33%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus	39 Kasus	62 Kasus	61 Kasus	98,39%	61 Kasus	98,39%	Kec. Tegalsari	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	23 Kasus	24 Kasus	24 Kasus	100,00%	24 Kasus	100,00%	Kec. Benowo	
			Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34 Orang	N/A	33 Orang	36 Orang	109,09%	36 Orang	105,88%	Kec. Bulak	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik	2 topik	2 topik	2 topik	100,00%	2 topik	100,00%	Kec. Gayungan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus	12 Kasus	9 Kasus	12 Kasus	133,33%	12 Kasus	133,33%	Kec. Genteng	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Sambikerep	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	39 kasus	24 kasus	26 kasus	108,33%	26 kasus	108,33%	Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Jambangan	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Lakarsantri	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus	21 Kasus	21 Kasus	21 Kasus	100,00%	21 Kasus	10,00%	Kec. Semampir	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	25 Kasus	12 Kasus	19 Kasus	158,33%	19 Kasus	158,33%	Kec. Pakal	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus	99 Kasus	144 Kasus	144 Kasus	100,00%	144 Kasus	100,00%	Kec. Sawahan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus	24 kasus	24 kasus	24 kasus	100,00%	24 kasus	100,00%	Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Wonokromo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	1 Topik	50,00%	1 Topik	50,00%	Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Mulyorejo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Semampir	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus	6 Kasus	2 Kasus	5 Kasus	250,00%	5 Kasus	250,00%	Kec. Sukolilo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Simokerto	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Sawahan	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Tambaksari	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	2 Topik	2 Topik	100,00%	2 Topik	100,00%	Kec. Asemrowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100,00%		2 Topik		100,00%		Kec. Tegalsari	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus		24 kasus		24 kasus		24 kasus		100,00%		24 kasus		100,00%		Kec. Wiyung	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		100,00%		2 Topik		100,00%		Kec. Wiyung	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus		62 Kasus		88 Kasus		88 Kasus		100,00%		88 Kasus		100,00%		Kec. Wonocolo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus		91 Kasus		12 Kasus		12 Kasus		100,00%		12 Kasus		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.05.2.01.02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			16.079		4.140		9.810		9.750		99,39%		13.890		86,39%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		2 Kali		120 Orang		145 Orang		120,83%		145 Orang		120,83%		Kec. Bubutan	
	7.01.05.2.01.02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			18.011		6.440		4.800		4.800		100,00%		11.240		62,41%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang		2 kali		35 Orang		35 Orang		100,00%		35 Orang		100,00%		Kec. Krembangan	
	7.01.05.2.01.02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			11.883		11.060		3.710		3.710		100,00%		14.770		124,30%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	77 Orang		4 Kali		57 Orang		57 Orang		100,00%		57 Orang		74,03%		Kec. Genteng	
	7.01.05.2.01.02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			13.399		5.320		6.160		6.160		100,00%		11.480		85,68%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang		4 kali		53 Orang		72 Orang		135,85%		72 Orang		118,03%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.05.2.01.02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			30.147		7.600		6.020		6.000		99,67%		13.600		45,11%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		4 Kali		60 Orang		60 Orang		100,00%		60 Orang		50,00%		Kec. Pabean Cantian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		10.230		3.480		2.760		79,31%		12.990		129,27%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang		4 kali		100 Orang		92 Orang		92,00%		92 Orang		92,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			9.379		7.200		2.200		2.200		100,00%		9.400		100,22%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		3 kali		40 Orang		40 Orang		100,00%		40 Orang		25,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		8.980		2.300		2.300		100,00%		11.280		112,25%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	166 Orang		4 Kali		50 Orang		50 Orang		100,00%		50 Orang		30,12%		Kec. Pakal	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		9.160		2.520		2.520		100,00%		11.680		116,23%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		5 kali		84 Orang		84 Orang		100,00%		84 Orang		52,50%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			22.510		16.600		2.100		2.100		100,00%		18.700		83,07%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang		4 Kali		4 Orang		4 Orang		100,00%		4 Orang		100,00%		Kec. Jambangan	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			6.699		1.750		1.000		1.000		100,00%		2.750		41,05%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang		2 Kali		74 Orang		74 Orang		100,00%		74 Orang		39,57%		Kec. Karangpilang	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.079		7.760		5.200		5.200		100,00%		12.960		80,60%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang		4 Kali		80 Orang		80 Orang		100,00%		80 Orang		100,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			8.039		11.350		1.400		1.400		100,00%		12.750		158,60%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang		4 kali		218 Orang		218 Orang		100,00%		218 Orang		52,15%		Kec. Kenjeran	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.749		10.100		4.698		4.698		100,00%		14.798		88,35%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang		5 Kali		561 Orang		89 Orang		15,86%		89 Orang		15,86%		Kec. Semampir	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			51.920		8.420		3.000		3.000		100,00%		11.420		22,00%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang		2 Kali		94 Orang		100 Orang		106,38%		100 Orang		106,38%		Kec. Tegalsari	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		3.980		2.500		2.500		100,00%		6.480		64,48%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	43 Orang		4 kali		50 Orang		50 Orang		100,00%		50 Orang		116,28%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			23.898		4.600		3.440		3.440		100,00%		8.040		33,64%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	36 Orang		4 kali		69 Orang		69 Orang		100,00%		69 Orang		191,67%		Kec. Tandes	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			18.011		6.760		10.400		10.400		100,00%		17.160		95,28%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		4 Kali		160 Orang		160 Orang		100,00%		160 Orang		100,00%		Kec. Sukolilo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			7.933		5.890		3.800		3.800		100,00%		9.690		122,15%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang		4 kali		60 Orang		60 Orang		100,00%		60 Orang		75,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		4.360		5.200		5.200		100,00%		9.560		95,13%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	52 Orang		4 kali		78 Orang		78 Orang		100,00%		78 Orang		150,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			24.610		8.580		7.530		7.530		100,00%		16.110		65,46%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	123 Orang		4 kali		91 Orang		91 Orang		100,00%		91 Orang		73,98%		Kec. Sawahan	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		6.400		8.900		8.900		100,00%		15.300		152,25%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		2 Kali		120 Orang		107 Orang		89,17%		107 Orang		89,17%		Kec. Rungkut	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			32.616		26.900		1.200		1.200		100,00%		28.100		86,15%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	230 Orang		10 Kali		40 Orang		40 Orang		100,00%		40 Orang		17,39%		Kec. Gayungan	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			29.707		13.600		2.000		2.000		100,00%		15.600		52,51%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		5 Kali		86 Orang		86 Orang		100,00%		86 Orang		71,67%		Kec. Wonokromo	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.079		9.650		5.460		5.460		100,00%		15.110		93,98%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		5 Kali		160 Orang		141 Orang		88,13%		141 Orang		88,13%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			2.512		3.620		1.300		1.080		83,08%		4.700		187,08%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34 Orang		2 kali		33 Orang		36 Orang		109,09%		36 Orang		105,88%		Kec. Bulak	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			23.766		10.160		1.890		1.890		100,00%		12.050		50,70%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	58 Orang		4 Kali		63 Orang		63 Orang		100,00%		63 Orang		108,62%		Kec. Wonocolo	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			33.671		16.170		13.560		13.560		100,00%		29.730		88,29%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang		4 kali		663 Orang		310 Orang		46,76%		310 Orang		46,76%		Kec. Tambaksari	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.414		6.700		4.070		4.070		100,00%		10.770		65,62%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	36 Orang		4 Kali		69 Orang		69 Orang		100,00%		69 Orang		191,67%		Kec. Gubeng	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			5.025		2.000		1.260		1.260		100,00%		3.260		64,88%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	164 Orang		2 Kali		164 Orang		80 Orang		48,78%		80 Orang		48,78%		Kec. Asemrowo	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.414		7.040		360		360		100,00%		7.400		45,08%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang		4 Kali		12 Orang		12 Orang		100,00%		12 Orang		100,00%		Kec. Benowo	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		6.975		6.439		6.439		100,00%		13.414		166,85%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		43 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Bubutan	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			29.778		4.292		6.439		6.439		100,00%		10.731		36,04%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan		19 kasus		7 Laporan		9 Laporan		128,57%		9 Laporan		128,57%		Kec. Krembangan	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			13.399		6.439		7.154		5.544		77,50%		11.983		89,43%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan		25 kasus		1 Laporan		3 Laporan		300,00%		3 Laporan		300,00%		Kec. Mulyorejo	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			13.260		10.731		18.507		10.731		57,98%		21.462		161,86%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Genteng	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			53.595		22.356		8.585		8.585		100,00%		30.941		57,73%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		28 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		7.869		18.243		18.243		100,00%		26.112		259,85%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan		30 kasus		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		1 Laporan		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		6.439		7.200		6.439		89,43%		12.877		160,18%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan		44 kasus		6 Laporan		6 Laporan		100,00%		6 Laporan		100,00%		Kec. Lakarsantri	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		7.154		3.623		3.577		98,73%		10.731		133,48%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan		37 Kasus		37 Laporan		37 Laporan		100,00%		37 Laporan		100,00%		Kec. Sambikerep	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		7.154		8.943		8.943		100,00%		16.097		160,18%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		25 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Pakal	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		0		9.000		0		0,00%		0		0,00%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		24 kasus		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			22.510		2.862		8.000		7.869		98,37%		10.731		47,67%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28 Laporan		47 Kasus		38 Laporan		39 Laporan		102,63%		39 Laporan		139,29%		Kec. Jambangan	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			103.841		32.193		32.193		32.193		100,00%		64.386		62,00%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		73 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Karangpilang	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		7.154		8.585		8.585		100,00%		15.739		195,77%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		47 kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Kenjeran	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			25.917		20.925		20.000		19.852		99,26%		40.778		157,34%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		21 Kasus		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Semampir	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			103.841		3.935		7.154		6.439		90,00%		10.373		9,99%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		39 Kasus		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Kec. Tegalsari	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			100.121		15.023		21.462		21.462		100,00%		36.485		36,44%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		29 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tandes	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			29.778		17.885		17.577		17.527		99,72%		35.412		118,92%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		7 Kasus		4 Laporan		5 Laporan		125,00%		5 Laporan		125,00%		Kec. Sukolilo	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			2.103		358		1.789		715		40,00%		1.073		51,04%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		10 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Simokerto	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			13.399		12.162		8.585		8.585		100,00%		20.747		154,84%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		39 kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		4.292		8.943		8.943		100,00%		13.235		131,70%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		24 kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wiyung	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			21.770		17.170		16.800		16.633		99,01%		33.803		155,27%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		100 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Sawahan	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.049		7.154		8.943		8.585		96,00%		15.739		156,62%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan		27 Kasus		5 Laporan		5 Laporan		100,00%		5 Laporan		100,00%		Kec. Rungkut	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			6.763		5.902		6.439		6.439		100,00%		12.341		182,48%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		17 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gayungan	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			7.149		5.366		6.439		6.439		100,00%		11.804		165,11%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		91 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Wonokromo	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.039		6.796		8.585		8.585		100,00%		15.381		191,32%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		70 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			3.350		6.260		2.146		2.146		100,00%		8.406		250,95%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		15 kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Bulak	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			16.308		0		1.000		500		50,00%		500		3,07%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88 Laporan		62 Kasus		88 Laporan		88 Laporan		100,00%		88 Laporan		100,00%		Kec. Wonocolo	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			27.844		21.600		14.289		13.800		96,58%		35.400		127,14%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		45 kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Tambaksari	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			16.414		14.308		14.666		14.666		100,00%		28.974		176,52%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		30 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Gubeng	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			15.550		11.983		8.406		8.406		100,00%		20.389		131,12%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		20 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Asemrowo	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			16.414		6.260		14.308		14.308		100,00%		20.568		125,31%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		23 Kasus		12 Laporan		12 Laporan		100,00%		12 Laporan		100,00%		Kec. Benowo	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
143	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.375.109		12.686.357		13.391.669		12.456.137		93,01%		25.142.494		174,90%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		94,35%		100%		96,94%		96,94%		96,94%		96,94%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.120.103		9.175.051		10.497.455		9.889.790		94,21%		19.064.840		209,04%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.120.103		9.175.051		10.497.455		9.889.790		94,21%		19.064.840		209,04%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		100%		26 Orang/bulan		26 Orang/bulan		100,00%		26 Orang/bulan		104,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			191.802		174.147		125.089		110.694		88,49%		284.840		148,51%		
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			191.802		174.147		125.089		110.694		88,49%		284.840		148,51%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		95.83 %		5 Paket		5 Paket		100,00%		5 Paket		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.063.203		3.337.160		2.769.124		2.455.653		88,68%		5.792.813		114,41%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		94.08 %		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.063.203		3.337.160		2.769.124		2.455.653		88,68%		5.792.813		114,41%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		94.08 %		4 Laporan		4 Laporan		100,00%		4 Laporan		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
144	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			846.659		868.011		3.978.425		2.516.972		63,27%		3.384.983		399,80%		
			Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	94%		87,29%		91%		95,30%		104,73%		95,30%		101,38%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			846.659		868.011		3.978.425		2.516.972		63,27%		3.384.983		399,80%		
			Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	291 Lembaga		N/A		298 Lembaga		298 Lembaga		100,00%		298 Lembaga		102,41%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			846.659		868.011		3.978.425		2.516.972		63,27%		3.384.983		399,80%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	291 Orang		12 Kali		298 Orang		298 Orang		100,00%		298 Orang		102,41%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
145	8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			8.317.287		16.455.525		78.917.958		78.907.505		99,99%		95.363.030		1146,56%		
			Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%		520,00%		46%		46,92%		102,00%		46,92%		46,92%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**			8.317.287		16.455.525		78.917.958		78.907.505		99,99%		95.363.030		1146,56%		
			Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	70 Lembaga		52 Lembaga		70 Lembaga		80 Lembaga		114,29%		80 Lembaga		114,29%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.2.01.04	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**			8.317.287		16.455.525		78.917.958		78.907.505		99,99%		95.363.030		1146,56%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang		154 Orang		140 Orang		150 Orang		107,14%		150 Orang		107,14%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
146	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			59.370		52.454		70.473		65.547		93,01%		118.001		198,75%		
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	100%		25,96%		40%		40,77%		101,93%		40,77%		40,77%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			59.370		52.454		70.473		65.547		93,01%		118.001		198,75%		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	30 Lembaga		27 Lembaga		31 Lembaga		26 Lembaga		83,87%		26 Lembaga		86,67%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			59.370		52.454		70.473		65.547		93,01%		118.001		198,75%		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan		2 kali		2 Laporan		2 Laporan		100,00%		2 Laporan		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
147	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			823.293		688.432		719.078		625.399		86,97%		1.313.831		159,58%		
			Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			823.293		688.432		719.078		625.399		86,97%		1.313.831		159,58%		
			Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya	8 Lembaga		9 Lembaga		8 Lembaga		10 Lembaga		125,00%		10 Lembaga		125,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			823.293		688.432		719.078		625.399		86,97%		1.313.831		159,58%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang		42 Kali		690 Orang		792 Orang		114,78%		792 Orang		114,78%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
148	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			12.624.896		9.655.933		27.067.091		26.941.525		99,54%		36.597.457		289,88%		
			Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%		100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%		98,59%		100%		100%		100,00%		100%		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			12.624.896		9.655.933		27.067.091		26.941.525		99,54%		36.597.457		289,88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Ouput Sub)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	18 Lembaga		10 Lembaga		17 Lembaga		17 Lembaga		100,00%		17 Lembaga		94,44%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	12 Lembaga		11 Lembaga		14 Lembaga		15 Lembaga		107,14%		15 Lembaga		125,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.04	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**			11.875.472		9.215.506		26.589.557		26.473.379		99,56%		35.688.884		300,53%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Orang		411 Kali		17 Orang		23 Orang		135,29%		23 Orang		127,78%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.05	**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**			749.424		440.427		477.534		468.146		98,03%		908.573		121,24%		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan		73 Kali		44 Laporan		65 Laporan		147,73%		65 Laporan		147,73%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Jumlah anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									**10.821.334.253**		**9.490.318.148**								
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Seluruh Program(%)												**98.60%**	**87.70%**			**95.85%**	**83.65%**		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program												**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Perlunya percepatan penanganan kemiskinan;
2. Perlunya penanganan terhadap pengangguran terbuka;
3. Perlunya penanganan inflasi;
4. Perlunya menjaga ketahanan pangan;
5. Perlunya penguatan kerjasama antar daerah dan lembaga untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan;
6. Masih perlunya optimalisasi jaringan drainase untuk mengatasi titik genangan dan pencegahan terjadinya banjir;
7. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan sesuai rencana tata ruang;
8. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting;
9. Masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta penurunan stunting;
10. Masih perlunya peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah;
11. Perlunya peningkatan kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata;
12. Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak;
13. Masih perlunya peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni;
14. Masih perlunya optimalisasi peningkatan keamanan dan ketertiban Masyarakat pasca Pemilihan Umum, Pemlihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
15. Perlunya upaya peningkatan pemberdayaan pemuda dan penguatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;

16. Masih perlunya pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Pendidikan

1. Masih belum optimalnya kualitas tenaga pendidik sesuai standar;
2. Perlunya optimalisasi pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;
3. Perlunya optimalisasi kualitas tenaga pendidik dan kualitas lembaga PAUD (TK);
4. Masih adanya lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi.

2.3.2.2 Kesehatan

1. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain Covid-19, HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, obesitas;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar;
3. Masih perlunya peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal terutama pada Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) binaan Pemerintah Kota Surabaya yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi;
5. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan;
6. Perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan;
7. Perlunya optimalisasi rujukan berjenjang;
8. Perlunya optimalisasi pemanfaatan jaminan kesehatan semesta dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan jaminan kesehatan.

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB;

2. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Surabaya karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal;
3. Perlunya optimalisasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan dan/atau konservasi energi pada gedung pemerintah dan swasta;
4. Penyediaan layanan air bersih terkendala lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota;
5. Adanya jaringan jalan yang v/c rasio-nya masih kurang optimal.

2.3.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman;
2. Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni;
3. Masih diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi;
4. Terbatasnya ketersediaan lahan untuk penyediaan perumahan.

2.3.2.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Masih adanya temuan pelanggaran peraturan;
2. Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Masih adanya kejadian kebakaran yang antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat.

2.3.2.6 Sosial

1. Perlunya pemutakhiran data Keluarga Miskin secara berkala;
2. Belum optimalnya proses reunifikasi diakibarkan adanya PPKM di daerah asal PPKS;
3. Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2.3.2.7 Tenaga Kerja

1. Masih diperlukannya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran;
2. Pengawasan ketenagakerjaan. perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan;

3. Masih diperlukannya perluasan kesempatan bekerja.

2.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya pemahaman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh beberapa pemangku kepentingan;
2. Perlunya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan terkait pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan;
3. Perlunya optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pencapaian indikator Kelurahan/kampung layak anak;
4. Perlunya optimalisasi upaya perlindungan perempuan dan anak utamanya dalam pencegahan dan penanganan permasalahan perempuan dan anak antara lain *trafficking* dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2.3.2.9 Pangan

1. Masih ditemukannya bahan pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan karena rendahnya kesadaran masyarakat;
2. Perlunya perluasan kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, sehingga akan mampu mendukung stabilitas harga pangan;
3. Perlunya optimalisasi potensi *urban farming* baik di masyarakat maupun pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan.

2.3.2.10 Pertanahan

1. Masih perlunya pengadaan tanah/bangunan untuk kepentingan umum;
2. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya;
3. Perlunya optimalisasi pengamanan dan sertifikasi aset pertanahan.

2.3.2.11 Lingkungan Hidup

1. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penataan Ruang Terbuka Hijau;
2. Masih diperlukan peningkatan asilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R;

3. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan;
5. Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi;
6. Belum optimalnya pelaksanaan penerbitan persetujuan lingkungan dikarenakan adanya transisi perubahan peraturan dengan diterbitkannya PP 5 tahun 2021, PP 22 tahun 2021 dan Permenlh 4 tahun 2021 dan adanya perpindahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan di provinsi dan pusat.

2.3.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Perlunya optimalisasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil secara *online*.

2.3.2.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Perlunya upaya peningkatan cakupan jumlah peserta KB baru;
2. Perlunya upaya peningkatan akses Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP);
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun;
4. Perlunya penguatan dan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam mendukung tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB di tingkat desa/kelurahan.

2.3.2.14 Perhubungan

1. Masih diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah di sekitar Surabaya;
2. Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum;
3. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.

2.3.2.15 Komunikasi dan Informatika

1. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan.

2.3.2.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Perlunya optimalisasi penggunaan ePeken oleh masyarakat untuk meningkatkan akses pemasaran produk UMKM dan toko kelontong;
2. Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan BPPOM;
3. Masih ada koperasi masih belum berklasifikasi AAB dan kurang optimalnya pertumbuhan anggota koperasi serta peningkatan volume usaha koperasi;
4. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional.

2.3.2.17 Kepemudaan dan Olahraga

1. Kurang meratanya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik, terutama pada kampung-kampung padat penduduk;
2. Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga atlet dan pelatih profesional.

2.3.2.18 Statistik

1. Perlunya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta yang tervalidasi dan terintegrasi;
2. Perlunya optimalisasi pelaksanaan forum satu data.

2.3.2.19 Persandian

1. Perlunya optimalisasi integrasi sistem antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
2. Perlunya perlindungan keamanaan data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.3.2.20 Kebudayaan

1. Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal;
2. Perlunya fasilitasi kelompok seni untuk dapat tampil di fasilitas publik.

2.3.2.21 Perpustakaan

1. Perlunya optimalisasi pemanfaatan Perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

2.3.2.22 Kearsipan

1. Perlunya optimalisasi kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan;
2. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal.

2.3.2.23 Kelautan dan Perikanan

1. Perlunya optimalisasi pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan;
2. Perlunya pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan.

2.3.2.24 Pariwisata

1. Perlunya optimalisasi upaya peningkatan kunjungan di objek wisata;
2. Perlunya optimalisasi kawasan wisata dan integrasi antar kawasan wisata;
3. Perlunya optimalisasi kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata.

2.3.2.25 Pertanian

1. Perlunya optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya pertanian *(urban farming),* peternakan dan perikanan;
2. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan;
3. Perlunya pencegahan dan penanganan terhadap dampak munculnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.

2.3.2.26 Perdagangan

1. Perlunya optimalisasi pengoperasioan sentra dan pasar;
2. Perlunya optimalisasi pengelolaan pasar tradisional.

2.3.2.27 Sekretariat Daerah

1. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku;

2. Masih adanya kecamatan yang batas wilayahnya perlu penegasan yang sah;
3. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat.

2.3.2.28 Perencanaan

1. Masih diperlukannya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
2. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan data dan evaluasi.

2.3.2.29 Keuangan

1. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah;
2. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
3. Belum validnya pendataan obyek pajak/retribusi yang dinamis;
4. Belum optimalnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dikarenakan petunjuk teknis yang terlambat dan perubahan petunjuk teknis atau kebijakan pada tahun berjalan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan Belanja Tidak Terduga.

2.3.2.30 Kepegawaian

1. Perlunya optimalisasi sistem merit dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
2. Perlunya penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan secara berkala.

2.3.2.31 Pendidikan dan Pelatihan

1. Perlunya optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai.

2.3.2.32 Penelitian dan Pengembangan

1. Masih adanya hasil penelitian dan pengembangan yang belum dimanfaatkan/ditindaklanjuti;
2. Perlunya penguatan kelembagaan bidang urusan penelitian dan pengembangan.

2.3.2.33 Inspektorat Daerah

1. Perlunya optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah;
3. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah.

2.3.2.34 Kecamatan

1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia utamanya pemberi pelayanan langsung bagi masyarakat;
2. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Perlunya optimalisasi pelaksanaan Dana Kelurahan.

2.3.2.35 Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian pada tahun 2024 diperkirakan masih menghadapi berbagai tekanan. Meski kondisi ekonomi global telah membaik dibandingkan setahun yang lalu, ketidakpastian masih mengintai. Dalam WEO Updates Januari 2024, IMF mengidentifikasi beberapa risiko utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Risiko-risiko tersebut meliputi peningkatan ketegangan geopolitik, suku bunga global yang tetap tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lemah di Tiongkok, serta volatilitas pasar keuangan dan risiko krisis utang. Selain itu, volatilitas harga komoditas yang disebabkan oleh perubahan iklim dan faktor geopolitik, serta fragmentasi yang meluas juga dapat menghambat prospek pertumbuhan ekonomi global.

Prospek pertumbuhan ekonomi global yang melambat juga dipengaruhi oleh faktor demografi yang tidak menguntungkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan bahwa rasio ketergantungan akan terus meningkat akibat fenomena populasi yang menua. Beberapa negara maju, seperti negara-negara Eropa dan Jepang, saat ini memiliki rasio ketergantungan lebih dari 50 %. Dengan angka kelahiran yang terus menurun, fenomena ini dapat memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi global karena turunnya permintaan global. Penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua juga dapat mengurangi angkatan kerja, sehingga menurunkan produktivitas suatu negara. Selain itu, populasi yang menua meningkatkan kebutuhan belanja untuk dana pensiun, fasilitas kesehatan, dan jaring pengaman sosial.

Di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat beberapa tren utama yang menawarkan peluang bagi pasar negara berkembang. Tren ini terutama berasal dari rekonfigurasi rantai pasok global, digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat, serta dekarbonisasi ekonomi.

Dalam jangka menengah, tren-tren ini berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang. Selain itu, isu populasi yang menua di negara maju dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Namun, optimalisasi peluang ini sangat bergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural di masing-masing negara.

Dampak ketidakstabilnya ekonomi global juga berdampak terhadap perekonomian nasional. Hal itu dikonfirmasi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang menunjukkan capaian yang moderat. Berdasarkan data BPS Nasional, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 %. Meskipun ditengah ketidakpastian global, capaian kinerja ekonomi nasional menunjukkan kinerja baik. Hal itu ditunjukkan oleh keberhasilan pemerintah mempertahankan capaian pertumbuhan ekonomi dikisaran 5 %. Peran konsumsi domestik masih menjadi kunci utama kuatnya ekonomi nasional disertai investasi yang terus tumbuh seiring peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peran sektor pariwisata juga terus menunjukkan menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Mempertimbangkan capaian di tahun 2023 dan kondisi ekonomi terkini, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) memprediksi perekonomian nasional tahun 2024 yang tertuang dalam APBN 2024 tumbuh pada kisaran 5,2 %. Dari sisi pengeluaran, peluang besarnya investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat. Sementara dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh sektor-sektor potensial yang mengalami pertumbuhan positif.

Bappenas juga menargetkan sasaran indikator makro lainya di tahun 2024. Indikator ketenagakerjaan yang diwakilkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan di kisaran 5,0-5,7 %. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan ditargetkan turun dikisaran 9 hingga 8,5 %.

Sementara indikator indeks gini yang mencerminkan pemerataan pendapatan ditargetkan dikisaran 0,381-0,384. Indeks pembangunan manusia ditargekan dikisaran 73,99 – 74,02. Target-target tersebut tentunya dibuat dan diwujudkan melalui program-program kerja pemerintah disertai arah kebijakan srategis yang tertuang dalam prioritas nasional (PN) RKP Tahun 2024.

Kinerja positif juga ditunjukkan oleh perekonomian Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,95 % (yoy). Sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan dan partanian. Dari sisi pengeluaran, kinerja perekonomian Jawa Timur ditopang peningkatan permintaan domestik masyarakat yang tercermin dari kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan net ekspor antardaerah pada tahun 2023

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan berkisar antara batas bawah 4,7 % hingga 5,49 %. Perhitungan perkiraan tersebut merupakah hasil proyeksi oleh beberapa lembaga akademisi maupun lembaga ekonomi yang tertuang dalam dokuman Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026. Selanjutnya arah kebijakan makro Jawa Timur kedepan dilaksanakan melalui pemerataan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dilakukan melalui optimalisasi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditargetkan dilaksanakan melalui perciptaan stabilitas makro ekonomi yang didukung investasi. Selanjutnya juga dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sektor primer dan sekunber serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Selaras dengan nasional dan Jawa Timur, meski mengalami perlambatan akibat pengaruh kondisi ekonomi global, namun kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2023 sudah cukup memuaskan. Masih kuatnya ketahanan ekonomi Kota Surabaya menjaga pertumbuhan ekonomi stabil tinggi. Sama seperti periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya konsisten tumbuh tinggi diatas capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur.

Kinerja konsumsi yang dibarengi tingginya daya beli menjadi fundamental ekonomi Kota Surabaya selama ini. Hampir 60 (enam puluh) % komponen konsumsi manyarakat menjadi kontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Selanjutnya konsistensi daya tarik investasi di Kota Surabaya juga menjadi daya dukung yang turut mengakselerasi. Capaian pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi selama ini juga merefleksikan besarnya produktivitas pelaku usaha serta sektor-sektor potensial di Kota Surabaya yang terus menggeliat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kinerja investasi berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 mencapai 37 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 34 triliun.

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, optimisme juga ditunjukkan oleh kinerja makro lainnya yakni kinerja indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan. Untuk kinerja pembangunan manusia, pada tahun 2023 nilai IPM Kota Surabaya sebesar 83,99 atau tumbuh sebesar 0,67 poin dibanding tahun 2022 yang sebesar 83,32. Selain itu, data kemiskinan juga menunjukkan penurunan seiring membaiknya kondisi perekonomian di Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin semakin berkurang menjadi sebanyak 4,65 % di tahun 2023 yang mulanya mencapai 4,72 % ditahun 2022. Perbaikan juga ditunjukkan oleh kinerja tingkat pengangguran Kota Surabaya yang mengalami penurunan yang mulanya sebesar 7,62 % pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,76 % di tahun 2023.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kota Surabaya

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan ekonomi yang terus berlanjut salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan nilai PDRB dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja peningkatan nilai tersebut besarannya menyerupai kondisi pra pandemi Covid-19. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh akumulatif meningkatnya nilai tambah hampir seluruh komponen pembentuk PDRB. Perkembangan perekonomian Kota Surabaya tahun 2019 hingga tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2019 s/d Tahun 2023* (dalam juta)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	928.398,16	889.331,91	917.595,42	982.815,39	1.026.186,70
B	Pertambangan dan Penggalian	33.531,33	31.943,80	32.761,34	33.392,98	32.513,35
C	Industri Pengolahan	109.205.137,20	107.416.294,34	113.535.139,44	126.030.898,75	135.434.984,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.362.300,29	2.237.615,57	2.417.167,25	2.742.046,30	3.728.710,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	791.147,83	824.951,94	872.320,90	932.750,33	968.113,96
F	Konstruksi	54.649.310,30	51.969.408,77	55.273.538,87	61.408.502,94	64.940.579,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	161.032.248,06	149.246.755,05	163.509.913,19	184.610.467,40	201.432.925,47
H	Transportasi dan Pergudangan	31.240.415,60	29.794.090,41	30.518.851,24	36.260.418,47	42.834.312,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95.519.341,84	85.618.582,64	91.418.079,71	102.248.698,97	114.627.560,20
J	Informasi dan Komunikasi	30.770.585,80	33.247.669,54	35.273.340,84	36.541.720,23	39.290.062,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.413.339,89	29.183.377,44	30.560.741,63	33.950.422,52	35.852.303,70
L	Real Estate	14.947.568,30	15.354.350,85	15.790.323,11	16.599.139,83	17.213.531,88
M,N	Jasa Perusahaan	14.930.184,77	14.116.912,06	14.543.157,97	15.772.593,51	17.530.932,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.054.990,77	8.238.304,23	8.310.975,30	8.486.026,22	8.533.021,21
P	Jasa Pendidikan	14.007.607,77	14.540.365,94	14.692.371,72	14.866.084,13	15.784.480,73

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.443.228,45	4.880.587,79	5.220.638,17	5.508.115,81	5.958.216,19
R,S,T, U	Jasa lainnya	8.159.192,66	6.918.915,11	7.340.199,70	8.642.127,81	10.106.272,69
	Produk Domestik Regional Bruto	**580.448.529,01**	**554.509.457,38**	**590.227.115,79**	**655.616.221,58**	**715.294.707,23**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024
*Catatan: *) data sementara*

Perekonomian Kota Surabaya terus tumbuh positif. Seperti yang terangkum pada Tabel III.1, pertumbuhan yang positif ditunjukkan oleh capaian realisasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Pada tahun 2019 nilai PDRB ADHB Kota Surabaya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 meski sedikit mengalami kontraksi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Pada 2019 PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar Rp580.448.529,01 juta dan hingga akhir tahun 2023 menghasilkan nilai tambah sebesar Rp715.294.707,23 juta. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Surabaya dikontribusi oleh peningkatan dari semua lapangan usaha pembentuknya terkecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati tiga terbesar pemberi kontribusi tertinggi bagi perekonomian Kota Surabaya hingga saat ini. Terkait pekembangan terkini, pada tahun 2023, PDRB ADHB untuk lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai sektor yang merupakan sektor terbesar menghasilkan nilai tambah sebesar Rp201.432.925,47 juta. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Industri Pengolahan dan diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2023 masing masing sebesar Rp135.434.984,12 juta dan sebesar Rp114.627.560,20 juta.

Selaras dengan realisasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surabaya yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel III.2, nilai PDRB ADHK Kota Surabaya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 juga mengalami peningkatan, terkecuali tahun 2020. Pada tahun 2019 nilai PDRB ADHK Kota Surbaya sebesar Rp410.879.306,14 juta meningkat menjadi sebesar Rp459.030.719,58 juta di tahun 2023. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan nilai tambah sebesar Rp128.814.587,77 juta pada tahun 2023. Jumlah ini mewakili kontribusi sebesar 28,06% dari seluruh lapangan usaha penyumbang PDRB Kota Surabaya. Sementara lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan nilai tambah sebesar Rp87.392.236,59 juta.

Tabel III.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2019 s/d Tahun 2023* (dalam Juta)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	576.221,53	547.994,90	554.054,69	573.236,82	576.177,55
B	Pertambangan dan Penggalian	20.782,09	19.464,04	19.479,83	19.094,55	17.844,90
C	Industri Pengolahan	77.271.868,81	76.384.521,77	79.366.597,57	84.567.579,11	87.392.236,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.546.272,08	1.449.668,99	1.538.145,94	1.661.665,76	2.174.083,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	605.979,60	630.336,37	665.833,73	680.003,79	696.386,15
F	Konstruksi	40.576.452,62	38.387.739,29	40.070.071,57	42.633.575,68	44.772.953,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	116.305.502,48	106.340.867,71	114.183.332,32	122.122.627,45	128.814.587,77
H	Transportasi dan Pergudangan	20.497.977,43	19.477.422,82	19.874.938,33	22.684.941,35	25.217.168,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.898.688,76	56.053.239,21	57.221.633,11	62.076.385,35	66.946.110,99
J	Informasi dan Komunikasi	27.531.903,71	29.511.280,46	31.281.790,23	32.264.418,48	34.446.030,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.187.832,54	19.231.210,98	19.324.709,68	19.648.801,34	20.445.326,71
L	Real Estate	10.784.959,46	11.000.304,15	11.179.684,13	11.634.820,68	11.916.338,17
M,N	Jasa Perusahaan	9.474.538,92	8.801.216,28	8.974.255,48	9.490.093,03	10.278.169,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	4.867.861,44	4.754.525,35	4.748.920,17	4.756.347,15	4.759.414,54

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
	dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	9.668.100,19	9.934.443,75	9.993.042,98	10.001.195,71	10.447.847,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.254.593,89	3.539.299,11	3.722.145,29	3.782.452,79	3.932.734,49
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.821.770,58	4.872.889,81	5.007.190,09	5.671.102,07	6.197.308,43
	Produk Domestik Regional Bruto	**410.879.306,14**	**390.936.424,98**	**407.725.825,13**	**434.268.341,12**	**459.030.719,58**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah,2024
*Catatan: *) data sementara*

Di lihat dari kontribusi sektor pembentuk perekonomian Kota Surabaya, struktur perekonomian Kota Surabaya memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran sektor tersier dalam menopang perekonomian Kota Surabaya dilihat dari peranan sektor Perdagangan dan Jasa. Kondisi ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2023 yang sedikit mengalami perlambatan, dimana selaras dengan perekonomian pusat dan global membuat beberapara sektor lapangan usaha Kota Surabaya juga melambat. Kondisi itu ditunjukkan oleh dua sektor terbesar Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2023 lapangan usaha ini memberikan peranan terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar 28,06 % yang sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 28,12 %. Hal yang sama juga dialami oleh kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan, dimana pada tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 19,04 % yang mulanya sebesar 19,47 %. Artinya selama tahun 2023 Industri Pengolahan produktivitasnya turun sebesar 0,40 %. Melemahnya kinerja perdagangan besar maupun kecil tersebut berdampak terhadap kinerja lapangan usaha Industri pengolahan akibat menurunnya permintaan masyarakat.

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki kecendurangan terus meningkat. Sejak tahun 2021 hingga 2023 lapangan usaha ini terus meningkat. Pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 14,03 % dan meningkat ditahun 2022 sebesar 14,29 %. Nilai tersebut meningkat kembali di tahun 2023 peranannya menjadi sebesar 14,58 %.Terus meningkatnya sektor ini masih terdapat base effect Kebijakan pelonggaran yang ini mendorong kegiatan operasional hotel dan restoran dengan kapasitas maksimal menjadi faktor mendorong pertumbuhan sektor ini tumbuh lebih tinggi. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat Kota Surabaya yang tinggi akan makanan minuman jadi mendorong semakin maraknya penyedia makanan minuman jadi (resto, cafe, warung kopi dll) yang tumbuh di Kota Surabaya.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan kontribusi, dimana pada tahun 2022 sebesar 5,22 % menjadi 5,49 %. Lapangan usaha ini mengalami peningkatan peranan diindikasi seiring tingginya belanja online sehingga aktivitas pergudangan meningkat.

Meningkatnya belanja online juga mendorong kebutuhan pada sektor transportasi dan pergudangan semakin meningkat.

Tabel III.3
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 s/d Tahun 2023*
(dalam %)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
		%	%	%	%	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	18,81	19,54	19,47	19,47	19,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	0,37	0,38	0,38	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15
F	Konstruksi	9,88	9,82	9,83	9,82	9,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,31	27,2	28	28,12	28,06
H	Transportasi dan Pergudangan	4,99	4,98	4,87	5,22	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,31	14,34	14,03	14,29	14,58
J	Informasi dan Komunikasi	6,7	7,55	7,67	7,43	7,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,67	4,92	4,74	4,52	4,45
L	Real Estate	2,62	2,81	2,74	2,68	2,60
M,N	Jasa Perusahaan	2,31	2,25	2,2	2,19	2,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	1,22	1,16	1,10	1,04
P	Jasa Pendidikan	2,35	2,54	2,45	2,30	2,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,91	0,91	0,87	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,42	1,25	1,23	1,31	1,35
	Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2024
*Catatan: *) data sementara*

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2023 perekonomian Kota Surabaya tumbuh positif sebesar sebesar 5,70 %. Meskipun capaian pada tahun ini lebih lamban dibanding tahun 2022 yang mencapai angka yang lebih tinggi yakni sebesar 6,51 % namun ekonomi Kota Surabaya terjaga tumbuh stabil di atas angka 5 %. perlambatan selaras dengan kinerja ekonomi pusat maupun provinsi yang mengalami pertumbuhan dengan kondisi yang sama. Kondisi ekonomi global saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan, mulai dari aksi geopolitik ekonomi yang mengganggu kestabilan ekonomi dunia, perlambatan ekonomi negara-negara maju seperti Tiongkok, ketidakstabilan harga baik karena permintaan ataupun ketersediaan, serta volatilas harga komoditas.

Kinerja ekonomi Kota Surabaya patut diapresiasi karena masih tumbuh cukup tinggi di tengah kondisi ekonomi fluktuatif yang terjadi selama tahun 2023. Masih tingginya capaian kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2023 juga hasil dari keberhasilan pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga daya beli masyarakat Kota Surabaya tetap tinggi melalui pengendalian harga barang dan jasa di Kota Surabaya. Selain itu, untuk pendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melalukan berbagai program seperti program peningkatan investasi melalui pelayanan investasi maupun perizinan, pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, pemberdayaan UMKM, penyediaan akses pekerjaan serta peningkatan sektor pariwisata di Kota Surabaya.

Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2019 - 2023*

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	6,09
2020	-4,85
2021	4,29
2022	6,51
2023*	5,70

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2024
**) data sementara*

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dilihat dari sisi penawaran, pada tahun 2023 terbentuk dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya. Terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih terkontraksi yakni lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Seperti yang terangkum dalam grafik batang, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni pengadaan listrik dan gas sebesar 30,84 %. Lapangan usaha ini tumbuh pesat dikarenakan karena tingginya kebutuhan akan listrik dan gas untuk menunjang seluruh aktivitas masyarakat di Kota Surabaya sehingga pemintaan akan komoditas tersebut sangat tinggi.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua yakni transportasi dan pergudangan sebesar 11, 16 %. Transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi dikarenakan peran sektor transportasi merupakan sarana penting dalam aktivitas perekonoamian. Sebagai moda mobilitas dan aktivitas masyarakat, tingkat mobilitas yang tinggi mengindikasikan semakin produktif suatu perekonomian.

Lapangan usaha tertinggi selanjutnya tumbuh pada kisaran 5 hingga 10 %, secara berurutan yakni jasa lainnya (9,28 %), jasa perusahaan (8,30 %), penyediaan akomodasi dan makan minum (7,84 %), informasi dan komunikasi (6,76 %), diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor (5,48 %), kontruksi (5,02 %). Sisanya tumbuh kisaran kurang dari 5 %. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2023 yakni Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar -6,54 %.

c. Tingkat Inflasi

Nilai Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 terjaga dalam kisaran sasaran. Pada awal tahun 2023 Kota Surabaya menetapkan target inflasi pada kisaran 2,5 +- 1 %, selaras dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Perkembangan pada desember 2023 menunjukkan inflasi Kota Surabaya year on year sebesar 3,03 %.inflasi yang terjaga dalam nilai kisarannya merupakan wujud keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2023. Nilai inflasi pada tahun 2023 capaiannya lebih rendah

dibanding nilai inflasi pada tahun 2022 yang mencapai sebesar 6,59 %.

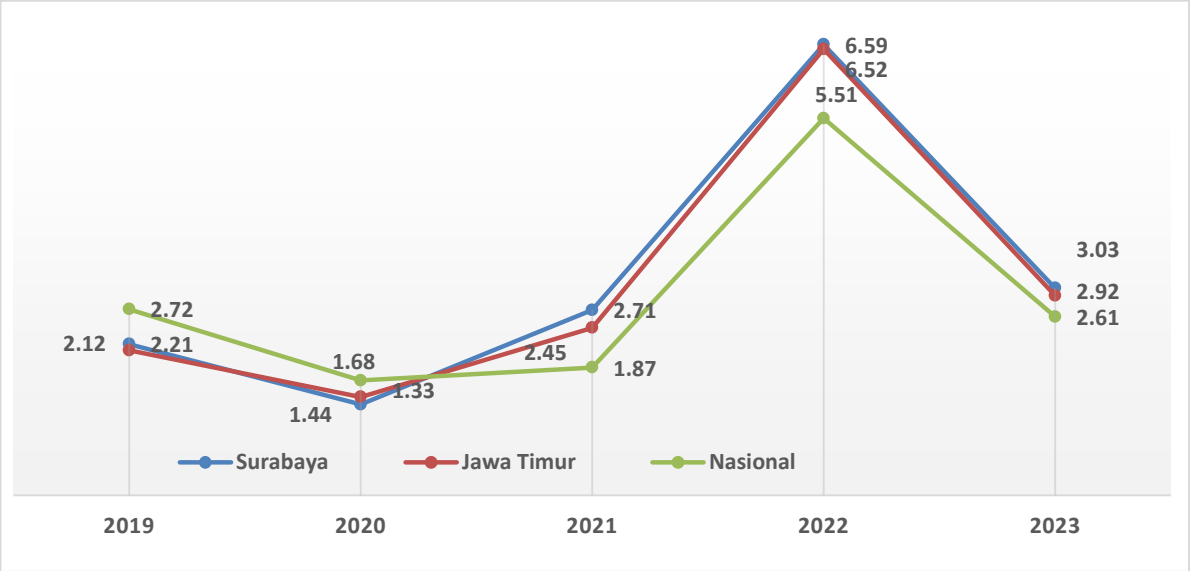

Gambar III.1
Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2019- 2023 (%)

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, 2023, diolah

Inflasi Kota Surabaya yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh 10 kelompok pengeluaran mengalami inflasi sisanya 1 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang berkontribusi tertinggi menyumbang inflasi Kota Surabaya di tahun 2023 secara berurutan yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau (6,36 %), perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (4,43 %), perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,41 %) dan penyediaan makanan dan minuman/restoran (3,34 %).

Kelompok Makanan, Minuman dan tembakau menjadi kelompok tertinggi yang menyumbang inflasi tahun 2023. Hal itu disebabkan karena ketiga sub pembentuknya menyumbang inflasi, tertinggi pada Sub kelompok rokok dan tembakau menyumbang sebesar 6,89 % diikuti subkelompok makanan sebesar 6,67 % dan minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,51 %. Sub kelompok makanan dikontribusi oleh komoditas-komoditas bahan pagan yang disebabkan selain karena periode musiman yang menyebabkan ketersediaan stok dipasaran terbatas, juga dikarenakan banyak sedikitnya permintaan. Untuk Sub kelompok rokok dan tembakau dikontribusi oleh tren peningkatan harga pada rokok kretek

filter yang merupakan dampak dari peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 10% pada awal tahun 2023.

Kelompok yang berperan tinggi selanjutnya yakni perawatan pribadi dan jasa lainya. Pada tahun 2023 kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalmai inflasi sebesar 4,43 %, atau tertinggi kedua setelah kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau. Selain karena permintaan yang tinggi akan perawatan pribadi, peningkatan harga komoditas emas yang meningkat selaras dengan kondisi ekonomi yang cukup berfluktuasi selama ini menjadi faktor pendorong peningkatan permintaan emas sebagai asset aman, peningkatan permintaan tersebut berdampak pada kenaikan harga emas secara general di pasaran.Kelompok pakaian dan alas kaki memberikan kontribusi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 sebesar 3,41 %. Dari 2 (dua) kelompok pembentuknya, inflasi pada sub kelompok alas kaki mengalami inflasi sebesar 7,28 %, sementara subkelompok pakaian mengalami inflasi yang lebih rendah yakni 2,57 %. Tekanan inflasi pada kelompok ini umumnya terjadi pada periode pertengahan tahun, dimana permintaan meningkat sejalan dengan pola tahunan di saat persiapan masuknya tahun ajaran baru sekolah pada bulan Juli pertengahan tahun.

Inflasi Kelompok Makanan dan MInuman/Restoran menjadi urutan keempat yang mengalami inflasi tinggi yang mengalami inflasi sebesar 3,34 %. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini dikontribusi oleh 3 kelompok sub pembentuknya. Secara berurutan, sub kelompok rokok dan tembakau mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 6,89 % selanjutnya sub kelompok makanan yang mengalami inflasi sebesar 6,67 % dan sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,51 %. Untuk sub kelompok makanan didorong oleh beberapa komoditas bahan makanan yang mengalami peningkatan harga baik karena terganggunya persediaan, anomali cuaca, pola musiman maupun faktor lainnya.

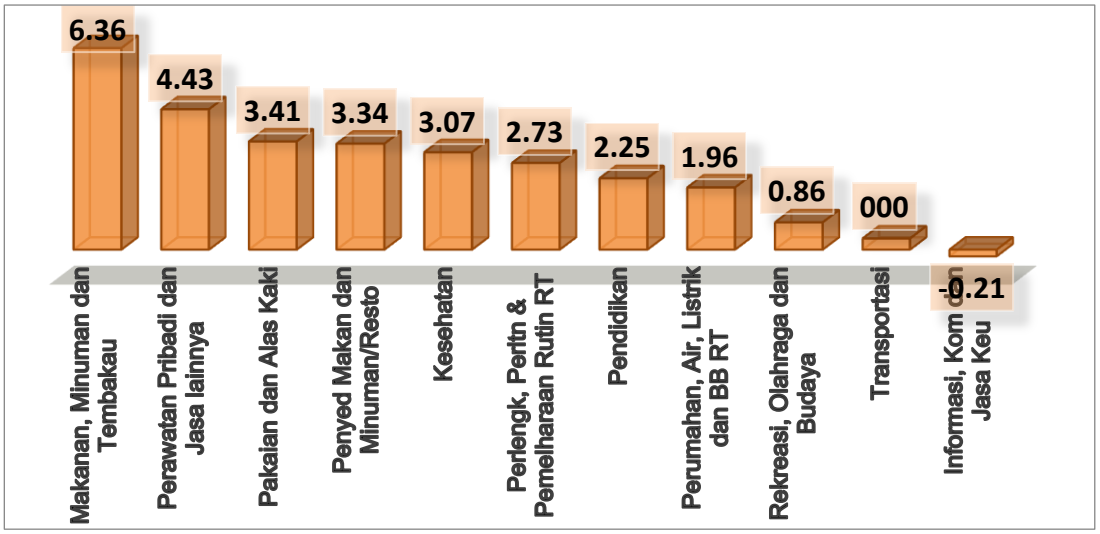

Gambar III.2
Grafik Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2023

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024, diolah

Jika dilihat dari jenis komoditasnya, 10 (sepuluh) komoditas tertinggi yang menyumbang inflasi Kota Surabaya selama tahun 2023 antara lain beras, cabai rawit, tarif air minum PAM, cabai merah, emas perhiasan, kontrak rumah, akademi perguruan tinggi, rokok kretek filter, sewa rumah dan bawang putih. Sementara 10 (sepuluh) komoditas yang menjadi penahan laju inflasi pada tahun 2023 antara lain telur ayam ras, bensin, minyak goreng, bawang merah, tomat, telepon selular, semangka, daging sapi, sawi hijau dan melon.

Selama pada tahun 2023 komoditas beras menjadi komoditas yang berkontribusi cukup signifikan terhadap inflasi di Kota Surabaya. Peningkatan harga beras di Peningkatan harga beras didorong oleh semakin menipisnya pasokan akibat penurunan produksi padi. Penurunan produksi padi di Jawa Timur disebabkan oleh rendahnya curah hujan akibat fenomena anomali cuaca El Nino. Selanjutnya penurunan produksi selanjutnya berdampak terhadap peningkatan harga gabah kering dan giling sehingga mendorong peningkatan harga beras di pasaran. Selain itu, permintaan yang tinggi juga disebabkan oleh percepatan pelaksanaan bantuan sosial sehingga mengakibatkan persediaan dipasaran mendorong persediaan dipasaran terbaas.

Komoditas yang juga tergolong penyumbang inflasi tertinggi pada subkelompok pangan yakni bumbu-bumbuan seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang putih. Cabai rawit dan cabai merah yang merupakan tergolong holtikultura

memiliki volatillitas yang cukup tinggi, dimana sering kali menjadi penyumbang inflasi akibat penurunan produktivitas, daya simpan yang pendek dan sangat bergantung dengan anomali cuaca dan faktor lainnya. Seiring dengan tingginya permintaan baik kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga (hotel restoran dan katering) menjadikan semakin tinggi juga kontribusi komoditas terhadap inflasi. Sementara untuk komoditas bawang putih mengalmai inflasi disebabkan oleh produksi yang menurun akibat cuaca el Nino sementara permintaan tetap tinggi dan realisasi impor yang kurang optimal karena produksi di daerah asal impor juga mengalami penurunan produksi.

Untuk kontrak rumah dan sewa rumah masih menjadi faktor tertinggi penyumbang inflasi Kota Surabaya di tahun 2023 sama seperti pola di tahun sebelum-sebelumnya. Sampai saat ini, permintaan akan hunian sementara seperti sewa maupun kontrak rumah di Kota Surabaya masih cukup tinggi. Selain dikarenakan harga rumah di Surabaya sudah tidak terjakau lagi, meningkatnya inflasi pada sewa rumah dan kontrak rumah untuk tahun 2023 juga didorong oleh peningkatan tarif air minum PAM. Di awal tahun 3023 perusahan air minum PAM Kota Surabaya melakukan penyesuaian tarif air minum PAM seiring meningkatnya biaya oprasional perusahaan. Selain tariff listrik, tariff air minum PAM merupakan komponen dari penentuan penetapan biaya sewa rumah sehingga meningkatnya tariff air minum PAM otomatis membuat para pemilik hunian sewa/kontrak memutuskan untuk menaikkan biaya sewa bulannya.

d. Investasi

Komponen investasi meupakan salah satu komponen terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB dari sisi pengeluaran. Peran investasi penting untuk menstimulus perekonomian Kota Surabaya sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Tabel III.5
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2019 –Tahun 2023

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2019	Rp 16.777.246.236.711	Rp 2.442.653.778.989
2020	Rp 16.356.162.161.751	Rp 1.258.527.150.916
2021	Rp 26.367.999.200.000	Rp 2.847.062.089.924
2022	Rp 32.360.553.538.640	Rp 2.537.261.412.162
2023	Rp 34.810.311.974.810	Rp 2.525.167.120.000

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, 2023

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, nilai total investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Nilai investasi Kota Surabaya tahun 2023 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp34.810.311.974.810. Sementara investasi dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 2.525.167.120.000. Sehingga total realisasi investasi Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar Rp 37.335.479.094.810.

e. Ekspor

Kinerja ekspor non migas Kota Surabaya selama tahun 2022 menunjukkan kinerja positif, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai realiasi ekspor non migas Kota Surabaya sebesar US$20.735.891.937 atau menurun sebesar 8,98 %. Lebih rendahnya realisasi ekspor non migas Kota Surabaya dipengaruhi oleh perlambatan kinerja ekonomi mitra dagang Kota Surabaya akibat ancaman resesi global. Disamping itu, adanya kebijakan untuk tarif ekspor maupun bea keluar untuk komoditas-komoditas tertentu turut menjadi faktor yang mempengaruhi turunnya kinerja ekspor Kota Surabaya pada tahun 2022.

Ditinjau dari komoditasnya, komoditas perhiasan/permata menjadi komoditas tertinggi yang diminati para importir selama tahun 2021. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya ekspor perhiasan/permata, yang mulanya sebesar

US$1.579.696.859 di tahun 2021 menjadi sebesar US$1.910.211.837 di tahun 2022. Kondisi Komoditas ekspor non migas tertinggi selanjutnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perdagangan Kota Surabaya terangkum dalam tabel 1.3. Jika dilihat komposisi, jenis komoditas ekspor non migas Kota Surabaya yang pada tahun 2021 hampir sama dengan jenis komoditas di tahun 2020 namun variasi besaran nilainya yang berbeda.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja impor non migas Kota Surabaya. Realisasi kinerja impor non migas Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar US$21.466.323.294 sementara realiasi pada tahun 2021 menunjukkan angka yang lebih rendah yakni US$19.568.405.393. Artinya, sepanjang tahun 2022 kinerja impor Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 8,84 % dibanding tahun 2021. Jika dilihat dari komposisinya, komoditas tertinggi masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana komoditas impor non migas Kota Surabaya mayoritas merupakan barang modal maupun inventori bahan baku serta barang konsumsi yang dipenuhi dari luar daerah maupun luar negeri. Adanya peningkatan nilai realisasi impor Kota Surabaya tahun 2022 dapat merefleksikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Surabaya pada tahun 2022 lebih produktif dibanding pada tahun 2022 yang ditunjukkan dari permintaan para pelaku usaha akan input produksi yang menunjang kebutuhan produksi selama tahun 2022.

Tabel III.6
Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya
Tahun 2018 – 2022

Nilai/Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor (US$)	18,120,064,879	17,278,974,907	17,278,974,907	22,780,677,395	20.735.891.93
Impor (US$)	17,368,048,068	15,382,235,848	15,382,235,848	19,568,405,393	21.466.323.294

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2023

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2019 ke tahun 2020 mempunyai tren meningkat dengan angka tingkat pengangguran yang mulanya sebesar 5,87 % menjadi 9,79 %. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara

lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan keterampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja yang utamanya banyak terjadi ketika pandemi Covid-19.

Berdasarkan data rilis Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 7,62 % dari yang sebelumnya sebesar 9,68 % pada tahun 2021 atau turun sebesar 2,06 %. Penurunan TPT terus belanjut menjadi 6,76 % di tahun 2023. Penurunan TPT Kota Surabaya yang cukup signifikan disebabkan oleh kebijakan pengurangan pengangguran khususnya difokuskan pada pengangguran akibat Covid-19. Penurunan ini merupakan sinyal efektivitas kebijakan yang diterapkan di Kota Surabaya sehingga membuat penduduk angkatan kerja yang sebelumnya terdorong keluar dari pasar kerja, dapat kembali terserap kdalam kategori penduduk yang bekerja dengan kriteria paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir.

Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, nilai TPT Kota Surabaya tahun 2022 didominasi oleh penduduk berpendidikan SMA ke atas. kondisi seperti ini juga terjadi pada periode-periode sebelumnya di mana penduduk bekerja di Kota Surabaya mayoritas sudah berpendidikan tinggi. Mutu pendidikan tenaga kerja erat kaitannya dengan nilai produktivitas yang dihasilkan pada suatu wilayah. Semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, maka semakin tinggi nilai produktivitas yang bisa dihasilkan.

Tabel III.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2019 - 2023

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2019	5,87%
2020	9,79%
2021	9,68%
2022	7,62%
2023	6,76%

Sumber data: BPS Jawa Timur, 2023

3.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2024 dan 2025

Kondisi perekonomian secara umum pada tahun 2024 diperkirakan masih tumbuh positif meskipun cenderung termoderasi. Tertahannya pertumbuhan tumbuh lebih tinggi utamanya dipengaruhi oleh faktor global. Masih tingginya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlanjutnya hingga saat ini serta tidak stabilnya kondisi moneter bank sentral berdampak terhadap perekonomian nasional dari sisi perdagangan dan investasi. Meskipun demikian, tekanan yang terjadi saat ini tidak sama seperti dampak pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian terkontraksi tajam. Berdasarkan rilis BPS Nasional, ekonomi Indonesia di akhir tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 % (y-on-y).

Ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan terus tumbuh di tahun 2025. Bappenas menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 pada kisaran 5,2 %, dan pada tahun 2025 diperkirakan mengalami pertumbuhan di kisaran 5,1-5,5 %. Melihat perkembangan terkini, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan masih tumbuh kuat, yakni dikisaran 6,1 % dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang terjadi. Salah satu sasaran pembangunan yang masih difokuskan ialah pemulihan ekonomi yang menjadi program keberlanjutan pemerintah. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh bergeraknya sektor-sektor riil, kebijakan yang secara mikro dan langsung menyentuh masyarakat serta ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator-indikator ekonomi yang lain. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha potensial Kota Surabaya yakni lapangan

usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih diperkirakan menjadi sektor yang berkontribusi besar menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Surabaya. Selain itu, peralihan status dari pandemi menjadi endemi berdampak terhadap meningkatnya mobiltas masyarakat dan khususnya aktivitas sektor pariwisata. Perkembangan yang positif tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya.

Selanjutnya, kondisi perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2025 juga diperkirakan semakin baik. Di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan tumbuh namun sedikit mengalami perlambatan yakni kisaran 5,5% sampai dengan 6,1 %, proyeksi ini masih sejalan dengan proyeksi yang ditargetkan Provinsi Jawa Timur untuk Kota Surabaya di tahun 2025 sebesar 5,74% - 7,73%. Meskipun ekonomi Surabaya terus bertumbuh namun cenderung melambat, perlambatan ini disebabkan oleh tingginya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi perekonomian yang melamban di berbagai negara memberikan dampak pada ekonomi domestik, terutama melalui sektor perdagangan dan keuangan. Aktivitas perdagangan Kota Surabaya diperkirakan akan mengalami performa yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai hub perdagangan domestik dan internasional, Surabaya sangat rentan terhadap perubahan situasi perdagangan internasional. Faktor-faktor seperti perang di beberapa negara dan disrupsi teknologi serta perubahan pola konsumsi global memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan Kota Surabaya. Sementara kinerja konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tetap menjadi komponen yang konsisten tumbuh positif seiring gigihnya komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian inflasi di Kota Surabaya.

Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Surabaya pada akhir tahun 2023 berdasarkan rilis BPS Kota Surabaya secara year on year (y-on-y) sebesar 3,03 %. Jika dibandingkan pada tahun 2022, Kota Surabaya mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 6,59 %. Sementara untuk tahun 2024, inflasi Kota Surabaya diperkirakan lebih terkendali sehingga inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024

diperkirakan pada kisaran 2,5 ± 1 %. Perkiraan tersebut juga telah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2024. Memperhatikan prospek perekonomian Kota Surabaya di masa yang akan datang, arah kebijakan ekonomi yang disusun diharapkan dapat mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditargetkan.

Pada tahun 2025 kondisi ekonomi Kota Surabaya diperkirakan tumbuh optimis lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi Kota Surabaya diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Meninjau dinamika ekonomi saat ini dan tantangan di masa depan, serta agenda pembangunan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan *untuk* ***"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."*** Kebijakan fiskal tahun 2025 memiliki nilai strategis karena berada dalam masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Substansi kebijakan fiskal 2025 mencakup keberlanjutan program prioritas yang sedang berjalan dan penguatan program unggulan untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia maju. Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas ini diharapkan dapat mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur, pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan serta melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui dua strategi utama: jangka menengah-panjang dan jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang mencakup penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, pertahanan dan keamanan, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Strategi jangka pendek

difokuskan pada keberlanjutan program prioritas saat ini dan penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan konvergensi antar daerah.

Sesuai dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, tema pembangunan tahun 2025 Provinsi Jawa Timur adalah ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan"***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1) Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2) Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3) Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan;
4) Pembangunan infrastuktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan;
5) Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
6) Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan;
7) Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, MUM desa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa;
8) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi;
9) Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup.

Berdasarkan kondisi ekonomi makro dan diselaraskan dengan arah kebijakan tahun 2025 yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 serta berdasarkan masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Musrenbang, maka kebijakan fiskal Kota Surabaya Tahun 2025 diarahkan untuk "***Penguatan Kapasitas Surabaya Untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis".*** Kebijakan ini dimaksud untuk mendorong akselerasi ekonomi yang tidak hanya cepat dan inklusif, tetapi juga berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan posisi tawar Kota Surabaya baik pada level regional maupun global melalui intensifikasi kerjasama dengan pihak-pihak strategis yang sejalan dengan arah pembangunan. Intensifikasi

kerjasama dimaksudkan salah satunya sebagai alternatif pembiayaan pembangunan bersumber selain APBD.

Arah kebijakan ekonomi digunakan untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan. Kondisi perkembangan ekonomi yang sangat dinamis dan fluktuatif mengakibatkan arah kebijakan ekonomi kedepan difokuskan pada aspek penguatan pondasi ekonomi. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global;
2. Menjaga inflasi tetap terkendali pada sasaran target sehingga daya beli tetap terjaga tinggi melalui optimalisasi pengendalian inflasi;
3. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, peningkatan produktivitas baik melalui *urban farming* maupun pemanfaatan aset-aset pemerintah menjadi lahan produktif pertanian;
4. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan melalui ilmu pengetahuan atau teknologi yang dapat diimplementasikan oleh nelayan;
5. Meningkatkan investasi melalui perbaikan kualitas pelayanan dan kemudahan izin berusaha;
6. Meningkatkan investasi meningkatkan investasi dan kerjasama pembiayaan;
7. Percepatan transformasi ekonomi termasuk ekonomi hijau dan ekonomi biru sesuai potensi wilayah;
8. Keberlanjutan program padat karya untuk mengentasan kemiskinan dan meningkatkan golongan masyarakat berpendapatan rendah;
9. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
10. Peningkatan akses lowongan pekerjaan melalui program penyerapan tenaga kerja melalui program melalui event maupun system penyerapan tenaga kerja;
11. Meningkatkan sektor pariwisata melalui keberlanjutan program penataan kawasan wisata; kolaborasi dengan stakeholder pariwisata, usaha perjalanan wisata, pemandu wisata, hotel dan restoran; melakukan event-event dan

promosi wisata dan sejarah serta melakukan pembentukan, pelatihan dan pembinaan kelompok sadar wisata.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya tahun 2025 mengacu pada:

A. Reformasi Struktural yang telah dilakukan Pemerintah Pusat adalah reformasi regulasi pada tingkat undang-undang meliputi :
   1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)
   2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

B. Regulasi teknis untuk menindaklanjuti UU HKPD, Pemerintah Pusat telah menerbitkan :
   1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas dasar Tenaga Listrik yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang mengatur teknis Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) mulai dari Perencanaan, pengalokasian, hingga monitoring dan evaluasi serta pengawasan
   4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan integrasi dari berbagai amanat pengaturan dalam UU HKPD yaitu sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan oleh daerah yang didukung dengan penyajian dan konsolidasi informasi keuangan, monev pendanaan desentralisasi

C. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan prestasi kerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah

produk/hasil yang mengutamakan output. Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusuan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Walikota Nomor Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

D. Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek terdiri dari:

   a. Kebijakan Pajak Daerah:
      1) Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan :
         i. Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah

ii. Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

iii. Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga Listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen (BBNKB)

iv. Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBB-P2 sebagai berikut:

1. Nilai NJOP 0 – 100 juta semula 0,10% menjadi 0,00%
2. Nilai NJOP 100 – 200 juta semula 0,10% menjadi 0,05%
3. Nilai NJOP 200 juta – 1 milyar semula tidak ada perubahan yaitu 0,10%
4. Nilai NJOP 1 milyar – 2 milyar semula 0,20% menjadi 0,15%
5. Nilai NJOP 2 milyar – 10 milyar tidak ada perubahan yaitu 0,20%

6. Nilai NJOP 10 milyar – 50 milyar semula 0,20% menjadi 0,25 %
7. Nilai NJOP 50 milyar ke atas semula 0,20% menjadi 0,30%

v. Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada perubahan untuk tarif BPHTB yaitu sebesar 5%

vi. Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) untuk Pajak Hotel, Restoran, Pajak Peneranga Jalan, Parkir, Hiburan sebagai berikut :

1. PBJT Jasa Perhotelan meliputi hotel tetap sebesar sebesar 10% dan rumah kos semula 5% menjadi tidak dipungut pajaknya
2. PBJT Jasa Makanan dan Minuman meliputi restoran dan katering serta jasa boga tetap sebesar 10%
3. PBJT Tenaga Listrik (PPJ) meliputi PLN rumah tangga semula 8% menjadi10%, PLN Industri Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi tetap sebesar 3%, PLN selain Golongan Industri Pertambangan, Minyak Bumi, dan Gas Alam selain Rumah Tangga semula 5% menjadi 10%, Non PLN tetap sebesar 1,5%
4. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Hiburan) meliputi Tontonan Film tetap sebesar 10%, Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, Busana semula 20% menjadi 10%, Pagelaran Kesenian, Musik, Tari yang bersifat Tradisional semula 5% menjadi 10%, Kontes Kecantikan dan Sejenisnya semula 35% menjadi 10%, Kontes Binaraga tetap 10%, Pameran Seni Budaya, Seni Ukir, Barang Seni, Tumbuhan, Satwa, Hasil Produksi tetap 10%, Pameran Busana, Komputer, Elektronik, Otomotif,

Properti semula 20% menjadi 10%, Diskotik, Karaoke Dewasa, Klub Malam, dan Sejenisnya tetap 50%, Sirkus, Akrobat, Sulap tetap 10%, Permainan, Bilyard, Golf, Bowling semula 35% menjadi 10%, Pacuan Kuda dan Kendaraan Bermotor semula 20% menjadi 10%, Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Spa tetap 50%, Pusat Kebugaran tetap 10%, Pertandingan Olahraga 15% menjadi 10%, Karaoke Keluarga semula 35% menjadi 40%, Permainan Ketangkasan tetap 10%, Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Argo Wisata, Kebun Binatang yang semula tidak ada maka sesuai perda yang baru tarifnya 10%

vii. Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pajak Reklame tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 25%

viii. Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 20%

ix. Peningkatan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ditindaklanjuti pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan adanya opsen yaitu tambahan pajak menurut %tase tertentu meliputi :

1. Pasal 44 dan Pasal 47 Perda 7 Tahun 2023 untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyebutkan tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66 % sedangkan pada regulasi sebelumnya yaitu pasal 94 Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%;

2. Penambahan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mempertimbangkan Surat Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.12.1/12888/202.2/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal: Estimasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

2) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Surabaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi meliputi:
   a) Evaluasi dan Penilaian NJOP Bumi dan Bangunan
   b) Perbaikan peta PBB
   c) Perhitungan target sesuai potensi PBB dan BPHTB dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak
   d) Membangun sistem terintegrasi antara pengelola usaha dengan Pemerintah Kota Surabaya
   e) Memperbarui Nilai Sewa Reklame secara berkala mengikuti nilai uang (*time value of money*) setiap tahunnya
3) Mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak
4) Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital
5) Memanfaatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk peningkatan PAD dari Pajak Daerah antara lain melalui pelaksanaan pertukaran data perpajakan, pemanfaatan data

dan/atau informasi pajak atas pengusaha dan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dalam bidang perpajakan

b. Kebijakan Retribusi Daerah:
   1) Penganggaran retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   2) Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah
   3) Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas dan Kecamatan/Kelurahan supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
   4) Penyesuaian indeks bangunan gedung pada komponen perhitungan retribusi IMB agar tidak memberatkan wajib retribusi khususnya pada rumah tinggal
   5) Penambahan komponen objek pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi terutama pemanfaatan aset daerah
   6) Optimalisasi pemungutan retribusi parkir, baik di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir dengan cara antara lain:
      a) Peningkatan pengawasan pada pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan juru parkir
      b) Penggunaan pembayaran non-tunai
      c) pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pemantauan pemungutan retribusi parkir

7) Optimalisasi pendapatan retribusi parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengupayakan kerja sama dengan pengelola parkir swasta
8) Meningkatkan kerja sama Rumah Sakit Umum Daerah dengan lembaga lain antara lain:
    a) asuransi kesehatan swasta untuk memperluas jangkauan pelayanan RSUD
    b) Perguruan Tinggi untuk praktik klinik
    c) Perusahaan-perusahaan swasta untuk *medical check-up*
9) Optimalisasi layanan Rumah Sakit Umum Daerah dengan layanan dan alat kesehatan yang baru dan mutakhir

c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD:
    1) Kebijakan pengganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain:
        a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi daerah
        b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintahan Daerah
        c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
        d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah
    2) Optimalisasi koordinasi dan/atau pengawasan kepada BUMD dan BUMN

d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
c) Hasil kerja sama daerah
d) Jasa giro
e) Hasil pengelolaan dana bergulir
f) Pendapatan bunga
g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
k) Pendapatan denda pajak daerah
l) Pendapatan denda retribusi daerah
m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
n) Pendapatan dari pengembalian
o) Pendapatan dari BLUD berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa Pendapatan BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD. Pendapatan dari BLUD tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan BLUD pada Dinas Kesehatan
2. Pendapatan BLUD pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie
3. Pendapatan BLUD pada RSUD Bhakti Dharma Husada
4. Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Surabaya Timur memperhatikan mulai beroperasinya Rumah Sakit Surabaya Timur pada bulan September 2024 dan komitmen terkait pelaksanaan BLUD pada Rumah Sakit Surabaya Timur yang tertuang pada Peraturan Walikota terkait Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Surabaya Timur Kota Surabaya yang masih dalam proses penyusunan serta memperhatikan Perraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana bahwa Rumah Sakit Umum Daerah merupakan salah satu obyek retribusi pelayanan kesehatan, sehingga perlunya untuk merencanakan Pendapatan RSUD Surabaya Timur
5. Pendapatan BLUD jasa layanan parkir pada Dinas Perhubungan memperhatikan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya

p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD yang Sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya.
4) Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota

2. Kebijakan Pendapatan Transfer

a) Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Fiskal, sedangkan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi;
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah pada APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut;
c) Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Terakhir;
d) Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer;
e) Integrasi sistem informasi untuk meningkatkan pengelolaan dana

transfer sehingga penerimaan dan penggunaan dana transfer lebih mudah dan lebih maksimal.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   a. Hibah sebagaimana pada Pasal 46 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
   b. Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dana yang berasal dari APBD yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 46 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berdasarkan data pendapatan daerah Kota Surabaya sebagaimana terlihat pada Tabel III.8

Tabel III.8
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya
Tahun 2022 s.d Tahun 2026

No	Uraian	Realisasi TA. 2022 (Audited)	Realisasi TA. 2023 (Audited)	Proyeksi/Target TA. 2024	Proyeksi/Target TA. 2025	Proyeksi/Target TA. 2026
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**5.314.695.257.794**	**5.771.818.530.453**	**6.420.892.151.293**	**8.024.312.956.497**	**8.168.840.826.821**
1.1.1	Pajak Daerah	4.157.521.611.124	4.562.879.779.487	5.061.651.201.188	6.550.224.998.396	6.599.551.271.295
1.1.2	Retribusi Daerah	269.599.560.046	289.382.181.469	393.470.465.818	316.334.245.975	322.760.394.412
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	233.686.218.755	152.380.733.841	222.512.698.894	210.074.787.736	258.533.086.602
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	653.887.867.869	767.175.835.656	743.257.785.393	947.678.924.390	987.996.074.512
1.2	**Pendapatan Transfer**	**3.476.613.421.688**	**3.832.961.233.953**	**4.349.422.316.570**	**3.187.718.030.124**	**3.198.539.039.347**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.516.292.582.738	2.595.300.604.262	2.727.367.254.000	2.694.153.486.882	2.704.974.496.105
1.2.2	Transfer Antar - Daerah Lainnya	960.320.838.950	1.237.660.629.691	1.622.055.062.570	493.564.543.242	493.564.543.242
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	**8.791.308.679.482**	**9.604.779.764.405**	**10.770.314.467.863**	**11.212.030.986.622**	**11.367.379.866.168**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan PD Penghasil Pendapatan, 2024

Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya Per Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada Tabel III.9

Tabel III.9
Realisasi, Target dan Proyeksi Per PD Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2022 s.d Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	Badan Pendapatan Daerah	4.177.250.689.693	4.573.798.966.702	5.061.651.201.188	6.550.224.998.396	5.996.619.634.117
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.848.389.155.761	4.157.105.095.159	4.732.948.556.216	3.536.842.392.105	3.237.919.084.683
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	101.733.121.281	112.508.222.727	144.634.403.064	115.634.403.064	105.861.330.254
4	Dinas Perhubungan	46.291.695.558	53.146.932.313	93.485.041.653	90.080.609.882	82.467.267.003
5	Dinas Lingkungan Hidup	79.520.392.415	84.916.831.126	103.857.367.792	122.455.080.145	112.105.544.172
6	Dinas Kesehatan	147.501.762.677	162.772.987.076	155.872.128.500	176.577.625.200	161.653.814.102
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	248.226.000	720.894.000	650.000.000	750.032.000	686.641.546
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	490.218.000	6.722.815.600	6.958.929.600	7.232.000.000	6.620.773.058
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	3.248.373.740	2.479.038.640	0	0	0
10	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	7.087.935.150	11.751.091.061	8.000.000.000	17.219.090.000	15.763.784.175
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	563.127.080	586.749.000	553.584.000	2.953.584.000	2.703.955.942

No	Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.066.450.000	597.510.000	360.000.000	360.000.000	329.573.880
13	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	209.370.718.921	270.202.075.903	292.316.171.975	307.470.399.714	281.483.924.031
14	RSUD Bhakti Dharma Husada	167.920.381.475	166.541.999.598	167.920.381.475	177.865.015.715	162.832.398.234
15	RSUD Surabaya Timur	0	0	0	105.000.000.000	96.125.715.031
16	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	621.111.831	928.555.500	1.106.702.400	1.365.756.400	1.250.326.767
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.319.900	0	0	0	0
JUMLAH		**8.791.308.679.482**	**9.604.779.764.405**	**10.770.314.467.863**	**11.212.030.986.622**	**10.264.423.766.995**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan PD Penghasil Pendapatan, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, maka Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah. PAD sebagai salah satu sumber daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2023 terealisasi sebesar Rp9.604.779.764.405,- atau 89,56% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian:

1. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp4.562.879.779.487,- atau 89,26%; retribusi daerah sebesar Rp289.382.181.469,- atau 70,44%; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan sebesar Rp152.380.733.841,- atau 68,48%; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp767.175.835.656,- atau 90,58% dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.562.879.779.487,- atau 89,26%. Pajak Daerah secara umum belum mencapai target di tahun 2023 namun sudah lebih baik dari tahun 2022. Tahun 2023 Pemerintah Kota Surabaya memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran pajak daerah agar sektor perekonomian segera pulih, dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730;
2. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke- 730;
3. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Ke- 78;
4. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78;
5. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 78;
6. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga

Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78;

7. Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila;
9. Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Memperingati Hari Ibu;
10. Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam Rangka Memperingati Hari Ibu.

Selain memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran Pajak Daerah, permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah adalah:

1. Masih ada pihak penyelenggara *event* yang mengajukan resitusi, dimana realisasi event hiburan insidentil bergantung pada jumlah pengunjung;
2. Masih adanya titik lokasi yang masih belum terpasang alat perekam *online* untuk pengawasan transaksi parkir dan sebagai pendukung integrasi laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
3. Masih adanya piutang pajak bumi dan bangunan yang belum terbayarkan. Dikarenakan adanya data wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang datanya tidak jelas/tidak ditemukan;
4. Penentuan tarif Pajak Penerangan Jalan yang akan dioptimalkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Belum tersedianya data pendukung potensi pajak Pajak Penerangan Jalan;

6. Minat masyarakat dalam melakukan pengiklanan tidak lagi menggunakan reklame tapi lebih banyak menggunakan *media social.*

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp289.382.181.469,- atau 70,44% dari target Rp410.802.472.144,- meliputi capaian dari retribusi jasa umum sebesar Rp110.182.249.087,- atau 67,88%; retribusi jasa usaha sebesar Rp101.481.005.293,- atau 78,11%; dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp77.718.927.089,- atau 65,55%.

Pada tahun 2023, selain kebijakan pengurangan pajak daerah, Pemerintah Kota juga memberikan keringanan pembayaran retribusi dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730;
2. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan Pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730;
3. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730;
4. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Administratif Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan Pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun;
5. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-78;
6. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada

Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78;

7. Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila;
8. Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila;
9. Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Retribusi Pemakaian Rumah Susun dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan;
10. Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Pelanggaran Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Di Lapangan Pada Saat Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan;
11. Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Ibu.

Meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran Retribusi Daerah, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi daerah, antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan tercapai 38,33% dikarenakan adanya pembangunan gorong-gorong yang mengurangi potensi pengguna parkir tepi jalan umum dan beberapa usaha yang tutup sehingga mengurangi titik parkir tepi jalan umum;
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercapai 65,71%. Atas hal tersebut telah dilakukan upaya operasi gabungan di lapangan dan mengirimkan surat kepada wajib retribusi yang telah habis masa berlaku uji kendaraannya untuk melakukan uji kendaraan;
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir tercapai 31,75% dikarenakan untuk

meringankan beban Masyarakat maka Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan untuk tidak memungut parkir pada halaman kantor pelayanan seperti Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas, titik parkir tersebut yang semula 129 lokasi menjadi 44 lokasi;

4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercapai 63,47% dikarenakan adanya regulasi terkait pegurangan pembebasan atau pengurangan denda antara lain Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730. Selain itu, berkurangnya pembangunan bangunan tinggi sehingga mengurangi permohonan IMB untuk bangunan tinggi, hal mana mengurangi pendapatan dari retribusi IMB. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB sebelum membangun rumah tinggal juga turut mengurangi pendapatan dari IMB.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp152.380.733.841,13 atau 68,48%. Bagian laba yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Surabaya tersebut merupakan *output* pendapatan BUMD dan BUMN di tahun 2023.

Secara rinci Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi:

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN yaitu dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) tercapai Rp12.127.976.955,- atau 100% dari target;
2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tercapai Rp122.729.105.220,- atau 63,64% dari target Rp122.729.105.220,- meliputi :
   a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tercapai Rp18.966.141.282,- atau 100% dari target terdiri dari :
      - BPR BPR SAU tercapai Rp2.011.991.150,- atau 100% dari target

- PT. Bank Jatim tercapai Rp16.948.635.132,- atau 100% dari target
- PT. BPR Jatim tercapai Rp5.515.000,- atau 100% dari target

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) tercapai Rp1.413.733.096,- atau 36,27% dari target Rp3.897.299.123,- terdiri dari :

- Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak ada realisasi dikarenakan memprioritaskan untuk pembayaran hutang. Target Deviden sebesar Rp214.564.102,-, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/228/2023 tentang Pengesahan laporan Keuangan Audited Tahun 2022 Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya tanggal 3 Agustus 2023;
- Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan tercapai sebesar Rp68.562.040,- atau 27,78% dari target Rp246.800.714.,- berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/382/436.1.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2022 Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya, tidak menetapkan dividen atas kinerja PD RPH Tahun 2022 karena PD RPH mengalami kerugian sebesar Rp830.527.229,- di tahun 2022;
- PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Karsa Utama tercapai sebesar Rp150.000.000,- atau 100% dari target yang ditetapkan;
- Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tercapai sebesar Rp1.195.171.056,- atau 36,37% dari target Rp3.285.934.307,- berdasarkan :
  1) Surat Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/315/436.1.2/2023 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya ;
  2) Surat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Nomor 122/Ext/PDTS-KBS/XII/2023, tanggal 14 Desember 2023, Perihal : Permohonan Pembayaran Deviden melalui Angsuran;
  3) Surat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang

Surabaya Nomor 002/EXT/PDTS-KBS/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, Perihal : Pembayaran Angsuran ke-2 Deviden PD. Taman Satwa KBS Tahun 2022.

c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) yaitu dari Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada (PDAM Surya Sembada) tercapai Rp102.349.230.842,- atau 60,21% dari target Rp169.997.629.868,- berdasarkan :
   - Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/147/436.1.2/2023 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Tahun 2022 tanggal 16 Mei 2023, dividen yang ditetapkan atas kinerja PDAM Surya Sembada tahun 2022 yang seharusnya disetorkan di Tahun 2023 sebesar Rp92.349.230.842,-, telah disetorkan pada Tahun 2022 sebesar Rp90.000.000.000,-. sehingga sisanya sebesar Rp2.349.230.842,- disetorkan pada Tahun 2023;
   - Dividen atas kinerja PDAM Surya Sembada Tahun 2023 yang seharusnya disetorkan di Tahun 2024 telah disetorkan sebesar Rp100.000.000.000,- pada Tahun 2023.

3. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu dari PT. YEKAPE Surabaya tercapai Rp17.523.651.666,- atau 100% dari target.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2023 sebesar Rp767.175.835.656,- atau 90,58% dari target yang telah ditetapkan.

2. **Pendapatan Transfer**

Realisasi pendapatan transfer tahun 2023 sebesar Rp3.832.961.233.953,- atau 92,78% dari target yang telah ditetapkan.

Pendapatan transfer Tahun 2023 meliputi:

1. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercapai Rp24.935.715.998,- (70,73%) dari target Rp35.253.719.000,-

dikarenakan DAK fisik penyalurannya memperhitungkan nilai kontrak pekerjaan masing-masing bidang.

2. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tercapai Rp740.084.347.812,- (96,57%) dari target Rp766.403.962.000,- dikarenakan penyalurannya memperhitungkan Silpa tahun sebelumnya
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi tercapai Rp1.224.592.229.691,- (79,38%) dari target Rp1.542.615.985.491,- berdasarkan :
   a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1004/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
   b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/293/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022
   c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/894/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023
   d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/181/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022
   e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/688/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2023
4. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi tercapai Rp13.068.400.000,- (99,73%) dari target Rp13.103.400.000,- berdasarkan :
   a. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023, Perihal : Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

b. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/2654/201.4/2023, Perihal : Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut yang semula aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa Hibah Bos yang semula pada kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum kebijakan belanja diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung ***"Penguatan Kapasitas Surabaya Untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis"***

Secara umum kebijakan belanja Daerah tahun 2025 yaitu :

1. Efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang operasional yang dapat digantikan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
2. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
3. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
4. Penguatan mekanisme sewa dan Kerjasama Operasi (KSO);
5. Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan. Penyusunan struktur belanja daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Adapun kebijakan belanja Daerah tersebut diimplementasikan dengan:

1. Penguatan Kapasitas Surabaya dilakukan dengan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat, produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Pemerintah Kota secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Di bidang pendidikan, alokasi anggaran diupayakan dapat mencapai sebesar minimal 20 % dari APBD yang diharapkan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mendukung

peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Di bidang kesehatan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mewujudkan ***"health for all",*** belanja yang ditekankan pada upaya promotif dan preventif sebagai strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk mengeliminasi TB, mencegah balita stunting, kematian Ibu serta kematian Bayi dan Balita;

2. Untuk mewujudkan SDM yang sejahtera, Pemerintah Kota juga mendorong penguatan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan sinergis melalui penerapan satu data. Langkah ini diambil agar program tersebut efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
3. Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 akan terus melanjutkan proses reformasi birokrasi menuju adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas;
4. Efisiensi belanja barang seiring dengan optimasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dilakukan melalui digitalisasi birokrasi, terutama pada komponen belanja barang yang mengalami pertumbuhan tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional yang dialihkan ke belanja yang lebih produktif, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK, penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat termasuk bantuan pemerintah, serta sinergi kebijakan belanja antara pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian anggaran serta optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);

5. Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan instalasi teknologi tinggi, APBD dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antarprogram dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*);
6. Pengalihan Belanja dari APBD kepada opsi pembiayaan selain APBD dengan kerjasama melalui *creating shared value* (CSV) dengan Perusahaan, KPBU maupun *Corporate Social Responsibility (*CSR) serta Kerjasama Operasi (KSO);
7. Sebagai bagian dari penyelarasan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 serta sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, Pemerintah Kota mendorong konversi kendaraan operasional dinas dari berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik pada tahun 2025. Pelaksanaan konversi ini dilakukan secara bertahap melalui pembelian kendaraan listrik baru serta melalui mekanisme sewa untuk efisiensi anggaran.

   Pemilihan alternatif sewa kendaraan dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain :

   a. Mekanisme sewa memungkinkan pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran di awal, karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pembelian kendaraan baru secara langsung;
   b. Mekanisme sewa kendaraan juga memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan armada, memungkinkan untuk menyesuaikan jenis dan jumlah kendaraan sesuai kebutuhan tanpa terikat dengan kepemilikan jangka panjang;
   c. Menghindari biaya perawatan dan pengelolaan yang tinggi, karena tanggung jawab tersebut berada pada penyedia jasa sewa.

   Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca,

meningkatkan efisiensi energi, menghemat anggaran, dan meningkatkan kualitas udara.

8. Pengalokasian Bantuan Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan sebagai dana cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah.

Berdasarkan data realisasi Tahun 2022, target Tahun 2023 dan Tahun 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan Tahun 2026, maka belanja daerah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel III.9

Tabel III.10
Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Surabaya
Tahun 2022 s.d Tahun 2026

No	Uraian	Realisasi TA. 2022 (Audited)	Realisasi TA. 2023 (Audited)	Proyeksi/Target TA. 2024	Proyeksi/Target TA. 2025	Proyeksi/Target TA. 2026
2	**BELANJA**					
2.1	**Belanja Operasi**					
2.1.1	Belanja pegawai	2,460,367,884,874	2,540,673,580,810	2,969,669,114,959	3,857,168,782,897	2,932,579,506,278
2.1.2	Belanja barang dan jasa	4,892,062,090,433	4,835,931,638,916	4,856,709,908,235	4,608,874,607,730	5,806,689,001,967
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	80,912,203,294	0
2.1.4	Belanja hibah	327,011,169,427	404,050,361,625	442,862,699,069	339,132,299,486	234,611,324,376
2.1.5	Belanja bantuan sosial	0	78223729100	28262400000	7,562,400,000	0
	Jumlah Belanja Operasi	**7,679,441,144,734**	**7,858,879,310,451**	**8,297,504,122,263**	**8,893,650,293,407**	**8,973,879,832,621**
2.2	**Belanja Modal**					
2.2.1	Belanja tanah	181,872,132,600	90,286,694,348	394,207,182,390	125,523,042,657	362,920,144,870
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	406,539,524,326	285,845,343,961	390,350,817,090	318,689,514,074	378,800,944,512
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	344,055,978,498	365,424,112,763	613,657,726,699	678,105,806,554	932,408,754,035
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	827,064,729,888	921,720,212,895	1,261,528,774,335	1,365,205,383,482	906,676,126,703
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	4,222,263,480	8,619,452,218	9,590,367,017	7,849,286,210	20,398,066,745
2.2.6	Belanja aset lainnya	2275837736	0	0	144,300,000	0
	Jumlah Belanja Modal	**1,766,030,466,528**	**1,671,895,816,185**	**2,669,334,867,531**	**2,495,517,332,977**	**2,601,204,036,865**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**					
2.3.1	Belanja tidak terduga	1,702,578,492	12,815,776,299	17,000,000,000	17,000,000,000	15,000,000,000
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**1,702,578,492**	**12,815,776,299**	**17,000,000,000**	**17,000,000,000**	**15,000,000,000**
2.4	**Belanja Transfer**					
2.4.1	Belanja bagi hasil	1,062,588,930	0	0	0	750,000,000
2.4.2	Belanja bantuan keuangan	0	-	500,000,000	20,500,000,000	500,000,000
	Jumlah Transfer	**1,062,588,930**	**0**	**500,000,000**	**20,500,000,000**	**1,250,000,000**
	Jumlah Belanja	**9,448,236,778,684**	**9,543,590,902,935**	**10,984,338,989,794**	**11,426,667,626,384**	**11,591,333,869,486**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappedalitbang, diolah tahun 2024

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan Pembiayaan Anggaran 2025 adalah:

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*;
2. Optimalisasi peran BUMN, *Special Mission Vehicle* (SMV), Badan Layanan Umum (BLU) dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional;
3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiscal buffer secara handal dan efisien, serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok rentan dan UMKM;

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya;
2. Pencairan dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam tahun anggaran berkenaan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Penerimaan pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah kota Surabaya tahun 2025 diarahkan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp10.000.000.000, untuk Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).

Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2022 – 2026) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.10

Tabel III.11
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2022 s.d Tahun 2026

No	Uraian	Realisasi TA. 2022 (Audited)	Realisasi TA. 2023 (Audited)	Proyeksi/Target TA. 2024	Proyeksi/Target TA. 2025	Proyeksi/Target TA. 2026
3	**PENERIMAAN**					
3.1	**Penerimaan Daerah**					
3.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	824,424,505,647	156,690,767,646	223,954,003,318	224,636,639,762	223,954,003,318
3.1.2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	13000000	0	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**824,437,505,647**	**156,690,767,646**	**223,954,003,318**	**224,636,639,762**	**223,954,003,318**
3.2	**Pengeluaran Daerah**					
3.2	Penyertaan modal	10,000,000,000	10,000,000,000	9,929,481,387	10,000,000,000	0
3.2.2	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**10,000,000,000**	**10,000,000,000**	**9,929,481,387**	**10,000,000,000**	**0**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya baik infrastruktur maupun non infrastruktur, anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan Pemerintah Kota Surabaya untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

Alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1) *fiscal engineering* yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep *expenditure reform* melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan *cost recovery*; (2) *creative financing* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema kerja sama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui sinergi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerja sama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, antara lain yakni:

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui
    a. Peningkatan kerja sama swasta dan pemerintah melalui kerja sama pemerintah swasta (KPS) / *Public Private Partnership* (PPP). Bentuk kerja sama KPS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerja sama seperti *Build-Operate-Transfer* (BOT), *Build-Transfer-Operate* (BTO), maupun bentuk lainnya.

b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan untuk berperan dan terlibat aktif dalam program pembangunan melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), kerjasama dengan perusahaan dalam intervensi program dengan menawarkan value bagi Perusahaan atau dikenal dengan *Creating Shared Value (*CSV). Pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya melalui CSR mapun CSV dipandang potensial untuk dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pengolahan yang merupakan sektor kedua dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Forum CSR Kota Surabaya telah dibentuk sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2. Pengembangan kerja sama antar daerah. Kerja sama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerja sama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah.
3. Kerja sama kemitraan dengan lembaga non pemerintah baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional, diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung program prioritas daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah.
4. Pengembangan kerja sama melalui pinjaman maupun hibah luar negeri yang digunakan pada bidang-bidang strategis utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, serta mendukung pencapaian visi dan misi Presiden-Wakil Presiden dan program strategis nasional.

RKPD Kota Surabaya mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut mengacu pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih ***"Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan".*** Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian di tahun 2023 serta dengan memperhatikan Rancangan Akhir RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, maka dilakukan penyesuaian terhadap target di tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Tabel IV.1.

Tabel IV.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,71% ***5,5%-6,1%****	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi local	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,12% ***5,50%****
		Indeks Gini	0,315 ***0,351-0,388****		Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,81%
					Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	5,87% ***7,95%****
					Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,27%
					Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	33,20%
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6% ***5,89% – 5,22%****	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	6,90%
		Persentase Penduduk Miskin	3,71% ***4,25% - 3,5%****		Persentase tenaga kerja yang terserap	22,45% ***22,67%****
					Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,79 ***0,69****
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	83,50 ***84,5 – 85,67%****	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	80,14
					Angka Harapan Hidup	74,62 ***76,15****
					Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,16%
					Skor Pola Pangan Harapan	95,35
				Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	93,77

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
	Pembentukan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Sosial	84,85	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Budaya Lokal	90,10
					Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	73,43
			85,91*		Indeks Kepedulian Sosial	89,40
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi Masyarakat	Indeks Infrastruktur Kota	0,793	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,860
					Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,751
					Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,745
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	68,97	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,10
					Indeks Kualitas Udara	90,35
					Indeks Kualitas Lahan	42,75
					Indeks Persampahan	78,71
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	85,01	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	85,07
						90,20 (AA)*
					Opini BPK	WTP
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,4 (Baik)
						4,82*
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	91,08%
						96%*
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,90	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,89
				Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,899

**) Perhitungan target terbaru berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi tahun 2023 yang juga menjadi baseline Tahun 2025 pada RPJPD Tahun 2025-2045.*

Pada tahun 2025, suntuk mengukur sasaran misi meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat, menggunakan indikator Indeks Penanggulangan Bencana. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Namun pada dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya Tahun 2025-2045, telah menggunakan indikator Indeks Risiko Bencana sebagai indikator sasaran visi dengan target sebesar 147,03 pada tahun 2025. Berikut disampaikan realisasi Indikator Indeks Risiko Bencana pada tabel IV.2

Tabel IV.2
Indeks Risiko Bencana Kota Surabaya

Indikator	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2025
Indeks Risiko Bencana	150,34	150,34	136,36	124,93	113,31	110,31

Sumber data : InaRISK BNPB, 2023

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025, strategi dan penelaahan terhadap Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Rancangan RKP Tahun 2025 dan Program Strategis Nasional serta strategi dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 bersamaan dengan penyusunan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025 yang mempedomani RPJPN Tahun 2025-2045 serta Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, sehingga dalam penyusunan RKPD Kota Surabaya juga memperhatikan hasil evaluasi RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025 dan Rancangan Akhir RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kota Surabaya yang telah tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Bermartabat;
2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif;
3. Pengembangan infrastruktur Hijau dan Sistim Transportasi Perkotaan Terpadu (*Integrated Transportation System)*;
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. ***"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".*** Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

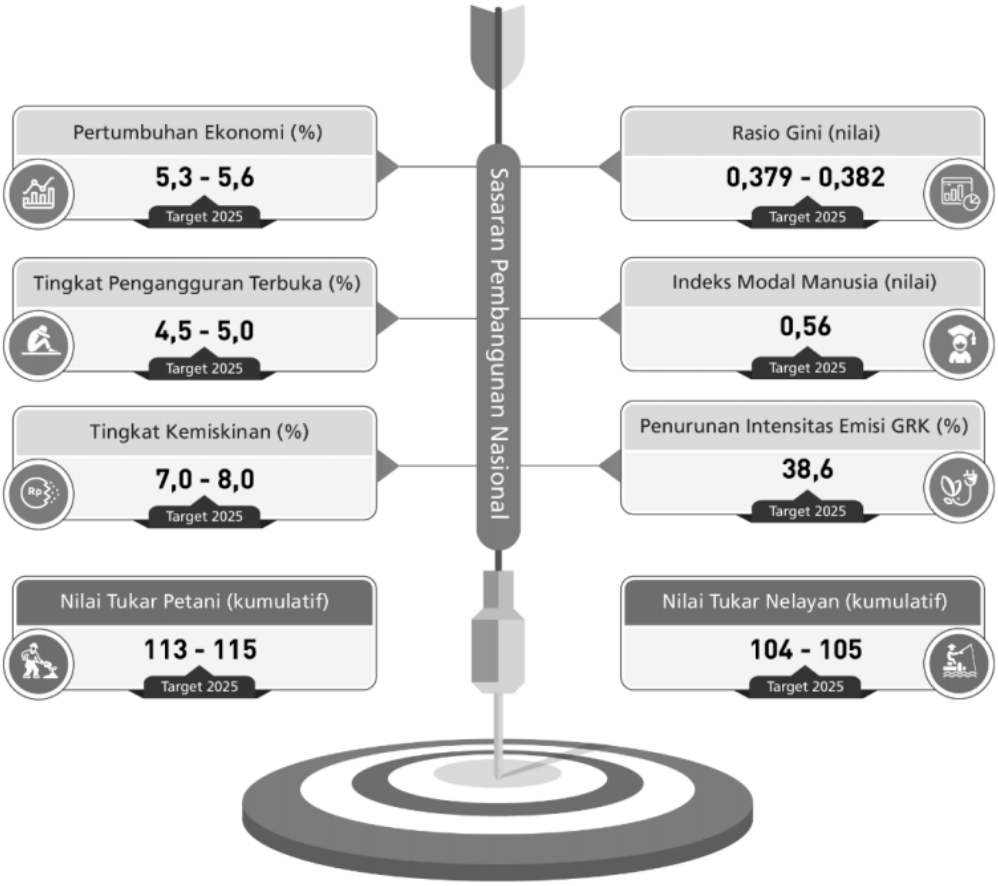

Gambar IV.1
Sasaran Pembangunan Tahun 2025
Sumber : Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP 2025

Sasaran pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2025 yang ingin dicapai yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,6%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5 – 5,0%
3. Tingkat Kemiskinan 7,0 – 8,0%
4. Rasio Gini 0,379 – 0,382
5. Indeks Modal Manusia 0,56
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK 38,6
7. Nilai Tukar Petani 113 – 115
8. Nilai Tukar Nelayan 104 – 105.

Untuk membangun dasar yang kokoh guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 dan mencapai target pembangunan tahun 2025, prioritas nasional yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Gambar IV.2

Prioritas Nasional Tahun 2025

Sumber : Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP 2025

Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur berakhir pada tahun 2024. RPJMD Provinsi Jawa Timur baru akan disahkan pasca Pemilu Kepala Daerah Serentak secara Nasional pada tahun 2024 sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, oleh sebab itu pada masa transisi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur Tahun 2025-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026.

Isu strategis RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, meliputi:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal;

2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Publik Pendukung Pertumbuhan Wilayah;
3. Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting, dan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi;
6. Peningkatan Kapasitas terhadap Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana;
7. Optimalisasi Upaya Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 diarahkan sesuai dengan tema yang disampaikan dalam Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur yakni "***Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan***".

Tema dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, dijabarkan pada prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pembangunan Infrastuktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan;
5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;
6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;
7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi;
9. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup.

Arahan pengembangan wilayah Kota Surabaya Tahun 2025 mempedomani RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yaitu :

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, real estate serta jasa perusahaan) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri dan pergudangan) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, jalan tol)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana banjir
8. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal
9. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
11. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

12. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan industri di Kota Surabaya
13. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
14. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
15. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas

4.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Surabaya

Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025 berdasarkan arah kebijakan dan tema arah kebijakan pada rencana fokus pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 serta memperhatikan rancangan tema pembangunan tahun 2025 nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka rancangan tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2025 yaitu ***"Penguatan Kapasitas Surabaya Untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis".***

Rancangan tema tersebut bermakna mendorong akselerasi ekonomi yang tidak hanya cepat dan inklusif, tetapi juga berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan posisi tawar Kota Surabaya baik pada level regional maupun global melalui intensifikasi kerjasama dengan pihak-pihak strategis yang sejalan dengan arah pembangunan.

Adapun prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial untuk mendukung peningkatan SDM dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;

2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah;
4. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial
5. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu;
6. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
8. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum;
9. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Layanan Publik.

Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Surabaya diselaraskan dengan Tema Prioritas dalam RKP Tahun 2025 dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Gambar IV.3
Penyelarasan Tema Pembangunan Tahun 2025

Penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2025 dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.3
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Layanan Publik	Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penguatan Pangkalan Utama Angkatan Laut Surabaya dalam rangka penguatan pengamanan maritim terhadap Surabaya dan garda maritim Indonesia bagian timur	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Peningkatan logistik dan perdagangan berbasis biru berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
					Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
					Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
					Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
						Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Pengembangan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Fasilitasi business matchmaking startup digital	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Fasilitasi digital technopreneur	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair /Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / T anaman Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastuktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Lanjutan Pengendalian Banjir Sungai Lamong	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			Pembangunan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Nasional	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah vokasi yang memiliki interlinkage and Match yang Kuat dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Dunia Industri		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Revitalisasi pelatihan vokasi di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Surabaya	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair /Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman; dan tekstil dan produksi tekstil dan alas kaki; Penguatan ekosistem kuliner;	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Pemerintahan Desa		dan film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif; dan pengembangan aplikasi dan gim	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
						Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di semua jenjang pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
penyandang disabilitas						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
			Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sistem pemagangan dalam negeri	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Penurunan kematian ibu dan bayi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada
						Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada
						Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan
						Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
						Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan
						Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
			Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
			Pembangunan kualitas keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Percepatan penurunan ketimpangan gender melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang pada wilayah kantong pekerja migran	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Peningkatan kapasitas layanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Bhakti Dharma Husada

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada
							RSUD dr. Mohamad Soewandhie
						Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada
			Fasilitasi literasi digital	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi, elektronik dan digital, alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Surabaya Regional Railway Line	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
			Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Metropolitan Surabaya	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Layanan Publik	Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;	Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Highlight Intervensi di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKP Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
mencapai masyarakat yang adil dan makmur					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Rehabilitasi kerusakan lahan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

4.2.3 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025

Pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 dijabarkan dalam Tabel IV.4 di bawah ini yang memuat indikator sasaran beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2025 dari setiap indikator sasaran tersebut.

Tabel IV.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran 2025
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,12% ***5,50%****
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,81%
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	5,87% ***7,95%****
			Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,27%
			Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	33,20%
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	6,90%
			Persentase tenaga kerja yang terserap	22,45% ***22,67%****
			Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,79 ***0,69****
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religious, berbudaya dalam bingkai kebhinekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	80,14
			Angka Harapan Hidup	74,62 ***76,15****
			Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,16% 1,47%*
			Skor Pola Pangan Harapan	95,35
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,77 94,21*
	Pembentukan karakter masyarakat	Terciptanya masyarakat yang berkarakter	Indeks Budaya Lokal	90,10
			Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	73,43

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran 2025
		berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kepedulian Sosial	89,40
				97,86*
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi Masyarakat	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,860
			Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,751
			Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,745
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,10
			Indeks Kualitas Udara	90,35
			Indeks Kualitas Lahan	42,75
			Indeks Persampahan	78,71
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan public	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	85,07
				90,20 (AA)*
			Opini BPK	WTP
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,4 (Baik)
				4,82*
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	91,08%
				96%*
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks ketentraman dan ketertiban kota	0,89
		Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,899

**) Perhitungan target terbaru berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi tahun 2023 yang juga menjadi baseline Tahun 2025 pada RPJPD Tahun 2025-2045.*

4.2.4 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan

pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025 telah diserahkan melalui surat pengantar Sekretariat DPRD Kota Surabaya kepada Walikota Surabaya tanggal 26 Februari 2024 nomor 100.1.4/1148/436.5/2024 atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya nomor 4 tahun 2024 tentang Penepatan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Selanjutnya Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam RKPD Kota Surabaya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel IV.5
Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata					
1	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Pembangunan Lapangan Bola Volley	200 m²	Pondok Maritim Indah Blok BB No. 16 RT.04 RW.06 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
2	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Pembangunan Lapangan Bola Basket	504 m²	RW 07, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut Jalan Baruk Utara, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
3	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Pembangunan Lapangan Bola Volley	200 m²	Pondok Benowo Indah RT.04 RW.10 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
4	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Pembangunan Lapangan Futsal	504 m²	Bulak cumpat 2/1, dekat balai RW 02 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
5	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Pembangunan Lapangan Futsal	504 m²	RT 01 RW 01 Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
6	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	10800 m²	Sumberrejo RW 3 Kel. Sumberrejo Kec. Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
7	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Pembangunan Lapangan Futsal	200 m²	PERUM P.B.I. RT O1 RW 11. KEL BABAT JERAWAT, KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
Dinas Lingkungan Hidup					
8	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembuatan Taman Aktif	220 m²	RW 07, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut Jalan Baruk Utara, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja					
9	Perluasan Kesempatan Kerja	Bimbingan Teknis Batik (Tulis)	20 Orang	RW1 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
10	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Ekspor-Impor	1 Pelatihan	Jalan Bumiarjo 25, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
Dinas Perhubungan					
11	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	Jl. Pakis Tirtosari No. 42 - 34 RT.05 RW.04 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
12	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	Jl Lontar Telaga Indah RT.06 RW.02 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
13	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	3 Titik	Jl. Dukuh Bulu RT.04 RW.04 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
14	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	Jl. Karangan Jaya IV No. 17 RT.12 RW.03 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Masjid An Nur, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
15	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Jl. Dukuh Karangan RT.03 RW.03 Gang 2-A Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
16	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Jl. Banyu Urip Kidul Gang VI-A RT.10 RW.03 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
17	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	16 Titik	Jl. Pakis Sidorejo Gang 1 - 4 RT.01 RW.05 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
18	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	Jl. Dukuh Pakis 6-D1 dan 6-D2 RT.01 RW.03 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
19	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	30 Titik	JL. GADUKAN TIMUR BARU RT 05 RW 04 KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
20	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	JL. TEMBOK LOR 1 RT 01 RW 03 KELURAHAN BUBUTAN KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
21	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	4 Titik	JL. SEMARANG RT 06 RW 03 KELURAHAN GUNDIH KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
22	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	4 Titik	JL. SEMARANG ATAU LAMONGAN RT 01 RW 03 KELURAHAN GUNDIH KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
23	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Jl. Tambak Mayor Barat RT.02 RW.07 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
24	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 Titik	Jl. Pakis Gang III RT.03 RW.03 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
25	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	MULYOREJO TENGAH 1/B RT 003 RW 002 KEL. MULYOREJO KEC. MULYOREJO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
26	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 Titik	Jl. Tambak Mayor Madya Gang III RT.10 RW.07 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 Titik	Pondok Benowo Indah Blok QQ RT.04 RW.08 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
28	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	JL. DUPAK MASIGIT GANG 10 RT 09 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
29	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Jl. Ketintang Barat V RT.01 RW.06 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
30	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Kendung Rejo Gang Masjid Dan Gang 7. RT 04 Kel Sememi, Kec Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
31	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	3 Titik	Jl. Pagesangan IV RT.01 RW.03 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
32	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	7 Titik	Kendung Rejo Gang 9, 9A Dan 12. RT 05. Kel Sememi Kec Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
33	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	7 Titik	Dukuh Pakis GG 5 F RT 05 RW 04, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
34	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	15 Titik	Jl Bulak Setro Indah 2 / Perum Bogorami Indah Regency, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
35	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	7 Titik	Jl. Bulak Cumpat Barat 4, RT 06 RW 02 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
36	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	4 Titik	Bulak Cumpat Gg 1, RW 02 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
37	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Bulak Cumpat Gg 3, RW 02 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
38	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	Makam Islam RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
39	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	20 Titik	Keputih Timur Jaya IV, I, Blok A-P RW 02 Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
40	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Bulak Rukem Timur 2i, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
41	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	4 Titik	Jl Keputih Tegal Bakti IC, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
42	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	15 Titik	Jl Gading Indah Utara Gg 1 - Gg 10, RT 03 RW 03 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
43	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	Jl Bulak Kali Tinjang Baru 2A, RT 01 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
44	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	Jl Bulak Kali Tinjang Baru Gg 3, RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
45	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	Bulak Setro Utara Gg 1, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
46	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	Bulak Setro Utara Gg Makam dan dekat lapangan, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
47	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	17 Titik	RT 5 RW 4 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
48	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	12 Titik	Jl. Jambangan No.50 RT.05 RW.02 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
49	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Type 2 + Solar Cell	1 Titik	Jl. Jambangan No.30 RT.03 RW.02 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
50	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan Plat Alumunium	2 Unit	Jl. Jambangan IX RT.06 RW.03 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
51	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	Jl Raya TK, Gg TK2, Gg TK3, Gg Makam1, dan Gg Makam2, RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
52	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	30 Titik	Tambak Medokan Ayu Gg X, XII, XIV, XVI, XI F, XI E, XI G, XIII, XV RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
53	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	Wonoayu Gg 1, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
54	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	Wonorejo Selatan Gg 3A, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
55	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 unit	Wonorejo Selatan Gg 3A, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
56	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	15 Titik	Jl Putra Bangsa III Blok A, Blok F, Blok G, dan pinggir kali, RT 09 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
57	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	4 Titik	Jl Tambak Medokan Ayu Gg X, RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
58	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Jl Tambak Medokan Ayu 6C, RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
59	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Jl Wonorejo Rungkut RT 02 RW 01 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
60	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Jl Wonorejo Rungkut RT 02 RW 01 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
61	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Manggis, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
62	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	9 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur 1, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
63	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur 2, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
64	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur 1, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
65	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	4 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur 2, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
66	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	Jl. Jambangan No.47 RT.01 RW.01 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
67	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Nanas, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
68	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Mangga, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
69	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Delima, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
70	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Rambutan, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
71	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Manggis, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
72	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Masjid, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
73	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Anggur, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
74	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Bulak Kalitinjang Baru Timur Gg Arbei, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
75	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Bulak Rukem Timur jalan tembusan, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
76	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	3 unit	RW 1 Simolawang kecamatan Simokerto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
77	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	RT 04 RW 04 Kel Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
78	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Medokan Ayu Tambak Gang VII, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
79	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Panjang Jiwo Gg Masjid, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
80	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Jl Siwalankerto 183, Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
81	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	halaman balai RW 05 Kel Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
82	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	RT 01 RW 14 Kel Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
83	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	RT 07 RW 14 Kel Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
84	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Jl Bulak Rukem Timur 2I, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
85	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	JL. JEPARA GANG 4 RT 04 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
86	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	JL. JEPARA GANG 5 RT 05 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
87	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	JL. JEPARA GANG 6 RT 06 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
88	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	JL. DUPAK MASIGIT GANG 4 RT 02 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
89	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 Titik	Kelurahan Morokrembangan RT 9 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
90	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan Plat Alumunium	2 Titik	RT 9 RW 6 Kel. Morokrembangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
91	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	RT 3, RT 4, Dan RT 5 RW 5 Kel. Dr soetomo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
92	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan PCTL 2 Tiang	15 m²	RT 1 RW 5 KEL. DR SOETOMO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
93	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Unit	RT 7 RW 7 KEL. KEMAYORAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
94	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 Titik	RT 7 RW 6 KEL. GUNDIH, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
95	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 Titik	Jl. Demak timur IX RT 9 RW 6 KEL. GUNDIH, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
96	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 Titik	RT 10 RW 6 KEL. GUNDIH, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
97	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	3 Buah	Jalan Sulung Sekolahan (Dpn SDN Sulung), Jalan Johar 3, Jalan Johar 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
98	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 unit	Jl Kebondalem V di RT 4/RW 6 Simolawang/simokerto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
99	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 unit	Jl. Simolawang II RT 8/RW 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
100	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Buah	Bogen 15-f, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
101	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Buah	Bronggalan 2 G, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
102	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Buah	Lebak Timur 3E Kelurahan Gading - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
103	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan Plat Alumunium	5 unit	Dinoyo Baru 57, Dinoyo Sekolahan 5, Alamat: Dinoyo Baru 53, RT/RW: 12/04, Kecamatan / Kelurahan: Tegalsari / Keputran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
104	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	Keputran Kejambon 2/88, RT/RW: 09/12, Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Embong Kaliasin , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
105	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 unit	Bronggalan II G , Kelurahan Pacarkembang - Tambaksari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
106	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	5 unit	Dinoyo Sekolahan 5/7A, RT/RW: 10/04, Kecamatan/Kelurahan: Tegalsari/Keputran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
107	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	12 Titik	Bendul Merisi Gg Besar Selatan, Kel. Bendul Merisi, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
108	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Sambikerep (Depan Balai RW Utara) RT 01 RW 04 Kec.Sambikerep, Kel. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
109	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	SAMBIKEREP GG III RT 06 RT 04 Kec.Sambikerep, Kel. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
110	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Sambikerep gg Pak Capir RT 08 RW 04 Kec. Sambikerep, Kel. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
111	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	Sambikerep gg Anggur RT 10 RW 04 Kec. Sambikerep, Kel. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
112	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	SAMBIKEREP KALIJARAN RT 12 RW 04 Kec. Sambikerep, Kel. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
113	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Sambikerep gg Teratai RT 12 RW 04 kec.Sambikerep, Kel.Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
114	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Sambikerep gg 1 RT 12 RW 04 Kec. Sambikerep, Kel. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
115	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	Kuwukan Regency RT 06 RW 06 KEC. SAMBIKEREP, KEL LONTAR, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
116	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Kuwukan Lapangan gg 1A RT 06 RW 06 Kel. Sambikerep, Kec Lontar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
117	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Dukuh Pakis rw 03 rt 09, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
118	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	7 Titik	Rejosari baru RT06 rw.03 gang 4, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
119	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Sememi Kidul Gang 2 RT 1 RW 4 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
120	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	Sememi Kidul Gang 3 RT 1 RW 4 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
121	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	Sememi Kidul Gang 5B RT 2 RW 4 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
122	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Jl. Manukan Kerto RT.06 RW.07 Depan Lapangan Volly Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
123	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	Dukuh Bulak Banteng Suropati 4a, Kelurahan Bulak Banteng - Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
124	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 unit	1. Pertigaan Gubeng Jaya Langgar dengan Gubeng Jaya IV; 2. Pertigaan Gubeng Jaya Langgar dengan Gubeng Jaya III ,Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
125	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Daun Rambu Lalu Lintas (75 cm) - ACP	4 unit	Perempatan jalan Ngagel Madya dengan jalan Ngagel Jaya Tengah, dekat warkop bening, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
126	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Type 2 + Solar Cell	1 unit	Perempatan jalan Ngagel Madya dengan jalan Ngagel Jaya Tengah, dekat warkop bening, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
127	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	12 Titik	PERUM P.B.I. BLOK A1,A2, KAV. KEL BABAT JERAWAT. KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
128	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	jalan bumiarjo RT 02 & 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
129	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	SIMO GUNUNG GG 2(SAMPING MASJID) RT 09, RW 01 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
130	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	SIMO GUNUNG 2/2 RT 09, RW 01 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
131	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	SIMO GUNUNG BARU NO. 5 RT 04, RW 01 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
132	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	7 Titik	PESAPEN TENGAH RT.06/RW 10 KELURAHAN KREMBANGAN UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIKAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
133	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	7 Titik	PESAPEN JETIS RT.06 RW.10 KELURAHAN KREMBANGAN UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIKAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
134	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	SIMO GUNUNG BARU NO. 5-A RT 04, RW 01 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
135	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	SIMO GUNUNG 4 NO. 12 RT 03, RW 01 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
136	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	SIMO GUNUNG 4 NO. 25 RT 03, RW 01 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
137	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	SIMO GUNUNG 4 NO. 37 RT 03, RW 01 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
138	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	20 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 4 RT 01, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
139	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	7 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 4A RT 01, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
140	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 5 RT 02, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
141	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	7 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 6 RT 02, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
142	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	4 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR RT 04, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
143	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	4 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 1C RT 04, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
144	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 1D RT 04, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
145	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	19 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR GG 2 RT 05, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
146	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR GG 1-A RT 07, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
147	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR GG 1-B RT 07, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
148	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	15 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR GG 8 RT 08, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
149	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	20 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR GG 9 RT 09, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
150	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	15 Titik	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR GG 10 RT 10, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
151	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	SIMO KWAGEAN BUNTU KIDUL 5c RT 05, RW 02 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
152	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	RT.08 RW.08 Jl. Girilaya 8 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
153	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	RT.08 RW.04 Jl. Banyu Urip Kidul Molin 2B/94 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
154	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Ketintang Barat 5 /102, RT 1 RW 6 Ketintang, KETINTANG GAYUNGAN , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
155	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	7 Titik	Kedung Pengkol 5 rt 1rw 6 mojo gubeng, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
156	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Kalianyar Kulon Gg,9,10,11 rt 4 rw 7 bongkaran pabean cantian, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
157	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Sambiarum Lor Gang VII rt 8 rw 6 SAMBIKEREP SAMBIKEREP , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
158	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	4 Titik	Banyu Urip Wetan GG 3B No 32 rt 9 rw 6 Banyu Urip Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
159	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	RT.02 RW.04 Jl. Pakis 50 Kel. Pakis Kec. Sawahan , Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
160	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Simo Sidomulyo Gg 5 rt 3 rw 15 Petemon Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
161	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Kedung Anyar II rt 4 rw 12 sawahan sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
162	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Gembong 4/39 - 54 rt 1 rw 4 kapasan simokerto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
163	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	"RT.04 RW.03 Jl. Simorejo Timur no. 4 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
164	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Sidodadi 10/33 rt 4 rw 3 SIDODADI SIMOKERTO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
165	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Semampir Barat Gg. 6 Medokan Semampir Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
166	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Semampir Barat, Pondok Tanjung Permai medokan semampir sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
167	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	Sidosermo 4 Gg 8A sidosermo wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
168	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	Jl Ketintang 1 No. 29 wonokromo wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
169	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	Jl. Ketintang 4F wonokromo wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
170	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	6 Titik	Jl Karangrejo 6 B RT 7 RW 2, WONOKROMO, WONOKROMO , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
171	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	Jl Karangrejo Sawah wonokromo wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
172	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	15 Titik	Pulo Wonokromo 200-B wonokromo wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
173	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	20 Titik	Jl. Pulo Tegalsari Gg Sumur wonokromo wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
174	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Pulo Tegalsari Gg 1 wonokromo wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
175	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	Jl Inspeksi RT 10 RW 7 Karah , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
176	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Jl. Bumi Arjo 7 Sawunggaling Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
177	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	Jl. Bumi Arjo RT 2 RW 5 Sawunggaling Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
178	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	Jl. Bumi Arjo RT 3 RW 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
179	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	BULAK BANTENG WETAN GG TENGAH RW.08 KEL. SIDOTOPO WETAN KEC. KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
180	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	BULAK BANTENG MADYA RT.01 RW.09 KEL. SIDOTOPO WETAN KEC. KENJERAN (BAGIAN LUAR JALAN RAYA), Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
181	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	BULAK BANTENG MADYA GG 11 RT.11 RW.09 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
182	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	BULAK BANTENG BARU GG KEMUNING RT.05 RW.07 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC,KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
183	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	BULAK BANTENG BARU GG.KENANGA RT.06 RW.07 KEL. SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
184	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	4 Titik	BULAK BANTENG BARU GG.FLAMBOYAN RT.03 RW.07 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC, KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
185	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	BULAK BANTENG WETAN GG 7 RT.06 RW.08 SIDOTOPO WETAN KEC, KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
186	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	BULAK BANTENG WETAN GG.9 RT.08 RW.08 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
187	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	BULAK BANTENG WETAN GG.11 RT.10 RW.08 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
188	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	BULAK BANTENG WETANG GG.15 RT.14 RW.08 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
189	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	BULAK BANTENG WETANG GG 17 RT.15 RW.08 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
190	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	2 Titik	BULAK BANTENG WETAN GG.08 RT.07 RW.08 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
191	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	10 Titik	BULAK BANTENG WETANG GG,DAHLIA RW.14 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC. KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
192	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	3 Titik	BULAK BANTENG GG.4 RT.03 RW.08 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
193	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	7 Titik	MAKAM RW.01 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
194	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	5 Titik	Jl Kapas Madya 6/5 , Kel. Kapad Madya Baru , kec. Tambaksari , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
195	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	PERUM P.B.I. RT 06 RW 07. KEL BABAT JERAWAT, KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
196	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	8 Titik	PERUM P.B.I. Blok S.O.Q.N RT04 RW 07. KEL BABAT JERAWAT. KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
197	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1	1 Titik	Jl. Sonorejo 1 (lapangan masjid baitul ghoffar), Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga					
198	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	125 m²	Jl. Pakis Gang III RT.03 RW.03 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
199	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	330 m²	Jl Jemur Ngawinan RT 07 RW 02 Kel Jemurwonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
200	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	84 m²	Jl Siwalankerto Timur 1 Gg Insperasi RW 05 Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
201	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	300 m²	Jl. Sidotopo Kidul Rt 3 RW 1 Simolawang/simokerto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
202	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	250 m²	Keputran Kejambon 2/88 , RT/RW: 09/12 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Embong Kaliasin , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
203	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	250 m²	Sepanjang jalan Dinoyo Sekolahan IV dan Dinoyo Sekolahan V, Alamat: Dinoyo Sekolahan 5/7A , RT/RW: 10/04 , Kecamatan/Kelurahan: Tegalsari/Keputran , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
204	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	79 m²	Dk Sambikerep Gg Teratai Rt 12 RW 04 Kec. Sambikerep, Kel.Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
205	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	206 m²	Tambak utara no 32.belakang rel Rt 07 Rw 04, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
206	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	364 m²	SIMO KATRUNGAN KIDUL MAKAM WARGA SISI TIMUR RW 01 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
207	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	250 m²	SIMO HILIR TIMUR RW 03 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
208	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	94 m²	KUPANG GUNUNG BARAT 4-B RT 02, RW 09 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
209	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	104 m²	KUPANG GUNUNG BARAT 9 RT 02, RW 09 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
210	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	31 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR NO. 20 RT 01, RW 02 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
211	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	114 m²	SIMO KWAGEAN BUNTU KIDUL RT 05, RW 02 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
212	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	114 m²	SIMO KWAGEAN BUNTU KIDUL NO.30 RT 05, RW 02 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
213	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	150 m²	RT.05 RW.03 Jl. Simo Rejo Timur GG IX Kel. Simo Mulyo Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
214	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	52 m²	Wonorejo Indah Timur Gg 7C 1 RW 8 RT 4, Rungkut, Wonorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
215	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	52 m²	Wonorejo Indah Timur Gg 7C 2 RW 8 RT 4 Rungkut, Wonorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
216	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	95 m²	Wonorejo Indah Timur Gg 7C 3, RW 8 RT 4 Rungkut, Wonorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
217	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	100 m²	Wonorejo Selatan 3A RW 8 RT 2 RUNGKUT WONOREJO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
218	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	155 m²	Siwalankerto Timur Gg 3 RW 5 RT 7 Wonocolo Siwalankerto, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
219	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	84 m²	RT.01 RW.04 Jl. Banyu Urip Kidul 1C Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
220	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	130 m²	"RT.07 RW.02 Jl. Simorejo 27/7 Kel. Simomulyo Kec. Sawahan , Kota Surabaya" , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
221	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	100 m²	Tambak Mayor Barat Asemrowo Asemrowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
222	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	76 m²	SAMBIARUM LOR GANG VII, sambikerep, sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
223	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	100 m²	simo gunung kramat barat 26, banyu urip sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
224	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	250 m²	Kupang Gunung Timur gang 5 , 4A , 4c Putat Jaya Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
225	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	180 m²	Kupang gunung timur 7 Putat Jaya Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
226	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	140 m²	Kedung Anyar II Sawahan Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
227	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	50 m²	SIDOTOPO WETAN GG2/GG KECIL RT.04 RW.01 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
228	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	56 m²	Jl. Pakis Tirtosari No. 42-D RT.05 RW.04 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
229	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	80 m²	Bulak Kali Tinjang Baru Timur Gg Arbei, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
230	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	60 m²	Bulak Kali Tinjang Baru Timur Gg Kelengkeng, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
231	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	63 m²	Siwalankerto Gg P. Faiz, Rw 05 kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
232	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	165 m²	Jl Siwalankerto Timur III (Gg Musholla Kyai Ahmad), Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
233	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	225 m²	Kelurahan Morokrembangan RT 12 RW 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
234	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	600 m²	Jl. Kedondong Gg 3 RT 3 RW 5 Kel. Tegalsari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
235	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	750 m²	RT 9 RW 6 Kel. Morokrembangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
236	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	125 m²	Rejosari Gang MAWAR, RT 04 RW 03. Kel BENOWO, Kec PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
237	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	76.5 m²	JL.PAKAL MADYA Gang PETUYO UTARA, RT 03 RW 03, KEL PAKAL, KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
238	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	140 m²	JL Tanah Merah Utara 4 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
239	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	200 m²	Bulak Rukem Timur Gang 2AB, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
240	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	150 m²	RT 3 RW 5 KEL. DR SOETOMO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
241	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	80 m²	RT 5 RW 5 KEL. DR SOETOMO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
242	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	200 m²	Sulung Gg. 1 (RT.1 & RT.2/RW.1) , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
243	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	96 m²	Jalan Sulung Sambongan RT 1 RW 1 Kel. Alun-Alun Contong, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
244	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	139 m²	Jalan Sulung Gg. 4, Kel. Alun-Alun Contong, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
245	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	137 m²	Jalan Sulung Gg. 5, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
246	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	250 m²	Dinoyo Sekolahan wilayah RT 05 - RW 04 Alamat: Dinoyo Sekolahan 1/64 , RT/RW: 05/04 , Kecamatan/Kelurahan: Tegalsari/Keputran , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
247	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	205 m²	JL Ploso Timur I G, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
248	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	163 m²	SIMO KATRUNGAN KIDUL GG 1 RT 07, RW 01 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
249	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	319 m²	RT.05 RT.06 RW.01 Jl. Simo Jawar 7 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
250	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	98 m²	RT.06 RW.07 Jl. Simo Kalangan Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
251	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	123 m²	RT.04 RW.01 Jl. Dukuh Jelidro Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
252	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	286 m²	RT.05 RW.03 Jl. Banyu Urip Kidul GG 5 No 21 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
253	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	141 m²	RT.05 RW.03 Jl. Banyu Urip Kidul 4A/4 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
254	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	85 m²	RT.05 RW.14 Jl. Petemon Barat 236 Kel. Petemon Kec. Sawahan , Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
255	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	230 m²	Jl. Simomulyo Baru 2E/10 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
256	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	100 m²	RT.04 RW. 03 (sisi sebelah timur) Jl.Simorejo Timur No. 4 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
257	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	70 m²	PLATUK GG RELA RT.06 RW.02 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
258	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	120 m²	KEBALEN WETAN GG 4RT.04 RW.07 KEL.KEL.KREMBANGAN UTARA KEC. PABEAN CANTIKAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
259	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	100 m²	SIDOTOPO WETAN GG.2 RT.04 RW.01 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
260	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	100 m²	SIDOTOPO WETAN GG.02 RT.04 RW.01 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
261	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	64 m²	Jl. Dukuh Bulu RT.04 RW.04 Gg Anggrek Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
262	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	160 m²	Jl. Dukuh Karangan Tengah Gang IV RT.05 RW.03 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Musholla Al Azahr , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
263	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	125 m²	Jl. Dukuh Karangan Gang V No.7 RT.01 RW.03 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
264	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	107 m²	Jl. Dukuh Bulu RT.04 RW.04 Gang Cemara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
265	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	50 m²	Jl. Dukuh Bulu Indah RT.04 RW.04 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
266	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	300 m²	Jl. Tambak Mayor Barat RT.02 RW.07 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
267	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	80 m²	RT 03 RW 02, Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
268	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	88 m²	Jl. Dukuh Bulu Gang Mawar Merah RT.04 RW.04 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
269	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	76 m²	Jl. UKA 20-B Gang Melati, RT.11 RW.02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
270	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	68 m²	Jl. Jambangan IV-A No.44 RT.04 RW.02 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
271	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	77 m²	Jl. Pagesangan IV Gang Prasojo dan Gang Rahmatullah RT.01 RW.03 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
272	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	282 m²	Jl. Dukuh Pakis VI-A RT.04 RW.03 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
273	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	160 m²	Jl. Wiyung Gang 1 Tengah RT.01 RW.02 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
274	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	134 m²	Jl. Jambangan No 30 RT.03 RW.02 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
275	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	56 m²	Jl. Jambangan No 91-93 RT.03 RW.02 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
276	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	50 m²	Jl. Jambangan Gang IV No.9-11 RT.03 RW.02 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
277	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	57 m²	Jl. Jambangan Gang Makam RT.03 RW.05 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
278	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	68 m²	Jl. Pakis Tirtosari VII-A RT.06 RW.05 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
279	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	146 m²	DK.Sumber Langgeng Gang Utara, RT 03 RW 04, Kel Sumberrejo, Kec Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
280	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	208 m²	Dk Sambikerep Gg Blimbing RT 03 RW 04 Kec. Sambikerep, Kel.Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
281	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	91 m²	Jl. Sambisari Gang Buntu RT.01 RW.03 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
282	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	45 m²	JL.BEJI RAHAYU KAV 2, RT 02 RW 04, KEL PAKAL , KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
283	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	106 m²	PERUM P.B.I BLOK A1 KAV. RT 01 RW 11. KEL BABAT JERAWAT, KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
284	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	658 m²	SIMO KATRUNGAN KIDUL GG 2 RT 07, RW 01 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
285	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	60 m²	JL.KANDANGAN GUNUNG 2B, RT 09 RW 01, KEL KANDANGAN, KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
286	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	165 m²	JL.KANDANGAN GUNUNG TANGSI 1A, RT 09 RW 01, KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
287	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	126 m²	JL.KANDANGAN GUNUNG TANGSI 1. RT 09 RW 01. KEL KANDANGAN. KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
288	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	115 m²	DK Sambikerep Gg VII RT 01 RW 04 Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
289	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	128 m²	DK Sambikerep Gg Salak RT 08 RW 04 Kec.Sambikerep, Kel. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
290	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	80 m²	Sememi Kidul Gang 1B RT 1 RW 4 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
291	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	43 m²	JL.KANDANGAN GUNUNG PERTIWI 1A, RT 09 RW 01, KEL KANDANGAN, KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
292	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	40 m²	Kalikepiting Jaya 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
293	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	250 m²	Dukuh Bulak Banten Suropati 5E, Kelurahan Bulak Banteng - Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
294	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	95 m²	SIMO POMAHAN RT 08, RW 02 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
295	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	199 m²	SIMO POMAHAN BARU BARAT GG 5 RT 07, RW 05 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
296	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	150 m²	SIMO GUNUNG BARAT TOL II RT 06, RW 08 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
297	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	150 m²	SIMO GUNUNG BARAT TOL II NO. 14 KEBELAKANG RT 06, RW 08 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
298	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	200 m²	SIMO TAMBAKAN GG 1 RT 02, RW 09 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
299	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	88 m²	BANYU URIP KIDUL GG 8 RT 05 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
300	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	106 m²	BANYU URIP KIDUL 2 MOLIN RT 09 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
301	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	200 m²	BANYU URIP KIDUL GG 9 RT 06 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
302	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover	48 m²	Kalikepiting Jaya 5 Buntu, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
303	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	377 m²	Sepanjang jalan Wonorejo RT 01 RW 01, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
304	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	200 m²	Bulak Rukem Timur 2D, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
305	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	100 m²	Keputih Jaya Timur I, RW 02 Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
306	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	119 m²	Jalan Keputih Timur Jaya II, RW 02 Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
307	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	84 m²	CANDI LONTAR KIDUL GG IV, RT 04 RW 08, KEL.LONTAR, KEC SAMBIKEREP, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
308	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	150 m²	Jl Kedinding lor GG rambutan no 33 RT 12 RW 01, Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
309	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	72 m²	PERUM P.B.I. Blok O sampai Blok D. RT 04 RW 07. KEL BABAT JERAWAT. KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
310	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	146 m²	Jalan Sulung Gg. 2 Kel. Alun-Alun Contong, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
311	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	250 m²	Alamat: Keputran Kejambon II/115 , RT/RW: 08/12 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Embong Kaliasin , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
312	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	100 m²	JL Karang Asem Gang II , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
313	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	690 m²	JL Tengumung Mulya Baru III , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
314	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	150 m²	JL Bronggalan sawah 4J, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
315	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	250 m²	TENGGUMUNG WETAN GG.SALAK RT.10 RW.08 KEL.WONOKUSUMO KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
316	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	150 m²	RANDU BARAT GG.3 RT.04 RW.12 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
317	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	270 m²	RT 04 RW 04 Jalan Nginden 5, Kel. Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
318	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	73 m²	RT 05 RW 04, Kel. Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo Jalan Nginden 6 No. 7, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
319	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	140 m²	RT 02 RW 03 Jalan kutisari Selatan Gang 1, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
320	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	88 m²	RT 05 RW 02, Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo Jalan Medokan Semampir Blok K, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
321	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	161 m²	RT 02 RW 08 Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo Jalan Medokan Semampir Timur II No. 14, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
322	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	600 m²	Pondok Benowo Indah RT.04 RW.10 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
323	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	290 m²	Kendung Rejo Gang 1C Dan 1D RT 01 RW 04, Kel Sememi Kec Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
324	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	81 m²	Jl Medayu Utara Gg 13B, RW 14 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
325	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	36 m²	DK Sambikerep Gg Pepaya RT 03 RW 04 Kec. Sambikerep, Kel.Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
326	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	100 m²	JL.PRIMA KEBRAON 6, RT 03 RW 08. KEL KEBRAON, KEC KARANG PILANG, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
327	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	160 m²	JL.SUMBERSARI KAV H.BASUNI, RT 01 RW 02, KEL SUMBERREJO, KEC SUMBERREJO. KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
328	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	200 m²	Kalilom Lor GG Melati 2, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
329	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	55 m²	BEJI RAHAYU RT 02 RW 04, KEL PAKAL, KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
330	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	440 m²	Jalan Beji Selatan 1. RT 02 RW 04. Kel Pakal. Kec Pkal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
331	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	332 m²	Jalan Tubanan Baru 1 RT01 RW 08, Kel Karangpoh Kec Tandes, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
332	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	107 m²	Perum U.K.A Gang 7 RT 04 RW 02, Kel Sememi Kec Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
333	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	250 m²	Sepanjang jalan Kejambon Alamat: Keputran Kejambon 1/44 , RT/RW: 02/12 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Embong Kaliasin , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
334	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	245 m²	Kandangan Rejo Gang 8, RT 06 RW 01, Kel Kandangan, Kec Benowo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
335	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	94 m²	PERUM.GRAHA SURYA NATA, BLOK B3, RT 05 RW 05, KEL SUMBERREJO. KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
336	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	200 m²	Klakah Rejo Lor, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
337	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	300 m²	Lebak Indah Utara IV, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
338	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	200 m²	Tambak wedi Baru 12 RT 10, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
339	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	380 m²	JL. POGOT GG 6 RT 03 RW 05 KEL. TANAH KALI KEDINDING, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
340	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	81 m²	Jl Taman Makam Pahlawan RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
341	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	360 m²	Dukuh Bulak Banteng Suropati 3 , Kelurahan Bulak Banteng - Kenjeran, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
342	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover	135 m²	RT 5 RW 6 KEL. WONOREJO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
343	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover	20 m²	Kalikepiting Jaya 3, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
344	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover	192 m²	Dk sambikerep gg makam RT 01 RW 04 Kec.Sambikerep, Kel. Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
345	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm)	100 m²	Dharmawangsa Barat, Alamat: Dharmawangsa VI/05A , RT/RW: 09/01 , Kecamatan/Kelurahan: Gubeng/Airlangga , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
346	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	740 m²	JL.Beji Selatan RT 02 RW 04. Kel Pakal. Kec Pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
347	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	80 m²	JL,PRIMA KEBRAON Blok NN-OO [Bougenvile]. RT 05 RW 08, KEL KEBRAON, KEC KARANG PILANG, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
348	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	350 m²	Dukuh Bulak Banteng Suropati 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
349	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	133 m²	GRAHA SURYA NATA BLOK I.1, RT 03 RW 05. KEL SUMBERREJO, KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
350	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	120 m²	JL.KANDANGAN GUNUNG PERTIWI 1, RT 09 RW 01. KEL KANDANGAN, KEC BENOWO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
351	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	60 m²	Bulak Kali Tinjang Baru Timur Gg Manggis, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
352	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	650 m²	RT 7 RW 6 KEL. GUNDIH, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
353	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	157 m²	PERUM GRAHA SURYA NATA BLOK I, 2. RT 03 RW 05. KEL SUMBERREJO, KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
354	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	140 m²	PERUM P.B.I Blok O Dan N, RT 04 RW 07. KEL BABAT JERAWAT, KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
355	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	46 m²	Jl Siwalankerto Timur 3, Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
356	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	40 m²	Kalikepiting Jaya 3 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
357	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 6 cm)	150 m²	Halaman Balai RW 05 Kel Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
358	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 6 cm)	250 m²	Sepanjang jalan Dinoyo Sekolahan III, Alamat: Dinoyo Sekolahan 3/5 , RT/RW: 04/04 , Kecamatan/Kelurahan: Tegalsari/Keputran , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
359	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 6 cm)	275 m²	DK. KUWUKAN III RT 04 RW 06 Kel. Lontar, Kec Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
360	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 6 cm)	130 m²	KUWUKAN GARUDA KAV.RAMAYANA, RT 07 RW 06, KEL. LONTAR, KEC. SAMBIKEREP, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
361	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 6 cm)	50 m²	JL Manukan Kerto RT 08, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
362	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	315 m²	Keputih Tegal Timur Baru Gg 2, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
363	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	65 m²	Jl Keputih Tegal Gg IX, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
364	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	82 m²	Keputih Timur Jaya Blok F, RW 02 Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
365	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	126 m²	Keputih Timur Jaya Blok A, RW 02 Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
366	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	350 m²	RT 3 RW 5 KEL. TEGALSARI (CP: 081292093441 (BP SUNARTO)) , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
367	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	170 m²	Pacar Kembang 5-F/17 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
368	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	20 m²	JL. Tanah Merah Salep Buntu A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
369	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	250 m²	Jl. Sidonipah RT 10,9 dan 7 RW 2 simolawang/simokerto, Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
370	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	135 m²	JL.PRIMA KEBRAON 9, RT 04 RW 08 , KEL KEBRAON, KEC KARANG PILANG, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
371	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	106 m²	PERUM P.B.I. BLOK A2 KAV. RT 01 RW 11. KEL BABAT JERAWAT. KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
372	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	331 m²	Jl Mayangkara Gayungan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
373	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	135 m²	JL Klakah Rejo GG 5, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
374	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	70 m²	GG. Soko, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
375	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	150 m²	JL.Lebak Timur VI , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
376	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	150 m²	JL Lebak Timur 5 A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
377	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	150 m²	JL Lebak Timur V, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
378	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	100 m²	JL. Lebak Timur VII, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
379	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	20 m²	JL. Sidotopo wetan Baru GG IV A, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
380	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	500 m²	Jl. Tambak Wedi baru VI no 39, RT 3 RW 3 , Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
381	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	348 m²	Jl Medayu Utara Gang I Tengah, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
382	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jembatan Bentang 12 m	20 m²	JL. DUPAK MAGERSARI RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
383	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jembatan Bentang 12 m	100 m²	JL. DUPAK GANG 1 RT 05 RW 06 SEPANJANG JALAN GANG 1 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
384	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jembatan Bentang 12 m	50 m²	JL. DUPAK GANG 1 RT 04 RW 06 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
385	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jembatan Bentang 12 m	60 m²	JL. DUPAK GANG 7 RT 07 RW 07 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
386	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jembatan Bentang 6 m	6 m²	Jl. Pakis Gunung 2 No. 26 RT.06 RW.04 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
387	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jembatan Bentang 6 m	6 m²	RT 9 RW 6 Kel. Morokrembangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
388	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jembatan Bentang 8 m	32 m²	Jl Kutisari Besar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
389	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm)	116 m²	jalan gayungan 1b (sebelah kanan makam umum) surabaya., Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
390	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	20 m²	Jl Kertopaten 1 /1 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
391	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 15 ton	57 m²	RW 8 Kelurahan Baratajaya kecamatan Gubeng, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
392	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	100 m²	RT.04 RW.03 Jl. Simorejo Timur no. 4 Kel. Simomulyo Kec. Sawahan , Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
393	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	500 m²	RT 06 RW 03, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
394	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	183 m²	RT 08, RW 04, Jalan Nginden VI-B , Kel. Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
395	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	130 m²	KUWUKAN GARUDA KAV.RAMAYANA, RT 07 RW 06, KEL.LONTAR, KEC. SAMBIKEREP, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
396	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	170 m²	Dk.Jawu Kidul , RT 02 RW 03, Kel Sumberrejo, Kec Pakal, Pengusul : , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
397	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	71 m²	Alamat: Keputran Kejambon 1/43 , RT/RW: 03/12 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Embong Kaliasin , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
398	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	725 m²	JL Kalilom Lor Indah GG Melati 1 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
399	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Top-Bottom 100/100 Gandar 15 ton	110 m²	Jl. Lontar Telaga Indah No.15 RT.06 RW.02 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
400	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Top-Bottom 100/100 Gandar 15 ton	170 m²	JL. TEMBOK LOR 4 GAMBUHAN RT 05 RW 03 KELURAHAN BUBUTAN KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
401	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Top-Bottom 100/100 Gandar 15 ton	150 m²	JL. TEMBOK LOR 1 BUNTU RT 03 RW 03 KELURAHAN BUBUTAN KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
402	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Top-Bottom 200/200 Gandar 20 ton	200 m²	RT 3 RW 5 KEL. TEGALSARI, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
403	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	150 m²	JL. DUPAK MAGERSARI 1 RT 04 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
404	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	130 m²	JL. DUPAK MAGERSARI 2 RT 04 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
405	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	250 m²	JL. DUPAK MAGERSARI 3 RT 03 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
406	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	220 m²	JL. DUPAK MAGERSARI 4 RT 03 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
407	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	100 m²	RT 1 dan RT 2 RW 4, Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
408	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 15 ton	500 m²	Sepanjang jalan Urip Sumoharjo, Alamat: Keputran Pasar Kecil 2/9L , RT/RW: 02/01 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Embong Kaliasin , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
409	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 5 ton	100 m²	Jalan Bratang 1C No. 9, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
410	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 5 ton	50 m²	RT 01 RW 06, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo Jalan Kutisari Indah Utara V/52, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
411	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 5 ton	325 m²	Jl Sidodadi Baru RW 2 simolawang/simokerto Jl. Simolawang II RT 8/RW 2, Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
412	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 150/200 dengan Cover Gandar 20 ton	230 m²	Jl Raya Wonorejo dari perbatasn RW 2 sampai dengan dekat fasum parkir kebun bibit, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
413	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover Gandar 15 ton	100 m²	Bulak Setro Utara Gg Makam, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
414	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	115 m²	Jalan Dukuh Pakis GG 5 F RT 5 RW 4, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
415	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	210 m²	Jl Amir Mahmud Gg 1, RT 06 RW 02 Kel. Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
416	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	370 m²	Jl Amir Mahmud Gg 1, RT 08 RW 02 Kel. Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
417	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	120 m²	Jl Amir Mahmud Gg 4D, RT 10 RW 02 Kel. Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
418	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	190 m²	Jl Amir Mahmud Gg 1 RT 05 RW 02 Kel Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
419	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	525 m²	Jl Nambangan Perak (utara lapangan futsal), Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
420	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	700 m²	Jl Medayu Utara Gg 30D, Jl Medayu Utara Gg 30D1, Jl Medayu Utara Gg 30D2, RT 09 RW 14 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
421	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	320 m²	Sepanjang jalan Dinoyo Sekolahan II, Alamat: Dinoyo Sekolahan 2/40 , RT/RW: 08/04 , Kecamatan/Kelurahan: Tegalsari/Keputran , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
422	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	60 m²	Sepanjang jalan Kejambon, Alamat: Keputran Kejambon 1/44 , RT/RW: 02/12 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Embong Kaliasin , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
423	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	175 m²	Dukuh Bulak Banteng Suropati 4a, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
424	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	205 m²	RT.08 RW.07 Jl. Simo Kalangan Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
425	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	110 m²	RT.05 RW.07 Jl. Simo Kalangan 2/150 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
426	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	100 m²	RT.03 RW.07 Jl. Simo Kalangan Barat Tol Trowongan Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal , Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
427	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	300 m²	RT.03 RW.03 Jl. Simorejo Timur 3 no 68 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal , Kota Surabaya , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
428	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	100 m²	Gubeng Kertajaya 6 C & 6 Langgar Kertajaya Gubeng, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
429	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	78 m²	Ketintang 31 rt 4 rw 1 Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
430	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	45 m²	Jl Ketintang 1 wonokromo wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
431	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	48 m²	Jl Karangrejo 7/9C Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
432	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	75 m²	Jl Jetis Baru Gg 1 wonokromo wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
433	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	230 m²	Jl Jetis Kulon Gg 1 No. 32 Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
434	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	285 m²	Jetis Kulon 10 wonokromo wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
435	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	225 m²	Jl Karang Rejo 4 Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
436	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	190 m²	Jl Karang Rejo 3 Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
437	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	88 m²	Jl Karangrejo Gg 5 wonokromo wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
438	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	280 m²	Semampir Barat Gg. 6, medokan semampir, sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
439	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	111 m²	PULO TEGALSARI MAHASISWA 3, wonokromo, wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
440	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	105 m²	Sidosermo 4 Gg.5 & Sidosermo 29, sidosermo wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
441	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	74 m²	KETINTANG 2/14 Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
442	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	382 m²	Jl Mustika baru, Ngagel, Wonokromo , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
443	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	48 m²	Jl Karangrejo 7/9C RT 2 RW 2 Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
444	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	61 m²	Jl Jetis Kulon GG 1 No. 24-30 Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
445	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	59 m²	Jetis Kulon 10 / A Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
446	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	75 m²	Jetis Kulon 10 / D Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
447	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	37 m²	Jetis Baru GG II Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
448	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	36 m²	Jetis Baru GG III Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
449	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	50 m²	Jetis Baru GG IV Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
450	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m²	Jl karang Rejo 4 RT 4 RW 8 Wonokromo Wonokromo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
451	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	275 m²	BULAK BANTENG MADYA GG.5 RW.09 KEL.SIDOTOPO WETAN KEC.KENJERAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
452	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	310 m²	Griya Kebraon Utara Gang IX Blok AM.21 RT.03 RW.09 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
453	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	700 m²	RT 05 RW 06 Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
454	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	600 m²	Dukuh Pakis Gang 3 RT 3 RW 6 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
455	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	250 m²	Jl. Kampung Malang Kulon 1 RT09 RW11, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
456	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	420 m²	Bulak Setro Gang 1, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
457	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	200 m²	Bulak Setro 3A, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
458	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	60 m²	Wonorejo Gang Dalam RT 03 RT 02 RW 01 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
459	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	500 m²	Jl Raya Tambak Medokan Ayu, RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
460	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	565 m²	Jl Tambak Medokan Ayu Gg VI B, RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
461	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	500 m²	Wonorejo Selatan 6 RT 10 RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
462	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	170 m²	JL. DUPAK GANG 5 RT 10 RW 06 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
463	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	550 m²	Wonorejo Indah Timur Gg 3 RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
464	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	210 m²	JL. DUPAK GANG 4 RT 08 RW 06 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
465	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	600 m²	JL. DUPAK JAYA RT 3 RW 07 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
466	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	66 m²	Jl. Jambangan IX RT.06 RW.03 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
467	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	450 m²	Bulak Rukem Timur 2G, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
468	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	100 m²	Baratajaya 20,21,22 RT.08 RW. 03, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
469	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	133 m²	RT 01 RW 14 Kel Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
470	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	71 m²	Alamat: Keputran Kejambon 1/43 , RT/RW: 03/12 , Kecamatan/Kelurahan: Genteng/Embong Kaliasin , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
471	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	725 m²	JL Kalilom Lor Indah GG Melati 2 , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
472	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	450 m²	Jl Tambak Medokan Ayu Gang 9, RT 08 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
473	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	700 m²	Medayu Utara Gg 11 & 15 RT 01 RW 12 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
474	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	1250 m²	Alamat: Simolawang II/80C , RT/RW: 03/01 , Kecamatan/Kelurahan: Simokerto/Simolawang, Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
475	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	50 m²	Sepanjang jalan Dinoyo Sekolahan IV dan Dinoyo Sekolahan V, Alamat: Dinoyo Sekolahan 5/7A , RT/RW: 10/04 , Kecamatan/Kelurahan: Tegalsari/Keputran , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
476	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	275 m²	Pembuatan saluran air baru sepanjang jalan Gubeng Airlangga 4 sebelah Barat, Alamat: Gubeng Airlangga 4/70 , RT/RW: 07/02 , Kecamatan/Kelurahan: Gubeng/Airlangga , Kota Surabaya , Kota Surabaya, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
477	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	168 m²	SIMO KATRUNGAN KIDUL GG 1 RT 07, RW 01 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
478	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	80 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 5 RT 02, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
479	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	240 m²	PERUM P.B.I. Blok U 1 Sampai Blok U24. RT 06 RW 07. KEL BABAT JERAWAT, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
480	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	260 m²	PERUM P.B.I. Blok Y1 Sampai Blok Y24.RT 06 RW 07. KEL BABAT JERAWAT. KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
481	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	240 m²	PERUM P.B.I. Blok V1 sampai V24. rt 06 rw 07. kel babat jerawat. kec pakal, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
482	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	1250 m²	PERUM P.B.I. Blok DS,DN,DR, dan BLok DM. RT 11 RW 07. KEL BABAT JERAWAT. KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
483	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	180 m²	Medayu Utara Gg 13B, RT 01 RW 14 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
484	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	125 m²	Jl Bulak Setro 1, RT 01 RW 04, Kel. Bulak, Kec Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
485	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	510 m²	Jl Raya Menur - Semolowaru, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
486	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	180 m²	Jl Nginden Semolo, Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
487	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	375 m²	Jl Mulyorejo Barat-Selatan dan Tengah, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
488	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	1050 m²	Wonorejo Selatan II RT 05 RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
489	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	160 m²	Wonorejo Indah Timur Gg 8, RW 08 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
490	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	150 m²	Wonorejo Indah Timur Gg 9, RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
491	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	540 m²	Wonorejo Indah Timur Gg 6, RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
492	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	300 m²	JL. DUPAK BARU GANG 2 RT 08 RW 05 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
493	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	700 m²	RT 2 RW 7 Medokan Asri Tengah (Jl Medokan Asri Tengah II & III), Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
494	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	880 m²	RT 3 RW 7 Medokan Asri Tengah (Jl Medokan Asri Tengah IV & V), Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
495	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	740 m²	RT 1 RW 7 Medokan Asri Tengah (Jl Medokan Asri Tengah I & taman), Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
496	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	100 m²	Medayu Utara Gg 30A, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
497	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	250 m²	RT 09 RW 02 Kel. Medokan Ayu Blok Raya, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
498	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	1200 m²	Wonorejo Selatan 1, Kel. Medokan Ayu, kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
499	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	400 m²	Wonorejo Selatan 5, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
500	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	420 m²	Wisma Kedung Asem Indah Blok G, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
501	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	100 m²	RT 3, RT 4 RW 5 KEL. WONOREJO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
502	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	100 m²	RT 6 RW 6 KEL. WONOREJO, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
503	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	66 m²	DK,JAWU KIDUL ,RT 02 RW 03 KEL SUMBERREJO KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
504	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	390 m²	Kuwukan Garuda RT 07 RW 06 Kel.Lontar, Kec.Sambikerep, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
505	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	460 m²	RAYA KUWUKAN LAPANGAN RT 06 RW 06 KEL.LONTAR, KEC. SAMBIKEREP, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
506	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	160 m²	DK SAMBIKEREP GG MAKAM RT 1 RW 04 KEC.SAMBIKEREP, KEL. SAMBIKEREP, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
507	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 15 ton	425 m²	Perempetan barat dan timur wilayah RT 02 RW 14, Medayu Utara Gang 3, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
508	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	100 m²	Jl Kyai Tambak Deres, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
509	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	125 m²	Bulak Setro 2, Kel. Bulak, Kec, Bulak, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
510	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	600 m²	Jl Keputih Timur Jaya, RW 02 Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
511	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m²	Tenggilis Mulya RT 5 RW 6, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
512	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	415 m²	RT 09 RW 02 Kel. Medokan Ayu Blok A, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
513	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	230 m²	RT 09 RW 02 Kel. Medokan Ayu Blok E, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
514	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	230 m²	RT 09 RW 02 Kel. Medokan Ayu Blok F, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
515	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	215 m²	RT 09 RW 02 Kel. Medokan Ayu Blok G, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
516	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	1050 m²	Jl Wonorejo Selatan IV, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
517	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	225 m²	Jl Margorejo II G, Kel. Margorejo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
518	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	1000 m²	Jl Kutisari Besar, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
519	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 3-29 RT 03, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
520	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	180 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 1 RT 03, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
521	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	80 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 1C RT 04, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
522	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	68 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 1D RT 04, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
523	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	380 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR GG 2 RT 05, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
524	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	330 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR GG 3 RT 06 RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
525	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	100 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR GG 1-A RT 07, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
526	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	150 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 31-53 RT 07, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
527	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	310 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR GG 8 RT 08, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
528	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	310 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR GG 9 RT 09, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
529	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	240 m²	SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR GG 10 RT 10, RW 02 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan , Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
530	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	1300 m²	Jalan Raya Medokan Sawah RW 01 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
531	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	1520 m²	Medokan Ayu Tambak VIII, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

No	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume	Lokasi	Validasi/ Keterangan
532	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	608 m²	Jl Siwalankerto Timur 1, Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
533	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	770 m²	sepanjang jalan Siwalankerto Timur (UK Petra s.d Asem Bolong), Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
534	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	320 m²	Dukuh Bulak Banteng Patriot Gang 6, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
535	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	250 m²	JL.PRIMA KEBRAON Blok NN-OO [Bogenvile]. RT 05 RW 08. KEL KEBRAON KEC KARANG PILANG, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
536	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 15 ton	500 m²	SEPANJANG JALAN KEDUNGSROKO RW 002 KEL. PACAR KEMBANG, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025
537	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 15 ton	350 m²	JL.RAYA BEJI RW 04,KEL PAKAL KEC PAKAL, Kota Surabaya	Teralokasi pada TA 2025

4.2.5 Pembangunan Pengarusutamaan Gender

Berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan Musrenbang Perempuan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan.

Berdasarkan aspirasi perempuan yang diterima dalam Musrenbang Perempuan, terdapat beberapa saran dan masukan untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan perempuan akan akses pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi serta harapan perempuan untuk dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suara, berkiprah dan berkreasi dalam berbagai aspek pembangunan. Disamping itu, terdapat aspirasi untuk meningkatkan inklusivitas kebijakan untuk setiap perempuan, termasuk perempuan disabilitas, agar mendapatkan kesempatan dalam Pembangunan kota. Lebih lanjut, terdapat masukan untuk memastikan hak-hak perempuan dihormati serta terdapat pusat pengembangan keterampilan bagi perempuan agar dapat mandiri dalam kehidupan bermasyarkat. Aspirasi ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi di kalangan perempuan mengenai pentingnya kesetaraan dan keadilan gender, yang menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Masukan yang diterima dalam musrenbang perempuan kemudian dituangkan dalam program dan kegiatan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025. Usulan terhadap Optimalisasi Satgas PPA dan PKBM sebagai relawan sahabat perempuan dan anak bersama Tim KRPPA Kelurahan dan Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait termasuk unsur Pentahelix dan lainya untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak mendukung Kota Surabaya sebagai DRPLA (Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak) diakomodir dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan pengampu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana. Usulan terhadap program prioritas Pendidikan untuk anak perempuan dan perempuan untuk mendapatkan akses dalam bidang Pendidikan yang lebih tinggi untuk mewujudkan kesetaraan Gender yang inklusif diakomodir dalam sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan dengan pengampu Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan BAZNAS. Usulan terhadap pemberikan Pola Asuh yang baik dalam keluarga,mencegah terjadinya Kasus kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurunkan pekerja anak dan perkawinan anak bersama stake holder terkait termasuk pemerintah dan unsur lainnya diakomodir dalam sub kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) dengan pengampu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Usulan terhadap Perempuan mampu mandiri secara Sosial dan Ekonomi dalam membantu Peningkatan Pendapatan Perempuan untuk Keluarga dan berpartisipasi dalam pembangunan Responsif Gender kota Surabaya diakomodir dalam sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) dengan pengampu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta diakomodir dalam subkegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota dengan pengampu Dinas Koperasi dan Perdagangan serta berkolaborasi dengan BAZNAS, Bangga Surabaya Peduli (BSP), perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) serta memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam pemberian modal usaha bagi pengusaha, pedagang dan pemilik toko kelontong perempuan.

4.2.6 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar dan menjaga mutu peayanan dasar melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM), Pemerintah Kota

Surabaya menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM yang tertuang dalam Peraturan walikota Surabaya Nomor 138 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kota Surabaya Tahun 2024-2025. Rencana aksi tersbut menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi penerapan SPM. Target pencapaian SPM pelayanan dasar Kota Surabaya disampaikan pada Tabel IV.6 di bawa ini.

Tabel IV.6
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
			2025	
BIDANG PENDIDIKAN				
1.	**Pendidikan Dasar Usia Dini**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	92,744	Dinas Pendidikan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	Dinas Pendidikan
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	18,88	Dinas Pendidikan
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	80,16	Dinas Pendidikan
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0,42	Dinas Pendidikan
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	Dinas Pendidikan
	6 . Indeks distribusi guru	%	100	Dinas Pendidikan
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	25,92	Dinas Pendidikan
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	0,59	Dinas Pendidikan
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	Dinas Pendidikan
2.	**Pendidikan Dasar**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	448,996	Dinas Pendidikan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	SD			
	1 . Angka partisipasi kasar	%	103,5	Dinas Pendidikan

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	Dinas Pendidikan
	3 . Angka partisipasi murni	%	98,66	Dinas Pendidikan
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	84,77	Dinas Pendidikan
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	66,29	Dinas Pendidikan
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	3,41	Dinas Pendidikan
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	0,90	Dinas Pendidikan
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73,72	Dinas Pendidikan
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	Nilai	72,59	Dinas Pendidikan
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	53,16	Dinas Pendidikan
	11 . Indeks distribusi guru	%	62,87	Dinas Pendidikan
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	23,86	Dinas Pendidikan
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0,32	Dinas Pendidikan
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	Dinas Pendidikan
	SMP			
	1 . Angka partisipasi kasar	%	99,03	Dinas Pendidikan
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	Dinas Pendidikan
	3 . Angka partisipasi murni	%	87,65	Dinas Pendidikan
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	87,94	Dinas Pendidikan
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	69,93	Dinas Pendidikan
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4,05	Dinas Pendidikan
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,64	Dinas Pendidikan
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73,39	Dinas Pendidikan
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	Nilai	70,61	Dinas Pendidikan
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	72,51	Dinas Pendidikan
	11 . Indeks distribusi guru	%	80,92	Dinas Pendidikan
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	32,42	Dinas Pendidikan
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0,54	Dinas Pendidikan
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	Dinas Pendidikan
3.	**Pendidikan Kesetaraan**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	4,865	Dinas Pendidikan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	Dinas Pendidikan
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	Dinas Pendidikan
	3 . Angka partisipasi murni	%	90,8	Dinas Pendidikan
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	52,92	Dinas Pendidikan
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	43,58	Dinas Pendidikan
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3,93	Dinas Pendidikan
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	2,81	Dinas Pendidikan

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	65,56	Dinas Pendidikan
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	Nilai	64,24	Dinas Pendidikan
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	Tidak ada	Dinas Pendidikan
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	Dinas Pendidikan
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	Tidak ada	Dinas Pendidikan
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	Tidak ada	Dinas Pendidikan
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	Dinas Pendidikan
BIDANG KESEHATAN				
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	43,532	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	4,353	Dinas Kesehatan
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	3.917.880	Dinas Kesehatan
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	43,532	Dinas Kesehatan
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	43,532	Dinas Kesehatan
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	43,532	Dinas Kesehatan
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	6,530	Dinas Kesehatan
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	43,532	Dinas Kesehatan
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	43,532	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	3,678	Dinas Kesehatan
	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,848	Dinas Kesehatan
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10,598	Dinas Kesehatan
	12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	43.532	Dinas Kesehatan
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	41,553	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Formulir Partograf	Formulir	41,553	Dinas Kesehatan
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	41,553	Dinas Kesehatan
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	41,553	Dinas Kesehatan
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	3,678	Dinas Kesehatan
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,848	Dinas Kesehatan

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10,598	Dinas Kesehatan
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	39,576	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	3,957	Dinas Kesehatan
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	3,957	Dinas Kesehatan
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	3,957	Dinas Kesehatan
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	3,957	Dinas Kesehatan
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	118,728	Dinas Kesehatan
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3,957	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	3,660	Dinas Kesehatan
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,848	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10,598	Dinas Kesehatan
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	163,907	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	163.907	Dinas Kesehatan
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	163,907	Dinas Kesehatan
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	163,907	Dinas Kesehatan
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	21,004	Dinas Kesehatan
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	167,815	Dinas Kesehatan
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	39,576	Dinas Kesehatan
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	13,192	Dinas Kesehatan
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	40,268	Dinas Kesehatan
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	10,067	Dinas Kesehatan
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	Vaksin	10,067	Dinas Kesehatan
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	10,067	Dinas Kesehatan
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	10,067	Dinas Kesehatan
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	40,605	Dinas Kesehatan
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	10,151	Dinas Kesehatan
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	10,151	Dinas Kesehatan
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	163,907	Dinas Kesehatan
	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	163,907	Dinas Kesehatan
	18 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3,660	Dinas Kesehatan

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	19 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,848	Dinas Kesehatan
	20 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10,598	Dinas Kesehatan
	21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	502	Dinas Kesehatan
	22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	28,824	Dinas Kesehatan
	23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	12,183	Dinas Kesehatan
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	329,696	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Buku raport kesehatanku	Buku	329,696	Dinas Kesehatan
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	65	Dinas Kesehatan
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	329,696	Dinas Kesehatan
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	756	Dinas Kesehatan
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	756	Dinas Kesehatan
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	329,696	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,848	Dinas Kesehatan
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10,598	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	502	Dinas Kesehatan
	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	297	Dinas Kesehatan
	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	28,824	Dinas Kesehatan
	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	26,282	Dinas Kesehatan
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	2.034.759	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			Dinas Kesehatan
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	126	Dinas Kesehatan
	2 . Alat ukur berat badan	Unit	795	Dinas Kesehatan
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	795	Dinas Kesehatan
	4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	795	Dinas Kesehatan
	5 . Alat : Tensimeter	Unit	795	Dinas Kesehatan
	6 . Alat : Glukometer	Unit	2,217	Dinas Kesehatan
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	19,681	Dinas Kesehatan
	8 . Alat : Lancet	Unit	9,079	Dinas Kesehatan
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	7,342	Dinas Kesehatan

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	63	Dinas Kesehatan
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	756	Dinas Kesehatan
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3,349	Dinas Kesehatan
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,848	Dinas Kesehatan
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10,598	Dinas Kesehatan
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	502	Dinas Kesehatan
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	297	Dinas Kesehatan
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	28,042	Dinas Kesehatan
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	337,268	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			Dinas Kesehatan
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	337,268	Dinas Kesehatan
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	337.268	Dinas Kesehatan
	3 . Buku kesehatan lansia	Buku	43,890	Dinas Kesehatan
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3,746	Dinas Kesehatan
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,848	Dinas Kesehatan
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10,598	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	502	Dinas Kesehatan
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	297	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	28,042	Dinas Kesehatan
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	749,560	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	126	Dinas Kesehatan
	2 . Tensimeter	Unit	795	Dinas Kesehatan
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	756	Dinas Kesehatan
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3,746	Dinas Kesehatan
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,848	Dinas Kesehatan

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10,598	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	297	Dinas Kesehatan
	8 . Obat Hipertensi	Paket	749,560	Dinas Kesehatan
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	105,081	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Alat : Glukometer	Unit	2,217	Dinas Kesehatan
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	19,681	Dinas Kesehatan
	3 . Alat : Kapas Alkohol	Unit	7,342	Dinas Kesehatan
	4 . Alat : Lancet	Unit	9,079	Dinas Kesehatan
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	756	Dinas Kesehatan
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	126	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3,349	Dinas Kesehatan
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,848	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10,598	Dinas Kesehatan
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	502	Dinas Kesehatan
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	297	Dinas Kesehatan
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	105,081	Dinas Kesehatan
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5,609	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	63	Dinas Kesehatan
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	3	Dinas Kesehatan
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	756	Dinas Kesehatan
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	63	Dinas Kesehatan
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	63	Dinas Kesehatan
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	63	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	63	Dinas Kesehatan
11	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	65,163	Dinas Kesehatan

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	63	Dinas Kesehatan
	2 . Reagen Zn TB	Paket	1,303	Dinas Kesehatan
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	65,163	Dinas Kesehatan
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu	Paket	130,326	Dinas Kesehatan
	Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering			
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	65,163	Dinas Kesehatan
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	756	Dinas Kesehatan
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	63	Dinas Kesehatan
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	3,875	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10,598	Dinas Kesehatan
	10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	930	Dinas Kesehatan
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	451	Dinas Kesehatan
	12 . Tenaga kesehatan Masyarakat	Orang	297	Dinas Kesehatan
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	28,042	Dinas Kesehatan
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	53,801	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	53,801	Dinas Kesehatan
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	53,801	Dinas Kesehatan
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	53.801	Dinas Kesehatan
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	53.801	Dinas Kesehatan
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	3.873	Dinas Kesehatan
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10,598	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,848	Dinas Kesehatan
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	930	Dinas Kesehatan

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	297	Dinas Kesehatan
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	28,042	Dinas Kesehatan
BIDANG PEKERJAAN UMUM				
1	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	2.992.285	PDAM Surya Sembada - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	627.313	PDAM Surya Sembada - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	627.313	PDAM Surya Sembada - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	0	PDAM Surya Sembada - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	0	PDAM Surya Sembada - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Jiwa	3.000.076	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	588.732	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah	Rumah Tangga	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	pedesaan dengan			
	kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)			
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	5.110	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	5.110	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT				
1	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan ; Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	50	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan ; Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan ; Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	KATEGORI TRANTIBUM			
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1520	Satuan Polisi Pamong Praja
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional,	Unit	430	Satuan Polisi Pamong Praja
	c. perlengkapan operasional)			

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	12	Satuan Polisi Pamong Praja
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang	978	Satuan Polisi Pamong Praja
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja
KATEGORI DAMKAR				
1	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	684	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	684	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di	dokumen	10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	Pemukiman, … dst.)			
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket dll.)	unit	875	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	684	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta layanan dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	684	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
KEBENCANAAN				
1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	732.378	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana orang	Orang	730.728	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan orang wahana multimedia)	Orang	1.650	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll)	Unit	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BIDANG SOSIAL				
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**			

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		40	Dinas Sosial
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	Dinas Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	8	Dinas Sosial
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	40	Dinas Sosial
	4 . Penyediaan sandang	Orang	40	Dinas Sosial
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	3	Dinas Sosial
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	40	Dinas Sosial
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	40	Dinas Sosial
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	40	Dinas Sosial
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	Dinas Sosial
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	40	Dinas Sosial
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	40	Dinas Sosial
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	13	Dinas Sosial
	13 . Layanan rujukan	Orang	7	Dinas Sosial
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		130	Dinas Sosial
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	Dinas Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	30	Dinas Sosial
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	130	Dinas Sosial
	4 . Penyediaan sandang	Orang	130	Dinas Sosial
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	130	Dinas Sosial
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	130	Dinas Sosial
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	130	Dinas Sosial

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	Dinas Sosial
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	130	Dinas Sosial
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	130	Dinas Sosial
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	Dinas Sosial
	12 . Layanan rujukan	Orang	5	Dinas Sosial
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		215	Dinas Sosial
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	Dinas Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	215	Dinas Sosial
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	215	Dinas Sosial
	4 . Penyediaan sandang	Orang	215	Dinas Sosial
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	14	Dinas Sosial
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	215	Dinas Sosial
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	215	Dinas Sosial
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	20	Dinas Sosial
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	Dinas Sosial
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	215	Dinas Sosial
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	215	Dinas Sosial
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	26	Dinas Sosial
	13 . Layanan rujukan	Orang	8	Dinas Sosial
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		1100	Dinas Sosial
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	100	Dinas Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	700	Dinas Sosial
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1100	Dinas Sosial
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1100	Dinas Sosial
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1100	Dinas Sosial
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1100	Dinas Sosial
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	180	Dinas Sosial
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	25	Dinas Sosial
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1100	Dinas Sosial
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	450	Dinas Sosial
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	70	Dinas Sosial
	12 . Layanan rujukan	Orang	850	Dinas Sosial
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**			
	PENERIMA LAYANAN DASAR			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 . Penyediaan sandang	Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.2.7 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan upaya penting dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem global. Emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrogen oksida (N2O), berasal dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas pertanian. Penurunan emisi GRK merupakan bagian dari upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tujuan yakni :

1. **SDG 13 : *Climate Action* (Aksi Iklim)**

   Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dengan mengurangi emisi GRK.

2. **SDG 7: *Affordable and Clean Energy* (Energi Bersih dan Terjangkau)**

   Meningkatkan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua, termasuk transisi ke energi terbarukan yang lebih rendah emisi

3. **SDG 11: *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan)**

   Membangun kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

4. **SDG 12**: ***Responsible Consumption and Production*** (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)

   Mengurangi limbah dan mengelola sumber daya alam secara lebih efisien untuk mengurangi emisi dari produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan.

Sejak tahun 2022 jumlah emisi gas rumah Kaca di Kota Surabaya mengalami peningkatan, hal ini salah satunya disebabkan karena mulai bergeraknya sektor perdagangan dan industri di Kota Surabaya dan daerah sekitar setelah sempat tertahan karena adanya pembatasan aktivitas akibat terjadinya pandemi Covid-19. Untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, berbagai langkah strategis akan diambil antara lain:

1. Transportasi ramah lingkungan dengan mengembangkan dan mempromosikan penggunaan transportasi umum. Selain itu pada sejak tahun 2024 secara bertahap dilakukan konversi kendaraan operasional dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik baik dengan pengadaan kendaraan baru maupun melalui skema sewa.
2. Efisiensi energi di perkantoran dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau;Pengelolaan Limbah dengan mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola limbah dengan cara yang lebih efisien untuk mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan sampah
4. Edukasi dan Kesadaran Publik dengan adanya kampung proklim, sekolah adiwiyata, putra/putri lingkungan serta kader masyarakat. Diharapkan dapat mingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi emisi GRK dan cara-cara praktis untuk berkontribusi melalui edukasi dan kampanye publik.

4.2.8 Inovasi Pembangunan Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peranan inovasi daerah ini sangat penting dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sesuai dengan tema RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 ***"Penguatan Kapasitas Surabaya Untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis",*** pada tahun 2025 akan dilaksanakan beberapa inovasi unggulan guna mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan tahun 2025, antara lain :

1. Penataan, *branding* dan promosi kawasan wisata juga untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di Kota Surabaya. Program ini dilaksanakan untuk mengembalikan lagi geliat ekonomi di Kota Surabaya

pasca Pandemi Covid-19 melanda. Dilakukan secara bertahap sejak tahun 2024, penataan kawasan Wisata Kota Lama Surabaya akan berlanjut pada tahun 2025. Terdapat 4 zona yakni zona eropa, zona pecinan, zona melayu dan zona arab yang pada tahun 2025 akan tertintegrasi. Destinasi wisata baru ini diharapkan dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Surabaya dan memingkatkan transaksi ekonomi khususnya di sektor usaha hotel, restoran dan kafe;

2. Optimalisasi e-Peken, Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN) berbentuk aplikasi yang dapat diakses melalui website maupun playstore pada android. Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi media transaksi untuk toko kelontong, UMKM dan Sentra Wisata Kuliner. Dengan adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dan Pengadaan Barang/Jasa e-Peken maka e-Peken tidak hanya sebagai meningkatkan omset dari pelaku UMKM saja namun juga mendukung optimalisasi belanja untuk UMKM dan upaya pengembangan yang dilakukan pada Tahun 2025 berupa :
    - Kolaborasi E-Peken Surabaya dengan BUMD RPH;
    - Kolaborasi dengan pedagang *fresh market;*
    - Penambahan fitur pengiriman *instant;*
    - Optimalisasi UMKM sebagai penyedia e-Katalog (Dukungan P3DN).
3. Kios TPID dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Surabaya Kios TPID telah didirikan sebanyak 13 Pasar yang berlokasi di Pasar Wonokromo, Pasar Pucang Anom, Pasar Genteng Baru, Pasar Tambahrejo, Pasar Kupang Gunung, Pasar Nambangan, Pasar Sememi, Pasar Raci Pakal, Pasar Gunung Anyar, Pasar Jambangan, Pasar Dukuh Menanggal, Pasar Kutisari, dan Pasar Soponyono. Pasar Nambangan sebagai salah satu pasar pangan aman dan berkualitas bagi masyarakat terpilih menjadi nominator dalam pelaksanaan lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun 2024. Selanjutnya direncanakan untuk dilakukan penambahan Kios TPID yang berlokasi di Pasar Bendul Merisi, Pasar Inpres Bratang, Pasar Pacar Keling, Pasar Dukuh Kupang, Pasar Simo Gunung, Pasar Babaan, Pasar Gubeng

Masjid, Pasar Banjar Sugihan, Pasar Dupak Bandarejo, Pasar Gayungsari, Pasar Kembang. Selain itu, direncanakan pembangunan Kios TPID di 4 rusun yaitu : Rusun Sumbo, Rusun Tanah Merah, Rusun Randu Agung dan Rusun Penjaringan Sari 3;

4. Peta Potensi Investasi Kota Surabaya, sebagai alat utama promosi yang dapat diakses secara *online* maupun katalog investasi. Diharapkan Peta Potensi Investasi Kota Surabaya dapat menggambarkan karakteristik wilayah, demografi, terutama potensi dan peluang investasi di masing-masing wilayah sehingga investor mampu menganalisis lokasi yang dianggap paling sesuai untuk berinvestasi serta mendapatkan gambaran yang utuh tentang investasi di Kota Surabaya;
5. *Surabaya Great Investment Promotion*. Event Promosi Investasi Kota Surabaya sebagai momen untuk pemasaran investasi di Kota Surabaya. Selain itu, calon investor juga akan mendapatkan pendampingan dan informasi yang mendalam tentang kemudahan pelayanan seluruh perizinan di Kota Surabaya;
6. Pesona Buaya (Pendampingan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMK Surabaya). Pesona Buaya dilatarbelakangi oleh pelaku usaha di banyak kelurahan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha dikarenakan belum mampu menjangkau layanan perizinan di Kota Surabaya. Inovasi ini dilakukan dalam bentuk pendampingan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha di seluruh Kelurahan sehingga dapat menjembatani kebutuhan pelaku usaha terkait pemenuhan Nomor Induk Berusaha serta izin-izin pendukung usaha lainnya;
7. Lapis Lupis (Layanan Asistensi dan Fasilitasi LKPM untuk peningkatan investasi). Inovasi yang memiliki fokus untuk asistensi pemenuhan kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh investor di Kota Surabaya. Lapis Lupis memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan capaian nilai investasi di Kota Surabaya melalui pelaporan yang baik, sistematis, dan tepat waktu;
8. ***ASSIK*** merupakan sinergi antara kebutuhan perusahaan-perusahaan di Kota Surabaya dengan Pencari Kerja, baik berupa peningkatan softskill, keterampilan, pelatihan maupun bimbingan teknis yang telah diserap pada sektor formal dan informal akan tetap dilanjutkan dengan menambah fitur *link and match* sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Beberapa pengembangan sistem ASSIK dilakukan dengan menambah beberapa fitur diantaranya :

- WA Blast yang berupa penambahan fitur pengiriman lowongan melalui platform WA;
- Pelatihan dan perluasan kesempatan kerja untuk Program Padat Karya;
- Perbanyak Bimtek informal untuk supporting peningkatan kompetensi;
- *Link and Match* kebutuhan sertifikasi umum perusahaan;
- Kerjasama dengan SMK AKAD AKL;
- Dukungan program 1 Keluarga 1 Sarjana akan diperbanyak pelatihan dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja;
- Selaras dengan ekonomi sirkular dan padat karya, akan ada pendataan industri untuk program 1 Kelurahan 1 Padat Karya/Industri

9. Program Padat Karya yang tidak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja namun juga pada pengurangan kemiskinan ekstrem sesuai Surat Keputusan Walikota 188.45/556/436.1.2/2022 tentang Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem beserta Surat Edaran Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Program Padat Karya mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pendapatan Keluarga Miskin. Pemerintah Kota Surabaya akan mengoptimalkan Program Padat Karya dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk memproduksi atau jasa yang setiap tahunnya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, agar keluarga miskin hasil pelatihan pada Program Padat Karya memiliki penghasilan dan mentas dari kemiskinan ekstrem;
10. Program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya pertanian, peternakan serta perikanan (urban farming), juga merupakan program unggulan untuk membantu perekonomian masyarakat khusunya masyarakat yang terdata sebagai keluarga miskin. Program budidaya ini memanfaatkan lahan-lahan aset milik pemerintah kota menjadi lahan produktif untuk budidaya perikanan, peternakan dan pertanian;
11. Pemberdayaan masyarakat di *Adventure Land* Romokalisari, merupakan program unggulan yang juga menjadi inovasi di sektor perikanan. *Adventure Land* Romokalisari merupakan bangunan bekas tempat pelelangan ikan bernama sentra ikan romokalisari yang terletak di Kecamatan Benowo. Seiring

dengan berkurangnya hasil perikanan tangkap di kawasan tersebut membuat bangunan ini menjadi sepi pengunjung. Kini kawasan sentra ikan romokalisari telah berubah menjadi *Adventure Land* Romokalisari dengan daya tarik wisata utama adalah wisata edukasi dan wisata bahari. Di *Adventure Land* Romokalisari terdapat sejumlah 31 orang masyarakat dengan status keluarga miskin yang berhasil diberdayakan menjadi petugas / operator wahana. Terdapat 8 orang pelaku UMKM mamin dan 10 penjual ikan segar yang juga diberdayakan. Program pemberdayaan di adventure land akan terus dikembangkan agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung tiap tahunnya;

12. ***E-rusun***, merupakan aplikasi yang digunakan untuk pembayaran retribusi rusun. Inovasi untuk memberikan kemudahan bagi penghuni rusun guna melakukan pembayaran restribusi secara online. Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa pengembangan antara lain menambahkan fitur pengembangan jaminan yang diperuntukkan untuk penghuni yang baru masuk, fitur pembayaran sewa unit hunian rusun, dan menu laporan kerusakan rusun oleh petugas di rusun. Kemudian pada tahun 2025 akan melakukan pengembangan berupa proses sanksi administratif, Goes to Android, pendataan penghuni yang mengikuti program padat karya/pelatihan/intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya, serta integrasi sistem antar PD yaitu SSW, data keluarga miskin, padat karya dan data kependudukan;
13. ***e-rutilahu***, merupakan aplikasi untuk melakukan input usulan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) oleh Kelurahan. Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa pengembangan antara lain menambahkan fitur survey dan cetak BA survey, fitur mapping titik rutilahu, dan melakukan penyederhanaan tampilan aplikasi agar lebih mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian pada tahun 2025 akan melakukan pengembangan berupa penambahan fitur prioritas dan cetak BA KRPR (Kesepakatan Rencana Perbaikan Rumah);
14. Beasiswa Pemuda Tangguh, merupakan program unggulan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat usia sekolah di Kota Surabaya. Program ini tentunya diprioritaskan kepada masyarakat yang terdata sebagai keluarga miskin. Beasiswa ini diberikan mulai dari jejang Pendidikan SD/SMP/SMA sampai dengan jenjang Perguruan Tinggi. Adapun rincian

beasiswa yang diberikan antara lain biaya pendidikan, biaya pendukung pendidikan, seragam, serta sepatu. Tata cara pemberian beasiswa ini tercantum di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa;

15. Platform Digital Terpadu untuk Bantuan Sosial *(Integrated Social Assistance Digital Platform)* yaitu platform digital yang terintegrasi untuk mendata, memantau, dan menyalurkan bantuan sosial secara efisien kepada warga miskin;
16. Program Kewirausahaan Sosial *(Social Entrepreneurship Program)*. Program ini bertujuan untuk mendorong dan mendukung kewirausahaan di kalangan masyarakat miskin melalui penyediaan modal usaha, pelatihan bisnis, dan pendampingan;
17. Pengembangan Aplikasi ehealth terbaru melalui fitur pendaftaran catin yang dimana tercatat dalam aplikasi PWS pemantauan aplikasi setempat yang juga telah terbridging dengan DPMPTSP dan DP3APPKB.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program

Rencana Program Tahun 2025 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 yang mempertimbangkan RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025, RPJMD Kota Surabaya 2021-2026, serta penelaahan atas Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025. Pada RKPD Tahun 2025 terdapat penyesuaian terhadap output pada level kegiatan dan subkegiatan yang di dalamnya terdapat perbedaan output dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4) dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42) sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada Kecamatan Tambaksari, output pada Renstra 749 lembaga menjadi 751 lembaga disebabkan adanya pemutakhiran jumlah RT/RW sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada Kecamatan Wonocolo, output pada Renstra 280 lembaga menjadi 281 lembaga disebabkan adanya pemutakhiran jumlah RT/RW sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada Kecamatan

Tegalsari, output pada Renstra 365 lembaga menjadi 364 lembaga disebabkan adanya pemutakhiran jumlah RT/RW sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada Kecamatan Sambikerep, output pada Renstra 260 lembaga menjadi 261 lembaga disebabkan adanya pemutakhiran jumlah RT/RW sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Sambikerep, output pada Renstra 37 lembaga menjadi 38 lembaga disebabkan adanya pemutakhiran jumlah RW sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada Kecamatan Gunung Anyar, output pada Renstra 217 lembaga menjadi 219 lembaga disebabkan adanya pemutakhiran jumlah RT/RW sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada Kecamatan Lakarsantri, output pada Renstra 200 lembaga menjadi 205 lembaga disebabkan adanya pemutakhiran jumlah RT/RW sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, output pada Renstra 18 lembaga menjadi 17 lembaga disebabakan adanya penyesuaian jumlah anggota tim kewaspadaaan dini Kota Surabaya berdasarkan SK Tim Kewasapadaan Dini Nomor 100.3.3.3/38/436.1.2/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/12/436.1.2/2022 Tentang Tim Kewaspadaan Dini Kota Surabaya.
9. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, output pada Renstra 12 lembaga menjadi 14 lembaga disebabkan adanya penyesuaian jumlah tim koordinasi pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing, dan tenaga kerja asing di Kota Surabaya.

10. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, output pada Renstra 3 sentra menjadi 2 sentra disebabkan adanya penyesuaian sentra yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
11. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, output pada Renstra 13 laporan menjadi 2 laporan disebabkan adanya pergeseran prasarana pertanian ke Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya pada Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian.
12. Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, output pada Renstra 432 objek menjadi 254 objek disebabkan adanya sub urusan air limbah beralih ke Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
13. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup, output pada Renstra 3 stasiun menjadi 2 stasiun disebabkan adanya penyesuaian jumlah stasiun pemantau kualitas udara ambien yang digunakan sebagai penentuan ISPU Kota dan Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU).
14. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, output Renstra 8 lokasi menjadi 9 lokasi disebabkan adanya penambahan bangunan bersejarah yang dikelola.
15. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, output pada Renstra 24 jenis menjadi 19 jenis disebabkan adanya pengalihan kegiatan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi ideologi kebangsaan serta penyesuaian jumlah kegiatan kepramukaan.

16. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, output pada Renstra 162 lokasi menjadi 393 lokasi disebabkan penyesuaian pemeliharaan terhadap jumlah lapangan olahraga yang terbangun.
17. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, output pada Renstra 45 cabang olahraga menjadi 50 cabang olahraga disebabkan adanya penambahan cabang olahraga yang mengikuti Porprov.
18. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, output pada Renstra 5.157 unit hunian menjadi 5.233 unit hunian disebabkan adanya penambahan Rusun Pakal Benowo.
19. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Kecamatan Semampir, output pada Renstra 210 kasus menjadi 21 kasus disebabkan adanya sinergi 3 pilar (TNI, Polri, dan Satpol PP Kecamatan) yang dapat meredam potensi konflik wilayah.
20. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada seluruh Perangkat Daerah outputnya berubah dari Renstra disebabkan adanya penyesuaian jumlah ASN (PNS dan PPPK).
21. Subkegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, output Renstra 2 dokumen menjadi 12 dokumen disebabkan adanya penyesuaian jumlah SOP yang disusun dan dimutakhirkan.
22. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja, output Renstra 978 orang menjadi 1.29 orang disebabkan adanya penyesuaian jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditingkatkan kapasitasnya
23. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan pada Dinas Pendidikan, output Renstra 293 satuan pendidikan menjadi 153 satuan pendiidkan disebabkan adanya penyesuaian dengan jumlah LKP yang ijin operasioalnya masih berlaku.

24. Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan pada Kecamatan Sambikerep, output Renstra 37 unit menjadi 38 unit disebabkan adanya pemutakhiran jumlah RT/RW sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan pada Kecamatan Genteng, output Renstra 52 unit menjadi 61 unit disebabkan adanya pemutakhiran jumlah RT/RW sesuai ketentuan yang berlaku.
26. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disebabkan penyesuaian jumlah anggota tim kewaspadaaan dini Kota Surabaya berdasarkan SK Tim Kewasapadaan Dini Nomor 100.3.3.3/38/436.1.2/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/12/436.1.2/2022 Tentang Tim Kewaspadaan Dini Kota Surabaya.
27. Subkegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, output Renstra 250 pelaku usaha menjadi 180 pelaku usaha disebabkan penyesuaian jumlah pelaku usaha di Sentra Ikan Hias Gunungsari dan Sentra Ikan Romokalisari (Adventure Land Romokalisari).
28. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, output Renstra 5 laporan menjadi 16 laporan disebabkan adanya pergeseran kegiatan pengelolaan taman hutan raya dari subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.
29. Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, output Renstra 13 unit menjadi 2 unit disesbabkan adnaya pemindahan kegiatan pengelolaan taman hutan raya ke subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.

30. Subkegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, output Renstra 12 dokumen menjadi 40 unit usaha disebabkan adanya pemutakhiran satuan output di SIPD RI.
31. Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota pada Dinas Lingkungan Hidup, output Renstra 226 unit menjadi 228 unit disebabkan adanya penambahan fasilitas baru TPS 3R Banjarsugihan dan Rumah Kompos Nginden Jangkungan yang mulai beroperasi pada Tahun 2024.
32. Subkegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Sosial, output Renstra 623.853 orang menjadi 92.892 orang disebabkan adanya penyesuaian dengan hasil Musyawarah Kelurahan tentang data keluarga miskin Tahun 2024.
33. Subkegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Sosial, output Renstra 264.931 keluarga menjadi 33.723 keluarga disebabkan adanya penyesuaian dengan hasil Musyawarah Kelurahan tentang data keluarga miskin Tahun 2024.
34. Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Sosial, output Renstra 83.899 keluarga menjadi 33.723 keluarga disebabkan adnaya penyesuaian dengan hasil Musyawarah Kelurahan tentang data keluarga miskin Tahun 2024.
35. Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Sosial, output Renstra 12 lemabga menjadi 8 lembaga disebabkan adanya penyesuaian dengan jumlah jenis PSKS kelembagaan di Kota Surabaya.
36. Subkegiatan Penyediaan Permakanan pada Dinas Sosial, output Renstra 1.485 orang menjadi 1.479 disebabkan adanya penyesuaian dengan jumlah penerima permakanan.
37. Subkegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Dinas Sosial, output Renstra 215 orang menjadi 230 orang disebabkan adanya penyesuaian dengan jumlah penghuni di Griya Werdha.
38. Subkegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Dinas Sosial, output Renstra 1.100 orang menjadi 900 orang disebabkan adanya penyesuaian dengan jumlah penghuni di Liponsos Keputih.

39. Subkegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada Dinas Sosial, output Renstra 130 orang menjadi 300 orang disebabkan adnaya penyesuaian dengan jumlah penghuni di Pondok Sosial Kalijudan dan Kampung Anak Negeri.
40. Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, output Renstra 1 objek menjadi 2 objek disebabkan adanya penambahan objek pemajuan kebudayaan sedekah bumi.
41. Subkegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, output Renstra 8 unit menjadi 9 unit disebabkan adanya penambahan bangunan bersejarah yang dikelola.
42. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula dimutakhirkan menjadi Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, output Renstra 820 orang menjadi 10 kegiatan disebabkan adanya pemutakhiran satuan output di SIPD RI.
43. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, output Renstra 500 orang menjadi 700 orang disebabkan meningkatnya minat para pemuda untuk menjadi meningkatkan kapasitas diri menjadi wirausaha.
44. Subkegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda dimutakhirkan menjadi Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, output Renstra 810 orang menjadi 859 orang disebabkan adanya penambahan jumlah peserta pada kegiatan kepramukaan.
45. Subkegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, output Renstra 15.749 orang menjadi 3.500 orang disebabkan

adanya pengalihan kegiatan pemberian beasiswa kepada sswa SMA/SMK/MA sederajat ke Sekretariat Daerah.

46. Subkegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga dimutakhirkan menjadi Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, output Renstra 162 unit menjadi 393 unit disebabkan adanya penyesuaian jumlah lapangan olahraga yang dipelihara
47. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dimutakhirakan menjadi Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, output Renstra 81 unit menjadi 78 unt disebabkan adnaya peneysuaian jumlah lapangan olahraga yang dibangun.
48. Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, output Renstra 680 orang menjadi 750 orang disebabkan adanya penambahan jumlah atlet yang mengikuti Porprov.
49. Subkegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, output Renstra 115 lembaga menjadi 14 orang disebabkan adanya pemutakhiran satuan output pada SIPD RI.
50. Subkegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, output pada Renstra 105 dokumen menjadi 109 dokumen disebabkan adanya penambahan rusun Pakal Benowo.
51. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, output Resntra 402 unit rumah menjadi 1.000 unit rumah disebabkan adanya keluarga miskin yang terindikasi memiliki rumah tidak layak huni.
52. Subkegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Badan penanggulangan Bencana Daerah, output Renstra

4.497 orang menjadi 12.500 orang untuk mengakomodir penanganan korban bencana pada kondisi krisis.

Pendanaan Daerah Tahun 2025 diarahkan sebagai berikut :

1. Alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru sebesar Rp 3.472.637.266.897 atau 30,37% penambahan proporsi belanja pegawai dikarenakan penambahan alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Alokasi anggaran Pendidikan sebesar Rp 2.236.211.544.807,- atau 19,57%;
3. Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 2.562.351.562.899 atau 31,93% termasuk di dalamnya pembangunan Rumah Sakit Baru yang dilaksanakan di tahun 2025.
4. Anggaran Dana Kelurahan sebesar Rp 509.832.278.610 atau 5%;
5. Pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM;
6. Pendanaan penanganan masalah genangan dan pencegahan banjir;
7. Peningkatan layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit baru;
8. Pengalokasian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp17.000.000.000;
9. Pengalokasian anggaran penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
10. Pengalokasian anggaran untuk mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui dukungan anggaran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Pengalokasian anggaran untuk penyusunan kajian penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Rencana Program Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 beserta tolok ukur Perangkat Daerah disampaikan secara rinci pada Tabel V.2 tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel V.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2025

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6,904,931,208,948**	**6,895,675,786,579**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**2,018,409,083,733**	**2,335,251,776,853**	
	Dinas Pendidikan				**2,018,409,083,733**	**2,335,251,776,853**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93.34 %	**1,027,494,678,866**	**1,065,645,442,822**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	**1,221,689,492**	**4,442,377,355**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1,221,689,492	4,442,377,355	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**1,015,519,669,162**	**1,029,406,175,947**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8621 Orang/bulan	1,015,519,669,162	1,029,406,175,947	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**768,925,702**	**1,331,193,750**	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	768,925,702	1,331,193,750	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**3,482,009,020**	**4,870,125,867**	
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1029 Unit	3,482,009,020	4,870,125,867	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**6,502,385,490**	**25,595,569,903**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2,280,371,400	2,477,486,842	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,222,014,090	23,118,083,061	Dinas Pendidikan
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	**955,460,343,275**	**1,135,260,137,038**	
			Angka Kelulusan SMP/MTS	100%			
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%			
			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	48%			
			Persentase lembaga PAUD berkualitas	84,47%			
			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	90,45%			
			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	95%			
			Persentase SD terakreditasi minimal B	94,59%			
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	97,12%			
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**448,106,485,850**	**525,680,725,971**	
			Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan			
			Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga			
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%			
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan			
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	20,130,661,848	102,209,068,227	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	12,627,720,264	7,328,936,554	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	73986 Peserta Didik	2,178,241,795	6,043,654,140	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	905,055,139	30,802,004,032	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan	147,472,000	188,257,077	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidikan	208,809,420,000	148,042,294,984	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	155 Unit	9,444,851,080	27,156,701,558	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	649 Satuan Pendidikan	440,312,000	320,596,621	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85997 Peserta Didik	190,287,799,724	200,687,502,776	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	10 Paket	3,134,952,000	2,901,710,002	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Peserta Didik		yang Tersedia				
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**287,930,200,980**	**336,850,677,733**	
			Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga			
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%			
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan			
			Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan			
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	26,549,507,280	68,139,378,818	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	11,507,622,351	18,104,472,640	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	1,434,015,107	6,779,353,288	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38574 Peserta Didik	119,601,426,429	144,634,345,134	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2220 Peserta Didik	3,912,957,598	4,584,334,125	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	766,799,715	13,494,309,792	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	257 Satuan Pendidikan	140,122,500	441,521,158	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	123,637,600,000	80,429,497,982	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	330 Satuan Pendidikan	380,150,000	243,464,796	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**126,605,231,202**	**155,806,676,313**	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan			
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan			
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 unit	168,629,100	168,629,100	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	253,727,534	742,276,390	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik	4,534,003,826	161,215,236	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	3092 Orang	5,241,055,500	8,420,251,413	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	807,111,640	716,291,392	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan	60,895,040,000	69,014,400,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	619,928,665	531,375,925	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	49,666,837	49,666,837	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88878 Satuan Pendidikan	54,036,068,100	76,002,570,020	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**92,818,425,243**	**116,922,057,021**	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan			
			Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3-5 hari			
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	40 Peserta Didik	5,903,890,180	849,600,290	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	72,703,075	113,510,791	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	153 Satuan Pendidikan	92,830,000	135,748,226	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan	4,729,770,000	6,791,865,140	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	737,812,818	297,778,918	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2812 Peserta Didik	81,281,419,170	108,733,553,656	Dinas Pendidikan
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		Rasio Guru/ Murid jenjang SD	01:20	**35,454,061,592**	**134,346,196,993**	
			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	01:20			
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**		Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	**35,454,061,592**	**134,346,196,993**	
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang			
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Dokumen	644,061,592	972,161,551	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan	34,810,000,000	133,374,035,442	Dinas Pendidikan
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,559,874,204,065**	**2,258,547,246,826**	
	Dinas Kesehatan				**1,812,180,009,888**	**1,552,970,993,782**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**1,043,494,394,353**	**514,181,874,493**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**670,492,494,461**	**267,393,132,781**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2253 Orang/bulan	670,492,494,461	267,393,132,781	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	**766,867,585**	**8,082,258,367**	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	766,867,585	8,082,258,367	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**92,407,407,107**	**132,645,183,455**	
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	92,407,407,107	132,645,183,455	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	3 jenis	**279,827,625,200**	**106,061,299,890**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Asemrowo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,717,614,233	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,005,692,514	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Balongsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,581,665,737	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bangkingan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,037,738,783	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,686,509,812	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Benowo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,384,498,826	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,389,161,242	16,846,030	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,562,076,271	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,573,860,529	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dupak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,047,098,371	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gading	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,077,034,862	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gayungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,708,872,257	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gundih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,936,184,152	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,684,703,730	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jagir	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,036,553,967	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jemursari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,455,538,119	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jeruk	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,428,301,367	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kalijudan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,180,622,429	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,559,132,779	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kebonsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,272,143,408	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,597,120,261	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kedurus	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,655,518,736	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kenjeran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,429,504,758	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Keputih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,166,092,380	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Ketabang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,663,819,910	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,714,757,061	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,991,812,451	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Lidah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	1,928,075,657	16,846,030	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	BLUD	Kulon	Penunjang Pelayanan				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Lontar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,306,442,453	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Made	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,431,686,583	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,085,556,458	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,900,078,876	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Menur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,509,996,335	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Mojo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,756,990,622	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,504,967,736	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,176,249,491	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,565,216,964	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,005,866,113	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pakis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,230,196,305	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pegirian	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,671,107,648	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Peneleh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,337,943,185	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Perak Timur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,894,812,442	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,204,643,421	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,504,209,495	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Rangkah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,517,207,882	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sawahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,006,513,771	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,865,399,160	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sememi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,760,034,664	16,846,030	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sidosermo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,942,852,342	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sidotopo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,728,345,520	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5,719,801,176	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Simolawang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,489,719,295	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Simomulyo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,609,702,420	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,665,073,401	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,183,303,984	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,390,202,218	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,642,281,024	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,013,238,735	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,160,404,004	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tenggilis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,819,683,787	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Wiyung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,484,439,036	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Wonokromo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,281,488,604	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,990,265,448	16,846,030	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RS Surabaya Timur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	105,000,000,000	105,000,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	**755,544,383,562**	**963,114,372,889**	
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,06%			
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,60%			
			Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,20%			
			Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%			
			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana	82,54%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dan Alat Kesehatan sesuai Standar				
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%			
			Persentase Jaminan Kesehatan	97,60%			
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%			
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%			
			Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%			
			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	58%			
			Persentase Rumah Sehat	88,21%			
			Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%			
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,10%			
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen	**439,732,648,036**	**408,594,862,695**	
			Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	14 unit			
			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit			
			Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit			
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	353,443,209,832	341,600,814,078	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	10,000,000,000	10,000,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	2,225,768,000	2,225,768,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	71,200,000	101,369,184	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit	8,139,036,013	22,802,987,596	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	250,000,000	926,120,001	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	58,184,591,135	1,388,851,720	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	4,244,536,173	20,455,226,279	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	3,174,306,883	9,093,725,837	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	70 Dokumen	**314,654,798,752**	**496,299,689,350**	
			Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan			
			Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan			
			Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan			
			Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan			
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	2 kegiatan			
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan			
			Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan			
			Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan			
			Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi			
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit			
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas			
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas			
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas			
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	63 Puskesmas			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi				
			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas			
			Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43532 Orang	4,358,980,335	9,146,713,967	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	739 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang	7,320,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Balongsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang	9,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	929 Orang	4,880,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Benowo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	825 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	673 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	760 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1029 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Dupak	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	6,100,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gading	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1286 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gayungan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	670 Orang	28,320,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gundih	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	595 Orang	9,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	969 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Jagir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	813 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Jemursari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277 Orang	4,880,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Puskesmas Jeruk	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	295 Orang	12,460,000	3,349,700	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Hamil		Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	846 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	853 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	577 Orang	9,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kedurus	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1109 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Keputih	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang	24,400,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ketabang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292 Orang	9,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	403 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	399 Orang	9,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Lontar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	698 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Made	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	9,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	848 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	899 Orang	18,300,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Menur	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	459 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Mojo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1158 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	821 Orang	4,880,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	844 Orang	9,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755 Orang	9,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pakis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	533 Orang	4,880,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pegirian	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	415 Orang	4,880,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Peneleh	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	610 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1078 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	642 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	784 Orang	7,080,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Rangkah	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	536 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sawahan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	703 Orang	9,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	455 Orang	4,880,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sememi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1347 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	618 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	788 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1051 Orang	5,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Simolawang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	604 Orang	9,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1164 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang	10,980,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	586 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	942 Orang	9,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	354 Orang	21,960,000	3,349,700	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Hamil	Tanjungsari	Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	719 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	732 Orang	19,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wiyung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	846 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	613 Orang	14,640,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1123 Orang	11,340,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	732 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221 Orang	2,750,000	2,750,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Balongsari	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	527 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221 Orang	5,500,000	5,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	895 Orang	5,500,000	5,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Benowo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	807 Orang	11,000,000	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	643 Orang	2,750,000	2,750,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	764 Orang	11,000,000	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	838 Orang	11,000,000	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Dupak	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	351 Orang	3,712,500	3,712,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Gading	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1304 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Gayungan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	664 Orang	11,000,000	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Gundih	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	589 Orang	5,500,000	5,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	920 Orang	11,210,000	11,210,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Jagir	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	771 Orang	12,375,000	12,375,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Jemursari	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	273 Orang	2,750,000	2,750,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Jeruk	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	293 Orang	10,000,000	10,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	784 Orang	12,375,000	12,375,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	804 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	840 Orang	11,000,000	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	617 Orang	5,500,000	5,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Kedurus	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1086 Orang	11,000,000	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	592 Orang	11,000,000	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Keputih	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	618 Orang	5,500,000	5,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Ketabang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang	11,000,000	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	401 Orang	18,150,000	18,150,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	574 Orang	12,375,000	12,375,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	389 Orang	17,600,000	17,600,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Lontar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	637 Orang	5,500,000	5,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Made	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	869 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	824 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Menur	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	458 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Mojo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1112 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Moro krembangan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	817 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan	585 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Bersalin		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Ngagel rejo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	844 Orang	11,000,000	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	617 Orang	5,500,000	5,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Pakis	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506 Orang	2,200,000	2,200,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Pegirian	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412 Orang	2,750,000	2,750,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Peneleh	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1062 Orang	11,000,000	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	626 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	771 Orang	2,750,000	2,750,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Rangkah	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	545 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	455 Orang	2,750,000	2,750,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Sawahan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	622 Orang	5,500,000	5,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Sememi	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1320 Orang	11,000,000	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	632 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	580 Orang	5,500,000	5,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	2,750,000	2,750,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Simolawang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	582 Orang	5,500,000	5,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1146 Orang	9,900,000	9,900,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	248 Orang	4,125,000	4,125,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292 Orang	4,400,000	4,400,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	501 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	859 Orang	5,500,000	5,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	672 Orang	8,250,000	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	715 Orang	11,000,000	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Wiyung	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	843 Orang	9,075,000	9,075,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	602 Orang	4,125,000	4,125,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1085 Orang	3,882,700	3,882,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4401 Orang	387,650,000	387,650,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152252 Orang	2,606,182,418	2,606,182,418	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Asemrowo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5706 Orang	1,800,000	1,800,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1656 Orang	3,360,000	3,360,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Balongsari	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3874 Orang	6,300,000	6,300,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Bangkingan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1608 Orang	3,960,000	3,960,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6988 Orang	3,420,000	3,420,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Benowo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6896 Orang	2,880,000	2,880,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4331 Orang	4,759,300	4,759,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5976 Orang	7,560,000	7,560,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6383 Orang	5,580,000	5,580,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Dupak	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3074 Orang	2,504,800	2,504,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Gading	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10240 Orang	5,460,000	5,460,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada	Puskesmas Gayungan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang	4690 Orang	12,960,000	12,960,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Usia Pendidikan Dasar		mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Gundih	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4449 Orang	4,560,000	4,560,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6652 Orang	2,430,000	2,430,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Jagir	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6300 Orang	5,400,000	5,400,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Jemursari	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2299 Orang	1,440,000	1,440,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Jeruk	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2048 Orang	10,760,000	10,760,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kalijudan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4565 Orang	6,720,000	6,720,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5505 Orang	13,417,900	13,417,900	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kebonsari	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6006 Orang	9,360,000	9,360,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4530 Orang	840	840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kedurus	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7997 Orang	2,430,000	2,430,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kenjeran	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5361 Orang	22,680,000	22,680,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Keputih	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6861 Orang	2,880,000	2,880,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Ketabang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2058 Orang	10,080,000	10,080,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2626 Orang	2,400,000	2,400,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4993 Orang	6,300,000	6,300,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3397 Orang	11,340,000	11,340,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Lontar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5718 Orang	11,040,000	11,040,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Made	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1631 Orang	22,680,000	22,680,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6600 Orang	7,560,000	7,560,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7453 Orang	4,320,000	4,320,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Menur	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5331 Orang	2,250,000	2,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Mojo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8294 Orang	2,340,000	2,340,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Moro krembangan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5274 Orang	3,000,000	3,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4483 Orang	3,780,000	3,780,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Ngagel rejo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5796 Orang	4,560,000	4,560,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6772 Orang	9,720,000	9,720,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Pakis	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3893 Orang	5,040,000	5,040,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Pegirian	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3698 Orang	1,800,000	1,800,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Peneleh	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4033 Orang	7,200,000	7,200,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Perak Timur	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8285 Orang	4,320,000	4,320,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5544 Orang	6,685,800	6,685,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5372 Orang	2,520,000	2,520,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Rangkah	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7599 Orang	3,420,000	3,420,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4170 Orang	17,640,000	17,640,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sawahan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5640 Orang	5,760,000	5,760,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sememi	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8152 Orang	10,080,000	10,080,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sidosermo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4512 Orang	11,015,000	11,015,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sidotopo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5973 Orang	6,240,000	6,240,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7354 Orang	2,280,000	2,280,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Simolawang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4285 Orang	10,560,000	10,560,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada	Puskesmas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang	8704 Orang	4,080,000	4,080,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Usia Pendidikan Dasar	Simomulyo	mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1832 Orang	4,980,000	4,980,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2402 Orang	8,048,500	8,048,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6072 Orang	16,800,000	16,800,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7137 Orang	7,200,000	7,200,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2687 Orang	3,600,000	3,600,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6253 Orang	6,000,000	6,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tenggilis	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6257 Orang	7,560,000	7,560,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wiyung	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6172 Orang	19,320,000	19,320,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wonokromo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4345 Orang	12,000,000	12,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8525 Orang	5,400,000	5,400,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2034759 Orang	1,312,197,100	3,226,155,029	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337268 Orang	112,094,700	4,295,626,652	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749560 Orang	133,956,869	18,866,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104362 Orang	1,440,175,490	1,440,175,490	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5552 Orang	380,000,000	380,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang	17,867,100,840	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 Orang	3,600,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	283 Orang	1,800,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	707 Orang	2,880,000	3,349,700	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Orang Terduga Tuberkulosis	Balongsari	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293 Orang	900	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1293 Orang	960	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Benowo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1179 Orang	1,320,800	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	712 Orang	1,980,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1164 Orang	7,200,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1216 Orang	9,450,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Dupak	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 Orang	858,8	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gading	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1879 Orang	12,960,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gayungan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	887 Orang	2,400,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gundih	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	834 Orang	720	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1203 Orang	1,800,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Jagir	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1273 Orang	720	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Jemursari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	423 Orang	2,700,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Jeruk	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	3,600,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	720	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1067 Orang	900	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1065 Orang	990	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	847 Orang	420	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kedurus	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1514 Orang	1,560,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	1,800,000	3,349,700	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Keputih	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	750 Orang	2,670,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Ketabang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	391 Orang	2,520,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 Orang	2,160,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 Orang	6,900,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	593 Orang	2,160,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Lontar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1029 Orang	1,530,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Made	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	298 Orang	12,960,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1163 Orang	1,620,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1323 Orang	7,200,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Menur	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1010 Orang	1,500,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Mojo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1649 Orang	1,500,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	932 Orang	1,500,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	843 Orang	750	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1137 Orang	26,760,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1268 Orang	11,250,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pakis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	741 Orang	2,970,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pegirian	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	630 Orang	1,800,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Peneleh	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	798 Orang	720	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1535 Orang	4,320,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1115 Orang	810	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Putat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	945 Orang	1,440,000	3,349,700	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Orang Terduga Tuberkulosis	Jaya	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Rangkah	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1444 Orang	6,120,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sawahan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1127 Orang	920	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	680 Orang	360	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sememi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1383 Orang	600	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	840 Orang	1,200,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1018 Orang	7,200,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1246 Orang	6,300,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Simolawang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	779 Orang	3,600,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1562 Orang	960	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	3,600,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 Orang	9,360,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 Orang	360	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1194 Orang	6,000,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 Orang	2,880,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1176 Orang	900	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1186 Orang	1,080,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wiyung	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1196 Orang	3,600,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	829 Orang	3,000,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1404 Orang	4,320,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	823 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	249 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Balongsari	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	1,440,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1416 Orang	210	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Benowo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	912 Orang	900	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	732 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	922 Orang	9,000,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1224 Orang	3,720,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Dupak	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	465 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Gading	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1420 Orang	600	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Gayungan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	538 Orang	1,020,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Gundih	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	695 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1109 Orang	240	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Jagir	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	924 Orang	1,740,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Jemursari	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	333 Orang	480	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Jeruk	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	792 Orang	3,960,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	882 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1217 Orang	240	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 Orang	180	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2175 Orang	2,940,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Kedurus	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	1287 Orang	1,950,000	3,349,700	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	696 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Keputih	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	664 Orang	600	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Ketabang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 Orang	480	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	462 Orang	1,200,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	718 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	447 Orang	840	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Lontar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	754 Orang	780	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Made	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	290 Orang	720	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1037 Orang	1,620,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	971 Orang	16,920,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Menur	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	718 Orang	2,400,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Mojo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1430 Orang	150	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	879 Orang	3,660,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	670 Orang	720	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	948 Orang	2,040,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	832 Orang	600	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Pakis	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	592 Orang	720	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Pegirian	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	490 Orang	360	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Peneleh	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	687 Orang	2,610,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1436 Orang	900	3,349,700	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	700 Orang	1,260,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	966 Orang	1,080,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Rangkah	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	803 Orang	360	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sawahan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	951 Orang	1,110,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	578 Orang	240	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sememi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1638 Orang	1,080,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	686 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	861 Orang	1,500,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Simolawang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	666 Orang	900	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1277 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang	300	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	613 Orang	1,200,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350 Orang	720	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1037 Orang	300	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	401 Orang	750	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	795 Orang	270	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	944 Orang	1,800,000	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Wiyung	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	952 Orang	450	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	667 Orang	390	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	1235 Orang	90	3,349,700	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Wonokusumo	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52741 Orang	1,194,744,498	3,349,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	773,718,678	175,558,630	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	87,712,500	4,191,820,546	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	169,613,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	149,933,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	167,006,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	153,776,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	188,003,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	249,731,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	169,532,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	178,208,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	212,648,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	166,691,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	165,663,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	167,747,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	316,637,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	385,463,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	196,886,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	170,432,000	25,122,750	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	168,102,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	244,103,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	337,037,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	200,238,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	162,338,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	364,283,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	164,972,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	149,372,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	149,312,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	145,940,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	164,597,600	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	161,672,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	157,892,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	137,912,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	185,885,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	183,320,200	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	148,538,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	421,373,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	199,228,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	161,222,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Puskesmas Ngagel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12 Dokumen	172,412,000	25,122,750	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Masyarakat	Rejo	Kesehatan Gizi Masyarakat				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	179,078,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	223,382,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	360,146,600	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	180,741,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	177,782,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	184,736,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	164,599,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	243,698,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	346,902,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	137,289,900	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	224,228,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	183,881,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	159,839,500	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	393,527,500	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	157,867,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	205,921,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	173,291,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	277,766,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	148,319,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	180,517,300	25,122,750	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	163,091,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	187,208,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	329,292,000	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	167,273,700	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	219,785,900	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	209,770,400	25,122,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	796,110,557	2,942,876,873	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	203,057,030	203,057,030	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	460,194,469	315,144,254	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	61,900,000	438,103,789	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	167,790,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	202,660,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	63,000,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	105,350,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	66,942,500	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	211,550,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	118,785,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	111,020,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	127,435,800	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	105,726,000	6,699,400	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	125,750,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	174,060,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	103,576,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	114,730,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	62,925,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	203,950,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	84,398,700	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	77,829,200	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	101,057,900	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	69,465,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	116,635,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	178,840,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	80,799,300	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	49,710,400	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	83,167,100	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	74,542,800	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	56,642,800	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	68,745,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	76,701,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	99,330,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	48,225,000	6,699,400	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kesehatan				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	151,630,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	137,345,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	96,511,800	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	112,267,400	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	208,640,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	119,445,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	189,415,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	183,045,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	73,849,500	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	50,747,500	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	59,646,700	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	170,590,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	76,095,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	183,850,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	167,787,900	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	99,406,200	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	124,305,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	186,245,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	159,215,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	137,393,500	6,699,400	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	70,315,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	122,269,500	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	134,202,400	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	69,825,800	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	83,816,900	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	49,185,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	137,080,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	90,388,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	101,552,300	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	64,165,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	106,890,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	111,250,000	6,699,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	73 Orang	138,860,905	138,860,905	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1,081,206,840	19,478,405,009	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	10,410,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	28,860,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	10,488,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,940,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	18,558,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	27,780,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	40,230,000	15,449,400	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dan Tidak Menular		Penyakit Menular dan Tidak Menular				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12,036,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	46,320,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	67,080,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	5,580,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	64,290,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	19,905,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	8,910,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21,060,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	6,450,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	38,280,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	30,648,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	7,770,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	27,390,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,460,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	8,640,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	48,810,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	15,870,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	31,001,300	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	13,710,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	9,780,000	15,449,400	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	13,650,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	7,920,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	32,010,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	87,057,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	16,707,900	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	52,440,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	42,399,600	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	7,620,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21,780,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	7,146,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	65,343,900	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	85,314,700	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	36,570,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	22,405,500	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	29,040,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,070,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	49,290,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21,960,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	49,872,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	10,350,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Sawah	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	53,640,000	15,449,400	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dan Tidak Menular	Pulo	Penyakit Menular dan Tidak Menular				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	16,290,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	10,448,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	85,220,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	39,940,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	21,210,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	29,490,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	23,100,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	36,750,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	11,040,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	25,710,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	46,170,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	30,780,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	50,900,400	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	31,498,200	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	20,790,000	15,449,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	199,486,311,647	434,139,730,483	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	896,371,203	896,371,203	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	967,760,297	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	537,569,557	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	636,049,687	12,280,400	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Balongsari	Puskesmas				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	584,893,747	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	824,564,556	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	836,543,034	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,034,071,266	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	712,694,532	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	690,596,652	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	742,066,565	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	996,198,286	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	714,471,758	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	643,616,850	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	867,418,927	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,012,072,623	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	549,677,787	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	781,983,568	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	587,347,626	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	957,723,779	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	798,198,178	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	799,319,682	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	913,148,369	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	803,526,135	12,280,400	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	727,217,346	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	566,145,064	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	554,634,314	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	809,634,761	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	638,436,054	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	818,504,531	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	575,803,504	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	745,610,278	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	718,559,927	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	730,813,249	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	721,970,938	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	992,997,022	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	724,295,523	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	968,545,145	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	786,656,271	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	641,181,215	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	736,412,089	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	629,415,549	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	971,991,998	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	613,806,234	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Putat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	1,070,507,089	12,280,400	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Jaya	Puskesmas				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	756,013,220	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	503,799,145	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	632,608,782	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	933,658,264	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	846,175,371	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,255,288,224	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,054,175,788	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	706,676,221	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,056,922,886	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	792,839,450	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	882,259,741	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	750,946,678	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,198,062,396	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	896,584,750	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	887,400,253	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	876,742,937	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	888,978,001	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	522,929,076	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,027,234,806	12,280,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	115,500,000	115,500,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Instalasi Farmasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	115,500,000	115,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,450,100	3,450,100	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,111,300	2,111,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,138,100	2,138,100	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,138,000	2,138,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,600	2,137,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,663,300	2,663,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500	2,137,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	10,300,900	10,300,900	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,175,800	5,175,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,138,100	2,138,100	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,985,500	5,985,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	7,725,000	7,725,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,138,300	2,138,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,100,800	5,100,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,150,000	5,150,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,910,200	2,910,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	8,625,800	8,625,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,000,600	3,000,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,138,100	5,138,100	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	3,863,300	3,863,300	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kesehatan Lainnya		Fasilitas Kesehatan Lainnya				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,990,300	2,990,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,000,500	3,000,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,000,100	3,000,100	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,000,500	3,000,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,370,300	5,370,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,687,800	4,687,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,800	2,137,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,317,600	2,317,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,318,000	2,318,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,138,300	2,138,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,000,600	4,000,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,725,600	4,725,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,312,600	4,312,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,000,600	4,000,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Moro krembangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,210,800	3,210,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	6,450,500	6,450,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Ngagel rejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	6,450,700	6,450,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,730,600	2,730,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,863,300	3,863,300	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,687,600	4,687,600	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,725,200	4,725,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,408,000	2,408,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	8,175,600	8,175,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,150,800	5,150,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,725,000	4,725,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	7,370,200	7,370,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,000,800	4,000,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,000,500	4,000,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,801,100	1,801,100	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,850,200	2,850,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,875,200	1,875,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,188,200	3,188,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,587,700	5,587,700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,090,000	3,090,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,000,100	2,000,100	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,138,100	2,138,100	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,408,200	2,408,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,587,800	5,587,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500	2,137,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,000,200	3,000,200	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	3,000,200	3,000,200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kesehatan Lainnya		Fasilitas Kesehatan Lainnya				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,407,500	2,407,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,000,500	3,000,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	666 Orang	977,288,400	977,288,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Balongsari	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Benowo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Dupak	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	91 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Gading	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Gayungan	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Gundih	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Jagir	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Jemursari	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Jeruk	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Orang dengan Tuberkulosis		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar				
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Kedurus	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Keputih	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	24 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Ketabang	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Lontar	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Made	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	8,136,000	8,136,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Menur	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Mojo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Moro krembangan	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Ngagel rejo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Pakis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,029,500	16,029,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Pegirian	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Peneleh	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Rangkah	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Sawahan	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Sememi	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	20,340,000	20,340,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Simolawang	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Puskesmas	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Orang dengan Tuberkulosis	Tanjungsari	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar				
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Wiyung	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	1 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	841,879,501	841,879,501	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	27,758,121	27,758,121	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Asemrowo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46,740,000	46,740,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	31,270,500	31,270,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Balongsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	63,310,100	63,310,100	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Bangkingan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	41,852,000	41,852,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	18,630,000	18,630,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Benowo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	64,050,000	64,050,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	45,840,000	45,840,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	53,760,000	53,760,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60,060,000	60,060,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Dupak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	18,090,000	18,090,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Gading	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	52,860,000	52,860,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Gayungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	77,160,000	77,160,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan	Puskesmas Gundih	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	1 Dokumen	32,460,000	32,460,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Anak		kesehatan ibu dan anak				
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60,090,000	60,090,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Jagir	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46,800,000	46,800,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Jemursari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	34,740,000	34,740,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Jeruk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	72,480,000	72,480,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Kalijudan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	59,130,000	59,130,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46,320,000	46,320,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Kebonsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	62,640,000	62,640,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	32,580,000	32,580,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Kedurus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	70,390,000	70,390,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Kenjeran	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	61,230,000	61,230,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Keputih	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	73,290,000	73,290,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Ketabang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	54,420,000	54,420,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60,360,000	60,360,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46,230,000	46,230,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	38,640,000	38,640,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Lontar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	53,127,600	53,127,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Made	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	44,782,800	44,782,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	55,560,000	55,560,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	72,420,000	72,420,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Menur	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	45,900,000	45,900,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Mojo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	47,160,000	47,160,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Moro krembangan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	18,900,000	18,900,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	45,780,000	45,780,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Ngagel rejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	32,610,000	32,610,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	36,381,000	36,381,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Pakis	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	19,380,000	19,380,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Pegirian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	17,700,000	17,700,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Peneleh	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	50,160,000	50,160,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Perak Timur	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60,150,000	60,150,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46,770,000	46,770,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	32,880,000	32,880,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Rangkah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46,410,000	46,410,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	17,910,000	17,910,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Sawahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	40,440,000	40,440,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Sememi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60,480,000	60,480,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Sidosermo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	49,260,000	49,260,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Sidotopo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	51,300,000	51,300,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	20,687,000	20,687,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Simolawang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	49,800,000	49,800,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Simomulyo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	53,760,000	53,760,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan	Puskesmas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	1 Dokumen	39,240,000	39,240,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Anak	Siwalankerto	kesehatan ibu dan anak				
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	59,070,000	59,070,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	52,080,000	52,080,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46,260,000	46,260,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	45,450,000	45,450,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	46,470,000	46,470,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Tenggilis	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	61,920,000	61,920,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Wiyung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	62,460,000	62,460,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Wonokromo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	31,300,500	31,300,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	31,130,000	31,130,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	243,375,000	243,375,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**		Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi	**123,973,202**	**363,310,759**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	123,973,202	363,310,759	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	**1,032,963,572**	**57,856,510,085**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	844,297,979	47,189,112,089	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	188,665,593	10,667,397,996	Dinas Kesehatan
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	53,51%	**2,540,427,537**	**5,861,843,013**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang	**520,127,537**	**3,841,543,013**	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	520,127,537	3,841,543,013	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Kegiatan	**2,020,300,000**	**2,020,300,000**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	189 Orang	2,020,300,000	2,020,300,000	Dinas Kesehatan
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	**476,543,155**	**2,790,371,493**	
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**		Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	**476,543,155**	**2,790,371,493**	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	476,543,155	2,790,371,493	Dinas Kesehatan
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%	**10,124,261,281**	**67,022,531,894**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	**181,415,081**	**10,118,740,334**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	181,415,081	10,118,740,334	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan	**9,942,846,200**	**56,903,791,560**	
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas			
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	756,720,300	54,013,675,396	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	180,068,400	40,631,861	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	168,255,000	39,124,496	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(UKBM)						
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	192,883,300	39,124,496	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	45,030,600	54,935,080	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	111,140,500	50,178,506	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	194,670,000	39,794,436	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	173,838,800	42,876,160	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	187,818,000	44,283,034	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	180,618,000	34,702,892	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	99,516,000	26,730,606	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	153,513,700	51,585,380	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	178,706,100	64,314,240	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Puskesmas Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	12 Dokumen	180,087,200	53,762,685	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kupang	Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	154,540,500	49,408,075	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	154,409,300	48,771,632	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	176,132,200	38,689,035	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	49,095,000	47,833,716	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	72,840,000	63,945,773	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	150,290,800	54,533,116	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	149,421,000	33,262,521	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	184,760,600	33,865,467	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	181,226,700	36,377,742	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	98,040,000	67,931,916	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(UKBM)						
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	160,842,600	23,849,864	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	121,707,300	22,309,002	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	25,245,000	48,671,141	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	159,537,700	46,895,800	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	174,780,000	33,396,509	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	147,333,500	46,527,333	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	156,561,600	56,140,972	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	177,645,000	37,550,137	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	185,860,300	45,421,932	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	180,636,700	39,995,418	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	12 Dokumen	127,107,000	22,610,475	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	191,007,000	35,506,820	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	175,850,800	25,223,241	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	144,585,000	50,479,979	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	51,930,000	68,635,353	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	134,999,000	30,080,306	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	140,163,500	50,915,440	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	151,319,700	46,460,339	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	128,490,000	30,549,264	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	164,977,500	46,996,291	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	49,624,500	53,394,218	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(UKBM)						
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	156,705,000	50,212,003	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	185,453,000	48,202,183	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	176,345,800	49,274,087	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	111,425,000	41,770,759	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	160,050,000	24,586,798	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	158,158,400	35,339,335	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	149,175,000	43,881,070	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	175,867,900	58,385,271	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	127,258,500	43,579,597	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	51,858,000	61,031,534	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Puskesmas Sawah	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	12 Dokumen	165,945,000	50,178,506	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pulo	Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	179,806,900	179,806,900	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	159,338,700	38,220,077	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	103,980,000	39,057,502	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	91,070,000	52,355,811	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	179,007,100	36,947,191	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	203,224,100	42,909,657	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	176,727,100	24,385,816	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	107,625,000	51,719,368	Dinas Kesehatan
	RSUD Bhakti Dharma Husada				**293,650,324,951**	**255,758,723,394**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82%	**266,234,619,031**	**247,322,516,031**	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%			
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan	100%	**87,159,603,316**	**35,732,521,594**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daerah		Tunjangan ASN				
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	478 Orang/bulan	87,159,603,316	35,732,521,594	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**1,210,000,000**	**45,112,415,975**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,210,000,000	45,112,415,975	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%	**177,865,015,715**	**166,477,578,462**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	177,865,015,715	166,477,578,462	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98%	**27,415,705,920**	**8,436,207,363**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%	**27,415,705,920**	**8,436,207,363**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	9,751,528,540	8,332,224,848	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan / atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	17,664,177,380	103,982,515	RSUD Bhakti Dharma Husada
	RSUD dr. Mohamad Soewandhie				**454,043,869,226**	**449,817,529,650**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82.95 %	**452,233,486,908**	**448,044,542,401**	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,95%			
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**143,342,526,626**	**71,091,174,454**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	811 Orang/bulan	143,342,526,626	71,091,174,454	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**1,420,560,568**	**72,073,629,254**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	RSUD dr. Mohamad	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1,420,560,568	72,073,629,254	RSUD dr. Mohamad

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kantor	Soewandhie	Umum Kantor yang Disediakan				Soewandhie
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%	**307,470,399,714**	**304,879,738,693**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	307,470,399,714	304,879,738,693	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08%	**1,810,382,318**	**1,772,987,249**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100%	**1,810,382,318**	**1,772,987,249**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1,810,382,318	1,772,987,249	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**1,833,861,475,379**	**1,715,649,361,735**	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				**256,490,850,991**	**330,233,830,500**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		Persentase bangunan yang ber IMB	2,51%	**251,348,967,505**	**315,023,875,229**	
			Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90,99%			
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	87%			
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	246 Bangunan	**251,348,967,505**	**315,023,875,229**	
			Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1756 Berkas			
			Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen			
			Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1893 Lokasi			
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang D iubahsuaikan	140 Bangunan Gedung	209,277,233,940	257,832,868,942	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara,	161 Bangunan Gedung	30,200,143,356	38,016,232,717	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Permukiman serta Pertanahan	Dirawat, dan Diperiksa Berkala				Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	597,764,419	744,125,760	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	63 Dokumen	6,135,319,803	8,725,772,931	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1861 Orang	1,790,467,426	3,517,553,733	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	3,348,038,561	6,187,321,146	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	97%	**629,803,242**	**982,824,630**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**		Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis	**629,803,242**	**982,824,630**	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	14 Lembaga	629,803,242	982,824,630	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		Persentase pelayanan penataan ruang	96%	**4,512,080,244**	**14,227,130,641**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota**		Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	**3,027,557,868**	**3,956,284,137**	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3,027,557,868	3,956,284,137	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pertanahan					Pertanahan
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen	**1,484,522,376**	**10,270,846,504**	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	659,149,280	2,713,270,038	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	825,373,096	7,557,576,466	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				**1,577,370,624,388**	**1,385,415,531,235**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95%	**124,166,069,536**	**135,419,812,430**	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,50%			
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	**291,093,699**	**344,372,047**	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	291,093,699	344,372,047	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**52,181,828,046**	**58,347,173,119**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/bulan	52,181,828,046	58,347,173,119	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	**7,820,461,442**	**10,691,808,797**	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7,820,461,442	10,691,808,797	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	332 unit	**63,872,686,349**	**66,036,458,467**	
			Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%			
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	243 Unit	14,347,586,091	14,582,585,213	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	76 Unit	16,093,425,170	17,184,881,841	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	33,431,675,088	34,268,991,413	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	**50,159,712,296**	**50,157,841,140**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	63 unit	**50,159,712,296**	**50,157,841,140**	
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	275 Unit	50,159,712,296	50,157,841,140	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	**7,140,325,823**	**9,306,760,255**	
			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	917 m3			
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	**7,140,325,823**	**9,306,760,255**	
			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis			
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	5,676,665,577	7,156,794,349	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga	1,463,660,246	2,149,965,906	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	**825,449,794,323**	**582,830,776,602**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	**825,449,794,323**	**582,830,776,602**	
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1199 lokasi			
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi			
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M	353,228,225,994	125,161,493,953	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	30 Sistem Drainase Perkotaan	9,210,978,232	10,118,188,268	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3100 Sistem Drainase	133,721,824,437	89,285,274,750	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perkotaan			
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5600 Sistem Drainase Perkotaan	250,637,021,627	246,834,072,506	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	50 Dokumen	7,306,391,509	8,038,410,749	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	28500 Sistem Drainase Perkotaan	71,345,352,524	103,393,336,376	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**		Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9%	**2,710,804,453**	**3,183,406,764**	
			Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%			
1.03.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	**2,710,804,453**	**3,183,406,764**	
			Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	13 Dokumen			
1.03.07.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit	1,413,022,096	1,771,015,449	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.07.2.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	13 Unit	1,297,782,357	1,412,391,315	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		Luas jalan yang diperbaiki	190.000 m2	**567,743,917,957**	**604,516,934,044**	
			Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11.700 meter			
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen	**567,743,917,957**	**604,516,934,044**	
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	325 lokasi			
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1.501 lokasi			
			Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi			
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokumen	11,130,668,935	7,385,767,390	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	67 KM	9,229,012,098	14,182,827,900	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dibangun	11.7 KM	362,012,327,305	273,886,985,539	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0.6 KM	94,258,143,381	221,175,433,968	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM	91,113,766,238	87,885,919,247	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**154,133,730,691**	**213,594,587,919**	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				**154,133,730,691**	**213,594,587,919**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89%	**42,328,131,614**	**56,352,355,952**	
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**78,582,259**	**120,425,013**	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	78,582,259	120,425,013	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**32,280,316,945**	**43,233,747,821**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	32,280,316,945	43,233,747,821	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	**7,074,258,076**	**9,664,298,347**	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	7,074,258,076	9,664,298,347	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	**2,894,974,334**	**3,333,884,771**	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	2,894,974,334	3,333,884,771	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%	**20,266,176,130**	**40,719,101,063**	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**		Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5233 Unit Hunian	**20,266,176,130**	**40,719,101,063**	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	109 Dokumen	20,266,176,130	40,719,101,063	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	97%	**69,381,794,035**	**18,599,003,728**	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis	**69,381,794,035**	**18,599,003,728**	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah	69,381,794,035	18,599,003,728	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%	**21,192,044,300**	**96,664,079,699**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	8 lokasi	**21,192,044,300**	**96,664,079,699**	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	21,192,044,300	96,664,079,699	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	80%	**965,584,612**	**1,260,047,477**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	12 dokumen	**965,584,612**	**1,260,047,477**	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	965,584,612	1,260,047,477	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**				**234,266,776,785**	**247,244,511,440**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				**39,276,806,873**	**64,545,592,943**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94%	**14,913,240,510**	**15,865,209,574**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**11,877,940,271**	**12,269,992,562**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	11,877,940,271	12,269,992,562	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1,726,286,810**	**1,659,697,050**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1,726,286,810	1,659,697,050	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**1,309,013,429**	**1,935,519,962**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,309,013,429	1,935,519,962	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%	**24,363,566,363**	**48,680,383,369**	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%			
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**		Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	**1,935,985,963**	**20,320,537,831**	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	250,502,546	332,559,008	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	31 Kawasan	465,731,311	16,669,689,472	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1650 Kawasan	1,219,752,106	3,318,289,351	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	**22,427,580,400**	**28,359,845,538**	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12500 Orang	20,020,219,834	26,091,537,168	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang	2,407,360,566	2,268,308,370	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				**89,394,725,411**	**106,397,990,225**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%	**36,329,391,500**	**42,363,948,872**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**32,461,349,646**	**37,585,967,811**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	32,461,349,646	37,585,967,811	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	**689,326,697**	**773,782,085**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	689,326,697	773,782,085	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket	**3,178,715,157**	**4,004,198,976**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,178,715,157	4,004,198,976	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	47	**53,065,333,911**	**64,034,041,353**	
			Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%			
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas	**52,128,718,317**	**62,884,592,427**	
			Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%			
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	30,503,198,157	42,696,090,601	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	8,308,449,684	8,688,797,335	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	689,637,659	1,006,457,845	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	875 Unit	12,627,432,817	10,493,246,646	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	500 Berkas	**553,054,317**	**550,836,044**	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	553,054,317	550,836,044	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	100 Kegiatan	**383,561,277**	**598,612,882**	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	383,561,277	598,612,882	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Satuan Polisi Pamong Praja				**105,595,244,501**	**76,300,928,272**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,50%	**33,932,974,046**	**37,856,080,753**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**27,980,970,875**	**29,866,531,734**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	27,980,970,875	29,866,531,734	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2,877,169,309**	**4,438,854,588**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2,877,169,309	4,438,854,588	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**3,074,833,862**	**3,550,694,431**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Satuan Polisi Pamong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	3,074,833,862	3,550,694,431	Satuan Polisi Pamong

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kantor	Praja	Umum Kantor yang Disediakan				Praja
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	**71,662,270,455**	**38,444,847,519**	
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%			
			Persentase PPNS yang dibina	100%			
			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%			
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%			
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	**64,532,696,753**	**34,779,391,727**	
			Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	110 Titik/Lokasi			
			Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali			
			Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1400 Orang			
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1279 Orang	2,521,738,675	464,624,933	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	712,286,819	527,904,015	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	163,182,324	60,645,708	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	59,275,441,278	31,434,906,728	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan	12 Laporan	1,640,119,800	2,167,279,536	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	219,927,857	124,030,807	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek	**6,919,918,565**	**3,550,376,313**	
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek			
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	1,267,510,858	1,267,510,858	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	4,694,388,310	1,865,433,496	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	958,019,397	417,431,959	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	70 Orang	**209,655,137**	**115,079,479**	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	209,655,137	115,079,479	Satuan Polisi Pamong Praja
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**104,385,938,295**	**125,388,301,806**	
	Dinas Sosial				**104,385,938,295**	**125,388,301,806**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	**21,990,603,678**	**24,100,496,756**	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,332,333,026**	**19,227,229,556**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	18,332,333,026	19,227,229,556	Dinas Sosial
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	**2,390,851,439**	**2,354,427,281**	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	2,390,851,439	2,354,427,281	Dinas Sosial

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kantor		Kantor yang Disediakan				
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	**1,267,419,213**	**2,518,839,919**	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,267,419,213	2,518,839,919	Dinas Sosial
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	94.12 %	**4,859,435,461**	**8,489,756,593**	
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	87.97 %			
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	6 jenis	**4,859,435,461**	**8,489,756,593**	
			Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	367 orang			
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	590 Orang	3,814,529,927	6,940,780,682	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	1,044,905,534	1,548,975,911	Dinas Sosial
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	**39,496,903,992**	**79,916,329,216**	
			Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			
			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	**28,380,780,385**	**58,385,519,829**	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali			
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali			
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali			
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1470 Orang	12,817,846,078	12,817,846,078	Dinas Sosial

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	603,835,030	476,574,432	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	7,484,613,792	37,558,453,866	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	6,513,693,469	5,917,302,965	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	960,792,016	1,615,342,488	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali	**11,116,123,607**	**21,530,809,387**	
			Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan			
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang	3,673,985,945	4,055,221,061	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	7,442,137,662	17,475,588,326	Dinas Sosial
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%	**35,695,849,926**	**10,901,678,147**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan	**35,695,849,926**	**10,901,678,147**	
			Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan			
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	92892 Orang	4,082,444,741	4,681,621,062	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33723 Keluarga	590,957,426	237,928,836	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	33723 Keluarga	27,230,824,455	5,865,631,443	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2229 Orang	3,791,623,304	116,496,806	Dinas Sosial
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%	**2,343,145,238**	**1,980,041,094**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis	**2,343,145,238**	**1,980,041,094**	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Dinas Sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	2,343,145,238	1,980,041,094	Dinas Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG**				**1,766,486,682,748**	**2,136,436,455,013**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**31,890,366,872**	**31,817,498,678**	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				**31,890,366,872**	**31,817,498,678**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%	**18,118,525,283**	**14,606,976,907**	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,313,895,759**	**12,701,619,226**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	16,313,895,759	12,701,619,226	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	**1,804,629,524**	**1,905,357,681**	
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan			
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	201,212,700	308,739,244	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,603,416,824	1,596,618,437	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	83,02%	**9,137,008,743**	**11,303,581,648**	
			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90,70%			
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan	**6,400,319,547**	**6,876,862,013**	
			Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan			
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang	5,943,002,268	6,442,049,343	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	457,317,279	434,812,670	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	**245,055,000**	**305,648,374**	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	245,055,000	305,648,374	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan	**2,491,634,196**	**4,121,071,261**	
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan	Dinas Perindustrian	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas	4 Dokumen	2,491,634,196	4,121,071,261	Dinas Perindustrian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Produktivitas Tenaga Kerja	dan Tenaga Kerja	dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				dan Tenaga Kerja
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	4%	**2,553,785,082**	**3,690,000,293**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan	**1,749,005,136**	**2,280,264,051**	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2050 Orang	136,669,442	24,068,094	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1200 Orang	584,652,683	1,151,313,034	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	1,027,683,011	1,104,882,923	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	5 Laporan	**363,652,260**	**338,717,769**	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair /Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	250 Orang	363,652,260	338,717,769	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	6 Laporan	**441,127,686**	**1,071,018,473**	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	300 Orang	441,127,686	1,071,018,473	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	14,41%	**2,081,047,764**	**2,216,939,830**	
			Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	50%			
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	**1,352,499,010**	**1,358,205,696**	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan	56,869,090	62,206,028	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	1,295,629,920	1,295,999,668	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,**		Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja	12 Laporan	**728,548,754**	**858,734,134**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	435,649,627	525,520,818	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara	292,899,127	333,213,316	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**25,462,764,674**	**26,977,323,004**	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**25,462,764,674**	**26,977,323,004**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**16,495,019,779**	**17,557,497,186**	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**13,904,852,628**	**12,968,828,412**	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	13,904,852,628	12,968,828,412	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**2,026,937,606**	**4,012,046,279**	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,026,937,606	4,012,046,279	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	**563,229,545**	**576,622,495**	
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	563,229,545	576,622,495	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	**1,476,030,060**	**2,324,452,411**	
			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%			
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	**658,855,946**	**782,126,026**	
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	218 Orang	658,855,946	782,126,026	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	**397,236,364**	**467,797,353**	
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi	397,236,364	467,797,353	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	**419,937,750**	**1,074,529,032**	
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	419,937,750	1,074,529,032	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	**772,872,385**	**538,910,612**	
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif	80.64 %			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			terhadap perlindungan perempuan				
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	**386,385,458**	**105,528,396**	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	386,385,458	105,528,396	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	25 kecamatan	**386,486,927**	**433,382,216**	
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	386,486,927	433,382,216	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	282	**1,874,536,269**	**619,665,009**	
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	**1,874,536,269**	**619,665,009**	
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	1,874,536,269	619,665,009	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	**297,127,666**	**468,442,056**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	**297,127,666**	**468,442,056**	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	297,127,666	468,442,056	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		Persentase Kelurahan Layak Anak	92.85 %	**3,535,073,654**	**3,918,987,218**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	**779,577,090**	**911,496,624**	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	779,577,090	911,496,624	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	**2,755,496,564**	**3,007,490,594**	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1,687,207,713	1,576,275,678	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,068,288,851	1,431,214,916	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	**1,012,104,861**	**1,549,368,512**	
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	80.64 %			
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	25 lembaga	**1,012,104,861**	**1,549,368,512**	
			Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus			
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	150 Orang	930,719,361	1,357,120,144	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 Layanan	81,385,500	192,248,368	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**32,166,066,260**	**29,976,669,513**	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				**32,166,066,260**	**29,976,669,513**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,50%	**29,196,163,458**	**26,817,815,854**	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**24,726,863,350**	**22,173,111,090**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	24,726,863,350	22,173,111,090	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**4,469,300,108**	**4,644,704,764**	
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,198,283,516	963,056,187	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,271,016,592	3,681,648,577	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1,25	**2,016,396,446**	**2,185,138,985**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis	**741,032,446**	**931,259,541**	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	15 Laporan	741,032,446	931,259,541	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target**		Jenis pemberdayaan masyarakat dalam	3 Jenis	**1,275,364,000**	**1,253,879,444**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal				
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	1,275,364,000	1,253,879,444	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,90%	**953,506,356**	**973,714,674**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	**953,506,356**	**973,714,674**	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	953,506,356	973,714,674	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**37,396,572,585**	**153,598,240,830**	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				**37,396,572,585**	**153,598,240,830**	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	54.207,76 M2	**37,396,572,585**	**153,598,240,830**	
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	1 lokasi	**37,396,572,585**	**153,598,240,830**	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37,396,572,585	153,598,240,830	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**543,656,260,306**	**737,329,095,473**	
	Dinas Lingkungan Hidup				**543,656,260,306**	**737,329,095,473**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%	**63,313,219,280**	**98,611,737,192**	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**51,938,909,561**	**81,736,755,260**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	51,938,909,561	81,736,755,260	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**10,886,696,970**	**15,689,324,212**	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Dinas Lingkungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	10,886,696,970	15,689,324,212	Dinas Lingkungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kantor	Hidup	Umum Kantor yang Disediakan				Hidup
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	**487,612,749**	**1,185,657,720**	
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	487,612,749	1,185,657,720	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	48%	**3,258,074,882**	**4,341,984,101**	
			Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	88%			
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis	**2,048,739,457**	**2,963,234,242**	
			jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan			
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	574,182,452	1,002,892,353	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1,474,557,005	1,960,341,889	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	**1,209,335,425**	**1,378,749,859**	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1,209,335,425	1,378,749,859	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	99,75%	**93,503,359,207**	**114,572,766,111**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen	**93,503,359,207**	**114,572,766,111**	
			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2,85 Ha			
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	503,795,927	355,347,314	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275,88 Ha	71,975,331,399	88,616,170,585	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	8,555,677,648	9,689,510,555	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	14 Unit	12,468,554,233	15,911,737,657	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%	**2,530,091,704**	**5,250,676,507**	
			Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	100%			
2.11.05.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**		Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas	**448,986,860**	**779,119,339**	
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen	448,986,860	779,119,339	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	**2,081,104,844**	**4,471,557,168**	
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	2,081,104,844	4,471,557,168	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	80%	**1,916,796,583**	**4,000,328,507**	
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254 obyek	**1,916,796,583**	**4,000,328,507**	
			Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%			
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	325 Dokumen	1,112,344,618	2,406,414,113	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	254 Badan Usaha	804,451,965	1,593,914,394	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	66,43%	**2,436,667,215**	**8,194,977,659**	
			Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	61,81%			
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis	**2,436,667,215**	**8,194,977,659**	
			Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali			
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1,682,444,409	7,391,891,335	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1670 Orang	754,222,806	803,086,324	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	81,60%	**5,024,681,716**	**687,891,941**	
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan	**5,024,681,716**	**687,891,941**	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / F ilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	5,024,681,716	687,891,941	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	47 obyek	**543,011,718**	**732,771,403**	
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	**543,011,718**	**732,771,403**	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	47 Pengaduan	543,011,718	732,771,403	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5,12%	**371,130,358,001**	**500,935,962,052**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	88,39%			
			Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	51,50%			
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**		Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis	**371,130,358,001**	**500,935,962,052**	
			Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis			
			Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis			
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	228 Unit	11,050,307,112	40,655,767,501	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	570129 Ton	146,983,900,647	182,639,753,908	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	305.000 ton	55,006,796,882	55,006,796,882	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	650430 Ton	158,089,353,360	222,633,643,761	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**63,350,288,039**	**35,101,221,545**	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				**63,350,288,039**	**35,101,221,545**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87.13 %	**54,572,780,870**	**26,618,622,796**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**15,995,090**	**16,846,030**	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	15,995,090	16,846,030	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**45,422,783,436**	**15,703,037,811**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	182 Orang/bulan	45,422,783,436	15,703,037,811	Dinas Kependudukan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		dan Pencatatan Sipil	Tunjangan ASN				dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	**6,667,466,238**	**10,049,047,313**	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,667,466,238	10,049,047,313	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2,466,536,106**	**849,691,642**	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,466,536,106	849,691,642	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%	**3,219,466,265**	**3,481,297,695**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas	**2,349,297,550**	**2,655,891,757**	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	2,349,297,550	2,655,891,757	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas	**870,168,715**	**825,405,938**	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	870,168,715	825,405,938	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%	**2,382,049,178**	**1,969,904,845**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	**1,896,131,328**	**1,524,354,120**	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	1,896,131,328	1,524,354,120	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	**485,917,850**	**445,550,725**	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	485,917,850	445,550,725	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	74%	**3,057,494,702**	**2,941,982,661**	
			Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	80%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	98%			
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	48000 data	**749,948,787**	**431,626,693**	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	749,948,787	431,626,693	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga	**717,063,940**	**653,293,096**	
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	247,739,607	290,494,322	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen	469,324,333	362,798,774	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	**1,590,481,975**	**1,857,062,872**	
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	1,590,481,975	1,857,062,872	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	**118,497,024**	**89,413,548**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**		Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi	**118,497,024**	**89,413,548**	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	118,497,024	89,413,548	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**1,721,155,024**	**1,721,155,024**	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**1,721,155,024**	**1,721,155,024**	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	100%	**1,721,155,024**	**1,721,155,024**	
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan**		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Kegiatan	**1,721,155,024**	**1,721,155,024**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	1,721,155,024	1,721,155,024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**29,798,016,444**	**28,652,028,313**	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**29,798,016,444**	**28,652,028,313**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	81.10 %	**668,782,459**	**623,395,139**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	170 Orang	**295,265,357**	**231,496,961**	
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	85 Satuan Pendidikan	295,265,357	231,496,961	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	**373,517,102**	**391,898,178**	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	63,600,000	63,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	180,000,000	180,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penduduk dan Keluarga Berencana					Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	129,917,102	148,298,178	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	17.85 %	**9,231,450,433**	**10,395,507,254**	
			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	85%			
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	**795,000,000**	**607,856,500**	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80,000,000	178,928,250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	465,000,000	178,928,250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	31 Organisasi	150,000,000	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB /	12 Kali	**1,628,614,980**	**2,657,551,879**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			PLKB) bersama dengan kader IMP				
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	459,000,000	1,797,554,279	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1,169,614,980	859,997,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417050 Orang	**6,439,585,453**	**4,559,922,143**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	589,017,453	2,353,459,177	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	5,621,373,000	1,749,975,260	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	189,995,000	417,287,706	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	39,200,000	39,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	**368,250,000**	**2,570,176,732**	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	31 Kampung	368,250,000	2,570,176,732	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun	**19,897,783,552**	**17,633,125,920**	
			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.57 %			
			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	51.63 %			
			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	43%			
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok	**5,949,583,552**	**3,684,925,920**	
			Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan			
			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan			
			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan			
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	987,881,218	1,460,361,277	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	38 Unit	480,000,000	412,984,560	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kader yang mengikuti O rientasi/ Pelatihan T eknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	966 Orang	572,182,163	608,785,259	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	56 Kelompok	3,909,520,171	1,202,794,824	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		jumlah Tim Pendamping Keluarga yang berpartisipasi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6642 orang	**13,948,200,000**	**13,948,200,000**	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	6,642,000,000	6,642,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	7,306,200,000	7,306,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**580,347,571,926**	**602,846,413,833**	
	Dinas Perhubungan				**580,347,571,926**	**602,846,413,833**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	**101,036,523,045**	**121,324,178,528**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**61,844,781,307**	**73,040,321,319**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	258 Orang/bulan	61,844,781,307	73,040,321,319	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	**2,692,909,945**	**5,949,268,893**	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	23 Paket	2,692,909,945	5,949,268,893	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kantor		Kantor yang Disediakan				
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	**8,889,994,789**	**14,725,751,312**	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	8,889,994,789	14,725,751,312	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	12 Laporan	**27,608,837,004**	**27,608,837,004**	
			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan			
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Perhubungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7,076,467,336	7,076,467,336	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Perhubungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	20,532,369,668	20,532,369,668	Dinas Perhubungan
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	48 km/jam	**472,182,751,916**	**472,129,235,418**	
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,70%			
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%			
			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%			
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	**237,568,599,451**	**323,533,150,600**	
			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi			
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit	64,232,405,597	117,251,785,570	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	11,090,726,620	28,689,292,469	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	102252 Unit	138,803,860,436	142,457,970,556	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9.000 Unit	23,441,606,798	35,134,102,005	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	**16,791,017,589**	**29,006,403,572**	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit	16,791,017,589	29,006,403,572	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	**11,294,783,570**	**20,323,723,533**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	11,294,783,570	20,323,723,533	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134.525 Unit	**6,549,029,894**	**8,140,370,621**	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	6,549,029,894	8,140,370,621	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis	**29,606,167,158**	**21,001,558,071**	
			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi			
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	26,052,717,739	16,847,883,556	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	13 Laporan	3,553,449,419	4,153,674,515	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor	**166,527,767,764**	**65,033,246,766**	
			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang			
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	109,724,136,221	32,542,203,342	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 Unit	56,803,631,543	32,491,043,424	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	**3,845,386,490**	**5,090,782,255**	
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	3,845,386,490	5,090,782,255	Dinas Perhubungan
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%	**1,448,330,120**	**3,518,991,966**	
2.15.03.2.04	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah**		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	**1,448,330,120**	**3,518,991,966**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kabupaten/Kota						
2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	1,448,330,120	3,518,991,966	Dinas Perhubungan
2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	**5,679,966,845**	**5,874,007,921**	
2.15.05.2.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**		Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali	**5,679,966,845**	**5,874,007,921**	
2.15.05.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	5,679,966,845	5,874,007,921	Dinas Perhubungan
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**101,372,859,350**	**134,994,507,645**	
	Dinas Komunikasi dan Informatika				**101,372,859,350**	**134,994,507,645**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,57%	**20,471,580,082**	**18,550,500,695**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,909,762,165**	**15,330,200,755**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	17,909,762,165	15,330,200,755	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**1,674,171,200**	**1,996,579,388**	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,674,171,200	1,996,579,388	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**887,646,717**	**1,223,720,552**	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	887,646,717	1,223,720,552	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	88%	**15,092,873,119**	**16,438,816,063**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	**15,092,873,119**	**16,438,816,063**	
			Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%			
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	68 Komunitas	1,700,071,798	2,943,702,842	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	36 Permohonan	1,180,247,014	849,869,579	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	34 Media	12,212,554,307	12,645,243,642	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	**65,808,406,149**	**100,005,190,887**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%	**65,808,406,149**	**100,005,190,887**	
			Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%			
			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%			
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	12 Laporan	344,878,712	498,811,081	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	12 Dokumen	5,093,782,846	5,641,236,233	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	58 Perangkat Daerah	57,058,841,214	57,058,841,214	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	7 Layanan	851,773,959	5,046,131,885	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Dokumen	2,459,129,418	31,760,170,474	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**39,675,928,659**	**48,828,540,628**	
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan				**39,675,928,659**	**48,828,540,628**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	**33,203,394,463**	**40,889,705,067**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**29,332,759,844**	**34,133,949,534**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi Usaha	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	99 Orang/bulan	29,332,759,844	34,133,949,534	Dinas Koperasi

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Tunjangan ASN				Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	**3,870,634,619**	**6,755,755,533**	
			Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan			
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	775,603,764	996,367,639	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,095,030,855	5,759,387,894	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**		Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	37%	**237,494,927**	**778,729,486**	
2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	**237,494,927**	**778,729,486**	
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	30 Unit Usaha	237,494,927	778,729,486	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	70%	**758,927,174**	**1,063,750,608**	
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	**758,927,174**	**1,063,750,608**	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	415 Unit Usaha	758,927,174	1,063,750,608	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	57%	**540,256,000**	**565,398,256**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**		Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian	103 Orang	**540,256,000**	**565,398,256**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		sebagai penerima manfaat				
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang	540,256,000	565,398,256	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	80%	**656,135,006**	**559,291,563**	
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	**656,135,006**	**559,291,563**	
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	83 Unit Usaha	656,135,006	559,291,563	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	39,96%	**2,307,974,429**	**3,423,538,598**	
			Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%			
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang	**2,307,974,429**	**3,423,538,598**	
			Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 sentra			
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha	277,344,431	374,936,306	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	2,030,629,998	3,048,602,292	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	88%	**1,971,746,660**	**1,548,127,050**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha**		Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk	500 orang	**1,971,746,660**	**1,548,127,050**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	menjadi Usaha Kecil		meningkatkan kinerja usaha				
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha	1,971,746,660	1,548,127,050	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**22,200,190,361**	**24,554,172,328**	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				**22,200,190,361**	**24,554,172,328**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	**17,297,687,794**	**15,852,454,611**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**12,622,903,553**	**13,545,528,060**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	12,622,903,553	13,545,528,060	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	**4,674,784,241**	**2,306,926,551**	
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%			
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	195,406,200	180,989,790	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,479,378,041	2,125,936,761	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		Jumlah Investor PMA/PMDN	210 Perusahaan	**488,826,565**	**665,825,252**	
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	76%	**488,826,565**	**665,825,252**	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	488,826,565	665,825,252	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60%	**639,823,419**	**738,216,183**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor	**639,823,419**	**738,216,183**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	639,823,419	738,216,183	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	**2,959,272,347**	**5,864,491,950**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	95.000 berkas	**2,959,272,347**	**5,864,491,950**	
			Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	12.000 Kegiatan usaha			
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14.000 Pelaku Usaha	2,336,692,858	4,772,465,039	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12.000 Kegiatan Usaha	622,579,489	1,092,026,911	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	45%	**709,840,880**	**1,056,164,066**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.400 perusahaan	**709,840,880**	**1,056,164,066**	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	280 Pelaku Usaha	182,076,962	283,670,298	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2930 Kegiatan Usaha	527,763,918	772,493,768	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	**104,739,356**	**377,020,266**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	450 perusahaan	**104,739,356**	**377,020,266**	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	4 Dokumen	104,739,356	377,020,266	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terpadu Satu Pintu	Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				Terpadu Satu Pintu
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**159,192,774,662**	**150,908,254,654**	
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata				**159,192,774,662**	**150,908,254,654**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	26%	**48,192,900,480**	**50,957,792,419**	
			Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	26%			
			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47,60%			
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis	**48,192,900,480**	**50,957,792,419**	
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	19 jenis			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan			
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	700 Orang	796,715,103	1,758,201,620	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	3500 Orang	45,355,485,689	45,009,330,136	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Kegiatan	457,168,462	1,715,027,022	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	859 Orang	1,583,531,226	2,475,233,641	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	195 medali	**110,999,874,182**	**99,950,462,235**	
			Persentase Penambahan dan Peningkatan	27%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Fasilitas Olahraga				
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	7 kecamatan	**32,180,937,467**	**24,739,225,447**	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	78 Unit	32,180,937,467	24,739,225,447	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	50 cabang olahraga	**52,787,142,762**	**41,576,316,316**	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	750 Orang	52,787,142,762	41,576,316,316	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen	**26,031,793,953**	**33,634,920,472**	
			Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	393 lokasi			
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	7 Laporan	6,952,696,600	5,784,896,322	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	393 Unit	19,079,097,353	27,850,024,150	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**421,848,609**	**695,275,338**	
	Dinas Komunikasi dan Informatika				**421,848,609**	**695,275,338**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	**421,848,609**	**695,275,338**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	**421,848,609**	**695,275,338**	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12 Dokumen	421,848,609	695,275,338	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**6,182,639,710**	**7,177,846,408**	
	Dinas Komunikasi dan Informatika				**6,182,639,710**	**7,177,846,408**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	34%	**6,182,639,710**	**7,177,846,408**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	**3,809,529,676**	**4,474,290,865**	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah	3,809,529,676	4,474,290,865	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	**2,373,110,034**	**2,703,555,543**	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	2,373,110,034	2,703,555,543	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**49,164,873,315**	**66,417,809,156**	
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata				**49,164,873,315**	**66,417,809,156**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	**27,439,912,662**	**51,347,778,050**	
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**25,008,655,617**	**32,124,462,132**	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	25,008,655,617	32,124,462,132	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%	**2,431,257,045**	**19,223,315,918**	
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%			
2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	707,358,455	1,678,871,823	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,723,898,590	17,544,444,095	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Olah Raga serta Pariwisata					Olah Raga serta Pariwisata
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	90%	**9,124,877,075**	**6,343,172,777**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	470 kali	**9,124,877,075**	**6,343,172,777**	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	9,124,877,075	6,343,172,777	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	61,00%	**1,350,224,295**	**2,443,045,599**	
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen	**1,350,224,295**	**2,443,045,599**	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	934 Orang	1,350,224,295	2,443,045,599	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		Persentase siswa yang memahami materi sejarah	78%	**1,063,587,820**	**1,292,537,554**	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali	**1,063,587,820**	**1,292,537,554**	
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	1,063,587,820	1,292,537,554	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,04%	**1,176,501,078**	**1,514,094,149**	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	280 lokasi	**1,176,501,078**	**1,514,094,149**	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	280 Objek	1,176,501,078	1,514,094,149	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	**9,009,770,385**	**3,477,181,027**	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**		Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	9 lokasi	**9,009,770,385**	**3,477,181,027**	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	730 Unit	450,849,060	223,925,519	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Olah Raga serta Pariwisata	Koleksi Secara Terpadu				Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit	807,608,640	433,529,270	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	241,542,300	135,342,114	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	7,509,770,385	2,684,384,124	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**39,405,954,301**	**51,582,763,852**	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				**39,405,954,301**	**51,582,763,852**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,03%	**24,519,391,780**	**19,264,533,768**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,014,731,427**	**15,905,796,978**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	22,014,731,427	15,905,796,978	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**105,521,773**	**227,838,059**	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	105,521,773	227,838,059	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	**627,548,538**	**754,717,966**	
2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	627,548,538	754,717,966	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**1,771,590,042**	**2,376,180,765**	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	320,279,999	214,852,854	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,451,310,043	2,161,327,911	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN**		Persentase event literasi yang diselenggarakan	79,20%	**14,886,562,521**	**32,318,230,084**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PERPUSTAKAAN		Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	79,95%			
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	89.07 %			
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	**14,390,068,877**	**31,664,881,514**	
			Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	230 Lembaga			
			Tingkat Kepuasan Pemustaka	83 nilai			
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1502 Perpustakaan	12,923,537,355	29,394,765,267	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	55,675,000	76,505,756	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	208,084,652	287,050,508	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1502 Eksemplar	927,128,270	1,665,490,096	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan	275,643,600	241,069,887	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah bibit penulis dan pendongeng	6445 orang	**496,493,644**	**653,348,570**	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	255 Lokus	496,493,644	653,348,570	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**3,080,551,651**	**3,257,638,792**	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				**3,080,551,651**	**3,257,638,792**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	29,42%	**2,990,342,741**	**3,079,364,831**	
			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	88,10%			
			Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	16,03%			
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah**		Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar	9000 item	**1,058,508,805**	**943,857,367**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kabupaten/Kota		arsipnya				
			Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	60 lembaga			
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas	813,764,526	783,408,214	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan	244,744,279	160,449,153	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar	**1,439,993,827**	**1,743,109,433**	
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip	1,439,993,827	1,743,109,433	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	8200 item	**491,840,109**	**392,398,031**	
			PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	69 Lembaga			
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	315,574,969	239,820,896	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	69 Laporan	176,265,140	152,577,135	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	79,98%	**90,208,910**	**178,273,961**	
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**		Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen	**90,208,910**	**178,273,961**	
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip	90,208,910	178,273,961	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**59,233,917,881**	**119,338,286,370**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**6,348,602,603**	**52,192,565,784**	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				**6,348,602,603**	**52,192,565,784**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	45%	**1,990,006,924**	**4,094,028,405**	
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,**		Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	**1,990,006,924**	**4,094,028,405**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	65 Unit	1,990,006,924	4,094,028,405	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	35 orang/kelompok	**1,994,807,114**	**1,687,007,407**	
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	38 kali	**437,839,088**	**379,055,908**	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	35 Kelompok	437,839,088	379,055,908	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	**1,556,968,026**	**1,307,951,499**	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63 Unit	1,556,968,026	1,307,951,499	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	NIHIL kasus	**207,017,600**	**45,590,707,452**	
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**		Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali	**207,017,600**	**45,590,707,452**	
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1768 Pelaku Usaha	207,017,600	45,590,707,452	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	75%	**2,156,770,965**	**820,822,520**	
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		Jumlah sentra ikan yang dikelola	2 sentra	**2,156,770,965**	**820,822,520**	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	180 Pelaku Usaha	2,156,770,965	820,822,520	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**15,029,387,126**	**15,649,123,052**	
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata				**15,029,387,126**	**15,649,123,052**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	64,28%	**7,571,916,547**	**6,263,209,935**	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	**6,592,255,696**	**5,122,716,295**	
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	6,592,255,696	5,122,716,295	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2 lokasi	**979,660,851**	**1,140,493,640**	
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	198,600,000	392,237,928	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	606,299,401	598,043,262	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Laporan	174,761,450	150,212,450	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	45%	**5,278,867,590**	**6,583,808,840**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis	**5,278,867,590**	**6,583,808,840**	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	5,278,867,590	6,583,808,840	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	100%	**2,178,602,989**	**2,802,104,277**	
			Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	26%			
			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	80%			
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 jenis	**621,701,142**	**822,352,444**	
			Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar	1 laporan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat				
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	80 Orang	327,333,041	398,117,844	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	300 Orang	294,368,101	424,234,600	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	5 Produk	**1,556,901,847**	**1,979,751,833**	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	220 Orang	1,556,901,847	1,979,751,833	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**22,903,503,170**	**33,361,760,428**	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				**22,903,503,170**	**33,361,760,428**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	40 Orang	**6,441,172,160**	**8,180,759,816**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis	**3,037,205,543**	**7,312,602,844**	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	520,000,000	520,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	2,517,205,543	6,792,602,844	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	**3,403,966,617**	**868,156,972**	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / T anaman Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	3,403,966,617	868,156,972	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	29 Lokasi	**11,612,721,404**	**21,217,226,624**	
			Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan	2 Ha			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			masyarakat				
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	**4,629,592,678**	**1,309,312,532**	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	4,629,592,678	1,309,312,532	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	2 Laporan	**6,983,128,726**	**19,907,914,092**	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	6,983,128,726	19,907,914,092	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	7 kelompok	**2,250,939,486**	**1,140,797,957**	
			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89,50%			
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	**1,104,392,452**	**845,362,342**	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	1,104,392,452	845,362,342	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	40 Unit	**1,146,547,034**	**295,435,615**	
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	40 Unit Usaha	1,146,547,034	295,435,615	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%	**98,484,024**	**113,552,709**	
3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80%	**98,484,024**	**113,552,709**	
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	98,484,024	113,552,709	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%	**2,500,186,096**	**2,709,423,322**	
			Tingkat Produktivitas Pertanian	6 ton/ha			
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan	7 kali	**2,500,186,096**	**2,709,423,322**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			kapasitas kelembagaan petani				
			Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang			
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1,032,380,837	1,007,364,140	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	1,467,805,259	1,702,059,182	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**13,276,147,894**	**16,863,107,803**	
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan				**13,276,147,894**	**16,863,107,803**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		Persentase ketepatan waktu pelayanan	95%	**904,619,313**	**1,879,526,300**	
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**		Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	**271,654,014**	**501,503,485**	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen	271,654,014	501,503,485	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**		Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan	**221,051,540**	**585,878,561**	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	60 Dokumen	221,051,540	585,878,561	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.03	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan	**98,503,604**	**127,369,070**	
3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	98,503,604	127,369,070	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.04	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri**		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan	**52,197,054**	**127,369,070**	
3.30.02.2.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat	Dinas Koperasi Usaha	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai	24 Dokumen	52,197,054	127,369,070	Dinas Koperasi

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan	**261,213,101**	**537,406,114**	
3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dokumen	261,213,101	537,406,114	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	**4,133,848,761**	**4,968,208,636**	
3.30.03.2.02	**Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**		Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	**4,133,848,761**	**4,968,208,636**	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	4,133,848,761	4,968,208,636	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	**913,733,441**	**1,309,690,535**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	**913,733,441**	**1,309,690,535**	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan			
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	628,542,007	883,738,076	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	285,191,434	425,952,459	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	**792,743,196**	**2,045,562,306**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan	**792,743,196**	**2,045,562,306**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa	Dinas Koperasi Usaha	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan	23.810 Unit	675,840,338	1,898,815,138	Dinas Koperasi

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tera, Tera Ulang	Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Alat Perlengkapan Ditera Ulang				Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang	116,902,858	146,747,168	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	**6,531,203,183**	**6,660,120,026**	
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**		Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	**6,531,203,183**	**6,660,120,026**	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5220 UMKM	6,531,203,183	6,660,120,026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**1,676,277,088**	**1,271,729,303**	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				**1,676,277,088**	**1,271,729,303**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	22%	**958,755,231**	**726,717,805**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	**958,755,231**	**726,717,805**	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	136,965,000	136,965,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	821,790,231	589,752,805	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**		Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	87%	**375,277,657**	**331,422,093**	
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	**375,277,657**	**331,422,093**	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan	12 Dokumen	375,277,657	331,422,093	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	**342,244,200**	**213,589,405**	
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota surabaya	1 Laporan	**342,244,200**	**213,589,405**	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	342,244,200	213,589,405	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1,079,256,125,726**	**598,829,751,379**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**833,789,699,816**	**336,663,870,020**	
	Sekretariat Daerah				**833,789,699,816**	**336,663,870,020**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	**548,417,681,238**	**262,195,830,744**	
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%			
			Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	96%			
			Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	90%			
			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	72,22%			
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			
			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%			
			Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%			
			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik	98%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik				
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%			
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**353,675,642,938**	**91,628,676,830**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	353,675,642,938	91,628,676,830	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	**1,065,715,050**	**4,083,838,091**	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1,065,715,050	4,083,838,091	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	**57,653,626,754**	**33,982,990,323**	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1400 Unit	57,653,626,754	33,982,990,323	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%	**102,210,980,282**	**63,205,968,393**	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%			
			Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%			
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,051,672,734	4,847,821,221	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,140,117,606	6,349,569,508	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97,019,189,942	52,008,577,664	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%	**12,222,634,448**	**9,302,988,321**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	186,165,013	1,230,107,941	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	12,036,469,435	8,072,880,380	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**		Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	**3,229,785,913**	**3,818,611,182**	
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi	58 instansi			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku				
			Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit			
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1,019,345,050	1,005,336,781	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	1,014,904,136	1,268,195,730	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1,195,536,727	1,545,078,671	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	**18,359,295,853**	**56,172,757,604**	
			Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%			
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	17,923,136,628	54,169,994,276	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	436,159,225	2,002,763,328	Sekretariat Daerah
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	**264,953,905,148**	**40,046,014,668**	
			Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari			
			Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	97%			
			Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	90%			
			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%			
			Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	77,83%			
			Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	99%			
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	90,32%			
			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%			
			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%			
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%			
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**		Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	144 Lembaga	**12,289,403,832**	**14,579,943,198**	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen			
			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	28 Kecamatan			
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	4,246,116,649	4,813,183,192	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	3,616,940,065	4,363,756,079	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	4,426,347,118	5,403,003,927	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	**242,027,809,722**	**4,931,080,546**	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan			
			Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan			
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	31,180,994,797	3,101,911,738	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	157,792,850,164	1,725,003,341	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	53,053,964,761	104,165,467	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum	**7,831,318,658**	**17,480,416,610**	
			Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum			
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum			
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	4,203,595,868	7,357,890,220	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	2,337,888,303	8,163,199,966	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	1,289,834,487	1,959,326,424	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	32 Lembaga	**2,805,372,936**	**3,054,574,314**	
			Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga			
			Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga			
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	495,942,271	1,043,031,631	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1,921,543,451	1,840,184,664	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	387,887,214	171,358,019	Sekretariat Daerah
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	**20,418,113,430**	**34,422,024,608**	
			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	85,50%			
			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	90%			
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	**3,990,456,689**	**4,723,953,234**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	1,945,599,986	2,272,752,926	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	1,415,047,153	1,863,336,616	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	629,809,550	587,863,692	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	**11,032,729,372**	**16,052,307,032**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	4,503,945,742	7,624,540,037	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	6,528,783,630	8,427,766,995	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	96%	**5,304,022,279**	**13,527,842,132**	
			Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%			
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	4,504,022,269	1,807,549,839	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan	300 Orang	800,000,010	11,720,292,293	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Barang dan Jasa		Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	**90,905,090**	**117,922,210**	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	90,905,090	117,922,210	Sekretariat Daerah
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**245,466,425,910**	**262,165,881,359**	
	Sekretariat DPRD				**245,466,425,910**	**262,165,881,359**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93,50%	**197,508,255,048**	**211,561,797,404**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,183,165,985**	**15,979,496,144**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	16,183,165,985	15,979,496,144	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**26,518,240,814**	**30,164,551,499**	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	26,518,240,814	30,164,551,499	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	≤ 1 Hari	**5,333,566,626**	**5,459,328,000**	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	5,333,566,626	5,459,328,000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	**92,568,125,490**	**96,495,857,354**	
4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan	92,568,125,490	96,495,857,354	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	**54,522,056,860**	**59,974,262,542**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	54,522,056,860	59,974,262,542	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**		Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	**2,383,099,273**	**3,488,301,865**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan	2,383,099,273	3,488,301,865	Sekretariat DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	**47,958,170,862**	**50,604,083,955**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan**		Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan	6 Dokumen	**3,966,579,925**	**5,204,428,773**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Peraturan DPRD		peraturan daerah yang dibahas				
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	3,966,579,925	5,204,428,773	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	**23,375,392,850**	**23,981,751,398**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	1,876,347,250	1,976,169,030	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	21,499,045,600	22,005,582,368	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	**15,935,378,895**	**16,446,119,598**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	15,935,378,895	16,446,119,598	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**		Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	**4,680,819,192**	**4,971,784,186**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	4,680,819,192	4,971,784,186	Sekretariat DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**251,503,377,066**	**355,483,806,321**	
5.01	**PERENCANAAN**				**38,735,331,159**	**50,029,640,754**	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				**38,735,331,159**	**50,029,640,754**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,62%	**30,795,247,263**	**35,308,368,760**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**313,528,000**	**210,672,162**	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	313,528,000	210,672,162	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**26,360,617,058**	**31,185,574,104**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	26,360,617,058	31,185,574,104	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**4,121,102,205**	**3,912,122,494**	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	783,496,848	525,229,314	Badan Perencanaan Pembangunan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Daerah, Penelitian dan Pengembangan					Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,337,605,357	3,386,893,180	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	**2,419,908,977**	**3,929,601,523**	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%			
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%			
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	7 dokumen	**1,209,734,115**	**1,402,990,689**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	3 Dokumen	1,209,734,115	1,402,990,689	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	**660,029,118**	**1,519,411,379**	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	660,029,118	1,519,411,379	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	**550,145,744**	**1,007,199,455**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	550,145,744	1,007,199,455	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,56%	**5,520,174,919**	**10,791,670,471**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	**2,070,760,755**	**3,064,619,578**	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	2 Laporan	779,796,780	1,321,771,942	Badan Perencanaan Pembangunan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pemerintahan				Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1,290,963,975	1,742,847,636	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan	**1,876,263,975**	**3,728,973,089**	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	957,185,263	2,300,252,660	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	919,078,712	1,428,720,429	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan	**1,573,150,189**	**3,998,077,804**	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	690,139,077	2,288,163,450	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	883,011,112	1,709,914,354	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.02	**KEUANGAN**				**175,376,130,977**	**268,922,125,234**	
	Badan Pendapatan Daerah				**65,990,301,447**	**149,367,472,525**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	**50,482,649,289**	**111,325,210,539**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**41,302,598,863**	**105,076,480,614**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/bulan	41,302,598,863	105,076,480,614	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	**237,514,507**	**302,277,285**	
5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi	Badan Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta	2 Dokumen	237,514,507	302,277,285	Badan Pendapatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Daerah	Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				Daerah
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**8,942,535,919**	**5,946,452,640**	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,030,747,512	243,984,248	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,911,788,407	5,702,468,392	Badan Pendapatan Daerah
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	**368,298,641**	**376,596,049**	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen	**368,298,641**	**376,596,049**	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	368,298,641	376,596,049	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	84%	**15,139,353,517**	**37,665,665,937**	
			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	71%			
			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%			
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	**15,139,353,517**	**37,665,665,937**	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan			
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20.211 Objek Pajak			
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	5,650,762,888	17,564,766,132	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20.211 Obyek Pajak	4,040,768,331	13,133,790,471	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	2,771,775,116	4,872,360,500	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	2,364,238,420	1,397,431,140	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	311,808,762	697,317,694	Badan Pendapatan Daerah
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				**109,385,829,530**	**119,554,652,709**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	**38,455,057,935**	**47,229,587,669**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**31,236,858,992**	**33,513,641,108**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	31,236,858,992	33,513,641,108	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	**140,224,080**	**2,257,260,781**	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	140,224,080	2,257,260,781	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**2,880,882,923**	**2,433,985,397**	
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%			
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	419,918,100	52,855,741	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,460,964,823	2,381,129,656	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	**4,197,091,940**	**9,024,700,383**	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.380 Unit	4,197,091,940	9,024,700,383	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jabatan						
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	**44,075,561,714**	**21,876,639,483**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	7 Dokumen	**3,315,703,700**	**2,377,972,635**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	778,054,400	570,265,194	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	701,125,920	574,729,075	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	684,195,211	595,725,795	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1,152,328,169	637,252,571	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	99464 berkas	**1,932,405,240**	**2,805,284,815**	
			Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen			
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	541,827,575	625,751,990	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	99464 Dokumen	1,390,577,665	2,179,532,825	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen	**1,327,452,774**	**1,193,382,033**	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	1,327,452,774	1,193,382,033	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	APBD	Daerah					Daerah
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	**37,500,000,000**	**15,500,000,000**	
			Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%			
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	20,500,000,000	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	17,000,000,000	15,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33,30%	**26,855,209,881**	**50,448,425,557**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen	**26,855,209,881**	**50,448,425,557**	
			Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%			
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	6,207,685,046	9,289,358,649	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	1,606,193,677	27,918,345,262	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7.679 Dokumen	17,652,981,053	10,102,385,761	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	60 Orang	1,388,350,105	3,138,335,885	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**27,022,594,238**	**26,307,577,976**	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				**27,022,594,238**	**26,307,577,976**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	**19,422,540,819**	**19,003,190,108**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,519,826,768**	**16,673,061,709**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	17,519,826,768	16,673,061,709	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**1,309,162,249**	**1,624,598,869**	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	1,309,162,249	1,624,598,869	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**593,551,802**	**705,529,530**	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	593,551,802	705,529,530	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	**7,600,053,419**	**7,304,387,868**	
			Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	94%			
			Persentase pegawai yang disiplin	96.80 %			
			Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	35.25 %			
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	93%	**3,511,375,443**	**2,823,680,454**	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	276,434,052	325,273,861	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	3,014,521,249	2,014,415,795	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	220,420,142	483,990,798	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**		Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas	**1,482,417,333**	**1,935,059,689**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	488,580,935	649,786,509	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	449,717,877	695,225,295	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Manusia					Manusia
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	544,118,521	590,047,885	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	**2,606,260,643**	**2,545,647,725**	
			Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis			
			Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis			
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5502 Dokumen	707,278,632	684,603,376	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1,143,002,083	933,163,698	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	755,979,928	927,880,651	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**4,813,487,803**	**9,535,106,987**	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				**4,813,487,803**	**9,535,106,987**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	95.5 %	**4,813,487,803**	**9,535,106,987**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang	**1,946,145,292**	**2,027,792,776**	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang	1,946,145,292	2,027,792,776	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang	**2,867,342,511**	**7,507,314,211**	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	2,867,342,511	7,507,314,211	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prajabatan						
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**5,555,832,889**	**689,355,370**	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				**5,555,832,889**	**689,355,370**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	**5,555,832,889**	**689,355,370**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen	**5,555,832,889**	**689,355,370**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	4,460,423,181	396,734,661	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	1,095,409,708	292,620,709	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**31,786,175,256**	**35,447,732,817**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**31,786,175,256**	**35,447,732,817**	
	Inspektorat				**31,786,175,256**	**35,447,732,817**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**27,230,766,868**	**31,555,888,906**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**24,441,629,500**	**27,567,135,419**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	24,441,629,500	27,567,135,419	Inspektorat
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**712,326,943**	**802,437,325**	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	712,326,943	802,437,325	Inspektorat
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**2,076,810,425**	**3,186,316,162**	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,076,810,425	3,186,316,162	Inspektorat
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	**2,418,016,900**	**2,764,042,986**	
			Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%			
			Persentase rekomendasi pengawasan internal	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah				
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen	**1,526,862,100**	**2,115,113,485**	
			Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	20 Rekomendasi			
			Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	65 lembaga			
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan	384,379,100	598,535,716	Inspektorat
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	340,348,000	39,939,749	Inspektorat
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	422,240,000	36,351,415	Inspektorat
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	379,895,000	1,440,286,605	Inspektorat
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	**891,154,800**	**648,929,501**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian N egara / D aerah yang Ditangani	5 Laporan	314,326,000	35,956,457	Inspektorat
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	576,828,800	612,973,044	Inspektorat
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%	**2,137,391,488**	**1,127,800,925**	
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%			
			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%			
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	**532,417,600**	**522,099,618**	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	266,208,800	443,240,070	Inspektorat
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	266,208,800	78,859,548	Inspektorat
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**		Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	47 Kali	**1,604,973,888**	**605,701,307**	
			Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 Laporan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 perangkat daerah	345,008,800	443,041,846	Inspektorat
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	471,641,000	70,353,080	Inspektorat
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	449,142,700	56,261,309	Inspektorat
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 perangkat daerah	339,181,388	36,045,072	Inspektorat
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1,282,215,464,205**	**1,413,075,437,126**	
7.01	**KECAMATAN**				**1,282,215,464,205**	**1,413,075,437,126**	
	Kec. Asemrowo				**27,126,168,373**	**26,415,046,883**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**18,785,753,520**	**14,946,315,394**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,071,543,091**	**13,997,087,382**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Asemrowo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	16,071,543,091	13,997,087,382	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**2,564,085,503**	**816,940,356**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Asemrowo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2,564,085,503	816,940,356	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**150,124,926**	**132,287,656**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Asemrowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	150,124,926	132,287,656	Kec. Asemrowo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**82,563,838**	**1,920,018,359**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,27%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3,450,000**	**3,852,155**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan	1 Laporan	3,450,000	3,852,155	Kec. Asemrowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	**45,659,200**	**1,881,580,861**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	45,659,200	1,881,580,861	Kec. Asemrowo
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**33,454,638**	**34,585,343**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Asemrowo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9,189,424	9,647,136	Kec. Asemrowo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,748,633	12,075,359	Kec. Asemrowo
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	12,516,581	12,862,848	Kec. Asemrowo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	**8,118,940,465**	**9,398,627,636**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**8,055,750,965**	**9,317,214,228**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Asemrowo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5,340,000	10,049,100	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Asemrowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3,057,096,932	4,294,287,535	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,516,065,899	560,417,579	Kec. Asemrowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,450,330,678	733,449,101	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Asemrowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,207,800,000	2,071,547,940	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	369,072,600	874,932,026	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	450,044,856	772,530,947	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga	**63,189,500**	**81,413,408**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	62 Unit Usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Asemrowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit	53,779,500	71,766,272	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	9,410,000	9,647,136	Kec. Asemrowo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**124,979,550**	**129,510,768**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	**124,979,550**	**129,510,768**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	124,979,550	129,510,768	Kec. Asemrowo
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**13,931,000**	**20,574,726**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**13,931,000**	**20,574,726**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Asemrowo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	3,200,000	5,024,550	Kec. Asemrowo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	10,731,000	15,550,176	Kec. Asemrowo
	Kec. Benowo				**32,464,239,965**	**31,304,399,551**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan	98.00 %	**20,919,833,243**	**16,507,701,266**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		kesekretariatan				
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,392,610,323**	**15,615,150,986**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Benowo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	18,392,610,323	15,615,150,986	Kec. Benowo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**2,364,092,770**	**724,460,100**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Benowo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2,364,092,770	724,460,100	Kec. Benowo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**163,130,150**	**168,090,180**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	163,130,150	168,090,180	Kec. Benowo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**84,649,212**	**2,466,163,228**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**5,308,092**	**5,426,514**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,308,092	5,426,514	Kec. Benowo
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga	**55,749,600**	**2,436,618,874**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	55,749,600	2,436,618,874	Kec. Benowo
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**23,591,520**	**24,117,840**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Benowo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	7,863,840	8,039,280	Kec. Benowo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	7,863,840	8,039,280	Kec. Benowo
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,863,840	8,039,280	Kec. Benowo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	**11,278,775,258**	**12,180,434,689**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**11,180,468,918**	**12,065,319,959**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Benowo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4,800,000	30,147,300	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kandangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,299,563,182	2,876,227,525	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Romokalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,978,885,933	1,011,356,430	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sememi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,169,174,767	3,155,850,324	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,278,621,872	563,929,324	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kandangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	905,400,000	1,470,001,526	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Romokalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	727,906,406	413,413,276	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sememi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,399,166,141	1,986,676,949	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	416,950,617	557,717,305	Kec. Benowo
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	**98,306,340**	**115,114,730**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kec. Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga	26 Unit	82,251,000	98,701,200	Kec. Benowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Lembaga Kemasyarakatan		Kemasyarakatan yang Disediakan				
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	16,055,340	16,413,530	Kec. Benowo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**159,216,552**	**117,273,308**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**159,216,552**	**117,273,308**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	159,216,552	117,273,308	Kec. Benowo
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**21,765,700**	**32,827,060**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**21,765,700**	**32,827,060**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Benowo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	7,100,000	16,413,530	Kec. Benowo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	14,665,700	16,413,530	Kec. Benowo
	Kec. Bubutan				**44,431,479,957**	**51,540,384,525**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.12 %	**23,412,477,962**	**17,562,376,303**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,752,594,721**	**15,957,214,794**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bubutan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	19,752,594,721	15,957,214,794	Kec. Bubutan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,549,049,441**	**1,448,920,200**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bubutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	3,549,049,441	1,448,920,200	Kec. Bubutan
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**110,833,800**	**156,241,309**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daerah						
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	110,833,800	156,241,309	Kec. Bubutan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**191,099,498**	**4,481,145,249**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**4,500,000**	**5,024,550**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000	5,024,550	Kec. Bubutan
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga	**167,706,400**	**4,437,743,523**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	167,706,400	4,437,743,523	Kec. Bubutan
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**18,893,098**	**38,377,176**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bubutan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	1,132,200	16,078,560	Kec. Bubutan
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	10,023,089	14,259,336	Kec. Bubutan
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,737,809	8,039,280	Kec. Bubutan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	87.5 %	**20,663,802,547**	**29,317,469,789**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		konsep inovasi				
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**20,508,888,547**	**29,116,565,569**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bubutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	26,840,000	37,564,456	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,131,243,182	2,767,658,964	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,611,278,391	3,658,766,363	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gundih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3,170,278,605	2,787,980,132	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,415,206,277	4,459,208,689	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3,390,416,105	3,505,701,355	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	493,200,000	1,166,146,727	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bubutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,451,375,765	2,272,583,021	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gundih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,047,650,215	2,479,470,979	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jepara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,356,600,000	2,407,098,823	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,414,800,007	3,574,386,060	Kec. Bubutan
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	**154,914,000**	**200,904,220**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	460 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	139,194,000	184,825,660	Kec. Bubutan
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	15,720,000	16,078,560	Kec. Bubutan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**143,153,400**	**155,275,344**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan	15 Lokasi	**143,153,400**	**155,275,344**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			ditertibkan				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	143,153,400	155,275,344	Kec. Bubutan
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**20,946,550**	**24,117,840**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**20,946,550**	**24,117,840**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bubutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	13,256,000	16,078,560	Kec. Bubutan
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7,690,550	8,039,280	Kec. Bubutan
	Kec. Bulak				**31,497,449,114**	**32,897,382,793**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.36 %	**21,818,295,403**	**20,799,534,821**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,676,993,159**	**16,822,508,692**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	17,676,993,159	16,822,508,692	Kec. Bulak
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket	**4,069,706,244**	**3,786,798,573**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bulak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4,069,706,244	3,786,798,573	Kec. Bulak
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	**71,596,000**	**190,227,556**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	71,596,000	190,227,556	Kec. Bulak
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**87,128,424**	**2,134,492,018**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	**6,540,000**	**10,049,100**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	6,540,000	10,049,100	Kec. Bulak
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga	**66,848,800**	**2,108,476,968**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66,848,800	2,108,476,968	Kec. Bulak
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan	**13,739,624**	**15,965,950**	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen			
			Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bulak	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	1,800,420	2,456,300	Kec. Bulak
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4,755,240	4,912,600	Kec. Bulak
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,183,964	8,597,050	Kec. Bulak
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**9,509,140,087**	**9,925,650,175**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**9,439,946,587**	**9,842,747,760**	
			jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bulak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,550,000	6,029,460	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,613,685,347	1,392,974,490	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,662,600,774	343,973,912	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,250,912,180	675,133,713	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,706,563,386	949,596,266	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	368,416,050	1,164,375,690	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	518,421,652	1,497,397,711	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	855,963,541	1,901,301,186	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,457,833,657	1,911,965,332	Kec. Bulak
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga	**69,193,500**	**82,902,415**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	460 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit	66,433,500	79,720,200	Kec. Bulak
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	2,760,000	3,182,215	Kec. Bulak
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**77,583,600**	**31,843,804**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	**77,583,600**	**31,843,804**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77,583,600	31,843,804	Kec. Bulak
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**5,301,600**	**5,861,975**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala**		Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	12 Laporan	**5,301,600**	**5,861,975**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daerah		Babinsa/Babinkamtibmas				
			Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	2,440,000	2,512,275	Kec. Bulak
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	2,861,600	3,349,700	Kec. Bulak
	Kec. Dukuh Pakis				**34,375,536,606**	**31,447,146,079**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.79 %	**20,703,624,285**	**20,230,687,712**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,569,082,701**	**15,766,278,859**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	17,569,082,701	15,766,278,859	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,018,226,184**	**4,367,996,053**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,018,226,184	4,367,996,053	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**116,315,400**	**96,412,800**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	116,315,400	96,412,800	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**100,013,802**	**2,509,194,180**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**3,600,000**	**8,374,250**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,600,000	8,374,250	Kec. Dukuh Pakis

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Vertikal Terkait						
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga	**71,652,000**	**2,454,403,474**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	71,652,000	2,454,403,474	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**24,761,802**	**46,416,456**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	4,734,460	16,078,560	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4,516,341	14,259,336	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	15,511,001	16,078,560	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**13,403,445,074**	**8,531,411,579**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	**13,296,376,574**	**8,393,154,220**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9,600,000	2,009,820	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,356,300,037	998,220,767	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,795,712,309	1,157,875,711	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunungsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,813,285,505	914,917,019	Kec. Dukuh Pakis

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,327,779,098	1,059,579,599	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	935,826,750	947,958,144	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	627,000,000	1,071,524,244	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	655,964,850	1,141,470,936	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	774,908,025	1,099,597,980	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga	**107,068,500**	**138,257,359**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	31 Unit	98,068,500	130,218,079	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	9,000,000	8,039,280	Kec. Dukuh Pakis
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**148,765,900**	**151,734,768**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**148,765,900**	**151,734,768**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	148,765,900	151,734,768	Kec. Dukuh Pakis
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**19,687,545**	**24,117,840**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 Kasus	**19,687,545**	**24,117,840**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	12,175,845	16,078,560	Kec. Dukuh Pakis
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7,511,700	8,039,280	Kec. Dukuh Pakis

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kec. Gayungan				**36,564,108,600**	**33,511,243,436**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.23 %	**23,297,343,238**	**18,148,133,335**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,968,301,495**	**16,192,560,977**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gayungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	19,968,301,495	16,192,560,977	Kec. Gayungan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,275,466,843**	**1,807,209,518**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gayungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	3,275,466,843	1,807,209,518	Kec. Gayungan
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**53,574,900**	**148,362,840**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gayungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	53,574,900	148,362,840	Kec. Gayungan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**69,439,028**	**2,625,461,338**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	31.15 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**6,553,200**	**6,699,400**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6,553,200	6,699,400	Kec. Gayungan
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga	**44,859,200**	**2,600,211,524**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	44,859,200	2,600,211,524	Kec. Gayungan
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**18,026,628**	**18,550,414**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	1 Bidang Urusan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat				
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gayungan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	1,310,640	1,339,880	Kec. Gayungan
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,852,148	9,171,254	Kec. Gayungan
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,863,840	8,039,280	Kec. Gayungan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	**13,063,533,344**	**12,540,404,055**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**12,956,832,584**	**12,402,327,639**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gayungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13,106,400	13,398,800	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,002,310,282	2,144,651,338	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gayungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,837,235,828	2,382,471,150	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ketintang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,455,925,018	2,382,471,150	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Menanggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,941,378,945	2,144,651,252	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,827,659,646	702,839,777	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gayungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	959,099,440	1,184,061,461	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ketintang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	995,981,250	748,402,638	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	924,135,775	699,380,073	Kec. Gayungan
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga	**106,700,760**	**138,076,416**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gayungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit	94,905,000	126,017,496	Kec. Gayungan
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	11,795,760	12,058,920	Kec. Gayungan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**111,922,800**	**157,865,520**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**111,922,800**	**157,865,520**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	111,922,800	157,865,520	Kec. Gayungan
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**21,870,190**	**39,379,188**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus	**21,870,190**	**39,379,188**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Gayungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	230 Orang	14,900,000	32,616,360	Kec. Gayungan
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	6,970,190	6,762,828	Kec. Gayungan
	Kec. Genteng				**39,587,883,743**	**44,541,464,705**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.60 %	**24,755,105,078**	**19,355,019,453**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**20,186,620,097**	**16,466,929,893**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Genteng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	20,186,620,097	16,466,929,893	Kec. Genteng
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,418,793,531**	**2,723,478,577**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Genteng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4,418,793,531	2,723,478,577	Kec. Genteng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**149,691,450**	**164,610,983**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Genteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	149,691,450	164,610,983	Kec. Genteng
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**99,766,602**	**4,878,963,978**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23.38 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**4,996,787**	**5,108,237**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,996,787	5,108,237	Kec. Genteng
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	**74,037,600**	**4,852,655,968**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74,037,600	4,852,655,968	Kec. Genteng
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**20,732,215**	**21,199,773**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Genteng	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	11,795,760	12,058,920	Kec. Genteng
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	7,863,840	8,039,280	Kec. Genteng
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1,072,615	1,101,573	Kec. Genteng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Dilimpahkan						
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	**14,541,214,509**	**20,020,089,425**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**14,331,028,869**	**19,746,029,662**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Genteng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	17,319,055	16,528,340	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	66 Unit	2,120,484,827	1,520,369,780	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Genteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	1,572,364,302	984,988,742	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1,991,917,672	1,551,880,964	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ketabang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	725,799,691	5,348,168,038	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Peneleh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	359,708,776	1,777,697,771	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,257,837,450	1,805,410,385	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Genteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	798,594,551	918,505,251	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,122,139,987	2,104,769,120	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ketabang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,689,669,028	1,467,127,138	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Peneleh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,675,193,530	2,250,584,133	Kec. Genteng
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga	**210,185,640**	**274,059,763**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	23 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Genteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	61 Unit	192,973,500	256,235,575	Kec. Genteng
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	17,212,140	17,824,188	Kec. Genteng
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**167,724,000**	**262,249,104**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**167,724,000**	**262,249,104**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	167,724,000	262,249,104	Kec. Genteng
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**24,073,554**	**25,142,745**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus	**24,073,554**	**25,142,745**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Genteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	64 Orang	11,474,760	11,882,792	Kec. Genteng
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12,598,794	13,259,953	Kec. Genteng
	Kec. Gubeng				**46,412,560,700**	**58,132,882,944**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.02 %	**26,329,511,755**	**20,501,160,276**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21,971,096,074**	**19,428,208,266**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gubeng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	21,971,096,074	19,428,208,266	Kec. Gubeng
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,237,141,891**	**964,089,210**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gubeng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4,237,141,891	964,089,210	Kec. Gubeng
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**121,273,790**	**108,862,800**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gubeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	121,273,790	108,862,800	Kec. Gubeng
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**151,865,338**	**6,247,637,110**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PUBLIK		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.77 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3,000,000**	**8,374,250**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,000,000	8,374,250	Kec. Gubeng
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga	**113,648,000**	**6,200,885,684**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	113,648,000	6,200,885,684	Kec. Gubeng
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**35,217,338**	**38,377,176**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gubeng	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	13,583,786	16,078,560	Kec. Gubeng
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13,769,712	14,259,336	Kec. Gubeng
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,863,840	8,039,280	Kec. Gubeng
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	**19,764,192,707**	**31,194,306,598**	
			Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**19,584,990,707**	**30,959,462,742**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gubeng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000	30,147,300	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Airlangga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,529,713,355	3,544,639,094	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Baratajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,386,491,302	3,114,696,931	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gubeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,830,202,114	2,774,678,011	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kertajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,005,843,013	3,714,272,278	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mojo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,445,578,107	4,508,586,635	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,328,258,554	2,937,215,261	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Airlangga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,067,688,618	1,466,004,081	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Baratajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	871,200,000	1,768,962,796	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gubeng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	714,685,302	1,312,078,985	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kertajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,866,476,925	1,783,595,861	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mojo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,725,000,000	2,662,867,768	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	804,853,417	1,341,717,741	Kec. Gubeng
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga	**179,202,000**	**234,843,856**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	90 Unit Kerja			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gubeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit	164,502,000	218,430,326	Kec. Gubeng
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	14,700,000	16,413,530	Kec. Gubeng
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**147,423,250**	**156,951,900**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**147,423,250**	**156,951,900**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	12 Laporan	147,423,250	156,951,900	Kec. Gubeng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**19,567,650**	**32,827,060**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**19,567,650**	**32,827,060**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Gubeng	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55 Orang	3,650,000	16,413,530	Kec. Gubeng
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	15,917,650	16,413,530	Kec. Gubeng
	Kec. Gunung Anyar				**30,983,916,538**	**33,873,123,683**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.06 %	**21,987,177,989**	**21,675,263,666**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,386,932,261**	**15,154,578,898**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	16,386,932,261	15,154,578,898	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	30 Paket	**5,498,790,028**	**6,415,084,768**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	5,498,790,028	6,415,084,768	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20 Unit	**101,455,700**	**105,600,000**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	101,455,700	105,600,000	Kec. Gunung Anyar
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**78,850,055**	**2,454,519,043**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkaitt	2 laporan	**10,485,120**	**10,719,040**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	10,485,120	10,719,040	Kec. Gunung Anyar
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	219 Lembaga	**37,106,400**	**2,411,843,865**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	37,106,400	2,411,843,865	Kec. Gunung Anyar
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	630 Dokumen	**31,258,535**	**31,956,138**	
			Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan			
			Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	630 Dokumen	10,419,588	10,652,046	Kec. Gunung Anyar
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	10,419,359	10,652,046	Kec. Gunung Anyar
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10,419,588	10,652,046	Kec. Gunung Anyar
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	**8,741,285,169**	**9,565,843,974**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**8,639,713,869**	**9,433,977,962**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	17,920,000	23,447,900	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,272,248,465	1,570,613,771	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Gunung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	1 Unit	1,282,193,211	588,445,189	Kec. Gunung Anyar

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kelurahan	Anyar Tambak	Terbangun				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,423,542,233	718,801,506	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,147,349,554	1,449,824,619	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	910,800,000	1,878,069,539	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	696,000,000	655,157,051	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	992,569,431	1,088,789,908	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	897,090,975	1,460,828,479	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	**101,571,300**	**131,866,012**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	91,741,500	121,816,912	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	9,829,800	10,049,100	Kec. Gunung Anyar
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**153,804,925**	**154,049,100**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**153,804,925**	**154,049,100**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	153,804,925	154,049,100	Kec. Gunung Anyar
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**22,798,400**	**23,447,900**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	**22,798,400**	**23,447,900**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	43 Orang	9,692,000	10,049,100	Kec. Gunung Anyar

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Nasional		Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	13,106,400	13,398,800	Kec. Gunung Anyar
	Kec. Jambangan				**33,425,859,275**	**29,012,604,476**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.49 %	**21,961,016,069**	**16,159,920,417**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,226,460,010**	**15,035,256,404**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jambangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	19,226,460,010	15,035,256,404	Kec. Jambangan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**2,616,217,259**	**1,007,330,653**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Jambangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	2,616,217,259	1,007,330,653	Kec. Jambangan
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**118,338,800**	**117,333,360**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Jambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	118,338,800	117,333,360	Kec. Jambangan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**113,044,577**	**1,788,854,610**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	29,53%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3,276,600**	**3,349,700**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan	3,276,600	3,349,700	Kec. Jambangan
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga	**52,466,400**	**1,680,000,000**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52,466,400	1,680,000,000	Kec. Jambangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**57,301,577**	**105,504,910**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Jambangan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen	982,98	1,004,910	Kec. Jambangan
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan	23,818,597	72,000,000	Kec. Jambangan
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	32,500,000	32,500,000	Kec. Jambangan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**11,155,613,125**	**10,851,712,409**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**11,058,362,125**	**10,727,497,246**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Jambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,638,300	1,674,850	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,824,568,023	934,257,040	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,363,792,721	1,560,404,283	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kebonsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,653,855,261	1,101,652,278	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pagesangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,576,549,086	1,258,246,079	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	965,016,000	1,756,326,000	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	1,773,939,100	1,486,122,000	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebonsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	439,900,000	1,547,998,716	Kec. Jambangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pagesangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	459,103,634	1,080,816,000	Kec. Jambangan
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	**97,251,000**	**124,215,163**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Jambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	82,251,000	109,215,163	Kec. Jambangan
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	15,000,000	15,000,000	Kec. Jambangan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**152,148,000**	**167,097,072**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**152,148,000**	**167,097,072**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	152,148,000	167,097,072	Kec. Jambangan
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**44,037,504**	**45,019,968**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	30 Kasus	**44,037,504**	**45,019,968**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Jambangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang	22,018,752	22,509,984	Kec. Jambangan
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30 Laporan	22,018,752	22,509,984	Kec. Jambangan
	Kec. Karangpilang				**34,960,335,417**	**33,785,027,941**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.80 %	**22,732,926,337**	**18,224,567,876**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,066,147,053**	**15,925,618,028**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangpilang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	18,066,147,053	15,925,618,028	Kec. Karangpilang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,526,183,056**	**2,172,553,454**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Karangpilang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	4,526,183,056	2,172,553,454	Kec. Karangpilang
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**140,596,228**	**126,396,394**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karangpilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	140,596,228	126,396,394	Kec. Karangpilang
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**117,386,210**	**2,888,833,478**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	100%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,100,000**	**16,078,560**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,100,000	16,078,560	Kec. Karangpilang
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga	**86,636,000**	**2,859,088,142**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86,636,000	2,859,088,142	Kec. Karangpilang
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**28,650,210**	**13,666,776**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Karangpilang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	7,326,000	12,862,848	Kec. Karangpilang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1,132,200	401,964	Kec. Karangpilang
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	20,192,010	401,964	Kec. Karangpilang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**11,897,357,870**	**12,403,927,719**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**11,769,616,370**	**12,230,470,067**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Karangpilang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7,200,000	2,679,760	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,465,930,660	793,506,078	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1,668,033,550	3,875,657,618	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1,748,071,929	1,481,058,366	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,157,576,109	642,099,305	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	411,600,000	648,488,248	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,952,804,122	667,913,255	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,065,000,000	877,868,356	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	293,400,000	3,241,199,081	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	**127,741,500**	**173,457,652**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Karangpilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	91,741,500	121,816,912	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	36,000,000	51,640,740	Kec. Karangpilang
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**178,722,000**	**157,158,768**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**178,722,000**	**157,158,768**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	178,722,000	157,158,768	Kec. Karangpilang
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**33,943,000**	**110,540,100**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus	**33,943,000**	**110,540,100**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Karangpilang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang	1,750,000	6,699,400	Kec. Karangpilang
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	32,193,000	103,840,700	Kec. Karangpilang
	Kec. Kenjeran				**37,433,314,038**	**53,709,419,342**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.74 %	**20,675,251,320**	**18,051,786,041**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,754,413,065**	**16,781,899,443**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenjeran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	16,754,413,065	16,781,899,443	Kec. Kenjeran
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,760,653,105**	**1,109,516,598**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenjeran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3,760,653,105	1,109,516,598	Kec. Kenjeran
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**160,185,150**	**160,370,000**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	160,185,150	160,370,000	Kec. Kenjeran
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**190,570,542**	**10,634,544,244**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PUBLIK		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	**2,457,450**	**2,512,275**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,457,450	2,512,275	Kec. Kenjeran
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga	**132,803,200**	**5,798,635,160**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	132,803,200	5,798,635,160	Kec. Kenjeran
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**55,309,892**	**4,833,396,809**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kenjeran	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	15,727,680	16,078,560	Kec. Kenjeran
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	31,718,372	4,809,278,969	Kec. Kenjeran
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,863,840	8,039,280	Kec. Kenjeran
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**16,388,690,596**	**24,835,143,587**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**16,253,478,435**	**24,660,522,265**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6,028,944	6,163,448	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	3,125,098,911	3,906,513,107	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,112,329,884	3,822,106,579	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,008,263,407	2,019,165,289	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,714,821,911	5,446,202,529	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,248,319,328	3,025,849,014	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,024,400,000	3,239,302,339	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,227,016,050	1,871,745,421	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	787,200,000	1,323,474,539	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	**135,212,161**	**174,621,322**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	120,213,000	159,622,161	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	14,999,161	14,999,161	Kec. Kenjeran
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**163,073,900**	**171,866,910**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	**163,073,900**	**171,866,910**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	163,073,900	171,866,910	Kec. Kenjeran
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**15,727,680**	**16,078,560**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**		Jumlah potensi konflik yang dapat	24 Kasus	**15,727,680**	**16,078,560**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas				
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kenjeran	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang	7,863,840	8,039,280	Kec. Kenjeran
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7,863,840	8,039,280	Kec. Kenjeran
	Kec. Krembangan				**43,276,079,740**	**52,659,088,856**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.39 %	**22,948,569,358**	**20,133,087,320**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,858,150,718**	**17,790,611,247**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Krembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	17,858,150,718	17,790,611,247	Kec. Krembangan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,950,838,640**	**2,142,237,327**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Krembangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4,950,838,640	2,142,237,327	Kec. Krembangan
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**139,580,000**	**200,238,746**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Krembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	139,580,000	200,238,746	Kec. Krembangan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**135,963,011**	**5,633,392,903**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,11%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan	**8,650,224**	**8,843,208**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	8,650,224	8,843,208	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga	**99,508,000**	**5,594,402,395**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	99,508,000	5,594,402,395	Kec. Krembangan
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**27,804,787**	**30,147,300**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Krembangan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	9,272,778	10,049,100	Kec. Krembangan
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,272,778	10,049,100	Kec. Krembangan
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9,259,231	10,049,100	Kec. Krembangan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**20,066,613,771**	**26,667,060,727**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**19,907,019,771**	**26,458,381,419**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Krembangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13,700,000	30,147,300	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4,130,358,940	3,398,684,513	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dupak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,986,066,286	3,453,097,305	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	976,933,773	3,998,712,113	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	6 Unit	2,556,631,070	3,172,837,055	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kelurahan	Krembangan Selatan	Terbangun				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Perak Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	3,124,856,255	3,234,239,303	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,086,600,000	1,982,422,507	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dupak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,315,133,553	2,432,112,574	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	1,057,800,000	1,373,294,185	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Perak Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,021,200,000	1,050,662,969	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2,637,739,894	2,332,171,595	Kec. Krembangan
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	**159,594,000**	**208,679,308**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Krembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	139,194,000	184,825,660	Kec. Krembangan
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	20,400,000	23,853,648	Kec. Krembangan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**109,695,000**	**177,759,264**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan	**109,695,000**	**177,759,264**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	109,695,000	177,759,264	Kec. Krembangan
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**15,238,600**	**47,788,642**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Laporan	**15,238,600**	**47,788,642**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Kec. Krembangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	35 Orang	8,800,000	18,010,592	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Nasional		Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	6,438,600	29,778,050	Kec. Krembangan
	Kec. Lakarsantri				**43,711,354,046**	**34,251,697,586**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.25 %	**27,603,089,904**	**20,980,256,070**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,644,594,953**	**18,063,585,532**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lakarsantri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	23,644,594,953	18,063,585,532	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,799,889,731**	**2,755,199,133**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lakarsantri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3,799,889,731	2,755,199,133	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**158,605,220**	**161,471,405**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Lakarsantri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	158,605,220	161,471,405	Kec. Lakarsantri
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**158,313,370**	**2,796,243,034**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,250,000**	**10,786,034**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	2,250,000	10,786,034	Kec. Lakarsantri
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	205 Lembaga	**130,324,000**	**2,745,070,004**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	130,324,000	2,745,070,004	Kec. Lakarsantri

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**25,739,370**	**40,386,996**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Lakarsantri	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen	2,139,858	16,078,560	Kec. Lakarsantri
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan	13,769,712	14,259,336	Kec. Lakarsantri
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,829,800	10,049,100	Kec. Lakarsantri
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**15,747,244,852**	**10,312,141,274**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**15,637,372,852**	**10,168,543,611**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	6,000,000	6,389,284	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bangkingan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	1,445,344,160	716,396,136	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jeruk	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,379,691,707	510,519,149	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3,402,928,913	497,724,329	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1,804,146,903	1,393,200,746	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,782,129,622	743,626,016	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sumurwelut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,297,911,698	393,696,944	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangkingan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	517,559,808	965,058,563	Kec. Lakarsantri

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jeruk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	396,048,726	986,244,600	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	479,295,159	979,817,252	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,264,168,800	1,643,893,185	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	499,800,000	703,767,299	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sumurwelut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	362,347,356	628,210,108	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga	**109,872,000**	**143,597,663**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit	101,232,000	134,418,662	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	8,640,000	9,179,001	Kec. Lakarsantri
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**185,667,600**	**145,638,768**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**185,667,600**	**145,638,768**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	185,667,600	145,638,768	Kec. Lakarsantri
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**17,038,320**	**17,418,440**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus	**17,038,320**	**17,418,440**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Lakarsantri	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	9,174,480	9,379,160	Kec. Lakarsantri
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	7,863,840	8,039,280	Kec. Lakarsantri

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kec. Mulyorejo				**50,373,408,050**	**49,491,518,171**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.98 %	**30,121,792,414**	**23,507,770,921**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,106,871,512**	**20,279,561,020**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	23,106,871,512	20,279,561,020	Kec. Mulyorejo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,816,111,001**	**3,029,400,000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mulyorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	6,816,111,001	3,029,400,000	Kec. Mulyorejo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**198,809,901**	**198,809,901**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	198,809,901	198,809,901	Kec. Mulyorejo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**135,816,182**	**6,733,503,610**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40,51%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**4,500,000**	**6,699,400**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000	6,699,400	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	**99,728,800**	**6,686,607,810**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	99,728,800	6,686,607,810	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**31,587,382**	**40,196,400**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	1 Bidang Urusan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat				
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mulyorejo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	13,106,400	13,398,800	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13,076,910	13,398,800	Kec. Mulyorejo
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5,404,072	13,398,800	Kec. Mulyorejo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**19,944,180,182**	**19,068,763,168**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**19,729,514,682**	**18,795,886,759**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6,060,000	1,674,850	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,701,463,668	2,947,833,091	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,157,968,701	1,902,278,400	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,604,846,407	1,902,278,400	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,595,160,677	951,139,200	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,220,735,250	2,377,848,000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3,429,760,337	2,377,848,000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,376,788,192	1,101,040,769	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	829,800,000	1,127,615,332	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,354,361,305	1,027,720,914	Kec. Mulyorejo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	744,070,660	558,633,259	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	958,010,700	1,669,712,107	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	750,488,785	850,264,437	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga	**214,665,500**	**272,876,409**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	167,665,500	222,630,909	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	47,000,000	50,245,500	Kec. Mulyorejo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**154,682,872**	**154,682,872**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	**154,682,872**	**154,682,872**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	154,682,872	154,682,872	Kec. Mulyorejo
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16,936,400**	**26,797,600**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**16,936,400**	**26,797,600**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang	3,830,000	13,398,800	Kec. Mulyorejo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	13,106,400	13,398,800	Kec. Mulyorejo
	Kec. Pabean Cantian				**36,900,600,505**	**42,175,231,916**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,93%	**22,056,402,775**	**19,371,737,511**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	KABUPATEN/KOTA						
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,325,190,048**	**17,466,465,178**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	17,325,190,048	17,466,465,178	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,559,655,760**	**1,729,367,714**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4,559,655,760	1,729,367,714	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**171,556,967**	**175,904,619**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	171,556,967	175,904,619	Kec. Pabean Cantian
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**107,609,549**	**4,985,546,833**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	18%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3,700,000**	**4,019,640**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,700,000	4,019,640	Kec. Pabean Cantian
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	376 Lembaga	**73,136,000**	**4,917,045,853**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	73,136,000	4,917,045,853	Kec. Pabean Cantian
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**30,773,549**	**64,481,340**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	1 Bidang Urusan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat				
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9,346,799	21,493,780	Kec. Pabean Cantian
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13,336,333	21,493,780	Kec. Pabean Cantian
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	8,090,417	21,493,780	Kec. Pabean Cantian
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**14,600,812,831**	**17,564,564,144**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**14,394,771,631**	**17,272,400,501**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	6,540,000	6,699,400	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bongkaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	814,152,396	2,283,835,216	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3,050,292,225	2,790,793,417	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,038,338,737	2,277,356,402	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Perak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,821,016,573	2,821,016,573	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bongkaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,069,026,750	1,131,938,596	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,607,580,351	2,735,396,683	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	944,224,599	1,181,764,214	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Perak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,043,600,000	2,043,600,000	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga	**206,041,200**	**292,163,643**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit	158,175,000	218,430,326	Kec. Pabean Cantian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	47,866,200	73,733,317	Kec. Pabean Cantian
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**118,182,550**	**169,640,928**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**118,182,550**	**169,640,928**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	118,182,550	169,640,928	Kec. Pabean Cantian
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**17,592,800**	**83,742,500**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**17,592,800**	**83,742,500**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	9,008,000	30,147,300	Kec. Pabean Cantian
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8,584,800	53,595,200	Kec. Pabean Cantian
	Kec. Pakal				**37,238,676,030**	**35,190,041,291**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,44%	**21,938,948,030**	**17,132,426,760**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,340,088,868**	**15,809,979,294**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pakal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	17,340,088,868	15,809,979,294	Kec. Pakal
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,434,972,711**	**1,181,219,423**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pakal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket	4,434,972,711	1,181,219,423	Kec. Pakal
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**163,886,451**	**141,228,043**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	163,886,451	141,228,043	Kec. Pakal
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**96,587,100**	**2,803,115,257**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,700,000**	**10,886,525**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,700,000	10,886,525	Kec. Pakal
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga	**69,601,600**	**2,761,645,971**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	69,601,600	2,761,645,971	Kec. Pakal
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**24,285,500**	**30,582,761**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pakal	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	6,058,380	13,834,261	Kec. Pakal
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,060,436	8,374,250	Kec. Pakal
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,166,684	8,374,250	Kec. Pakal
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**15,047,111,800**	**15,114,106,306**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**14,919,152,800**	**14,948,173,548**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pakal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6,000,000	26,797,600	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	2,791,060,530	4,267,520,388	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,980,208,192	2,368,380,064	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sumberejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,551,184,779	2,066,351,998	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2,130,051,849	1,923,693,793	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,438,800,000	2,066,890,889	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pakal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	481,200,000	930,188,622	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sumberejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	597,600,000	129,030,125	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Benowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	943,047,450	1,169,320,069	Kec. Pakal
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga	**127,959,000**	**165,932,758**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	107,559,000	142,819,828	Kec. Pakal
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	20,400,000	23,112,930	Kec. Pakal
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**138,571,200**	**120,294,768**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**138,571,200**	**120,294,768**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138,571,200	120,294,768	Kec. Pakal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**17,457,900**	**20,098,200**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	**17,457,900**	**20,098,200**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pakal	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	166 Orang	7,800,000	10,049,100	Kec. Pakal
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	9,657,900	10,049,100	Kec. Pakal
	Kec. Rungkut				**46,252,273,634**	**56,461,863,611**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,26%	**28,283,978,151**	**21,950,098,431**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,638,377,128**	**19,969,407,552**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rungkut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	22,638,377,128	19,969,407,552	Kec. Rungkut
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,535,068,903**	**1,840,898,863**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rungkut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,535,068,903	1,840,898,863	Kec. Rungkut
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**110,532,120**	**139,792,016**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	110,532,120	139,792,016	Kec. Rungkut
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**144,499,552**	**5,478,143,526**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,16%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	**1,050,000**	**12,393,890**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,050,000	12,393,890	Kec. Rungkut
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga	**120,916,000**	**5,427,372,460**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	120,916,000	5,427,372,460	Kec. Rungkut
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**22,533,552**	**38,377,176**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Rungkut	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	900	16,078,560	Kec. Rungkut
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13,769,712	14,259,336	Kec. Rungkut
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,863,840	8,039,280	Kec. Rungkut
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**17,650,306,531**	**28,859,474,354**	
			Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**17,406,377,731**	**28,538,582,098**	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Rungkut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	4,500,000	33,497,000	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,220,757,515	3,703,650,433	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Rungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	12 Unit	1,793,881,070	3,064,204,678	Kec. Rungkut

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kelurahan	Kidul	Terbangun				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,793,685,652	2,894,195,218	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Penjaringansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,561,742,776	3,125,820,308	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,739,277,103	2,986,633,349	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,139,473,058	2,931,647,788	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,402,904,400	1,948,823,802	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	937,200,000	1,625,380,474	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	963,021,825	1,668,532,168	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penjaringansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,358,134,332	1,574,842,454	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1,617,000,000	1,668,143,414	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	874,800,000	1,313,211,012	Kec. Rungkut
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga	**243,928,800**	**320,892,256**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit	234,099,000	310,843,156	Kec. Rungkut
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	9,829,800	10,049,100	Kec. Rungkut
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**153,829,800**	**154,049,100**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	**153,829,800**	**154,049,100**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	153,829,800	154,049,100	Kec. Rungkut
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**19,659,600**	**20,098,200**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**		Jumlah potensi konflik yang dapat	150 Kasus	**19,659,600**	**20,098,200**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas				
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Rungkut	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	9,829,800	10,049,100	Kec. Rungkut
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	9,829,800	10,049,100	Kec. Rungkut
	Kec. Sambikerep				**33,875,921,118**	**34,643,318,193**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,02%	**20,070,999,275**	**22,799,410,277**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,623,922,362**	**15,104,845,398**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	16,623,922,362	15,104,845,398	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket	**3,359,209,913**	**7,599,059,279**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sambikerep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	3,359,209,913	7,599,059,279	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**87,867,000**	**95,505,600**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	87,867,000	95,505,600	Kec. Sambikerep
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**113,756,201**	**3,443,485,126**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**5,400,000**	**5,694,490**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,400,000	5,694,490	Kec. Sambikerep

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	261 Lembaga	**79,744,800**	**3,422,884,493**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79,744,800	3,422,884,493	Kec. Sambikerep
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**28,611,401**	**14,906,143**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sambikerep	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen	8,990,664	9,513,148	Kec. Sambikerep
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	17,622,022	3,349,700	Kec. Sambikerep
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1,998,715	2,043,295	Kec. Sambikerep
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	**13,528,886,702**	**8,176,537,902**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**13,393,695,709**	**8,005,804,176**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5,400,000	5,024,550	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3,310,056,733	1,422,669,241	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,329,066,959	499,854,691	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,004,356,681	1,412,480,050	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Beringin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	2 Unit	3,276,265,895	307,060,880	Kec. Sambikerep

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kelurahan		Terbangun				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,432,800,000	1,518,870,724	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,221,600,000	1,418,571,000	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	512,349,441	833,579,340	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	301,800,000	587,693,700	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	**135,190,993**	**170,733,726**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	120,213,000	155,421,578	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	14,977,993	15,312,148	Kec. Sambikerep
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**147,515,100**	**199,767,048**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**147,515,100**	**199,767,048**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	147,515,100	199,767,048	Kec. Sambikerep
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**14,763,840**	**24,117,840**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus	**14,763,840**	**24,117,840**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	6,900,000	16,078,560	Kec. Sambikerep
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan	7,863,840	8,039,280	Kec. Sambikerep
	Kec. Sawahan				**56,248,007,894**	**68,559,998,826**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,82%	**28,217,327,358**	**22,797,844,153**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,305,572,113**	**20,215,176,467**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sawahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	22,305,572,113	20,215,176,467	Kec. Sawahan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,779,972,545**	**2,448,980,012**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sawahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	5,779,972,545	2,448,980,012	Kec. Sawahan
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**131,782,700**	**133,687,674**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	131,782,700	133,687,674	Kec. Sawahan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**240,676,104**	**9,313,548,634**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	74,03%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**2,981,706**	**3,048,227**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,981,706	3,048,227	Kec. Sawahan
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga	**218,037,600**	**9,280,353,107**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	218,037,600	9,280,353,107	Kec. Sawahan
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**19,656,798**	**30,147,300**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan	1 Bidang Urusan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			kepada Camat				
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sawahan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	5,331,732	10,049,100	Kec. Sawahan
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	4,495,266	10,049,100	Kec. Sawahan
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	9,829,800	10,049,100	Kec. Sawahan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**27,594,093,618**	**36,249,991,914**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**27,356,885,010**	**35,937,902,788**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sawahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10,616,184	10,853,028	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,508,772,339	3,474,406,840	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3,243,631,950	3,545,939,048	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3,569,922,541	3,577,259,257	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,140,285,802	3,776,234,708	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3,245,501,734	3,611,035,954	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Petemon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,051,453,915	2,934,526,945	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,996,572,225	3,216,778,236	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,204,934,585	2,103,167,407	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pakis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	3,351,090,300	2,435,572,913	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas /	1,809,000,000	3,160,036,454	Kec. Sawahan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,128,181,086	1,820,534,975	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Petemon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3,096,922,349	2,271,557,023	Kec. Sawahan
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga	**237,208,608**	**312,089,126**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit	227,772,000	302,441,990	Kec. Sawahan
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	9,436,608	9,647,136	Kec. Sawahan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**146,262,000**	**152,233,968**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**146,262,000**	**152,233,968**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	146,262,000	152,233,968	Kec. Sawahan
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**49,648,814**	**46,380,157**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus	**49,648,814**	**46,380,157**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sawahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	64 Orang	23,894,414	24,609,925	Kec. Sawahan
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	25,754,400	21,770,232	Kec. Sawahan
	Kec. Semampir				**46,379,389,807**	**70,455,500,124**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,67%	**25,423,355,564**	**22,246,932,999**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan	100%	**19,895,993,402**	**18,169,150,158**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daerah		Tunjangan ASN				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semampir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	19,895,993,402	18,169,150,158	Kec. Semampir
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,254,066,554**	**3,775,955,633**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Semampir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,254,066,554	3,775,955,633	Kec. Semampir
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**273,295,608**	**301,827,208**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	273,295,608	301,827,208	Kec. Semampir
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**242,075,411**	**8,349,495,220**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**5,820,000**	**15,778,910**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,820,000	15,778,910	Kec. Semampir
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	**214,062,400**	**8,285,543,136**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	214,062,400	8,285,543,136	Kec. Semampir
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**22,193,011**	**48,173,174**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Semampir	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	2,830,500	18,141,860	Kec. Semampir
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,000,000	19,437,720	Kec. Semampir
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,362,511	10,593,594	Kec. Semampir
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**20,545,473,072**	**39,673,580,813**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**20,305,154,856**	**39,360,245,717**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Semampir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	26,860,000	27,783,332	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,371,281,950	4,823,588,000	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,503,969,688	4,410,137,600	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,069,814,812	4,422,502,228	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,072,621,726	5,650,488,800	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,744,360,140	4,961,404,800	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,709,160,608	3,445,420,000	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,424,307,500	2,894,152,800	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,567,714,905	3,445,420,000	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,174,455,028	3,445,420,000	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,640,608,499	1,833,928,157	Kec. Semampir
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga	**240,318,216**	**313,335,096**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit	221,445,000	294,040,824	Kec. Semampir
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	18,873,216	19,294,272	Kec. Semampir
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**138,444,960**	**142,825,632**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	**138,444,960**	**142,825,632**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138,444,960	142,825,632	Kec. Semampir
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**30,040,800**	**42,665,460**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	21 Kasus	**30,040,800**	**42,665,460**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Semampir	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang	5,433,000	16,748,500	Kec. Semampir
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	24,607,800	25,916,960	Kec. Semampir
	Kec. Simokerto				**40,800,260,711**	**45,441,781,743**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,53%	**23,484,850,640**	**17,990,892,865**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,543,175,508**	**15,940,971,151**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Simokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	19,543,175,508	15,940,971,151	Kec. Simokerto
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,802,948,232**	**1,909,830,990**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Simokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	3,802,948,232	1,909,830,990	Kec. Simokerto
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang	100%	**138,726,900**	**140,090,724**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		urusan Pemerintah Daerah yang disediakan				
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Simokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	138,726,900	140,090,724	Kec. Simokerto
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**115,568,264**	**4,723,529,864**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	81,70%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga	**3,231,768**	**3,349,700**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,231,768	3,349,700	Kec. Simokerto
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga	**104,627,200**	**4,708,920,039**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	104,627,200	4,708,920,039	Kec. Simokerto
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**7,709,296**	**11,260,125**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Simokerto	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	405,594	3,753,375	Kec. Simokerto
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,651,851	3,753,375	Kec. Simokerto
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	3,651,851	3,753,375	Kec. Simokerto

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**17,067,198,481**	**22,585,646,037**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**16,898,550,481**	**22,360,829,367**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Simokerto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	4,800,000	46,838,886	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,276,377,308	1,966,849,773	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidodadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,736,488,359	1,875,774,030	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simolawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	1,783,020,639	2,417,268,584	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1,376,144,472	2,170,972,733	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,540,977,306	2,775,556,365	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,262,448,150	1,728,680,745	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,007,225,375	1,596,716,578	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidodadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	731,400,000	2,446,144,697	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simokerto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,617,380,218	2,158,528,563	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simolawang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,562,288,654	3,177,498,413	Kec. Simokerto
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga	**168,648,000**	**224,816,670**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Simokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	151,848,000	182,217,600	Kec. Simokerto
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	16,800,000	42,599,070	Kec. Simokerto
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**126,984,950**	**131,677,587**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman	14 Lokasi	**126,984,950**	**131,677,587**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum		dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	126,984,950	131,677,587	Kec. Simokerto
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**5,658,376**	**10,035,390**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus	**5,658,376**	**10,035,390**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Simokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47 Orang	3,410,000	7,932,877	Kec. Simokerto
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	2,248,376	2,102,513	Kec. Simokerto
	Kec. Sukolilo				**52,470,747,880**	**57,180,416,956**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,18%	**31,569,258,054**	**24,630,549,176**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**25,578,226,051**	**21,775,781,712**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukolilo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	25,578,226,051	21,775,781,712	Kec. Sukolilo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,867,128,526**	**2,643,375,857**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukolilo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,867,128,526	2,643,375,857	Kec. Sukolilo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**123,903,477**	**211,391,607**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukolilo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	123,903,477	211,391,607	Kec. Sukolilo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**185,512,798**	**5,935,430,260**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			masyarakat				
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,71%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**6,300,000**	**14,738,680**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6,300,000	14,738,680	Kec. Sukolilo
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	439 Lembaga	**121,038,400**	**5,890,577,777**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	121,038,400	5,890,577,777	Kec. Sukolilo
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**58,174,398**	**30,113,803**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukolilo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen	14,150,274	10,015,603	Kec. Sukolilo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	15,281,053	10,049,100	Kec. Sukolilo
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	28,743,071	10,049,100	Kec. Sukolilo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**20,546,453,878**	**26,378,036,382**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**20,311,389,358**	**26,072,743,660**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kec. Sukolilo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	12 Lembaga	7,770,000	23,447,900	Kec. Sukolilo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Keputih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,169,199,530	2,249,664,418	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,320,563,272	2,392,343,218	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,509,886,103	3,020,102,264	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,274,297,775	3,020,102,217	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,407,383,316	3,298,311,971	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Semolowaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,145,019,489	1,761,469,998	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,721,582,354	2,046,367,920	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	779,374,757	780,674,114	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Keputih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	980,042,232	1,033,519,298	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,093,016,670	1,470,386,310	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	935,400,000	1,167,111,153	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	878,400,000	1,403,730,640	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	946,200,000	1,206,980,356	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Semolowaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,143,253,860	1,198,531,883	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga	**235,064,520**	**305,292,722**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukolilo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit	211,954,500	281,439,074	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	23,110,020	23,853,648	Kec. Sukolilo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**130,686,000**	**188,612,496**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman	11 Lokasi	**130,686,000**	**188,612,496**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum		dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	130,686,000	188,612,496	Kec. Sukolilo
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**38,837,150**	**47,788,642**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus	**38,837,150**	**47,788,642**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sukolilo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	10,400,000	18,010,592	Kec. Sukolilo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	28,437,150	29,778,050	Kec. Sukolilo
	Kec. Sukomanunggal				**45,239,648,113**	**46,243,753,516**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,90%	**26,507,894,501**	**21,174,800,865**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21,235,793,100**	**19,118,818,333**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	21,235,793,100	19,118,818,333	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,118,020,337**	**1,885,215,540**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5,118,020,337	1,885,215,540	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**154,081,064**	**170,766,992**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	154,081,064	170,766,992	Kec. Sukomanunggal
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**148,928,556**	**4,191,236,664**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			masyarakat				
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**8,257,032**	**8,441,244**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8,257,032	8,441,244	Kec. Sukomanunggal
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	**103,782,400**	**4,152,648,120**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	103,782,400	4,152,648,120	Kec. Sukomanunggal
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**36,889,124**	**30,147,300**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	9,829,800	10,049,100	Kec. Sukomanunggal
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	15,424,306	10,049,100	Kec. Sukomanunggal
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	11,635,018	10,049,100	Kec. Sukomanunggal
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**18,417,059,306**	**20,663,057,057**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**18,280,237,106**	**20,488,388,162**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	12 Lembaga	29,489,400	30,147,300	Kec. Sukomanunggal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Putat Gede	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,574,266,799	1,591,799,149	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,790,404,236	2,405,262,060	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,072,280,506	3,405,314,697	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,840,389,826	2,184,565,545	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,772,972,950	1,952,310,778	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,328,580,667	2,310,805,702	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Putat Gede	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	360,719,808	407,200,921	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,684,881,960	1,209,682,444	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,461,024,000	2,187,055,326	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,071,615,469	626,803,709	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	622,811,485	1,133,491,178	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	670,800,000	1,043,949,353	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga	**136,822,200**	**174,668,895**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit	113,886,000	151,220,995	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	22,936,200	23,447,900	Kec. Sukomanunggal
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**151,864,500**	**194,560,730**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**151,864,500**	**194,560,730**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	12 Laporan	151,864,500	194,560,730	Kec. Sukomanunggal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**13,901,250**	**20,098,200**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus	**13,901,250**	**20,098,200**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	9,430,000	10,049,100	Kec. Sukomanunggal
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4,471,250	10,049,100	Kec. Sukomanunggal
	Kec. Tambaksari				**66,414,989,517**	**93,766,006,145**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,91%	**35,000,558,048**	**30,774,190,807**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**27,937,694,430**	**25,443,205,449**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tambaksari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	27,937,694,430	25,443,205,449	Kec. Tambaksari
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,860,142,478**	**5,098,005,618**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tambaksari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	6,860,142,478	5,098,005,618	Kec. Tambaksari
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**202,721,140**	**232,979,740**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	202,721,140	232,979,740	Kec. Tambaksari
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**229,298,053**	**9,621,019,524**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47,02%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**15,039,594**	**15,375,123**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15,039,594	15,375,123	Kec. Tambaksari
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	751 Lembaga	**184,246,400**	**9,569,467,641**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	184,246,400	9,569,467,641	Kec. Tambaksari
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**30,012,059**	**36,176,760**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tambaksari	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	7,434,060	12,058,920	Kec. Tambaksari
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,777,999	12,058,920	Kec. Tambaksari
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,800,000	12,058,920	Kec. Tambaksari
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**30,857,101,616**	**52,993,124,114**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan	**30,579,220,916**	**52,633,656,475**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6,000,000	1,674,850	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Dukuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	7 Unit	2,116,182,765	4,011,339,417	Kec. Tambaksari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kelurahan	Setro	Terbangun				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gading	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1,398,770,772	4,869,452,735	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,550,082,370	4,861,719,709	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,522,076,997	4,423,557,419	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	3,140,242,795	5,176,869,950	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ploso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2,579,217,461	4,656,137,452	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rangkah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,226,204,811	3,738,430,958	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3,698,747,790	4,339,186,125	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	966,600,000	1,062,864,769	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gading	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,554,118,725	2,224,080,470	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,366,651,920	2,456,022,787	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,218,000,000	1,675,032,253	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,844,929,425	2,427,229,882	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ploso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,407,000,000	2,685,780,685	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rangkah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	785,400,000	1,357,203,661	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambaksari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,198,995,085	2,667,073,353	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga	**277,880,700**	**359,467,639**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit	246,753,000	327,645,489	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	31,127,700	31,822,150	Kec. Tambaksari
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**285,406,800**	**316,156,800**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi	**285,406,800**	**316,156,800**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	285,406,800	316,156,800	Kec. Tambaksari
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**42,625,000**	**61,514,900**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus	**42,625,000**	**61,514,900**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tambaksari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang	20,560,000	33,671,400	Kec. Tambaksari
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	22,065,000	27,843,500	Kec. Tambaksari
	Kec. Tandes				**48,454,477,721**	**50,069,737,944**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,12%	**28,668,971,537**	**22,291,366,402**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,755,933,377**	**20,296,818,965**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tandes	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	23,755,933,377	20,296,818,965	Kec. Tandes
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,759,836,230**	**1,832,212,306**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tandes	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4,759,836,230	1,832,212,306	Kec. Tandes
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**153,201,930**	**162,335,131**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tandes	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	153,201,930	162,335,131	Kec. Tandes
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**243,955,352**	**4,936,407,767**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PUBLIK		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**18,840,000**	**19,294,272**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18,840,000	19,294,272	Kec. Tandes
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga	**155,055,634**	**4,844,759,975**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	155,055,634	4,844,759,975	Kec. Tandes
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**70,059,718**	**72,353,520**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tandes	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	23,591,520	24,117,840	Kec. Tandes
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	22,876,678	24,117,840	Kec. Tandes
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	23,591,520	24,117,840	Kec. Tandes
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**19,310,013,432**	**22,571,684,267**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**19,125,874,932**	**22,358,563,435**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tandes	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	36,000,000	40,196,400	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tandes	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,689,811,336	2,314,485,999	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karangpoh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,327,668,340	2,268,394,892	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Balongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,649,236,639	1,343,307,570	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,529,802,005	1,055,456,384	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,487,178,272	4,764,212,397	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,736,919,388	2,458,343,485	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tandes	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	687,744,530	911,900,453	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangpoh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,441,817,927	1,727,657,888	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Balongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,536,885,795	885,744,717	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	568,200,000	962,207,137	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,876,200,000	2,815,890,087	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	558,410,700	810,766,026	Kec. Tandes
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga	**184,138,500**	**213,120,832**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tandes	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit	161,338,500	193,826,560	Kec. Tandes
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	22,800,000	19,294,272	Kec. Tandes
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**202,733,000**	**146,260,464**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	**202,733,000**	**146,260,464**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	202,733,000	146,260,464	Kec. Tandes
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**28,804,400**	**124,019,044**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**28,804,400**	**124,019,044**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tandes	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55 Orang	3,050,000	23,897,860	Kec. Tandes
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	25,754,400	100,121,184	Kec. Tandes
	Kec. Tegalsari				**43,667,379,362**	**47,544,713,590**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,25%	**23,628,376,021**	**20,176,816,108**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,773,261,949**	**16,950,602,771**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tegalsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	18,773,261,949	16,950,602,771	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,602,737,272**	**2,920,501,743**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tegalsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	4,602,737,272	2,920,501,743	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**252,376,800**	**305,711,594**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	252,376,800	305,711,594	Kec. Tegalsari
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**117,807,635**	**5,183,912,532**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang	23.25 %			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dipertimbangkan				
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**9,829,800**	**10,049,100**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan	9,829,800	10,049,100	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	**83,650,400**	**5,001,018,912**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83,650,400	5,001,018,912	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**24,327,435**	**172,844,520**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tegalsari	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	5,060,733	24,117,840	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan	2,830,500	20,098,200	Kec. Tegalsari
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	16,436,202	128,628,480	Kec. Tegalsari
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**19,589,801,687**	**21,718,914,924**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**19,414,362,167**	**21,491,963,199**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	8,191,500	8,374,250	Kec. Tegalsari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,238,419,742	3,311,428,845	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Keputran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	1,925,191,213	2,829,275,073	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	1,995,277,307	3,281,862,241	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	3,827,925,961	1,679,180,765	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2,102,978,227	2,720,120,842	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	823,868,416	1,835,582,923	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Keputran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,599,998,861	1,452,105,889	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,454,625,100	1,809,621,795	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,083,600,000	949,788,951	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,354,285,840	1,614,621,625	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga	**175,439,520**	**226,951,725**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	151,848,000	201,627,993	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	23,591,520	25,323,732	Kec. Tegalsari
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**297,509,019**	**309,308,976**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi	**297,509,019**	**309,308,976**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	297,509,019	309,308,976	Kec. Tegalsari
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**33,885,000**	**155,761,050**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	62 Kasus	**33,885,000**	**155,761,050**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daerah		Babinsa/Babinkamtibmas				
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tegalsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang	16,000,000	51,920,350	Kec. Tegalsari
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	17,885,000	103,840,700	Kec. Tegalsari
	Kec. Tenggilis Mejoyo				**32,691,847,103**	**31,789,517,714**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,01%	**20,485,839,348**	**17,349,788,008**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,918,845,690**	**15,739,285,452**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	16,918,845,690	15,739,285,452	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	**3,424,368,858**	**1,462,247,767**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	3,424,368,858	1,462,247,767	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	**142,624,800**	**148,254,789**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	142,624,800	148,254,789	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**70,700,658**	**2,551,635,241**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24,73%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	**1,950,000**	**12,728,860**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,950,000	12,728,860	Kec. Tenggilis Mejoyo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga	**26,895,200**	**2,483,133,876**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26,895,200	2,483,133,876	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan	**41,855,458**	**55,772,505**	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	5,888,550	18,590,835	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	17,781,778	18,590,835	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	18,185,130	18,590,835	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**12,026,080,747**	**11,779,957,497**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	**11,925,713,247**	**11,646,403,473**	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7,200,000	26,673,322	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kutisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3,101,187,160	1,697,312,007	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kendangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,659,501,357	1,567,015,304	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,397,574,755	1,587,513,346	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	1 Unit	2,381,060,083	1,786,345,282	Kec. Tenggilis Mejoyo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kelurahan	Jiwo	Terbangun				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kutisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	710,764,200	1,067,306,096	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kendangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	561,343,688	1,271,723,442	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	827,674,829	1,248,121,959	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,279,407,175	1,394,392,715	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga	**100,367,500**	**133,554,024**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	25 Unit	79,087,500	105,014,580	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	21,280,000	28,539,444	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**95,096,550**	**88,038,768**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi	**95,096,550**	**88,038,768**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	95,096,550	88,038,768	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**14,129,800**	**20,098,200**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	**14,129,800**	**20,098,200**	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	4,300,000	10,049,100	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai	1 Laporan	9,829,800	10,049,100	Kec. Tenggilis Mejoyo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Kec. Wiyung				**34,660,037,714**	**32,592,054,714**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,43%	**21,229,172,521**	**17,448,623,817**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,078,146,286**	**15,603,916,548**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wiyung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	17,078,146,286	15,603,916,548	Kec. Wiyung
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,027,715,109**	**1,734,120,628**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wiyung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4,027,715,109	1,734,120,628	Kec. Wiyung
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**123,311,126**	**110,586,641**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wiyung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	123,311,126	110,586,641	Kec. Wiyung
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**88,007,082**	**2,904,709,268**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55,81%			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**6,815,328**	**6,967,376**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6,815,328	6,967,376	Kec. Wiyung
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga	**60,981,600**	**2,876,731,744**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	60,981,600	2,876,731,744	Kec. Wiyung
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada	6 Bidang Urusan	**20,210,154**	**21,010,148**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Camat				
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wiyung	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9,526,276	10,049,100	Kec. Wiyung
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,829,800	10,049,100	Kec. Wiyung
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	854,078	911,948	Kec. Wiyung
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**13,178,181,511**	**12,065,894,461**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**13,058,040,367**	**11,910,211,785**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wiyung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1,310,640	1,339,880	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,846,317,756	1,436,054,384	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,516,581,916	1,675,410,759	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wiyung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,960,379,062	1,667,236,125	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Babatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2,067,627,288	2,166,718,023	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Babatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,135,407,393	1,837,091,711	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,191,816,312	842,672,248	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	673,200,000	962,895,275	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wiyung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	665,400,000	1,320,793,380	Kec. Wiyung

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga	**120,141,144**	**155,682,676**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wiyung	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	107,559,000	142,819,828	Kec. Wiyung
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12,582,144	12,862,848	Kec. Wiyung
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**146,262,000**	**152,728,968**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	**146,262,000**	**152,728,968**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	146,262,000	152,728,968	Kec. Wiyung
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**18,414,600**	**20,098,200**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	**18,414,600**	**20,098,200**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wiyung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	136 Orang	9,829,800	10,049,100	Kec. Wiyung
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8,584,800	10,049,100	Kec. Wiyung
	Kec. Wonocolo				**40,603,759,988**	**38,682,521,125**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,36%	**24,573,764,677**	**19,646,719,420**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**20,535,769,044**	**17,595,265,081**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonocolo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	20,535,769,044	17,595,265,081	Kec. Wonocolo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,918,317,143**	**1,827,862,708**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wonocolo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	3,918,317,143	1,827,862,708	Kec. Wonocolo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**119,678,490**	**223,591,631**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonocolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	119,678,490	223,591,631	Kec. Wonocolo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**97,165,160**	**3,810,367,019**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35.14 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	**1,800,000**	**8,910,202**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,800,000	8,910,202	Kec. Wonocolo
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	281 Lembaga	**90,219,200**	**3,684,743,523**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90,219,200	3,684,743,523	Kec. Wonocolo
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**5,145,960**	**116,713,294**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonocolo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	1,500,000	108,004,074	Kec. Wonocolo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1,965,960	2,009,820	Kec. Wonocolo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1,680,000	6,699,400	Kec. Wonocolo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**15,803,876,151**	**15,020,187,594**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	**15,629,821,751**	**14,832,012,234**	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	7,500,000	18,318,000	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,923,787,557	1,537,319,555	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidosermo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,406,816,428	1,119,392,266	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,507,962,480	2,123,349,366	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,567,901,151	2,848,309,204	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Margorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,171,851,702	1,143,111,057	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	879,733,782	709,961,010	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	949,200,000	1,975,406,835	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,310,740,125	846,810,972	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Margorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,030,173,950	1,505,547,600	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidosermo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	874,154,576	1,004,486,369	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	**174,054,400**	**188,175,360**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	139,194,000	184,825,660	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	34,860,400	3,349,700	Kec. Wonocolo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran	100%	**121,104,000**	**165,173,328**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perda di Kecamatan				
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**121,104,000**	**165,173,328**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	121,104,000	165,173,328	Kec. Wonocolo
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**7,850,000**	**40,073,764**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus	**7,850,000**	**40,073,764**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wonocolo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39 Orang	3,500,000	23,765,584	Kec. Wonocolo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24 Laporan	4,350,000	16,308,180	Kec. Wonocolo
	Kec. Wonokromo				**53,693,752,946**	**65,706,548,748**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,23%	**28,388,269,740**	**22,695,884,011**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,353,270,390**	**21,653,686,544**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonokromo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	23,353,270,390	21,653,686,544	Kec. Wonokromo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,856,023,850**	**847,284,452**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wonokromo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	4,856,023,850	847,284,452	Kec. Wonokromo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**178,975,500**	**194,913,015**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonokromo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	178,975,500	194,913,015	Kec. Wonokromo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**193,779,120**	**6,795,589,254**	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.15 %			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**1,740,000**	**3,751,664**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,740,000	3,751,664	Kec. Wonokromo
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga	**183,722,400**	**6,782,123,460**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	183,722,400	6,782,123,460	Kec. Wonokromo
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**8,316,720**	**9,714,130**	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonokromo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	452,88	1,674,850	Kec. Wonokromo
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,931,920	4,019,640	Kec. Wonokromo
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	3,931,920	4,019,640	Kec. Wonokromo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	**24,990,448,716**	**36,013,055,595**	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	**24,803,689,116**	**35,766,072,070**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wonokromo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1,740,000	1,071,904	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Darmo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,968,922,834	2,084,960,703	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jagir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,465,420,844	3,995,476,630	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ngagel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,616,481,287	2,855,743,405	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,486,200,471	4,787,091,426	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,990,663,163	3,839,386,399	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonokromo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	3,550,748,319	4,937,372,479	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Darmo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,562,158,345	2,115,317,711	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jagir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,503,940,138	1,963,261,189	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngagel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	622,347,912	1,297,476,402	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,809,600,000	2,772,012,327	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,726,765,881	2,091,174,087	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonokromo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,498,699,922	3,025,727,408	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga	**186,759,600**	**246,983,525**	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wonokromo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit	183,483,000	243,633,825	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3,276,600	3,349,700	Kec. Wonokromo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**106,848,100**	**165,163,728**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan	20 Lokasi	**106,848,100**	**165,163,728**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			ditertibkan				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	106,848,100	165,163,728	Kec. Wonokromo
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**14,407,270**	**36,856,160**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	**14,407,270**	**36,856,160**	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wonokromo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	7,600,000	29,706,980	Kec. Wonokromo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	6,807,270	7,149,180	Kec. Wonokromo
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**51,254,674,554**	**37,046,613,881**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**51,254,674,554**	**37,046,613,881**	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**51,254,674,554**	**37,046,613,881**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**14,457,933,458**	**14,375,108,724**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**11,292,423,594**	**9,120,103,174**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	11,292,423,594	9,120,103,174	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**221,866,193**	**191,802,421**	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	221,866,193	191,802,421	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**2,943,643,671**	**5,063,203,129**	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2,943,643,671	5,063,203,129	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	93%	**5,790,657,096**	**846,658,745**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan**		Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang	293 Lembaga	**5,790,657,096**	**846,658,745**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	293 Orang	5,790,657,096	846,658,745	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	**17,419,567,000**	**8,317,286,963**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	70 Lembaga	**17,419,567,000**	**8,317,286,963**	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang	17,419,567,000	8,317,286,963	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	81%	**83,410,000**	**59,370,396**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	**83,410,000**	**59,370,396**	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	83,410,000	59,370,396	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN**		Persentase potensi konflik umat beragama yang	100%	**1,039,429,445**	**823,293,275**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina				
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya	8 Lembaga	**1,039,429,445**	**823,293,275**	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	1,039,429,445	823,293,275	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	**12,463,677,555**	**12,624,895,778**	
			Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%			
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	14 Lembaga	**12,463,677,555**	**12,624,895,778**	
			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	17 Lembaga			
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17 Orang	11,733,039,850	11,875,471,710	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan	730,637,705	749,424,068	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL					**11,426,667,626,384**	**11,591,333,869,486**	

Sasaran pembangunan diarahkan untuk mencapai target indikator kerangka makro sebagimana disampaikan pada tabel V.2

Tabel V.2
Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro

Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target RKP Tahun 2025	Target RKPD Provinsi Jawa Timur	Target Surabaya dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2025	Keterangan
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,6%	5,10 – 5,41%	5,74% - 7,73%	5,5% - 6,1%	-
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 – 5,0	4,49 – 3,90	5,89 – 5,22%	5,89% - 5,22%	-
Rasio Gini	0,379 – 0,382	0,386 – 0,381	0,3078 – 0,3847	0,351 - 0,388	-
Indeks Modal Manusia	0,56	0,61	-	0,57	Pada RKPD Tahun 2025 tidak terdapat Indikator tersebut. Namun pada baseline indikator tahun 2025 di RPJPD Tahun 2025-2045 ditargetkan sebesar 0,57
Tingkat Kemiskinan	7,0 – 8,0%	9,40 – 8,90%	3,63% - 2,83%	4,25%- 3,5%	-
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	38,6%	1,00%	-	-43,36%	Pada RKPD Tahun 2025 tidak terdapat Indikator tersebut. Namun pada baseline indikator tahun 2025 di RPJPD Tahun 2025-2045 ditargetkan sebesar 26,01% - 30%

5.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan hasil analisis keuangan tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023 dan target tahun 2024. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif belanja daerah disajikan dalam Tabel V.3 tentang Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2025.

Tabel V.3
Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2025

NO	URAIAN		PROYEKSI 2025
A	**PENDAPATAN**		**11.212.030.986.622**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**8.024.312.956.498**
	a	Pajak Daerah	6.550.224.998.397
	b	Retribusi Daerah	316.334.245.975
	c	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	210.074.787.736
	d	Lain-Lain PAD yang sah	947.678.924.390
2	**PENDAPATAN TRANSFER**		**3.187.718.030.124**
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		**2.694.153.486.882**
	a	1) Dana Perimbangan	2.694.153.486.882
	b	2) Dana Insentif Daerah	0
	Transfer Antar – Daerah		**493.564.543.242**
	a	1) Pendapatan Bagi Hasil	489.721.229.463
	b	2) Bantuan Keuangan	3.843.313.779
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**		**0**
	a	Pendapatan Hibah	
	b	Pendapatan Dana Darurat	
	c	Pendapatan Lainnya	
B	**BELANJA**		**11.426.667.626.384**
	BELANJA OPERASI + BELANJA MODAL		**11.389.167.626.384**
1	**BELANJA OPERASI**		**8.893.650.293.407**
	a	Belanja Pegawai	3.857.168.782.897
	b	Belanja Barang dan Jasa	4.608.874.607.730
	c	Belanja Bunga	
	d	Belanja Subsidi	80912203294
	e	Belanja Hibah	339.132.299.486
	f	Belanja Bantuan Sosial	7.562.400.000
2	**BELANJA MODAL**		**2.495.517.332.977**
	a	Belanja Modal Tanah	125.523.042.657
	b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	318.689.514.074
	c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	678.105.806.554
	d	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.365.205.383.482
	e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.849.286.210

NO	URAIAN		PROYEKSI 2025
	f	Belanja Modal Aset Lainnya	144.300.000
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**		**17.000.000.000**
	a	Belanja Tidak Terduga	17.000.000.000
4	**BELANJA TRANSFER**		**20.500.000.000**
	a	Belanja Bagi Hasil	0
	b	Belanja Bantuan Keuangan	20.500.000.000

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (diolah tahun 2024).

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat Kota Surabaya terkait pembangunan manusia, nilai tambah barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, garis atau batas kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan sosial. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban, tenaga kerja, pengarustamaan gender, pangan, pertanahan, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga bencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, penanaman modal, kebudayaan, kearsipan, kelautan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang

mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan
4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan diarahkan untuk mencapai target indikator kerangka makro sebagimana disampaikan pada tabel VI.1

Tabel VI.1
Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro

Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target RKP Tahun 2025	Target RKPD Provinsi Jawa Timur	Target Surabaya dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2025	Keterangan
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,6%	5,10 – 5,41%	5,74% - 7,73%	5,5% - 6,1%	-
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 – 5,0	4,49 – 3,90	5,89 – 5,22%	5,89% - 5,22%	-
Rasio Gini	0,379 – 0,382	0,386 – 0,381	0,3078 – 0,3847	0,351 - 0,388	-
Indeks Modal Manusia	0,56	0,61	-	0,57	Pada RKPD Tahun 2025 tidak terdapat Indikator tersebut. Namun pada baseline indikator tahun 2025 di RPJPD Tahun 2025-2045 ditargetkan sebesar 0,57
Tingkat Kemiskinan	7,0 – 8,0%	9,40 – 8,90%	3,63% - 2,83%	4,25%- 3,5%	-
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	38,6%	1,00%	-	-43,36%	Pada RKPD Tahun 2025 tidak terdapat Indikator tersebut. Namun pada baseline indikator tahun 2025 di RPJPD Tahun 2025-2045 ditargetkan sebesar -43,36%

Indikator kinerja utama secara rinci, dapat dilihat pada Tabel VI.2.

Tabel VI.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026

	Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan										
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Kondisi Awal**	**Target Indikator Tujuan**							**Kondisi Akhir**
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**Realisasi 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4,85%	6,3%-6,8% 2,71%-5,00%*	2,96%	3,21%*** 5,9%****	5,7%	3,46%*** 6,1%****	3,71% 5,5% - 6,1%*****	3,96 %	3,96%
		Indeks Gini	0,344	0,38-0,37 0,334*	0,328	0,323	0,423	0,423	0,315 0,351 – 0,388*****	0,311	0,311
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,79%	6,30%-5,90% 9,00%-5,90%*	8,99%	8,26% 5%****	6,76%	6,93%*** 4,5%****	6,50% 5,89 – 5,22%*****	6,00 %	6,00%
		Persentase Penduduk Miskin	5,02%	4,71%-4,60%	4,62%	4,31%	4,65%	4,01%	3,71% 4,25% - 3,5%*****	3,42 %	3,42%
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani,	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar	Indeks Pembangunan Manusia	82,23	81-82	82,50	82,50	83,99	83,50	83,50 84,5 – 85,67*****	83,50	83,50

	Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan									
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Kondisi Awal**	**Target Indikator Tujuan**						**Kondisi Akhir**
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**Realisasi 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	lainnya										
	Pembentukan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Sosial	73,99	75,05**	76,69	79,41	82,70	82,13	84,85 85,91*****	87,57	87,57
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks Infrastruktur Kota	0,600	0,606**	0,626	0,678	0,75	0,734	0,793	0,854	0,854
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65,10	68,32	68,54	70,35	68,75	68,97	69,18	69,18
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	78,13	81,81	82,61	83,41	95,12	84,21	85,01	85,81	85,81

	Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan										
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Kondisi Awal**	**Target Indikator Tujuan**							**Kondisi Akhir**
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**Realisasi 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,77	0,81**	0,83	0,85	0,92	0,87	0,90	0,92	0,92

Keterangan :

1. Untuk IKLH memiliki kondisi awal = 66,99 dan target pada Tahun 2021-2026 adalah 66,99 ; 67,00 ; 67,02 ; 67,03 ; 67,05 ; 67,06 secara berturut-turut.
2. *) penyesuaian target pada Tahun 2021 dengan kondisi saat proses penyusunan
3. **) merupakan indikator baru atau menggunakan cara perhitungan yang berbeda, kondisi awal pada Tahun 2020 dan target pada Tahun 2021 merupakan proyeksi.
4. ***) terdapat penyesuaian pada RKPD 2024 dengan mempertimbangkan evaluasi tahun 2022 serta proyeksi di masa mendatang pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi 6,1% dan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,5%
5. ****) berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi tahun 2023
6. *****) penyesuaian target pada RKPD 2025 dengan berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2023

6.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. IKK membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana tujuan dan target pembangunan daerah telah tercapai. Tujuan dalam penetapan IKK Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKK Kepala PD dapat dilihat pada Tabel VI.3.

Tabel VI.3
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
	1	Indeks Gini	0,344	0,38-0,37 0,334*	0,328	0,323	0,319	0,315 0,351 – 0,388*****	0,311	0,311	Indeks
	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4,85%	6,3%-6,8% 2,71%-5,00%*	2,96%	3,21%	3,46% 6,1%***	3,71% 5,5% - 6,1%*****	3,96%	3,96%	%
	3	Persentase Penduduk Miskin	5,02%	4,71%-4,60%	4,62%	4,31%	4,01%	3,71% 4,25% - 3,5%*****	3,42%	3,42%	%
	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,79%	6,30%-5,90% 9,00%-5,90%*	8,99%	8,26%	6,93% 4,5%***	6,50% 5,89% - 5,22%*****	6,00%	6,00%	%
	5	Indeks Pembangunan Manusia	82,23	81-82	82,50	82,50	83,50	83,50 84,5 – 85,67*****	83,50	83,50	Indeks
	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65,10	68,32	68,54	68,75	68,97	69,18	69,18	Indeks
	7	Indeks Reformasi Birokrasi	78,13	81,81	82,61	83,41	84,21	85,01	85,81	85,81	Indeks
	8	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,77	0,81**	0,83	0,85	0,87	0,90	0,92	0,92	Indeks

B.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**										
	1	Indeks Harmoni Sosial	73,99	75,05**	76,69	79,41	82,13	84,85 85,91*****	87,57	87,57	Indeks
	2	Indeks Infrastruktur Kota	0,600	0,606**	0,626	0,678	0,734	0,793	0,854	0,854	Indeks
C.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
	Layanan Urusan Wajib Dasar										
	1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**									
	1.1.	Indeks Pendidikan	76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77	Indeks
	2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**									
	2.1.	Angka Harapan Hidup	74,18	74,04 74,27*	74,36	74,44	74,53	74,62 76,15	74,70	74,70	Tahun
	2.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat	86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08% 96%*****	92,01%	92,01%	%
		2.2.1. Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08% 96,73%*****	92,01%	92,01%	%
	3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
	3.1.	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,748	0,754**	0,770	0,800	0,820	0,860	0,890	0,890	Indeks
	3.2.	Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894	Indeks
		3.2.1. Indeks Penataan Ruang	0,282	0,283**	0,285	0,286	0,288	0,292	0,294	0,294	Indeks
	4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**									
	4.1.	Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894	Indeks
		4.1.1. Indeks Keciptakaryaan	0,035	0,038**	0,070	0,170	0,270	0,370	0,500	0,500	Indeks

5	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**										
5.1.	Indeks Penanggulangan Bencana		0,732	0,765**	0,792	0,828	0,864	0,899	0,935	0,935	Indeks
5.2.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota		0,81	0,85**	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,90	Indeks
	5.2.1.	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	65,68%	74,20%**	76,39%	78,58%	80,77%	82,96%	85,15%	85,15%	%
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**										
6.1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan		0,87	0,87**	0,85	0,83	0,81	0,79 0,69*****	0,77	0,77	Indeks
6.2.	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk		2,46%	2,41%**	2,35%	2,28%	2,22%	2,16%	2,10%	2,10%	%
Layanan Urusan Wajib Non Dasar											
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**										
1.1.	Persentase tenaga kerja yang terserap		20,28%	20,71%**	21,14%	21,57%	22,01%	22,45% 22,67%	22,83%	22,83%	%
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
2.1.	Indeks Pembangunan Gender		93,58	93,70	93,73	93,74	93,75	93,77	93,78	93,78	Indeks
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**										
3.1.	Skor Pola Pangan Harapan		96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50	Skor
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**										
4.1.	Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan		0,329	0,338**	0,379	0,503	0,625	0,751	0,894	0,894	Indeks
	4.1.1.	Indeks Pertanahan	0,012	0,018**	0,024	0,047	0,067	0,089	0,100	0,100	Indeks

5	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**										
5.1.	Indeks Kualitas Air		56,05	56,06	56,07	56,08	56,09	56,10	56,11	56,11	Indeks
5.2.	Indeks Kualitas Udara		90,31	90,31	90,32	90,33	90,34	90,35	90,36	90,36	Indeks
5.3.	Indeks Kualitas Lahan		42,63	42,63	42,66	42,69	42,72	42,75	42,78	42,78	Indeks
5.4.	Indeks Persampahan		75,84	75,90	76,95	77,54	78,13	78,71	79,29	79,29	Indeks
5.5.	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan		39,49	42,97**	47,97	56,46	64,94	73,43	81,91	81,91	Indeks
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
6.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat		86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08% 96%*****	92,01%	92,01%	%
	6.1.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08% 96,73%*****	92,01%	92,01%	%
7	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										
7.1.	Angka Harapan Hidup		74,18	74,04 74,27*	74,36	74,44	74,53	74,62 76,15	74,70	74,70	Tahun
	7.1.1.	Indeks Bangga Kencana	61,23%	63,14%**	65,05%	66,96%	68,87%	70,78%	72,69%	72,69%	%
8	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**										
8.1.	Indeks Penyelenggaraan Transportasi		0,673	0,676**	0,680	0,690	0,728	0,745	0,768	0,768	Indeks
9	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**										
9.1.	Indeks Sistem Pemerintahan		3,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4 (Baik)	3,5	3,5	Indeks

	Berbasis Elektronik		(Baik)	(Baik)**	(Baik)	(Baik)	(Baik)	4,82 *****	(Sangat Baik)	(Sangat Baik)	
10	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**										
10.1.	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro		0,00%	0,24%**	8,30%	16,60%	24,90%	33,20%	41,50%	41,50%	%
11	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**										
11.1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah		2,71%	4,25%**	4,60%	5,50%	6,30%	6,90%	7,40%	7,40%	%
11.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat		86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08% 96%*****	92,01%	92,01%	%
	11.2.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08% 96,73%*****	92,01%	92,01%	%
12	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**										
12.1.	Indeks Pendidikan		76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77	Indeks
	12.1.1.	Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan	0,69	0,70**	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,82	Indeks
13	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**										
13.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik) 4,82*****	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)	Indeks
	13.1.1.	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100,00 %	100,00%**	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	%

14	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**										
14.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,0 (Baik)	3,0 (Baik)**	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik) 4,82*****	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)	Indeks
	14.1.1.	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100,00 %	100,00%**	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	%
15	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**										
15.1.	Indeks Budaya Lokal		88,56	81,50 88,60*	88,90	89,30	89,70	90,10	90,50	90,50	Indeks
16	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**										
16.1.	Indeks Pendidikan		76,08	80,16 76,89*	77,70	78,52	79,33	80,14	81,77	81,77	Indeks
	16.1.1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	67,40	67,90**	68,40	68,90	69,40	69,90	70,40	70,40	Nilai
17	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**										
	17.1.1.	Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	0,00%	61,54%**	69,23%	76,92%	84,62%	92,31%	100,00 %	100,00 %	%
Layanan Urusan Pilihan											
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**										
1.1.	Persentase pertumbuhan PDRB		-10,87%	4,40%**	4,87%	5,18%	5,37%	5,87%	6,51%	6,51%	%

	kategori penyediaan akomodasi dan makan minum										
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**										
2.1.	Skor Pola Pangan Harapan		96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50	Skor
	2.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	0,00%	5,00%**	10,00%	16,00%	22,00%	28,00%	34,00%	34,00%	%
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**										
3.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		-8,57%	3,30%**	3,65%	3,86%	4,01%	4,12% 5,50%	4,58%	4,58%	%
3.2.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan		-1,15%	3,50%**	3,61%	3,70%	3,96%	3,81%	4,10%	4,10%	%
3.3.	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak		5,23%	5,23%**	5,24%	5,25%	5,26%	5,27%	5,28%	5,28%	%
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**										
4.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan		-1,15%	3,50%**	3,61%	3,70%	3,96%	3,81%	4,10%	4,10%	%
	4.1.1.	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	70,00%	73,00%**	75,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	80,00%	%
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**										
5.1.	Skor Pola Pangan Harapan		96,25	92,00*	93,00	94,00	95,20	95,35	95,50	95,50	Skor
	5.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	1,90%	2,00%**	2,50%	5,10%	8,20%	12,00%	16,00%	16,00%	%

Penunjang Urusan											
1	**Perencanaan**										
1.1.	Nilai SAKIP		75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07 90,2 (AA)	86,12	86,12	Nilai
	1.1.1.	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	21,68	22,00**	23,62	23,93	24,23	24,53	24,84	24,84	Nilai
2	**Keuangan**										
2.1.	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai
	2.1.1.	Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	91,13%	88,03%**	90,87%	88,88%	89,50%	89,92%	90,35%	90,35%	%
3	**Kepegawaian**										
	3.1.1.	Indeks Kualitas Pegawai	76,69%	78,69%**	79,20%	79,64%	80,24%	81,03%	81,73%	81,73%	%
4	**Pendidikan dan Pelatihan**										
	4.1.1.	Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	68,90%	75,38%**	76,38%	77,14%	78,28%	79,52%	80,30%	80,30%	%
5	**Penelitian dan pengembangan**										
5.1.	Nilai SAKIP		75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07 90,2 (AA)	86,12	86,12	Nilai
	5.1.1.	Nilai Indeks Inovasi Daerah	52,90	54,00**	55,00	58,00	61,00	64,00 65*****	67,00	67,00	Indeks

6	**Sekretariat Daerah**										
6.1.	Nilai SAKIP		75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07 90,2 (AA)	86,12	86,12	Nilai
7	**Sekretariat DPRD**										
	7.1.1.	Persentase pelaksanaan fungsi DPRD	100,00 %	100,00%**	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	%
8	**Inspektorat Daerah**										
	8.1.1.	Indeks kualitas pengawasan	76,89	78,19	79,23	81,60	83,55	85,93	87,88	87,88	Indeks
9	**Kesatuan Bangsa dan Politik**										
9.1.	Indeks Kepedulian Sosial		89,00	89,00**	89,10	89,20	89,30	89,40	89,50	89,50	Indeks
9.2.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota		0,81	0,85**	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,90	Indeks
	9.2.1.	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	95,35%	95,43%**	95,51%	95,59%	95,67%	95,75%	95,83%	95,83%	%
10	**Kecamatan**										
10.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat		86,05%	88,31%	88,31%	89,23%	90,16%	91,08% 96%*****	92,01%	92,01%	%
	10.1.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	86,05%	88,31%**	88,31%	89,23%	90,16%	91,08% 96,73%*****	92,01%	92,01%	%

Keterangan :

1. Untuk IKLH memiliki kondisi awal = 66,99 dan target pada Tahun 2021-2026 adalah 66,99 ; 67,00 ; 67,02 ; 67,03 ; 67,05 ; 67,06 secara berturut-turut.
2. Skor Pola Pangan Harapan pada Tahun 2021 ditargetkan lebih kecil dibandingkan dengan kondisi awal dikarenakan turunnya daya beli masyarakat terhadap keberagaman kelompok pangan akibat Pandemi Covid-19.
3. Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup pada kondisi awal berada pada nilai 0 (nol) dikarenakan merupakan indikator baru yang belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya.
4. *) penyesuaian target pada Tahun 2021 dengan kondisi saat proses penyusunan.
5. **) merupakan indikator baru, kondisi awal pada Tahun 2020 dan target pada Tahun 2021 merupakan proyeksi.
6. ***) terdapat penyesuaian indikator pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2024
7. ****) berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi tahun 2023
8. *****) penyesuaian target pada RKPD 2025 dengan berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2023

BAB VII
PENUTUP

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2025 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

WALIKOTA SURABAYA

ERI CAHYADI